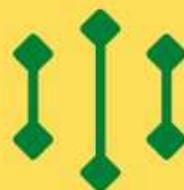




# Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2022

Tentang



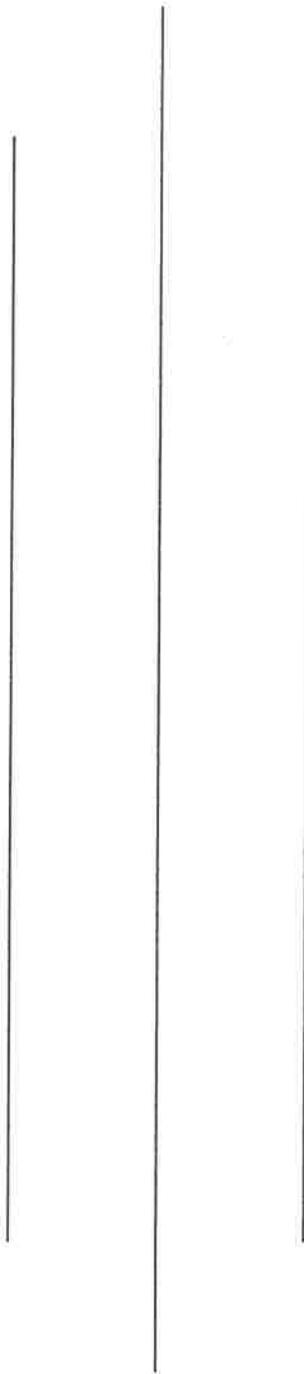
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )  
Tahun 2023

"Hari esok lebih baik dari hari ini"



**PERATURAN BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PASER TAHUN 2023**



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
2. Daerah adalah Kabupaten Paser.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
4. Rencana Kerja Pemerintahn Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Paser untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

## BAB II

### POKOK-POKOK PENYUSUNAN

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Paser dalam periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - BAB I : Pendahuluan;
  - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - BAB VII : Penutup.
- (3) Uraian Bab I sampai dengan Bab VII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, menjadi :

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Kabupaten Paser Tahun 2023.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 6 Juli 2022

**BUPATI PASER,**

ttd

**FAHMI FADLI**

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 6 Juli 2022

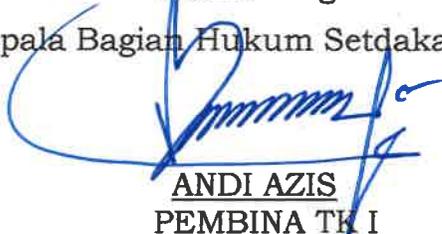
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,**

ttd

**KATSUL WIJAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setdakab Paser



**ANDI AZIS**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP 19680816 199803 1 007**



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Diagram</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Daftar Grafik</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	7
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	10
1.4 Maksud dan Tujuan .....	11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah .....	1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	20
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .....	47
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	151
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	156
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .....	238
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	238
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan..... Daerah .....	240
2.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan RKPD	243
2.4.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 .....	243
2.4.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 .....	243



### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	1
3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan, Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2023 .....	2
3.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	23
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	24
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	25
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	30
3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .....	35

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	3
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2023	10
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 .....	23
4.2.1 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk RKPD 2023 .....	48
4.2.2 Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang .....	50
4.3 Inovasi Pembangunan Daerah.....	50

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah .....	27
--	----

### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	1
---	---

### **BAB VII PENUTUP**

7.1 Penutup .....	1
-------------------	---



## Daftar Tabel

	Hal
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser.....	2
Tabel 2.2 Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Paser.....	4
Tabel 2.3 Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan Kabupaten Paser.....	6
Tabel 2.4 Jumlah sungai berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser.....	7
Tabel 2.5 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Paser 2019-2021 .....	10
Tabel 2.6 Luas Budidaya dan Produksi Tambak dan Kolam 2017-2021 .....	11
Tabel 2.7 Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Kab. Paser Tahun 2020-2021.....	12
Tabel 2.8 Produksi Perkebunan Rakyat 2020-2021 .....	12
Tabel 2.9 Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi.....	13
Tabel 2.10 Jenis dan daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser.....	15
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 .....	17
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 .....	17
Tabel 2.13 Kepadatan Penduduk Kabupaten Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021	19
Tabel 2.14 PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021 (Jutaan Rupiah) .....	21
Tabel 2.15 Kontribusi Masing-masing Sektor terhadap PDRB .....	22
Tabel 2.16 Perkembangan Inflasi Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	23
Tabel 2.17 PDRB Perkapita Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah).....	24
Tabel 2.18 Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Paser Tahun 2017-2021	25
Tabel 2.19 Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	28
Tabel 2.20 Tabel Indeks Gini Kabupaten Paser .....	29



Tabel 2.21	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, 2017-2021	31
Tabel 2.22	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	36
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	36
Tabel 2.24	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	37
Tabel 2.25	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	38
Tabel 2.26	Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 .	39
Tabel 2.27	Jumlah Angka Kematian Bayi.....	40
Tabel 2.28	Jumlah Angka Kematian Balita.....	41
Tabel 2.29	Jumlah Angka Kematian Ibu.....	41
Tabel 2.30	Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021	42
Tabel 2.31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021	44
Tabel 2.32	Banyaknya Permohonan dan Penyelesaian Tentang Pertanahan di Kabupaten Paser Tahun 2019-2021.....	45
Tabel 2.33	Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Paser Tahun 2017 -2021.....	46
Tabel 2.34	Jumlah Perkumpulan Kesenian, Jumlah Perkumpulan Olahraga, Jumlah Sarana Olahraga dan Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif di Kabupaten Paser Tahun 2021.....	46
Tabel 2.35	Indeks Kepuasan Masyarakat 12 Unit Layanan di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	48
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	50
Tabel 2.37	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Kabupaten Paser Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021.....	51
Tabel 2.38	Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu per Satuan Balita Di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	52



Tabel 2.39	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk Tahun 2017–2021 .....	53
Tabel 2.40	Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 penduduk Kabupaten Paser Tahun 2017–2021.....	54
Tabel 2.41	Ketersediaan Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas .....	55
Tabel 2.42	Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	56
Tabel 2.43	Kategori Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Paser Tahun 2016-2019	57
Tabel 2.44	Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2017-2021 .....	58
Tabel 2.45	Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Tahun 2017-2021 .....	59
Tabel 2.46	Panjang Jalan Negara Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Kalimantan Timur (km) Tahun 2021 .....	60
Tabel 2.47	Kondisi Jembatan Tiap Kecamatan Tahun 2021 di Kabupaten Paser ....	60
Tabel 2.48	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Non Teknis Tahun 2010-2021 ..... Kabupaten Paser.....	61
Tabel 2.49	Luas Sawah yang Terlayani Irigasi Jaringan Irigasi Teknis dan Non Teknis	62
Tabel 2.50	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser (ha) .....	62
Tabel 2.51	Data Debit Sungai Utama di Kabupaten Paser .....	63
Tabel 2.52	Tabel Usulan Sumber Air Baku Terpilih.....	64
Tabel 2.53	Pembagian Zonasi Pelayanan SPAM Kabupaten Paser.....	66
Tabel 2.54	Persentase Akses Air Minum Layak Kabupaten Paser Tahun 2017-2021	67
Tabel 2.55	Presentase Akses Air Minum Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Paser Tahun 2021 .....	68
Tabel 2.56	Jumlah Sambungan Rumah.....	69
Tabel 2.57	Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Minum di Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021 .....	71
Tabel 2.58	Presentase Akses Sanitasi Layak Kabupaten Paser Tahun 2017-2021...	72



Tabel 2.59	Presentase Akses Sanitasi Layak, Sanitasi Aman dan BABS Kabupaten Paser Tahun 2021.....	73
Tabel 2.60	Data Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021	74
Tabel 2.61	Data Infrastruktur Persampahan Terbangun.....	75
Tabel 2.62	Data armada angkutan sampah .....	76
Tabel 2.63	Drainase Perkotaan Kabupaten Paser sampah.....	78
Tabel 2.64	Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Paser.....	81
Tabel 2.65	Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tana Paser Tahun 2021.....	82
Tabel 2.66	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan di Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021.....	85
Tabel 2.67	Capaian Penanganan rumah tidak layak huni Tana Paser Tahun 2017-2021.....	86
Tabel 2.68	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat tinggal di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 .....	86
Tabel 2.69	Luasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Kabupaten Paser Tahun 2021	87
Tabel 2.70	Banyaknya Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Paser ..... 2017-2021.....	88
Tabel 2.71	Jumlah Anggota Linmas Terlatih di Kabupaten Paser 2021.....	89
Tabel 2.72	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tersedia	90
Tabel 2.73	Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2019-2021 .....	91
Tabel 2.74	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser .....	92
Tabel 2.75	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Paser Tahun 2017-2021	94
Tabel 2.76	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Paser Tahun 2017-2021	95
Tabel 2.77	Luas Produksi Padi dan Palawija (Ton) di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 .....	96



Tabel 2.78	Luas Panen, Produksi Padi dan Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2021 .....	96
Tabel 2.79	Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Per Hektar di Kabupaten Paser 2017-2021.....	97
Tabel 2.80	Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Paser Berupa Tanah Tahun 2017-2021.....	98
Tabel 2.81	Jumlah Bangunan ber-IMB Tahun 2017-2021.....	99
Tabel 2.82	Kondisi Penyelesaian Produk Rencana Tata Ruang Kabupaten Paser s.d Tahun 2021.....	101
Tabel 2.83	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Paser s.d Tahun 2021.....	102
Tabel 2.84	Indeks Kualitas Air di Kabupaten Paser .....	103
Tabel 2.85	Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Paser .....	104
Tabel 2.86	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Km2) di Kabupaten Paser .....	104
Tabel 2.87	Data Emisi Rumah Kaca .....	105
Tabel 2.88	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Paser s.d Tahun 2021.....	106
Tabel 2.89	Rekapitulasi Bencana di Kabupaten Paser Tahun 2021 .....	107
Tabel 2.90	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2018-2021 .....	108
Tabel 2.91	Jumlah, Laju Pertumbuhan, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, Tahun 2021.....	108
Tabel 2.92	Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	110
Tabel 2.93	Jumlah Desa menurut Kategori di Kabupaten Paser, 2022.....	111
Tabel 2.94	Persentase Penduduk Perempuan Umur 10 Tahun Ke atas Menurut Status Perkawinan di Kab. Paser Tahun 2017-2021.....	112
Tabel 2.95	Capaian Kinerja Keluarga Berencana di Kabupaten Paser Tahun 2021.	113



Tabel 2.96 Panjang Jalan dengan Tingkat Kewenangan Pemerintah Kabupaten Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Paser (km), 2021 .....	114
Tabel 2.97 Jumlah Kendaraan Bermotor (Umum dan Pribadi) .....	115
Tabel 2.98 Jumlah Armada dan Panjang Trayek Tahun 2021 .....	116
Tabel 2.99 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Realisasi .....	117
Tabel 2.100 Jumlah Kejadian Kecelakaan .....	117
Tabel 2.101 Jumlah Rambu Lalu lintas, Eksisting, Panjang Marka dan kondisinya ....	118
Tabel 2.102 Banyaknya Barang Bongkar dan Muat di Pelabuhan Kabupaten Paser (Ton/M3) .....	119
Tabel 2.103 Jenis Surat Kabar yang Beredar di Kabupaten Paser Tahun 2017- 2021	121
Tabel 2.104 Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah UMKM di Kabupaten Paser 2017- 2021 .....	123
Tabel 2.105 Jumlah Investor 2017-2021 .....	124
Tabel 2.106 Jumlah Nilai Investasi 2017-2021 .....	125
Tabel 2.107 Perkembangan Kegiatan Kepemudaan, 2018-2021 .....	125
Tabel 2.108 Perkembangan Bidang Olah Raga di Kabupaten Paser, 2017-2021 .....	126
Tabel 2.109 Dokumen Statistik di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 .....	126
Tabel 2.110 Kinerja Persandian Kabupaten Paser .....	127
Tabel 2.111 Data Kesenian dan Budaya di Kabupaten Paser, 2021 .....	128
Tabel 2.112 Jumlah Perpustakaan, Jumlah Pengunjung dan Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 .....	129
Tabel 2.113 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2017-2021 .....	130
Tabel 2.114 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2017-2021 .....	131
Tabel 2.115 Produktivitas Padi Per Hektar di Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021 .	131
Tabel 2.116 Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Paser 2017-2021 .....	132



Tabel 2.117 Luas Areal Perkebunan Kabupaten Paser Menurut Status, Tahun 2017-2021 ( Ha ).....	133
Tabel 2.118 Luas Areal Perkebunan Kabupaten Paser Menurut Kondisi, Tahun 2017-2021 (Ha).....	134
Tabel 2.119 Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021 (Ton)	135
Tabel 2.120 Populasi Ternak Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021 .....	136
Tabel 2.121 Produksi Telur Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021 (butir).....	137
Tabel 2.122 Produksi Ternak yang Dipotong Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021 ..	137
Tabel 2.123 Produksi Perikanan Kabupaten Paser Menurut Jenis Produksi Tahun 2017-2021 (Ton) .....	138
Tabel 2.124 Luas Budidaya Tambak, Kolam, Keramba, Rumput Laut Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	139
Tabel 2.125 Luas Kebakaran Hutan, Rehabilitasi Lahan dan Kebun bibit (Ha) di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 .....	139
Tabel 2.126 Jumlah Pedagang dan Kelompok Pedagang di Kabupaten Paser Pada Tahun 2017-2021.....	139
Tabel 2.127 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 .....	141
Tabel 2.128 Perolehan Opini BPK, LPPD dan AKIP Kabupaten Paser .....	143
Tabel 2.129 Capaian Nilai Penilaian Birokrasi Kabupaten Paser .....	144
Tabel 2.130 Jumlah Pegawai Daerah Kabupaten Paser Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021.....	146
Tabel 2.131 Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2021 .....	146
Tabel 2.132 Jumlah Sumber Daya Aparatur (PNS dan CPNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Jenis Kelamin di Tahun 2021 .....	149
Tabel 2.133 Penilaian Penyelenggaraan SPIP .....	150
Tabel 2.134 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (%) Tahun 2017-2021	152
Tabel 2.135 Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Tahun 2017-2021 .....	153



Tabel 2.136 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	154
Tabel 2.137 Angka Kriminalitas di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 .....	154
Tabel 2.138 Banyaknya Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser Tahun 2020 ...	155
Tabel 2.139 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 .....	157
Tabel 2.140 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser Tahun 2021 .....	185
Tabel 2.141 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Paser Tahun 2021 .....	187
Tabel 2.142 Daftar Desa Rawan Pangan Kabupaten Paser .....	238
Tabel 2.143 Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser .....	240
Tabel 3.1 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Paser Tahun 2017-2021	3
Tabel 3.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023 .....	2
Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Paser (miliar rupiah), 2017-2021 .....	4
Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 (Persen)	5
Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Paser (miliar rupiah), 2017-2021 .....	7
Tabel 3.5 PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021 (Milyaran Rupiah).....	8
Tabel 3.6 PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2021 (Milyaran Rupiah).....	10
Tabel 3.7 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, 2017-2021	14
Tabel 3.8 Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 .....	15
Tabel 3.9 Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 .....	18
Tabel 3.10 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023 .....	20



Tabel 3.11	Sasaran Ekonomi Makro Daerah .....	23
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Paser Tahun 2021 s.d Tahun 2023 .....	27
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 s.d Tahun 2023.....	31
Tabel 3.14	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Paser .....	33
Tabel 3.15	Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama dan Kabupaten Paser .....	33
Tabel 3.16	Alokasi Mandatori Spending menurut Urusan Pemerintah Daerah.....	34
Tabel 3.17	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 s.d 2023.....	36
Tabel 4.1	Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2023 .....	2
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .....	6
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2023.....	11
Tabel 4.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 .....	27
Tabel 4.5	Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Prioritas Kabupaten Paser Tahun 2023 dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Paser.....	40
Tabel 4.6	Persandingan Program Perangkat Daerah Kabupaten Paser dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) .....	42
Tabel 4.7	Sinkronisasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.....	47
Tabel 4.8	Sinkronisasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.....	48
Tabel 5.1	Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 .....	1
Tabel 5.2	Konsistensi Target Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan RPJMD Tahun Pelaksanaan .....	5



Tabel 5.3	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	27
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser.....	2
Tabel 6.2	Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.....	3



## Daftar Gambar

	<b>Hal</b>
Gambar I.1 Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan RKPD.....	6
Gambar I.2 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kabupaten Paser sampai dengan Penyusunan APBD .....	7
Gambar I.3 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan PD .....	11
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Paser .....	3
Gambar 4.1 Pola Hubungan Antara Fokus Utama Pembangunan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.....	5



## Daftar Diagram

	<b>Hal</b>
Diagram 2.1 Distribusi Penduduk di Kabupaten Paser Menurut Kecamatan Tahun 2021.....	18
Diagram 2.2 Jumlah Angka Kematian Balita.....	41
Diagram 2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Paser Tahun 2020.....	112
Diagram 2.4 Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2021.....	148



## Daftar Grafik

	<b>Hal</b>
Grafik 2.1 Rata-rata Curah Hujan per Tahun (mm) .....	9
Grafik 2.2 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Persen) Tahun 2021 .....	21
Grafik 2.3 PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Tahun 2021 .....	22
Grafik 2.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	26
Grafik 2.5 Analisis Relevansi Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	27
Grafik 2.6 Analisis Relevansi Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	27
Grafik 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021.....	30
Grafik 2.8 Perbandingan IPM Kabupaten Paser dengan Kabupaten di sekitarnya Tahun 2021.....	31
Grafik 2.9 Keberadaan Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2021 .....	33
Grafik 2.10 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	34
Grafik 2.11 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	34
Grafik 2.12 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	35
Grafik 2.13 Jumlah Perbandingan APM jenjang SD, SMP dan SMA Kabupaten Paser dengan Provinsi dan Nasional.....	38
Grafik 2.14 Jumlah Angka Kematian Bayi.....	40



Grafik 2.15	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Paser 2017-2021.....	47
Grafik 2.16	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	50
Grafik 2.17	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan di Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021.....	85
Grafik 2.18	Banyaknya Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Paser 2017-2021.....	88
Grafik 2.19	Perbandingan Perkembangan IPM Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021 .....	94
Grafik 2.20	Jumlah Bangunan ber-IMB Tahun 2017-2021 .....	100
Grafik 2.21	Indeks SPBE Kabupaten Paser .....	122
Grafik 2.22	Jumlah Investor 2017-2021 .....	124
Grafik 2.23	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2017-2021 .....	130
Grafik 2.24	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 .....	141
Grafik 2.25	Perkembangan Nilai AKIP Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 .....	145
Grafik 2.26	Jumlah Pegawai Daerah Kabupaten Paser Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021.....	146
Grafik 2.27	Jumlah Sumber Daya Aparatur (PNS dan CPNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	148
Grafik 3.1	PDRB Perkapita Kabupaten Paser .....	11
Grafik 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.....	12
Grafik 3.3	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2017-2021 .....	14
Grafik 3.4	Penduduk Miskin di Kabupaten Paser (%) .....	15
Grafik 3.5	Garis Kemiskinan Kabupaten Paser .....	16



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Kabupaten Paser, penjabaran pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Penyusunan RKPD 2023 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang Kabupaten Paser dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Paser berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Paser. Pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Praktek umum perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menempuh beberapa tahap berikut ini : 1) Secara



terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah sebelumnya; 2) Menentukan perkiraan-perkiraan potensi-potensi daerah dan prospek-prospek perkembangan terkait keadaan daerah dan masyarakat baik di lingkungan internal dan eksternal; 3) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan arahan perencanaan pada tahap di atasnya; dan 4) Menyusun konsep strategi pemecahan masalah melalui penentuan program dan kegiatan pembangunan.

Lebih lanjut RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemerintah Kabupaten Paser memberikan perhatian dan daya upaya optimal sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini berarti dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan serta memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Karakter RKPD yang berkualitas dimaknai dengan RKPD yang memenuhi kriteria antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sementara itu RKPD disusun melalui proses panjang dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD  
Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:
  - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD;
  - b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD  
Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.
  - a. Perumusan rancangan awal RKPD.  
Dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :
    - a) Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
    - b) Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
    - c) Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
    - d) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
    - e) Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;



- f) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j) Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

b. Penyajian rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a) Pendahuluan;
- b) Gambaran umum kondisi daerah;
- c) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- d) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e) Rencana kerja dan pendanaan daerah
- f) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g) Penutup.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi rancangan awal Renja seluruh perangkat daerah dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Verifikasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada setiap rancangan awal Renja seluruh perangkat daerah di Kabupaten Paser sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Paser.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya bertujuan untuk membahas rancangan RKPD. Musrenbang RKPD dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RKPD terdiri atas Musrenbang RKPD Kabupaten Paser dan Musrenbang RKPD di kecamatan. Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Paser dirumuskandalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang



menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Paser. Pembahasan Rancangan RKPD, dilaksanakan dalam rangka:

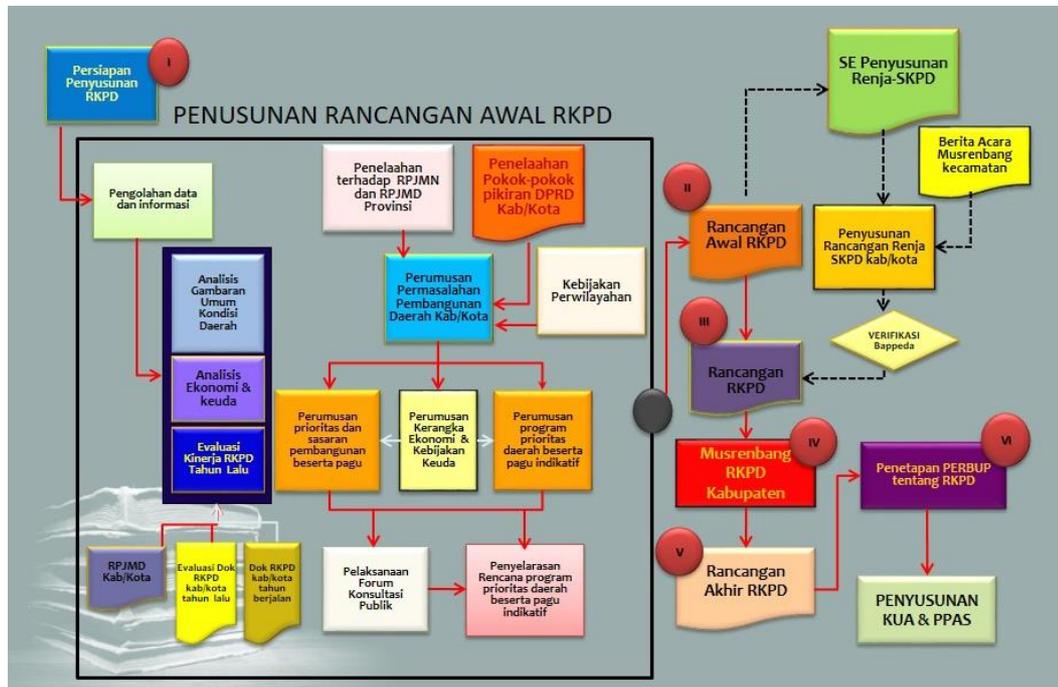
- a. Menyetujui permasalahan pembangunan Daerah;
  - b. Menyetujui prioritas pembangunan Daerah;
  - c. Menyetujui program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
  - d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
  - e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten Paser, dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.
5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Paser merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Paser menjadi rancangan akhir RKPD Kabupaten Paser berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Paser.

6. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

Secara umum, tata urutan dalam penyusunan RKPD disajikan dalam diagram alir di gambar 1.1 berikut ini :



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

**Gambar 1.1**

**Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan RKPD**

RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengaju pada RPJMN Berpedoman pada RPJMD dilakukan melalui penyalarsan :

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah Kabupaten Paser dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah Kabupaten Paser dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser.

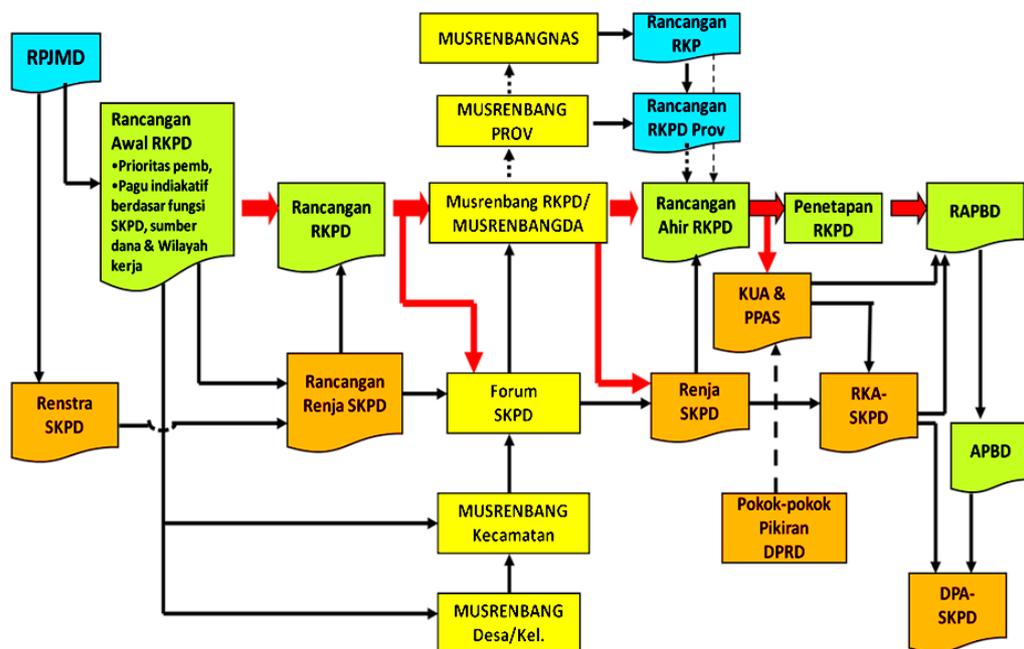
Penyalarsan program dan kegiatan pembangunan daerah ditingkat kabupaten dengan prioritas pembangunan daerah ditingkat provinsi dan prioritas pembangunan daerah ditingkat nasional dilakukan dengan pengacuan RKP pada RPJMN sesuai dengan tahapan yang terkait. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Diagram alir proses penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD disajikan dalam gambar 1.2 berikut ini :

**Gambar 1.2**

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kabupaten Paser sampai dengan Penyusunan APBD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

**Gambar 1.2**

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kabupaten Paser sampai dengan Penyusunan APBD

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang No. 17 Th. 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
23. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



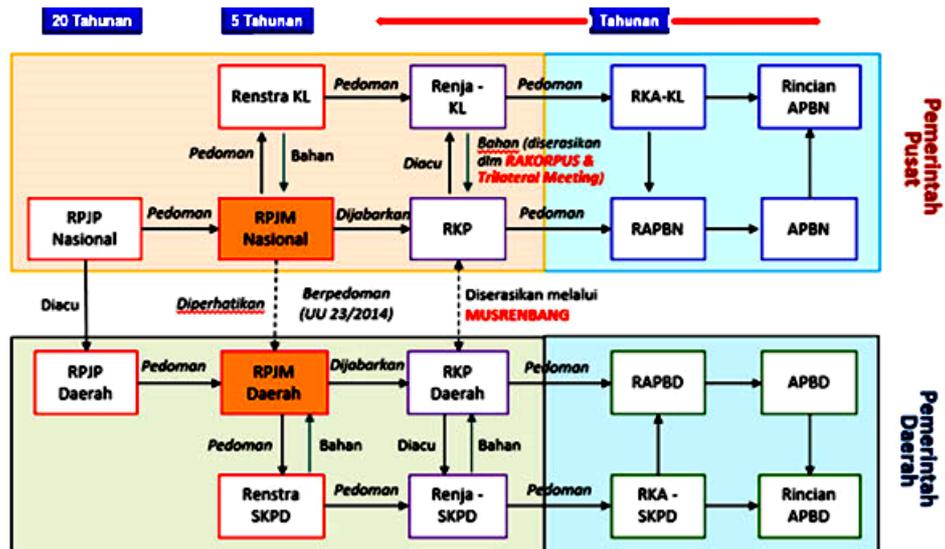
- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah dicabut;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  29. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
  31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036;
  32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035;
  35. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah



meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada gambar 1.3 berikut ini



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

**Gambar 1.3**

Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan PD

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Paser dan sinergitas program dan kegiatan di daerah.

Adapun tujuannya penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah Sebagai Berikut :

1. Sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Paser dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan;
2. Memberikan gambaran terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Paser;



3. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023;
4. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Tahun 2023.

### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Rancangan Kerja Pemerintah Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### 1. Bab I. Pendahuluan

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 2. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah

#### 3. Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### 4. Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat Tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2023.

#### 5. Bab V. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah (PD), indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

#### 6. Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

Memuat realisasi penyerapan anggaran dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun anggaran 2021.

#### 7. Bab VII. Penutup

Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2023.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran daerah yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah Kabupaten Paser.

##### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

###### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

###### 2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Paser secara geografis terletak pada  $0^{\circ}48'29,44''$ — $2^{\circ}37'24,21''$  Lintang Selatan dan  $115^{\circ}37'0,77''$ - $118^{\circ}1'19,82''$  Bujur Timur. Kabupaten Paser terletak di ujung paling selatan dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Kalimantan ini memiliki luas wilayah  $\pm 11.603,94$  Km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara
2. Sebelah Timur Laut : Berbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat)
4. Sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Kotabaru (Prov. Kalimantan Selatan)
5. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan)
6. Sebelah Barat Daya : Berbatasan dengan Kabupaten Balangan (Provinsi Kalimantan Selatan)
7. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan)



8. Sebelah Barat Laut : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah)

Selat Makassar yang berada di bagian timur Kabupaten Paser memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 Km ke arah utara ibukota Kabupaten (Kota Tana Paser).

Secara Administratif Kabupaten Paser terdiri dari 10 Kecamatan yang dibagi menjadi 139 Desa dan 5 Kelurahan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.1 dan Gambar 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser

No.	Kecamatan	Daratan (Km <sup>2</sup> )	Perairan (Km <sup>2</sup> )	Jumlah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Pasir Belengkong	836,62	153,49	990,11	8,53
2	Tanah Grogot	326,95	8,63	335,58	2,89
3	Batu Engau	1.501,61	5,65	1.507,26	12,99
4	Tanjung Harapan	480,40	233,65	714,05	6,15
5	Muara Samu	855,25	0,00	855,25	7,37
6	Kuaro	596,76	150,54	747,30	6,44
7	Batu Sopang	1.111,38	0,00	1.111,38	9,58
8	Muara Komam	1.753,40	0,00	1.753,40	15,11
9	Long Ikis	1.138,37	65,85	1.204,22	10,38
10	Long Kali	2.250,44	134,95	2.385,39	20,56
<b>Jumlah</b>		<b>10.851,18</b>	<b>752,76</b>	<b>11.603,94</b>	<b>100,00</b>

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

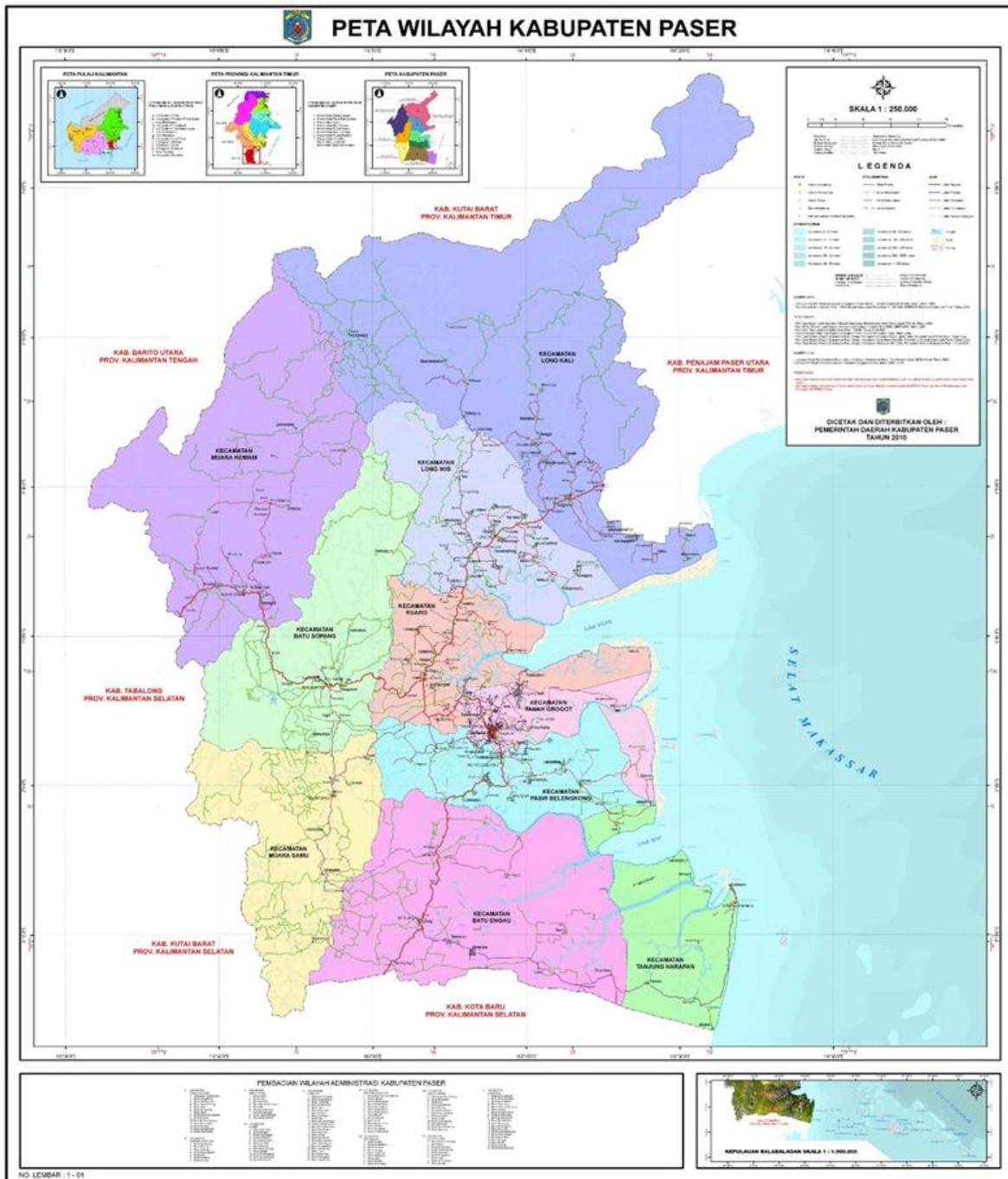
Berdasarkan data di atas kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Long Kali, yakni sekitar 2.385,39 Km<sup>2</sup> atau 20,56% dari luas Kabupaten Paser, sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, yaitu sekitar 335,58 Km<sup>2</sup> atau 2,89% dari luas total Kabupaten Paser. Hampir sepertiga lebih lautan



**Pemerintah Kabupaten Paser**

berada di Tanjung Harapan, kecamatan yang terletak paling selatan Kabupaten Paser. Secara geografis, Kabupaten Paser sangat diuntungkan karena memiliki karakteristik wilayah daratan dan lautan. Luas wilayah laut sekitar 6,5% dari daratan, tetapi terhubung langsung dengan selat makassar yang strategis untuk perhubungan kawasan timur Indonesia.

**Gambar 2.1**  
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Paser





### 2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

#### A. Posisi Astronomis

Posisi astronomis Kabupaten Paser adalah  $0^{\circ}48'29,44''$ — $2^{\circ}37'24,21''$  Lintang Selatan (LS) dan  $115^{\circ}37'0,77''$ - $118^{\circ}1'19,82''$  Bujur Timur (BT).

#### B. Posisi Geostrategi

Kabupaten Paser secara geostrategis dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Jarak terjauh antar ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten yakni sejauh 86 km yang kurang lebih dapat memakan waktu empat atau lima jam dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**  
Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Paser

No	Ibu Kota Kabupaten ke Kota Kecamatan	Jarak (km)	Sarana yang dilalui
1	Tanah Grogot - Tanah Grogot	0	-
2	Tanah Grogot - Muser (Kec. Muara Samu)	60	Darat
3	Tanah Grogot - Batu Engau	55	Darat
4	Tanah Grogot - Tanjung Aru (Kec. Tanjung Harapan)	66/57	Laut/Darat
5	Tanah Grogot - Pasir Belengkong	5	Darat
6	Tanah Grogot - Kuaro	28	Darat
7	Tanah Grogot - Batu Sopang	58	Darat
8	Tanah Grogot - Long Ikis	60	Darat
9	Tanah Grogot - Muara Komam	86	Darat
10	Tanah Grogot - Long Kali	77	Darat

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Dari sisi jalur laut, Selat Makassar di bagian timur kawasan memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak



12 Km ke arah utara ibukota Kabupaten (Kota Tana Paser), sedangkan Kota Tana Paser berjarak lebih kurang 145 Km dari Kota Balikpapan, atau 260 Km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda).

### C. Kondisi Kawasan

Kondisi umum daerah Paser adalah dataran rendah berbukit dan kawasan pesisir di beberapa kecamatan. Lebih detail, kawasan Kabupaten Paser akan digambarkan dalam sub bab berikut yang meliputi kondisi topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi.

### D. Topografi

Dengan kontur wilayah pantai dan pegunungan, secara garis besar topografi Kabupaten Paser dibagi dalam dua wilayah :

- a. Wilayah **Timur** merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m diatas permukaan laut yang membentang dari utara sampai selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai dengan luas 967.100 Ha (69,52% dari Luas daratan). Dengan jalan negara Penajam-Kuaro dan Kerang Dayo sebagian batas topografi;
- b. Wilayah **Barat** merupakan daerah dataran tinggi dan bergelombang, berbukit dan bergunung berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas 424.100 Ha (30,48% dari luas daratan). Di wilayah ini terdapat beberapa puncak pegunungan seperti Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380 m, Gunung Lumut 1.233 m, Gunung Narujan atau Gunung Rambutan dan Gunung Halat.

Kondisi wilayah Kabupaten Paser memiliki variasi topografis. Wilayah dataran rendah berada di sebelah timur, berlokasi di wilayah pesisir. Terdapat beberapa lokasi yang memiliki dataran tinggi walaupun dari segi luasan kurang signifikan, yaitu di kawasan Muara Samu dan Batu Sopang. Pada bagian barat wilayah kabupaten, terdapat deretan pebukitan, dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, yang menjadi bagian dari Pegunungan Meratus, salah satu dari empat pegunungan utama di Kalimantan.

Keberagaman tersebut terefleksikan pada keragaman kelas kemiringan lereng. Pada wilayah pantai (Kecamatan Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro) dan pada sebagian dataran tinggi di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang,



dominasi kelas kemiringan lereng datar sangat jelas. Cakupan wilayah seperti ini memungkinkan dikembangkan pertanian pangan (semusim) tanpa pengeluaran modal yang signifikan. Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang dan Muara Samu merupakan wilayah yang memiliki dominasi kemiringan lereng terjal sehingga membatasi kegiatan perekonomian berbasis pertanian semusim, Dataran rendah pada kawasan timur Kabupaten Paser memiliki bentang lahan yang relatif berbeda. Dengan demikian, klasifikasi lereng di Kabupaten Paser dibagi menjadi 4 (empat) kategori kemiringan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan Kabupaten Paser

No.	Kemiringan lereng (%)	Kawasan
1	Lereng 0-2 %	Kecamatan Long Kali, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Kuaro yang terletak pada bagian pantai menghadap Selat Makasar
2	Lereng 2-15 %	Kecamatan Kuaro, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Tanah Grogot
3	Lereng < 40 %	Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Ikis
4	Lereng > 40 %	Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Muara Komam

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Wilayah Kecamatan Batu Engau juga didominasi oleh dataran aluvial, diikuti oleh dataran bergelombang dan hogback. Dataran aluvial juga ditemukan di Kecamatan Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis dan Long Kali, walaupun dalam luasan yang terbatas. Bentang lahan lain yang penting diperhatikan adalah dataran banjir. Kalimantan, termasuk di dalamnya Kabupaten Paser, memiliki curah hujan yang tinggi. Kombinasi tersebut penting diperhatikan dalam perencanaan wilayah, terutama pemanfaatan lahan untuk permukiman. Mengingat Long Kali merupakan salah satu sistem sungai yang terbesar di Kabupaten Paser, dataran banjir dijumpai mendominasi lingkungan sekitar Sungai Long Kali. Dataran banjir juga dijumpai di perbatasan



Kecamatan Tanah Grogot dan Pasir Belengkong. Bagian barat Kabupaten Paser didominasi oleh sistem pegunungan atau pebukitan struktural terutama di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang.

### E. Geologi

Secara eksploratif Kabupaten Paser terdiri dari beberapa jenis tanah:

- Tanah Aluvial/Gambut, Jenis tanah ini ditemukan di bagian timur, menyebar di daerah dataran rendah, landai dan bergelombang pada lembah-lembah aliran sungai dan pantai dengan luas  $\pm 182.250$  Ha;
- Tanah Podzolik Merah Kuning, jenis tanah ini terdapat dibagian barat, pada daerah-daerah bergelombang dan berbukit pada kiri dan kanan jalan poros Long Kali, Kuaro, menyebar ke Selatan di bagian Barat Kecamatan Pasir Belengkong dan Selatan Kecamatan Tanjung Harapan dengan Luas  $\pm 517.850$  ha;
- Tanah Campuran/Kompleks, yaitu Jenis tanah yang terdiri dari tanah Podzolik Coklat/Andosol  $\pm 32.750$ ha, Podzolik/Litosol  $\pm 74.000$ ha dan Organosol/Gambut  $\pm 56.000$  ha, Podsolik  $\pm 422.000$  ha dan Regosol/Gleysol/Mediteran  $108.400$  Ha yang menyebar di bagian barat dan Utara Kabupaten Paser.

### F. Hidrologi

Kawasan rawa banyak dijumpai pada Kecamatan Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali dan Pasir Belengkong. Hampir keseluruhan wilayah Kecamatan Tanjung Harapan didominasi oleh dataran aluvial yang dipengaruhi sedimen jaringan sungai.

#### a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Paser memiliki banyak sungai yang tersebar di seluruh kawasan. Berdasarkan data yang dihimpun, kondisi hidrologi di Kabupaten Paser dipengaruhi oleh keberadaan beberapa sungai besar yaitu dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

**Tabel. 2.4**  
Jumlah sungai berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Jumlah Sungai
1	Batu Sopang	6
2	Muara Samu	8



No	Kecamatan	Jumlah Sungai
3	Batu Engau	35
4	Tanjung Harapan	15
5	Pasir Belengkong	14
6	Tanah Grogot	12
7	Kuaro	41
8	Long Ikis	19
9	Muara Komam	17
10	Long Kali	17
<b>Jumlah</b>		<b>184</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser 2022

Adapun beberapa sungai yang cukup besar dan panjang tersebut antara lain Sungai Telake (430 Km) dan Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Apar Besar (95 Km) dan Sungai Kerang (190 Km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai tempat menangkap ikan dan sumber pengairan juga berfungsi sebagai sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman.

#### **b. Sungai, Danau dan Rawa**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Paser memiliki beberapa sungai yang cukup besar dan panjang, antara lain Sungai Telake (430 Km) dan Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Apar Besar (95 Km) dan Sungai Kerang (190 Km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai sumber irigasi juga digunakan oleh masyarakat untuk tempat menangkap ikan, dan sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kondisi sungai, danau dan rawa data ini penting untuk diketahui sebagai bahan untuk mempertimbangkan potensi pengembangan pertanian dan perkebunan.

#### **c. Debit Air**

Data debit air sungai berguna untuk mengetahui potensi sekaligus kemungkinan adanya ancaman dari sungai. Potensi itu antara lain, penggunaan debit air sungai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Sekaligus di sisi lain, kemungkinan

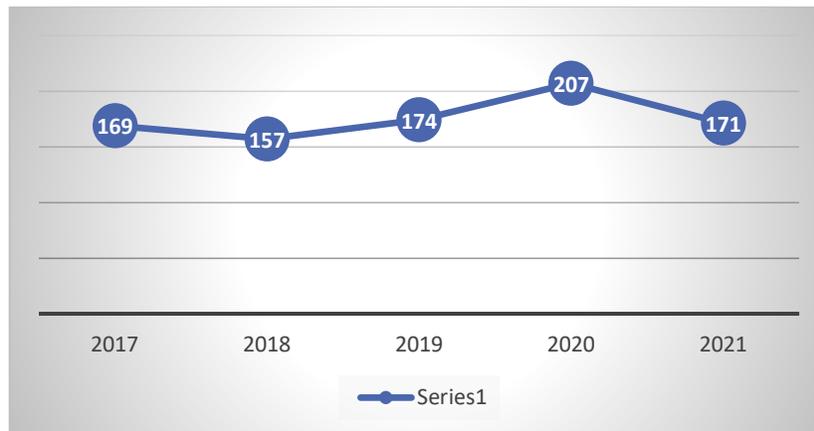


adanya ancaman antara lain berupa bencana banjir jika terdapat debit air sungai yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik.

## G. Klimatologi

Kabupaten Paser beriklim tropis basah, rata-rata curah hujan mencapai 175,6 mm per tahun. Didukung kondisi topografi yang beragam kondisi curah hujan berbeda disetiap daerah. Pada Tahun 2021, rata-rata curah hujan adalah 171 mm, angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2020 yakni 207 mm. Adapun pola curah hujan dalam lima tahun terakhir, rata-rata curah hujan cenderung berfluktuasi.

**Grafik 2.1**  
Rata-rata Curah Hujan per Tahun (mm)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Selain dapat menggambarkan karakter cuaca, curah hujan menentukan kekuatan sumber daya air daerah terutama kemampuan untuk mengelola sektor pertanian. Di kecamatan yang memiliki rata-rata curah hujan yang kurang dapat dicarikan alternatif saluran irigasi yang mampu menyuplai kebutuhan air bagi lahan pertanian.

## H. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Paser terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan non budidaya dan kawasan budidaya. Untuk kawasan non budidaya meliputi:

- Kawasan Lindung**, kawasan ini seluas 116.952 ha terdapat di Kecamatan Muara Komam bagian Barat, Timur dan Selatan, Long Kali bagian Timur, Batu Sopang bagian Barat dan Selatan, dan Long Ikis bagian Barat ;



- b. **Kawasan Sempadan Pantai**, kawasan ini sepanjang ± 191,93 km, ditetapkan di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Batas Sempadan dihitung ± 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan;
- c. **Kawasan Sempadan Sungai**, kawasan ini ditetapkan di sepanjang sungai ± 100 meter di kiri kanan sungai besar dan ± 50 meter dari kiri kanan anak sungai.

Sedangkan kawasan budidaya adalah areal penggunaan lahan yang dimanfaatkan secara produktif misalnya kawasan produksi hutan, kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Adapun Penggunaan lahan untuk budidaya sesuai potensi daerah adalah sebagai berikut:

a) **Kawasan Pertanian Tanaman Pangan**

Kawasan ini utamanya ditanami dengan padi sawah, padi ladang dan palawija. Keberadaan sawah irigasi tersebar di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong dan Tanah Grogot. Sedangkan tanaman padi ladang banyak ditemukan di Kecamatan Batu Engau, Muara Komam, Muara Samu, Long kali dan Batu Sopang. Tanaman pangan di Kabupaten Paser lebih didominasi komoditi padi, baik padi sawah maupun padi ladang. Disamping itu beberapa kecamatan juga mengembangkan tanaman palawija lainnya seperti, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.

**Tabel 2.5**  
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Paser 2019-2021

No.	Jenis Tanaman	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Padi Sawah	6.706	30.432,17	4,57	9.233	52.366	42,9	13.157	50.864,78	38,66
2	Padi Ladang	2.943	9.005,58	3,06	2.971	9.005,58	3,06	2.971	-	-
3	Jagung	1.138	6.461	5,67	1.063	6.569	61,92	944	5.825	61,71
4	Ubi Kayu	77	1.159	15,05	105	3.706	352,92	96	3.609,60	376
5	Ubi Jalar	25	352	14,08	22	383	173,94	26	449,80	173



No.	Jenis Tanaman	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
6	Kacang Tanah	42	56	1,33	59	83	14,12	58	82	14,14
7	Kacang Kedele	1	1	13	13	20	15,4	13	18,80	14,46
8	Kacang Hijau	7	7	1	16	14	8,5	14	12,50	8,93

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, 2022

### b) Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan tambak tersebar di sekitar kawasan sempadan pantai, tepatnya di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Tanah Grogot, Pasir Belengkong dan Tanjung Harapan. Kaitanya dengan penggunaan lahan perikanan adalah budidaya tambak dan kolam air.

**Tabel 2.6**

Luas Budidaya dan Produksi Tambak dan Kolam 2017-2021

Tahun	Tambak		Kolam	
	Luas Budidaya (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Budidaya (Ha)	Produksi (Ton)
2021	13.060	13.802,87	120,34	204,04
2020	15.940	12.073,24	120,00	203,14
2019	15.766	15.726,55	120,00	239,73
2018	15.766	12.689,90	120,00	210,60
2017	15.766	11.912,50	98,50	157,20

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Paser 2022

Berdasarkan data diatas terdapat fluktuasi luas budidaya tambak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 luas budidaya tambak sebesar 13.060 Ha, angka ini lebih kecil dibanding dengan tahun 2020 sebesar 15.940 Ha. Penurunan luas lahan budidaya tambak tersebut dikarenakan perubahan fungsi lahan menjadi lahan perkebunan sawit namun dari segi produksi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 12.073,24 dan pada tahun 2021 sebesar 13.802,87 ton atau sebesar 14,32% . Sedangkan luas kolam, secara umum tidak terdapat penambahan luas lahan yang cukup besar pada tahun 2021. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan produksi mencapai



204,04 ton dibanding dengan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 203,14 ton.

### c) Kawasan Perkebunan

Seluas ± 193.495,97 ha tersebar di Kecamatan Long Ikis, Long Kali, Tanjung Harapan, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Sopang, Muara Komam, Muara Samu, Batu Engau dan Kuaro.

**Tabel 2.7**  
Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Kab. Paser  
Tahun 2020-2021

Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)	
	2020	2021
Kelapa sawit	175.042,72	175.577,42
Karet	14.681,75	11.666,25
Kelapa dalam	2.698	2.301
Kopi	654,75	408,50
Lada	87	85,50
Kakao	76,50	48,50
Lainnya	125,25	52,50

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, 2022

Hingga saat ini kelapa sawit masih menjadi Komoditi perkebunan favorit di Kabupaten Paser bahkan mencapai 91 persen dari total areal perkebunan. Perkebunan kelapa sawit memang dikenal sebagian besar masyarakat memiliki daya tahan lebih baik dibandingkan kebun lainnya, seperti kebun karet. Terlebih, perawatan dan pemanenannya, jauh lebih mudah dan memberikan keuntungan hingga 25 tahun dalam satu siklusnya.

**Tabel 2.8**  
Produksi Perkebunan Rakyat 2020-2021

Jenis Tanaman	Luas Areal (ton)	
	Tahun 2020	Tahun 2021
Kelapa sawit	1.802.818.017	1.622.067.445



Jenis Tanaman	Luas Areal (ton)	
	Tahun 2020	Tahun 2021
Karet	9.232.540	9.242.958
Kelapa dalam	4.075.080	3.283.280
Kopi	110.099	Tidak tersedia
Lada	12.839	14.964
Kakao	2.915	2.015
Lainnya	159.383	85.483

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, 2022

Produksi Sawit pada tahun 2020 dan 2021 menurun disebabkan karena sebagian tanaman yang sudah tua dan mulai dilakukannya program replanting. Sedangkan untuk komoditas non sawit cenderung menurun atau hanya stagnan karena tidak banyak petani pekebun yang menanam. Sulitnya penjualan dan tidak stabilnya harga pasar salah satu penyebab kurangnya minat pekebun.

#### d) Penggunaan Lahan Sektor Kehutanan

Hutan sebagai paru-paru lingkungan menjadi wilayah suaka yang dilindungi sekaligus juga sebagian dimanfaatkan sebagai sumber produksi. Kawasan hutan lindung tersebar di daerah Gunung Beratus, Gunung Lumut, Sungai kendilo-Ketam, Hilir Sungai Rawang dan Sungai Samu.

**Tabel 2.9**  
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi

Fungsi Hutan	Luas Kawasan (Ha)	
	2017	2018
<b>Hutan Konservasi</b>		
i. Cagar Alam	102.361	102.361
ii. Taman Hutan Raya	3.995	3.445,37
<b>Kawasan Budidaya Kehutanan</b>		
i. Hutan Lindung	118.957	118.957
ii. Hutan Produksi Tetap	240.256	240.256
iii. Hutan Produksi Terbatas	180.036	180.036
iv. Hutan Produksi Yang dapat dikonversi (HPK)	9.698	9.698



Fungsi Hutan	Luas Kawasan (Ha)	
	2017	2018
<b>Kawasan Budidaya Non Kehutanan</b>		
i. Areal Penggunaan Lain	481.175	481.175

Sumber : Perda Kab. Paser No.9 Tahun 2015 tentang RTRW Kab. Paser tahun 2015-2035

- a) **Kawasan Hutan Produksi Tetap**, tersebar di Kecamatan Batu Sopang bagian Tengah, Muara Komam bagian Utara, Long Ikis bagian Utara dengan luas 240.256 ha;
- b) **Kawasan Hutan Produksi Terbatas**, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai daerah penyangga. Alokasi pemanfaatannya dipertahankan sesuai dengan fungsinya dimana eksploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam, kawasan memiliki luas 180.036 ha;
- c) **Kawasan Areal Penggunaan Lain**, yaitu kawasan yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan budidaya pertanian pada umumnya. Kawasan ini tersebar di 8 (delapan) kecamatan dengan luas 481.175 ha.
- e) **Penggunaan Lahan Sektor Pertambangan**

Kawasan pertambangan di Kabupaten Paser seluas 71.000,00 Ha, tersebar di Kecamatan Batu Sopang, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Kuaro, Long Ikis dan Batu Engau. Selain untuk kawasan pertambangan batu bara juga telah ditetapkan wilayah pertambangan rakyat untuk bahan galian emas dengan luas sekitar 4.958,57 ha, tersebar di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang.
- f) **Penggunaan Lahan Sektor Pariwisata**

Kawasan ini merupakan kawasan yang dianggap mempunyai daya tarik tinggi untuk dijadikan objek wisata. Kawasan ini bersifat fleksibel, maksudnya tidak terkait pada batas-batas administrasi ataupun batas lainnya, sehingga kawasan pengembangannya tidak harus didelineasi secara jelas seperti kawasan-kawasan tersebut di atas.



### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah ditujukan untuk memacu perkembangan sosial ekonomi serta mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Setidaknya pengembangan wilayah di Kabupaten Paser dapat mengakomodasi tiga komponen yakni terkait dengan aktivitas manusia, ruang beradaptasi serta sarana komunikasi dan transportasi.

Aktivitas manusia dikaitkan dengan kondisi demografis, barang material, energi. Dari segi konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Sarana penghubung dua provinsi tersebut adalah jalan nasional yang selalu dilewati sarana transportasi darat yang menghubungkan antara wilayah di Kalimantan.

Pada bagian timur Kabupaten Paser berhadapan langsung dengan selat Makasar, yang akan datang memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional apalagi dukungan prioritas kebijakan nasional terkait dengan peningkatan fungsi laut sebagai perwujudan semangat maritim.

### 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Perlindungan terhadap resiko bencana ditujukan untuk melindungi warga dan lingkungannya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh fenomena alam atau aktivitas manusia. Di wilayah Kabupaten Paser, terdapat beberapa identifikasi terkait dengan rawan bencana yakni bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang, angin topan, kebakaran, gempa dan kekeringan.

**Tabel 2.10**

Jenis dan daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser

No.	Rawan Bencana	Kecamatan Rawan Bencana
1	Banjir	Batu Sopang, Muara Samu, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Long Ikis dan long Kali
2	Tanah Longsor (gerakan tanah kerentanan tinggi)	Batu Sopang, Long Ikis dan Long Kali



No.	Rawan Bencana	Kecamatan Rawan Bencana
3	Gelombang Pasang	Kawasan yang berhadapan dengan laut
4	Kebakaran	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Sopang, Pasir Belengkong dan Batu Engau

Sumber : RTRW Kabupaten Paser 2012

#### 2.1.1.4 Demografi

Cakupan demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk merupakan tujuan bagi pembangunan itu sendiri. Itu sebabnya analisis kependudukan menentukan berbagai keputusan selama perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

##### 2.1.1.4.1 Jumlah Penduduk

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, juga terjadi di Kabupaten Paser yang tampak dalam berbagai fenomena kependudukan termasuk meningkatnya jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di beberapa titik strategis di Kabupaten Paser. Secara gradual, jumlah penduduk di Kabupaten Paser mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 1,73 persen. Hal tersebut memberi dasar dan gambaran yang semakin jelas, tentang meningkatnya kepadatan penduduk tiap tahunnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 274.452 jiwa dan bertambah menjadi 277.602 jiwa pada tahun 2021. Selama lima tahun terakhir dijelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (RJK) pada tahun 2021 adalah 108,65 artinya bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 109 orang penduduk laki-laki. Lebih lanjutnya dijelaskan pada tabel 2.11 dibawah ini.



**Tabel 2.11**  
Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)	RJK (%)
2017	132.538	121.965	254.503	2,61	108,67
2018	133.995	124.027	258.022	1,38	108,04
2019	151.533	134.361	285.894	2,11	112,78
2020	143.647	131.805	275.452	1,75	108,98
2021	144.555	133.047	277.602	0,78	108,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

#### 2.1.1.4.2 Struktur Penduduk

Sampai saat ini Kabupaten Paser memiliki karakteristik piramida penduduk melebar (Piramida muda) yang berarti kelompok balita dan remaja masih sangat besar. Gambaran dari karakteristik penduduk ini satu sisi menyimpan potensi usia produktif yang tinggi, disisi lain menanggung rasio ketergantungan (*dependency ratio*) usia tidak produktif yang tinggi pula.

**Tabel 2.12**  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur  
dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Tahun	Umur (Tahun)			Jumlah	RK
	0 - 14	15 - 64	65+		
2017	64.717	180.786	9.000	254.503	40,78
2018	65.793	182.958	9.571	258.022	41,19
2019	85.555	192.188	7.436	285.894	48,39
2020	70.304	193.314	11.834	275.452	42,49
2021	69.599	195.447	12.556	277.602	42,03

Sumber : Diolah dari Kabupaten Paser Dalam Angka 2022

Struktur penduduk penting untuk diketahui sebagai bahan untuk menentukan prioritas program dalam memaksimalkan penyediaan layanan dasar dan ketenagakerjaan. Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Paser memiliki penduduk usia sekolah dan usia



produktif yang tinggi. Dengan demikian, terdapat implikasi terhadap kebijakan penyediaan layanan pendidikan yang memadai sekaligus didukung penyediaan lapangan kerja di semua sektor.

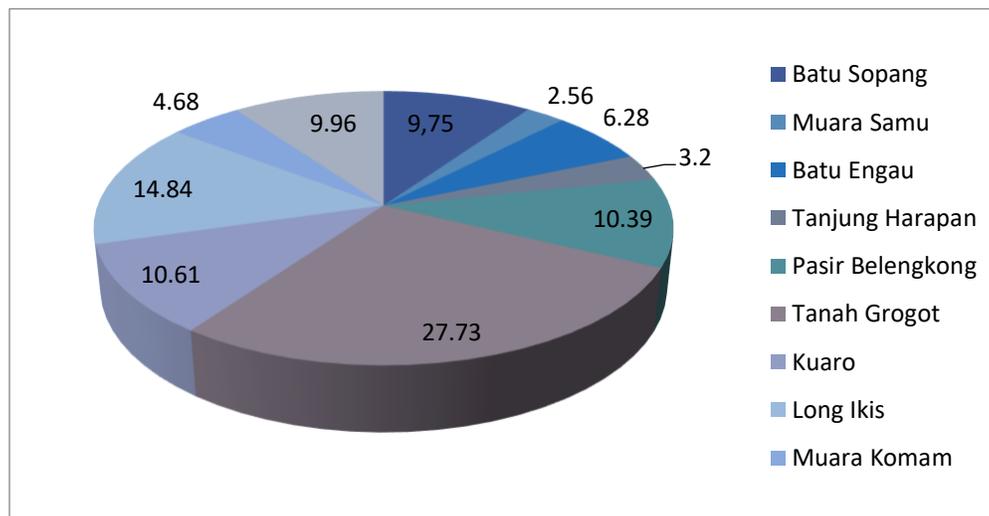
Dari sisi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) pada tahun 2020, 100 kelompok umur produktif (15-64 tahun) Kabupaten Paser menanggung kurang lebih 42,49 penduduk tidak produktif (0-14 dan 65+ Tahun). Sedangkan pada tahun 2021 terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk mengalami penurunan menjadi 42,03. Namun keseluruhan angka ketergantungan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir tersebut tetap wajib diperhatikan untuk memproyeksikan kemampuan penduduk produktif. Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah dengan percepatan jumlah penduduk yang tinggi harus diimbangi persiapan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan kemudian diikuti penyiapan lapangan kerja yang memadai.

#### 2.1.1.4.3 Distribusi Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Saat ini, distribusi penduduk di Kabupaten Paser masih belum merata. Hal tersebut dibuktikan dengan konsentrasi penduduk yang terpusat di Kecamatan Tanah Grogot sebanyak 27,73 Persen dari total jumlah penduduk. Padahal dilihat dari luas wilayah, Tanah Grogot merupakan daerah dengan luas daerah terkecil, sebagaimana dapat dilihat pada diagram 2.1 dibawah ini:

**Diagram 2.1**

Distribusi Penduduk di Kabupaten Paser Menurut Kecamatan Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Staistik Kabupaten Paser,, 2022



Seperti halnya pola pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara otomatis berpengaruh pada naiknya kepadatan penduduk di Kabupaten Paser secara umum. Pada tahun 2021, kepadatan secara gradual sebesar 23,74 penduduk tiap Km<sup>2</sup>. Paradoks ekstrim pada distribusi penduduk tersebut terlihat dengan padatnya penduduk di kawasan Ibu Kota Kabupaten Paser, yaitu Kecamatan Tanah Grogot yang mencapai 229,38 penduduk/Km<sup>2</sup> dibandingkan dengan Kecamatan Tanjung Harapan yang hanya memiliki kepadatan 12,40 penduduk/Km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.13**

Kepadatan Penduduk Kabupaten Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
1	Batu Sopang	1.111,38	27.059	24,35
2	Muara Samu	855,25	7.114	8,32
3	Batu Engau	714,05	17.423	11,56
4	Tanjung Harapan	1.507,26	8.886	12,44
5	Pasir Belengkong	990,11	28.852	29,14
6	Tanah Grogot	335,58	76.976	229,38
7	Kuaro	747,30	29.462	39,42
8	Long Ikis	1.204,22	41.196	34,21
9	Muara Komam	1.753,39	12.986	7,41
10	Longkali	2.385,39	27.648	11,59
<b>Jumlah</b>		<b>11.603,94</b>	<b>277.602</b>	<b>23,74</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah ketersediaan fasilitas publik, atau potensi wilayah yang dimiliki. Kondisi penyebaran ini tidak menguntungkan bagi pemerataan pembangunan daerah. Dengan adanya perbedaan kepadatan, maka pola penyebaran penduduk yang terjadi juga mengikuti pola penduduk yang mengelompok pada tempat-tempat tertentu. Penduduk banyak dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat daerah-daerah yang mempunyai aktifitas ekonomi yang relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi yang masih terbatas.



## **2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah penduduk miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan. Sementara itu pendekatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk melihat perkembangan pemerataan pembangunan digunakan indikator ketimpangan pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah.

#### **2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB**

Secara sederhana, PDRB menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Penghitungannya berasal dari jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto Daerah. PDRB merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa akhir suatu daerah yang dihasilkan dalam periode tertentu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan pertumbuhan dari nilai produksi barang-barang dan jasa yang dihasilkan dari satu tahun ketahun berikutnya, yang mengindikasikan kinerja perekonomian daerah dalam menciptakan output atau nilai tambah suatu barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan memperhitungkan pertumbuhan PDRB. Untuk mengukur pertumbuhan output riil, maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk menyesuaikan efek perubahan harga (inflasi). Secara umum Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) masyarakat di Kabupaten Paser mengalami peningkatan. Nilai nominal PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2021 menjadi 43,24 trilyun, turun sekitar 10,75 triliun dibanding tahun sebelumnya. Lebih lanjut dijelaskan pada tabel 2.14 dibawah ini.



**Tabel 2.14**

PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021 (Jutaan Rupiah)

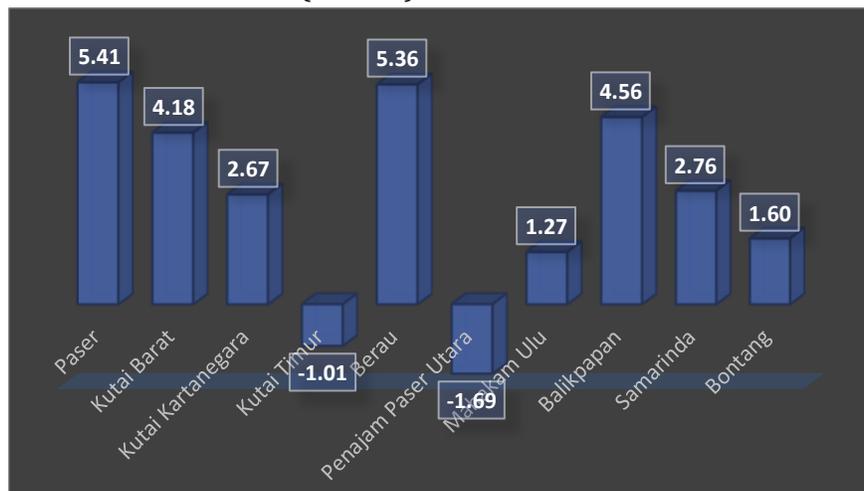
Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Total PDRB ADHB	Tanpa Kategori Pertambangan dan Penggalian	Total PDRB ADHK	Tanpa Kategori Pertambangan dan Penggalian
2017	43.954.254,84	11.831.022,31	33.137.650,69	8.876.525,62
2018	48.054.117,69	12.300.092,00	34.362.054,56	9.183.582,43
2019	48.025.891,19	15.688.213,90	35.734.748,73	9.464.908,90
2020*	43.238.165,66	14.030.145,39	34.711.818,19	9.593.589,41
2021**	53.995.918,57	13.144.456,81	36.588.972,34	9.647.303,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Namun seperti kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Paser terdapat pertambangan non migas (batubara) yang memiliki kontribusi sangat besar dalam pembentukan nilai PDRB, sehingga perlu kita lihat angka PDRB jika dihitung tanpa subsektor pertambangan batubara. Pada tahun 2021 angka PDRB ADHB Tanpa Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,14 triliun rupiah, sedangkan untuk PDRB ADHK memiliki nominal lebih kecil 9,64 triliun rupiah.

**Grafik 2.2**

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Persen) Tahun 2021

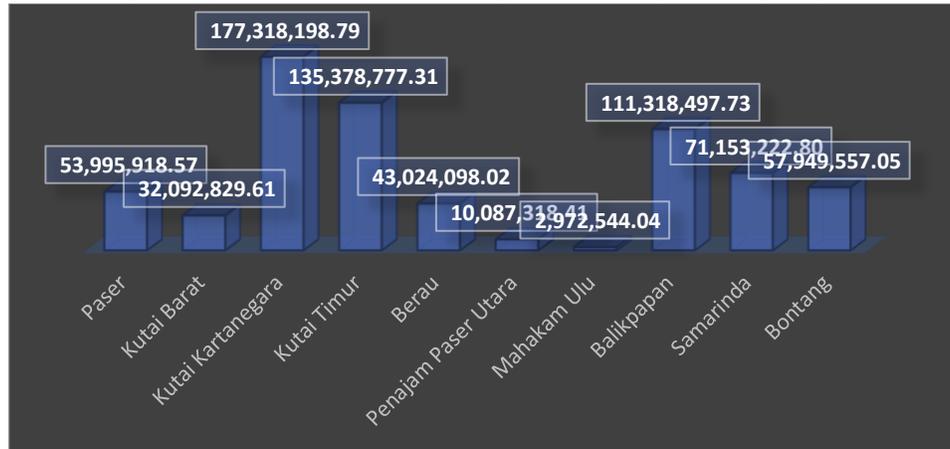


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2022



**Grafik 2.3**

PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Dalam struktur ekonomi Kabupaten Paser tahun 2021, peranan tertinggi masih dipegang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, dimana pada tahun 2021 sebesar 70,95 persen meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 67,55. Selanjutnya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berada pada urutan kedua dalam memberikan andil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser tahun 2021, yakni sebesar 12,02 persen yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 12,68. Industri Pengolahan menempati peringkat ketiga dengan kontribusi sebesar 5,28 persen di tahun 2021. Secara lebih detail, tingkat kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.15 dibawah ini :

**Tabel 2.15**  
Kontribusi Masing-masing Sektor terhadap PDRB

Lapangan Usaha / Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,29	10,20	10,56	12,68	12,02
B Pertambangan dan Penggalian	73,08	74,40	72,63	67,55	70,95
C Industri Pengolahan	4,92	4,49	4,69	5,86	5,28
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F Konstruksi	2,2	2,38	2,87	3,17	2,57
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,54	3,56	3,87	4,44	3,73



Lapangan Usaha / Industry		2017	2018	2019	2020*	2021**
H	Transportasi dan Pergudangan	0,44	0,44	0,47	0,53	0,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,28	0,30	0,33	0,28
J	Informasi dan Komunikasi	0,62	0,61	0,66	0,79	0,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,36	0,36	0,39	0,44	0,37
L	Real Estate	0,30	0,29	0,30	0,34	0,28
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,07	1,06	1,13	1,23	1,05
P	Jasa Pendidikan	1,18	1,21	1,35	1,62	1,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,41	0,42	0,46	0,65	0,60
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,22	0,22	0,23	0,26	0,21
<b>Produk Domestik Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser,, 2022

### 2.1.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli penduduk menurun.

Mengingat Kabupaten Paser belum melaksanakan perhitungan inflasi, maka untuk kebutuhan penyusunan dokumen ini, angka inflasi yang disajikan didekati dengan hasil perhitungan inflasi Kota Balikpapan. Tahun 2020, tingkat inflasi Kota Balikpapan sebesar 0,65% dan untuk Tahun 2021 angka inflasi adalah 2,28%.

**Tabel 2.16**  
Perkembangan Inflasi Kabupaten Paser  
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Tingkat Inflasi</b> (Menggunakan data Inflasi Kota Balikpapan)	2,45	3,13	1,88	0,65	2,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2022



### 2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB perkapita atau pendapatan perkapita menggambarkan besaran nilai PDRB per jiwa atau per satu orang di suatu wilayah. Namun demikian, nilai PDRB tersebut tidak serta merta mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena nilai PDRB tersebut hanyalah merupakan nilai bagi bruto antara total perhitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun suatu wilayah dengan tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang ada dalam proses pembentukannya.

Tahun 2021, nilai PDRB perkapita Kabupaten Paser diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2020, nilai PDRB perkapita Kabupaten Paser sebesar 157.19 juta rupiah, sedangkan tahun 2021 sebesar 194.50 juta rupiah.

Perkembangan nilai PDRB perkapita Kabupaten Paser secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut ini :

**Tabel 2.17**  
PDRB Perkapita Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)

LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.097,84	17.499,14	18.308,83	19.935,76	23.383,37
B	Pertambangan dan Penggalian	117.150,00	127.704,35	125.897,54	106.188,97	137.995,06
C	Industri Pengolahan	7.879,64	7.698,33	8.122,55	9.211,66	10.271,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	36,02	36,11	37,50	40,76	41,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,69	31,65	34,62	35,70	37,75
F	Konstruksi	3.519,83	4.086,61	4.982,86	4.990,58	4.992,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.667,67	6.108,91	6.713,79	6.980,35	7.263,07
H	Transportasi dan Pergudangan	702,16	754,02	806,37	828,80	881,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	441,91	477,09	520,38	523,20	550,72
J	Informasi dan Komunikasi	999,56	1.042,28	1.135,55	1.248,78	1.328,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	583,76	625,58	668,40	686,73	714,18
L	Real Estate	476,91	498,78	520,02	532,19	537,02



LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020	2021
M,N	Jasa Perusahaan	86,55	89,04	91,65	88,98	95,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.721,89	1.820,29	1.966,48	1.927,57	2.046,70
P	Jasa Pendidikan	1.886,52	2.071,33	2.332,73	2.554,14	2.789,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	659,26	717,18	797,36	1.017,39	1.165,47
R,S,T, U	Jasa lainnya	353,25	376,49	403,23	405,54	414,30
<b>PDRB Per Kapita</b>		<b>160.296,47</b>	<b>171.637,17</b>	<b>173.339,87</b>	<b>157.197,11</b>	<b>194.508,39</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

#### 2.1.2.1.4 Angka Kemiskinan

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Dalam SDGs dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Kabupaten Paser.

**Tabel 2.18**

Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Tahun	Kondisi Kemiskinan				
	Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)
2017	25.300	9,28	433.823	1,32	0,27
2018	25.140	9,03	455.635	1,22	0,31
2019	25.445	8,95	477.440	1,57	0,40
2020	26,77	9,23	515.414	1.04	0,21
2021	27,56	9,73	527.659	1.37	0,32

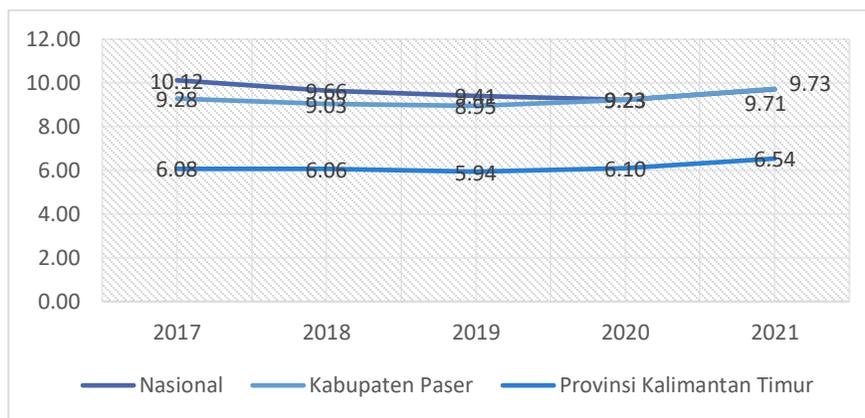
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022



Persentase penduduk miskin di Kabupaten Paser 2017 - 2021 cukup fluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 9,28 menurun menjadi 8,95 pada tahun 2019 lalu meningkat menjadi 9,23 lagi pada tahun 2020 , dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 9,73.

Jika dibandingkan dengan proporsi penduduk miskin di regional Kalimantan Timur, persentase penduduk miskin di Kabupaten Paser masih lebih tinggi dibandingkan proporsi penduduk miskin Kalimantan Timur dan lebih rendah dibandingkan dengan Nasional. Namun demikian perkembangan penurunan kemiskinan di Kabupaten Paser cenderung melambat dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

**Grafik 2.4**  
Perkembangan Tingkat Kemiskinan  
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional



Sumber: Badan Pusat statistik

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1). Indek P1 Kabupaten Paser pada tahun 2021 sebesar 1,37 dan tingkat keparahan kemiskinan (P2), sebesar 0,32. Persoalan penanggulangan kemiskinan selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sebaiknya harus bisa juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil P1 maka kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin rendah.



**Grafik 2.5**

**Analisis Relevansi Kedalaman Kemiskinan (P1)  
Kabupaten Paser Tahun 2017-2021**



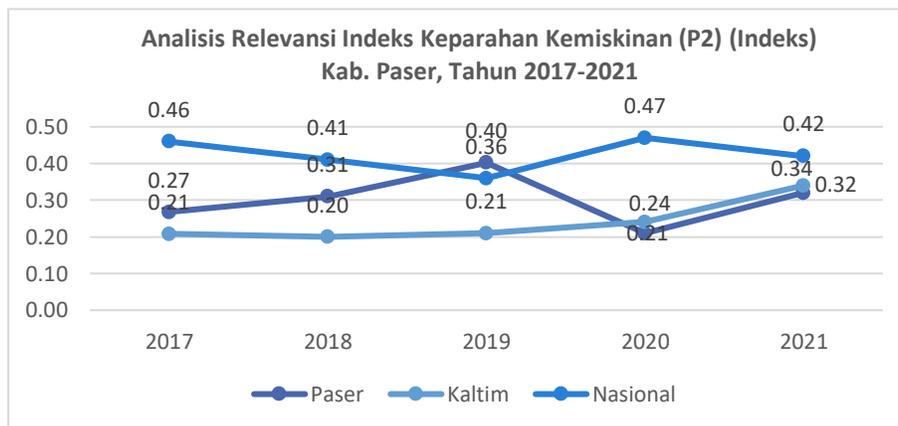
Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada grafik 2.5 terlihat bahwa posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang berada di bawah rata – rata Nasional dan di atas Provinsi Kalimantan Timur. Jika dilihat percepatan penurunan P1 Kabupaten Paser selama periode tahun 2017-2021 nampak lebih lambat dibandingkan nasional

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Grafik 2.6**

**Analisis Relevansi Keparahan Kemiskinan (P2)  
Kabupaten Paser Tahun 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik



Pada grafik 2.6 terlihat bahwa posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Paser berada di atas rata-rata provinsi dan di bawah rata-rata nasional. Namun kondisi perkembangan penurunan tingkat keparahan kemiskinan juga cenderung mengalami perlambatan sehingga hal ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Paser.

### 2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jumlah tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut ini.

**Tabel 2.19**  
Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser  
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja (Jiwa)	122.162	135.854	137.737	142.568	136.640
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)	62,15	66,84	66,17	67,88	65,35
Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)	5,54	4,84	4,38	4,52	5,70
Tingkat Kesempatan Kerja / TKK (%)	94,46	95	95,45	95,48	96,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Tabel 2.19 diatas menggambarkan bahwa Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Paser pada tahun 2021 sebesar 5,70%, angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,18% jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020, yaitu sebesar 4,52%. Hal ini disebabkan angkatan kerja semakin banyak/ bertambah tetapi lapangan usaha tetap bahkan dikarenakan kondisi pandemi menyebabkan lesunya dunia



usaha dan terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Paser antara lain yaitu :

- 1) Pengendalian Pertambahan penduduk
- 2) Memberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan dan berinvestasi di Kabupaten Paser
- 3) Meningkatkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kerja
- 4) Mendorong dan mengembangkan industri-industri berbasis pertanian

### 2.1.2.1.6 Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “indeks gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Secara umum Indeks Gini Kabupaten Paser memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak merata. Meskipun para ahli ekonomi menganggap “wajar” pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyat agar lebih memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.20**

Tabel Indeks Gini Kabupaten Paser

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Gini	0,277	0,299	0,262	0,290	0,288

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2022



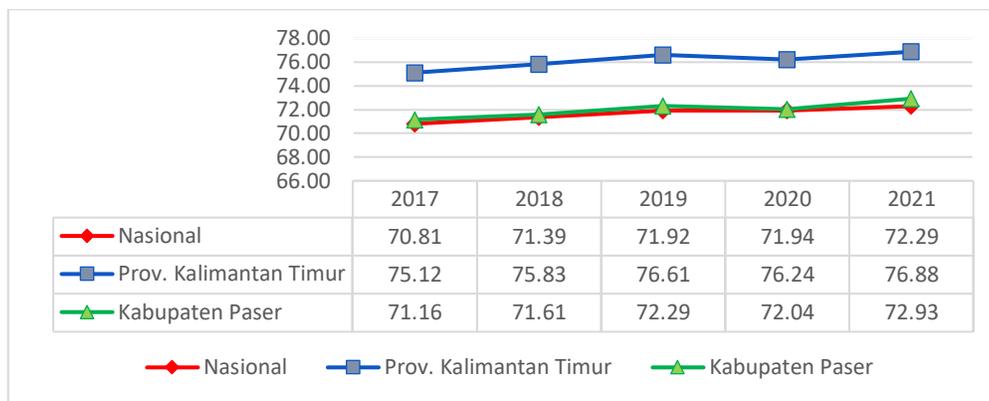
### 2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Isu pembangunan manusia merupakan isu sentral yang memiliki dimensi yang luas sehingga berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat untuk melihat pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah secara umum. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan instrumen untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia suatu wilayah karena dalam batas-batas tertentu IPM mewakili tujuan dari pembangunan manusia.

IPM yang memiliki komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dianggap mampu menggambarkan kualitas manusia atau tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Sehingga semakin tinggi nilai IPM maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan di suatu wilayah.

**Grafik 2.7**

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser mengalami trend perlambatan selama periode 2017-2021 yakni berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan Timur dan berada di atas IPM Nasional. pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2017.

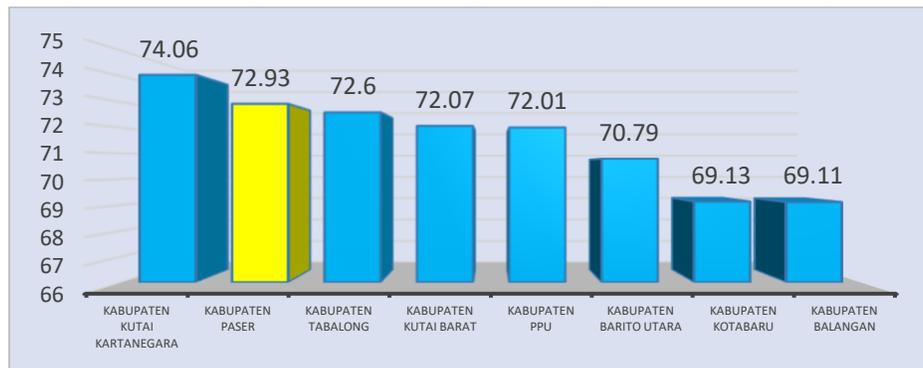
Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser mengalami trend perlambatan selama periode 2017-2021. IPM Kabupaten Paser berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan berada di atas IPM Nasional. IPM Kabupaten Paser meningkat dari 72,04 pada tahun 2020 menjadi 72,93 pada tahun 2021 . Sejalan dengan pertumbuhan IPM Provinsi dan Nasional.



Jika dibandingkan dengan daerah kabupaten di sekitarnya, capaian IPM Kabupaten Paser pada tahun 2021 lebih rendah dari Kabupaten Kutai Kartanegara (74,06) dan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten PPU, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Balangan. Perbandingan IPM Kabupaten Paser dengan Kabupaten yang berbatasan dengannya selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.8**

Perbandingan IPM Kabupaten Paser dengan Kabupaten di sekitarnya Tahun 2021



Sumber, Badan Pusat Statistik, 2022(diolah)

Selanjutnya, jika dilihat dari komponen pembentuk IPM selama periode 2020 - 2021, dimana pertumbuhan komponen angka harapan hidup tumbuh dari 72,62 pada tahun 2020 menjadi 72,88 pada tahun 2021, rata rata lama sekolah meningkat dari 8,55 pada tahun 2020 menjadi 8,79 pada tahun 2021, angka harapan lama sekolah dari 13,10 pada tahun 2020 menjadi 13,25 pada tahun 2021, serta pengeluaran per kapita meningkat dari Rp.10.344.000 pada tahun 2020 menjadi Rp.10.673.000 pada tahun 2021.

Perkembangan komponen pembentuk IPM 2017-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.21**

Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, 2017-2021

Komponen	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	72.05	72.28	72.52	72.62	72.88
Rata-Rata Lama Sekolah	8.20	8.22	8.54	8.55	8.79



Komponen	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Lama Sekolah	12.98	12.99	13.00	13.10	13.25
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	10.280	10.605	10.767	10.344	10.673
<b>IPM</b>	<b>71.16</b>	<b>71.61</b>	<b>72.29</b>	<b>72.04</b>	<b>72.93</b>

Sumber, Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Tabel 2.21 menunjukkan bahwa komponen indikator pembentukan IPM selama periode 2017 - 2021, dimana pertumbuhan seluruh komponen yakni angka harapan hidup tumbuh sebesar 26 poin di tahun 2021, rata rata lama sekolah hanya meningkat 24 poin, angka harapan lama sekolah sebesar 15 poin, serta pengeluaran per kapita sebesar 329 poin di tahun 2021. Sehingga secara keseluruhan nilai IPM tumbuh sebesar 0,92% pertahun.

Dari tabel di atas juga didapatkan informasi bahwa di antara empat indikator pembentukan IPM, indikator yang paling berpengaruh adalah pengeluaran per kapita rill sementara yang pengaruhnya paling rendah adalah rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Oleh karena itu program peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan dan peningkatan pendapatan per kapita harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Paser.

## 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.1.2.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan elemen penting perencanaan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan agar masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasannya. Dengan dasar pendidikan yang kuat, individu atau masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan dan mampu memberdayakan diri dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat hidup sejahtera.

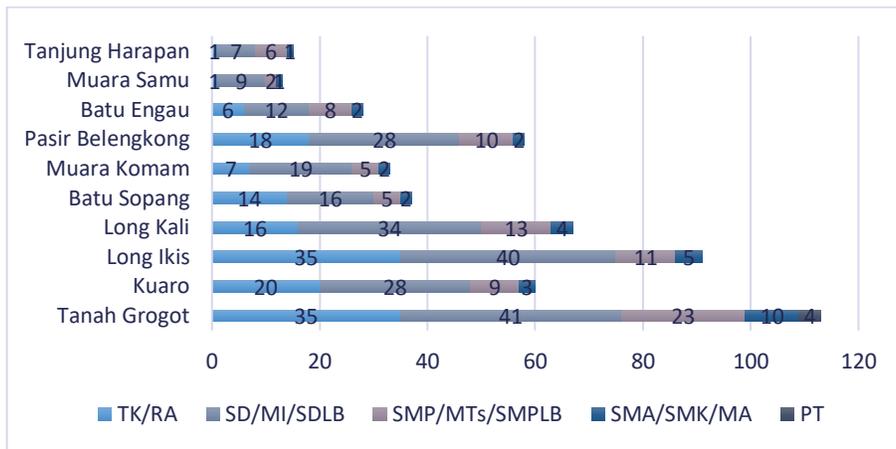
Pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Paser terkait dengan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari beberapa indikator pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kelulusan, angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja.



Kemajuan dunia pendidikan pada suatu wilayah tidak lepas dari campur tangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu wujud peran serta pemerintah dalam kemajuan dunia pendidikan adalah peningkatan jumlah sekolah dari tahun ke tahun.

Hingga tahun 2021, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Paser berdasarkan tingkat pendidikan adalah TK (Taman Kanak-Kanak) sebanyak 143 unit, RA (Raudatul Athfal) sebanyak 10 unit, SD (Sekolah Dasar) 221 unit, MI (Madrasah Ibtidaiyah) sebanyak 13 unit, SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 76 unit, MTs (Madrasah Tsanawiyah) sebanyak 17 unit, SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 17 unit, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) sebanyak 12 unit, MA (Madrasah Aliyah) sebanyak 12 unit, dan Perguruan Tinggi sebanyak 4 unit.

**Grafik 2.9**  
Keberadaan Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2021



Sumber, Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser 2022

### A. Angka Melek Huruf

Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, indikator angka melek huruf juga menjadi dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya terkait pengembangan pembelajaran berkelanjutan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, serta penggalian potensi.

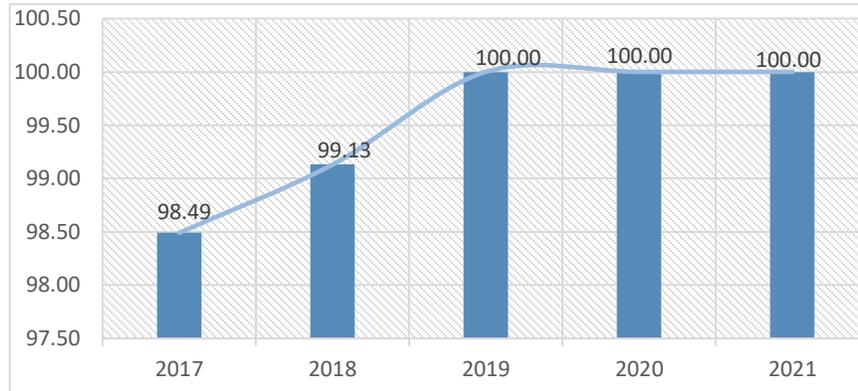
Angka melek huruf di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2017–2021 menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Tahun 2017 capaian angka melek



huruf Kabupaten Paser tercatat sebesar 98,49% kemudian berturut-turut meningkat menjadi 99,13% ditahun 2018, dan menjadi 100% di tahun 2019-2021. Berikut adalah perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 :

**Grafik 2.10**

Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021



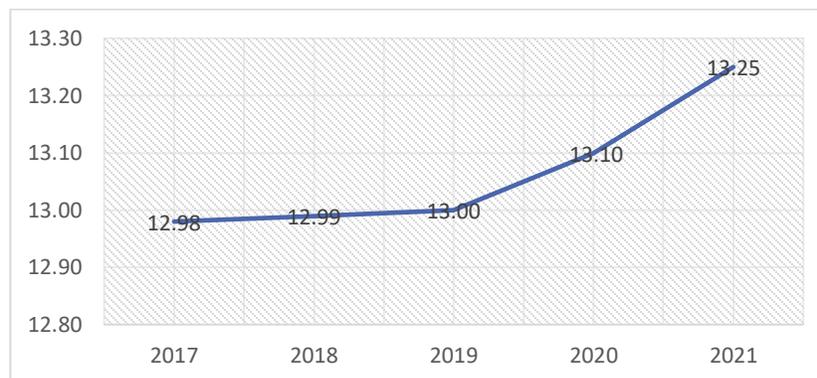
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, 2022

## B. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. AHLIS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak diukur melalui Angka Harapan Lama Sekolah (AHLIS).

**Grafik 2.11**

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021



Sumber, Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

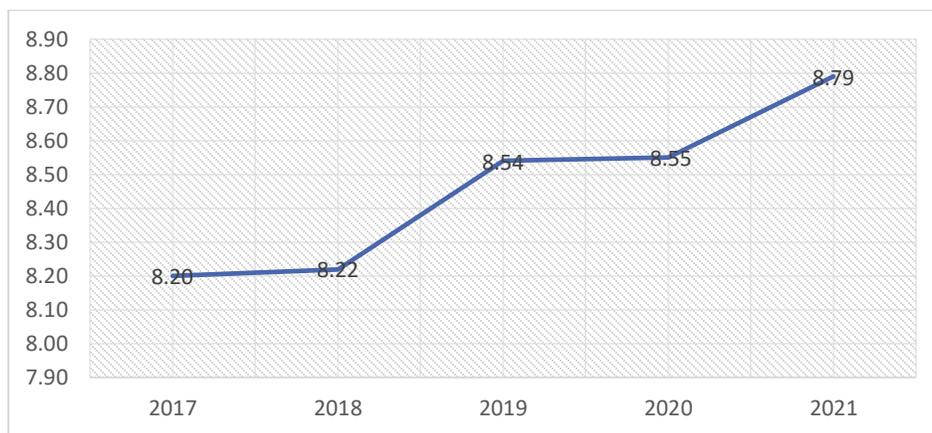


Grafik 2.11 tersebut menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Paser terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Paser sebesar 13,25 yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Paser rata-rata memiliki harapan untuk bersekolah selama 13,25 tahun semenjak dilahirkan. Pencapaian angka rata-rata harapan lama sekolah Kabupaten Paser hingga tahun 2021 sudah di atas wajib belajar 9 tahun.

### C. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Paser ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Paser semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berikut adalah perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Paser Tahun 2017-2021.

**Grafik 2.12**  
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah  
Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Grafik 2.9 tersebut menunjukkan bahwa perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2017 - 2021 Kabupaten Paser memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,07% per tahun. Pencapaian angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Paser hingga tahun 2021 yaitu 8,79 tahun masih dibawah wajib belajar 9 tahun.



**Tabel 2.22**  
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Paser  
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas</b>	8.20	8.22	8.54	8.55	8.79

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun harus terus menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Paser ke depannya melalui program peningkatan wajib belajar 9 tahun.

#### D. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK Kabupaten Paser tahun 2017-2021 dapat dilihat dari tabel 2.23 dibawah ini :

**Tabel 2.23**  
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

No.	Angka Partisipasi Kasar	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD/MI	111,26	105,23	110,33	110,33	107,15
2.	SMP/MTSn	89,42	93,04	96,52	96,52	96,06

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Paser, 2022

Dari tabel di atas, Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI pada tahun 2021 yakni 107,15%. Nilai APK masih lebih dari 100% hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat murid yang berusia di luar usia sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. APK tingkat SMP/MTSn pada tahun 2020 adalah 96,52%



sedangkan pada tahun 2021 adalah 96,06%, hal ini menunjukkan tidak ada nya kenaikan.

**E. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan sekolah tersebut. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Paser berikut disajikan dalam tabel 2.24.

**Tabel 2.24**  
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

No.	Angka Partisipasi Murni	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD/MI	97,19	97,58	97,64	97,87	97,78
2.	SMP/MTSn	78,40	78,84	79,40	81,58	80,96
3	SMA	60,37	60,67	60,84	61,87	61,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

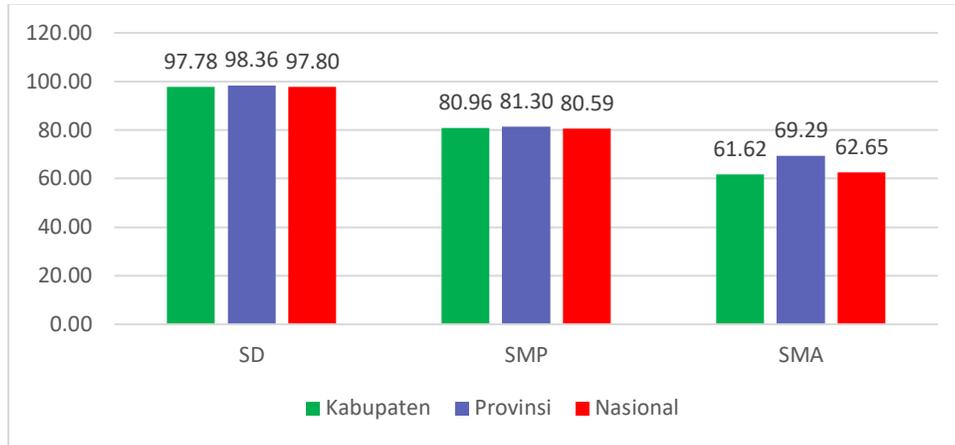
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,19% jika dibandingkan tahun 2020 yang sudah mencapai 97,87%. Senada dengan APM tingkat SMP/MTs pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 0,62%, dimana APM tingkat SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 81,58% sedangkan pada tahun 2021 menjadi 80,96%. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat SMA/MA, dimana pada tahun 2021 hanya mencapai 61,62%, yang sebelumnya 61,87 , terjadi penurunan sebesar 0,25%.

Capaian kinerja pendidikan tahun 2021 dengan indikator APM Kabupaten Paser jika dibandingkan dengan rata-rata APM Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, maka APM SD Kabupaten Paser lebih rendah dari rata-rata APM Provinsi dan Nasional. APM SMP lebih rendah dari rata-rata APM Provinsi dan lebih tinggi dari rata rata Nasional sedangkan APM SMA lebih rendah dari rata-rata APM Provinsi dan Nasional.



**Grafik 2.13**

Perbandingan APM jenjang SD, SMP dan SMA Kabupaten Paser dengan Provinsi dan Nasional



Sumber, Badan Pusat Statistik, 2022

### F. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.25 berikut :

**Tabel 2.25**

Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

No.	Jenjang Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	0,1	0,20	0,92	0,94	0,88
2	SMP/MTs	0,2	1,50	1,18	2,28	1,79
	<b>Rata-rata</b>	<b>0,15</b>	<b>0,95</b>	<b>1,05</b>	<b>1,61</b>	<b>1,33</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, 2022

Ditinjau dari keberlanjutan sekolah, rata-rata angka putus sekolah dalam lima tahun terakhir (dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021) terus menerus mengalami peningkatan. Angka Putus Sekolah dalam 2 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, hal ini disebabkan karena dampak pandemic covid-19.

#### 2.1.2.2.2 Kesehatan

##### A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam



pembangunan kesejahteraan rakyat di sektor kesehatan. Angka harapan hidup (AHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. AHH bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Perkembangan AHH tahun 2017 - 2021 di Kabupaten Paser ditunjukkan pada Tabel 2.29. Selama periode ini, AHH penduduk Kabupaten Paser terus meningkat dari 72,05 tahun pada tahun 2017 menjadi 72,88 pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,011% per tahun.

Meskipun pencapaian AHH (72,88 tahun) di Kabupaten Paser pada tahun 2021 berada di atas Nasional (71,52 tahun) namun masih lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Kalimantan Timur (74,61 tahun) dan berada di posisi ketujuh dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, program dan kegiatan kesehatan yang terkait untuk meningkatkan angka harapan hidup perlu menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Paser ke depan.

**Tabel 2.26**

Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Indikator Derajat Kesehatan	Presentase Angka Harapan Hidup tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	72,05	72,28	72,52	72,62	72,88

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022

**B. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2017-2021), capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Paser memperlihatkan keadaan yang fluktuatif. Angka kematian bayi pada tahun 2017 sebesar 40 bayi, pada tahun 2018 terjadi kenaikan kasus kematian bayi menjadi sebesar 62 bayi, pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 65 bayi, pada tahun 2020 angka kematian bayi menurun menjadi 49 bayi dan pada tahun 2021 angka kematian bayi kembali mengalami kenaikan menjadi 60 bayi,. Adapun penyebab kematian bayi yang terjadi pada tahun 2021 di Kabupaten Paser rata-rata disebabkan oleh Kelaianan keginetal, asfiksia, infeksi, ASI eksklusif yang belum optimal.

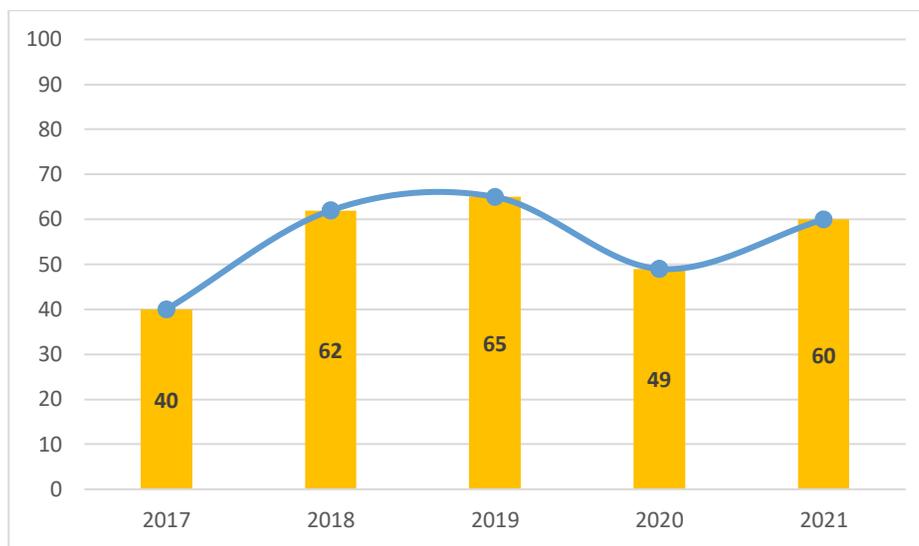


**Tabel 2.27**  
Jumlah Angka Kematian Bayi

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Kematian Bayi	40	62	65	49	60

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022

**Grafik 2.14**  
Jumlah Angka Kematian Bayi



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022

### C. Angka Kematian Balita

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2017-2021), capaian Angka Kematian Balita (AKB) Kabupaten Paser memperlihatkan keadaan yang fluktuatif. Angka kematian balita pada tahun 2017 sebanyak 51 balita, pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus kematian balita menjadi 56 balita, pada tahun 2019 kasus kematian balita sebanyak 70 balita, pada tahun 2020 angka kematian balita menurun menjadi 55 balita dan pada tahun 2021 jumlah kematian balita kembali meningkat yaitu sebanyak 64 balita. Adapun penyebab utama kematian balita yang terjadi di Kabupaten Paser adalah Penyakit koginetal, infeksi TB pada balita, ISPA, diare dan asupan gizi.

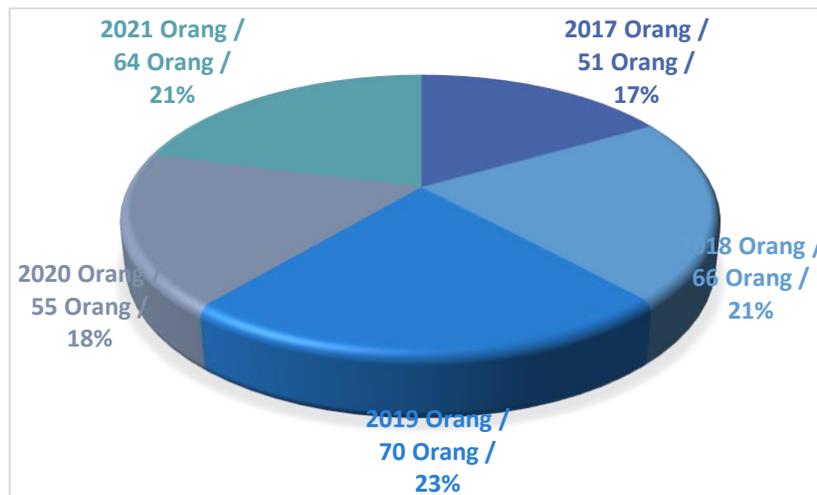


**Tabel 2.28**  
Jumlah Angka Kematian Balita

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Kematian Balita	51	66	70	55	64

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022

**Diagram 2.2**  
Jumlah Angka Kematian Balita



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022

#### D. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat derajat kesehatan ibu. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Paser dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi sebagaimana tertera dalam Tabel 2.28. Namun demikian angka ini dibawah standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sebanyak 150 orang per 100.000 kelahiran hidup. sehingga dapat dikatakan bahwa program Pemerintah Kabupaten Paser dalam menurunkan angka kematian Ibu sudah cukup berhasil.

**Tabel 2.29**  
Jumlah Angka Kematian Ibu

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Kematian Ibu	12	7	5	5	20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022



Persoalan kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Paser pada tahun 2021 disebabkan karena kasus covid 19 sebanyak 9 orang sedangkan kasus lainnya disebabkan karena perdarahan dan hipertensi. Selama kurun waktu 2017-2020 umumnya disebabkan oleh karena tingkat pengetahuan dari masyarakat yang masih rendah mengenai masalah kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan semasa kehamilan, pendarahan, eklapsi, lambat dirujuk, dan persalinan belum sepenuhnya ditangani oleh bidan atau tenaga kesehatan. Selain itu kondisi geografis yang sangat luas dan sulit serta topografi pegunungan menyebabkan kurang atau sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

### E. Status Gizi Balita

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perkembangan prevalensi balita gizi buruk dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi.

**Tabel 2.30**

Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase balita dengan gizi buruk	12,1%	0,08%	0,11%	0,053%	0,35%
2	Persentase balita dengan gizi kurang	18,4%	12,40%	7,86%	7,85%	8,3%
3	Persentase balita stunting	31,8%	27,54%	21,8%	14,18%	15,9%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022

Status gizi di Kabupaten Paser sudah berada di bawah angka yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sebesar 1,5%, dimana pada tahun 2021 balita dengan gizi buruk hanya sebesar 0,35% namun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sedangkan persentase balita dengan gizi kurang pada tahun 2021 sebesar 8,3%.



Untuk prevalensi stunting di Kabupaten Paser selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari 231,8% pada tahun 2017 turun menjadi 14.18% pada tahun 2020, akan tetapi pada tahun 2021 terjadi peningkatan kasus stunting menjadi 15,9%.

Penanganan stunting perlu dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini beresiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa, lebih rentan terhadap penyakit. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang mengatur tentang percepatan penurunan stunting secara multi sector, yang terdapat 5 pilar strategi nasional yaitu

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan dikementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah Kab/kota dan pemerintah desa
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
3. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi

Strategi penurunan stunting adalah pendekatan multisektor dan intervensi terintegrasi. Upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk mempercepat upaya menurunkan angka prevalensi stunting pada anak. Oleh karena itu diperlukan upaya penanganan pencegahan stunting secara intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan dengan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita kurang gizi, pemberian tablet tambah darah bagi remaja dan ibu hamil, promosi Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), pemantauan pertumbuhan, pemeriksaan kehamilan pencegahan infeksi, kesehatan lingkungan. Sedangkan intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada diluar persoalan kesehatan. antara lain penyediaan air minum,



peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan bergizi. Kegiatan pencegahan stunting secara spesifik dan sensitif belum dapat berjalan secara maksimal dan terkoordinasi dengan baik dan berkesinambungan.

**2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan**

Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang Ketenagakerjaan ditunjukkan oleh indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

**A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode tertentu, di Kabupaten Paser. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.31**  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Paser  
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)	62,15	62,11	66,43	67,68	65,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

**2.1.2.2.1 Pertanian**

Bidang pertanian merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah dan secara khusus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pertanian terkait dengan aset masyarakat maupun pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk berbagai hal dalam memenuhi kebutuhan hidup, yaitu antara lain sebagai tempat pemukiman, sebagai sarana produktivitas masyarakat, hingga sarana bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan dan melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Pada bagian ini menyajikan data mengenai berbagai hal terkait pertanian, sebagaimana dapat dijelaskan dalam tabel 2.32 berikut ini :



**Tabel 2.32**  
Banyaknya Permohonan dan Penyelesaian Tentang Pertanahan  
di Kabupaten Paser Tahun 2019-2021

Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
	Permohonan	Diselesaikan	Sisa	Permohonan	Diselesaikan	Sisa	Permohonan	Diselesaikan	Sisa
Peta bidang	2.960	-	2.960	928	794	134	-	-	-
Kutipan	2.960	-	2.960	-	-	-	-	-	-
Layanan Pengukuran bidang tanah luas kurang dari 10 Ha	-	-	-	-	-	-	1007	982	25
SKPT	99	92	7	81	81	-	58	58	-
Sertifikat pemberian hak atas tanah	5.508	5.451	57	276	249	27	495	450	45
Sertifikat peralihan hak atas tanah	681	611	70	581	581	-	571	514	57
Sertifikat tanggungan kredit verbal dan hipotik	802	724	78	588	588	-	495	495	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

### 2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pada bagian ini dijelaskan mengenai analisis kinerja terhadap perkembangan obyek wisata di Kabupaten Paser. Potensi pariwisata di Kabupaten Paser cukup layak untuk dikembangkan sebagai penopang perekonomian daerah, baik objek wisata alam maupun wisata sejarahnya.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Paser pada tahun 2021 adalah sebanyak 8.865 orang pengunjung dimana hal ini didukung dengan adanya objek wisata unggulan yang baru yaitu objek wisata gunung boga.



**Tabel 2.33**  
Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Nama Tempat Rekreasi	Jumlah Pengunjung				
	2017	2018	2019	2020	2021
Museum Sadurengas	3 984	2 400	1 750	190	1.125
Tahura Lati Petangis	3 900	2 900	1 193	-	385
Doyam Turu/Liang Batulis	700	200	0	-	236
Kemilau Laut Pondong	3 800	900	511	381	975
Danum Layong	1 700	400	366	34	285
Goa Layong/Goa Tengkorak	2.000	900	476	234	428
Goa Losan	400	200	0	50	215
Liang Mangku Langit	600	100	100	-	104
Doyam Seriam	750	56	0	-	120
Kapal Susur Kandilo	0	0	0	0	
Kampung Warna Warni					1.789
Gunung Boga					3.203
<b>Jumlah Pengunjung</b>	<b>20.572</b>	<b>24.562</b>	<b>27.070</b>	<b>907</b>	<b>8.865</b>

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2022

**Tabel 2.34**  
Jumlah Perkumpulan Kesenian, Jumlah Perkumpulan Olahraga, Jumlah Sarana Olahraga dan Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif di Kabupaten Paser Tahun 2021

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Perkumpulan Kesenian	70	Kelompok Seni
2	Jumlah Klub Olahraga	314	Termasuk Cabang Olahraga
3	Jumlah Sarana Olahraga	283	Termasuk Gedung Olahraga
4.	Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif	17	Pelaku Ekonomi Kreatif

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2022



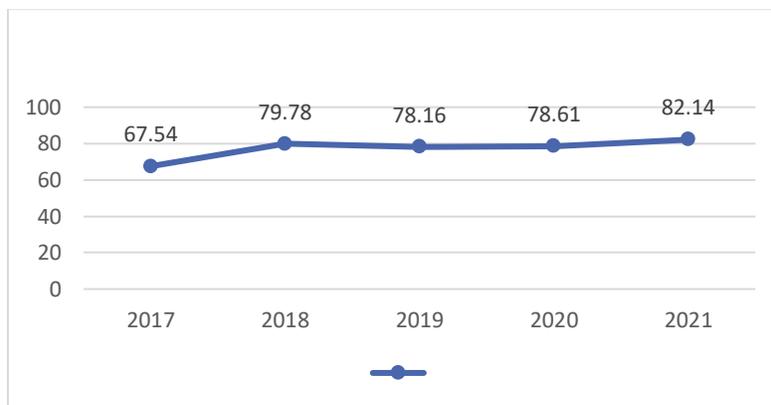
Pada tabel 2.34 di atas terlihat perkembangan seni, olahraga dan kreatifitas masyarakat Kabupaten Paser menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dimana kelompok perkumpulan kesenian telah mencapai 70 kelompok dan jumlah klub olahraga yang mencapai 314 klub dengan 283 sarana olahraga yang tersedia. Terdapat 17 pelaku ekonomi kreatif baik perorangan maupun kelompok. Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Paser dalam mendukung peningkatan ekonomi kreatif masyarakat maka pada tahun 2022 akan dilaksanakan penyusunan dokumen Peta Jalan Ekonomi Kreatif Daerah Kabupaten Paser (TALANPEKDA)

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik oleh pemerintah Kabupaten Paser adalah indeks kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Paser dilaksanakan oleh perangkat daerah pemangku pelayanan umum. Namun belum semua perangkat daerah tersebut konsisten melaksanakan survei setiap tahun. Rata-rata perangkat daerah yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat setiap tahunnya adalah 6 sampai 10 perangkat daerah. Dari data yang terhimpun, hasil penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah melalui survei kepuasan masyarakat di tingkat perangkat daerah menunjukkan kecenderungan peningkatan kualitas pelayanan publik yakni 78,61 tahun 2020 menjadi 82,14 di tahun 2021. Trend grafik IKM Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel berikut :

**Grafik 2.15**

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Paser Tahun 2017-2021



Sumber : Data Diolah, 2022



Dari hasil IKM tersebut disimpulkan terdapat 12 unit layanan dengan kinerja unit pelayanan yang Baik , yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Paser, Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Puskesmas Tanah Grogot. Selain itu, terdapat 1 PD berhasil meningkatkan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanannya menjadi berkategori sangat baik yaitu Dinas Sosial Kabupaten Paser.

**Tabel 2.35**

Indeks Kepuasan Masyarakat 12 Unit Layanan  
di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

No	Perangkat Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	Kinerja Unit Pelayanan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser	-	71,90	74,712	78,477	79,920	Baik
2	Dinas Sosial Kabupaten Paser	-	-	82,556	83,944	89,438	Sangat Baik
3	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Paser	-	-	80,309	82,473	81,937	Baik
4	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser	-	68,90	81,363	83,373	81,53	Baik
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Paser	-	-	-	-	83,250	Baik
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser	-	-	-	-	84,249	Baik
7	Dinas Perhubungan Kabupaten Paser	-	-	76,424	-	77,256	Baik
8	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser	-	-	77,783	80,558	79,828	Baik
9	RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser	63,72	78,00	73,016	-	79,920	Baik
10	Kecamatan Tanah Grogot	70,75	84,78	83,084	-	82,667	Baik
11	Kelurahan Tanah Grogot	71,05	83,21	83,824	85,942	84,610	Baik
12	Puskesmas Tanah Grogot	65,60	80,42	82,556	-	81,627	Baik

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan IKM di beberapa perangkat daerah tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh perangkat daerah yang menjadi objek survei memperoleh predikat



“baik” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas akan kinerja pelayanan perangkat daerah tersebut. Hal ini merupakan sinyal positif bagi pemerintah daerah yang berarti bahwa masyarakat di Kabupaten Paser merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah sudah memenuhi harapan masyarakat. Akan tetapi, hal ini masih perlu ditingkatkan lagi baik dari jumlah unit organisasi yang di survei maupun dari sisi kualitas pelayanan sehingga masyarakat semakin puas terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Paser.

### **2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

#### **2.1.3.1.1 Pendidikan**

Jumlah dan laju penduduk yang besar merupakan aset bagi pembangunan apabila diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Penduduk yang besar dengan tingkat SDM yang rendah hanya akan menjadi beban bagi pembangunan di suatu wilayah. Oleh sebab itu, penanganan masalah penduduk sebaiknya tidak hanya diarahkan pada upaya penekanan laju pertumbuhannya akan tetapi lebih dititikberatkan pada peningkatan sumber daya manusianya. Salah satu bagian dari peningkatan sumber daya manusia adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan.

#### **A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

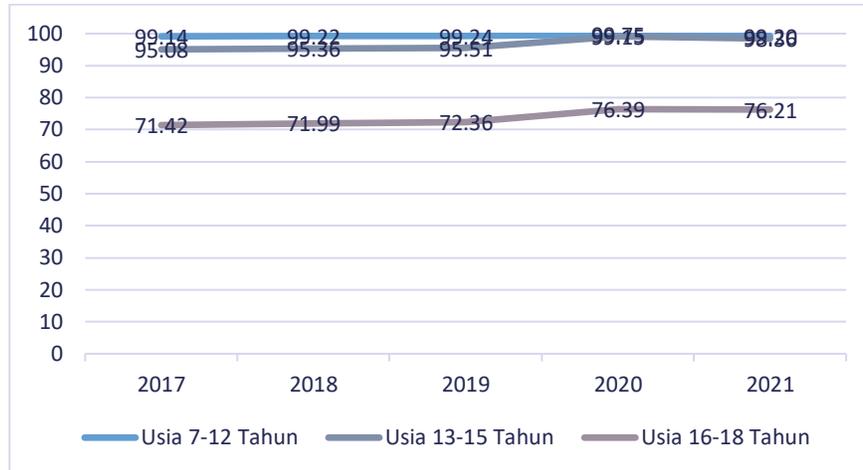
APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) atau menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar atau menengah. Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Akan tetapi, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang perlu diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah.

Pada tahun 2020, APS penduduk usia 7-12 tahun sebesar 99,75%, sedangkan pada tahun 2021 APS usia 7-12 sebesar 99,20%, terjadi penurunan sebesar 0,55%. Sementara



itu pada tahun 2020 APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 99,15% mengalami penurunan menjadi 98,36% pada tahun 2021 atau terjadi penurunan sebesar 0,76%, sedangkan untuk APS penduduk usia 16-18 tahun di tahun 2020 sebesar 76,39 menjadi 76,21 pada tahun 2021 atau terjadi penurunan sebesar 0,18%.

**Grafik 2.16**  
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

**Tabel 2.36**  
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

No.	Usia Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
1	7-12 Tahun	99,14	99,22	99,24	99,75	99,20
2	13-15 Tahun	95,08	95,36	95,51	99,15	98,36
3	16-18 Tahun	71,42	71,99	72,36	76,39	76,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

**B. Rasio Jumlah Sekolah, Murid dan Guru**

Dalam upaya peningkatan tingkat pendidikan penduduk, ketersediaan sarana dan tenaga pengajar yang memadai sesuai dengan potensi jumlah penduduk usia sekolah yang ada merupakan hal pokok yang harus menjadi perhatian. Selanjutnya data Jumlah sekolah, murid dan guru dapat disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 2.37**  
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Kabupaten Paser  
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

No.	Jenjang Pendidikan	207	2018	2019	2020	2021
<b>1 SD/MI/SDLB</b>						
1.1	Jumlah SD	237	237	237	234	234
1.2	Murid	35.349	35.104	35.297	35.810	34.922
1.3	Guru	2.252	2.307	2.513	2.577	2.620
1.4	Rasio Murid Guru	15,70	15,21	14,30	13,90	13,33
1.5	Rasio Murid Sekolah	149,15	148,11	150,32	153,03	149,24
<b>2 SLTP/MTS/SMPLB</b>						
2.1	Jumlah SLTP	93	94	94	93	93
2.2	Murid	14.385	14.301	14.161	14.335	14.420
2.3	Guru	1.067	1.078	1.191	1.234	1.328
2.4	Rasio Murid Guru	13,48	13,26	11,89	11,62	10,86
2.5	Rasio Murid Sekolah	154,68	152,13	150,64	154,14	155,05
<b>3 SLTA/SMK/MA</b>						
3.1	Jumlah SLTA	42	43	44	42	42
3.2	Murid	11.211	11.501	11.973	12.130	13.003
3.3	Guru	872	863	943	936	1.008
3.4	Rasio Murid Guru	12,86	13,32	12,69	12,96	12,90
3.5	Rasio Murid Sekolah	266,93	267,46	272,11	288,81	309,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Pada semua jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA jumlah murid mengalami kenaikan yang signifikan terutama sejak diprioritaskan program wajib belajar 9 tahun. Namun, untuk tahun 2021 jumlah murid SD/MI/SDLB sedikit mengalami penurunan menjadi 34.922 dari 35.810 pada tahun 2020



### 2.1.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

#### A. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu, bayi, dan balita. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

Selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2018, jumlah posyandu di Kabupaten Paser menunjukkan trend yang agak stagnan. Pada tahun 2019, jumlah posyandu di Kabupaten Paser tercatat sebanyak 361 posyandu meningkat menjadi 371 pada tahun 2021. Dilihat dari sisi rasio, jumlah posyandu per 1.000 balita di Kabupaten Paser sudah cukup memadai dalam melayani balita hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, rasio posyandu 15,29 meningkat menjadi 15,9.

Meskipun rasio posyandu sudah ideal, namun perlu untuk meningkatkan partisipasi kader dalam rangka mendukung kesadaran masyarakat untuk datang dalam kegiatan pemantauan tingkat status gizi anak, ibu hamil dan menyusui di posyandu

**Tabel 2.38**

Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu per Satuan Balita  
Di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Posyandu	356	356	361	370	371
Jumlah Balita	27.099	29.401	30.012	24.328	23.332
Rasio Posyandu per satuan balita	13,14	12,11	12,30	15,21	15,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022



## B. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Paser dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas sarana kesehatan kepada masyarakat.

Pada tahun 2021 jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Paser sebanyak 124 unit dengan jumlah penduduk 277.602 jiwa.

**Tabel 2.39**  
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk  
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk *)	254.503	258.022	285.890	275.452	277.602
Jumlah Puskesmas	18	19	19	19	19
Jumlah Puskesmas Pembantu	109	109	115	99	105
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	127	128	134	118	124
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0,0004	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004

Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2022

## C. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainnya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2021, jumlah dokter umum yang ada di Kabupaten Paser sebanyak 62 orang atau mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya sebanyak 47 orang. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk di Kabupaten Paser tahun 2021 sebesar



22,33. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di Kabupaten Paser melayani 4.477 penduduk.

Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Paser tahun 2021 adalah sebanyak 32. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di Kabupaten Paser tahun 2021 adalah sebesar 11,52. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di Kabupaten Paser melayani 8.675 penduduk.

Jumlah dokter gigi di Kabupaten Paser tahun 2021 sebanyak 20 orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 18 orang. Rasio dokter gigi di Kabupaten Paser per 100.000 penduduk sebesar 7,2.

**Tabel 2.40**  
Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi  
per 100.000 penduduk Kabupaten Paser Tahun 2017–2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk	254.503	258.022	285.890	275.452	277.602
Dokter Umum	55	41	60	47	62
Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	22	16	21	17,06	22,33
Dokter Spesialis	25	28	28	30	32
Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	10	11	10	11	11,52
Dokter Gigi	19	16	20	18	20
Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	7	6,20	3,49	6,53	7,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022

Selain fasilitas Kesehatan hal dasar lain yang sangat diperlukan dalam pelayanan Kesehatan yaitu kondisi tenaga Kesehatan, Ketenagaan merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Ketenagaan merupakan bagian pembahasan dalam manajemen Puskesmas.

Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas



pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. Jenis Tenaga Kesehatan yang harus tersedia di puskesmas yaitu terdiri dari 9 (Sembilan) jenis standar yaitu dokter atau dokter layanan primer; dokter gigi; perawat; bidan; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; ahli teknologi laboratorium medik; tenaga gizi; dan tenaga kefarmasian. Kondisi ketersediaan 9 jenis tenaga Kesehatan di puskesmas se Kabupaten Paser dapat terlihat pada tabel 2.41 berikut:

**Tabel 2.41**  
Ketersediaan Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas

No	Puskesmas	Perawat	Dokter	Dokter Gigi	Bidan	Tenaga Apoteker	Promkes	Kesling	Nutrisi onis	Lab Medik
1	Sebakung Taka	Lebih	Kurang	Standar	Standar	Lebih	Standar	Standar	Kurang	Kurang
2	Senaken	Lebih	Lebih	Standar	Lebih	Lebih	Kurang	Standar	Lebih	Standar
3	Batu Kajang	Lebih	Lebih	Kurang	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih
4	Muser	Lebih	Standar	Standar	Lebih	Standar	Kurang	Standar	Standar	Kurang
5	Kerang	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih
6	Tanjung Aru	Lebih	Kurang	Kurang	Lebih	Lebih	Kurang	Standar	Standar	Lebih
7	Suatang Baru	Lebih	Lebih	Standar	Standar	Lebih	Kurang	Lebih	Standar	Standar
8	Pasir Belengkong	Lebih	Standar	Standar	Lebih	Lebih	Kurang	Standar	Lebih	Lebih
9	Suliliran Baru	Lebih	Standar	Standar	Lebih	Standar	Kurang	Standar	Kurang	Kurang
10	Padang Pangrapat	Lebih	Lebih	Standar	Lebih	Lebih	Kurang	Standar	Lebih	Standar
11	Tanah Grogot	Lebih	Lebih	Standar	Lebih	Lebih	Kurang	Lebih	Lebih	Lebih
12	Kuaro	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih
13	Lolo	Lebih	Standar	Standar	Lebih	Lebih	Kurang	Standar	Lebih	Standar
14	Long Ikis	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih
15	Krayan	Lebih	Lebih	Kurang	Lebih	Lebih	Standar	Standar	Standar	Lebih
16	Kayungo	Lebih	Standar	Standar	Lebih	Standar	Standar	Lebih	Standar	Standar
17	Muara Komam	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Lebih	Tidak Ada	Tidak Ada	Lebih	Tidak Ada
18	Longkali	Lebih	Lebih	Tidak Ada	Lebih	Lebih	Tidak Ada	Lebih	Lebih	Lebih



19	Mendik	Lebih	Standar	Lebih	Lebih	Lebih	Standar	Standar	Lebih	Lebih
	<b>Terstandar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>42%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>78%</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat gambaran ketersediaan 9 jenis tenaga kesehatan dipuskesmas se-Kabupaten Paser yaitu sebesar 88 % sesuai standar kebutuhan. Untuk jenis tenaga Kesehatan yang masih kurang di beberapa puskesmas yaitu tenaga promosi Kesehatan, hanya 42 % puskesmas mempunyai tenaga promosi Kesehatan sesuai standar kebutuhan. Serta hanya 78% puskesmas mempunyai tenaga laboratorium medik sesuai standar kebutuhan.

#### D. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah puskesmas di Kabupaten Paser pada tahun 2021 sebanyak 19 puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan. Angka kunjungan puskesmas pada tahun 2021 tidak tersedia data. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Paser sebanyak 105 puskesmas pembantu yang tersebar di 144 desa/kelurahan.

**Tabel 2.42**

Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Puskesmas	18	19	19	19	19
Jumlah Kecamatan	10	10	10	10	10
Jumlah Kunjungan Puskesmas	413.906	-	-	-	-
Jumlah Puskesmas Pembantu	109	103	115	99	105
Jumlah Desa/ Kelurahan	144	144	144	144	144

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022



**Tabel 2.43**

Kategori Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Paser Tahun 2016-2019

No	Nama Puskesmas	2016	2017	2018	2019
1	Long Ikis	Dasar			Madya
2	Kuaro	Madya			Utama
3	Tanah Grogot		Madya		
4	LongKali		Madya		
5	Mendik		Madya		
6	Pasir Belengkong		Madya		
7	Padang Pengrapat		Madya		
8	Suliliran baru		Madya		
9	Muser		Madya		
10	Batu Kajang			Madya	
11	Muara Komam			Madya	
12	Kerang			Madya	
13	Suatang Baru			Madya	
14	Tanjung Aru			Madya	
15	Krayan			Dasar	
16	Long Gelang			Madya	
17	Lolo			Madya	
18	Sebakung Taka				Madya
19	Senaken				Madya

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022

Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin sempurna kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan. Salah satu cara untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan puskesmas dilakukan dengan akreditasi. Dengan implementasi standar akreditasi akan menjamin manajemen puskesmas, penyelenggaraan program kesehatan, dan pelayanan klinis telah dilakukan secara berkesinambungan.



Jumlah puskesmas di Kabupaten Paser adalah sebanyak 19 puskesmas, dimana terdiri dari 10 puskesmas rawat inap dan 9 puskesmas non rawat inap yang tersebar di 10 kecamatan. Hingga Tahun 2019, seluruh Puskesmas sudah terakreditasi yakni 1 puskesmas dengan kategori Dasar, 17 puskesmas dengan kategori Madya dan 1 puskesmas dengan kategori Utama. Pada 2020 dan 2021 tidak dilakukan penilaian akreditasi Puskesmas karena kendala pandemi Covid-19

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Akreditasi Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungan, Puskesmas sebagai institusi perlu meningkatkan kinerja dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan atau kesehatan masyarakat. Saat ini dikabupaten Paser dari 19 Puskesmas semua sudah terakreditasi, kedepan Dinas Kesehatan menargetkan status Akreditasi Puskesmas menjadi Utama dan Paripurna.

#### E. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Paser tahun 2021 mencapai 108,6%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Kabupaten Paser ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan.

**Tabel 2.44**

Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Ibu yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	5.159	4.725	5.203	5.554	5.450
Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	5.915	5.978	5.978	5.978	5.019



Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	87,2	79,12	87,1	92,9	108,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022

### 2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Paser. Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Paser dapat dilihat dari beberapa aspek.

#### A. Jalan dan Jembatan

Indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) di Kabupaten Paser yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2020 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah 41,28% dan pada tahun 2021 mencapai angka 22,49%. Terdapat penurunan kondisi jalan mantap karena dari hasil survey penguatan kondisi jalan penilaian untuk kerikil yang sebelumnya dikategorikan sedang/rusak ringan menjadi rusak berat. Penanganan yang serius dan berkesinambungan sangat diperlukan, mengingat perputaran roda perekonomian sangat bergantung pada akses jalan. Untuk selanjutnya produk akhir penanganan kondisi jalan kabupaten yaitu perkerasan beton rigid atau perkerasan aspal agar penilaian kondisi jalan hanya di kriteria baik atau sedang sehingga persentasi kemantapan jalan dapat meningkat.

**Tabel 2.45**

Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Tahun 2017-2021

KONDISI JALAN	2017	2018	2019	2020	2021
<b>PANJANG JALAN (KM)</b>	<b>1005,19</b>	<b>1005.19</b>	<b>1005.19</b>	<b>1005.19</b>	<b>1005.19</b>
BAIK	24.97%	15.90%	20.61%	13.56%	14.63%
SEDANG	19.25%	2.21%	2.87%	27.71%	7.86%
RUSAK RINGAN	29.19%	30.77%	37.69%	43.76%	10.89%
RUSAK BERAT	26.59%	51.12%	38.83%	14.97%	66.62%
<b>JUMLAH</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2022



**Tabel 2.46**

Panjang Jalan Negara Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Kalimantan Timur (km) Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Paser	58,51	158,11	6,67	0,40
2	Kutai Barat	44,95	128,31	50,72	44,76
3	Kutai Kartanegara	37,12	217,77	45,13	12,70
4	Kutai Timur	71,85	313,26	83,74	11,42
5	Berau	69,31	157,88	27,19	4,95
6	Penajam Paser Utara	12,34	45,83	0,79	0,10
7	Mahakam Ulu	-	-	-	-
8	Balikpapan	5,24%	39,32	1,09	-
9	Samarinda	2,69	38,35	8,56	2,79
10	Bontang	3,82	5,23	-	-
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>305,83</b>	<b>1104,06</b>	<b>223,89</b>	<b>77,12</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2022

Kondisi sarana Jembatan sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas yang menentukan tingkat pembangunan infrastruktur wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah tersebut. Jumlah jembatan pada ruas jalan Kabupaten Paser sebanyak 177 buah dengan berbagai macam tipe dan kondisi sesuai dengan hasil survei kondisi data base jembatan tahun 2021

**Tabel 2.47**

Kondisi Jembatan Tiap Kecamatan Tahun 2021 di Kabupaten Paser

No.	Kecamatan	Jumlah (Buah)	Kondisi							
			(%)	Baik	(%)	Sedang	(%)	Rusak Ringan	(%)	Rusak Berat
1	Tanah Grogot	29	44.83	13	27.59	8	27.59	8	0	0
2	Paser Belengkong	15	26.67	4	20.00	3	46.67	7	6.67	1



3	Kuaro	13	30.77	4	30.77	4	7.69	1	30.77	4
4	Longikis	19	47.37	9	15.79	3	21.05	4	15.79	3
5	Longkali	35	34.29	12	8.57	3	17.14	6	40.00	14
6	Batu Sopang	7	42.86	3	14.29	1	-	0	42.86	3
7	Muara Komam	33	45.45	15	3.03	1	3.03	1	48.48	16
8	Muara Samu	8	75.00	6	0.00	0	12.50	1	12.50	1
9	Batu Engau	16	25.00	4	0.00	0	18.75	3	56.25	9
10	Tanjung Harapan	2	100	2	21.05	0	21.05	0	36.84	0
<b>JUMLAH</b>		<b>177</b>		<b>72</b>		<b>23</b>		<b>31</b>		<b>51</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2022

## B. Jaringan Irigasi

Indikator rasio jaringan irigasi. Angka rasio jaringan irigasi pada tahun 2018 menunjukkan jumlah angka 1:21,91 pada tahun 2020 menjadi 1:16,74 meningkat karena adanya normalisasi, rehabilitasi, dan pembangunan saluran irigasi yang sebagian besar bersumber dari anggaran bantuan keuangan provinsi dan penurunan jumlah lahan persawahan. Rasio tersebut didapat dari hasil perhitungan panjang saluran irigasi (km) dibagi dengan luas lahan sawah (Ha). Sampai dengan tahun 2021 panjang saluran irigasi 758,746 km yang terdiri atas saluran irigasi primer sepanjang 164,864 km, irigasi sekunder 516,382 km, dan tersier sepanjang 77,050 km, dengan kondisi baik pada jaringan irigasi primer 90,17% kondisi sedang/rusak ringan sebesar 9,83% di tahun 2021.

**Tabel 2.48**

Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Non Teknis Tahun 2020-2021 Kabupaten Paser

No.	Jaringan Irigasi	Panjang (M)	2020			Jumlah (%)	2021			Jumlah (%)
			Baik	Sedang / Rusak Ringan	Rusak Berat		Baik	Sedang / Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Primer	164,864.00	88.73	11.27	0.00	100.00	90.17	9.83	0.00	100.00
2	Sekunder	516,832.00	74.82	18.02	7.17	100.00	78.44	20.09	1.47	100.00
3	Tertier	77,050.00	44.00	40,62	15.38	100.00	44.84	39.78	15.38	100.00
<b>JUMLAH</b>		<b>758,746.00</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>

Sumber : DPUR Kab. Paser, DTPH Kab. Paser (Data diolah), 2022



Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi sampai dengan tahun 2021 tersebar di seluruh wilayah kabupaten paser terbagi dalam 2 (dua) sistem irigasi, irigasi teknis dan non teknis dengan luasan irigasi teknis 3,978,96 ha dan irigasi non teknis (rawa) 1.047,44 ha dengan jumlah keseluruhan seluas 5.026,40 ha.

**Tabel 2.49**

Luas Sawah yang Terlayani Irigasi Jaringan Irigasi Teknis dan Non Teknis

No.	Jaringan Irigasi	Luas /ha
1	Teknis	3.978,96
2	Non Teknis (rawa)	1.047,44
<b>Jumlah</b>		<b>5.026,40</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser (diolah), 2022

Potensi irigasi rawa untuk menunjang sektor pertanian cukup baik dibandingkan dengan jumlah lahan pertanian yang ada di kabupaten paser dengan panjang irigasi rawa dengan kondisi baik sepanjang 98.430 meter (data 2020) dan luas lahan sawah yang tersebar di seluruh kewilayah kabupaten paser 13.729 ha,

**Tabel 2.50**

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser (ha)

No.	Kecamatan	Jumlah/ Ha
1	Batu Sopang	0
2	Muara Samu	25
3	Batu Engau	7
4	Tanjung Harapan	300
5	Pasir Belengkong	3.585
6	Tanah Grogot	1.456
7	Kuaro	1.400
8	Long Ikis	3.251
9	Muara Komam	0
10	Long Kali	3.705
<b>Jumlah</b>		<b>13.729</b>

Sumber : Badan Pusat Statitik Kabupaten Paser, 2022

### C. Potensi Air Baku

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya



melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Kabupaten Paser memiliki 4 (empat) Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Adang–Kuario, DAS Kandilo, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang

- DAS bagian hulu Kabupaten Paser yaitu DAS Kandilo seluas 3.416,1 Km<sup>2</sup> yang tersebar di Kecamatan Muara Komam, Kecamatan Batu Sopang, dan Muara Samu.
- DAS bagian tengah Kabupaten Paser yaitu di sebagian DAS Adang–Kuario, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang. DAS bagian tengah Kabupaten Paser tersebar di Kecamatan Batu Engau, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuario, Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali.
- DAS bagian hilir Kabupaten Paser yaitu di sebagian DAS Adang–Kuario, DAS Telake dan DAS Kerang–Segendang. DAS bagian hilir Kabupaten Paser tersebar di Kecamatan Tanjung Harapan, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuario, Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali.

**Tabel 2.51**

Data Debit Sungai Utama di Kabupaten Paser

No.	Wilayah Pelayanan	Koordinat	Dalam (m)		Lebar (m)		Debit (m <sup>3</sup> /det)		
			Aktual	Fluktuasi	Aktual	Fluktuasi	Max	Min	Rata-Rata
1	Sungai Kandilo Hilir	S: 01° 56' 33,7" E: 116° 10' 52,2"	3,00	6,85	102,00	102,00	22,45	16,9	19,685
2	Sungai Kandilo Hulu (Batu Sopang)	S: 01 49' 45,7" E: 115 57' 19,6"					5,5	1,6	3,575
3	Sungai Telake	S: 01° 31' 13,5" E: 116° 19' 16,8"							2,183
4	Sungai Lombok	S: 01° 37' 08,13" E: 116° 09' 08,03"							0,30
5	Sungai Muru	S: 01° 49' 53,1" E: 116° 04' 55,1"	0,75	3,50	17,50	24,00			0,997
6	Sungai Komam	S: 01° 40' 34,35" E: 115° 48' 00,23"	0,45	3,25	17,00	22,00			0,727
7	Sungai Setiu	S: 01 49' 45,7" E: 115 57' 19,6"	0,50	3,50	12,00	20,00			0,588
8	Sungai Kerang	S: 02° 14' 50,36" E: 116° 03' 54,84"							1,834

Sumber data : *Kompilasi data Studi Evaluasi Lingkungan DAS Kandilo & Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Paser 2017*



**Tabel 2.52**  
Tabel Usulan Sumber Air Baku Terpilih

No.	Wilayah Pelayanan	Sumber Air Baku		Keterangan Korrdinat
		Eksisting	Pengembangan	
1	Tanah Grogot	Sungai Kandilo	Sungai Kandilo	S: 01° 56' 33,7 " E:116° 10' 52,2"
2	Pasir Belengkong	Sungai Kandilo	Sungai Kandilo	S: 01° 56' 26,8" E: 116° 10' 52,0"
3	Longkali	Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)	S: 1°31'8.96" E :116°19'16.44"
4	Longikis	Sungai Lombok Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)	S: 01° 37' 10,5" E: 116° 09' 08,8"
5	Kuaro	Sungai Muru Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)	S: 01° 49' 53,1" E: 116° 04' 55,1"
6	Muara Komam	Sungai Komam	Sungai Komam	S: 01° 40' 34,35" E: 115° 48' 00,23"
7	Batu Kajang	Sungai Kandilo	Sungai Setiu	S: 01° 49' 45,7" E: 115° 57' 19,6"
8	Batu Engau	Sungai Kerang	Sungai Kerang	S: 02° 14' 50,00" E: 116° 03' 55,00"
9	Muara Samu	-	Sungai Muser/Samu	S: 02° 01' 12,30" E: 115° 56' 04,60"
10	Tanjung harapan	-	Air Tanah (Sumur Bor)	S: 02° 15' 43,60" E: 116° 31' 49,65"

Sumber data: PDAM Tirto Kandilo & Analisis Konsultan

Pembagian wilayah zonasi pelayanan Sistem Distribusi Air Minum PDAM Kabupaten Paser didasarkan pada :

- Zona yang selama ini sudah terbentuk;
- Jarak terhadap sumber air dan kondisi topografi;
- Daerah yang potensial dan merupakan prioritas pengembangan sesuai pemanfaatan ruang dalam rencana ruang kota sesuai dengan rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Paser ;
- Rencana pengendalian dan pemerataan tekanan hidrolis pada zona pelayanan yang dibentuk, dengan dibuat sistem distribusi tertutup/loop tiap zona. Dalam operasionalnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga sistem distribusi antar zonasi ini, satu sama lain harus bisa saling mensupply kebutuhan air, apabila ada gangguan distribusi pada salah satu zona dengan cara membuka dan menutup sistem isolasi



valve induk nya yang juga akan dilengkapi dengan meter induk sebagai kontrol pemakaian air;

- Rencana Pengendalian NRW;
- Jarak terhadap sumber air dan kondisi topografi;
- Rencana pengembangan sumber air, khususnya rencana pembangunan Bendungan Lambakan (Sungai Telake).

Kondisi eksisting pelayanan PDAM terdiri dari 8 zona pelayanan yaitu Pelayanan Perkotaan Kecamatan Tanah Grogot, IKK Longkali, IKK Long Ikis, IKK Long Kuario, IKK Pasir Balengkong, IKK Batu Sopang, IKK Muara Komam, IKK Muara Komam. Sedangkan IKK Muara Samu dan IKK Tanjung Harapan belum terlayani Sistem PDAM. Dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Bendungan Lambakan serta kondisi kualitas dan kualitas air baku di Wilayah IKK Long Kali, Long Ikis dan Kuario, dimasa mendatang direncanakan ke 3 buah IKK tersebut dijadikan menjadi satu sistem perkotaan dengan sumber air baku dari Bendungan Lambakan.

IKK Muara Samu dan IKK yang saat ini belum dilayani PDAM , direncanakan dimasa mendatang telah dilayani SPAM PDAM.

Daerah yang sudah terlayani air minum PDAM. Pengembangan SPAM pada daerah ini diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan dengan; pemanfaatan kapasitas produksi tidak terpakai (idle capacity), optimalisasi, pengurangan kebocoran, peningkatan kapasitas dan pembangunan baru.

Pengembangan SPAM pada daerah ini diarahkan pada:

1. Pemanfaatan Kapsitas Produksi tidak terpakai (idle capacity),meliputi:

- Menambah cakupan pelayanan
- Meningkatkan optimalisasi PDAM

2. Pengembangan SPAM,meliputi:

- Pembangunan Baru
- Peningkatan dan
- Perluasan

3. Program Penurunan Kebocoran (NRW)

Pembagian Zonasi Pelayanan PDAM Eksisting dan Zonasi Pengembangan Pelayanan PDAM , dapat dilihat pada Tabel 2.53



**Tabel 2.53**  
Pembagian Zonasi Pelayanan SPAM Kabupaten Paser

EKSITING			RENCANA PENGEMBANGAN		
Zona	Perkotaan & IKK	Cakupan Wilayah	Zona	Perkotaan & IKK	Penambahan Cakupan Wilayah
I	Perkotaan Tanah Grogot	Kecamatan Tanah Grogot: Kel tanah Grogot, Ds Tepian Batang, Ds Janju, Ds Sempulang, Ds Tapis, Ds Padang Pangrapat, Ds Jone, Ds Senaken, Ds Tanah Priuk, Rantau Panjang	I	Perkotaan Tanah Grogot	Ds Sungai Tuak, Ds Pondong Baru
II	IKK Long Kali	Kelurahan Long Kali, Ds Putang	II	Perkotaan Long Ikis, Long Kali dan Kuaro	Ds Mendik, Ds Mendik Makmur, Ds Mendik Bakti, Ds Mendik Karya, Ds Bente Tualan.
III	IKK Longikis	Kelurahan Longikis, Ds Semuntai, Ds Lombok, Ds pait, Ds Tajur, Ds Krayan bahagia, Ds Jemparing, Ds Atang Pait.			Ds Sawit Jaya , Ds Krayan Makmur.
IV	IKK Kuaro	Kelurahan Kuaro, Ds Klempangsari, Ds Modang, Ds sandelei			Ds rangan, Ds Lolo
V	IKK Pasir Balengkong	Ds.Sangkuriman, Ds Damit, Ds Olongpinang, Ds Bekoso, Ds pasir balengkong, Desa Suatang kateban , Ds Suliran Baru,	III	IKK Pasir Balengkong	Ds Suatang, Ds Suliliran Ds Suliliran Baru, Ds Suatang Baru, Ds Lempesu, Ds Pulau Rantau (T Grogot), Ds Pepara (T Grogot), Ds Sungai Tuak (T Grogot)
V	IKK Pasir Balengkong	Ds.Sangkuriman, Ds Damit, Ds Olongpinang, Ds Bekoso, Ds pasir balengkong, Desa Suatang kateban , Ds Suliran Baru,	III	IKK Pasir Balengkong	Ds Suatang, Ds Suliliran Ds Suliliran Baru, Ds Suatang Baru, Ds Lempesu, Ds Pulau Rantau (T Grogot), Ds Pepara (T Grogot), Ds Sungai Tuak (T Grogot)
VI	IKK Batu Sopang	Ds Batu Sopang,	IV	IKK Batu Sopang	Ds Songka (Batukajang), Ds Sungai Terik, Ds Kasungai,
VII	IKK Muara Komam	Kel Muara Koman, Ds batubutok, Ds Selerong	V	IKK Muara Komam	IKK Muara Komam
VIII	IKK Batu Engau	Ds Kerang	VI	IKK Batu Engau	Ds Tampak, Ds Mengkudu, Ds Kerangdayo
			VII	Muara Samu	Ds Muser , Ds Biu . Ds Libur Dinding
			VIII	Tanjung Harapan	Ds Tanjung Aru

Sumber data : Dokumen Rispam Kabupaten Paser (Bappedalitbang)



#### D. Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, masyarakat di Kabupaten Paser memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Sarana air bersih perpipaan diperoleh dari PDAM dan non PDAM yang dikelola oleh masyarakat (program Pamsimas). Sementara sistem air minum non perpipaan diperoleh dengan menggunakan air sungai, sumur gali dan mobil tangki yang dikelola oleh masyarakat. Penggunaan penangkap air hujan sebagai sumber air bersih dilakukan oleh hampir semua masyarakat Kabupaten Paser khususnya yang belum teraliri dari jaringan SPAM perpipaan, termasuk masyarakat yang tinggal didaerah dekat dengan sungai, kondisi air sungai yang keruh pada musim hujan menjadikan warga masih menangkap air hujan.

Akses air minum Kabupaten Paser selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana Tahun 2020 mencapai 66,88% dengan rincian di kawasan perkotaan terlayani 80,78% dan di kawasan pedesaan terlayani 58,70% dan pada Tahun 2021 meningkat hingga 70,14%,. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terlayani akses air minum khususnya diwilayah pedesaan. Perkembangan persentase akses air minum dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.54**  
Persentase Akses Air Minum Layak Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Akses Air Minum Perkotaan	71,10	73,60	77,93	80,78	70,14
2	Akses Air Minum Pedesaan	49,59	52,21	54,06	58,70	
<b>Akses Air Bersih Kabupaten Paser</b>		<b>57,57</b>	<b>60,14</b>	<b>62,91</b>	<b>66,88</b>	<b>70,14</b>

Sumber : Hasil Analisa Pokja AMPL Kabupaten Paser, 2022

Saat ini akses air minum Kabupaten Paser telah mencapai 70,14% dengan rincian akses air minum jaringan perpipaan sebesar 51,92% sedangkan akses air minum bukan jaringan perpipaan baru mencapai 18,21%. Dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Paser hanya 1 (satu) kecamatan yang belum dilayani oleh jaringan perpipaan yaitu kecamatan Tanjung Harapan. Adapun untuk wilayah yang sudah dilayani dengan jaringan PDAM juga masih belum sepenuhnya dapat terlayani 100% pelayanan dikarenakan karena secara jarak ataupun geografis belum terjangkau dengan jaringan perpipaan PDAM. Untuk



saat ini pelayanan sarana air minum di layani oleh SPAM-SPAM pedesaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Pamsimas ataupun dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada seperti memanfaatkan sumur-sumur gali dan mata air yang untuk kebutuhan perorangan ataupun dikelola bersama untuk satu desa.

Selain itu ada beberapa wilayah seperti di kecamatan Muara Samu dan beberapa wilayah di kecamatan Batu Sopang dan Muara Komam disediakan dengan pembuatan sistem pengolahan skala pedesaan dan juga sumur-sumur bor yang diusahakan oleh PT. Kideco, yang pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing masyarakat. Capaian persentase akses air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.55**  
Persentase Akses Air Minum Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan  
Kabupaten Paser Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan PDAM (JP PDAM)	Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan Non PDAM (JP Non PDAM)	Jumlah Jiwa Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Total Jumlah Jiwa Terlayani Air Minum (JP dan BJP)	Persentase Akses Air Minum Layak	Persentase Akses Air Minum Perpipaan	Persentase Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan
1	Kabupaten Paser	122.241	27.409	52.500	202.150	70,14%	51,92%	18,21%

Sumber : Hasil Analisa Pokja AMPL Kabupaten Paser, 2021

Kebutuhan pelayanan air minum di wilayah perkotaan dilayani oleh jaringan perpipaan dari PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser, dimana PDAM ini mempunyai pelayanan perkotaan dan beberapa unit pelayanan. Unit adalah satuan Kerja PDAM yang terdapat di Kecamatan dimana didalamnya terdapat manajemen dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sendiri, seluruhnya berjumlah 9 (Sembilan) unit yang terletak di ibukota kecamatan, antara lain :

- a) PDAM Perkotaan Tanah Grogot : Kap. IPA 200 Lt/dt
- b) PDAM Unit Pelayanan Pasir Belengkong : Kap. IPA 70 Lt/dt
- c) PDAM Unit Pelayanan Batu Sopang : Kap. IPA 15 Lt/dt
- d) PDAM Unit Pelayanan Long Kali : Kap. IPA 10 Lt/dt
- e) PDAM Unit Pelayanan Long Ikis : Kap. IPA 45 Lt/dt



## Pemerintah Kabupaten Paser

- f) PDAM Unit Pelayanan Kuaro : Kap. IPA 40 Lt/dt
- g) PDAM Unit Pelayanan Muara Komam : Kap. IPA 10 Lt/dt
- h) PDAM Unit Pelayanan Batu Engau : Kap. IPA 10 Lt/dt
- i) PDAM Unit Pelayanan Muara Samu : Kap. IPA 10 Lt/dt

Dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Paser sebanyak 288.225 Jiwa dan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 94.080. Jumlah Sambungan Rumah terlayani PDAM 29.105 dan Sambungan Rumah terlayani Non PDAM 6.526, Total Sambungan Rumah yang terlayani di Kabupaten Paser sebanyak 35.631.

**Tabel 2.56**  
Jumlah Sambungan Rumah

No	Wilayah Pelayanan (Desa/Kelurahan)	Sambungan Rumah (SR)	Kapasitas IPA Terpasang (L/dt)
<b>TANAH GROGOT</b>			200,00
1	Kelurahan Tanah Grogot	8285	
2	Tapis	1238	
3	Janju	391	
4	Tepian Batang	1089	
5	Sempulang	465	
6	Padang Pengrapat	785	
7	Jone	1774	
8	Senaken	1189	
9	Tanah Periuk	893	
10	Sungai Tuak	356	
11	Pepara	21	
		<b>16.486</b>	
<b>UP. PASIR BELENGKONG</b>			70,00
1	Sangkuriman	716	
2	Pasir Belengkong	567	
3	Damit	825	
4	Olong Pinang	231	
5	Bekoso	320	
6	Suliliran Baru	69	
7	Suatang Baru	3	
		<b>2.731</b>	
<b>UP. BATU ENGAU</b>			10,00
1	Kerang	495	
2	Kerang Dayo	336	



Pemerintah Kabupaten Paser

No	Wilayah Pelayanan (Desa/Kelurahan)	Sambungan Rumah (SR)	Kapasitas IPA Terpasang (L/dt)
3	Tampakan	76	
4	Mengkudu	12	
		<b>919</b>	
	<b>UP. BATU SOPANG</b>		5,00
1	Batu Kajang	<b>380</b>	
	<b>UP. MUARA KOMAM</b>		10,00
1	Muara Komam	1052	
2	Batu Butok	174	
3	Selerong	38	
		<b>1264</b>	
	<b>UP. LONG KALI</b>		10,00
1	Long Kali	1004	
2	Putang	161	
		<b>1.165</b>	
	<b>UP. KUARO</b>		40,00
1	Kuaro	1.291	
2	Klempang Sari	293	
3	Rangan Luar	105	
4	Lolo	141	
5	Pondong	73	
6	KPJ	641	
		<b>2.544</b>	
	<b>UP. LONG IKIS</b>		40,00
1	Long Ikis	299	
2	Lombok	438	
3	Pait	916	
4	atang pait	231	
5	Krayan Bahagia	318	
6	Samuntai	525	
7	Sawit Jaya	201	
8	Jemparing	144	
9	Sandeley	241	
10	Modang	36	
		<b>3.349</b>	
	<b>UP. MUARA SAMU</b>		10,00
	Muara Samu	227	
		<b>227</b>	
	<b>TOTAL PELANGGAN</b>	<b>29.105</b>	



Kebutuhan pelayanan air bersih di wilayah pedesaan sebagian besar belum dilayani oleh PDAM, untuk pemenuhan air bersih telah dibangun sarana dan prasarana air bersih perdesaan di beberapa desa yang dikelola oleh desa dan warga baik berupa sumur bor, bangunan penangkap mata air dan hidran umum.

**Tabel 2.57**

Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama di Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021

No.	Sumber Air Minum	2017	2018	2019	2020	2021
1	Air Kemasan/ Isi Ulang	46,5	48,51	-	-	-
2	Leding	18,84	17,82	45,73	34,29	32,73
3	Sumur Bor/Pompa	0,19	3,67	1,37	5,58	6,11
4	Sumur/Mata Air Terlindung	9,00	10,00	16,26	12,43	14,32
5	Sumur/Mata Air Tak Terlindung	8,30	5,56	13,36	26,97	16,90
6	Lainnya	17,17	14,44	23,28	20,73	29,94
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan air minum, sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan air kemasan/isi ulang dan ledeng (PDAM), dimana Tahun 2021 mencapai 32,73%, sedangkan lainnya memakai sumur bor, sumur/mata air terlindungi dan tak terlindungi

#### 2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh. Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni, pembangunan jalan perumahan dan drainase yang memadai, serta pembangunan sanitasi (IPAL Komunal, MCK, dan sampah) yang layak, merupakan program yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kualitas lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan.



### A. Sanitasi

Rumah tangga dengan sanitasi layak adalah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain. Akses sanitasi layak di Kabupaten Paser saat ini masih tergolong rendah, dimana Tahun 2020 sebesar 67,13% dan Tahun 2021 menurun menjadi 71,05%. Rendahnya akses sanitasi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki sarana jamban yang layak, terutama untuk daerah - daerah pedesaan yang masih sangat bergantung pada keberadaan sungai, sebagian besar belum memiliki fasilitas tempat buang air besar sehingga masyarakat melakukan kebiasaan BAB (Buang Air Besar) langsung ke sungai/danau, kolam/sawah, dan kebun. Hal tersebut tentu dapat mencemari tanah dan mencemari sumber air minum warga.

**Tabel 2.58**  
Persentase Akses Sanitasi Layak Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat)	41,7%	53,8%	69,78%	67,13%	71,05%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022  
Website Monev STBM,2021

Pada Tahun 2021 akses sanitasi layak Kabupaten Paser sebesar 71,05% yang dapat dilihat dari jumlah akses jamban sehat permanen, jumlah akses jamban sehat semi permanen, jumlah akses jamban sharing, dan jumlah akses IPAL/IPLT/Septictank Komunal. Sedangkan untuk akses aman baru mencapai 1,14% dan yang masih BABS (tanpa akses) mencapai 6,94%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kemampuan untuk membuat tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi perumahan yang tidak memiliki fasilitas buang air besar perlu mendapat perhatian pemerintah agar perumahan warga memenuhi standar kesehatan dasar.



**Tabel 2.59**

Persentase Akses Sanitasi Layak, Sanitasi Aman dan BABS Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah KK dengan Akses Jamban Sehat Permanen (JSP)	Jumlah KK dengan Akses Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	Jumlah KK dengan Akses Jamban Sharing (JSH)	Jumlah KK dengan Akses Aman Air Limbah (IPAL/IPLT/Septictank Komunal)	Jumlah KK dengan Akses Tangki Septik Layak	Jumlah KK yang BABS	Persentase Akses Jamban (Sanitasi Layak)	Persentase Akses Sanitasi Aman	Persentase BABS (Tanpa Akses)	Persentase Akses Sanitasi Dasar
1	Kabupaten Paser	49.300	13.827	3.718	646	66.845	6.532	71,05%	0,71%	6,94%	52,40%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2022  
Website Monev STBM,2021

Permasalahan sanitasi lainnya saat ini di Kabupaten Paser belum tersedia fasilitas sanitasi terpusat berupa IPAL sehingga secara umum belum dapat melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan pengelolaan limbah cair. Tetapi untuk pengelolaan limbah cair rumah tangga berupa buangan manusia (black water) telah ada mobil Penyedot Tinja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan cakupan pelayanan yang masih terbatas yaitu untuk wilayah perkotaan saja dan hanya dilayani dengan 1 buah mobil penyedotan tinja. Untuk pengolahan limbah tinja Kabupaten Paser telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berada di Desa Janju, sehingga limbah yang dibuang telah dilakukan pengolahan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan pada lokasi tersebut.

## B. Persampahan

Sampah merupakan limbah padat yang timbul dari aktivitas manusia baik di rumah, kantor, pasar, tempat umum, dan sebagainya. Besarnya timbulan sampah dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi suatu masyarakat. Semakin tinggi kemampuan ekonomi masyarakat akan membuat semakin tinggi tingkat konsumsi dan berdampak pada semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan. Pertumbuhan penduduk dan aktifitas kabupaten yang semakin meningkat juga akan meningkatkan jumlah timbulan sampah.

Timbulan sampah yang ada di Kabupaten Paser merupakan sampah yang berasal dari kegiatan pemukiman (rumah tangga), kegiatan pasar dan daerah komersial



(pertokoan), kegiatan perkantoran, kegiatan dari fasilitas umum, penyapuan jalan, dan lain-lain. Sumber sampah tersebut didominasi oleh sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga dengan mayoritas merupakan sampah basah atau sampah organik.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup persentase sampah terkelola pada Tahun 2021 telah mencapai 60,66 dengan jumlah penduduk yang terlayani sebesar 174.308 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan persampahan masih belum sepenuhnya melayani penduduk di Kabupaten Paser, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.60 berikut

**Tabel 2.60**

Data Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk terlayani (jiwa)	101,399	105,101	165.884	167.385	174.308
2	Sampah yang dihasilkan (ton/hari)	134,13	137,10	114,61	108,57	115,29
3	Sampah yang dapat dikelola (ton/hari)	50,70	52,55	66,35	66,95	69,943
4	Sampah yang tidak dapat dikelola (ton/hari)	83,43	84,55	48,25	41,62	45,35
5	Persentase sampah terkelola	37,80	38,33	57,90	61,67	60,66

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2022

Pengelolaan persampahan Kabupaten Paser saat ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan baru dapat melayani kawasan ibukota Kabupaten dan 6 (enam) kawasan ibukota kecamatan yang meliputi Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Muara Komam dan kecamatan Long Kali. Untuk Ibu Kota Kecamatan yang dilayani hanya pada kawasan komersil dan fasilitas umum. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai baik untuk pewadahan, pengumpulan, TPS, Armada Angkutan sampai pada kemampuan dan ketersediaan TPA serta kondisi geografis Kabupaten Paser.

Sampah yang berasal dari sumber dikumpulkan di setiap rumah tangga dengan wadah tertentu, baik dengan plastik maupun pewadahan yang lain. Selanjutnya sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yang dilakukan baik oleh masyarakat



langsung maupun oleh petugas pengumpul dari Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya sampah dari TPS diangkut dengan kendaraan pengangkut sampah menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), di TPA sampah tidak semuanya dibuang/ditimbun, untuk jenis sampah organik sampah diolah menjadi bahan berguna melalui kegiatan pengomposan.

Untuk daerah perkotaan Tanah Grogot pengelolaan persampahan dikelola bersama oleh masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup, dimana setiap hari telah ada pelayanan pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA yang berlokasi di Desa Janju. Sedangkan untuk kecamatan-kecamatan yang jauh dari lokasi TPA pengelolaannya dilakukan dengan mengumpulkan sampah pada kontainer yang ditempatkannya pada lokasi tertentu dan selanjutnya diangkut ke TPA Desa Janju setiap 2x seminggu. Pengelolaan sampah di Kabupaten Paser tidak semua dilakukan dengan cara pembuangan sampah ke TPS dan diangkut ke TPA. Di beberapa kecamatan masih ada rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah dengan cara ditimbun, dibakar dan dibuang ke kali/sungai terutama untuk Kecamatan Muara Samu, Batu Engau dan Tanjung Harapan. Hal ini dikarenakan tidak sampainya jangkauan pelayanan pengangkutan sampah ke kecamatan tersebut, mengingat lokasi TPA yang sangat jauh yaitu berada di Kecamatan Tanah Grogot dan Kecamatan Batu Sopang. Dan berikut kami sampaikan data infrastruktur persampahan terbangun beserta system pengelolaanya dan jumlah armada pengangkutan sampah.

**Tabel 2.61**

Data Infrastruktur Persampahan Terbangun

No	Nama Infrastruktur	Sistem Pengelolaan
1	TPA Sampah KM 7 Janju	Controll Landfill
2	TPA Sampah Kecamatan Batu Sopang	Controll Landfill
3	TPS 3R Pasar Senaken	Pengomposan Sampah Pasar
4	TPS 3R Desa Tapis	Pengomposan Sampah Organik dan Pemilahan Sampah Non Organik
5	TPS 3R Semumun	Pemilahan Sampah Non Organik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2022



**Tabel 2.62**  
Data Armada Angkutan Sampah

No	Jenis Armada	Volume	Satuan
1	Dump Truck	11	Unit
2	Truck Armroll	4	Unit

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2022

### C. Drainase

Pada saat ini sistem drainase di Kabupaten Paser masih kurang baik, pada musim hujan sering terjadi genangan terutama pada daerah yang mempunyai topografi relatif rendah. Genangan yang terjadi, baik di jalan maupun di lingkungan permukiman, disebabkan oleh hujan bersifat sementara dengan durasi yang bervariasi. Genangan yang ada memang belum menimbulkan dampak kerugian materiil yang signifikan, namun dirasakan cukup mengganggu aktifitas masyarakat di sekitarnya.

Penyebab dari genangan tersebut antara lain luapan dari saluran yang sudah penuh dan tidak mampu menampung debit air yang lewat, kondisi saluran yang tersumbat akibat banyaknya sedimen dan sampah dalam saluran dan lubang drainase tersumbat. Untuk itu penanganan genangan yang akan dilakukan adalah membangun saluran baru atau melakukan rehabilitasi saluran yang ada agar kapasitasnya dapat menampung air hujan yang ada, melakukan pemeliharaan rutin pada semua saluran dan bangunan drainase yang ada.

Pengelolaan drainase di wilayah Kabupaten Paser masih menggunakan sistem gravitasi yaitu pengaliran air berdasarkan beda tinggi tanah yang memanfaatkan badan sungai pada saat air surut untuk membuang genangan air. Pada saat ini pengelolaan drainase pada kawasan kota memanfaatkan Sungai Kandilo sebagai saluran primer.

Saluran drainase di Kabupaten Paser sebagian besar merupakan saluran terbuka yang menurut klasifikasinya terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier. Saluran primer selain memanfaatkan dari saluran-saluran alam berupa alur sungai yang terbentuk secara topografi alam ada sebagian berupa saluran primer yang dibangun berdasarkan perencanaan kapasitas aliran yang melewatinya. Ada beberapa hal yang



sangat dominan dan berkaitan langsung dengan memburuknya sistem drainase yang ada di wilayah Kabupaten Paser yaitu :

- 1) Kondisi sistem drainase yang ada pada umumnya tidak memenuhi syarat untuk kondisi sekarang dan masa akan datang
- 2) Sedimentasi yang tinggi pada setiap saluran drainase ada
- 3) Saluran drainase dimanfaatkan untuk aktivitas kegiatan perdagangan, jasa , perumahan dll
- 4) Pembuangan limbah domestic (sampah) dan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan yang belum baik. Hal ini memberikan efek samping yang dapat memperburuk sistem drainase kota.
- 5) Peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan lahan pemukiman terutama di sekitar pusat kota. Dalam hal mencari dan menggunakan lahan, banyak penduduk tidak memperhatikan konservasi lingkungan, sehingga banyak lahan-lahan yang mestinya dapat berfungsi sebagai resapan air, menjadi tidak berfungsi lagi, sehingga mengakibatkan banjir.

Pada Sungai Kandilo sendiri terjadi run off saat masuk musim penghujan sebesar 330,672 m<sup>3</sup>/detik dikarenakan debit maks sungai 5.634 m<sup>3</sup>/detik. Kondisi meluapnya sungai dikarenakan perubahan daerah hulu sungai terjadi erosi dampak dari berkurangnya tanaman penahan tanah sekaligus resapan limpasan air, sehingga ketika terjadi hujan tanah turun ke sungai mengakibatkan penumpukan sedimen sepanjang alur sungai. Eksisting drainase dapat mengalirkan debit buangan dari kawasan akan tetapi masih terjadi genangan air. Sehingga dapat disimpulkan penyebab genangan air dikarenakan penumpukan sedimen bahkan beberapa ujung saluran/drainase terpotong/tidak tembus ke saluran drainase yang seharusnya. Berikut adalah kondisi drainase Perkotaan Kabupaten Paser.



**Tabel 2.63**  
Kondisi Drainase Perkotaan Kabupaten Paser

No	Nama Desa/kelurahan	Ruas Jalan	Lokasi	Tinggi (cm)	Luas (ha)	volume (m <sup>3</sup> )	Genangan/Banjir	Permasalahan		
1	Kelurahan Tanah Grogot	Jl. Jend Sudirman	Pertigaan (Jl. Pangeran Mentri - Jl. Kusuma Bangsa)	30	0.54	1620	Genangan	1. Saluran menuju outfall tertutup 2. Sedimentasi pada gorong - gorong 3. Sebagian besar saluran inlet tertutup		
			Perempatan (SPBU)	30	0.86	2580	Banjir	1. Sedimentasi pada drainase 2. Sebagian besar saluran inlet tertutup		
			Pertigaan (Taman hutan kota)	30	2.21	6630	Banjir	1. Sebagian besar saluran inlet tertutup		
		Jl. R.A. Kartini	Perempatan (BNI)	20	0.93	1860	Banjir	1. Sedimentasi pada drainase 2. Dimensi saluran inlet kecil 3. Jumlah saluran inlet kurang		
			Depan Counter HP (OPPO- Realme)	40	0.98	3920	Banjir	1. Sedimentasi pada drainase 2. Dimensi saluran inlet kecil 3. Jumlah saluran inlet kurang		
			Jl. Kandilo Bahari	Gg Satria	50	4.70	23500	Banjir	1. Sebagian besar tidak memiliki saluran drainase 2. Elevasi pemukiman lebih rendah dari drainase	
		Masjid Nurul Falah		15	1.44	2160	Genangan	1. Sebagian besar saluran inlet tertutup 2. Elevasi psaluran inlet terlalu tinggi dari jalan		
		Jl. Sultan Hasanuddin	Depan Hotel Aulia	30	0.73	2190	Genangan	1. Sedimentasi pada drainase		
		Jl. Cokroaminoto	Grapari Telkomsel	20	0.25	500	Genangan	1. Sedimentasi pada drainase		
			Pertigaan (Gg. Delima - Jl. Cokroaminoto)	20	0.38	760	Genangan	1. Sedimentasi pada drainase		
				Jl. Bayangkara	Depan Asrama Bayangkara	30	0.40	1200	Genangan	1. Sedimentasi pada drainase 2. Dimensi saluran drainase kecil 3. Terjadi cekungan sebelum masuk ke gorong- gorong
					SMA Muhammadiyah Tanah Grogot	5	0.15	75	Genangan	1. Terjadi penyumbatan pada drainase
Gg. Padat Karya	30				0.47	1410	Banjir	1. Sebagian besar wilayah pemukiman berbentuk cekungan 2. Drainase tidak menerus / terpotong		



No	Nama Desa/kelurahan	Ruas Jalan	Lokasi	Tinggi (cm)	Luas (ha)	volume (m <sup>3</sup> )	Genangan/Banjir	Permasalahan		
		Jl. Paya Rupia	Gg. Balai Benih	40	1.78	7120	Banjir	1. Tidak memiliki saluran irigasi dari persawahan		
		Jl. Gajah Mada	Kantor DPRD Kab. Paser	10	0.77	770	Genangan	1. Sedimentasi pada drainase 2. Sebagian besar saluran inlet tertutup		
		Jl. Pangeran Menti	Gg. 49	20	4.51	9020	Genangan	1. Sebagian besar tidak memiliki saluran drainase lingkungan		
2	Desa Jone	Jl. Untung Suropati	Perm. Jone Indah - Gg. Amas	30	5.29	15870	Banjir	1. Sedimentasi pada drainase 2. Sebagian besar saluran inlet tertutup 3. Dimensi saluran inlet kecil		
3	Desa Senaken	Jl. Senaken	Gg Al Ihsan	20	0.28	560	Genangan	1. Sedimentasi pada drainase		
			Gerbang pondok pesantren Fastabiqul Khairat	20	0.02	40	Genangan	1. Sedimentasi pada drainase		
4	Desa Tanah Periuk	Jl. Sultan. A. Yani	Poros	100	42.47	424700	Banjir	1. Kurangnya saluran irigasi persawahan 2. Pemukiman berada di persawahan		
		Jl. H. Karim	Poros	20	1.86	3720	Banjir	1. Sedimentasi pada drainase 2. Saluran menuju outfall tersumbat		
5	Desa Tapis	<i>Jl. D.I. Panjaitan – Jl. K. Piere Tendeau</i>	Pertigaan (Kantor Desa Tapis)	20	0.06	120	Genangan	1. Sedimentasi pada gorong-gorong 2. Sebagian besar saluran inlet tertutup 3. Dimensi saluran inlet kecil 4. Jumlah saluran inlet kurang		
				Jl. Seluang	Perm. Kopri Tapis Gg. Tirta	100	8.19	81900	Genangan	1. Saluran drainase tidak menerus
					Perm. Kopri Blok Blok B RT.08 (Depan Musollah)	30	0.07	210	Genangan	1. Sedimentasi pada drainase 2. Saluran drainase tidak menerus
6	Desa Sungai Tuak	-	Sisi Utara	40	78.93	315720	Banjir	1. Pemukiman berada di daerah sempadan sungai		
			Sisi Selatan	40	67.01	268040	Banjir	1. Pemukiman berada di daerah sempadan sungai		
7	Pasir Belengkong	Jl. Keraton	Depan Musium Sarudengas	40	0.45	1800	Banjir	1. Beberapa sisi drainase jebol		
			Sekitaran Makam Pengeran Syarif Hamid	100	3.66	36600	Banjir	1. Tidak memiliki saluran drainase 2. Elevasi pemukiman sejajar dengan are persawahan		
			Jl. Jend. A. Yani	Depan pasar Benuo	20	0.09	180	Genangan	1. Sebagian besar saluran inlet tertutup	
			Jl. M. Saleh	Suatang Ketuban Lama	150	34.67	520050	Banjir	1. Elevasi sejajar dengan muka sungai	



Penanganan Drainase Perkotaan Kabupaten Paser di beberapa lokasi masih dimungkinkan untuk dengan mengatur pola pengaliran dan menata dimensi salurannya, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pola penanganan drainase dapat dilaksanakan dalam beberapa alternatif yaitu:

### **1. Pengaturan Pola Aliran**

Pola aliran harus dibuat sedemikian rupa sehingga memenuhi RTRW Kabupaten Paser dan RDTR Kawasan Perkotaan Paser baik dalam aneka ragam fasilitas yang direncanakan oleh tata ruang tersebut, maupun pentahapan pelaksanaan tata ruang tersebut. Proporsi pembagian daerah alirannya lebih ditentukan oleh kondisi topografi daerahnya, sedangkan penentuan arah alirannya ditentukan oleh lereng lahan yang dibuat drainasenya.

Pola aliran dan jenis pengalirnya didesain sedemikian rupa sehingga mendukung prinsip desain saluran yang memerlukan pemeliharaan seminimum mungkin. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan pola aliran adalah :

- a. Badan penerima aliran limpasan eksisting Jaringan sungai yang ada dalam suatu wilayah perencanaan, merupakan titik akhir dari aliran limpasan air yang ada.
- b. Sistem drainase yang ada dalam perencanaan pola aliran, sedapat mungkin tidak merusak pola alami/buatan yang sudah ada sehingga pekerjaan yang dilaksanakan akan menjadi lebih ekonomis dan memungkinkan untuk menjangkau seluruh saluran di daerah tersebut.
- c. Topografi daerah aliran pola aliran yang mengikuti kemiringan lahan akan mempermudah pengaliran air dan selain itu pekerjaan akan menjadi lebih ekonomis dan mudah dalam pengoperasiannya.

### **2. Penataan Sistem Jaringan Drainase**

Penataan sistem jaringan drainase Perkotaan Kabupaten Paser melalui Normalisasi, Rehabilitasi maupun Pembangunan Baru Saluran Drainase berguna menciptakan lingkungan yang aman dan baik terhadap genangan, luapan sungai, banjir kiriman, maupun hujan lokal.



#### D. Kawasan Kumuh Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Berdasarkan hasil identifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Paser yang dilaksanakan Tahun 2020 diperoleh luasan kawasan permukiman kumuh sebesar 224,52 Ha yang tersebar pada 10 (sepuluh) wilayah perkotaan, dengan luasan tertinggi berada pada kelurahan Tanah Grogot dengan luas 92,15 Ha atau sebesar 42,37% dari total luasan kumuh. Hal ini disebabkan karena Kelurahan Tanah Grogot merupakan Ibukota Kabupaten Paser dengan permukiman padat penduduk. Lokasi permukiman kumuh perkotaan tersebut telah ditetapkan dengan SK Bupati Paser nomor 653/KEP-116/2021 tentang Penetapan lokasi perumahan kumuh dan Permukiman kumuh kawasan Perkotaan Kabupaten Paser.

**Tabel 2.64**

Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Paser

No.	Nama Kelurahan/Desa	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	Persentase (%)
1	Batu Kajang	20,46	9,11
2	Muara Komam	11,91	5,30
3	Kuaro	7,72	3,43
4	Long Ikis	12,50	5,56
5	Long Kali	21,60	9,62
6	Tanah Grogot	92,15	42,37
7	Pasir Belengkong	1,00	0,44



No.	Nama Kelurahan/Desa	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	Persentase (%)
8	Batu Engau	24,48	10,90
9	Muara Samu	10,65	4,74
10	Tanjung Aru	19,05	8,48
<b>Total Luas</b>		<b>224,52</b>	<b>100,00</b>

Sumber : SK Bupati Paser tentang Penetapan lokasi perumahan kumuh dan Permukiman kumuh kawasan Perkotaan Kabupaten Paser.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Paser telah melakukan upaya penanganan pada beberapa lokasi di Kecamatan Tanah Grogot dan luasan kawasan kumuh telah berkurang sebesar 18,44 Ha. Capaian penanganan kawasan permukiman kumuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.65 berikut.

**Tabel 2.65**  
Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tana Paser Tahun 2021

Kelurahan/Desa	RT/RW	Luas Kumuh SK 2021 (Ha)	Luas Penanganan Kumuh 2021 (Ha)	Sisa Luas Kumuh (Ha)
<b>Tanah Grogot</b>	RT 1 RW 2	3,24	0	3,24
<b>Tanah Grogot</b>	RT 5 RW 2	3,35	0	3,35
<b>Tanah Grogot</b>	RT 6 RW 3	3,25	0	3,25
<b>Tanah Grogot</b>	RT 10 RW 3	3,43	0	3,43
<b>Tanah Grogot</b>	RT 3 RW 4	14,3	0	14,3
<b>Tanah Grogot</b>	RT 5 RW 4	12,44	12,44	0
<b>Tanah Grogot</b>	RT 7 RW 4	5,99	0	5,99
<b>Tanah Grogot</b>	RT 11 RW 5	11,33	0	11,33
<b>Tanah Grogot</b>	RT 14 RW 5	25,1	0	25,1
<b>Senaken</b>	RT 3	6	6	0
<b>Senaken</b>	RT 4	3,57	0	3,57
<b>Senaken</b>	RT 6	3,15	0	3,15
<b>Kuaro</b>	RT 4	3,51	0	3,51
<b>Kuaro</b>	RT 11	1,78	0	1,78



Kelurahan/Desa	RT/RW	Luas Kumuh SK 2021 (Ha)	Luas Penanganan Kumuh 2021 (Ha)	Sisa Luas Kumuh (Ha)
<b>Kuaro</b>	RT 19	2,43	0	2,43
<b>Longkali</b>	RT 2	5,87	0	5,87
<b>Longkali</b>	RT 11	3,51	0	3,51
<b>Longkali</b>	RT 14	6,07	0	6,07
<b>Longkali</b>	RT 16	6,15	0	6,15
<b>Longikis</b>	RT 1	1,61	0	1,61
<b>Longikis</b>	RT 2	0,98	0	0,98
<b>Longikis</b>	RT 3	4,71	0	4,71
<b>Longikis</b>	RT 4	2,36	0	2,36
<b>Longikis</b>	RT 6	2,84	0	2,84
<b>Muara Komam</b>	RT 1	1,06	0	1,06
<b>Muara Komam</b>	RT 2	3,36	0	3,36
<b>Muara Komam</b>	RT 3	2,31	0	2,31
<b>Muara Komam</b>	RT 4	3,24	0	3,24
<b>Muara Komam</b>	RT 9	1,94	0	1,94
<b>Batu Kajang</b>	RT 11	1,65	0	1,65
<b>Batu Kajang</b>	RT 15	7,92	0	7,92
<b>Batu Kajang</b>	RT 16	2,42	0	2,42
<b>Batu Kajang</b>	RT 17	1,67	0	1,67
<b>Batu Kajang</b>	RT 18	6,8	0	6,8
<b>Batu Engau</b>	RT 1	1,17	0	1,17
<b>Batu Engau</b>	RT 2	0,63	0	0,63
<b>Batu Engau</b>	RT 3	5,27	0	5,27
<b>Batu Engau</b>	RT 4	3,49	0	3,49
<b>Batu Engau</b>	RT 5	2,09	0	2,09
<b>Batu Engau</b>	RT 6	3,21	0	3,21



Kelurahan/Desa	RT/RW	Luas Kumuh SK 2021 (Ha)	Luas Penanganan Kumuh 2021 (Ha)	Sisa Luas Kumuh (Ha)
Batu Engau	RT 7	5,14	0	5,14
Batu Engau	RT 8	2,76	0	2,76
Batu Engau	RT 9	0,72	0	0,72
Muser	RT 1	1,15	0	1,15
Muser	RT 2	2,5	0	2,5
Muser	RT 3	3,11	0	3,11
Muser	RT 4	3,09	0	3,09
Muser	RT 5	0,47	0	0,47
Muser	RT 6	0,33	0	0,33
Pasir Belengkong	RT 1	1	0	1
Tanjung Aru	RT 1	3,62	0	3,62
Tanjung Aru	RT 2	2,46	0	2,46
Tanjung Aru	RT 3	2,55	0	2,55
Tanjung Aru	RT 4	2,16	0	2,16
Tanjung Aru	RT 5	1,42	0	1,42
Tanjung Aru	RT 6	0,68	0	0,68
Tanjung Aru	RT 7	6,16	0	6,16
<b>TOTAL</b>		<b>224,52</b>	<b>18,44</b>	<b>206,08</b>

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Paser, 2022

## E. Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak layak untuk tempat tinggal disebabkan oleh kondisi rumahnya yang tidak sehat atau berada di kawasan permukiman kumuh maupun rumah yang bisa membahayakan kehidupan penghuninya karena tidak memenuhi standar konstruksi. Konsep rumah layak huni adalah rumah yang mempunyai sirkulasi udara yang baik, kualitas air yang memadai, pencahayaan atau penerangan yang cukup, dapur bersih dan pembuangan asap lancar, konstruksi bangunan yang memenuhi standard, dan mempunyai sanitasi yang baik.



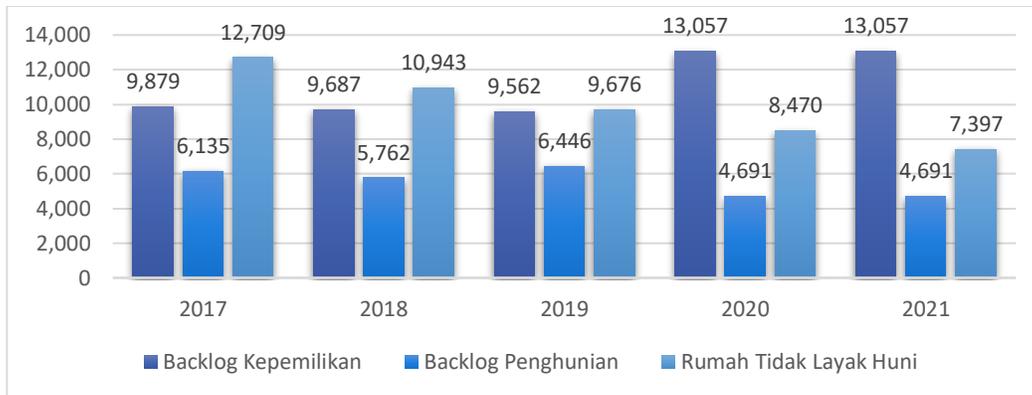
Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan jumlah backlog dan rumah tidak layak huni Kabupaten Paser masih cukup tinggi, dimana angka backlog kepemilikan pada Tahun 2019 mencapai 13.057 unit sedangkan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 7.397unit.

**Tabel 2.66**  
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan di Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2020
1	Backlog Kepemilikan	9.879	9.687	9.562	13.057	13.057
2	Backlog Penghunian	6.135	5.762	6.446	4.691	4.691
3	Rumah Tidak Layak Huni	12.709	10.943	9.676	8.470	7.397

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, 2022

**Grafik 2.17**  
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan di Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser (Form 1 B)

Berdasarkan data jumlah rumah tidak layak huni periode Tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa selama kurum waktu 5 tahun telah ada penurunan jumlah rumah tidak layak huni. Hal ini dikarenakan adanya beberapa program yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan sebagian pembangunan rumah layak huni. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah



berupa bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah (pra sejahtera). Tujuan bantuan stimulan ini adalah supaya rumah warga yang tidak layak huni bisa dibangun menjadi rumah yang layak huni dengan lingkungan yang sehat serta aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penanganan rumah tidak layak huni Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.67**  
Capaian Penanganan rumah tidak layak huni Tana Paser  
Tahun 2017-2021

No	KEGIATAN	2017 (Unit)	2018 (Unit)	2019 (Unit)	2020 (Unit)	2021 (Unit)	SUMBER PENDANAAN
1	Pembangunan Rumah Layak Huni	54	140	161	108	5	APBD, APBN, DAK
2	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni/ Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	569	1626	1107	1098	1070	APBD, APBN, DAK
	<b>Total</b>	<b>623</b>	<b>1.766</b>	<b>1.268</b>	<b>1.206</b>	<b>1.075</b>	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, 2022

Selama lima tahun terakhir, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah sendiri terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2021 mencapai 82,05% sedangkan 17,95% dengan status sewa/kontrak, bebas sewa dan lainnya. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan semakin tingginya kepemilikan status tempat tinggal. Untuk lebih jelasnya perkembangan persentase status kepemilikan tempat tinggal dapat dilihat pada table 2.68 berikut.

**Tabel 2.68**  
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status  
Kepemilikan Tempat tinggal di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

No.	Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	2017	2018	2019	2020	2021
1	Milik sendiri	81,52	79,18	81,96	81,26	82,05
2	Kontrak /Sewa	9,86	10,75	-	-	-
3	Bebas sewa	6,11	7,48	-	-	-
4	Lainnya	2,51	2,58	18,04	18,74	17,95
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021

\*) Tahun 2019 dan 2020 yang termasuk lainnya adalah kontrak/sewa, bebas sewa dan lainnya



## F. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Luasan RTH Kabupaten Paser baru mencapai 638.171 m<sup>2</sup> dengan rincian RTH Publik baru mencapai 335.206 m<sup>2</sup>. Luas RTH tersebut tentunya masih belum dapat memenuhi proporsi RTH Publik minimal sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Untuk lebih jelasnya luasan RTH dapat dilihat pada tabel 2.69 berikut.

**Tabel 2.69**

Luasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Kabupaten Paser Tahun 2021

No.	Jenis RTH	Luas (m <sup>2</sup> )
1	RTH Publik	335.206
2	Taman Median dan Daerah Milik Jalan	10.465
3	RTH Private	171.900
4	RTH Tempat Pemakaman Umum (TPU)	120.600
<b>Total Luas</b>		<b>638.171</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2022

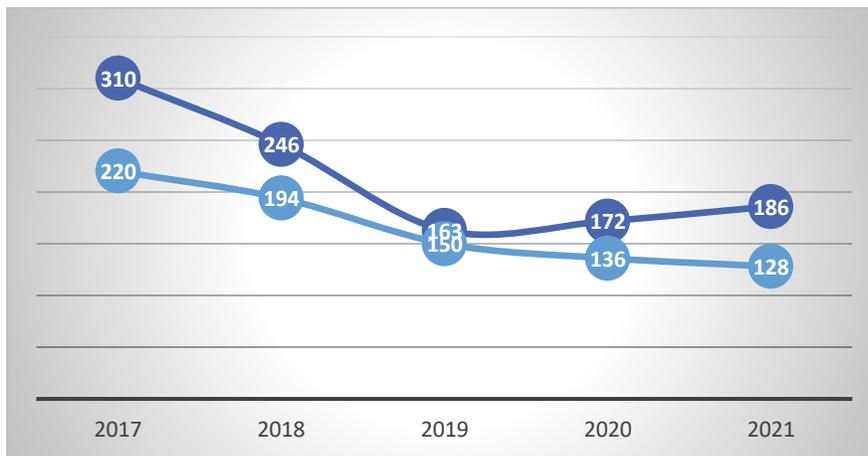
### 2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, jumlah gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Paser mengalami penurunan. Tahun 2017 jumlah pelanggaran kamtibmas yang terjadi di wilayah Kabupaten Paser ada sebanyak 310 kejadian, dengan jumlah kasus diselesaikan sebanyak 220 kasus dan tahun 2021 turun menjadi 186 kejadian, dengan jumlah kasus diselesaikan sebanyak 128 kasus.



**Grafik 2.18**

Banyaknya Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum  
Polres Paser 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser (Diolah), 2022

**Tabel 2.70**

Banyaknya Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum  
Polres Paser 2017-2021

Tahun	Kejadian	Diselesaikan
2021	186	128
2020	172	136
2019	163	150
2018	246	194
2017	310	220

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Pelanggaran Kamtibmas yang banyak terjadi adalah kasus pencurian. Sementara untuk angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Paser masih cukup tinggi.

Jumlah anggota Linmas terlatih di Kabupaten Paser pada tahun 2021 adalah sebanyak 2.872 orang, berkurang dari tahun 2020 yaitu sebanyak 2.888 orang.



**Tabel 2.71**

Jumlah Anggota Linmas Terlatih di Kabupaten Paser 2021

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Batu Sopang	209
2	Muara Samu	137
3	Tanjung Harapan	229
4	Batu Engau	131
5	Pasir Belengkong	289
6	Tanah Grogot	495
7	Kuaro	273
8	Long Ikis	473
9	Muara Komam	205
10	Long Kali	381
11	Cadangan Kabupaten	50
	<b>2021</b>	<b>2.872</b>
	<b>2020</b>	<b>2.888</b>
	<b>2019</b>	<b>2.476</b>
	<b>2018</b>	<b>2.472</b>
	<b>2017</b>	<b>2.038</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

#### 2.1.3.1.6 Sosial

Layanan urusan wajib sosial terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sehingga, sebagai tolak ukur untuk menentukan strategi dalam hal memenuhi kewajiban tersebut, seharusnya diketahui data mengenai jumlah sarana sosial seperti panti asuan, panti jompo dan panti rehabilitasi, serta jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial. Kategori PMKS di Kabupaten Paser terdiri dari Balita terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar, penyandang cacat, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban bencana alam.



**Tabel 2.72**

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tersedia

Kategori PMKS	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Anak balita terlantar	Jiwa	62	35	NA	27	25
2. Anak terlantar	Jiwa	420	458	NA	339	315
3. Lansia terlantar	Jiwa	1.176	1.059	NA	921	859
4. Penyandang cacat (disabilitas)	Jiwa	518	548	NA	801	696
5. Gelandangan dan Pengemis	Jiwa	NA	NA	NA	9	0
6. Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	485	485	118	118	163
7. Korban Bencana Alam	Jiwa	312	925	100	1412	426
8. Korban Bencana Sosial	Jiwa	0	0	364	5506	574

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Paser, 2022

Berdasarkan data pada tabel 2.69 di atas, kategori PMKS yang paling menurun adalah Korban Bencana Alam, yaitu meningkat dari 1.412 pada tahun 2020 menjadi 1.412 pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan berkurangnya bencana alam yang terjadi di Kabupaten Paser. Hal senada juga terjadi pada Korban Bencana Sosial yang menurun sebesar 574 di tahun 2021.

### 2.1.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Dalam perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, perlu mempertemukan beberapa bidang perencanaan pembangunan yang saling beririsan selain bidang ketenagakerjaan yaitu demografi, ekonomi dan pendidikan. Ketiga bidang tersebut menjadi pilar dalam program pembangunan yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, produktivitas dan distribusi tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja. Tantangan kajian ketenagakerjaan bagi pembangunan adalah mempertemukan ketersediaan angkatan kerja dengan lapangan kerja yang sesuai dan produktif secara ekonomi sehingga mampu menciptakan kemandirian warga.



Dilihat dari struktur penduduk produktif, komposisi penduduk angkatan kerja pada tahun 2021 sebanyak **136.640** orang (64,57 persen) dan bukan angkatan kerja sebanyak **74.968** orang (35,42 persen). Sebagian besar penduduk 96,22 persen dari penduduk angkatan kerja kegiatan utamanya adalah bekerja, tetapi masih ada 3,77 persen yang mencari pekerjaan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Paser mencapai 64,57% pada tahun 2021, sedangkan tingkat pengangguran penduduk usia kerja mencapai 3,77%, hal ini dapat dilihat dari TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) pada tahun 2021.

**Tabel 2.73**

Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2019-2021

Kegiatan Utama	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>137.737</b>	<b>68,75</b>	<b>142.568</b>	<b>67,88%</b>	<b>136.640</b>	<b>64,57%</b>
• Bekerja	131.471	95,45	136.131	95,48%	131.484	96,22%
• Pengangguran	6.266	4,54	6.437	4,51%	5.156	3,77%
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>69.611</b>	<b>34,74</b>	<b>67.452</b>	<b>32,11%</b>	<b>74.968</b>	<b>35,42%</b>
• Sekolah	19.092	27,42	16.515	24,48%	17.063	22,76%
• Mengurus Rumah Tangga	44.269	63,59	44.926	66,60%	50.035	66,74%
• Lainnya	6.250	8,97	6.011	8,91%	7.870	10,49%
<b>Jumlah</b>	<b>207.348</b>	<b>100,00</b>	<b>210.020</b>	<b>100,00</b>	<b>211.608</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser (Diolah), 2022

Walaupun sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser, bukan berarti sektor tersebut juga berkontribusi secara dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan tabel di bawah ini, sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 38,94% pada tahun 2021. Pada sisi yang lain, persentase sektor pertambangan dan penggalian hanya menunjukkan angka 8,23% pada tahun 2021, dimana sektor pertambangan dan penggalian ini penyerapan tenaga kerjanya masih di bawah sektor Jasa Kemasyarakatan dan perdagangan, yaitu masing-masing sebesar 16,55% dan 23,33%.



**Tabel 2.74**  
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja  
Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin (orang)		Total	%
	Lk	Pr		
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	38.625	12.577	51.202	38,94
Pertambangan dan Penggalian	10.206	615	10.821	8,23
Industri Pengolahan	3.574	2.168	5.742	4,37
Listrik, Gas dan Air	827	-	827	0,63
Bangunan	5.509	-	5.509	4,19
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	13.745	16.932	30.677	23,33
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	3.499	245	3.744	2,85
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	1.013	187	1.200	0,91
Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	11.761	10.001	21.762	16,55
<b>JUMLAH</b>	<b>88.759</b>	<b>42.725</b>	<b>131.484</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Dengan demikian, pertanian masih menjadi sektor terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Paser walaupun sumbangannya terhadap PDRB masih rendah. Di samping pertanian, sektor jasa dan perdagangan juga cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurunnya daya serap sektor pertambangan dan penggalian dan meningkatnya daya serap sektor lainnya mengindikasikan bahwa sektor lain diluar pertambangan dan penggalian secara perlahan-lahan mengalami penguatan daya serap tenaga kerja.

### 2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk menunjukkan aspek pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari kualifikasi sumberdaya manusianya atau dari tingkat pendidikan. Pada tingkat SD, APM Perempuan di tahun 2021 sejumlah 97,30%, sedangkan APM laki-laki sejumlah 98,32%. APM pada tingkat SMP, APM perempuan di tahun 2021 sejumlah 88,95%, sedangkan APM laki-laki sejumlah 102,79. Untuk tingkat SMP, jumlah partisipasi sekolahnya cenderung lebih kecil



dibandingkan dengan tingkat SD. Pada tingkat SMA, APM perempuan di tahun 2021 sejumlah 76,86%, sedangkan pada laki-laki sejumlah 84,84%

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang pemberdayaan perempuan adalah status pekerjaan bagi penduduk yang bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser pada Tahun 2021 bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 4.511 orang, selisihnya sedikit dengan PNS laki-laki yang berjumlah 2.337 orang. Jika dilihat dari seluruh Lapangan Pekerjaan, perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 42.725 orang atau 32,49%.

Angka partisipasi perempuan dalam kategori pendidikan sekolah SD-SMA ternyata tidak diikuti dengan jumlah partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja. Padahal ukuran kesetaraan sebetulnya tidak hanya selesai dilihat dari angka partisipasi sekolahnya namun juga kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan yang salah satunya direpresentasikan dalam partisipasi pada angkatan kerja. Sedangkan angka partisipasi perempuan di ranah politik (Anggota DPRD) justru sangat rendah. Di periode tahun 2010 hingga 2013 perbandingan perempuan dan laki-laki hanya 12%. Angka ini tidak mengalami lonjakan yang cukup berarti sebab pada pemilu legislatif yakni tahun 2014 hingga 2018 perbandingannya hanya 17%. Pada tahun 2019 perbandingannya sedikit meningkat menjadi 20%

Sedangkan upaya untuk perlindungan anak masih sangat perlu perhatian lebih intensif. Hingga saat ini masih terdapat balita dan anak terlantar yang membutuhkan pertolongan, untuk balita terlantar pada tahun 2021 sebanyak 25 balita, sedangkan anak terlantar pada tahun 2021 sebanyak 315 anak yang perlu ditangani. Sampai saat ini, Kabupaten Paser belum menyediakan Panti Asuhan anak yang dapat merehabilitasi kasus-kasus anak dan balita terlantar.

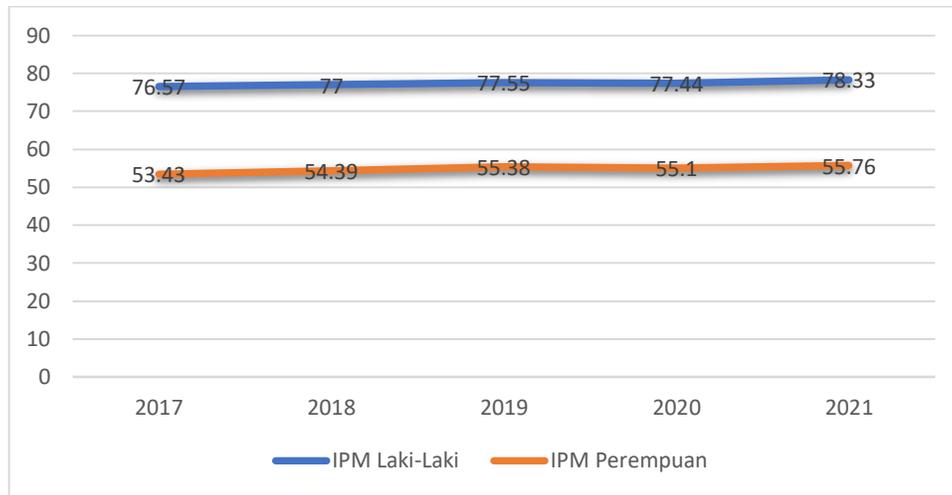
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit yang kompleks dan cukup menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta partisipasi aktif dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan. Disparitas gender masih terjadi di dalam proses pembangunan manusia di



Kabupaten Paser. Hal ini ditunjukkan oleh grafik 2.15 yang memperlihatkan bahwa selama periode 2017–2021, nilai IPM perempuan selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM laki-laki.

**Grafik 2.19**  
Perbandingan Perkembangan IPM Laki-Laki dan Perempuan  
Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2022

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi.

**Tabel 2.75**  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup Perempuan (tahun)	73,92	74,15	74,39	74,66	74,84
Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan (tahun)	13,43	13,44	13,45	13,46	13,47
Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (tahun)	7,78	7,79	8,12	8,13	8,36
Pengeluaran per Kapita Perempuan (ribu rupiah/thn)	2.733	2.869	2.968	2.902	2.965
<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	<b>69,78</b>	<b>70,64</b>	<b>71,41</b>	<b>71,15</b>	<b>71,19</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan IPG Kabupaten Paser dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung fluktuatif, dimana Indeks Pembangunan Gender pada tahun



2021 mencapai 71,19, dimana Angka Harapan Hidup perempuan 74,84 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah 13,47 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah 8,36 tahun menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di Kabupaten Paser tidak tamat SMP.

**Tabel 2.76**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Paser Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	16,67	16,67	20,00	20,00	20,00
Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	41,18	45,01	46,89	43,59	44,39
Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	23,06	23,27	23,44	23,74	23,71
<b>Indeks Pemberdayaan Gender Kab. Paser</b>	<b>62,07</b>	<b>62,76</b>	<b>66,20</b>	<b>65,66</b>	<b>65,67</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2022

IDG Kabupaten Paser mengalami peningkatan dalam kurun 2017-2019 dan menurun pada tahun 2020 mencapai angka 65,66. Angka ini menurun 0,54% dibanding tahun 2019. Melambatnya pertumbuhan IDG ini disebabkan oleh satu komponen yang mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni komponen perempuan sebagai Tenaga Profesional turun dari 46,89% pada tahun 2019 menjadi 43,59% pada tahun 2020. Meski demikian, komponen Sumbangan Pendapatan Perempuan mengalami peningkatan dari 23,44% pada tahun 2019 menjadi 23,74% pada tahun 2020.

### 2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian dari cita-cita nasional yang harus terdukung juga dengan cita-cita daerah. Produksi tanaman pangan setempat diharapkan mampu menyuplai kebutuhan pangan masyarakat. Sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan dominan dapat dimaksimalkan produksinya agar memenuhi kebutuhan warga masyarakat Kabupaten Paser secara mandiri.



**Tabel 2.77**

Produksi Padi dan Palawija (Ton) di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Jenis Produksi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Padi Sawah	36.023	23.394	30.432,17	52.366	50.864,78*
Padi Ladang	5.445	7.148	9.005,58		
Jagung	3.523	15.306	6.461	6.569	5.825*
Ubi Kayu	3.478	1.738	1.159	3.706	3.609,60*
Ubi Jalar	300	343	352	383	449,80*
Kacang Tanah	86	40	56	83	82*
Kacang Kedelai	61	-	1	20	18*
Kacang Hijau	5	3	7	14	12,50*

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Paser 2021  
Angka Sementara \*)

Dilihat dari distribusi hasil panen, kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar untuk produksi padi (sawah maupun ladang) adalah Kecamatan Long Kali dengan luas Panen sebesar 3.784,50 Ha Padi sawah, kemudian Kecamatan Pasir Belengkong dengan luas lahan 2.319,90 Ha padi sawah, disusul Kecamatan Tanah Grogot dengan luasan lahan 1.738,10 Ha padi sawah. Khusus untuk padi ladang yang biasa tersebar di daerah lahan kering, kecamatan yang memberikan kontribusi produksi padi ladang terbesar adalah Kecamatan Muara Samu dengan luasan lahan 620 Ha, Kecamatan long kali luasan 542 Ha dan disusul Kecamatan Muara komam dengan jumlah 380 Ha. Sehingga sampai saat ini Kecamatan Long Kali merupakan wilayah pertanian dengan luasan lahan produktif yang luasan sehingga menyumbang produksi padi paling besar untuk di Kabupaten Paser.

**Tabel 2.78**

Luas Panen, Produksi Padi dan Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Panen	
		Padi Sawah	Padi Ladang
1	Batu Sopang	0.00	268



No.	Kecamatan	Luas Panen	
		Padi Sawah	Padi Ladang
2	Muara Samu	3	630
3	Tanjung Harapan	0	43
4	Batu Engau	3	37
5	Pasir Belengkong	2,319.90	0
6	Tanah Grogot	1,738.10	0
7	Kuaro	110,80	155
8	Long Ikis	883,40	135
9	Muara Komam	0.00	380
10	Longkali	3.784,50	542
<b>Jumlah</b>		<b>8,842.70</b>	<b>2.183</b>

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Paser, 2022

**Tabel 2.79**  
Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Per Hektar  
di Kabupaten Paser 2017-2021

Tahun	Produktivitas Padi Sawah Per Hektar	Produktivitas Padi Ladang Per Hektar
2017	4,62	2,59
2018	4,27	2,93
2019	4.36	3,06
2020	4,29	
2021	3,87	

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Paser, 2022

Dalam perhitungan Produktivitas terjadi perubahan perhitungan yang awalnya menggunakan sistem Ubinan menjadi sistem KSA (Kerangka Sampel Area) sehingga didapat Pada tahun 2021 produktivitas padi sebesar 3,87 Ha, dalam hal ini terjadi penurunan produktivitas dari tahun 2020 kemarin sebesar 4,29 ton per hektar. Tabel di atas menunjukkan bahwa produktivitas padi cenderung berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan



bahwa potensi produktivitas padi masih bisa ditingkatkan agar sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk.

#### 2.1.3.2.4 Pertanahan

Aglomerasi Untuk pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Pemerintah Kabupaten Paser perlu dilakukan beberapa pembenahan terkait kebijakan dalam urusan pertanahan terutama dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah-tanah oleh masyarakat atau pemberian izin membuka tanah yang harus disesuaikan pola ruang. Guna mendukung program tersebut saat ini Pemerintah Kabupaten Paser sedang menyiapkan regulasi yang akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan juga kebutuhan yang ada di daerah, sehingga regulasi tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan urusan pertanahan di Kabupaten Paser.

**Tabel 2.80**  
Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Paser  
Berupa Tanah Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Aset Tanah	1728	1738	1761	1761	1753
2	Persentase Sertifikasi Tanah Milik Daerah	0	10	0	13	14
3	Jumlah Persil Bidang Tanah Diusulkan Sertifikasi	0	0	4	34	117
4	Persentase Aset Tetap Tanah tumpang tindih/dikuasai pihak ketiga	0,41	0,41	0,41	0,41	0,22

Sumber : BKAD Kabupaten Paser, 2022

Jumlah Aset Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Paser sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 1.753 persil tanah dan baru 262 persil tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atau 14% yang memiliki sertifikat dari jumlah inventaris aset tanah. Hal ini disebabkan masih banyak kendala yang dihadapi dalam penyelesaian proses sertifikat tanah, anatar lain: proses pengadaan tanah tidak tuntas sampai proses balik nama hak atas tanah, waktu proses pengurusan tanah yang cenderung lama dan melebihi tahun anggaran berjalan dan adanya gugatan dari ahli waris atau keluarga pemilik tanah. Sampai dengan tahun 2021 juga masih terdapat aset tanah yang menjadi sengketa dan masih dalam



penyelesaian proses hukum sebanyak 4 persil tanah. Namun disisi lain dengan adanya Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kabupaten Paser di fasilitasi oleh KPK (Tim Korsupgah Wilayah Kalimantan Timur) telah melaksanakan perjanjian kerjasama atau MoU dengan BPN dalam percepatan penyelesaian sertifikasi aset tanah daerah.

Aglomerasi penduduk dan peningkatan infrastruktur jasa membutuhkan pengelolaan lahan yang semakin rapi. Salah satu wujud usaha untuk mengendalikan dan mengatur pengelolaan bangunan adalah adanya IMB. IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Dengan adanya penetapan IMB di Kabupaten Paser, diusahakan akan terwujudnya ketertiban masyarakat serta kepastian hukum. Individu atau persekutuan (badan) yang akan mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai Pasal 5 ayat 1 Perda Nomor 7 Tahun 2009.

**Tabel 2.81**  
Jumlah Bangunan ber-IMB Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Bangunan ber-IMB
2017	170
2018	247
2019	320
2020	229
2021	292

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Paser, 2022



**Grafik 2.20**  
Jumlah Bangunan ber-IMB Tahun 2017-2021



Sumber : DPMP TSP Kabupaten Paser 2021

Terjadi peningkatan IMB pada tahun 2021 menjadi 292 yang sebelumnya 229 pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) semakin meningkat. Dengan adanya pengaturan dalam pendirian bangunan diharapkan rencana konstruksi bangunan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bersama.

#### 2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

##### A. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang tercantum pada pasal 17 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rencana tata ruang terdiri atas : rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang Kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Dalam pelaksanaannya penyusunan RTRW dan RRTR hingga tahun 2019 baru



menyelesaikan 1 (satu) produk perda RTRW sedangkan untuk produk RRTR belum ada yang menjadi produk hukum. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi dari penyelesaian produk RTR pada Wilayah Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel 2.82 berikut :

**Tabel 2.82**  
Kondisi Penyelesaian Produk Rencana Tata Ruang  
Kabupaten Paser s.d Tahun 2021

No.	Jenis Produk Rencana Tata Ruang Daerah	Jumlah Produk RTR	Materi Teknis	Produk Hukum Daerah (Perda)
1	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Perda Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 29 Oktober 2015	1	1	1
2	Rencana Rinci Tata Ruang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	11	6	0

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2022*

Pada kegiatan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) telah dilakukan koordinasi meski hingga saat ini masih berada pada tahapan materi teknis dan pendukungnya, kondisi tersebut diantaranya :

- a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanah Grogot (Review Tahun 2017) dan proses KLHS Tahun 2018;
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kuaro (Penyusunan Tahun 2018);
- c. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batu Sopang (Review Tahun 2018);
- d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pasir Belengkong (Penyusunan Tahun 2012);
- e. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Long Ikis (Penyusunan Tahun 2012); dan
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Long Kali (Penyusunan Tahun 2013).

Terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi belum terselesaikan produk hukum dari RRTR yang ada tersebut antara lain :



- a. Sering berubahnya pedoman penyusunan RTR yang menjadi acuan pemerintah di daerah dalam melaksanakan penyusunan sehingga membuat materi teknis yang telah terselesaikan harus dilakukan penyesuaian
- b. Adanya perbedaan kewenangan urusan dalam proses penyusunan materi teknis yang berada di Kementerian ATR/BPN dan penyusunan peta yang menjadi bagian urusan Badan Informasi Geospasial.

Tahun 2022 dilakukan penyusunan materi teknis, naskah akademik, dan renperda revisi RTRW. Sedangkan pada tahun 2023 direncanakan proses persetujuan substansi lintas sektor dan pada tahun 2024 ditargetkan penetapan revisi RTRW sudah selesai.

## B. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indikator dari kualitas lingkungan suatu daerah, hal ini dapat dilihat dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Untuk mendukung pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang ideal diperlukan pengendalian pencemaran lingkungan baik air, udara dan tanah. Akibat dari penurunan kualitas lingkungan juga menjadi salah satu penyebab dari bencana alam yang terjadi.

Berikut disajikan tabel indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir.

**Tabel 2.83**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Paser s.d Tahun 2020

Tahun	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2017	67,23
2018	70,73
2019	73,30
2020	71,17
2021	73,97

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2022



### C. Indeks Kualitas Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Oleh karena itu, untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Paser tahun 2021 diperoleh nilai 57,50 yang berarti kualitas air masuk pada kriteria sedang.

**Tabel 2.84**  
Indeks Kualitas Air di Kabupaten Paser

Jumlah Titik				Nilai Indeks Permutu				IKA
Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	
10	13	1	0	29,17	27,08	1,25	0,00	57,50

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2022

### D. Indeks Kualitas Udara

Udara merupakan sumber daya alam yang paling berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, sehingga harus dijaga dan dipelihara kelestarian karena tanpa udara, makhluk hidup bisa kehilangan kehidupannya. Dengan semakin meningkatnya aktivitas kegiatan ekonomi manusia, semisal bidang industri dan transportasi, maka secara logis semakin meningkat pula zat-zat polutan yang dikeluarkan kegiatan industri maupun transportasi tersebut. Keberadaan zat-zat polutan di udara ini tentu akan berpengaruh terhadap proses-proses fisik dan kimia yang terjadi di udara. Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Paser tahun 2021 diperoleh nilai 90,59 yang berarti kualitas udara masuk pada kriteria sangat baik.



**Tabel 2.85**  
Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Paser

Perhitungan Indeks					IKU
Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Baku Mutu			
NO2	SO2	NO2	SO2	INDEKS	90,59
6,71	7,42	0,17	0,37	0,27	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2022

### E. Indeks Tutupan Lahan

Perubahan lahan sebagai konsekuensi dari peningkatan kebutuhan akan ruang, memiliki berbagai bentuk. Namun umumnya yang menjadi sorotan adalah perubahan dari bentukan alami menjadi buatan. Hal ini dikarenakan terdapat dampak lingkungan yang menyertainya. Contohnya adalah deforestasi, yang mengubah bentukan hutan menjadi area pertanian atau perkotaan. Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Paser tahun 2021 diperoleh nilai 71,51 yang berarti kualitas tutupan lahan masuk pada kriteria baik.

**Tabel 2.86**  
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Km<sup>2</sup>) di Kabupaten Paser

TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
<b>0,53</b>	71,61	0,00108836991329572	0,53362516463823	71,51

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2022

Berdasarkan perhitungan indeks kualitas tersebut di atas indeks kualitas air masih masuk kategori sedang, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya aktivitas domestik dan kegiatan industri sepanjang perairan terutama Sungai Kandilo sebagai sumber baku air minum. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan indeks kualitas air adalah melaksanakan pengawasan dan pemantauan kualitas air sungai setiap tahunnya, dimana terdapat beberapa titik pantau pada 4 daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Paser. Pemerintah Kabupaten Paser juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha



tentang pengolahan limbah termasuk pengetatan ijin-ijin lingkungan yang kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam

## F. Emisi Gas Rumah Kaca

Efek rumah kaca merupakan kondisi yang terjadi seperti pada rumah kaca, dimana panas matahari terjebak di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menjadi hangat. Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut gas rumah kaca. Yang termasuk gas rumah kaca yang ada di atmosfer antara lain adalah karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), nitrogen dioksida (N<sub>2</sub>O), metana (CH<sub>4</sub>), dan freon (SF<sub>6</sub>, HFC dan PFC). Berdasarkan potensi emisinya maka di Kalimantan Timur ditetapkan tiga sumber emisi yaitu: sektor pengelolaan limbah, sektor pemanfaatan lahan (pertanian, kehutanan dan sektor berbasis pemanfaatan lahan lainnya) dan sektor energi, transportasi, industri. Adapun baseline disusun berdasarkan data dan informasi teknis dari bidang-bidang sesuai dengan ketentuan pembagian, Gas-gas yang dihitung dari berbagai aktivitas yang menimbulkan emisi umumnya adalah CO<sub>2</sub> (Carbon dioksida), CH<sub>4</sub> (Methane) dan N<sub>2</sub>O (Nitrogen dioksida) dengan satuan Gg/tahun CO<sub>2</sub> equivalen. Berdasarkan perhitungan pada Tabel. 2.84 maka pada tahun 2020 total emisi dari sektor energi sebesar 4,47 Gg/tahun CO<sub>2</sub> equivalen dan pada sektor pemanfaatan lahan pertanian sebesar 162,21 Gg/tahun CO<sub>2</sub> equivalen.

**Tabel 2.87**  
Data Emisi Rumah Kaca

No.	Bidang	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Energi	143,41	148,3	0,19	4,47	0
2.	Pertanian	165,29	166,09	159,38	162,21	0
3.	Kehutanan	0	-260,03	0	0	0
4.	Limbah	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL (Gg CO<sub>2</sub>)</b>	308,7	54,36	159,57	166,67	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2021



## G. Kebencanaan

Kabupaten Paser memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi iklim yang menyebabkan panjangnya musim kemarau atau musim penghujan. Untuk bencana alam banjir seringkali terjadi pada wilayah-wilayah dataran rendah dan sekitar sungai, hal ini juga dipicu karena adanya pendangkalan sungai sehingga kemampuan menampung air hujan semakin berkurang.

**Tabel 2.88**

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Paser s.d Tahun 2021

Tahun	Indeks Risiko Bencana (IRB)
2017	196,40
2018	196,40
2019	196,40
2020	196,40
2021	196,40

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, 2022



**Tabel 2.89**  
Rekapitulasi Bencana di Kabupaten Paser Tahun 2021

No.	Jenis Bencana	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2.	Pohon Tumbang	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.	Kebakaran Rumah & Bangunan	0	1	5	2	4	4	5	2	2	4	5	3
4.	Orang Tenggelam	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
5.	Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	3	35	2	0
6.	Tanah Longsor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7.	Gelombang Pasang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Gagal Teknologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Gempa Bumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Orang Hilang	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
11.	Evakuasi Mayat	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
12.	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Evakuasi Kecelakaan Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, 2022

**Tabel 2.90**

Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2018-2021

Kecamatan	2018	2019	2020	2021
Batu Sopang	2	5	4	3
Muara Samu	1	8	7	1
Batu Engau	-	-	-	-
Tanjung Harapan	-	-	-	-
Pasir Belengkong	8	6	6	6
Tanah Grogot	5	6	8	1
Kuaro	-	-	-	-
Long Ikis	3	8	6	2
Muara Komam	-	-	4	10
Long Kali	14	14	9	17
<b>Paser</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>40</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

#### 2.1.3.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan manusia adalah masalah kependudukan yang mencakup jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Karakteristik penduduk sangat memiliki pengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial-ekonomi penduduk yang biasanya dilihat dari struktur umur dan jenis kelamin.

**Tabel 2.91**

Jumlah, Laju Pertumbuhan, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Distribusi Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
Batu Sopang	27.059	0,71	9,75	24,35
Muara Samu	7.114	3,78	2,56	8,32
Batu Engau	17.423	2,68	6,28	11,56
Tanjung Harapan	8.886	0,34	3,20	12,44
Pasir Belengkong	28.852	0,90	10,39	29,14
Tanah Grogot	76.976	0,83	27,73	229,38
Kuaro	29.462	0,94	10,61	39,42
Long Ikis	41.196	0,12	14,84	34,21
Muara Komam	12.986	-0,54	4,68	7,41



Long Kali	27.648	0,26	9,96	11,59
Paser	<b>277.602</b>	<b>1,78</b>	<b>100,00</b>	<b>23,74</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Kecamatan Tanah Grogot merupakan ibukota Kabupaten Paser yang mempunyai penduduk paling banyak di Kabupaten Paser, sebaliknya Kecamatan Muara Samu merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Muara Samu sebesar 3,78%, Kecamatan Batu Engau sebesar 2,68%. Tingginya pertumbuhan penduduk pada wilayah ini tidak terlepas dari tersedianya potensi pengembangan wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Paser mengindikasikan bahwa kontribusi tertinggi dalam pertumbuhan penduduk Kabupaten Paser tahun 2021 dikarenakan tingginya migrasi dari luar provinsi yang datang mengingat Kecamatan Batu Engau merupakan kecamatan yang menjadi lokasi transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Selain itu, kecamatan Batu Engau dan Kecamatan Muara Komam merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga menjadi pintu masuk bagi migrasi penduduk, baik itu dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan maupun dari wilayah lain.

Migrasi ini terjadi dengan berbagai alasan antara lain untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan. Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari penambahan penduduk yang tinggi adalah berupa penambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumberdaya yang ada di daerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, meningkatnya jumlah pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Paser tahun 2021 mencapai 23,74 jiwa per km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Paser termasuk kategori penduduk sangat jarang. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Paser tiap tahunnya semakin bertambah, peningkatan kepadatan penduduk tersebut seiring dengan makin berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional yang terjadi di daerah ini.

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat adalah Kecamatan Tanah Grogot yaitu sebanyak 229,38 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 76.976 jiwa atau sebesar 27,73% dari total penduduk Kabupaten Paser tahun 2021. Sedangkan kepadatan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan



Muara Komam yaitu sebanyak 7,41 jiwa/ km<sup>2</sup>.

Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu tugas pemerintah dalam menjamin hak warga untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan atau warga negara Indonesia yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Layanan dasar kependudukan dan catatan sipil meliputi jumlah penduduk ber-KTP, jumlah penduduk ber-akte kelahiran serta jumlah pasangan berakte nikah. Selain merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi, ketersediaan dokumen-dokumen tersebut juga sangat mempengaruhi kualitas pendataan daerah terkait jumlah penduduk. Ataupun juga untuk menentukan target group dari program tertentu seperti program keluarga bencana dengan targetnya adalah pasangan sudah menikah yang akan diketahui jumlahnya jika terdaftar/pernah memiliki akte nikah.

**Tabel 2.92**  
Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	96,33	96,67	95,76	97,81	99,95
2	Kepemilikan akta lahir per 1000 penduduk	479	493	526	524,3	640

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Paser, 2021*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pencapaian terhadap kepemilikan Kartu Tanda Penduduk bagi masyarakat di Kabupaten Paser telah mencapai persentasi yang cukup tinggi. Hal ini tentunya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan, sehingga proses penyediaan KTP dapat dilaksanakan dengan optimal.

### 2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk konteks Kabupaten Paser, bagian ini memaparkan data mengenai jumlah program pemberdayaan masyarakat. Data tersebut berdampak pada penentuan prioritas program pemberdayaan masyarakat di tahun berikutnya.

Tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan atau ketidakberdayaan. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa.

Membangun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan harus dilakukan dengan mengubah paradigma “Membangun Desa” menjadi “Desa Membangun”. Hal ini berarti ada aset desa yang harus digali, dikembangkan, dan menjadi energi sosial yang



sangat bermanfaat bagi masyarakat, yaitu menumbuhkembangkan budaya dan nilai-nilai sosial desa seperti kegotongroyongan, kerelawanan, kesetiakawanan, keswadayaan masyarakat menuju kemandirian desa.

**Tabel 2.93**  
Jumlah Desa menurut Kategori di Kabupaten Paser, 2022

Kategori	Jumlah	%
Sangat Tertinggal	0	0
Tertinggal	0	0
Berkembang	46	33,09
Maju	76	54,68
Mandiri	17	12,23
<b>Jumlah</b>	<b>139</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian desa pada tahun 2022 di Kabupaten Paser telah mengalami peningkatan, dimana sudah tidak ada lagi desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal. Jumlah desa mandiri sebanyak 17 desa (12,23%), desa maju 76 desa (54,68%), desa berkembang 46 desa (54,68%). Pemerintah Kabupaten Paser masih terus berupaya untuk mendorong peningkatan kemandirian desa sehingga semakin banyak desa yang berubah statusnya menjadi kearah desa mandiri.

#### 2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan Keluarga Berencana (KB), disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etika dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Lahirnya program keluarga berencana antara lain bertujuan untuk menekan tingginya angka kelahiran. Program seperti ini masih sangat diperlukan karena jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bisa menjadi tidak bermakna, karena setiap peningkatan hasil pembangunan akan terserap oleh pertumbuhan penduduk. Usia antara 15-49 tahun merupakan usia subur bagi perempuan karena pada selang usia tersebut kemungkinan perempuan melahirkan anak cukup besar. Perempuan yang usianya berada

pada periode ini disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi yang berstatus kawin. Semakin banyak jumlah PUS, maka semakin banyak pula jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak maka semakin besar tanggungan kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumahtangga. Dengan demikian pembatasan jumlah anak perlu diperhatikan demi tercapainya keluarga yang sejahtera.

**Tabel 2.94**

Persentase Penduduk Perempuan Umur 10 Tahun Ke atas Menurut Status Perkawinan di Kab. Paser Tahun 2017-2021

Status Perkawinan	2017	2018	2019	2020	2021
Belum Kawin	29,10	27,06	27,75	27,45	27,27
Kawin	63,47	65,31	64,26	64,68	65,15
Cerai *)	7,44	7,64	7,99	7,87	7,58
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*) Termasuk cerai hidup dan cerai mati

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser, 2021

Pada tahun 2021, persentase penduduk perempuan 10 tahun ke atas berstatus kawin mengalami kenaikan dari 64,68 persen pada tahun 2020 menjadi 65,15 persen. Namun demikian status cerai mengalami sedikit penurunan menjadi 7,58 persen dari tahun sebelumnya sebesar 7,87 persen. Seiring dengan itu, status belum kawin juga mengalami penurunan menjadi 27,27 persen, jika di dibandingkan tahun 2020 sebesar 27,45 persen.

**Diagram 2.3**

Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Paser Tahun 2021



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser, 2021

**Tabel 2.95**

Capaian Kinerja Keluarga Berencana di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Fasilitas kesehatan KB	28
2	Kader KB	307
3	Jejaring Faskes KB	188
4	Jumlah Pasangan usia subur	36.841
5	Peserta KB Aktif	21.846
	- IUD	1.347
	- MOW	581
	- MOP	21
	- Kondom	464
	- Implant	1.947
	- Suntikan	10.606
	- PIL	6.880

*Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Paser, 2022*

Dari sisi penggunaan alat kontrasepsi, pada tahun 2021 terdapat 59,29% PUS yang menggunakan alat kontrasepsi KB dan sisanya tidak menggunakan alat kontrasepsi KB karena sedang hamil atau sedang merencanakan kehamilan, takut efek samping serta pandangan agama.

#### 2.1.3.2.9 Perhubungan

Perhubungan atau transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan bidang transportasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diberbagai sektor di daerah, daya saing, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah.

Mencermati dinamika perkembangan yang terjadi, maka perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi ke depan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, baik pada skala lokal, nasional maupun global. Tantangan pembangunan infrastruktur transportasi dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah bagaimana mewujudkan konektivitas wilayah dalam upaya peningkatan kelancaran akses kepada masyarakat pengguna jasa transportasi termasuk pendistribusian barang sampai ke pelosok, sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang merata serta mewujudkan pembangunan sektor unggulan.



Kabupaten Paser yang memiliki keunggulan dan karakteristik baik dari segi wilayah maupun jumlah penduduk. Luasnya wilayah kabupaten Paser yang mencapai 11.603,94 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 Kecamatan dengan jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti dimana diperkirakan sesuai data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 275.452 jiwa, dan bertambah 277.602 jiwa pada tahun 2021. Lebih dari 25,83% tinggal di kecamatan Tanah Grogot yang merupakan ibukota kabupaten Paser, sedangkan sisanya tidak merata tersebar di 9 kecamatan. Upaya untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar dalam kerangka pemerataan pembangunan harus didorong melalui dukungan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi yang merata, proses perencanaan pembangunan transportasi untuk lima tahun ke depan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kondisi sekarang, sasaran maupun target yang belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian target RPJMD dan Renstra sampai dengan tahun 2021, perlu digaris bawahi bahwa secara umum target output bisa tercapai, namun secara outcome masih perlu mendapat perhatian apakah dapat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat maupun terhadap aspek keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu perlu terlebih dahulu memahami kondisi permasalahan dalam penyelenggaraan dan pelayanan transportasi terhadap perwujudan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi kabupaten paser yang meliputi :

**A. Transportasi Darat**

Transportasi darat memiliki potensi yang besar dalam mempersatukan seluruh sistem transportasi. Untuk angkutan barang peran pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (*feeder*) terhadap sistem transportasi di Kabupaten Paser. Arah pengembangan transportasi darat harus selaras dan terintegrasi dengan arah pengembangan moda transportasi lainnya. Berikut data Prasarana dan sarana transportasi darat di Kabupaten Paser.

**Tabel 2.96**

Panjang Jalan dengan Tingkat Kewenangan Pemerintah Kabupaten Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Paser (km), 2021

No.	Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan			Jumlah
		Aspal	Tidak Aspal	Lainnya	
1	Batu Sopang	23,60	12,02	36,13	71,75
2	Muara Samu	8,30	2,22	14,47	24,99
3	Batu Engau	4,60	49,90	48,54	103,04
4	Tanjung Harapan	-	7,76	26,62	34,38



No.	Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan			
		Aspal	Tidak Aspal	Lainnya	Jumlah
5	Pasir Balengkong	51,50	4,96	70,46	126,92
6	Tanah Grogot	132,30	5,73	44,17	182,20
7	Kuaro	30,50	4,34	32,35	67,19
8	Long Ikis	47,60	20,70	37,85	106,15
9	Muara Komam	8,90	13,60	89,37	111,87
10	Long Kali	26,40	30,70	119,60	176,70
<b>Paser</b>		<b>333,70</b>	<b>151,93</b>	<b>519,56</b>	<b>1.005,19</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2022

Pada indikator perhubungan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Berikut jumlah kendaraan bermotor :

**Tabel 2.97**  
Jumlah Kendaraan Bermotor (Umum dan Pribadi)

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sepeda Motor			8.347	5.683	8.556
2	Mobil Penumpang					
	Umum	239	239	61	7	24
	Tidak Umum	-	-	761	301	796
3	Mobil Barang					
	Umum	346	346	122	20	48
	Tidak Umum	8415	9302	465	376	473
4	Bus Besar					
	Umum	-	-	-	-	-
	Tidak Umum	28	28	-	-	-
5	Bus Sedang					
	Umum	28	28	-	2	2
	Tidak Umum	112	110	-	-	-
6	Bus Kecil					
	Umum	2	2	-	6	6
	Tidak Umum	49	51	-	-	-
7	Kendaraan Roda Tiga					
	Umum	-	-	-	-	-
	Tidak Umum	-	-	-	-	-

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2022



Data di atas terhadap tingkat pelayanan angkutan lebih cenderung tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Saat ini pelayanan angkutan keprintisan untuk mendukung konektivitas wilayah, khususnya wilayah pedalaman masih belum optimal, antara lain belum seluruh kecamatan dilayani angkutan umum. Berikut jumlah armada dan panjang trayek.

**Tabel 2.98**  
Jumlah Armada dan Panjang Trayek Tahun 2021

Kode Trayek	Panjang Trayek (km)	Jumlah Armada (Unit)				Tarif (Rp)	Tarif /km (Rp)
		Bus Besar	Bus Sedang	Bus Kecil	Mobil Penumpang Umum		
Angkutan Perkotaan		-	-	-	18	6.000,-	
Angkutan Perdesaan							
Tanah Grogot - Kerang	55	-	-	-	17	35.000,-	
Tanah Grogot - Payo Klato	25	-	-	-	18	10.000,-	
Tanah Grogot - Bekoso	17	-	-	-	7	10.000,-	
Tanah Grogot - Pondong	19	-	-	-	8	11.000,-	
Tanah Grogot - Muara Komam	86	-	-	-	11	50.000,-	
Tanah Grogot - Lori	60	-	-	-	13	40.000,-	
Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKAP) Tanah Grogot - Penajam							
Tanah Grogot - - Penajam (MPU)	147	-	-	-	111	60.000,-	
Tanah Grogot - - Penajam (Bus)	147	9	-	1		50.000,-	
<b>Jumlah</b>	<b>409</b>	<b>9</b>		<b>1</b>	<b>203</b>		

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Paser 2022

Standar keselamatan dan keamanan transportasi darat meliputi kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana keselamatan. Berikut jumlah kendaraan bermotor wajib uji.



**Tabel 2.99**  
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Realisasi

No.	Jenis Kendaraan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Wajib Uji	Realisasi	Wajib Uji	Realisasi	Wajib Uji	Realisasi	Wajib Uji	Realisasi
1	Bus Umum								
	• Ukuran Besar	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ukuran Sedang	1	1	1	0	1	0	1	0
	• Ukuran Kecil	2	2	2	0	2	0	2	0
2	Bus Bukan Umum								
	• Ukuran besar	2	6	6	2	10	10	10	41
	• Ukuran sedang	223	245	245	283	231	220	231	121
	• Ukuran kecil	2	2	2	0	10	10	10	32
3	Mobil Penumpang Umum	164	239	239	162	239	127	239	122
4	Taksi	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pick up	5.555	5.387	5.387	3.379	5.606	3.585	5.606	3.048
6	Truk berat	13	13	13	13	14	14	14	14
7	Truk sedang	4.302	4.405	4.405	2.819	4.427	2.898	2.540	572
8	Kereta gandengan	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kereta tempelan	2	2	2	2	2	0	0	0
10	Penarik (tractor head)	1	1	1	1	2	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>10.267</b>	<b>8.629</b>	<b>10.303</b>	<b>6.661</b>	<b>10.144</b>	<b>6.864</b>	<b>8.653</b>	<b>3.936</b>

Sumber : UPTD PKB Kabupaten Paser 2022

Selain itu rendahnya pengetahuan dan kesadaran untuk tertib berlalu lintas juga perlu menjadi perhatian bersama terhadap tingkat resiko kecelakaan. Berikut jumlah kejadian kecelakaan.

**Tabel 2.100**  
Jumlah Kejadian Kecelakaan

No.	Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Kejadian Kecelakaan	Jumlah Korban			Total	Faktor Penyebab utama kecelakaan
				Meninggal dunia	Luka berat	Luka ringan		
1	2017	103	103	52	4	95	151	Manusia (84,65%) Alam (1,48%) Kendaraan (4,88%) Prasarana Jalan (8,99%)
2	2018	68	68	34	6	97	137	Manusia (68,10%) Alam (1,33%) Kendaraan (12,04%) Prasarana Jalan (1,86%)



No.	Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Kejadian Kecelakaan	Jumlah Korban			Total	Faktor Penyebab utama kecelakaan
				Meninggal dunia	Luka berat	Luka ringan		
3	2019	71	71	29	8	73	110	Manusia (85%) Alam (9%) Kendaraan (4,32%) Prasarana Jalan (1,68%)
4	2020	41	41	32	3	33	68	Manusia (70%) Alam (10%) Kendaraan (7,32%) Prasarana Jalan (12,68%)
5	2021	67	67	20	11	66	97	Manusia (83%) Alam (7,7%) Kendaraan (6,9%) Prasarana Jalan (2,4%)

Sumber : Polres Paser

Faktor penyebab utama kecelakaan sebagian besar oleh faktor manusia, namun faktor prasarana jalan juga berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan di Kabupaten Paser. Berikut rambu lalu lintas dan panjang marka jalan.

**Tabel 2.101**  
Jumlah Rambu Lalu lintas, Eksisting, Panjang Marka dan kondisinya

No.	Status	Perkiraan Jumlah Rambu yang Dibutuhkan	Rambu Eksisting			Perkiraan Panjang Jalan yang membutuhkan Marka (m)	Panjang Jalan yang sudah dilengkapi marka	
			Jumlah	Baik	Rusak		Marka Tepi	Marka Tengah
1	Jalan Nasional	68	208	168	40	294.034,65	7.681,45	12.877,9
2	Jalan Provinsi	12	78	72	6	25.200	0,00	0,00
3	Jalan Kab/Kota	470	432	400	32	141.271.550	7.636,300	3.818.150
<b>Jumlah</b>		<b>430</b>	<b>455</b>	<b>77</b>	<b>1</b>	<b>141.590.784,65</b>	<b>7.643.981,45</b>	<b>3.831.027,9</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Paser 2022

## B. Transportasi Laut

Transportasi laut atau sungai memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian daerah kabupaten Paser, dimana pengangkutan barang merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah. Keefektifan terhadap operasional pelayaran akan menurunkan biaya operasional yang memberikan dampak yang besar bagi konsumen maupun penyedia layanan transportasi itu sendiri. Beberapa wilayah kecamatan dan pesisir yang belum semua terjangkau oleh angkutan darat bagi angkutan penumpang dan barang menjadi alternatif terhadap distribusi perekonomian masyarakat kabupaten paser. Berikut jumlah bongkar muat barang di pelabuhan Kabupaten Paser.



**Tabel 2.102**  
Banyaknya Barang Bongkar dan Muat di Pelabuhan Kabupaten Paser (Ton/M3)

No.	Barang	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Bongkar	Muat								
1	Solar	340.663	0	402.993	0	374.008		401.873	0	365.450	
2	Pupuk	36.709	0	62.804	0	26.453		22.911	0	28.713	
3	Alat Berat	9.265	8.398	9.835	6.434	4.972	7.244	5.790	4.561	2.192	12.976
4	Semen	9.120	1.396	8.067	2.000	1.580		0	0	3.875	
5	AN	19.809	0	29.774	0	33.970		28.092		29.124	
6	Sirtu	30.302	17.816	37.005	10.675	20.847		10.428		30.932	
7	Container	0	0	0	0			0			
8	Aspal	0	0	0	0			0			
9	GC	0	0	0	0			0		525	150
10	Karnel										
	Eksport	0	0	0	0		0				16.585
	Domestik	1.841	24.002	0	123.301		55.236		15.840		
11	CPO										
	Eksport	0	0	0	0		0		402.158		504.093
	Domestik	0	326.293	6.400	389.798		438.360				
12	Batu Bara										
	Eksport	0	21.040.635	0	24.099.461		23.490.020		22.413.176		23.826.962
	Domestik	0	10.661.828	0	11.518.769		12.200.188		11.768.493		14.536.443
13	Penumpang	0	0	402.993	0						



Pemerintah Kabupaten Paser

No.	Barang	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
14	Import Aspal	1.935	0	0	0						
15	Cangkang	0	9.745	0	7.270		18.212		30.943		22.692
16	Kayu										
	Bulat	0	192.565	0	25.581		5.579				
	Olahan	0	3.470	0	18.353						
17	Nikel										
	Eksport	0	0	0	0						
	Domestik	0	0	0	0						
18	Konstruksi	0	0	1.258	0						
19	Batu Split	0	0	21.943	46.851	16.311	48.275	18.081	13.019	21.256	5.018
20	Pasir	0	0	11.855	0	3.102		4.487		4.193	
21	GN	0	0	240	0					525	
22	Bibit Karet	0	0		30.600						
23	Lowbad						5				
24	CPKO				4.551						
25	Rotan				94						

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022



Data tersebut diatas menunjukkan bahwa melalui sarana transportasi laut atau sungai, bahan baku maupun barang hasil produksi dari satu wilayah dapat dipasarkan ke wilayah lain dalam rangka meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan perekonomian .

**C. Transportasi Udara**

Transportasi udara sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik yang dapat melayani angkutan penumpang dan barang relatif terbatas khususnya barang bernilai tinggi dan membutuhkan waktu cepat, dan dapat melakukan penetrasi sampai keseluruhan wilayah yang tidak bias dijangkau oleh moda transportasi lain. Jaringan prasarana transportasi udara yang bersifat nasional terdiri dari simpul yang berwujud Bandar Udara dan ruang lalu lintas yang berwujud ruang lalu lintas udara. Bandar udara dibedakan berdasarkan fungsi, penggunaan, klasifikasi, status dan penyelenggaraannya dan kegiatannya.

Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Perhubungan telah berupaya untuk mengembangkan moda transportasi udara, namun hingga saat ini masih dalam proses tindaklanjut pembangunan Bandara yang sempat tertunda dalam beberapa tahun belakangan.

**2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informasi**

Implikasi bagi terbukanya teknologi informasi, juga berpengaruh terhadap meningkatnya media publik termasuk surat kabar, TV lokal dan radio di Kabupaten Paser. Media lokal berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus media politik yang menyuarakan aspirasi warga masyarakat. Meningkatnya media publik dapat dilihat dari semakin meningkatnya jenis surat kabar lokal dalam lima tahun terakhir.

**Tabel 2.103**  
Jenis Surat Kabar yang Beredar di Kabupaten Paser  
Tahun 2017-2021

Jenis Surat Kabar	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	4	4	2	2	2
Lokal	6	6	4	4	4

Sumber : Diskominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, 2022

Pada tahun 2021, surat kabar regional sejumlah 4 buah yaitu Kaltim Post, Tribun Kaltim, Koran Kaltim dan Balikpapan Pos. Selain surat kabar, muncul juga televisi lokal



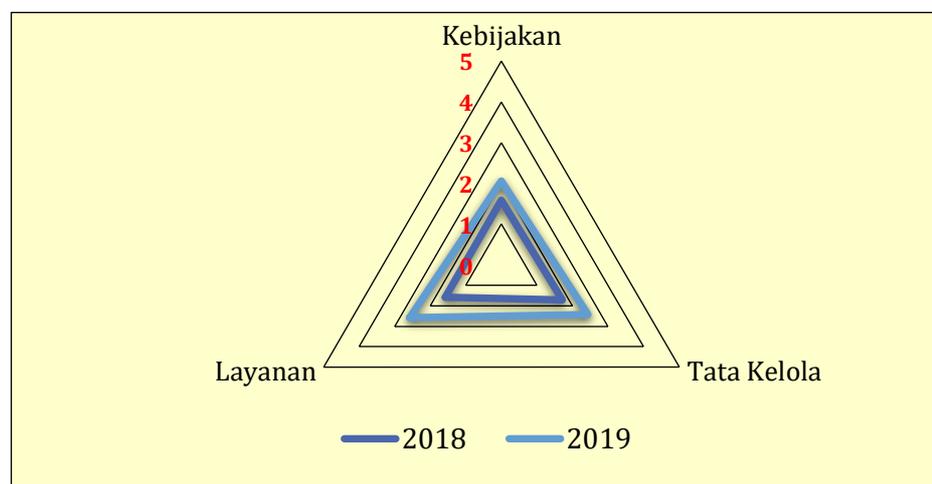
dan radio lokal yang mengudara di kawasan Kabupaten Paser misalnya Paser TV. Selain itu, untuk media nasional, terdapat 2 media yaitu Kompas dan Media Indonesia.

Tidak hanya media cetak dan elektronik, sumber informasi juga berasal dari media internet. Salah satu akses warga terhadap internet dapat melalui warnet yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Pada tahun 2018, rasio jumlah warnet terhadap 1000 penduduk sebanyak 0,21 atau total jumlah absolutnya, 55 unit. Dari total jumlah tersebut, 10 warnet merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) program MENKOMINFO yang menetapkan satu kecamatan memiliki 1 Pusat Layanan Internet Kecamatan.

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Kabupaten Paser telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui <http://www.paserkab.go.id/>. Ragam informasi terkait Paser dapat secara mudah diakses oleh siapapun juga.

Capaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Paser pada awal penilaian di Tahun 2018 adalah 1,63 dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 1,69 seperti digambarkan pada grafik di bawah ini :

**Grafik 2.21**  
Indeks SPBE Kabupaten Paser



Sumber : Diskominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, 2021

Berdasarkan data penilaian terhadap penerapan SPBE di Kabupaten Paser pada tahun 2021 mendapatkan nilai 1,36 dengan predikat kurang. Hal ini menandakan bahwa terjadi penurunan terdaap kualitas pengelolaan SPBE di Kabupaten Paser, baik itu dari



dimensi layanan, kebijakan dan tata kelola. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser perlu mendorong agar kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dapat ditingkatkan pada periode selanjutnya untuk menunjang peningkatan penilaian indeks SPBE sebagai bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Paser telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

#### 2.1.3.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan bagian dari wujud ekonomi riil masyarakat Paser. Oleh sebab itu, guna menentukan strategi pengembangan yang tepat, perlu diketahui mengenai jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten Paser. Kinerja bidang koperasi dapat dilihat dari pertambahan jumlah koperasi dan jumlah anggotanya. Dalam kurun waktu 2017-2021 presentase koperasi aktif di kabupaten Paser terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 presentase koperasi aktif menurun menjadi 56,33 persen. Menurunnya presentase koperasi aktif ini akibat dari banyaknya program yang tidak berlanjut, mitra kerja yang tidak lagi beroperasi karena pandemic covid-19 dan pengurus koperasi tidak lagi aktif. Berbeda halnya dengan keberadaan UMKM dimana tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebanyak 40.534 jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 7.882, drastisnya peningkatan UMKM ini akibat dari adanya program Bantuan Produktif Usaha Mikro. Pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif meningkat menjadi 59,44 persen, meningkatnya persentase koperasi aktif dikarenakan mulai pulihnya kondisi perekonomian pasca pandemi serta terlaksananya dengan baik pembinaan koperasi. Begitu pula dengan keberadaan UMKM terus mengalami peningkatan.

Selain itu, sebagai bagian dari pemberdayaan, perlu juga dilihat sejauh mana Koperasi dan UKM mendapat kemudahan modal. Iklim usaha yang semakin membaik tampak dengan semakin banyaknya jumlah UKM.

**Tabel 2.104**  
Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah UMKM  
di Kabupaten Paser 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Koperasi Aktif	78,44	78,52	79,32	56,33	59,44
2	Jumlah UMKM	14.398	14.638	7.882	40.534	62.480

Sumber : Dinas Perindagkop Kabupaten Paser, 2022



### 2.1.3.2.12 Penanaman Modal

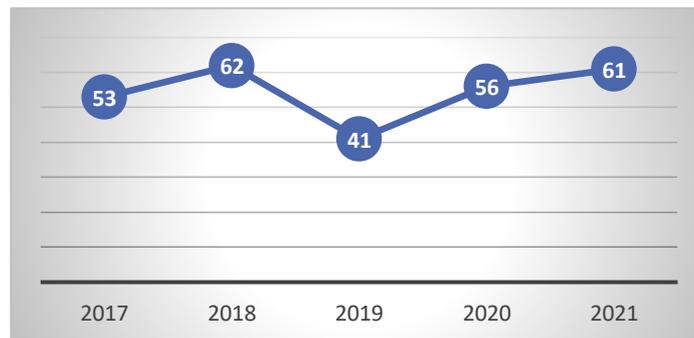
Potensi perekonomian di Kabupaten Paser tidak hanya terfokus pada pertambangan (batu bara) tetapi juga perkebunan sawit. Kedua sektor usaha tersebut padat modal dan menarik banyak investor baik yang berskala nasional maupun asing. Oleh sebab itu, tolok ukur dalam pengembangan investasi daerah dapat dilihat melalui jumlah investor berskala nasional PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) serta jumlah investasi di Kabupaten Paser.

**Tabel 2.105**  
Jumlah Investor 2017-2021

Tahun	Jumlah Investor
2017	53
2018	62
2019	41
2020	56
2021	61

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Paser, 2022

**Grafik 2.22**  
Jumlah Investor 2017-2021



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Paser, 2022

Iklim investasi yang membaik menyebabkan jumlah investor yang semakin banyak. Industri galian tambang non migas menyerap banyak investor baik dalam negeri maupun luar negeri, apalagi dengan dukungan kemudahan investasi yang diterapkan di Kabupaten Paser.



**Tabel 2.106**  
Jumlah Nilai Investasi 2017-2021

Tahun	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Dan Asing (PMDN/PMA)
2017	776.968.138.458
2018	7.935.089.676.690
2019	1.910.175.000.000
2020	657.970.000.000
2021	1.022.501.340.000

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Paser, 2022

### 2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Sebagai ujung tombak pembangunan sekaligus masa depan daerah, pemuda memerlukan berbagai dukungan layanan dasar. Sampai tahun 2021, sebanyak 8 organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan dan 285 pemuda yang terlibat dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Berikut perkembangan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Paser tahun 2018-2021:

**Tabel 2.107**  
Perkembangan Kegiatan Kepemudaan, 2018-2021

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah Peserta Kegiatan Jambore Pemuda Tk. Kabupaten (Orang)	30	30	30	30
Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Orang)	-	25	25	217
Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	15	25	25	21
Jumlah Peserta Jambore Pemuda Daerah Tingkat Propinsi (Orang)	6	6	6	
Jumlah Peserta Paskibraka Seleksi Tingkat Nasional (Orang)	4	4	4	17
Jumlah Peserta Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Nasional (Orang)	1	1	1	
Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan	8	10	10	8
Jumlah kelompok wirausaha pemuda pemula yang dibina	3	3	3	1

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2021

Selain bidang kepemudaan, dukungan terhadap organisasi olahraga juga ditingkatkan tiap tahunnya. Olahraga merupakan sarana pemersatu masyarakat karena sifatnya yang mampu menggugah kebersamaan. Sampai tahun 2021, terdapat 235 klub olahraga dan 34 organisasi pemuda yang aktif. Selain itu untuk mendukung kegiatan



olahraga sebanyak 56 unit sarana olahraga dikelola dan dikembangkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser.

Adapun Perkembangan Olahraga di Kabupaten Paser Tahun 2017-2020 adalah sebagaimana tabel 2.108 berikut:

**Tabel 2.108**  
Perkembangan Bidang Olah Raga di Kabupaten Paser, 2017-2021

URAIAN	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Klub Olahraga	210	221	231	231	235
Jumlah Gelanggang /Balai Remaja	2	2	2	2	2
Jumlah organisasi pemuda	33	34	34	34	34
Jumlah Tenaga dan pembina Keolahragaan	46	48	71	71	72
Apresiasi dan Penghargaan bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang yang Berprestasi	0	48	0	0	0
Jumlah Sarana Olahraga	54	54	54	54	56

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2021

#### 2.1.3.2.14 Statistik

Ketersediaan data merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan dalam merencanakan pembangunan. Analisis Kinerja untuk urusan wajib statistik didasarkan pada ketersediaan data mengenai PDRB Kabupaten dan Kabupaten Dalam Angka yang sampai saat ini terlaporkan terbit tahun 2022, yang berisi data terbaru hingga tahun 2021. Ketersediaan data merupakan langkah maju bagi perencanaan tetapi masih perlu dilengkapi dan diperbaharui datanya. Pemerintah Kabupaten Paser memiliki dokumen statistik yang menyediakan data-data terkait pembangunan di Kabupaten Paser. Dokumen statistik tersebut disediakan oleh BPS Kabupaten Paser, yang biasa disebut “Paser dalam Angka” dan “PDRB Kabupaten Paser” Kedua buku tersebut tersedia setiap tahun. Sedangkan Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi baru mulai dilaksanakan pada tahun 2019, seperti yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.109**  
Dokumen Statistik di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Buku Data statistik Paser Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedia sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Diolah dari berbagai sumber



### 2.1.3.2.15 Persandian

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, pemerintah Kabupaten Paser perlu senantiasa meningkatkan kewaspadaan dari berbagai hal, salah satunya keamanan informasi penting milik pemerintah daerah. Saat ini pemerintah Kabupaten Paser dalam tahap menyusun kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah, melalui penyusunan terhadap laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi, sehingga kedepannya perangkat daerah dapat menggunakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten Paser.

**Tabel 2.110**  
Kinerja Persandian Kabupaten Paser

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	2,4	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, 2021

Fasilitas persandian di Kabupaten Paser tersedia sebagai inventaris alat sandi nasional (Badan Sandi Negara) dan prosedur pemakaian persandian negara ini diampu oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian. Namun dari data jumlah permohonan pemakaian persandian dan alat sandi tersebut sampai dengan Tahun 2020 belum dimanfaatkan oleh perangkat daerah yang memfungsikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sebelumnya fasilitas persandian tersebut berada di sekretariat daerah dan dimanfaatkan oleh sekretariat daerah cq. bagian umum dalam melaksanakan tugas-tugas persandian dan komunikasi dengan kecamatan sampai dengan Tahun 2016. Pemanfaatan persandian ini berkurang disebabkan karena semakin maju dan berkembangnya teknologi komunikasi dan informatika yang menuntut bukan hanya pengamanan informasi saja tetapi berkembang pada pengamanan data dan informasi siber serta sosialisasi kebutuhan pengamanan informasi rahasia negara dan data siber. Selama tahun 2016-2020 dari 41 OPD di Kabupaten Paser hanya ada 2,4 % yang menggunakan persandian dalam komunikasi perangkat daerah.

### 2.1.3.2.16 Kebudayaan

Untuk dukungan terhadap layanan dasar kebudayaan, pemerintah daerah Kabupaten Paser menyelenggarakan festival seni dan keolahragaan. Pemerintah



mengadakan festival kebudayaan minimal setahun dua kali pada momentum peringatan 17 Agustus dan hari jadi Kabupaten Paser. Festival tersebut menampilkan atraksi kebudayaan lokal Kabupaten Paser dan menggelar pasar rakyat.

Aktifitas seni dan budaya di Kabupaten Paser masih belum berkembang optimal. Rendahnya aktifitas seni dan budaya disebabkan sanggar-sanggar kesenian masih kurang aktif. Berbagai upaya dilakukan dalam melestarikan kesenian dan budaya lokal melalui inventarisasi kesenian lokal yang ada di Kabupaten Paser.

**Tabel 2.111**  
Data Kesenian dan Budaya di Kabupaten Paser, 2021

No	Uraian	Jumlah
1.	Kesenian Lokal	25 Jenis
2.	Tradisi Lisan	17 buah
3.	Adat Istiadat	38
4.	Ritus	12
5.	Pengetahuan Tradisional	17
6.	Teknologi Tradisional	60
7.	Kesenian Tradisional	28
8.	Bahasa	10
9.	Permainan Rakyat	21
10.	Olahraga Tradisional	12
11.	Jumlah Benda Cagar Budaya	25
12.	Jumlah Wajib Budaya Tak Benda yang ditetapkan oleh Kementerian	4
13.	Jumlah Wajib Budaya Tak Benda yang ditetapkan oleh Kementerian	6
14.	Jumlah Objek Benda Kebudayaan	444
15.	Jumlah Lembaga Kebudayaan	97
16.	Jumlah Sekolah yang mengajarkan Muatan Lokal Bahasa Paser	16
17.	Jumlah Tempat Promosi Kebudayaan	4
18.	Jumlah Pementasan Seni Budaya Dalam Setahun	2

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, 2022

### 2.1.3.2.17 Perpustakaan

Data yang dibutuhkan pada bagian ini adalah mengenai jumlah perpustakaan, jumlah koleksi buku di perpustakaan serta jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya. Data-data tersebut penting untuk diketahui karena jumlah pengunjung perpustakaan menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan pendidikan di masyarakat. Saat ini, jumlah perpustakaan sejumlah 296 unit termasuk perpustakaan desa yang dikelola daerah.



**Tabel 2.112**

Jumlah Perpustakaan, Jumlah Pengunjung dan Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perpustakaan	306	306	306	306	310
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	9.035	14.863	13.900	2.682	3.244
3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	129	335	2.171	372	1.033

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, 2022

Berdasarkan Tabel di atas, terjadi penambahan jumlah perpustakaan sebanyak 4 perpustakaan desa di Kabupaten Paser yang semula pada tahun 2020 berjumlah 306 menjadi 310 pada tahun 2021. Kemudian untuk jumlah pengunjung perpustakaan juga mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan yaitu sebanyak 3.244 pengunjung pada tahun 2021, yang mana sebelumnya hanya 2.682 pengunjung pada tahun 2020. Dapat dilihat dalam dua tahun terakhir jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Paser trennya cenderung menurun. Jika dibandingkan pengunjung tahun 2019. Penurunan tersebut bukan hanya disebabkan kurangnya minat dari masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa untuk membaca buku di perpustakaan, namun juga akibat dari pandemic covid-19 dimana perpustakaan hanya dibuka setengah hari saja. Untuk koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah terdapat penambahan jumlah koleksi sebanyak 661 buku pada tahun 2021, yang semula hanya 372 buah menjadi 1.033 buah. Penambahan ini sebagian besar bersumber dari Hibah Buku dari Perpustakaan Nasional dan pengadaan pengembangan bahan pustaka Tahun Anggaran 2021. Kedepan perlu dilakukan peningkatan kerjasama dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Paser untuk menumbuhkan motivasi siswa agar gemar untuk membaca. Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah tidak adanya pustakawan yang dapat mengelola katalog buku maupun kualitas variasi koleksinya.

#### **2.1.3.2.18 Kearsipan**

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Paser baru dimulai sejak tahun 2017. Perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Paser yang telah mengelola arsip secara baku hingga tahun 2021 telah mencapai 40% dari seluruh perangkat daerah, terdapat peningkatan 4% apabila dibandingkan tahun 2020 sebesar 36%.



**Tabel 2.113**  
 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Secara Baku  
 Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Secara Baku	26	27	34	36	40

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, 2022

Pengelolaan arsip secara baku dapat dilakukan secara kontinu apabila sejumlah persyaratan dalam aspek pengelolaan arsip tersedia, seperti petugas arsip (arsiparis) dan keterampilan petugas dalam mengelola arsip memadai. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik ataupun informasinya.

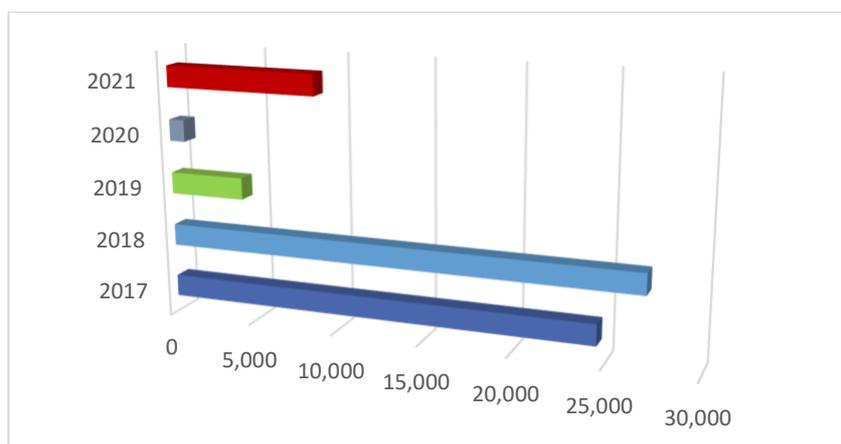
### 2.1.3.3 Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Dalam RPJMD, pembahasan tentang urusan pemerintahan pilihan ini berguna untuk menggambarkan pencapaian pembangunan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Gambaran pencapaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 2.1.3.3.1 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang sedang dikembangkan oleh Kabupaten Paser. Menurut data sektor ini selalu menunjukkan tren perkembangan yang baik dalam empat tahun terakhir. Guna mengidentifikasi tren perkembangan, potensi dan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Paser ke depan, berikut adalah data tentang jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusinya terhadap PDRB :

**Grafik 2.23**  
 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2022



**Tabel 2.114**

Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan
2017	24.562
2018	27.070
2019	4.376
2020	907
2021	8.865

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2022

Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Paser mengalami penurunan drastis menjadi sebesar 907 wisatawan, namun kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 8.865 wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan ini masih potensial untuk ditingkatkan, tetapi permasalahan utama dalam sektor pariwisata adalah kurang memadainya infrastruktur, salah satunya adalah akses jalan menuju lokasi.

#### 2.1.3.3.2 Pertanian

Pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di Kabupaten Paser. Sektor ini dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat dari sektor non-tambang. Guna mendukung hal itu maka diperlukan data yang berguna untuk menentukan target dan indikator keberhasilan pengembangan pertanian pada masa mendatang, berikut adalah data tentang produktivitas padi (padi sawah dan padi ladang) di Kabupaten Paser.

Adapun data sektoral pendukung dari sector pertanian secara umum adalah data produksi yang dihasilkan. Untuk komoditi tanaman pangan yang menjadi data pendukung pembentuk PDRB antara lain data produksi padi, palawija, dan hortikultura. Data produksi padi dihasilkan dari produktivitas dan luas panen.

Data produktivitas Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.115 berikut

**Tabel 2.115**

Produktivitas Padi Per Hektar di Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021

Tahun	Produktivitas Padi (Ton/Ha)
2016	3,65
2017	3,61



2018	3,60
2019	3,71
2020	4,28
2021	3,87

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kabupaten Paser, 2022

Produktivitas padi per hektar di Kabupaten Paser mengalami penurunan dari 4,28 Ton/Ha pada tahun 2020 menjadi 3,87 Ton/Ha pada tahun 2021, kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun sangat fluktuatif, namun secara umum kenaikan dan penurunan ini disebabkan beberapa faktor yaitu faktor diluar usaha tani seperti cuaca dan faktor didalam usaha tani seperti input produksi (ketersediaan pupuk, benih dan faktor lainnya).

Tahun 2021 luas panen padi mengalami peningkatan sebesar 331 Ha dibanding tahun 2020 namun produksi mengalami penurunan sebesar 1.501 Ton, hal ini disebabkan penurunan produktivitas padi pada tahun 2020 sebesar 4,28 Ton/Ha menjadi 3,87 Ton/Ha pada tahun 2021. Penurunan produktivitas ini disebabkan adanya beberapa kecamatan centra produksi padi mengalami banjir selama dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan April dan November-Desember 2021.

**Tabel 2.116**

Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Paser 2017-2021

Tahun	Padi	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
2021	13.157	50.864,78
2020	12.826	52.366
2019	9.649	39.438
2018	7.917	30.542
2017	9.883	41.726

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, 2022

Dalam melaksanakan pembangunan sub sektor perkebunan yang merupakan bagian integral dari sektor pertanian dan lanjutan dari pembangunan sebelumnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani perkebunan dengan cara meningkatkan produksi komoditas perkebunan sehingga secara tidak langsung berdampak pada terbukanya kesempatan



kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui usaha peremajaan (*replanting*), intensifikasi, ekstensifikasi, maupun diversifikasi dengan pola pengembangan seperti pola swadaya/parsial, perkebunan inti rakyat dan perkebunan besar swasta atau milik negara.

Luas areal kebun kelapa sawit masih mendominasi perkebunan di Kabupaten Paser. Pada tahun 2021 luas kebun kelapa sawit di Kabupaten Paser sebesar 175.577,42 Ha. Disamping kelapa sawit masih banyak lagi jenis perkebunan, antara lain karet, kelapa, kopi, kakao, lada dan lain-lain. Adapun luas masing-masing perkebunan di Kabupaten Paser pada tahun 2021 adalah karet seluas 11.666,25 Ha, kakao 48,50 Ha, kelapa 2.301 Ha, kopi 408,50 Ha, lada 85,50 Ha, dan tanaman lainnya 129,5 Ha.

**Tabel 2.117**

Luas Areal Perkebunan Kabupaten Paser Menurut Status, Tahun 2017-2021 ( Ha )

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
<b>Kelapa Sawit</b>	<b>182,585.72</b>	<b>183.574,72</b>	<b>183.574,72</b>	<b>175.042,72</b>	<b>175.577,42</b>
Perkebunan Rakyat	81,470.00	82.459,00	82.459,00	73,927.00	74.461,70
Perkebunan Besar Negara	14,401.72	14,401.72	14,401.72	14,401.72	14.401,72
Perkebunan Besar swasta	86,714.00	86,714.00	86,714.00	86,714.00	86.714,00
<b>Karet</b>	<b>13,749.50</b>	<b>13.843,00</b>	<b>13.843,00</b>	<b>14.321,75</b>	<b>11.666,25</b>
Perkebunan Rakyat	13,290.50	13.384,00	13.384,00	14.222,75	11.207,25
Perkebunan Besar Negara	399.00	399.00	399.00	399.00	399,00
Perkebunan Besar Swasta	60.00	60.00	60.00	60.00	60,00
<b>Kakao</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	<b>76.50</b>	<b>48,50</b>
Perkebunan Rakyat	125.00	125.00	125.00	76.50	48,50
Perkebunan Besar Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perkebunan Besar Swasta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Kelapa</b>	<b>2,639.50</b>	<b>2.442,50</b>	<b>2.442,50</b>	<b>2.698,00</b>	<b>2.301,00</b>
<b>Kopi</b>	<b>876.30</b>	<b>876.30</b>	<b>876.30</b>	<b>654.75</b>	<b>408,50</b>
<b>Lada</b>	<b>92,50</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>87,00</b>	<b>85,50</b>
<b>Lainnya</b>	<b>203.25</b>	<b>209,50</b>	<b>209,50</b>	<b>260,25</b>	<b>129,5</b>

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, 2022



Pengembangan komoditi sawit terbesar pada tahun 2021 dikembangkan oleh perkebunan perkebunan rakyat. Sedangkan luas perkebunan Negara dan perkebunan swasta tidak mengalami perubahan luas areal. Meskipun dilihat dari luas areal yang ada cukup luas, tidak semua perkebunan yang ada di Kabupaten Paser berada dalam kondisi produktif. Dari luas 175.577,42 Ha kebun kelapa sawit yang ada, seluas 25.478,25 Ha belum menghasilkan, dan 3.750 Ha sudah rusak/tua, sedangkan sisanya seluas 146.349,17 Ha merupakan tanaman menghasilkan (produktif).

**Tabel 2.118**  
Luas Areal Perkebunan Kabupaten Paser Menurut Kondisi,  
Tahun 2017-2021 (Ha)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
<b>Kelapa Sawit</b>					
Tanaman Belum Menghasilkan	22,791.00	15.701,00	24.986,40	27.512,00	25.478,25
Tanaman Menghasilkan	137,877.72	43.990,00	142.871,72	144.017,72	146.349,17
Tanaman Rusak	21,917.00	21.917,00	15.717,00	3.513,00	3.750,00
<b>Karet</b>					
Tanaman Belum Menghasilkan	7,152.00	6.954,00	7.154,00	8.489,50	5.860,50
Tanaman Menghasilkan	6,468.00	5.347,00	5.790,50	5.807,75	5.524,75
Tanaman Rusak	129.50	989,50	979,50	394,50	281,00
<b>Kakao</b>					
Tanaman Belum Menghasilkan	5.50	5,50	0,00	0,00	0,00
Tanaman Menghasilkan	115.00	115,00	13,50	11,50	8,50
Tanaman Rusak	4.50	4,5	111,50	65,00	40,00
<b>Kelapa</b>					
Tanaman Belum Menghasilkan	99.00	99,00	99,00	135,00	82,50
Tanaman Menghasilkan	2,095.50	2.031,50	2.031,50	2.256,50	1.856,50
Tanaman Rusak	447.00	312,00	312,00	306,00	362,00
<b>Kopi</b>					
Tanaman Belum Menghasilkan	50.30	50,30	50,30	48,00	8,00
Tanaman Menghasilkan	676.50	676,50	540,00	358,75	199,25
Tanaman Rusak	149.50	149,50	286,00	248,00	201,25



Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
<b>Lada</b>					
Tanaman Belum Menghasilkan	18.75	16.25	20.00	23,00	22,75
Tanaman Menghasilkan	77.00	69.00	62.50	54,25	56,00
Tanaman Rusak	2.50	3.50	10.50	9,75	6,75

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, 2022

Hingga tahun 2021, produk unggulan sektor perkebunan di Kabupaten Paser masih dikuasai oleh tanaman kelapa sawit. Produksi kelapa sawit Kabupaten tahun 2021 mencapai 1.622.067,445 Ton. Jumlah produksi ini jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Tanaman perkebunan lain yang juga merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Paser adalah tanaman karet, produksi tanaman perkebunan karet di Kabupaten Paser tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 9.242.958 Ton.

**Tabel 2.119**

Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021 (Ton)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Kelapa Sawit	2,029,319.17	1.979.831,30	1.987.340,35	1.802.818,00	1.622.067.445
Karet	10,640.48	8.703,85	8.213,08	8.854,08	9.242.958
Kelapa	4,037.95	3.826,90	3.683,95	4.060,28	3.283,28
Kopi	210.80	203,54	122,41	100,48	7212
Kakao	28.36	27,41	3,57	2,56	2,02
Lada	15.655	15,06	12,39	12,84	14,96
Lainnya	215.67	168,85	152,32	195,15	104,89

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, 2022

Pembangunan sub sektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak. Usaha peternakan di Kabupaten Paser pada umumnya merupakan usaha rakyat bersifat sambilan dan berskala kecil (sapi, kerbau, kambing dan unggas), namun cukup memberikan harapan dalam hal pengembangannya. Meskipun demikian ada juga usaha peternakan dalam skala besar, khususnya bagi petani



yang mempunyai modal besar. Adapun permasalahan dalam hal pembangunan sub sektor peternakan adalah relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum berkembangnya pembibitan hewan ternak, usaha peternakan rakyat masih belum dikelola secara profesional dan minimnya sarana dan prasarana penunjang usaha peternakan rakyat.

Pada umumnya peternakan di Kabupaten Paser masih bersifat tradisional, meskipun di beberapa daerah telah mendapatkan penyuluhan dari Petugas Lapangan yang didatangkan dari Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Paser dalam upaya peningkatan produksi ternak serta imunisasi ternak terhadap berbagai kemungkinan terserang penyakit.

Dari berbagai jenis populasi hewan ternak besar yang ada di Kabupaten Paser, ternak sapi mempunyai jumlah populasi yang paling banyak pada tahun 2021, yaitu 19.154 ekor, diikuti populasi kambing sebanyak 7.322 ekor, dan kerbau sebanyak 562 ekor. Selain ternak besar, di Kabupaten Paser juga terdapat beberapa jenis ternak kecil seperti ayam ras, ayam buras, itik, angsa, dan ayam petelur. Dari beberapa jenis ternak kecil tersebut, ayam ras memiliki populasi terbanyak dibanding jenis ternak yang lain, yaitu sebanyak 535.052 ekor.

**Tabel 2.120**  
Populasi Ternak Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	6	6
<b>Ternak Besar</b>					
Sapi	20.319	18.890	18.676	18.977	19.154
Kerbau	507	486	562	673	562
Kambing	5.627	7.172	7.970	7.983	7.322
Domba	51	-	-	90	83
<b>Ternak Kecil/ Unggas</b>					
Ayam Ras	105.841	192.600	383.723	593.000	535.052
Ayam Buras	154.472	139.000	135.109	139.648	157.631
Itik	10.805	10.483	11.651	10.842	5.402
Ayam Petelur	700	0	688	23.756	2.246

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022



Berbicara masalah populasi ternak kecil terutama unggas tidak terlepas dari jumlah produksi yang dihasilkan, karena kebanyakan peternak menjual telur ternaknya untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah produksi telur tergantung kepada kondisi ternak itu sendiri. Ternak yang berkembang dengan baik atau dalam keadaan sehat akan besar jumlah produksinya, namun sebaliknya apabila perkembangan ternak tidak normal atau sakit akan mengurangi jumlah daging ternak itu sendiri. Untuk itu suplai makanan kepada ternak menjadi modal utama bagi perkembangan ternak itu sendiri. Pada tahun 2021, produksi telur ayam buras mencapai 150.000 butir, itik 1.584.000 butir, sedangkan produksi ayam petelur 1.900

**Tabel 2.121**  
Produksi Telur Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021 (butir)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ayam Petelur</b>	-	31.158.000	15.579.000	1.575.000	1.900
<b>Ayam Buras</b>	10.905.300	6.977.023	7.127.023	25.933.969	150.000
<b>Itik</b>	6.837.023	644.011	693.011	2.635.000	1.584.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Untuk memenuhi kebutuhan akan daging di Kabupaten Paser, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengembangan dan peningkatan produksi ternak. Selain upaya tersebut, pada titik waktu tertentu pemerintah bahkan mendatangkan ternak-ternak tersebut dari luar wilayah Kabupaten Paser.

Berdasarkan data yang tersedia, selama tahun 2021, frekuensi pemotongan ternak mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Jumlah pemotongan sapi selama tahun 2021 adalah 2.025 ekor. Sedangkan untuk pemotongan ayam ras, pada tahun 2021 jumlah yang dipotong adalah 5.040 ekor.

**Tabel 2.122**  
Produksi Ternak yang Dipotong Kabupaten Paser, Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
<b>Ternak Besar</b>					
Sapi	3,184	2.690	2.124	2.524	2.025
Kerbau	6	6	-	66	1
Kambing	691	1.238	-	1.908	207



Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Domba	-	33	-	14	2
<b>Ternak Kecil/Unggas</b>					
Ayam Ras	1,999,589	2.649.742	383.723	2.944.562	5.040
Ayam Buras	460,622	809.212	-	117.250	0
Itik	20.576	23.500	-	14.148	14.148

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Dari tahun ke tahun produksi perikanan Kabupaten Paser menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama produksi perikanan budidaya walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena permintaan produk perikanan untuk ekspor khususnya udang windu mengalami penurunan akibat adanya pandemic Covid-19. Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap baik laut dan perairan umum daratan cenderung sangat fluktuatif. Hal ini disebabkan karena produksi perikanan laut sangat dipengaruhi oleh musim tangkap ikan. Sedangkan untuk perikanan tambak tidak dipengaruhi oleh musim tangkap ikan dan lebih cenderung dipengaruhi oleh sistem pengelolaan budidaya tambak tersebut

Tahun 2021 total produksi perikanan Kabupaten Paser mengalami kenaikan dari 2020 dari 22.875,83 menjadi 24.692,21 di tahun 2021 atau sebesar 7,94%, dapat dilihat dari tabel 2.123 di bawah ini.

**Tabel 2.123**  
Produksi Perikanan Kabupaten Paser Menurut Jenis Produksi,  
Tahun 2017-2021 (Ton)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Perikanan Laut	10.825,4	11.207,80	10.884,30	10.523,60	10.611,50
Perikanan Umum	112,3	111,4	69,20	69,50	70,00
Tambak	11.912,5	12.689,9	15.726,55	12.073,24	13.802,87
Kolam	157,2	210,6	239,73	203,14	204,04
Keramba	6,7	9,7	4,40	2,75	3,80
Rumput Laut	400	183,4	-	3,6	-

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Paser, 2022



**Tabel 2.124**  
Luas Budidaya Tambak, Kolam, Keramba, Rumput Laut  
Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Tambak</b>					
Potensi	32,750	32,750	32.749,59	32.750,00	32.750,00
Manfaat	15,766	15,766	15.765,99	15.940,00	13.060
<b>Kolam</b>					
Potensi	706.00	706.10	706.10	706,00	706,00
Manfaat	98,50	120.00	120.00	120,34	120,34
<b>Keramba</b>	23.00	23.00	23.00	-	-
<b>Rumput Laut</b>	6,60	46.80	46.80	-	-

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Paser, 2022

### 2.1.3.3.3 Kehutanan

Kerusakan hutan merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Paser. Dalam rangka menentukan strategi serta prioritas program rehabilitasi hutan pada masa mendatang, diperlukanlah data tentang kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Paser. Berikut disajikan data dalam bentuk tabel.

**Tabel 2.125**  
Luas Kebakaran Hutan, Rehabilitasi Lahan dan Kebun bibit (Ha)  
di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020
Kebakaran Hutan (CA)	149,1	-	-	-
Rehabilitasi Lahan Luar Kawasan	-	-	17	-
Rehabilitasi Lahan Dalam Kawasan	-	-	168	50
Reklamasi Kawasan Hutan	-	-	-	-
Kebun Bibit	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2022



Isu kerusakan hutan di Kabupaten Paser selalu dihubungkan dengan perluasan area perkebunan sawit sebagai salah satu penyumbang PDRB terbesar. Apabila dibandingkan dengan wilayah perkebunan sawit di Indonesia, kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Paser tergolong kecil. Namun sekecil apapun kerusakan hutan adalah sebuah permasalahan yang besar bagi lingkungan.

#### 2.1.3.3.4 Perdagangan

Bagian ini menggambarkan kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Paser. Sehingga, jumlah pedagang dan jumlah kelompok pedagang merupakan hal dasar yang harus diketahui. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas program pengembangan di sektor perdagangan, berikut adalah data tentang jumlah pedagang di Kabupaten Paser:

**Tabel 2.126**  
Jumlah Pedagang dan Kelompok Pedagang  
di Kabupaten Paser Pada Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Pedagang	Jumlah Kelompok Pedagang
2017	9.825	2
2018	7.231	2
2019	7.997	2
2020	8.453	2
2021	8.949	2

Sumber : Dinas Perindagkop Kabupaten Paser, 2022

Jumlah pedagang di Kabupaten Paser dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih mengalami fluktuatif, pada tahun 2017 jumlah pedagang masih lebih banyak dibandingkan tahun 2019, namun demikian di tahun 2020 dan 2021 terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten Paser mulai membaik dan menggeliat, sehingga pedagang di dalamnya mengalami peningkatan, hal ini juga dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang membaik dalam dua tahun terakhir.

Dibandingkan dengan jumlah pedagang yang cenderung labil, jumlah kelompok pedagang di Kabupaten Paser menunjukkan tren yang stabil. Dalam kurun waktu 5 tahun, dari 2017 hingga 2021 tidak ada penambahan jumlah kelompok pedagang. Kelompok pedagang hanya ada 2 kelompok, yaitu kelompok pedagang pasar tradisional dan kelompok pedagang pasar modern.



### 2.1.3.3.5 Perindustrian

Perindustrian merupakan bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi. Data mendasar yang diperlukan untuk menentukan strategi pengembangan industri di Kabupaten Paser adalah data mengenai pertumbuhan industri. Berikut adalah data uraian data tentang pertumbuhan industri di Kabupaten Paser selama 2017-2021:

**Tabel 2.127**

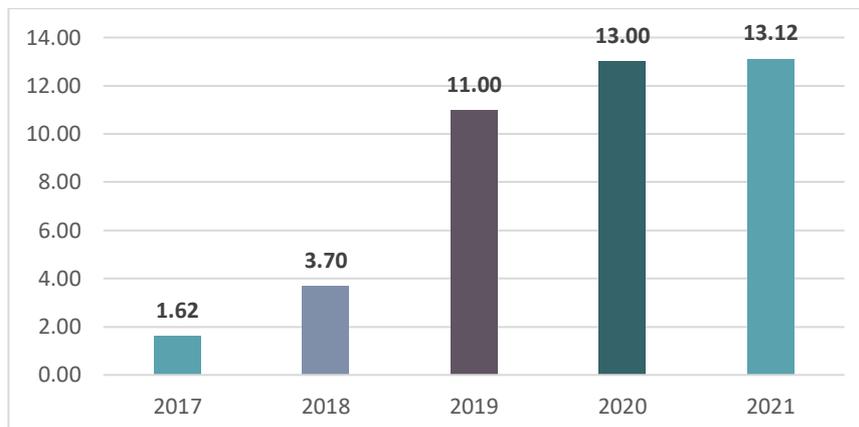
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Tahun	Pertumbuhan Industri
2017	1,62%
2018	3,70%
2019	11%
2020	13%
2021	13,12%

Sumber : Dinas Perindagkop Kabupaten Paser, 2022

**Grafik 2.24**

Pertumbuhan Industri di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Perindagkop Kabupaten Paser, 2022

Industri rumah tangga di Kabupaten Paser terus menunjukkan tren kenaikan. Walaupun jumlahnya tidak begitu besar jika dibandingkan dengan industri pertambangan. Hasil temuan lapangan mengindikasikan bahwa belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang pada satu sisi justru memiliki keunggulan komparatif dan turunya daya beli masyarakat turut serta berpengaruh terhadap lambatnya pertumbuhan industri di Kabupaten Paser.



### **2.1.3.4 Penunjang Urusan**

#### **2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan**

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Perencanaan Pembangunan Daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pada orientasi proses, perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. Pada orientasi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser yang merupakan pedoman perencanaan tahunan adalah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Paser Tahun 2006-2025 2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan harus konsisten antar perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Hal ini dibuktikan dengan terakomodasinya 100% program yang ada di RPJMD dalam RKPD maupun APBD.

#### **2.1.3.4.2 Keuangan**

##### **A. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Daerah**

Tata kelola keuangan daerah Paser masih menyisakan kendala. Walaupun opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Paser yang selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan diikuti oleh capaian predikat nilai LPPD yang berada pada kriteria “Tinggi” hingga “Sangat Tinggi” namun tidak berbanding lurus dengan capaian AKIP Kabupaten Paser yang belum dapat memperoleh predikat “Baik”. Salah satu kendala terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ialah terkait pengelolaan aset dan pengelolaan pendapatan yang dinilai masih belum optimal menunjang belanja pada APBD. Untuk itu ke depan diperlukan suatu organisasi yang dapat mengelola aset dan pendapatan secara optimal.



**Tabel 2.128**

Perolehan Opini BPK, LPPD dan AKIP Kabupaten Paser

Hasil Penilaian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai EKPPD	2,9	2,86	2,8	2,69	-
Nilai Evaluasi AKIP	56,21	57,76	57,76	58,41	58,93

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2022

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Paser meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Paser masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas.

Selain itu, kendala yang sangat penting untuk segera diatasi adalah meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, serta mencapai pelayanan prima pada masyarakat. Adanya beberapa kasus korupsi yang melibatkan oknum PNS masih mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah belum sepenuhnya bebas dari KKN. Pelaksanaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) masih harus terus ditambah guna menjamin aparatur bebas dari praktek-praktek KKN.

Dalam menjalankan perannya melayani masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten harus membuka akses informasi pelayanan, misalnya informasi pada anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RTRK, layanan KTP, KK dan surat-surat keterangan lainnya. Potensi penguat dalam proses pembangunan Kabupaten Paser harus juga nampak pada peran masyarakat, maka masyarakat secara terstruktur dan terencana harus dilibatkan dalam proses dan pengawasan pembangunan Paser, termasuk dalam upaya tindak pencegahan korupsi. Salah satu media komunikasi partisipasi masyarakat adalah layanan interaksi on-line. Masukan dan partisipasi masyarakat harus dipastikan masuk dan ditanggapi, serta aduan permasalahan harus sampai dan dicarikan solusinya.

Pemerintah Kabupaten Paser telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan beberapa tahun berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dapat



dipertanggungjawabkan dan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara yang dimiliki. Sampai dengan tahun 2021, dana SILPA tercatat sekitar 16,21% terhadap realisasi APBD, dengan seluruh program terlaksana. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat sebesar 22,92% terhadap realisasi APBD.

Pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Paser memang masih lambat jika dilihat dari capaian indeks reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri oleh Inspektorat Kabupaten Paser.

**Tabel 2.129**

Capaian Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Paser

No	Komponen/Sub Komponen	Hasil PRB		
		Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
1	Komponen Pengungkit	25.03	26.52	27,25
2	Komponen Hasil	28.63	29.27	28,80
<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>53.66</b>	<b>55.81</b>	<b>56,05</b>

Sumber: *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, 2022*

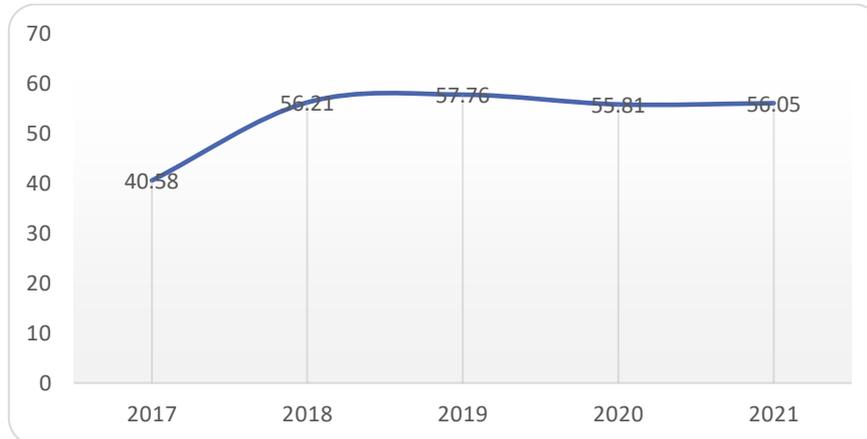
Jika dilihat dari hasil penilaian mandiri di atas, reformasi birokrasi di Kabupaten Paser dapat dikatakan berjalan lambat, mengingat agenda reformasi birokrasi secara nasional pelaksanaannya sudah memasuki tahun akhir dari roadmap reformasi birokrasi 2015-2019. Sedangkan pada kondisi sampai dengan Tahun 2021 nilai indeks reformasi birokrasi Kabupaten Paser masih berada pada kategori cukup. Ada beberapa faktor penyebab pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Paser berjalan lambat, diantaranya dapat dilihat dari komponen pengungkit/proses pada sub komponen penataan dan penguatan organisasi dan penatalaksana organisasi, penataan sistem manajemen SDM serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang menunjukkan skor 40-60% dari nilai maksimal pengungkit/proses.

Penilaian evaluasi AKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Paser pada tahun 2020 yaitu 55,81 dan pada tahun 2021 yaitu 56,05. Hal ini merupakan capaian yang belum bisa dikatakan baik. Perkembangan capaian nilai AKIP Kabupaten Paser dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik 2.25 di bawah ini:



**Grafik 2.25**

Perkembangan Nilai AKIP Kabupaten Paser 2017-2021



Sumber : Bagian Organisasi, 2022

Beberapa penjelasan yang direkomendasikan terkait nilai capaian SAKIP Kabupaten Paser belum dapat meraih predikat “Baik” disebabkan *pertama*: masih ditemukan ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada RPJMD, RENSTRA dan dokumen perjanjian kinerja hingga level terendah. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada. Rumusan tujuan dan sasaran strategis masih bersifat proses dan belum berorientasi pada hasil/*outcome*, dengan kata lain keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis tidak selalu memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. *Kedua*: monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target-target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada perangkat daerah hingga level yang paling rendah belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektifitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal. *Ketiga*: program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tidak relevan dengan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut dapat menimbulkan pemborosan anggaran karena tidak relevan dengan kinerja yang ingin dicapai oleh daerah.

#### **2.1.3.4.3 Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Paser dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2017 - 2021 berdasarkan jenis kelamin). Jumlah PNS & CPNS di tahun 2021 berjumlah 4.511 orang terdiri dari 4.372 PNS dan 139 CPNS.



**Tabel 2.130**

Jumlah Pegawai Daerah Kabupaten Paser Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021

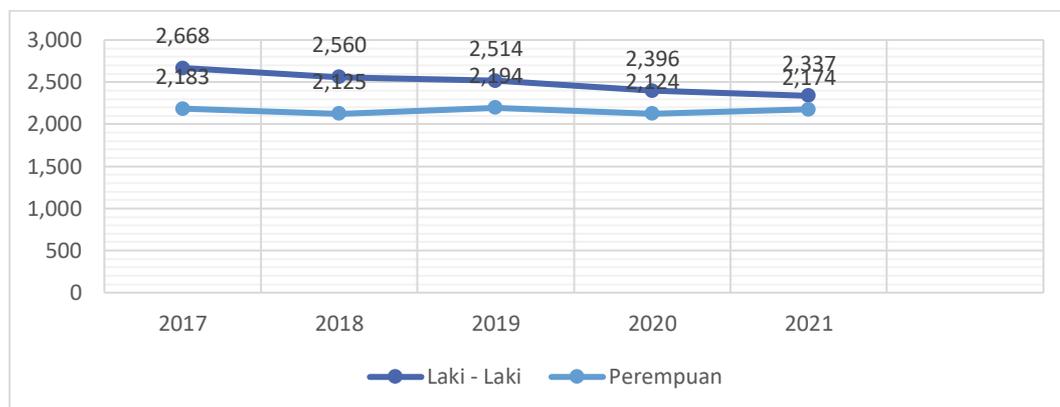
Tahun	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
2017	2.668	2.183	4.851
2018	2.560	2.125	4.685
2019	2.514	2.194	4.708
2020	2.396	2.124	4.520
2021	2.337	2.174	4.511

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Pada tahun 2021 jumlah Aparatur Negara Pemerintah Kabupaten Paser berjumlah 4.511 orang, yang terdiri dari 2.337 atau 51,81% Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 2.174 atau 48,19% Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.

**Grafik 2.26**

Jumlah Pegawai Daerah Kabupaten Paser Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser (Diolah), 2022

**Tabel 2.131**

Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2021

Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>Eselon II</b>			
Eselon II A	1	0	1
Eselon II B	24	3	27
<b>Eselon III</b>			
Eselon III A	46	10	56



<b>Eselon</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Eselon III B	86	29	<b>115</b>
<b>Eselon IV</b>			
Eselon IV A	291	181	<b>472</b>
Eselon IV B	46	21	<b>67</b>
<b>Non Eselon</b>			
Non Eselon	1.843	1.930	<b>3.773</b>
<b>Total</b>	<b>2.337</b>	<b>2.174</b>	<b>4.511</b>

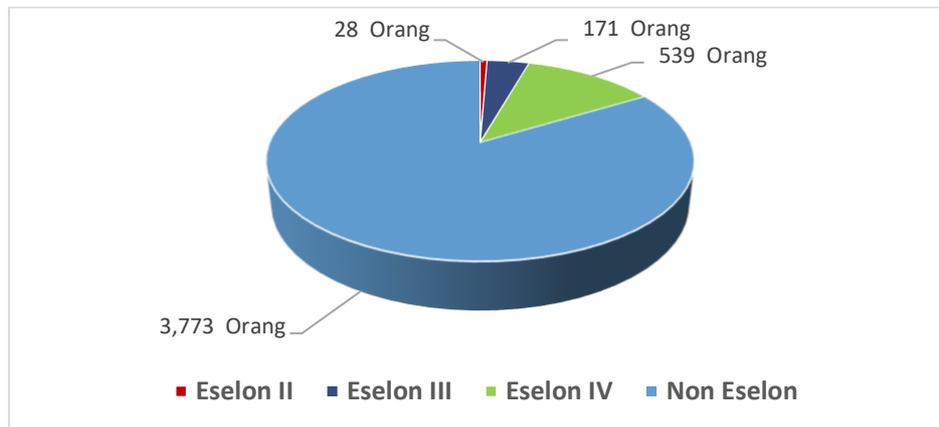
Sumber : BKPSDM Kabupaten Paser, 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas terdapat 27 Aparatur untuk Eselon II yang meliputi Eselon II.A dan Eselon II.B, 171 Aparatur untuk Eselon III yang meliputi Eselon III.A dan Eselon III.B, 539 Aparatur untuk Eselon IV yang meliputi Eselon IV.A dan Eselon IV.B serta 3.773 Aparatur untuk Non Eselon. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan dari total jumlah pegawai baik PNS maupun CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, yakni 4.511 Aparatur. Adapun komposisi rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon di Kabupaten Paser tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Eselon II berjumlah 28 orang atau 0,6% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 25 orang berjenis kelamin laki-laki dan 3 orang berjenis kelamin perempuan.
- b. Eselon III berjumlah 171 orang atau 3,79% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 132 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 39 orang yang berjenis kelamin perempuan..
- c. Eselon IV berjumlah 539 orang atau 11,95% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 337 orang berjenis yang kelamin laki-laki dan 202 orang yang berjenis kelamin perempuan.
- d. Non Eselon berjumlah 3.773 orang atau 83,64% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 1.843 orang berjenis yang kelamin laki-laki dan 1.930 orang yang berjenis kelamin perempuan.



**Diagram 2.4**  
Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon  
Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2021

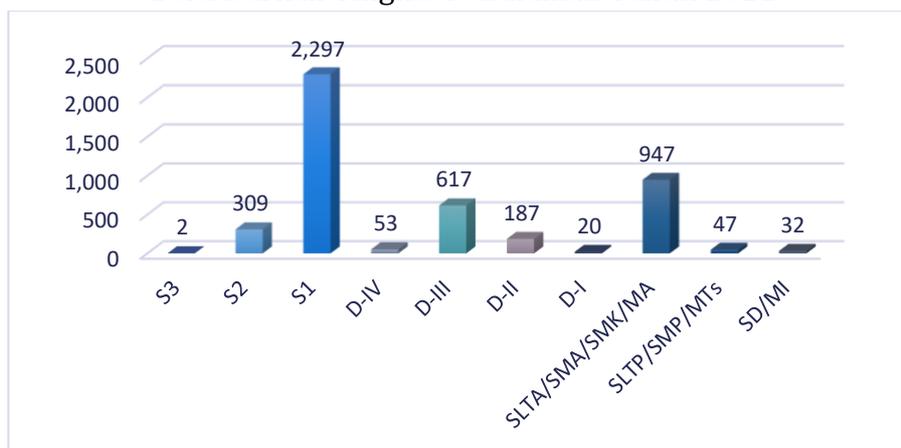


Sumber : BKPSDM Kabupaten Paser, 2022

Selain itu dari sekian jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, Pegawai (PNS dan CPNS) untuk tingkatan pendidikan S-1 (Sarjana) mendominasi tingkat pendidikan Aparatur Negara di Kabupaten Paser, yakni di angka 2.297 atau sekitar 50,92% dari total 4.511 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 1.100 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1.197 orang berjenis kelamin perempuan. Untuk tingkatan pendidikan paling sedikit berada di tingkat pendidikan S-3 yang terdiri dari 2 orang atau sekitar 0,04%, dari total 4.511 Aparatur Negara, yakni 1 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan.

Adapun komposisi perbandingan jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan di tahun 2021 tersebut dapat dilihat pada tabel 2.132 dan grafik 2.27 berikut ini.

**Grafik 2.27**  
Jumlah Sumber Daya Aparatur (PNS dan CPNS)  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021



Sumber : BKPSDM Kabupaten Paser, 2022



**Tabel 2.132**  
Jumlah Sumber Daya Aparatur (PNS dan CPNS)  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Jenis Kelamin di Tahun 2021

Jenis Golongan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
S3	1	1	2
S2	206	103	309
S1	1.100	1.197	2.297
D-IV	29	24	53
D-III	178	439	617
D-II	95	92	187
D-I	7	13	20
SLTA/SMA/SMK/MA	642	305	947
SLTP/SMP/MTs	47	0	47
SD/MI	32	0	32
<b>Total</b>	<b>2.337</b>	<b>2.174</b>	<b>4.511</b>

Sumber : BKPSDM Kabupaten Paser, 2022

Dari tabel dan grafik tingkat pendidikan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan S3 sebanyak 2 orang atau 0,04%, Tingkat Pendidikan S2 sebanyak 309 orang atau 7,07% dan Tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2.297 orang atau 50,92% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan D-IV sebanyak 53 orang atau 1,17%, Tingkat Pendidikan D-III sebanyak 617 orang atau 13,68%, Tingkat Pendidikan D-II sebanyak 187 orang atau 4,15% dan Tingkat Pendidikan D-I sebanyak 20 orang atau 0,44% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan SLTA/SMA/SMK/MA sebanyak 947 orang atau 20,99% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan SLTP/SMP/MTs sebanyak 47 orang atau 1,04% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan SD/MI sebanyak 32 orang atau 0,71% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.



#### 2.1.3.4.4 Pengawasan

Peningkatan sistem pengawasan internal menjadi hal pokok sebagai tindakan pertama dalam upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Jika dilihat dari tabel di bawah ini menunjukkan tingkat maturitas SPIP Kabupaten mengalami penurunan penilaian, dimana pada tahun 2020 berada pada level 3 (terdefinisi), akan tetapi pada tahun 2021 penilaian maturitas SPIP berada pada level 2 (berkembang).

**Tabel 2.133**  
Penilaian Penyelenggaraan SPIP

No	Elemen SPIP	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen
1	Penetapan Tujuan	40,00%	2,500	1,000
2	Struktur dan Proses	30,00%	2,727	0,818
3	Pencapaian Tujuan SPIP	30,00%	2,850	0,855
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>		<b>2,673</b>
	<b>Keterangan</b>		<b>Level 2 (Berkembang)</b>	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Paser, 2021

Berdasarkan penilaian tersebut, masih terdapat beberapa catatan terhadap pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, diantaranya adalah pada elemen penetapan tujuan, dimana terdapat ketidakselarasan antara sasaran strategis pemerintah daerah dengan sasaran strategis perangkat daerah. Selain itu, dari elemen struktur dan proses, catatan terhadap penilaian elemen ini adalah terkait dengan lemahnya penegakkan integritas dan nilai etika, belum diterapkannya manajemen kinerja yang baik, masih lemahnya pengumpulan data kinerja serta monitoring dan evaluasi yang belum berjalan dengan baik, proses manajemen risiko yang belum melekat pada proses bisnis, masih lemahnya pemerintah daerah dalam menentukan rencana tindak pengendalian, pelaksanaan reviu kinerja yang dilakukan belum mampu menjabarkan kinerja perangkat daerah dari level yang paling tinggi ke level paling terendah dan belum adanya perbaikan atas dokumen perencanaan pada tiap perangkat daerah, indikator dan ukuran kinerja yang dirumuskan belum menggambarkan dan berorientasi outcome/hasil serta belum memenuhi kriteria spesifik, measurable/terukur, relevan, dan cukup sebagai alat ukur kinerja daerah. Selain itu informasi tentang kinerja pemerintah daerah belum memadai dan whistle blowing



system belum tersosialisasi dan terimplementasi dengan baik di Kabupaten Paser. Kemudian Pemerintah Kabupaten Paser belum menerapkan pemantauan berkelanjutan yang baik di perangkat daerah pada saat penyusunan laporan kinerja, dan evaluasi terpisah belum terlaksana dengan baik. Pada elemen pencapaian tujuan SPIP, catatan yang diberikan adalah terkait dengan belum selarasnya sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di perangkat daerah, masih banyaknya aset yang dalam kondisi kurang baik dan rusak berat, serta masih terdapat temuan ketaatan terhadap peraturan oleh BPK RI di Kabupaten Paser selama 5 tahun berturut-turut yang lebih dari 5 temuan

#### **2.1.3.4.5 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat**

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPJM dan RKPD. Selain itu, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD.

#### **2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Pada level tersebut, optimalisasi potensi daerah secara optimal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, maka kondisi daerah Kabupaten Paser terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia (SDM).



### 2.1.4.1 Aspek Daya Saing

Beberapa indikator yang digunakan dalam kerangka analisis kinerja atas kemampuan ekonomi daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita. Dalam skema daya saing daerah, kedua indikator tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana potensi maupun hambatan bagi daerah dari segi ekonomi untuk mencapai visi pembangunan. Berikut adalah tabel yang memuat data tentang konsumsi rumah tangga per kapita dan konsumsi rumah tangga non-pangan per kapita di Kabupaten Paser :

**Tabel 2.134**  
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (%) Tahun 2017-2021

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Sub Sektor Pangan Per Kapita	Konsumsi Rumah Tangga Sub Sektor Non-Pangan Per Kapita
2017	55,22	44,78
2018	51,83	48,17
2019	51,95	48,05
2020	52,09	47,91
2021	48,93	51,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, indikator tersebut masuk ke dalam fokus kemampuan ekonomi daerah yang menentukan daya saing Kabupaten Paser. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan konsumsi rumah tangga sub sektor pangan per kapita sebesar 3,16%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Paser di bidang ekonomi perlu menjadi perhatian. Pengeluaran konsumsi rumah tangga sub sektor pangan per kapita ini masih fluktuatif dan belum stabil, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian di Paser masih perlu ditingkatkan.

Berbeda halnya dengan konsumsi rumah tangga sub-sektor pangan per kapita, konsumsi rumah tangga non-pangan per kapita justru mengalami peningkatan sebesar - 3,16% dari tahun sebelumnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga sub sektor non-pangan per kapita ini juga masih fluktuatif dan belum stabil.



### 2.1.4.2 Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan, karena investasi berpengaruh pada kuantitas permodalan di suatu daerah, pembukaan lapangan kerja, permintaan dan penawaran, serta pengaruh lain yang berhubungan dengan kegiatan sosio-ekonomi masyarakat. Dalam rangka mengetahui potensi dan hambatan yang dalam berinvestasi di Kabupaten Paser, maka dilakukanlah analisis terhadap beberapa indikator dalam tabel berikut:

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Daerah, DPMPTSP, Kabupaten Paser, pada tahun 2020 rata-rata Kabupaten Paser memiliki lama waktu perijinan selama 5 jam. Hal ini berlaku untuk 6 jenis perijinan, seperti SIUP, TDP, IUI, TDI, IMB dan HO. Lima jam adalah waktu tergolong cepat jika berpijak kepada Standar Operasional Prosedur DPMPTSP. Cepatnya proses perijinan ini mengindikasikan bahwa proses perijinan semakin baik dan mampu mendukung peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Paser.

**Tabel 2.135**  
Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Retribusi Jasa Umum	6	8	6	9	8
Retribusi Jasa Usaha	11	11	10	11	8
Retribusi Perijinan Tertentu	4	4	3	3	3
<b>Jumlah Retribusi</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>19</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, 2022

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2017 Kabupaten Paser memiliki 21 jenis retribusi. Retribusi tersebut berhubungan dengan iklim investasi. Kedua puluh satu retribusi tersebut terdiri dari 6 retribusi jasa umum, 11 retribusi jasa usaha dan 5 retribusi perijinan tertentu yang ditangani oleh DPMPTSP, Kabupaten Paser. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 19 macam retribusi daerah yang dilaksanakan pemungutannya. Belum ada indikasi bahwa jenis-jenis retribusi tersebut berpengaruh kurang baik terhadap iklim investasi di Kabupaten Paser selama tahun terakhir



**Tabel 2.136**

Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Jenis Perda	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perda yang terkait perijinan	12	12	12	12	12

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Paser, 2022

Dari tahun 2017 hingga 2021, jumlah perda yang terkait perijinan di Kabupaten Paser berjumlah tetap. Tidak ada kenaikan atau penurunan sama sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya penyesuaian jumlah Perda tentang perijinan dengan isu-isu strategis di bidang perijinan, sehingga Perda mampu mendukung aspek daya saing Kabupaten Paser dengan baik.

#### 2.1.4.3 Angka Kriminalitas

Angka kriminal umum dan criminal khusus di Kabupaten Paser mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 186 kasus, sedangkan tahun sebelumnya sebanyak 172 kasus. Beberapa kasus kriminalitas umum yang terjadi seperti kasus curat, kasus curanmor, penganiayaan, kebakaran, percobaan pencurian, percobaan pemerkosaan sedangkan kriminal khusus terjadi seperti kasus korupsi dan kasus illegal logging. Hal ini mengindikasikan masih perlunya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing, serta perlunya tindak pencegahan yang lebih intensif

**Tabel 2.137**

Angka Kriminalitas di Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Tahun	Angka Kriminalitas
2017	310 Kasus
2018	246 Kasus
2019	163 Kasus
2020	172 Kasus
2021	186 Kasus

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

#### 2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

SDM merupakan faktor terpenting dalam rangka mewujudkan visi pembangunan, karena SDM secara teknis menentukan kualitas kerja pemerintah mulai dari aspek



perencanaan hingga implementasi. Selain itu, kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap perwujudan visi pemerintah daerah karena bersentuhan langsung dengan aspek strategis maupun teknis. Sehingga, analisis kinerja pada fokus SDM dimaksudkan untuk mengetahui potensi serta kelemahan yang dialami. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator sebagai berikut:

**a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)**

Kualitas pekerja yang bekerja pada seluruh lapangan usaha dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja dapat diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, karena semakin tinggi tingkat pendidikan diperkirakan kemampuan dan keterampilan mereka akan bertambah.

**Tabel 2.138**

Banyaknya Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang di tamatkan	laki - laki	%	Perempuan	%	Total	%
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0	0	0	0	0	0
Tidak/Belum Tamat SD	7	0,44	0	0,00	7	0,35
SD/Ibtidaiyah	20	1,24	1	0,26	21	1,05
SMP Umum/ Kejuruan/Sederajat	70	4,35	10	2,57	80	4,00
SMA Umum/Kejuruan/Sederajat	1299	80,73	249	64,01	1548	77,48
Program Diploma I/II/II	61	3,79	32	8,23	93	4,65
Program DIV/S1/S2/S3	152	9,45	97	24,94	249	12,46
<b>Jumlah</b>	<b>1609</b>	<b>100</b>	<b>389</b>	<b>100</b>	<b>1998</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, 2022

Penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Paser tahun 2020 yang bekerja didominasi oleh lulusan SMU/Kejuruan (77,48%). Jika dilihat menurut jenis kelamin, pekerja laki-laki didominasi oleh lulusan SMA Umum/Kejuruan (80,73%), demikian pula dengan pekerja perempuan didominasi oleh lulusan SMA Umum/Kejuruan (64,01%).

**b. Rasio ketergantungan**

Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Kabupaten Paser tahun 2020 sebesar 42,49 persen. Dengan kata lain setiap 100 penduduk usia produktif (usia



15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 42 hingga 43 orang penduduk yang tidak produktif, yang mana 36 hingga 37 orang diantaranya berasal dari kelompok muda (usia di bawah 15 tahun) dan 6 orang lainnya berasal dari kelompok usia lanjut (di atas 65 tahun). Salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam rangka mengurangi besarnya angka beban ketergantungan adalah dengan pengendalian jumlah kelahiran (fertilitas) dan menghindari usia perkawinan muda. Jika jumlah kelahiran dapat dikendalikan, maka beban ketergantungan pun akan menurun.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan yang berfungsi untuk memberikan masukan terhadap perencanaan pada tahun rencana dan sebagai kontrol terhadap pencapaian target RPJMD.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Hal ini menyangkut realisasi capaian target kinerja tahun lalu terhadap RPJMD. Hasil evaluasi, dalam perumusannya masih mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Hasil evaluasi mengarah pada upaya pemecahan masalah-masalah yang komprehensif, dalam menjawab persoalan isu-isu strategis yang dirumuskan dan dikembangkan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Paser. Evaluasi ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah (PD)



**Tabel 2.139**  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	
						K	Rp	K	Rp			
1.	PENDIDIKAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70	137.097.669.000	70	106.149.701.971	100	77,43		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD	0,94		0,94						Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Angka Putus Sekolah SMP	2,28		2,28						
			APK PAUD	37,60	169.143.111.907	37,60	157.216.052.584	100	92			
			APK SD; APM SD	108,62 97,87		108,62 97,87						
			APK SMP; APM SMP	95 81,58		95 81,58						
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100	58.450.500	100	56.971.500	100	97,46		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	100	114.568.900	100	80.860.000	100	70,57		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	100	299.490.600	100	297.724.800	100	99,41		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
2.	KESEHATAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase dokumen penunjang urusan pemerintah daerah	100	9.641.934.911	90,6	7.206.036.846	99	75		Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase UKM dan UKP yang dipenuhi	96	203.178.633.540	79,25	186.082.872.284	59	92		Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100	33.153.809.956	80,1	30.399.745.433	87	92		Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase obat, alkes & makanan minuman di peredaran yg memenuhi syarat	85	319.390.300	72	232.413.106	88	73		Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan germas	70	771.511.442	63	441.127.900	92	57		Kesehatan
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	17.216.943.485	100	13.679.238.305	100	79,45		Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	20	137.412.438.765	25	127.565.090.160	125	92,83		Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase capaian akses air minum layak	70	14.383.769.147	70,63	14.167.296.670	100,9	98,5		Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan gedung pemerintah untuk pelayanan publik yang dikelola dengan baik	81	49.120.655.778	64	41.726.278.640	79,01	84,95		Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	39	262.542.379.337	41,28	239.689.122.014	105,85	91,3		Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
			Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	71		71,67		100,94			



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	55	603.230.000	89,17	521.573.303	162,13	86,46		Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	47,5	1.024.630.400	45,18	993.329.927	95,12	96,95		Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Teknologi Pengelolaan Air Minum yang dimanfaatkan	80,95	2.358.171.000	80,95	2.290.748.750	100	97,14		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
5.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70	8.738.404.864	70	8.389.846.931	100	96,01		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
			Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IRB baik	75		75		100			
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	26,53	598.180.640	26,53	582.720.319	100	97,42		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	5	4.190.730.700	8,21	4.142.655.417	164,26	98,85		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	89,26	4.640.258.700	89,78	4.615.405.437	100	99,46		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	39,58	264.361.148.791	36,81	253.688.055.144	92,99	95,96		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
6.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	600	11.642.052.447	488	9.766.631.953	81,29	83,89		Satuan Polisi Pamong Praja
			Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi RENJA, SPIP)	12		12		100			Satuan Polisi Pamong Praja



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		
						K	Rp	K	Rp				
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12		12		100			Satuan Polisi Pamong Praja		
			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	100		100		100					
			Persentase Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100		100		100					
			Persentase Jumlah Peserta Sosialisasi	100		100		100					
			Pemenuhan Atas Sumber Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah	12		12		100					
			Penyediaan Surat Menyurat (Materai)	12		12		100					
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP & Linmas	420	3.195.451.850	3.104.623.695	60,19	97.16			Satuan Polisi Pamong Praja		
			Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan	100								100	
			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum	100								100	
			Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	100								100	
			Jumlah Peserta Pembinaan PPNS	1								1	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80	5.309.959.212	80	5.309.959.212	100	100		Dinas Pemadam Kebakaran		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			1.544.025.920		1.544.025.920	Na			Dinas Pemadam Kebakaran		
		7.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	80	6.246.909.700	70	4.884.074.633	70	78,18		Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
	UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Layanan Penanggulangan Bencana	100	1.681.854.948	99,89	1.667.035.628	99,89	99,12		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	SOSIAL	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase KK miskin yang menerima bantuan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha	100	787.079.950	100	760.868.660	100	97		Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	100	368.240.500	100	344.902.650	100	94		Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	TMP dalam kondisi baik	100	96.695.900	100	95.948.500	100	99		Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	100	342.701.895	72,5	301.670.945	72,5	88		Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Cakupan layanan penanganan bencana	100	962.468.175	100	705.907.191	100	73		Dinas Sosial
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	indeks kepuasan pelayanan masyarakat	100	7.466.583.151	100	6.018.455.372	100	81		Dinas Sosial
9.	TENAGA KERJA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Keterpenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70	6.550.995.190	70	5.462.895.254	100	83,39		Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Capaian Program Tenaga Kerja yang Dilaksanakan Setiap Tahunnya	100	26.718.000	100	26.464.800	100	99,05		Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihanberbasis Kompetensi	50	305.905.950	50	300.484.100	100	98,23		Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	30	134.536.470	30	133.111.998	100	98,94		Dinas Tenaga Kerja



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Hubungan Industrial	Persentase Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	40	118.352.034	40	101.738.771	100	85,96		Dinas Tenaga Kerja
10.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SKPD yang terlayani	100	613.761.490	100	554.918.792	100	90		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pppa
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100	538.490.830	100	532.761.010	100	99		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pppa
		Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	100	126.063.800	100	121.090.200	100	96		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pppa
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak	40	62.463.290	40	61.501.390	100	98		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pppa
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Sekolah Ramah Anak yang sesuai standar	100	50.290.200	100	50.290.200	100	100		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pppa
		Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	157.939.850	100	137.832.650	Na	87		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pppa
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang terlayani	100	412.965.560	100	337.873.088	100	82		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pppa
11.	PANGAN	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase Ketersediaan pangan	99,24	651.127.908	98,11	646.289.877	98,86	99,26		Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan (FSVA)	31	556.473.060	35	530.242.542	112,9	95,29		Dinas Ketahanan Pangan



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji	80	140.984.900	72,73	140.668.100,00	90,91	99,78		Dinas Ketahanan Pangan
12.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	28,57	352.699.500	46,15	352.643.900	161,55	99,98		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	33,33	7.045.422.500	0	597.841.000	0	8,49		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi sistem pendaftaran tanah terhadap proses pembebasan tanah	200 Orang	85.422.100	121	81.805.700	60,5	95,77		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
13.	LINGKUNGAN HIDUP	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Skor Indeks Tutupan Lahan	74,14	1.364.006.400	71,51	1.267.598.400	96,45	92,93		Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Tutupan Lahan/Hutan	74,17	1.364.006.400	71,51	1.267.598.400	96,41	92,93		
			Presentase Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam	75	1.278.442.600	27,5	1.267.598.400	36,67	99,15		
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan	69	1.170.335.261	39	1.158.291.016	56,52	98,97		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Presentase Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	80	241.496.800	20	239.546.668	25	99,19		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkat ke TPA	42,5	6.089.593.980	31,47	6.043.247.686	74	99,24		Dinas Lingkungan Hidup



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan	65	133.282.000	48	75.911.400	73,85	56,96		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Komunitas Masyarakat Hukum adat yang mendapatkan PPLH	100	82.510.000	63	59.470.400	63	72,08		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Komunitas Masyarakat Hukum adat yang mendapatkan PPLH	100	105.703.520	58,48	48.295.000	58,48	45,69		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	80	104.673.000	49	64.922.858	61,25	62,02		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan adminitrasi penunjang urusan pemerintah terlaksana	100	471.676.800	100	456.106.690	100	96,7		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan administrasi penunjang urusan pemerintah terlaksana	100	12.140.057.860	100	10.471.450.258	100	86,26		Dinas Lingkungan Hidup
15.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	72	7.951.401.164	71,67	5.699.118.232	99,54	71,67		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan	95	2.684.638.708	68.33	1.801.163.608	71.93	67.09		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100	1.122.908.020	97.88	1.009.161.800	100	97.89		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid	100	11,895.000	100	10.030.000	100	84.32		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang terlayani	100	6.473.368.602	100	5.927.050.699	100	91.56		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Penataan Desa	Persentase batas desa yang terselesaikan	45	174.874.800	17.27	152.158.600	38.38	87.01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kawasan perdesaan yang terbentuk	2	33.339.600	2	26.083.352	100	78.24		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan desa yang sesuai ketentuan perundangan	100	3.684.288.950	100	2.582.391.074	100	70.09		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata persentase Lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat hukum adat yang aktif	100	2.063.644.830	100	1.818.499.250	100	88.12		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
17.	PERHUBUNGAN	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar	70	8.338.320.505	49,38	5.693.665.700	70,54	68,28		Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang - perorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten	60	1.845.569.430	60	1.738.762.602	100	94,21		Dinas Perhubungan



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Pelaksanaan rencana induk perkeretaapian	5	97.892.600	5	96.667.434	100	98,75		Dinas Perhubungan
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan pelayanan masyarakat	68	12.132.545.316	68	12.031.297.681	100	99,16		Dinas Perhubungan
			presentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	70		70		100			
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Publik yang disebarluaskan	85	3.967.569.686	78.57	3.709.031.030	92.43	93.48		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
19.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	9.989.148.786	100	9.284.441.997	100	93		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif yang Melaksanakan RAT	79	31.399.900	59	30.003.500	75	95,55		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm
		Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang maju	12 Koperasi	54.000.000	15 Koperasi	53.816.000	125	99,66		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Jumlah UKM yang di Berdayakan	200	61.396.200	166	58.763.800	83	95,71		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm
		Program Pengembangan Ukm	Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya ( dari mikro menjadi kecil )	14,98	336.304.000	15	335.764.000	100	99,84		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm
20.	PENANAMAN MODAL	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi LAKIP	100	7.067.867.379	100	5.734.806.238	100	81,14		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	306.016.800	100	233.507.400	100	76,31		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	100	272.298.800	100	215.827.857	100	79,26		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Memingkaynya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100	663.706.750	95	581.677.197	95	87,64		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Paket Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	100	183.376.800	93,17	170.857.923	93,17	93,17		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya urusan penunjang pemerintahan	353	6.381.687.815	354	5.857.910.720	90.82	90.82		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terbentuknya potensi pemuda melalui minat dan bakat kearah pembangunan nasional	314	1.732.652.520	264	1.705.083.253	98.41	98,41		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	11	3.836.728.192	11	2.889.365.290	75.31	75,31		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Berkembangnya kapasitas kepramukaan	1 Organisasi	150.000.000	1 Organisasi	150.000.000	100	100		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
22.	STATISTIK	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Daerah	90	295.824.900	90	244.185.735	100	82.54		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
23.	PERSANDIAN	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat terlayani dengan pengamanan Data dan Informasi	75	72.419.900	75	50.262.400	100	68.40		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
24.	KEBUDAYAAN	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Event Kebudayaan sesuai dengan standar kebudayaan	70%	121.561.800	70%	110.500.800	100	74,45		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kelompok Seni/sanggar kesenian yang aktif	18%	37.597.300	18%	32.093.575	100	85,36		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	Jumlah penyelenggaraan event dan penulisan buku yang berkaitan dengan sejarah daerah	5 event	13.561.800	5 event	13.561.800	100	74,31		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan pengunjung museum sadurengas pertahun	1 unit	4.366.034.000	1 unit	724.433.101	100	65,22		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
25.	PERPUSTAKAAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	68	6.892.736.481	68	5.579.559.635	100	80,94		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Pengunjung Perpustakaan	80	598.180.640	93	568.663.357	116,25	94,93		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno Yang Dilestarikan	5 Dokumen	38.010.691	5 Dokumen	34.572.700,00	100	90,95		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
26.	KEARSIPAN	Program Pengelolaan Arsip	Persentase PD Yang Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku	34	73.026.500	34	68.482.600	100	93,77		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Yang Diselamatkan Dan Dilestarikan	34	141.634.680	34	139.029.436	100	98,16		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Angka Pemakaian Arsip	100	10.935.210	100	10.772.190	100	98,5		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
27.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan aparatur DKP (%)	100	4.713.657.150	100	5.012.425.961	100	106,34		Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	12.716 ton	7.363.377.920	10681,5	6.887.816.866	84	93,54		Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	18083 ton	3.655.636.374	14010,71	3.158.694.692	77,48	86,41		Dinas Perikanan



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU Fishing dan kegiatan merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	30	41.452.000	30%	39.275.400	100	94,75		Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	2532	233.638.830	2433,36	208.176.411	96,1	89,1		
28.	PARIWISATA				2.929.143.950,00		2.899.168.346,00	Na	98,98		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi PAD dari sektor pariwisata	20	2.405.008.970,00	20	2.389.768.635,00	90	99,37		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	10	216.347.880,00	10	215.785.280,00	100	99,74		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Tingkat peran dan partisipasi dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif	9	307.787.100,00	9	293.614.431,00	100	95,4		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
29.	PERTANIAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah berjalan dengan baik	100	16.522.684.233	100	15.262.127.526	100	92,37		Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana tanam dan pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	100	2.582.407.750	100	2.364.721.898	100	91,57		Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang di manfaatkan	100	12.850.141.800	100	11.198.033.600	100	87,14		Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pertumbuhan produksi tanaman pangan dan hortikultura (%)	100	240.888.360	100	203.021.258	100	84,28		Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		Program Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan produksi kelompok yang di suluh	100	1.179.391.697	100	1.102.371.303	100	93,47		Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
	PERTANIAN	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah infrastruktur pertanian yang terbangun	40 Paket	87.877.130.950	34	86.183.709.960	85	98,07		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanian
	PERTANIAN	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan Dan Peternakan)	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	100	177.385.000	100	177.383.900	100	100		Dinas Perkebunan Dan Peternakan
		Program Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan Dan Peternakan)	Persentase Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan	100	119.000.000	100	118.995.000	100	100		Dinas Perkebunan Dan Peternakan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan Dan Peternakan)	Presentasi sarana pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dimanfaatkan	100	6.657.374.438	100	6.410.568.850	100	96,29		Dinas Perkebunan Dan Peternakan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan Dan Peternakan)	Persentase Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang dimanfaatkan	100	1.284.444.022	100	1.268.283.359	100	98,74		Dinas Perkebunan Dan Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Populasi hewan ternak yang sehat	100	1.541.180.347	100	1.524.826.097	100	98,94		Dinas Perkebunan Dan Peternakan
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Perkebunan Dan Peternakan)	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	100	732.199.829	100	714.331.670	100	97,56		Dinas Perkebunan Dan Peternakan
30.	KEHUTANAN	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik.	70,5	11.193.312.165	23	8.355.622.855	32,62	74,62		Dinas Lingkungan Hidup
31.	PERDAGANGAN	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	10	31.400.000	10	31.298.800	100	99,68		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun	2	6.643.463.209	1	5.901.950.370	50	89		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Bapok	50	82.843.700	50	82.247.300	100	99		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Produk Bahan Ekspor	5	44.154.500	42	44.119.500	840	99,92		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang di Tera dan Di Standarisasio	50	218.894.092	50	206.923.691	100	94,53		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm
32.	INDUSTRI	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan IKM	2,4	635.392.700	1,7	632.501.550	71	99,54		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pemutahiran data IKM	100	93.575.000	100	92.943.650	100	99,33		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm
33.	TRANSMIGRASI	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Kawasan Trasnigrasi yang Sesuai Perencanaan	100	56.097.420	100	32.091.810	100	57,21		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Peningkatan Jumlah KK Transmigran Sejahtera yang Ditempatkan	6 Kawasan	11.000.000	6 Kawasan	10.176.545	100	92,51		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Baru Yang Berkembang Dengan Memiliki Sarana dan Prasarana Memadai	1 Kawasan	96.731.600	1 Kawasan	94.296.600	100	97,48		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
34.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	1.346.909.050	100	1.292.930.089	90	97.00		Sekretariat Daerah



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Peresentase perumusan kebijakan pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti	100	9.205.031.330	100	8.727.977.481	89	96.00		Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks kepuasan layanan sekretariat	70	48.896.389.604	70	43.380.389.890	89	89.00		Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan sekretariat	80	41.209.936.925	80	32.218.736.615	80	73.42		Sekretariat Dprd
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Perda dan dokumen anggaran yang di tetapkan tepat waktu	100	23.685.558.890	NA	19.056.868.804	1	42.742.427		
			Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	80		80		100			Sekretariat Dprd
35.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aparatur perencana yang memiliki kompetensi perencana	90	11.107.004.114	77	9.800.184.369	85.86	88.23		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	95	2.501.380.670	95	2.064.583.249	100	82.54		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
			2.Sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (persen/ada)	100		100		100			
			3. Persentase data tersedia yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan	90		90		100			
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.Persentase hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti	90	2.986.736.620	90	2.663.797.479	100	89.19		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
			2) Presentase hasil pengendalian dokumen perencanaan	100		100		100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil kajian yang ditindaklanjuti	90	2.959.048.700	82	1.918.009.420	91.11	64.82		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	penilaian/Review Inspektorat terhadap Laporan Kinerja	100	34.874.564.627	99.71	30.223.895.054	99.71	86.66		Badan Keuangan Aset Daerah
			Tingkat Maturitas SPIP	100		99,71		99,71			Badan Keuangan Aset Daerah
			Persentase Penyajian jenis data SIPD secara lengkap	100		99,71		99,71			Badan Keuangan Aset Daerah
			Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100		99,71		99,71			Badan Keuangan Aset Daerah
			Prosentase pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan dan barang daerah	100		99,71		99,71			Badan Keuangan Aset Daerah
			Persentase Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang tersedia	100		99,71		99,71			Badan Keuangan Aset Daerah
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana Kerja yang kondusif	100		99,71		99,71			Badan Keuangan Aset Daerah
			Persentase jumlah sarana penunjang Disiplin aparaturnya yang tersedia	100		99,71		99,71			Badan Keuangan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan data capaian kinerja Keuangan Perangkat Daerah yang tepat dan valid	100	249,846,760,599	99.50	221,633,487,945	99.50	88.71		Badan Keuangan Aset Daerah



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
			Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan Sesuai SAP	100		99,5		99,5			Badan Keuangan Aset Daerah
			Persentase jumlah pengajuan SPM yang sesuai ketentuan	100		99,5		99,5			Badan Keuangan Aset Daerah
			Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran tepat waktu	100		99,5		99,5			Badan Keuangan Aset Daerah
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan	100		99,5		99,5			Badan Keuangan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi pengelolaan Barang milik Daerah	100	3,075,352,500	100	2,630,696,634	100	85.54		Badan Keuangan Aset Daerah
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan standar satuan harga dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang	100		100		100			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	indeks kepuasan pelayanan masyarakat	100	12,360,241,285	100	10,598,197,510	100	85.74		Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	7	3,562,232,400	12	3,395,751,227	171	95.33		Badan Pendapatan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran	100	5,471,407,850	100	4,913,651,461	100	89.81		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
			Persentase data sektoral yang tersusun	100	80,578,700.00	100	60,654,667.00	100	75.27		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah	Cakupan pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional	100	237,867,750	100	139,388,250	75.57	58.60		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase ASN yang telah lulus diklat PIM	100	4,549,318,555.00	80.32	4,071,835,766.00	80.32	89.50		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Cakupan pegawai yang memenuhi kompetensi sesuai standar	100		62.25		62.25			Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			16.435.094.200		12.908.494.005	Na	78.54		Inspektorat Kabupaten
		Program Penyelenggaraan Pengawasan			4.810.090.100		2.615.488.494	Na	54.38		Inspektorat Kabupaten
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi			708.407.800		412.130.858	Na	58.18		Inspektorat Kabupaten
37.	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	100	4.314.855.760	100	3.440.749.033	100	79,74		Kantor Kecamatan Batu Sopang
			Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	18		18		100			
			Persentase temuan ditindak lanjuti	0		0		0			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	0		0		0			
			Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat	0		0		0			Kantor Kecamatan Batu Sopang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	440.402.700	0	427.806.200	0	97.14		Kantor Kecamatan Batu Sopang
			Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	100		100		100			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	0	177.879.600	0	177.871.200	0	100		Kantor Kecamatan Batu Sopang
			Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	0		0		0			
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	286.767.100	100	285.251.100	100	99.47		Kantor Kecamatan Batu Sopang
			Persentase pelanggaran perda dan perkara yang terselesaikan di wilayah kecamatan	100		100		100			
			Presentase penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100		100		100			



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	57.652.000	100	57.650.000	100	100		Kantor Kecamatan Batu Sopang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	9	80.372.000	9	80.314.100	100	99.93		Kantor Kecamatan Batu Sopang
	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	indeks kepuasan pelayanan sekretariat	100	5.384.306.236	100	4.128.910.212	100	80,26		Kantor Camat Longikis
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100	216.570.430	100	184.585.430	100	85.23		Kantor Camat Longikis
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	139.146.800	100	135.008.800	100	97.03		Kantor Camat Longikis
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	100	367.161.000	100	365.731.000	100	99.61		Kantor Camat Longikis
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100	13.268.500	100	11.658.500	100	87.87		Kantor Camat Longikis
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100	82.967.400	90	76.847.400	90	92.62		Kantor Camat Longikis
	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	indeks kepuasan pelayanan sekretariat		777.382.220		760.496.111				Kantor Kelurahan Longikis
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		488.419.500		481.960.500	Na	98.68		Kantor Kelurahan Longikis
	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	indeks kepuasan pelayanan sekretariat	100	5.082.588.978	100	4.304.570.038	100	84,69		Kantor Kecamatan Kuaro



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	indeks kepuasan pelayanan masyarakat	100	689.180.380	100	686.925.860	100	99.67		Kantor Kecamatan Kuaro
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	presentase lembaya kemasyarakatan yang aktif	100	298.248.950	100	270.246.350	100	90.61		Kantor Kecamatan Kuaro
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase pelanggaran perda dan perkara yang terselesaikan di wilayah kecamatan	100	260.497.300	100	258.053.600	100	99.01		Kantor Kecamatan Kuaro
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase kasus konflik sosial yang tertangani/terrealisasikan diwilayah kecamatan	100	18.316.650	100	16.875.850	100	92.13		Kantor Kecamatan Kuaro
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase desa yang menyampaikan laporan Kepala Desa tepat waktu	100	76.581.410	100	76.581.410	100	100.00		Kantor Kecamatan Kuaro
	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	indeks kepuasan pelayanan sekretariat	100	846.679.717	100	792.143.543	100	87.40		Kelurahan Kuaro
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	indeks kepuasan pelayanan masyarakat	100	14.234.300	100	13.034.300	100	91.57		Kelurahan Kuaro
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	presentase lembaya kemasyarakatan yang aktif	100	526.825.630	100	512.011.800	100	97.19		Kelurahan Kuaro
	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat		5.765.312.125		5.292.440.407				Kecamatan Longkali
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelanggaran perda dan perkara yang terselesaikan di wilayah kecamatan		202.533.270.00		198.490.770.00	Na	98.00		Kecamatan Longkali
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		49.557.900.00		49.557.900.00	Na			Kecamatan Longkali



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan		49.557.900.00		49.557.900.00	Na			Kecamatan Longkali
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan					Na			Kecamatan Longkali
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan kepala desa tepat waktu					Na			Kecamatan Longkali
	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks pelayanan kepuasan sekretariat	80	3.472.623.200	76,8	2.705.404.914	96	77,91		Kantor Kecamatan Muara Komam
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan pelayanan masyarakat	100	514.365.320	100	512.704.570	100	9.967.712.637		Kantor Kecamatan Muara Komam
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase lembaga masyarakat yang aktif	100	147.902.100	100	137.981.200	100	93.29		Kantor Kecamatan Muara Komam
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan	100	274.890.820	100	236.339.750	100	85.98		Kantor Kecamatan Muara Komam
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase kasus konflik sosial yang tertangan/terselesaikan di wilayah kecamatan	100	1.069.247.420	100	974.397.830	100	91.13		Kantor Kecamatan Muara Komam
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase desa yang menyampaikan laporan kepala desa tepat waktu	100	47.859.000	100	47.815.000	100	99.91		Kantor Kecamatan Muara Komam
	UNSUR KEWILAYAHAN	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	80	221.906.134	76,8	211.971.058	96	95,52		Kantor Kelurahan Muara Komam
		Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan pelayanan masyarakat	100	32.938.400	100	32.906.400	100	90,99		Kantor Kelurahan Muara Komam



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	466.928.484	100	466.700.984	100	99.95		Kantor Kelurahan Muara Komam
	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	82	532.661.905	80	506.045.469	97.56	95.00		Kantor Kecamatan Muara Samu
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	80	361.887.895	78.93	353.397.595	98.66	97.65		Kantor Kecamatan Muara Samu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	170.183.300	100	158.465.690	100	93.11		Kantor Kecamatan Muara Samu
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan	100	175.217.500	100	172.576.500	100	98.49		Kantor Kecamatan Muara Samu
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	24.251.500	100	19.830.000	100	81.77		Kantor Kecamatan Muara Samu
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan kepala desa tepat waktu	9	62.120.000	9	44.510.000	100	71.65		Kantor Kecamatan Muara Samu
	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Sekretariat	100	6.038.808.974	90	4.861.896.201	100	94,43		Kantor Kecamatan Tanah Grogot
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	254.119.800	100	252.896.200	100	99.52		Kantor Kecamatan Tanah Grogot
			Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100		25		25			Kantor Kecamatan Tanah Grogot
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	82.359.400	100	81.176.750	100	98.56		Kantor Kecamatan Tanah Grogot



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	351.660.000	100	348.234.500	100	99.02		Kantor Kecamatan Tanah Grogot
			Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	0		0		0			Kantor Kecamatan Tanah Grogot
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100	48.435.000	100	48.385.000	100	99.89		Kantor Kecamatan Tanah Grogot
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100	186.819.020	100	185.781.700	100	99.44		Kantor Kecamatan Tanah Grogot
	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100	325.741.800	90	300.204.793	90	92.16		Kantor Kelurahan Tanah Grogot
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	100	565.630.694	100	561.513.040	100	99.27		Kantor Kelurahan Tanah Grogot
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	873.852.800	100	873.278.800	100	99.93		Kantor Kelurahan Tanah Grogot
	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	indeks kepuasan pelayanan sekretariat		4.496.181.397		4.014.085.329	Na			Kantor Kecamatan Pasir Belengkong
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan	100	881.901.200	89	879.952.000	89	99		Kantor Kecamatan Pasir Belengkong
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	187.514.300	100	180.344.600	100	96,18		Kantor Kecamatan Pasir Belengkong
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	100	440.926.000	100	440.926.000	100	100		Kantor Kecamatan Pasir Belengkong



Pemerintah Kabupaten Paser

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah	100	14.768.500	100	4.568.500	100	100		Kantor Kecamatan Pasir Belengkong
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	presentasi desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu	100	68.443.300	100	63.943.300	100	93,43		Kantor Kecamatan Pasir Belengkong
	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	100	2.374.247.380	100	2.202.863.587	100	96.11		Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan pelayanan Masyarakat	100	34.442.500	100	34.426.500	100	99.95		Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase kelembagaan yang aktif	100	195.399.700	100	162.308.800	100	83,06		Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase pelanggaran perda dan perkara yang terselesaikan di wilayah kecamatan	100	21.641.500	99	21.574.000	99	99.68		Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	100	52.001.500	95	51.091.500	95	97,55		Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prsentase desa yang meyampaikan laporan kepala desa tepat waktu	100	367.729.800	97,56	353.335.000	97,56	96.09		Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100	3.620.544.822	98	3.494.721.755	100	97		Kantor Kecamatan Batu Engau
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	0	93.360.000		93.350.000	Na	99.99		Kantor Kecamatan Batu Engau
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	100	244.816.300	100	232.111.000	100	94.81		Kantor Kecamatan Batu Engau



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)		STATUS REALISASI KINERJA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
						K	Rp	K	Rp		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Kasus Konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah Kecamatan	100	182.412.600	63	179.008.600	100	98.13		Kantor Kecamatan Batu Engau
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase desa yang Menyampaikan Laporan Kepala Desa Tepat Waktu	100	221.217.050	98	212.904.300	98	96.24		Kantor Kecamatan Batu Engau
38.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase program yang terlaksana dan waktu pelaksanaannya	100	6.426.839.557	100	5.151.708.645	100	80.2		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pengetahuan pelajar dan masyarakat tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	80	68.737.000	80	63.866.700	100	92.9		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase kebangsaan sipil, hak-hak politik dan Lembaga demokrasi	68	771.166.374	68	771.166.374	100	100		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang dilakukan pemberdayaan dan pengawasan	80	54.265.500	80	53.784.100	100	99.1		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya pengetahuan pelajar dan masyarakat tentang peraturan bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006.dan bahaya narkoba	80	359.287.080,00	80	348.976.951,00	100	97.1		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah pelaksanaan koordinasi kewaspadaan dini, monitoring evaluasi dan pelaporan	10	1.097.660.300	5	703.219.973	50	64.1		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dari 234 program tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Paser, terdapat 117 Program yang target pencapaiannya 100%, 8 Program Prioritas yang pencapaian targetnya berada di bawah 80 persen. Program tersebut antara lain : Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3); Program Penataan Desa; Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan tabel tersebut di atas juga didapatkan informasi bahwa terdapat 9 indikator program yang capaian target kinerjanya lebih dari 100% diantaranya: Persentase capaian akses air minum layak dengan capaian kinerja sebesar 100,9% ; Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dengan capaian kinerja sebesar 105,85% ; Persentase Jembatan dalam kondisi Baik dengan capaian kinerja sebesar 100,94%; Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional dengan capaian kinerja sebesar 162,13% ; Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani dengan capaian kinerja sebesar 164,26% ; Jumlah Desa Rawan Pangan (FSVA) dengan capaian kinerja sebesar 112,9% ; Persentase penanganan sengketa tanah Garapan dengan capaian kinerja sebesar 161,55 ; Jumlah Koperasi yang maju dengan capaian kinerja sebesar 125% ; Persentase peningkatan Pengunjung Perpustakaan dengan capaian kinerja sebesar 116,25%; Jumlah infrastruktur pertanian yang terbangun dengan capaian kinerja sebesar 85%



Tabel 2.140

## Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser Tahun 2021

No	INDIKATOR	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5		
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,04	73,15	72,93	99,70	
2	Angka Kemiskinan	9,23	8,50	9,73	87,36	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,52	4,50	5,70	119,36	
4	Pertumbuhan Ekonomi	-2,86	1,30	5,41	416,15	
5	Indeks Gini	0,290	0,285	0,288	101,42	
6	Indeks Reformasi Birokrasi	55,81	58	56,05	96,64	
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	NA	4	6	150,00	
8	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	44,68	47,50		0,00	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,17	70,09	73,97	105,54	
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	196,40	196,40	196,40	100,00	
11	Umur Harapan Hidup	72,62	72,71	72,88	100,23	
12	Angka Harapan Lama Sekolah	13,10	13,10	13,25	101,15	
13	Rata-rata Lama Sekolah	8,55	8,55	8,79	102,81	
14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	70	NA	N/A	
15	Nilai SAKIP	58,41 (CC)	59	58,91 (CC)	99,85	
16	Nilai IKM daerah	78,61	80	82,142	102,68	
17	Angka Kriminalitas	172	53	186	350,94	
18	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang	4,87	4,90	2,75*	56,12	



No	INDIKATOR	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5		
19	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	0,33	-1,00	0,28	-28,00	

Ket : \*) data sementara

Indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah untuk itu, pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*Key performance indicator*).

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama pada RKPD Tahun 2021 di atas, diperoleh informasi bahwa:

- Capaian kinerja yang melampaui target (>100%) = 10 indikator
- Capaian kinerja >70%-100% = 5 indikator
- Capaian kinerja >50%-70% = 1 indikator
- Capaian kinerja 0%-50% = 1 indikator
- Capaian kinerja yang belum ada data = 2 indikator

Capaian indikator kinerja utama daerah pada tabel tersebut masih belum terisi seluruhnya karena pengukuran belum selesai dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi prioritas pembangunan nasional yang tentunya memerlukan sinergitas kebijakan perencanaan di daerah. Adapun capaian TPB Kabupaten Paser sebagaimana tersaji pada tabel 2.139 berikut.



Tabel 2.141

## Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Paser Tahun 2021

NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
<b>Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun</b>								
Target: 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1	1.2.1	Tingkat kemiskinan daerah	BPS	%	9,73	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
2	1.3.1 (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketengakerjaan	Disnakertrans	%	28.953 orang	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Dilaksanakan sesuai target (SS)
3	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan	Dinsos	%	75,4	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	Meningkat menjadi 95%	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
4	1.3.1 (c)	Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusifnya	Dinsos	%	57%	Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	Meningkat menjadi 17,12%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
		Jumlah penerima Jamkesda		Jiwa	47.896			Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
		Jumlah penerima JKN			48.709			Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
		Jumlah penerima JKH		Kelompok				
5	1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH	Dinsos	jiwa	12.177	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Menurun menjadi 2,8 juta	Dilaksanakan mencapai target (SS)
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro								



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
6	1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinkes	%	103	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Meningkat menjadi 70%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
7	1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinkes	%	84,7	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Meningkat menjadi 63%.	Dilaksanakan mencapai target (SS)
8	1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Pemberdayaan Perempuan	%	85,9	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Meningkat menjadi 65%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
9	1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas Perumahan	%	70,14 %	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
10	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan	%	71,05 %	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
11	1.4.1. (g)	APM SD/MI/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	95,7%	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Meningkat menjadi 94,78%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
12	1.4.1. (h)	APM SMP/MTS/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	83,8%	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Meningkat menjadi 82,2%	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
13	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun (0-18 tahun) dengan kepemilikan akta kelahiran.	Disdukcapil	%	91,74	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Meningkat menjadi 77,4%.	Dilaksanakan mencapai target (SS)
14	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	BAPPEDA	%		Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 100%	
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miuskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonosmi, sosial, lingkungan, dan bencana								
15	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	5	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Dilaksanakan mencapai target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
16	1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah	BPBD	lokasi	15	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	Meningkat menjadi 39 daerah	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
17	1.5.1. (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	BPBD	%	0	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Meningkat menjadi 151 ribu	Tidak ada data (NA)
18	1.5.1. (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinsos	jiwa	tidak ada pendampingan karena pandemi	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
19	1.5.1. (d)	Kajian resiko bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	BPBD	kajian	0	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Meningkat menjadi 450	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
20	1.5.1 (e)	Persentase penanganan banjir	BPBD	%	85%	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	Menurun menjadi 118,6	Dilaksanakan mencapai target (SS)
21	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rp	1,85 M	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Dilaksanakan mencapai target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
22	1.5.3	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	Tidak ada data (NA)
23	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPEDA	%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
24	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPEDA	%	Pendidikan : 20,02%. Kesehatan : 16,66%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pendidikan (20 %), Kesehatan (10 %)	Dilaksanakan mencapai target (SS)
<b>Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</b>								
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun								
25	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	BPS			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	
26	2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi pada anak Balita	Dinkes	%	14,1	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	Menurun menjadi 17%	Dilaksanakan mencapai target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
27	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	BPS			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	
		Desa Rawan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	desa	35			Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
28	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinakes	%	tdk diukur	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	Menurun menjadi 8,5 %	Tidak ada data (NA)
		Tingkat kemiskinan daerah	BPS	%	9,73			Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
<p>Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan</p>								
29	2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Balita	Dinkes	%	14,82	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
30	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinkes	%	14,82	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun	Menurun menjadi 28%	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
						2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).		
31	2.2.2.	Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) amak pada usia kurang dari 5 tahun	Dinkes	%	8,3	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
32	2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinkes	%	tidak diukur	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	Menurun menjadi 28%	Tidak ada data (NA)
33	2.2.2. (b)	Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinkes	%	68,1	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	Meningkat menjadi 50%	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
34	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan	Skor	Skor PPH = 86,5 dan tingkat konsumsi ikan = 54,42 kg/kapita	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Skor PPH Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB), Tingkat konsumsi ikan Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
		Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Ketahanan Pangan	Skor	Skor PPH = 86,5			Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
35	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS	Angka		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
		Nilai Tambah Pertanian	BPS	juta rupiah				Tidak ada data (NA)
		Nilai Tukar Petani (NTP)	BPS	Angka				Tidak ada data (NA)
<b>Tujuan 3 Menjamin Hidup yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</b>								
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
36	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes	per 100.000 kelahiran	366/100.000 kelahiran	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Menurun menjadi 306	Dilaksanakan tetapi target belum tercapai (SB)
37	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinkes	%	108,6	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Meningkat menjadi 95%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
38	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinkes	%	103,5	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Meningkat menjadi 85 %	Dilaksanakan mencapai target (SS)
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
39	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 1000 kelahiran hidup	11,7	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Dilaksanakan mencapai target (SS)
40	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 1000 kelahiran hidup	10,1	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Dilaksanakan mencapai target (SS)
41	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 1000 kelahiran hidup	11	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	Menurun menjadi 24	Dilaksanakan mencapai target (SS)
42	3.2.2.(b)	Cakupan anak 12-23 bulan telah memperoleh imunisasi dasar lengkap	Dinkes	%	88	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Meningkat menjadi 95%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
43	3.3.1.(a)	Prevalensi Penderita HIV	Dinkes	Angka	28	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Menurun menjadi <0,5%	Dilaksanakan mencapai target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
44	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinkes	kasus	121	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Menurun menjadi 245	Dilaksanakan mencapai target (SS)
45	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinkes	per 1000 penduduk	0,8	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Dilaksanakan mencapai target (SS)
46	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.			-	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Meningkat menjadi 300	
47	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.				(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
		Persentase deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinkes	%	175			Dilaksanakan mencapai target (SS)
48	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinkes	orang	33	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	
49	3.3.5(a)	Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	Dinkes	%	95	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	Meningkat menjadi 34 provinsi	Dilaksanakan mencapai target (SS)
50	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).				Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Meningkat menjadi 35.	Dilaksanakan mencapai target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
		Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis 100%	Dinkes	%	23			Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
51	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinkes, BNN			Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	Menurun menjadi 5,4%	Tidak ada data (NA)
52	3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinkes	%		Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Menurun menjadi 24,3%	
		Pemeriksaan Tekanan Darah Tinggi	Dinkes	%	16,5			Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
53	3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18 tahun	Dinkes	-	tidak ada data	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	Menurun	Tidak ada data (NA)
54	3.4.2*	Angka Kematian akibat Bunuh Diri	(Angka Bunuh diri)Polres/du kcapil (angka kematian)		1	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	
55	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.			1	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	Meningkat menjadi 280	Dilaksanakan mencapai target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinkes	Puskesmas	19			Dilaksanakan mencapai target (SS)
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan								
56	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinsos dan BNN		NA	Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	Menurun menjadi angka 0,02%	Tidak ada data (NA)
		Kasus Penyalahgunaan narkoba	POLRES	Kasus				
57	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	SATPOL PP			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Tidak ada data (NA)
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk keluarga berencana informasi dan pendidikan dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional								
58	3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alkon metode modern	Dinas Pemberdayaan Perempuan	%	56,5	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Meningkat menjadi 66%	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
59	3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS	Dinas Pemberdayaan Perempuan	%	85,9	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Meningkat menjadi 65%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
60	3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi MKJP	Dinas Pemberdayaan Perempuan	%	16,8	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	Meningkat menjadi 23,5%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
61	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Pemberdayaan Perempuan	kelahiran per 1000 perempuan 15-19 tahun	47	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	Menurun menjadi 38	
62	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Pemberdayaan Perempuan	jumlah anak perWUS	2,03	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	Menurun menjadi 2,28	Dilaksanakan mencapai target (SS)
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang								
63	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Dinkes		tidak ada data	Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	Menurun menjadi 9,91%	Tidak ada data (NA)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
64	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Dinkes	%	75,4	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
65	3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinsos	%	75,4	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Meningkat menjadi minimal 95%	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.								
66	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinkes	%	tidak ada	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Tidak ada data (NA)
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
67	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinkes	%	tidak ada data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Tidak ada data (NA)
68	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinkes	%	100			Dilaksanakan mencapai target (SS)
69	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinkes/Dis nakertrans	Org		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Tidak ada data (NA)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
<b>Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua</b>								
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
70	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Diknas	menu nggu data INAP	96,4	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Dilaksanakan mencapai target (SS)
71	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Diknas	%	88,63	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	Meningkat menjadi 84,2%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
72	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Diknas	%	67,9	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Meningkat menjadi 81%	Dilaksanakan tetapi target belum tercapai (SB)
73	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Diknas	%	102,4	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Meningkat menjadi 114,09%	Dilaksanakan tetapi target belum tercapai (SB)
74	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Diknas	%	97,8	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada	Meningkat menjadi 106,94%	Dilaksanakan tetapi target belum tercapai (SB)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
						tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).		
75	4.1.1.(g)	Angka rata-rata lama sekolah	Diknas	Tahun	8,24	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
Target 4.2. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
76	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Diknas	%	35	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Meningkat menjadi 77,2%	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
Target 4.4. Pada Tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk ketrampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.								
77	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Kominfo			Meningkat	Kabupaten	Tidak ada data (NA)
Target 4.5. Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
78	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Diknas	%	APM SD/MI/Sederajat = 95,70; APM SMP/MT S/ sederajat = 83,8; APM SMA/SMK/MA/ sederajat : - ; APK Perguruan Tinggi : -	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	Meningkat	Dilaksanakan mencapai target (SS)
		APM SD/MI/ sederajat	Diknas	%	95,7%	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Meningkat menjadi 94,78%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
		APM SMP/MTS/ sederajat	Diknas	%	83,8%	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Meningkat menjadi 82,2%	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Terpenuhi (SB)
Target 4.6. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki literasi dan numerasi								



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
79	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Diknas	%	100	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Meningkat menjadi 96,1%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
80	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Diknas	%	100	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	Meningkat	Dilaksanakan mencapai target (SS)
81	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Diknas	%	85,2	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Dilaksanakan mencapai target (SS)
82	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik.	Diknas	%	33,17	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
<b>Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan</b>								
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
83	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Kebijakan	92	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	bertambah sebanyak 16	Dilaksanakan mencapai target (SS)
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
84	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Kasus	10	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Dilaksanakan mencapai target (SS)
85	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan	%	10	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
86	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. (konfirmasi)	Dinas Pemberdayaan Perempuan	kasus	10	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Dilaksanakan mencapai target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
87	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Pemberdayaan Perempuan	%	100	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	Meningkat menjadi 70%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
88	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pemberdayaan Perempuan	% (sebelum umur 15 tahun)	47	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Meningkat
		Data Nikah Dibawah Umur	Kemenag	Jiwa				
89	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Kemenag	Tahun		Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).	Meningkat menjadi 21 tahun	
90	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Pemberdayaan Perempuan	angka		Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	Menurun menjadi 38 tahun	
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
91	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Setwan	angka	20,00 %	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Meningkat	Dilaksanakan mencapai target (SS)
92	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi jabatan struktural	BKPP	%	66,94 %	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Meningkat	Dilaksanakan mencapai target (SS)
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.								
93	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Dinas Pemberdayaan Perempuan	%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
94	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Pemberdayaan Perempuan	%	6,7	Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Menurun menjadi 9,9%	Dilaksanakan mencapai target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
95	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern (Konfirmasi)	Dinas Pemberdayaan Perempuan	%	99,51	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	Meningkat menjadi 85%	Dilaksanakan mencapai target (SS)
96	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Kominfo	%	85	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
<b>Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua</b>								
Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua								
97	6.1.1(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinkes	%		Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	
98	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Perumahan			Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	
99	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan	%		Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	Tidak ada data (NA)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas Perumahan	%	70,14 %			Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
Target 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
100	6.2.1.(a)	Proporsi penduduk yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Dinkes	%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
101	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Dinkes	%		Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Meningkat menjadi 100%	
102	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinkes	desa		Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	
103	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Dinkes	desa/kelurahan		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
104	6.2.1.(e)	Cakupan pengembangan IPAL Komunal	Dinas Perumahan	unit	48 Unit	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
105	6.2.1.(f)	Tersedianya SR Air Limbah terpusat	Dinas Perumahan	kecamatan	-	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	TTT
Target 6.3. Pada Tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global								
106	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).				Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	
		Jumlah IPLT yang tersedia di kabupaten	Dinas Perumahan	unit	1			Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
107	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	PU/Data SSK	%	150 KK terlayani di IPLT	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
108	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	DLH		memenuhi baku mutu untuk kualitas air embung	Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.	Meningkat	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
109	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DLH	skor	57,5	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	Meningkat	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
Target 6.4. Pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjami penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
110	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura			Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	ada	Tidak ada data (NA)
Target 6.5. Pada Tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumberdaya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
111	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	DPUTR	%		Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai (TTT)
112	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	DPUTR		belum ada	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	8 WS	Tidak ada data (NA)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
113	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.			1 WS	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	10 WS (skala nasional)	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
114	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	DPUTR		belum ada	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang-ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	ada	Tidak ada data (NA)
<b>Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</b>								
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang,								
117	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Bappeda/B PS	%	5,41	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
118	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Bappeda/B PS	per juta rupiah	194.50 juta rupiah.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								
119	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Bappeda/B PS/Disnakertrans	%		Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Meningkat	
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
120	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	Disnakertrans	% (Persen)	laki laki = 50.134 orang, perempuan = 30.148 orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Tidak ada data (NA)
121	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Disnakertrans	% (Persen)		Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	51%	Tidak ada data (NA)
122	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Disnakertrans	% (Persen)	51.202 orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
123	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Disperindagkop	% (Persen)	0	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	25%	Tidak ada data (NA)
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
124	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Disnakertrans	Rupiah	24.306	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Tidak ada data (NA)
125	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Disnakertrans	% (Persen)	laki laki = 3,37%, perempuan = 4,61%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
126	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Disnakertrans			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Tidak ada data (NA)
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial megnurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
127	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Disnakertrans			Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Meningkat	Tidak ada data (NA)
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
128	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Bappeda/BPS	%		Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	Meningkat menjadi 8%	



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
129	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Orang	0	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
130	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata	Orang	8.865	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
131	8.9.1.(c)	Jumlah pendapatan retribusi sektor pariwisata	Dispar/BKAD	Juta Rupiah	Rp 14.580.000	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
132	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	BPS			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
		Jumlah pengunjung pada obyek wisata			8865			Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
133	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	BPS			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
134	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Analisis			Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Menurun (mendekat)	



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
135	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Disperindagkop	% (Persen)	0	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Meningkat	Tidak ada data (NA)
<b>Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</b>								
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
136	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.				Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237).	Bertambah 3.258 km	Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai (TTT)
137	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.				Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).	Meningkat	Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai (TTT)
138	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dishub	Unit	3	Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.	24 pelabuhan (skala nasional)	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
139	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.						
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
140	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	BPS	%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
141	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS	%		Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	
142	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS	%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.								
143	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil menengah terhadap total nilai tambah industri.	Disperindag kop/BPS	%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
144	9.3.2*	Cakupan industri kecil menengah dengan pinjaman atau kredit.	Disperindag kop/BPS	%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan								
145	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Bappeda (Cek APBD)	%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
		Jumlah kajian di pemerintah daerah	Bappedalith ang					
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
146	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Kominfo	%	NA	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Tidak ada data (NA)
147	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Kominfo	jml pddk memiliki telpon dibagi seluruh jml pddk	85	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
148	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Kominfo	jml pddk usia lima tahun keatas dibagi seluruh jml pddk	75	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
<b>Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara</b>								
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi paling bawah pada tingkat yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional								
149	10.1.1*	Koefisien Gini.	Bappeda	index	0,288	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Menurun menjadi 0,36	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
150	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinsos	%	NA	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	Tidak ada data (NA)
151	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	DPMD	kabupaten		Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019.	80 Kabupaten (skala nasional)	



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
152	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	DPMD	desa	8	Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	
153	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	DPMD	Desa	13	Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	
154	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BPS	%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
155	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dinsos/BPS	%		Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).	Menurun menjadi 14%	
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.								
156	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	BPS	%		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.								
157	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS			Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3).	Meningkat menjadi 87	Tidak ada data (NA)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
158	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Pol PP		0	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai ke setaraan yang lebih besar.								
159	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Disnakertrans	%	28.953 orang	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	
<b>Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</b>								
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.								
160	11.1.1.(a)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	BPS	Klasifikasi	6 (Nilai 54,78) Kategori Sedang	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	3,7 juta rumah tangga	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
161	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	BPS	BWP		Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)	
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara								
162	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).				Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2).	5 metropolitan (skala nasional)	
163	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Bappeda			Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
164	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.		Kota		Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	ada	



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
165	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Tidak ada data (NA)
166	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	InaRISK	-	196,40	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	Menurun menjadi 30%	
167	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	jenis		Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	Tidak ada data (NA)
168	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Tidak ada data (NA)
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota								
169	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH	%	60,66	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Meningkat menjadi 80%	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
170	11.6.1.(b)	Persentase sampah yang terangkut	DLH	%	69,943	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019.	Meningkat/ada	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas								
171	11.7.1.(a)	Jumlah Kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	DLH	Kota	1	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.	Meningkat/ada	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
		Presentase ruang terbuka hijau perkotaan	DLH	%	9			Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030								
172	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	Tidak ada data (NA)
<b>Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</b>								



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
173	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	ton	000,0000	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
174	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	ton	4422,23	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	20 ton per hari (skala nasional)	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
175	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Disnakertrans	jumlah	N/A	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	Meningkat	Tidak ada data (NA)
Target 12.6 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.								



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
176	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	DLH		N/A	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	Meningkat	Tidak ada data (NA)
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.								
177	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.				(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
		Jumlah fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan	Bagian Organisasi	%				
<b>Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</b>								
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
178	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen		Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	ada	Tidak ada data (NA)
179	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	5	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
<b>Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman</b>								
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
180	15.1.1.(a).	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH	%	N/A	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Meningkat	Tidak ada data (NA)
		Indeks Tutupan Lahan	DLH	indeks	71,51			
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.								
181	15.3.1. (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH	persentase	N/A	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	5,5 juta ha (skala nasional)	Tidak ada data (NA)
Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.								
182	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.				(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.								
183	15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DLH	Dokumen	1	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	Meningkat	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
<b>Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan</b>								
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
184	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	POLRES	kasus	0	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	
185	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES	per 100000 penduduk	NA	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Tidak ada data (NA)
186	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POLRES		48	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	
		Angka kriminalitas	POLRES	per 10000 penduduk	6,70			



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
187	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Kesbangpol		NA	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	Meningkat	Tidak ada data (NA)
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.								
188	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinsos	perse ntase		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Tidak ada data (NA)
189	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinsos	perse ntase		Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	Menurun	Tidak ada data (NA)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
190	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Dinsos	perse ntase		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Tidak ada data (NA)
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.								
191	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS		3,64	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	Meningkat menjadi 4,0	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB),
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
192	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BKAD	realisa si/alo kasi		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Tidak ada data (NA)
193	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BKAD		100%	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga : 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
		Opini WTP Kabupaten Paser	BKAD	WTP	WTP			Dilaksanakan Mencapai Target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
194	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bappeda	%	15,5	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga : 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	
195	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. (khusus lelang / seleksi)	Bagian Barang Jasa	perse ntase		Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	Menjadi menjadi 80%	
196	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Organisasi Sekda	Indeks	56,05	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	Meningkatk menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
197	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Organisasi Sekda	%		Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	Tidak ada data (NA)
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.								
198	16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Setwan	per se n	20	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Meningkat	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
199	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	BKSDM	per se ntase	11,11	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Meningkat	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran								
200	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Disdukcapil	per se n	94	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
201	16.9.1. (a)	Persentase kepemilikan akta lahir penduduk	Disdukcapil	persen	54	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 77,4%	Dilaksanakan Tetapi Target Nasional Belum Tercapai (SB)
202	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Disdukcapil	persen	94	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Meningkat menjadi 85%	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
Target 16.10 menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional								
203	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Kominfo	persen	0	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	Meningkat	
		Jumlah pejabat PPID yang memiliki sertifikat PPID	Kominfo	orang	0			
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								
204	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan	Kesbangpol		tidak ada	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
		diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						
<b>Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksana dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan</b>								
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
205	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BKAD	Perse ntase		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
206	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.(perlu konfirmasi)	BKAD	Perse ntase		Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Di atas 12%	
207	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. (perlu konfirmasi)	BKAD	Perse ntase		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
208	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Kominfo		130	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
						tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).		
209	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Kominfo		Tidak memiliki data jumlah penduduk yang sudah terlayani mobile broadband	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Tidak ada data (NA)
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.								
210	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Kominfo		NA	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Tidak ada data (NA)
211	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Kominfo	Persentase	130	Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.	100%	
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.								



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
212	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).				Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	ada	
213	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).				Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	ada	
<p>Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p>								
214	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	Perse ntase		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
215	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	Perse ntase		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
216	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam	BPS	doku men		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	



NO	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian 2021	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	Keterangan
		Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).						
217	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Bappeda			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
218	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Disdukcapil	Ketersediaan		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	
219	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Kominfo	Pengunjung	58.445	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
220	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	Persentase		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	



## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Paser juga memperhatikan permasalahan yang muncul dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh berlandaskan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Selain itu, permasalahan pembangunan diperoleh dari proses musrenbang. Identifikasi permasalahan pembangunan yang diperoleh melalui proses musrenbang menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan telah disusun dengan pendekatan bawah-atas, yang berarti juga mengakomodir dan menelaraskan aspirasi masyarakat.

### 2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

#### 1. Pertumbuhan Sektor Pertanian Rendah dan Fluktuatif

Fungsi penting lain dari sektor pertanian adalah penyedia pangan. Ketahanan pangan setidaknya dapat dilihat dari dua ukuran yakni skor PPH dan tingkat ketersediaan pangan. Dilihat dari wilayahnya hingga saat ini masih terdapat 33% desa masuk dalam kategori desa rawan pangan. Dilihat dari skor PPH, kabupaten Paser memiliki skor PPH yang cukup tinggi namun demikian jika dilihat dari tingkat ketersediaan pangan kebutuhan pangan daerah masih belum dapat dipenuhi sendiri oleh Kabupaten Paser. Hampir separuh kebutuhan bahan pangan utama Kabupaten Paser masih didatangkan dari luar. Produksi pangan yang fluktuatif dan produktivitasnya yang Pemerintah Kabupaten Paser rendah menjadi penyebab dari rendahnya kemampuan daerah untuk menyediakan pangan pokok.

**Tabel 2.142**

Daftar Desa Rawan Pangan Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Desa
<b>Prioritas 1 (Sangat Rentan)</b>		
1	Tanjung Harapan	Tunas Keladen
2	Tanjung Harapan	Labuang Kalo
3	Tanjung Harapan	Senipah
4	Long Kali	Kepala Telake
<b>Prioritas 2 (Rentan)</b>		



1	Batu Sopang	Rantau Buta
2	Batu Sopang	Rantau Layung
3	Muara Samu	Muara Andeh
4	Batu Engau	Pengguren Jaya
5	Tanjung Harapan	Tanjung Aru
6	Tanjung Harapan	Selengot
7	Tanjung Harapan	Lori
8	Tanjung Harapan	Random
9	Tanah Grogot	Sungai Langir
10	Kuaro	Harapan Baru
11	Long Ikis	Muara Adang
12	Long Ikis	Krayan Sentosa
13	Muara Komam	Lusan
14	Muara Komam	Swan Slutung
15	Muara Komam	Sekuan Makmur
16	Long Kali	Muara Toyu
17	Long Kali	Perkuwin
18	Long Kali	Muara Lambakan
<b>Prioritas 3 (Agak Rentan)</b>		
1	Muara Samu	Tanjung Pinang
2	Muara Samu	Suweto
3	Muara Samu	Biu
4	Batu Engau	Lomu
5	Batu Engau	Segendang
6	Batu Engau	Riwang
7	Batu Engau	Bai Jaya
8	Pasir Belengkong	Sunge Batu
9	Tanah Grogot	Prepat
11	Long Ikis	Olung
12	Long Ikis	Tiwei
13	Long Kali	Muara Adang Ii

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser,, 2022

## 2. Industri Pengolahan belum mampu untuk menjadi Pendorong Sektor lainnya.

Peran dan pertumbuhan sektor industri pengolahan di Paser cukup tinggi yaitu Pada Tahun 2013 Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Paser hanya berjumlah 13 pabrik, dan pada tahun 2020 telah berjumlah 17 pabrik dengan kapasitas



sebesar 870 ton/jam, namun demikian sektor industri pengolahan itu didominasi oleh industri pengolahan kelapa sawit. Pertumbuhan industri pengolahan terus mengalami penurunan itu artinya industri CPO ini mulai masuk ke titik jenuh. Sebagaimana diketahui hingga saat ini industri pengolahan kelapa sawit baru menghasilkan CPO dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang relative padat modal. Untuk menciptakan multiplier yang lebih tinggi pada produk CPO (hilirisasi) dibutuhkan teknologi tinggi dengan pendanaan yang cukup tinggi pula.

### 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun berdasarkan analisis data gambaran umum daerah dan data lain yang terkait dengan tema RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023.

**Tabel 2.143**  
Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser

Sasaran	Indikator	Permasalahan
Sasaran 1.1: Meningkatnya efek berganda( <i>multiplier effect</i> ) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal / non tambang	1. Industri yang mengolah produk lokal belum berkembang 2. Kualitas dan kontinuitas produksi sektor pertanian belum terpenuhi
Sasaran 1.2 : Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	Kegiatan pariwisata belum mampu menjadi pengungkit aktivitas ekonomi masyarakat
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	1. Sistem pengumpulan data kinerja belum berjalan optimal 2. Keterbatasan kapasitas SDM tentang akuntabilitas kinerja 3. Evaluasi kinerja belum mampu sepenuhnya mendorong perbaikan manajemen kinerja 4. Pelaporan kinerja belum dijadikan rujukan/sumber dalam mendorong perbaikan selanjutnya.
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran belum optimal 2. Regulasi dana alokasi khusus (DAK) yang tidak selaras dengan jadwal perencanaan penganggaran daerah



Sasaran	Indikator	Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Belum optimalnya manajemen aset daerah</li><li>4. Masih rendahnya implementasi anggaran berbasis kinerja</li><li>5. Kualitas pengawasan internal belum optimal</li></ol>
Sasaran 2.2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan <i>e-government</i> belum sepenuhnya berjalan optimal</li><li>2. Belum semua unit pelayanan publik melakukan dan atau menindaklanjuti hasil survei kepuasan</li><li>3. Belum optimalnya pemenuhan ketersediaan sarana pelayanan terutama bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus (penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dsb.)</li><li>4. Budaya kerja ASN belum sepenuhnya berorientasi melayani</li></ol>
Sasaran 2.3 : Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih munculnya potensi konflik berbau SARA</li><li>2. Belum optimalnya penegakan perda</li><li>3. Menurunnya ketahanan sosial masyarakat</li></ol>
Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) masih berada pada rentang Sedang</li><li>2. Ketersediaan layanan, kualitas pembangunan jalan lingkungan, perbaikan RTLH dan Sanitasi masih belum merata</li><li>3. Sarana dan prasarana moda transportasi belum merata di semua wilayah</li></ol>
Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemanfaatan tata ruang Kabupaten yang belum optimal</li><li>2. Kesesuaian Pola Ruang antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota, serta pelaksanaannya belum optimal</li></ol>



Sasaran	Indikator	Permasalahan
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kemampuan rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup rendah
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterbatasan sarana dan prasarana serta alokasi pendanaan yang belum memadai</li><li>2. Kurangnya tenaga teknis yang ahli dibidangnya pada Badan Penanggulangan Bencana Kab. Paser</li><li>3. Minimnya regulasi Daerah dalam mendukung upaya penanggulangan kebencanaan termasuk dalam hal pengurangan resiko bencana, penanganan darurat dan penanganan dampak bencana</li><li>4. Tingkat kerentanan yang cukup tinggi</li></ol>
Sasaran 4.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sarana dan prasarana sekolah belum sepenuhnya sesuai standar</li><li>2. Distribusi dan kompetensi tenaga pendidik yang belum merata</li></ol>
	Rata - rata Lama Sekolah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan kesetaraan</li><li>2. Masih tingginya angka putus sekolah</li></ol>
Sasaran 4.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sarana dan prasarana kesehatan belum sepenuhnya sesuai standar</li><li>2. Distribusi dan kompetensi tenaga kesehatan yang belum merata</li><li>3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan</li><li>4. Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular</li><li>5. Belum berakhirnya masa pandemi covid 19</li></ol>
Sasaran 4.3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan dasar masih rendah</li></ol>



Sasaran	Indikator	Permasalahan
		2. Masih rendahnya keterserapan tenaga kerja formal 3. Pandemi Covid 19
	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Terbatasnya lapangan kerja formal 2. Jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja Kompetensi pencari kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja

## 2.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan RKPD

### 2.4.1 Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2021

Berikut adalah faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2021:

1. Komitmen pimpinan daerah dalam pencapaian target-target pembangunan daerah.
2. Posisi daerah sebagai penyangga IKN baru.
3. Meningkatnya harga komoditas ekspor di tingkat global
4. Dukungan Anggaran dari APBN dan APBD Provinsi

### 2.4.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2021

Berikut di bawah ini adalah faktor penghambat pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2021 :

1. Pandemi Covid 19 yang belum berakhir menimbulkan dampak pada sector Kesehatan dan ekonomi
2. Kondisi infrastruktur yang buruk menyebabkan rendahnya *multiflier* efek ekonomi lokal non tambang
3. Daya saing Sumber Daya Manusia yang masih rendah
4. Kualitas tata kelola pemerintahan yang belum optimal
5. Luasnya wilayah geografis
6. Masih lemahnya sistem ketahanan bencana



## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Memperkuat struktur ekonomi yang fundamental dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya merupakan konsep dasar pengembangan ekonomi wilayah. Salah satu upaya diperlukan adalah meningkatkan upaya pemerataan antar wilayah dan antar sektor perekonomian. Penataan dasar yang diperlukan adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas, pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, melakukan promosi investasi dan perdagangan, melakukan pengembangan kawasan ekonomi terpadu ataupun kawasan ekonomi yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial. Selanjutnya secara proposional peran migas, pertambangan dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian dikurangi secara bertahap.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser ke depan masih bertumpu pada sektor pertambangan/penggalian yang kontribusinya masih sangat dominan. Pentingnya kedudukan sumber daya alam dalam pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka pengenalan akan potensinya menjadi sangat penting. Dengan mengetahui potensi tersebut, maka dapat memudahkan dalam pemanfaatan dan penataan, sehingga fungsi ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal.

Sedangkan sektor pertanian, perdagangan dan sektor industri pengolahan merupakan sektor-sektor yang sangat menjanjikan di masa depan dan layak untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena potensinya demikian besar, dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dan merupakan sektor yang dapat diperbaharui (renewable) dengan pertumbuhan yang positif dan relatif konstan, walaupun kontribusinya masih relatif kecil.



### **3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan, Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Nasional Pada RKP 2023**

Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah. Sejak tahun 2016, perhitungan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perubahan tahun dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Periode waktu sebelum tahun 2016, perhitungan pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan tahun dasar 2000, sedangkan untuk tahun 2016 ke depan dihitung dengan berdasarkan tahun dasar 2010.

Berdasarkan hasil perhitungan angka sangat sementara yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser tahun 2021 telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 dengan nilai pertumbuhan ekonominya sebesar -2,86 persen ditahun 2020 menjadi 5,41 persen ditahun 2021.

Perhitungan PDRB sejak tahun 2016, selain terjadi pergantian pada penggunaan tahun dasar juga terjadi penambahan kategori lapangan usaha. Pada perhitungan PDRB sebelumnya, kategori lapangan usaha hanya dikelompokkan pada 9 sektor lapangan usaha, sedangkan sejak tahun 2016, perhitungan PDRB mengelompokkan sektor lapangan usaha menjadi 17 kategori. Penambahan jumlah kategori ini bertujuan untuk memperoleh perhitungan nilai PDRB yang lebih rinci sesuai dengan perkembangan kebutuhan data yang diharapkan oleh pengguna data serta disesuaikan dengan perkembangan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLU) tahun 2009.

Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi daerah yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya dan berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka pencapaian makro ekonomi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### **A. Kinerja Ekonomi Daerah**

Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum disajikan dalam dua dasar hitung yang meliputi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan tujuan untuk memperoleh angka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah,



sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung untuk melihat pergeseran dari struktur ekonomi. Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut :

### 1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Kemajuan ekonomi suatu daerah memang bisa kita lihat secara kasat mata, namun untuk melakukan perencanaan strategi pembangunan kedepan, hasil pencapaian pembangunan perlu dipotret secara kuantitatif. Kemajuan ekonomi suatu daerah secara kuantitatif bisa dipotret dengan menggunakan instrumen yang bernama PDRB. Meskipun instrumen ini tidak mutlak memberikan gambaran kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya secara nyata, namun paling tidak dapat dipakai untuk melihat struktur dan pergeseran ekonomi yang terjadi di suatu wilayah.

Struktur perekonomian Kabupaten Paser pada tahun 2021 masih didominasi oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Nilai kontribusi kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian adalah sebesar 70,95% dari total PDRB kabupaten Paser.

Kategori lapangan usaha lainnya yang juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser adalah kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori lapangan usaha industri pengolahan dan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser adalah sebesar 12,02%, kategori industri pengolahan sebesar 5,28% dan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,73%.

Gambaran lebih jelas terkait kontribusi masing-masing kategori, dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Paser  
Tahun 2017-2021

LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,29	10,20	10,56	12,68	12,02
B	Pertambangan dan Penggalian	73,08	74,40	72,63	67,55	70,95
C	Industri Pengolahan	4,92	4,49	4,68	5,86	5,28



LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020	2021
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	2,20	2,38	2,87	3,17	2,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,54	3,56	3,87	4,44	3,73
H	Transportasi dan Pergudangan	0,44	0,44	0,47	0,53	0,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,28	0,30	0,33	0,28
J	Informasi dan Komunikasi	0,62	0,61	0,66	0,79	0,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,36	0,36	0,39	0,44	0,37
L	Real Estate	0,30	0,29	0,30	0,34	0,28
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1,07	1,06	1,13	1,23	1,05
P	Jasa Pendidikan	1,18	1,21	1,35	1,62	1,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,41	0,42	0,46	0,65	0,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,22	0,22	0,23	0,26	0,21
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2022

**Tabel 3.2**

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Paser (miliar rupiah), 2017-2021

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2011**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 521,28	5 878,75	6 231,56	6 390,88	6 611,46
Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISH	64,83	73,68	81,40	81,11	84,99
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 280,00	1 431,55	1 592,22	1 585,89	1 635,95
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7 983,04	9 673,09	9 702,38	8 471,15	9 625,40
Perubahan Inventori	127,61	99,33	45,30	32,35	13,56
Net Ekspor Barang dan Jasa	28 977,49	30 897,72	30 373,04	26 676,78	36 024,56



Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2011**
Produk Domestik Bruto	43 954,25	48 054,12	48 025,89	43 238,17	53 995,92

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2022

Catatan : \*) Angka Sementara, \*\*) Angka Sangat Sementara

## 2) PDRB Harga Konstan

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan tentang capaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam hal pertumbuhannya. Sejak tahun 2016, perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang tertuang dalam perhitungan PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2010, sedangkan perhitungan PDRB pada tahun-tahun sebelumnya dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2000. Sebelum tahun 2016, perhitungan pertumbuhan ekonomi disajikan dalam 9 (sembilan) kelompok sektor lapangan usaha, sedangkan perhitungan PDRB setelah periode tahun 2016 disajikan ke dalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha yang secara tidak langsung dampak memberikan gambaran lebih detail dibandingkan dengan penyajian pada periode tahun sebelum tahun 2016.

Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser berdasarkan ADHK hasil perhitungan angka sangat sementara mencapai angka 5,41%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, nilai pertumbuhan ini mulai mengalami kenaikan sebesar 8,27%. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori/lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 7,99% dimana pada tahun 2020 sebesar -3,72%. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

**Tabel 3.3**

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 (Persen)

LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,22	-0,04	3,35	-1,04	-3,91
B	Pertambangan dan Penggalian	0,43	3,78	3,61	-3,72	7,99
C	Industri Pengolahan	8,98	5,18	4,49	-2,77	-4,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,23	-0,12	1,82	7,85	3,36



LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020*	2021**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,52	2,71	6,85	2,31	6,46
F	Konstruksi	5,11	8,94	14,91	-5,02	-3,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,10	6,16	4,96	1,15	3,11
H	Transportasi dan Pergudangan	3,93	5,55	3,99	-0,09	3,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,79	5,96	4,19	-2,28	3,11
J	Informasi dan Komunikasi	6,46	3,95	6,43	9,08	6,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,35	5,75	3,67	1,89	2,68
L	Real Estate	1,93	3,74	1,78	1,12	-0,96
M,N	Jasa Perusahaan	1,06	3,77	1,37	-3,67	8,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,20	4,81	4,18	-3,47	2,07
P	Jasa Pendidikan	7,28	7,29	5,97	3,91	2,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,70	6,91	5,93	22,84	13,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,39	6,45	4,94	-2,12	1,16
<b>PDRB</b>		<b>1,17</b>	<b>3,69</b>	<b>3,99</b>	<b>-2,86</b>	<b>5,41</b>
<b>PDRB Tanpa Pertambangan Dan Penggalan</b>		<b>3,23</b>	<b>3,46</b>	<b>5,05</b>	<b>-0,56</b>	<b>-1,34</b>
<b>Kategori Pertambangan Dan Penggalan</b>		<b>0,43</b>	<b>3,78</b>	<b>3,61</b>	<b>-3,72</b>	<b>7,99</b>

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser, 2022

Catatan : \*) Angka sementara; \*\*) Angka sangat sementara

Perekonomian Kabupaten Paser pada tahun 2021 tumbuh sebesar 5,41 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,86. Ditinjau menurut Lapangan Usaha, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa sektor diantaranya lapangan usaha Pertambangan dan penggalan, dimana kategori ini tumbuh menjadi 7,99 persen.

Apabila ditelaah lebih lanjut, kinerja ekonomi Kabupaten Paser tahun 2021 dari sisi lapangan usaha kategori Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan



ekonomi positif (8,28%). Kategori Transportasi dan Pergudangan (3,56%). Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6,46%).

Perekonomian Kabupaten Paser yang diukur menurut besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar Harga Berlaku menurut jenis pengeluaran 36.588,97 miliar pada tahun 2021, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Paser (miliar rupiah), 2017-2021

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 820,80	3 941,81	4 067,39	4 032,16	4 073,69
Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISH	45,43	49,25	51,86	51,14	51,50
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	752,48	832,61	920,70	895,95	910,34
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5 942,99	7 018,84	6 569,97	5 626,97	6 266,04
Perubahan Inventori	101,73	72,02	32,95	23,80	8,51
Net Ekspor Barang dan Jasa	22 474,22	22 447,53	24 091,87	24 081,79	25 278,90
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>33 137,65</b>	<b>34 362,05</b>	<b>35 734,75</b>	<b>34 711,82</b>	<b>36 588,97</b>

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2022  
Catatan : \*) Angka Sementara, \*\*) Angka Sangat Sementara

### 3) Besaran Nilai PDRB

Besaran nilai PDRB secara tidak langsung dapat menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi nilai PDRB yang dimiliki oleh suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kemampuan suatu wilayah dalam mengelola dan menggali sumber daya ekonominya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung



menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha berfluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Sejak tahun 2016 Nilai PDRB ADHK 2010 terus mengalami penurunan yang puncaknya pada tahun 2016 dikarenakan pelambatan ekonomi global yang berimbas kepada menurunnya harga Batubara yang menjadi sumber kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Paser.

PDRB ADHK 2010 dengan batubara memiliki sumbangan terbesar dalam perekonomian Kabupaten Paser, tahun 2021 PDRB Kabupaten Paser sebesar 36,5 triliun rupiah, sementara Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian hanya mencapai 9,4 triliun rupiah, nilai tersebut terus mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, walaupun demikian selama 3 tahun terakhir PDRB Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian, Nominal PDRB Kabupaten Paser terus mengalami peningkatan.

**Tabel 3.5**  
PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)  
Tahun 2017-2021 (Milyaran Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3 792,74	3 791,29	3 918,19	3 877,43	3 725,68
B	Pertambangan dan Penggalian	24 261,13	25 178,47	26 087,45	25 118,23	27 124,06
C	Industri Pengolahan	1 521,86	1 600,74	1 670,56	1 626,18	1 561,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,44	8,43	8,58	9,25	9,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,42	6,59	7,04	7,21	7,67
F	Konstruksi	720,85	785,32	902,40	857,07	824,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 186,12	1 259,17	1 321,69	1 336,88	1 378,43



No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
H	Transportasi dan Pergudangan	145,80	153,89	160,03	159,89	165,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	86,87	92,05	95,91	93,72	96,63
J	Informasi dan Komunikasi	253,74	263,77	280,72	306,21	327,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	113,47	120,00	124,41	126,76	130,16
L	Real Estate	104,51	108,42	110,35	111,59	110,52
M,N	Jasa Perusahaan	15,09	15,66	15,87	15,29	16,56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	340,03	356,39	371,29	358,41	365,83
P	Jasa Pendidikan	388,75	417,08	441,98	459,27	473,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129,92	138,89	147,13	180,72	204,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya	61,92	65,91	69,17	67,70	68,48
<b>PDRB ADHK Kab. Paser</b>		<b>33 137,65</b>	<b>34 362,05</b>	<b>35 734,75</b>	<b>34 711,82</b>	<b>36 588,97</b>
<b>PDRB ADHK Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian</b>		<b>8 876,53</b>	<b>9 183,58</b>	<b>9 647,30</b>	<b>9 593,59</b>	<b>9 464,90</b>
<b>PDRB ADHK Kategori Pertambangan Dan Penggalian</b>		<b>24 261,13</b>	<b>25 178,47</b>	<b>26 087,44</b>	<b>25 118,23</b>	<b>27 124,06</b>

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser Tahun 2022

Tiga kategori yang mempunyai nominal terbesar dalam PDRB Kabupaten Paser, antara lain kategori Pertanian, Pertambangan dan Industri Pengolahan. Kategori Pertanian masih didominasi oleh perkebunan tahunan yaitu kelapa sawit. Perkembangan perkebunan kelapa sawit masih menghasilkan tren positif dalam hal nominal PDRB. Sementara itu, kategori pertambangan dan penggalian yang mempunyai Nilai PDRB tertinggi hingga tahun 2021. Industri pengolahan di Kabupaten Paser didominasi oleh industri pengolahan minyak kelapa sawit yaitu CPO dan minyak mentah lainnya.

Meningkatnya pembangunan pabrik kelapa sawit selama 5 tahun terakhir membuktikan bahwa hasil perkebunan Kabupaten Paser cukup melimpah dan sangat dimungkinkan untuk dibangun industri hilir di wilayah Kabupaten Paser. Dengan terus bertambahnya pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.



**Tabel 3.6**  
PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  
Tahun 2017-2021 (Milyaran Rupiah)

No.	Kategori/Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 962,54	4 899,32	5 072,68	5 483,47	6 491,27
B	Pertambangan dan Penggalian	32 123,23	35 754,03	34 881,43	29 208,02	38 307,70
C	Industri Pengolahan	2 160,65	2 155,34	2 250,45	2 533,73	2 851,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,88	10,11	10,39	11,21	11,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,42	8,86	9,59	9,82	10,48
F	Konstruksi	965,16	1 144,15	1 380,56	1 372,70	1 385,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 554,11	1 710,34	1 860,14	1 919,99	2 016,24
H	Transportasi dan Pergudangan	192,54	211,11	223,42	227,97	244,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	121,17	133,57	144,18	143,91	152,88
J	Informasi dan Komunikasi	274,08	291,81	314,62	343,49	368,69
K	Jasa Keuangan	160,07	175,15	185,19	188,99	198,26
L	Real Estate	131,59	139,65	144,08	146,38	149,08
M,N	Jasa Perusahaan	23,73	24,93	25,39	24,47	26,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	472,15	509,64	544,84	530,19	568,17
P	Jasa Pendidikan	517,30	579,92	646,31	702,53	774,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,77	200,79	220,92	279,84	323,54
R,S,T,U	Jasa Lainnya	96,86	105,41	111,72	111,55	115,01
<b>PDRB ADHB Kab. Paser</b>		<b>43 954,25</b>	<b>48 054,12</b>	<b>48.025,89</b>	<b>43.238,17</b>	<b>53 995,92</b>
<b>PDRB ADHB Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian</b>		<b>11 831,02</b>	<b>12 300,09</b>	<b>15 688,21</b>	<b>14 030,14</b>	<b>13 144,46</b>
<b>PDRB Kategori Pertambangan Dan Penggalian</b>		<b>32 123,23</b>	<b>35 754,02</b>	<b>38 881,42</b>	<b>29 208,02</b>	<b>38 307,70</b>

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser Tahun 2022

PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha 2017-2021 sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bersifat fluktuatif yang kemudian meningkat lagi tahun 2021 sebesar Rp.53.995,92 milyar.

Namun seperti kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Paser terdapat pertambangan non migas (batubara) yang memiliki kontribusi sangat besar dalam pembentukan nilai PDRB, sehingga perlu kita lihat angka PDRB jika dihitung tanpa



subsektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2021 angka PDRB ADHB tanpa kategori pertambangan dan penggalian sebesar 13.144,46 milyar rupiah, sedangkan untuk PDRB ADHK memiliki nominal sebesar 9 464,90 milyar rupiah.

#### 4) PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Paser dengan Pertambangan dan Penggalian mengalami kenaikan sejak tahun 2017 yaitu 160,30 juta rupiah, tahun 2018 yaitu 171,64 juta rupiah, tahun 2019 yaitu 173,34 juta rupiah dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 157,2 juta rupiah serta meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar 194,51 juta rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Paser tanpa Batu Bara mengalami kenaikan dari 51 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi 52 juta rupiah tahun 2018 dan 47,4 juta rupiah tahun 2019 serta 51 juta rupiah pada tahun 2020.

**Grafik 3.1**  
PDRB Perkapita Kabupaten Paser



Sumber : BPS Kabupaten Paser dan BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022.

Perlu diingat bahwa secara riil pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian tidak dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu juga dilihat angka PDRB per kapita Kabupaten Paser jika dihitung tanpa memasukkan sub sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2019 angka PDRB per kapita Kabupaten Paser jika dihitung tanpa memasukkan komponen sub sektor pertambangan dan penggalian hanya sebesar 56,5 Juta Rupiah, sedangkan dengan pertambangan dan penggalian pendapatan perkapita sebesar 194,51 juta Rupiah.

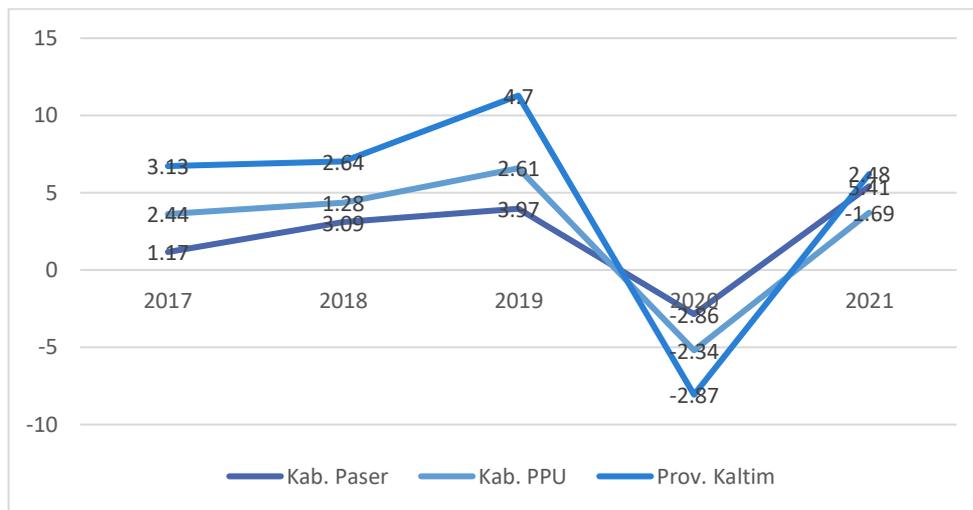


## 5) Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perhitungan sangat sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser menunjukkan kenaikan dari -2,86 pada tahun 2020 menjadi 5,41 pada tahun 2021. Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebesar 2,48 setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,87. Kabupaten Paser memperoleh capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 disusul oleh Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser selengkapnya dapat dilihat melalui grafik berikut.

**Grafik 3.2**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Paser 2022, BPS PPU 2022, dan BPS Kaltim 2022

Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan. Perkiraan capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah 3,5-4,5

## 6) Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap



tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli penduduk menurun.

Mengingat sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Paser belum melaksanakan perhitungan inflasi, maka untuk kebutuhan penyusunan laporan ini, angka inflasi yang disajikan didekati dengan hasil perhitungan inflasi Kota Balikpapan. Pada April 2021, tingkat inflasi Kota Balikpapan sebesar 0,02%. Tingkat inflasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,25%.

## 7) Investasi

Nilai investasi Kabupaten Paser meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.657 milyar menjadi Rp.1.022 triliun pada tahun 2021 yang terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp.567,12 milyar dan penanaman Modal Asing sebesar Rp.455,37 milyar. Adapun sector usaha yang menarik investasi tertinggi adalah pertambangan, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan serta industri makanan.

## 8) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun atas 3 (tiga) dimensi dasar yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pengetahuan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta indikator standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

**Tabel 3.7**

Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, 2017-2021

Komponen	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	72.05	72.28	72.52	72.62	72.88
Rata-Rata Lama Sekolah	8.20	8.22	8.54	8.55	8.79
Angka Harapan Lama Sekolah	12.98	12.99	13.00	13.10	13.25



Komponen	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	10.280	10.605	10.767	10.344	10.673
<b>IPM</b>	<b>71.16</b>	<b>71.61</b>	<b>72.29</b>	<b>72.04</b>	<b>72.93</b>

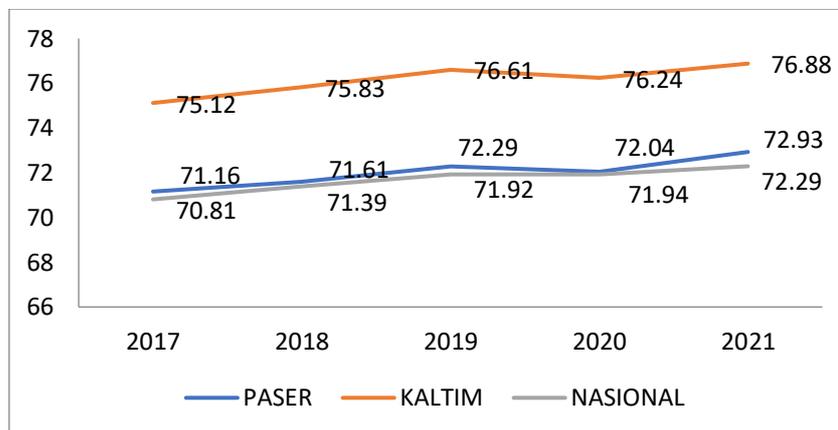
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator yang paling berpengaruh adalah pengeluaran per kapita rill sementara yang pengaruhnya paling rendah adalah rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Oleh karena itu program peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan dan peningkatan pendapatan per kapita harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Paser.

Berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Paser, IPM Kabupaten Paser tahun 2021 sebesar 72,93 poin, meningkat sebesar 0,89 poin dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan nilai IPM seiring dengan peningkatan yang terjadi pada AHH, AHS dan RLS, serta pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

**Grafik 3.3**

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Paser 2022 dan BPS Kaltim 2022

## 9) Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Paser tahun 2021 mencapai 277.602 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,75% Adapun rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Paser tahun 2021 adalah 108,65 yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. Gambaran pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya disajikan pada tabel 3.8 berikut ini :



**Tabel 3.8**  
Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk	254.503	258.022	285.894	275.452	277.602
Komposisi menurut jenis kelamin:					
- Laki-laki	132.538	133.995	151.533	143.647	144.555
- Perempuan	121.965	124.027	134.894	131.805	133.047
Pertumbuhan (%)	2,61	1,38	2,11	1,75	1,75
Tingkat Kepadatan (per km <sup>2</sup> )	21,93	22,24	24,64	23,74	

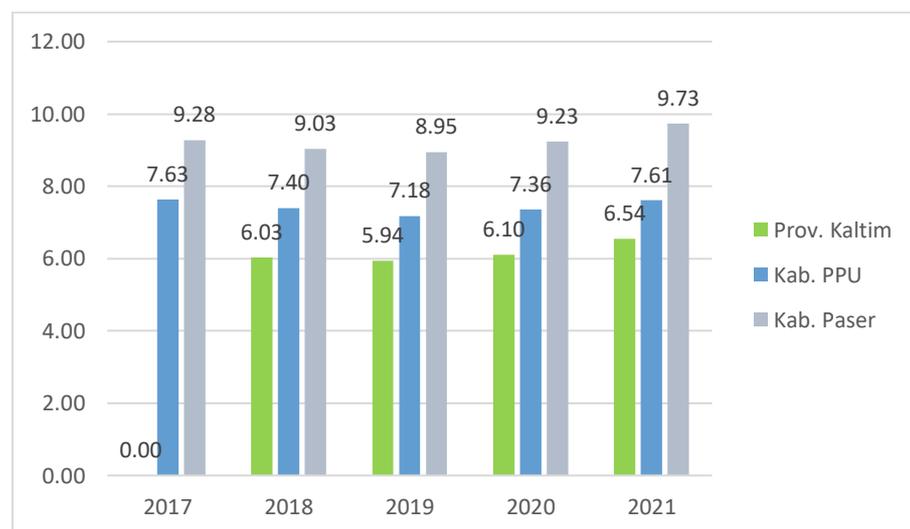
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2022

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk bersifat fluktuatif, sedangkan tingkat kepadatan penduduk selalu meningkat.

### 10) Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Paser sebanyak 9,23 persen pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 9,73 persen pada tahun 2021. Pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,08 dibanding tahun 2018 dan tahun 2021 persentase penduduk miskin meningkat sebesar 0,5%.

**Grafik 3.4**  
Penduduk Miskin di Kabupaten Paser (%)

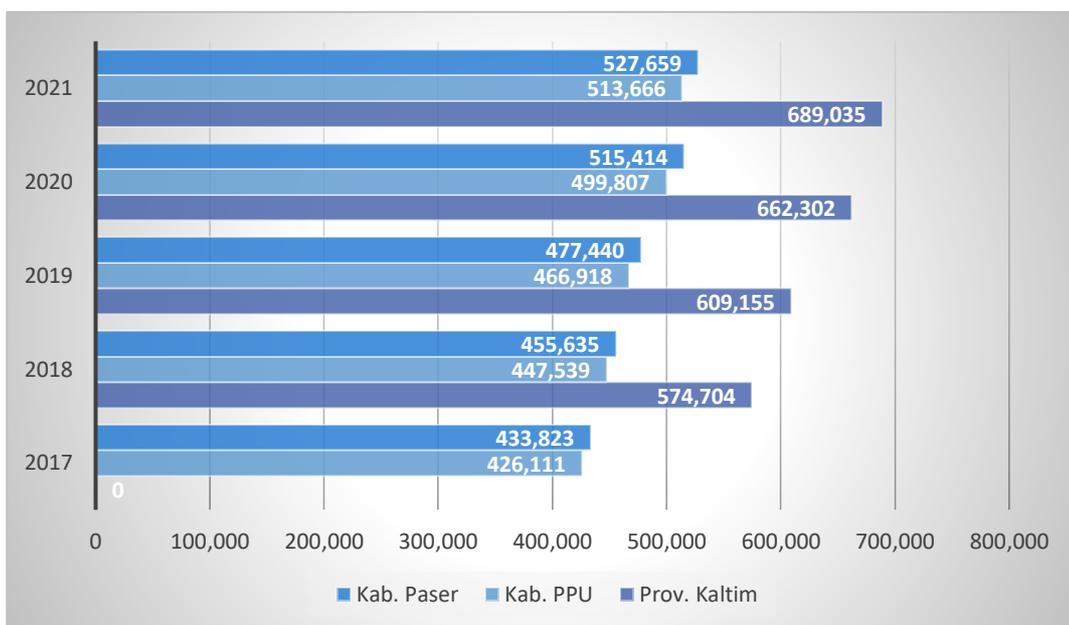


Sumber : BPS Paser 2022 dan BPS Kaltim 2022



Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. BPS mencatat garis kemiskinan penduduk Indonesia September 2020 sebesar Rp. 486.168/kapita/bulan. Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan non-makanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut, maka masuk kategori penduduk miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Paser selalu mengalami kenaikan, dan pada tahun 2021 garis kemiskinan Kabupaten Paser sebesar Rp 527.659/kapita/bulan. Angka ini berada diatas Kabupaten Penajam Paser Utara dan penduduk Indonesia.

**Grafik 3.5**  
Garis Kemiskinan Kabupaten Paser



Sumber : BPS Paser 2022 dan BPS Kaltim 2022

## B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023

Tahun 2023 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Kinerja Perekonomian Kabupaten Paser pada Tahun 2022 dan 2023 dihadapi pada beberapa tantangan dan peluang yang perlu disikapi dengan cermat. Adapun tantangan dan peluang dimaksud antara lain sebagai berikut:



## 1) Tantangan

- a. Pandemi Covid mengubah perilaku masyarakat dalam berinteraksi, berinvestasi dan dalam perilaku hidup.
- b. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kabupaten Paser relatif rendah
- c. Sektor industri belum mampu mendorong sektor perdagangan dan jasa
- d. Semakin berkurangnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian dan masih kurangnya jumlah penyuluh pertanian
- e. Belum optimalnya pemanfaatan SDA dalam mendukung pemerataan kesejahteraan dan daya saing ekonomi
- f. Berkurangnya lahan pertanian produktif karena adanya alih fungsi lahan oleh berbagai kepentingan
- g. Kurangnya investasi pada sektor pariwisata
- h. Belum tersedianya Industri hilir untuk komoditas pertanian
- i. Masih Rendahnya kualitas layanan publik
- j. Belum optimalnya pemenuhan ketersediaan sarana pelayanan terutama bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.
- k. Kemampuan rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup rendah

## 2) Peluang

- a. Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata
- b. Area perkebunan kelapa sawit yang cukup luas, sehingga meningkatkan produksi TBS di Kabupaten Paser, yang mana hal ini mendorong dalam meningkatkan jumlah Pabrik CPO
- c. Luas Lahan produktif untuk sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan masih cukup tersedia
- d. Berkembangnya kelembagaan petani di Kabupaten Paser dalam rangka untuk meningkatkan laju adopsi teknologi di sektor pertanian
- e. Kondisi ketentraman dan ketertiban Kabupaten Paser cukup terkendali
- f. Adanya Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait reformasi birokrasi yang merupakan landasan normatif bagi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Paser



- g. Adanya Peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi pasca pandemic
- h. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang memudahkan pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendaftarkan HAKI dan mendirikan PT. Sebagaimana UMKM mejadi tombak pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat menyerap tenaga kerja semakin besar

**C. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada RKPD 2023**

**1) Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Timur**

Ekonomi Makro Kalimantan Timur pada tahun 2023 diharapkan tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**

Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Uraian	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023
<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	76,88	77,25	77,75
<b>Tingkat Kemiskinan</b>	6,54	56,00	5,90
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	6,83	6,75	6,50
<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	2,48	3,5± 1	3,5± 1
<b>PDRB Perkapita (Juta Rp)</b>	76,88	170	175
<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara (%)</b>	2,69	2,00	2,50
<b>Nilai Tukar Petani</b>	120,94	113,00	114,00
<b>Indeks Gini</b>	0,334	0,313	0,308
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	75,06	76,05	76,15
<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	68,47	B (71,50)	B (72,00)

Sumber : BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, 2022



## 2) Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Penguatan ekonomi Kalimantan Timur setelah diterpa pandemi COVID-19 melanjutkan perbaikan perekonomian tahun 2021 diharapkan terus berlangsung dan memberikan banyak dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Adapun target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat ditempuh melalui :

- 1) Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas) melalui pengembangan kawasan sentra-sentra produksi guna mempercepat munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan berbasis pada masing-masing komoditas unggulan.
- 2) Meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan di Kalimantan Timur yang disertai dengan penguatan rantai pemasaran, kemudahan berusaha, dan insentif investasi. dalam rangka percepatan upaya transformasi ekonomi. Untuk mendukung proses pengembangan hilirsasi industri tersebut, akan dilakukan peningkatan kapasitas SDM dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja seperti melalui pendidikan dan pelatihan serta pendidikan vokasi dan menengah. Hal ini dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan berkualifikasi serta untuk mendorong investasi dalam negeri. Sehingga penciptaan nilai tambah dari kawasan strategis untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi.
- 3) Penguatan daya saing infrastruktur dasar, mencakup konektivitas, energi, air baku serta infrastruktur pendukung ekonomi lainnya. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mendukung konektivitas antara sentra produksi kawasan industri dengan outlet, Melalui penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas, maka efisiensi dan efektifitas kegiatan perekonomian dapat terwujud.

## D. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2023

### 1) Sasaran Ekonomi Makro

Upaya peningkatan produktivitas di semua sector ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan Gross National



Income (GNI) perkapita (Atlas Method) menjadi US\$4.720-4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*.

**Tabel 3.10**

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
<b>Perkiraan Besaran-Besaran Pokok</b>				
Pertumbuhan PDB (% yoy)	3,7	5,0-5,5	5,7-6,0	5,3-5,9
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% yoy): Akhir Periode	1,87	3,0	2,8	3 ± 1
<b>Neraca Pembayaran</b>				
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	144,9	151,6-152,4 <sup>c)</sup>	146,8	158,9-160,9
- dalam bulan impor	8,0	7,5-7,4 <sup>c)</sup>	6,8	7,5-7,4
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	0,3	(0,3)-(0,5) <sup>c)</sup>	(1,9)	(0,4)-(0,6)
<b>Keuangan Negara</b>				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,1	8,4 <sup>a)</sup>	10,5-11,7	10,2-10,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	(2,6)	(2,6) <sup>a)</sup>	0,2-0,0	(0,7)-(0,5)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(4,6)	(4,9) <sup>a)</sup>	(1,6)-(1,7)	(2,9)-(2,8)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	40,7	43,8 <sup>a)</sup>	28,9-29,6	41,7-42,4
<b>PMTB/Investasi</b>				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,8	5,4-6,0	7,2-7,8	6,1-7,1
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	901,0	968,4	1294,1	1.250-1.400
<b>Target Pembangunan</b>				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5-6,3	4,0-4,6	5,3-6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5-9,0	7,0-7,5	7,5-8,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376-0,378	0,374-0,377	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,29	72,67-72,69	74,77 <sup>c)</sup>	73,31-73,49
<b>Penurunan Emisi GKR</b>	23,55	26,87	26,80	27,02
<b>Indikator Pembangunan</b>				
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103-105	104	103-105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69 <sup>b)</sup>	104-106	106	106-107

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Keterangan : a) *Exercise Internal* Kementerian PPN/Bappenas, b) Capaian Rata-Rata Tahun 2021 (BPS), dan c) Terdapat penyesuaian angka outlook 2022 dari sasaran pada pemutakhiran RKP tahun 2022 setelah rilis realisasi angka 2021.

Catatan: Sesuai dengan perkembangan terkini, khususnya ketidakpastian globab akibat tensi geopolitik, maka outlook mengalami revisi ke bawah dari 5,2-5,5 menjadi 5,0-5,5 persen; Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif



Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US\$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31-73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107.

### **3) Arah Kebijakan**

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

#### 1) Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (between sectors). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

#### 2) Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.



### 3) Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

#### 3.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada Tahun 2023 ekonomi makro Kabupaten Paser diharapkan tumbuh positif. Sasaran ekonomi makro tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.11**  
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Uraian	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,41	1,32	3,5-4,5
Tingkat Kemiskinan	9,73	8,00	8,80
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,7	3,45	4,5
Indeks Gini	0,288	0,275	0,270
Indeks Pembangunan Manusia	72,93	73,03	73,77

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Paser, 2022

Laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi sektor ekonomi yang ada sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor :

1. Pengaruh faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta perkembangan perekonomian daerah sekitar.
2. Pengaruh faktor internal yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian melalui pembinaan UMKM dan Koperasi serta pengembangan



sistem pendukung usaha bagi UMKM, perbaikan dan pemeliharaan pasar-pasar, penyediaan infrastruktur ekonomi dan lain-lain.

Selain itu faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi adalah kondisi sosial dan politik, dimana keadaan sosial dan politik yang stabil akan mendukung perkembangan perekonomian daerah.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak terlepas dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kebijakan keuangan Kabupaten Paser disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang merupakan tahun ke-2, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah yang menjadi salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat. Keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan



akan terus meningkat. Peningkatan ini disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Secara umum kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Paser pada tahun 2023 diarahkan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, melalui kebijakan pendapatan tahun 2023 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
- b. Kebijakan belanja daerah pada APBD digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.
- c. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah serta pengembalian pinjaman Daerah.

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pada Sumber Penerimaan daerah terdiri atas 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2). Pendapatan Transfer, 3).Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Kabupaten Paser.

Terkait dengan peningkatan kapasitas PAD dan peningkatan dana perimbangan sebagai upaya penguatan kemampuan fiskal, perlu dilakukan upaya :

- a. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas atau pengelola pajak daerah;
- d. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- e. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti system pembayaran secara online;



- f. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
- g. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
- h. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah kepada masyarakat khususnya para wajib pajak daerah.
- i. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- j. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan dilakukannya peninjauan kembali terhadap dasar hukum pungutan pajak dan retribusi daerah dengan mempedomani Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

**Tabel 3.12**

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Paser

Tahun 2021 s.d Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022 (Per 31 Mei)	RKPD 2022	Proyeksi 2023
1	2	4	4		4	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>173.315.327.565,13</b>	<b>270.129.905.878,22</b>	<b>7.404.384.938</b>	<b>180.239.437.775,00</b>	<b>161.478.006.250,00</b>
4.1.1	Pajak Daerah	33.268.971.828,26	48.074.617.655,26	2.634.124.784	44.142.500.000,00	44.142.500.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	9.527.589.970,21	10.780.217.789,50	3.841.952.613	13.281.984.425,00	10.217.838.250,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.164.142.133,44	5.038.453.633,21	0	6.500.000.000,00	5.000.000.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	126.354.623.633,22	206.236.616.800,25	928.307.542	116.314.953.350,00	102.117.668.000,00
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.182.811.359.242,00</b>	<b>1.913.090.027.703,00</b>	<b>254.612.647.300</b>	<b>1.565.136.013.555,35</b>	<b>1.480.214.375.000,00</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.682.044.073.743,00	1.300.917.444.701,00	190.513.604.300	1.286.229.341.555,35	1.215.675.363.000,00
	Dana Perimbangan	1.513.531.810.485,00	1.139.626.323.072,00			<b>1.097.037.972.000</b>
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		682.662.771.555,35	<b>720.123.532.000,00</b>



Kode	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022 (Per 31 Mei)	RKPD 2022	Proyeksi 2023
1	2	4	4		4	4
	(DBH)					
	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		438.745.286.000,00	376.914.440.000 ,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	-		-	-
	Dana Insentif Daerah (DID)	43.329.877.000,00	34.102.035.000,00		37.102.035.000,00	3.376.283.000 ,00
	Dana Desa (DD)	125.182.386.258,00	127.189.086.629,00		127.719.249.000,00	115.261.108.000 ,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	500.767.285.499,00	612.172.583.002,00	64.099.043.000	278.906.672.000,00	264.539.012.000 ,00
	- Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	169.578.622.255,00	221.117.067.002,00		278.906.672.000,00	264.539.012.000 ,00
	- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	331.188.663.244,00	391.055.516.000,00		-	-
4.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>47.926.825.100,00</b>	<b>46.223.386.678,00</b>	<b>0</b>	<b>53.264.532.580,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.118.997.100,00	3.990.000.000,00	0	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00



Kode	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022 (Per 31 Mei)	RKPD 2022	Proyeksi 2023
1	2	4	4		4	4
	- Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
4.3.2	Dana Darurat	-	-		-	-
4.3.3	Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	43.807.828.000,00	42.233.386.678,00		49.264.532.580,00	-
	- Pendapatan Hibah Dana BOS				49.264.532.580,00	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.404.053.511.907,13</b>	<b>2.229.443.320.259,22</b>	<b>262.017.032.238</b>	<b>1.798.639.983.910,35</b>	<b>1.645.692.381.250,00</b>

Keterangan : Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Prov. Kaltim Belum dialokasikan



Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. 1.645.692.381.250,00. Dalam proyeksi pendapatan daerah tahun 2023, sumber penerimaan pendapatan yang diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan dengan proyeksi tahun 2022.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Berkaitan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
- b. Mendukung pencapaian sasaran program pembangunan dan prioritas pembangunan Kabupaten Paser tahun 2023;
- c. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran Pendidikan dan Kesehatan sesuai perundang-undangan;
- d. Mendukung program strategis nasional dan provinsi dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.



Tabel 3.13

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 s.d Tahun 2023

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022 (Per 31 Mei)	RKPD Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.412.973.358.973,31</b>	<b>1.590.213.275.471,00</b>	<b>348.443.606.403</b>	<b>1.114.937.423.466,05</b>	<b>1.001.230.928.594,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	745.421.072.642,00	664.457.254.015,00	243.145.246.954	672.546.746.732,23	647.891.012.412,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	598.472.440.672,31	904.699.805.382,00	102.623.359.449	421.528.562.369,82	330.739.916.182,00
5.1.3	Belanja Bunga				-	-
5.1.4	Belanja Subsidi				-	-
5.1.5	Belanja Hibah	69.079.845.659,00	21.056.216.074,00	2.675.000.000	20.862.114.364,00	22.600.000.000,00
	Pengamanan Pemilukades untuk Kodim dan Polres				600.000.000,00	-
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				19.545.209.290,00	-
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				716.905.074,00	-
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial				-	-
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat				-	-
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>571.330.520.756,47</b>	<b>428.445.542.273,00</b>	<b>3.365.189.940</b>	<b>576.803.409.719,80</b>	<b>359.422.500.162,00</b>
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>69.966.802.134,00</b>	<b>8.548.889.049,00</b>	<b>235.063.000</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>
	Belanja Tidak Terduga	69.966.802.134,00	8.548.889.049,00	235.063.000	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Paser

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022 (Per 31 Mei)	RKPD Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>250.548.819.170,00</b>	<b>151.037.043.950,00</b>	<b>40.774.139.846</b>	<b>290.399.150.724,50</b>	<b>277.997.285.827,00</b>
<b>5.4.01</b>	<b>Belanja Bagi Hasil</b>	<b>3.665.020.100,00</b>	<b>2.982.727.150,00</b>		<b>5.742.448.442,50</b>	<b>5.483.743.150,00</b>
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah				4.414.250.000,00	4.414.250.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah				1.328.198.442,50	1.069.493.150,00
<b>5.4.02</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>246.883.799.070,00</b>	<b>148.054.316.800,00</b>	<b>40.774.139.846</b>	<b>284.656.702.282,00</b>	<b>272.513.542.677,00</b>
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				42.821.510.782,00	<b>30.361.037.477,00</b>
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa				241.835.191.500,00	<b>242.152.505.200,00</b>
	Bantuan Keuangan Desa Lainnya (Pilkades)				2.439.535.000,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kota/Kabupaten kepada Desa (APBN)				127.719.249.000,00	115.261.108.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kota/Kabupaten Kepada Desa (ADD)				110.676.407.500,00	125.891.397.200,00
	Karya Bhakti TNI				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.304.819.501.033,78</b>	<b>2.178.244.750.743,00</b>	<b>392.817.999.189</b>	<b>1.987.139.983.910,35</b>	<b>1.644.650.714.583,00</b>



Berikut kami sampaikan Kapasitas Riil Keuangan daerah dan Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

**Tabel 3.14**

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Paser

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2023
1	Pendapatan	1.645.692.381.250,00
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	200.000.000.000,00
	Total Penerimaan	1.845.692.381.250,00
	Dikurangi :	
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1.223.751.558.077,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	621.940.823.173,00

**Tabel 3.15**

Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Paser

No	URAIAN	ANGGARAN
	<b>Belanja Operasi</b>	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	646.327.294.235,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	21.610.030.250,00



3	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.483.743.150,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	247.905.664.640,00
5	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1.663.706.669,00
6	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
7	Belanja Honorarium PNS Tenaga Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis	3.281.541.520,00
8	Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan Kantor seperti Listrik, Telepon dsb)	21.699.713.717,00
	<b>Total Belanja</b>	<b>953.971.694.181,00</b>

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Rencana belanja urusan pendidikan sebagaimana mandatory Undang-undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)

**Tabel 3.16**

Alokasi Mandatori Spending Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	MANDA TORI	PROYEKSI APBD 2023	ALOKASI	PERANGKAT DAERAH	KET
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	20%	1.644.650.714.583,00	329.179.814.729,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20,02%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>		1.644.650.714.583,00	1.100.707.340,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,07 %
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	10%	1.644.650.714.583,00	273.959.841.515,00	Dinas Kesehatan	16,66 %
<b>KEPEGAWAIAN</b>	0,16%	1.644.650.714.583,00	5.540.396.500,00	BKPSDM	0,34 %
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	0,75%	1.644.650.714.583,00	16.713.043.526,00	Inspektorat	1,02 %



Sebagaimana tabel tersebut alokasi dana Pendidikan (bidang Pendidikan, Perpustakaan dan Kesejahteraan Rakyat) yang mendukung untuk urusan pendidikan yang ada saat ini sudah mencapai 20,02%, sehingga alokasi yang ada sudah memenuhi Mandatori sesuai UU Pendidikan. Anggaran urusan Kesehatan tahun 2023 sebesar 9,7 persen diluar gaji dan tunjangan, anggaran yang ada masih belum memenuhi aturan mandatory, namun apabila ditambah gaji anggaran kesehatan sudah memenuhi yaitu 16,66%. Alokasi yang diberikan pada tahun 2023 untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia khusus aparatur telah dialokasikan sebesar 0,34%. Alokasi ini lebih besar dari pada ketentuan yang seharusnya, dimana besaran alokasi yang digunakan minimal adalah sebesar 0,16%. Begitu pula dengan nilai alokasi yang diberikan untuk melaksanakan urusan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Paser, sebesar 1,02% dari APBD, dimana batas minimal alokasi yang harus diberikan untuk APBD Kabupaten sebesar 1 sampai 2 triliun adalah sebesar 0,75% dari APBD.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

#### **3.2.4.1 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Pngeluaran Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah Kabupaten Paser masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan pengembalian terhadap utang pinjaman daerah. Dalam menutup defisit anggaran harus jelas, transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut :



**Tabel 3.17**

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 s.d Tahun 2023

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH			
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	RKPD Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
(1)	(2)	(5)	(6)		
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>442.373.646.400,77</b>	<b>528.408.789.165,12</b>	<b>200.000.000.000,00</b>	<b>200.000.000.000,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	442.373.646.400,77	528.408.789.165,12	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13.164.868.099,00</b>	<b>11.490.000.000,00</b>	<b>11.500.000.000,00</b>	<b>201.041.666.667,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	13.164.868.099,00	11.490.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				11.500.000.000,00
	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo				4.000.000.000,00
	Bank Kaltimtara				7.500.000.000,00
3.2.3	Pengembalian Pinjaman Daerah				189.541.666.667,00



Pemerintah Kabupaten Paser

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH			
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	RKPD Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
	Pengembalian Pinjaman Daerah pada Bank Kaltimara				189.541.666.667,00
3.2.4	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>429.208.778.301,77</b>	<b>516.952.789.175,12</b>	<b>188.500.000.000,00</b>	<b>1.041.666.667,00</b>



Adapun pengalokasian SiLPA sumber perolehannya (Pembiayaan Penerimaan) sebagai berikut;

- a) Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
- b) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Penghematan Barang dan Jasa-Barang
- d) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas
- e) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga
- f) Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
- g) Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan.

Pada pembiayaan pengeluaran yaitu;

- a) Penyertaan Modal pada Bankaltimtara
- b) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
- c) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah

#### **3.2.4.2 Kebutuhan Investasi**

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur dan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB ADHK tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser mencapai angka 5,41 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu -2,86% menunjukkan bahwa Perekonomian di Kabupaten Paser telah mengalami pertumbuhan. Untuk itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan



daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah dan optimalisasi kontribusi BUMD serta investasi diluar APBD melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

### 3.2.4.3 Pendanaan Pembangunan Melalui CSR/TSP

Kabupaten Paser merupakan salah satu dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya dengan mengandalkan pendanaan melalui APBD, Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur dan investasi sektor swasta yang berusaha di wilayah Kabupaten Paser.

Potensi sumber pendanaan pembangunan juga diperoleh salah satunya melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Paser serta Peraturan Bupati Paser Nomor 87 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Paser yang ditujukan baik dari perusahaan kecil, menengah dan besar yang dikelola oleh swasta maupun BUMN dan BUMD.

Selama ini, pelaksanaan *CSR/TSP* yang dilakukan di Kabupaten Paser lebih banyak bersifat *charity*, amal, sesuai kebutuhan sesaat, kurang memberi dampak yang berkelanjutan, dan lokal di sekitar lingkungan perusahaan. *CSR/TSP* yang bersifat *charity* dilakukan berkaitan dengan perayaan hari besar keagamaan dan kenegaraan maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. Bentuk kegiatan tersebut antara lain adalah sunatan massal, sumbangan hari besar keagamaan (zakat), parcel lebaran, hewan untuk kurban Idul Adha, sumbangan kepada RT/RW, donor darah, pengobatan gratis, material untuk infrastruktur dan lain lain.

Meskipun kegiatan *CSR/TSP* yang dipraktekkan para pelaku usaha ini masih bersifat *short term* dan tidak seluruhnya berkelanjutan, namun kesadaran dan inisiatif baik pelaku usaha tersebut untuk melaksanakannya perlu diberi apresiasi. Hal ini berarti pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya melakukan *CSR/TSP* sebagai wujud kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan serta sebagai “alat” untuk memperkuat hubungan dengan komunitas disekitarnya cukup baik. Selain itu harus



diakui ada nilai positif yang ditimbulkannya, paling tidak dari *transfer payment* yang mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat dalam jangka pendek.

Dalam upaya menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Paser berupaya untuk melakukan investasi di berbagai bidang, baik fisik maupun non-fisik. Selain investasi di bidang infrastruktur, pemerintah Kabupaten Paser masih mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan pelayanan dasar seperti pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan dasar lainnya. Pemerintah Kabupaten Paser terus dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dari waktu ke waktu, sementara kapasitas pembiayaan pemerintah relatif terbatas.

Menyadari keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten Paser dalam membiayai kebutuhan pendanaan pembangunan di Kabupaten Paser, Pemerintah Kabupaten Paser menyusun beberapa strategi yang diantaranya adalah meningkatkan kerja sama pembangunan dengan melibatkan peran masyarakat, kalangan dunia usaha, organisasi pemerintah, dan pembiayaan swasta. Dalam upaya tersebut, pemerintah terus mendorong kegiatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan tersebut dengan menggunakan sumber-sumber pendanaan yang tidak termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendanaan yang berasal dari non-APBD tersebut terutama berasal kegiatan CSR/TSP/TSP perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Paser.

Saat ini masih ada perusahaan yang mempersepsikan CSR/TSP sebagai bagian dari biaya atau tindakan reaktif untuk mengantisipasi penolakan masyarakat dan lingkungan. Beberapa perusahaan memang mampu mengangkat status CSR/TSP ke tingkat yang lebih tinggi dengan menjadikannya sebagai bagian dari upaya *brand building* dan peningkatan *corporate image*. Namun upaya-upaya CSR/TSP tersebut masih jarang yang dijadikan sebagai bagian dari perencanaan strategis perusahaan.

Saat ini penyelenggaraan CSR/TSP umumnya dilaksanakan sendiri oleh korporasi. Namun ada satu perusahaan tambang yaitu PT. Kideco Jaya Agung, Tbk. yang telah melakukan perencanaan kegiatan CSR/TSP bersama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Paser pada 10 (sepuluh) kecamatan yang ada. Pendampingan ini dilakukan dalam rangka mensinkronkan kegiatan yang akan didanai melalui APBD dan yang akan dibiayai melalui CSR/TSP. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kepentingan dan pengkondisian lingkungan sasaran yang lebih



## Pemerintah Kabupaten Paser

baik, terencana, terkoordinasi, dan memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut program CSR/TSP. Diharapkan dengan kegiatan musrenbang CSR/TSP ini pelaksanaan CSR/TSP di lapangan masih tumpang tindih (*overlapping*), kurang tepat sasaran, dan tidak berkelanjutan dengan kegiatan yang didanai melalui APBD Kabupaten Paser.



## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

##### **4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023**

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tidak lepas dari tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sinergi tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Paser dengan pembangunan nasional dilakukan melalui telaahan substansi dan target yang akan dicapai pada Tahun 2023.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 (RPJMN 2020-2024): **“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”**.

Tema dan focus pembangunan nasional tahun 2023, dijabarkan dengan Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023 sebagai berikut:

- Prioritas 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- Prioritas 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi dan Menjamin Pemerataan
- Prioritas 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Prioritas 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Prioritas 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Prioritas 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- Prioritas 7: Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah :

- (1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.



Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran Pembangunan	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 - 5,9
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,375 - 0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,31 - 73,49
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02
7	Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	103 - 105
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	106 - 107

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Dalam penyusunan RKP Tahun 2023 telah diidentifikasi beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project/MP*) yang memiliki relevansi terhadap tema, sasaran dan arah kebijakan. Instrumen Clearing House menjadi basis pembahasan Major Project, mekanisme clearing house ke dalam Major Project sangat penting untuk memastikan tentang ruang lingkup, output nya dan yang sangat penting mengenai skema pendanaan. Pemerintah telah mempersiapkan Major Project sesuai dengan Prioritas Nasional dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional seperti:

PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

1. Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
2. Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM
3. Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
4. Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas
5. Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi dan Menjamin Pemerataan

6. Major Project Wilayah Adat Papua; Wilayah Adat Pago dan Wilayah Adat Domberay



7. Major Project Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8. Major Project Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
  9. Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
  10. Major Project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
  11. Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- PN 5: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
12. Major Project Jaringan Pelabuhan Utama terpadu
  13. Major Project Transformasi Digital
- PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
14. Major Project Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

#### 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan analisa terhadap permasalahan pembangunan dan tujuan pembangunan pada interpretasi/arahan tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023. Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian menjadi sasaran utama pada tema RKPD 2023. Sesuai dengan Tema RKPD 2023 ***“Penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”***, maka kata kunci pada tema tersebut adalah Reformasi Struktural, Daya Saing SDM, dan Ibu Kota Negara, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah:

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;
2. Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat;
3. Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan;
4. Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi;
5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas antar daerah dan kawasan pendukung IKN; dan
6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.



Prioritas pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dengan mempedomani prioritas nasional pada RKP tahun 2023. Beberapa prioritas nasional dan prioritas pembangunan di Kalimantan Timur pada tahun 2023 memiliki keterkaitan dalam rangka mendukung tercapainya prioritas nasional.

Berkaitan dengan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat pada tahun 2023 adalah merupakan RKP Tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan periode Pertama RPJMN 2020-2025, dengan pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka RKPD tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun keempat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Visi pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Secara grafis, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dapat di lihat seperti pada gambar berikut :



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2022

### Gambar 4.1

Pola Hubungan Antara Fokus Utama Pembangunan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Adapun daftar tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :



**Tabel 4.2**  
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET P-RPJMD	
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS</b>						
<b>Tujuan 1 :</b> Mewujudkan SDM yang berdayasaing, berkarakter dan berakhlak mulia	<b>Indeks Pembangunan Manusia(IPM)</b>	<b>76,61</b>	<b>76,24</b>	<b>76,88</b>	<b>77,25</b>	<b>77,75</b>
Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,69	13,72	13,81	14,02	14,13
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,70	9,77	9,84	10,04	10,17
Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	-	-	0,13	0,85	1,09
Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,22	74,33	74,61	74,60	74,75
Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	65,65	65,54	66,64	65,64	65,70
<b>Tujuan 2 :</b> <b>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Tingkat Kemiskinan (%)</b>	<b>5,94</b>	<b>6,10</b>	<b>6,54</b>	<b>6,00</b>	<b>5,90</b>
	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>6,09</b>	<b>6,87</b>	<b>6,83</b>	<b>6,75</b>	<b>6,50</b>
Sasaran 5 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun		0,6752	0,7071	35	45
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	29,41		26,04	35,00	40,00
<b>MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN</b>						



TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET P-RPJMD	
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	<b>4,74</b>	<b>-2,87</b>	<b>2,48</b>	<b>3,5±1</b>	<b>3,5±1</b>
	<b>PDRB per Kapita (Juta Rp)</b>	<b>180,25</b>	<b>160,17</b>	<b>182,54</b>	<b>170</b>	<b>175</b>
	<b>LPE Non Migas dan Batubara (%)</b>	<b>5,08</b>	<b>-0,50</b>	<b>2,69</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>
	<b>Nilai Tukar Petani</b>	<b>105,38</b>	<b>111,65</b>	<b>120,94</b>	<b>113,00</b>	<b>114,00</b>
Sasaran 7 : Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	11.775	10.132	10.090	11.038	12.122
Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	2,04	2,23	4,75	1,72	1,89
Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	7,46	8,24	7,97	9,64	9,86
Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,56	0,63	0,54	0,65	0,65
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,33	0,36	0,32	0,37	0,37
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,33	4,94	4,97	5,20	5,30
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,52	1,67	1,56	1,70	1,72
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,12	1,13	1,06	1,07	1,08
Sasaran 11: Meningkatkan realisasi investasi sektor Non Migas dan non BatuBara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	22,31	25,14	41,15	35,00	35,67
Sasaran 12 : Meningkatnya usaha ekonomi kopersidan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15,04	15,04	15,13	13,00	13,50



TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET P-RPJMD	
		2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,03	1,06	10,47	9,67	9,91
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	-	-	16,34	15,23	15,68
<b>MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN</b>						
<b>Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar</b>	<b>Indeks Gini</b>	<b>0,330</b>	<b>0,328</b>	<b>0,334</b>	<b>0,313</b>	<b>0,308</b>
Sasaran 14 : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tataruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	10.721.656	3.570.750	4.664.922	6.000.000	8.100.000
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	341.529.897	294.478.397	323.231.994	337.000.000	370.000.000
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan )	2	2	4	5	7
	Capaian akses air minum layak (%)	54,59	64,53	70,78	68,53	70,53
	Luas lahan pertanian yang beririgasi(Ha)	13.728,50	13.878,50	14.078,50	14.278,50	14.778,50
Sasaran 14 : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tataruang/kewilayahan	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.525,47	1.371,21	1.190,14	1.187,82	1.137,82
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	641	477	406,3	374	329
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,46	66,46	75,38	76,74	83,10
	Rasio elektrifikasi (%)	88,93	90,21	91,98	93,00	95,00



TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET P-RPJMD	
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN</b>						
<b>Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>75,75</b>	<b>75,25</b>	<b>75,06</b>	<b>76,05</b>	<b>76,15</b>
Sasaran 15 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca(GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU(%)	25,18	50,72	41,96	28,50	29,33
Sasaran 16 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	154,49	153,49	154,02	151,49	150,49
<b>MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK</b>						
<b>Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>B (70,00)</b>	<b>B (70,50)</b>	<b>B (68,47)</b>	<b>B (71,50)</b>	<b>B (72,00)</b>
Sasaran 17 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	82,00	83,57	82,50	83,00
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,04	3,14	2,22	3,25	3,30
Sasaran 18 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif danefisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,55	76,60	77,67	77,00	78,00
Sasaran 19 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem PengawasanIntern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4



#### 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2023

Sebagaimana Visi Kabupaten Paser yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yaitu **“MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”**. Untuk merealisasi Visi tersebut, maka di dalam RPJMD telah ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan Kabupaten Paser sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
2. meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan.
3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Berdasarkan dari misi pembangunan tersebut selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dan hubungannya dalam merealisasikan ke-empat misi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 4.3**  
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2023

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	Target Tahun 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RPJMD 2021-2026	RKPD 2023	
<b>MISI 1 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing</b>							
	<b>Tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	-2.77	2,32	3,5-4,5	
	<b>Sasaran 1.1: Meningkatnya efek berganda(multiplier effect) sektor pertanian</b>	<b>Pertumbuhan sektor ekonomi lokal / non tambang</b>	%	4.87	5.14	5.14	
	<b>PROGRAM DAERAH: PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, MUTU HASIL DAN OLAHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Rata-rata pertumbuhan produksi pertanian</b>	%	1,23	2,49	2,49	DTPH, Disbunnak, Diskan dan DKP
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	%	100	100	100	DTPH
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	%	100	100	100	DTPH
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Pertumbuhan produksi tanaman Pangan dan hortikultura	%	-2.23	10.40	10.40	DTPH
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan prioritas Perekonomian dan Pembangunan yang dituangkan dalam produk hukum daerah	%	NA	100	100	Sekretariat Daerah
	Program Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	%	50	62	62	DTPH
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase sarana pertanian (perkebunan dan peternakan) yang dimanfaatkan	%	0	100	100	Disbunnak
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	%	0	100	100	Disbunnak
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	%	50	60	60	Disbunnak
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	%	0	100	100	Disbunnak



KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	Target Tahun 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RPJMD 2021-2026	RKPD 2023	
	Program Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	%	0	100	100	Disbunnak
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	-3.29	0.6	0.6	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	6.23	1.00	1.00	Dinas Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan	%	35	45	45	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan	%	-81.8	0.9	0.9	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	%	30	50	50	DKP
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat ketersediaan pangan	%	97.59	97.90	97.90	DKP
		Tingkat konsumsi pangan	%	84.1	86	86	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	%	20.83	18.06	18.06	DKP
		Persentase Penyaluran cadangan Pangan	%	38.84	10	10	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	%	71,67	82	82	DKP
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian	%	2,10	2.40	2.40	Dinas Perindag kop UKM
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota	Persentase pemutahiran data IKM	%	40	50	50	Dinas Perindag kop UKM
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	Juta Rupiah	657,970	725,412	725,412	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor non tambang dan non sawit	Investor	56	62	62	DPMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	82.06	82.06	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	Investor	56	62	62	DPMPTSP
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	%	50	70	70	DPMPTSP



KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	Target Tahun 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RPJMD 2021-2026	RKPD 2023	
	<b>Sasaran1.2 : Berkembangnya sektor kepariwisataan</b>	<b>Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)</b>	%	-2,28	1.12	1.12	
	<b>PROGRAM DAERAH: PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF</b>	<b>Pertumbuhan industri pengolahan non tambang</b>	%	17.32	17,45	17,45	Disporapar Disdikbud, & Disperindagkop UKM
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang baik	%	16,13	21.21	21.21	Disporapar
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	-56,13	20	20	Disporapar
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang memperoleh Perlindungan Hak Cipta dari HAKI	Produk	0	1	1	Disporapar
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	%	10	20	20	Disporapar
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi dan fasilitas yang dibangun/direhab	%	2.70	4	4	Disperindag kop UKM
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	%	50	50	50	Disperindag kop UKM
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan produk lokal yang diekspor	%	0	20	20	Disperindag kop UKM
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	%	50	100	100	Disperindag kop UKM
	Proram Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Produk UMKM yang dipasarkan/dipromosikan	%	0	12	12	Disperindag kop UKM
	Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi sehat	%	56.33	62	62	Disperindag kop UKM
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rata-Rata Omset per koperasi	Juta Rp	219	257	257	Disperindag kop UKM
	Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang maju	%	0	12	12	Disperindag kop UKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan	%	0	5	5	Disperindag kop UKM
	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Jumlah UMKM yang naik kelas	%	0	0.05	0.05	Disperindag kop UKM



KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	Target Tahun 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RPJMD 2021-2026	RKPD 2023	
<b>MISI 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan</b>							
	<b>TUJUAN 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas</b>	Indeks Reformasi Birokrasi		55.81 (CC)	65 (CC)	65 (CC)	
	<b>SASARAN 2.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</b>	Nilai SAKIP		58.41 (CC)	65 (B)	65 (B)	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		NA	72	72	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH</b>	Nilai SAKIP	Nilai	58.41 (CC)	65 (B)	65 (B)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	%	NA	72	72	Seluruh Perangkat Daerah
		Persentase PD dengan Nilai IRB Baik	%	75	80	80	Sekretariat Daerah
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perumusan kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	Sekretariat Daerah
		Nilai EKPPD		2.80	2.95	2.95	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	92.64	94	94	Bappeda litbang
		Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	%	NA	94	94	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	91.64	93	93	Bappeda litbang
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	%	50	65	65	Bappeda litbang
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai berkinerja baik	%	NA	100	100	BKPSDM
		Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	%	NA	75	75	
		Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	%	NA	75	75	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	%	NA	75	75	BKPSDM
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	%	NA	100	100	Sekretariat DPRD
		Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	
		Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	Doku-men	NA	6	6	



KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	Target Tahun 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RPJMD 2021-2026	RKPD 2023	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	%	NA	100	100	Kecamatan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penurunan temuan administratif atas laporan keuangan pemerintah daerah	%	NA	10	10	BKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase permasalahan pengelolaan barang milik daerah selesai ditindaklanjuti	%	NA	55	55	BKAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	7,34	7,7	7,7	Bapenda
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)		2.50	3.50	3.50	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	%	70	75	75	Inspektorat
		Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	%	25	75	75	Inspektorat
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	36	50	50	Dinas Kearsipan & Perpus
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip/dokumen daerah yang dilestarikan	%	44	55	55	Dinas Kearsipan & Perpus
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase angka pemakaian arsip	%	100	100	100	Dinas Kearsipan & Perpus
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	%	100	100	100	Dinas kominfostaper
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi	%	NA	50	50	Dinas kominfostaper
	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa	%	NA	5	5	DPMD
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	%	NA	100	100	DPMD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti	%	NA	100	100	DPMD
	<b>Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Nilai IKM Daerah	%	78.61	81	81	
	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	%	95	96	96	Disdukcapil
	Program Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	%	95	96	96	Disdukcapil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid	%	95	96	96	Disdukcapil



KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	Target Tahun 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RPJMD 2021-2026	RKPD 2023	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	Disdukcapil
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	%	NA	100	100	Dinas kominfostaper
	Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang terintegrasi	%	NA	40	40	Dinas kominfostaper
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	NA	72	72	Kecamatan
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Rekomendasi	120	50	50	DisperindakopUKM
	<b>SASARAN 2.3 : Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif</b>	Angka Kriminalitas		53.00	51.00	51.00	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	Angka Kriminalitas		53.00	51.00	51.00	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran perda	%	NA	55	55	Satpol PP
		Presentase Demonstrasi Anarkis	%	NA	0	0	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan layanan kebakaran kabupaten	%	NA	40	40	Dinas Damkar
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penurunan konflik berbau sara	%	50	100	100	Badan Kesbang pol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	70	80	80	Badan Kesbang pol
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	%	NA	75	75	Badan Kesbang pol
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	Dinas Kesbang pol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	%	NA	100	100	Dinas Kesbang pol
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	%	NA	55	55	Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	%	NA	100	100	Kecamatan



KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	Target Tahun 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RPJMD 2021-2026	RKPD 2023	
<b>MISI 3 : Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan</b>							
	<b>Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup</b>	Indeks Gini		0.290	0.270	0.270	DPUTR
	<b>Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur</b>	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		NA	5	5	DPUTR
	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS</b>	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	51,05	69	69	DPUTR
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	34,62	58	58	DPUTR
		Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	%	67,48	80	80	DPUTR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi baik	%	67	73	73	DPUTR
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik.	%	78	84	84	DPUTR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	%	49	68	68	DPUTR
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	%	1	30	30	DPUTR
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	%	3.25	47.40	47.40	DPKPP
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani	%	0	30	30	DPKPP
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	88.30	91.20	91.20	DPKPP
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	35.58	51.58	51.58	DPKPP
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase capaian akses air minum layak	%	66,88	81	81	DPUTR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	%	67,13	78	78	DPUTR
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar	%	60	90	90	Dishub



KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	Target Tahun 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RPJMD 2021-2026	RKPD 2023	
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten	%	50	90	90	Dishub
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian.	%	0	40	40	Dishub
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan kawasan transmigrasi Yang sesuai perencanaan	%	1	0	0	Disnaker trans
	Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	Persentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	%	40	70	70	Disnaker trans
	Program Pengembangan Kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan perkotaan baru yang memiliki sarana prasarana yang memadai	Kawa-san	1	0	0	Disnaker trans
	<b>Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana</b>	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang		44.68	59.18	59.18	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	71,17	71,48	74,56	
		Indeks Risiko Bencana (IRB)		196	195	195	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENATAAN RUANG DAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	71.17	71,48	74,56	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	%	50	70	70	DLH
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	68	73	73	DLH
		Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	3	9	9	DLH
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase jumlah perusahaan/ pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3	%	50	80	80	DLH
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Perusahaan / pelaku usaha yang mendapat kan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan	%	55	100	100	DLH
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat hidup.	Persentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.	%	11,22	55	55	DLH



KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	Target Tahun 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RPJMD 2021-2026	RKPD 2023	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rasio Luas RTH (Ruang terbuka Hijau) dan Taman kehati yang dikelola	%	48.72	60	60	DLH
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	0	100	100	DLH
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah predikat penghargaan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Buah	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	DLH
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	68,75	100	100	DLH
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	39,57	53	53	DLH
		Persentase pengelolaan sampah disumber	%	11,37	19	19	DLH
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Bangunan dan Infrastruktur Persampahan yang berfungsi dengan baik	%	40	55	55	DPUTR
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik.	%	68	76,66	76,66	DLH
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang	%	44.68	59.18	59.18	DPUTR
	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan layanan penanggulangan bencana	%	100	100	100	BPBD
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	%	14.29	57.14	57.14	DPKPP
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	16.67	55.56	55.56	DPKPP
	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase proses penetapan tanah ulayat	%	NA	50	50	DPKPP
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	%	NA	30	30	DPKPP



KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	Target Tahun 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RPJMD 2021-2026	RKPD 2023	
<b>MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</b>							
	<b>TUJUAN 4 : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata</b>	<b>Indeks pembangunan Manusia</b>	<b>%</b>	<b>72.04</b>	<b>73.40</b>	<b>73.77</b>	
	<b>SASARAN 4.1. Meningkatnya kualitas pendidikan</b>	<b>1. Angka Harapan Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>13.10</b>	<b>13.30</b>	<b>13.30</b>	Disdikbud
		<b>2. Rata - rata Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>8.55</b>	<b>8.70</b>	<b>8.70</b>	Disdikbud
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN</b>	<b>Rata - rata Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>8.55</b>	<b>8.70</b>	<b>8.70</b>	Disdikbud
	Program Pengelolaan Pendidikan	1. APK SD	%	108.62	107.00	107.00	Disdikbud
		2. APK SMP	%	95.00	95.50	95.50	Disdikbud
		3. APM SD	%	97.87	98.00	98.00	Disdikbud
		4. APM SMP	%	81.58	95.50	95.50	Disdikbud
		5. APK PAUD	%	37.60	38.00	38.00	Disdikbud
		6. Angka Putus Sekolah SD	%	0.94	0.70	0.70	Disdikbud
		7. Angka Putus Sekolah SMP	%	2.28	1.5	1.5	Disdikbud
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	%	90	100	100	Disdikbud
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Pendidik sesuai standar	%	90	91	91	Disdikbud
		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Tenaga Kependidikan sesuai standar	%	NA	55	55	
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	%	100	100	100	Disdikbud
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	%	N/A	100	100	Disdikbud
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina	%	1	2	2	Dinas Kearsipan & Perpus
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	Naskah	N/A	5	5	Dinas Kearsipan & Perpus
	<b>SASARAN 4.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>	<b>Umur Harapan Hidup</b>	<b>Tahun</b>	<b>72.62</b>	<b>72.90</b>	<b>72.90</b>	Dinkes
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN</b>	<b>Umur Harapan Hidup</b>	<b>Tahun</b>	<b>72.62</b>	<b>72.90</b>	<b>72.90</b>	Dinkes
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	%	100	100	100	Dinkes



KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	Target Tahun 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RPJMD 2021-2026	RKPD 2023	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	%	100	100	100	Dinkes
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan pengendalian dan pengawasan Obat, alkes dan makanan minuman	%	100	100	100	Dinkes
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif	%	NA	70	70	Dinkes
	<b>SASARAN 4.3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Angka Kemiskinan</b>	%	<b>9.23</b>	<b>7.30</b>	<b>8.80</b>	
		<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	%	<b>4.52</b>	<b>3.17</b>	<b>4.5</b>	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	<b>Angka Kemiskinan</b>	%	<b>9.23</b>	<b>7.30</b>	<b>8.80</b>	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	%	100	100	100	Disnaker trans
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	60	60	Disnaker trans
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	30	30	30	Disnaker trans
	Program Hubungan Industrial	Tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	%	38.46	40	40	Disnaker trans
	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Kasar		12.61	10	10	Dinas PPKBP3A
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB		73.6	76	76	Dinas PPKBP3A
	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	%	100	100	100	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Cakupan layanan penanganan bencana	%	100	100	100	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	TMP dalam kondisi baik	%	100	100	100	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga aktif	%	100	100	100	Dinas PPKBP3A
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan	%	34.39	40.00	40.00	Dinas PPKBP3A
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	36	71.43	71.43	Dinas PPKBP3A
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	%	82.35	100	100	Dinas PPKBP3A
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan	%	40	60	60	Dinas PPKBP3A



KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	Target Tahun 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					RPJMD 2021-2026	RKPD 2023	
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak	%	23.81	59.52	59.52	Dinas PPKBP3A
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Poin	560	650	650	Dinas PPKBP3A
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	100	100	100	Dinas PPKBP3A
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	15.56	15.56	15.56	Disporapar
		Persentase kelompok wirasaha muda	%	20	47	47	Disporapar
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pembinaan Cabang olahraga	%	11	34	34	Disporapar
		Jumlah atlet berprestasi	Orang	3	3	3	Disporapar
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Gugus Pramuka Aktif	%	100	100	100	Disporapar
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Even Kebudayaan sesuai dengan standar kebudayaan	%	NA	70	70	Disdikbud
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok seni/sanggar Kesenian yang aktif	%	12	24	24	Disdikbud
	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Penyelenggaraan even dan penulisan buku yang berkaitan dengan sejarah daerah	even	NA	5	5	Disdikbud
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	NA	70	70	Disdikbud
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan pengunjung Museum Sadurengas per tahun	%	NA	12	12	Disdikbud
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	%	NA	25	25	Kecamatan
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	78.65	85	85	DPMD
		Lembaga Adat Desa yang aktif	%	40	60	60	
		Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Lembaga	2	2	2	



## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun yang direncanakan.

Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2023 yaitu **"PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN BERBASIS PERTANIAN UNTUK MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT "**

Tema tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dan merupakan strategi kedua dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Paser. Tema RKPD Tahun 2023 merupakan arah kebijakan pembangunan sebagai tindak lanjut dari tema sebelumnya, dimana evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya menunjukkan perlu adanya pengembangan perekonomian berbasis pertanian dengan tetap mempertimbangkan aspek kesejahteraan rakyat, pengelolaan lingkungan hidup dan layanan publik

Alur pikir dalam perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Paser tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:





Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian.

Banyak hal yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian berbasis pertanian, yaitu meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian, seperti petani, nelayan, dan peternak, meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta mengembangkan teknologi sederhana dalam rangka mendorong industri berbasis pertanian.

Kabupaten Paser secara umum merupakan daerah sentra pertanian, yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani, pekebun, peternak dan nelayan dan atau buruh tani. Perkembangan pertanian di Kabupaten Paser sangat pesat dan menjadi penyumbang perekonomian. Upaya untuk mengembangkan usaha pertanian menjadi sebuah industri terus diupayakan baik industri rumah tangga maupun industri modern. Industri berbasis pertanian diharapkan menjadi usaha berkembang dan memiliki efek berganda (*multiplier effect*) bagi masyarakat Kabupaten Paser. Sektor pertanian merupakan penyumbang Nilai PDRB terbesar kedua setelah sector pertambangan. Sehingga keberlangsungan perkembangan sektor pertanian terus diupayakan dan menjadi sebuah industri berbasis pertanian.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif

Persoalan pelayanan publik memang sangat kompleks apabila Pemerintah Kabupaten Paser tidak mampu menggeser pembangunan fisik ke pembangunan yang lebih komprehensif dan integratif. Artinya, tidak hanya berfokus pada satu sektor, tetapi perlu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan publik, terutama dalam pelayanan kebutuhan dasar.

Melalui tersedianya pelayanan publik, terutama dalam pelayanan kebutuhan dasar, tentu Pemerintah Daerah bisa melindungi penduduk miskin. Pemerintah Daerah perlu menjadi penyedia dan regulator pelayanan kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi

3. Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu



daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, energi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pembangunan infrastruktur pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan strategis yaitu:

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja;
- b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal; dan
- c) Meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastrukturnya.

#### 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

Kualitas pembangunan manusia hingga saat ini masih didekati dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasar angka IPM yang dicapai, hingga saat ini IPM kabupaten Paser masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan IPM provinsi Kalimantan Timur, sebagai induknya. Untuk mengejar ketinggalan tersebut diperlukan Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Secara umum, faktor-faktor seperti sumber daya alam, material dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung ketersediaan faktor SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan informal dan formal (yang berhubungan dengan keterampilan atau keahlian kerja), akses dan mutu pelayanan kesehatan, kepribadian dan kepercayaan diri, tingkat kesejahteraan hidup dan ketersediaan lapangan kerja yang relevan. Pendidikan dan kesehatan merupakan suatu upaya dalam proses pengembangan SDM.

Sebagai upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan salah satunya yaitu melalui peningkatan sarana dan prasarana yang memadai yakni dengan pemenuhan sarana dan prasarana pada sekolah. Sedangkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis



maupun non medis, peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kualitas pengelolaan manajemen Fasyankes maupun fasilitasnya, penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat;

Peningkatan Kesejahteraan sosial masih sangat dipengaruhi oleh kondisi Tingginya angka kemiskinan dan masalah masalah sosial ini muncul dari berbagai aspek dan kejadian yang saling terhubung dan mempengaruhi. Dalam kaitan dengan itu, di Paser teridentifikasi sejumlah hal yang menyebabkan munculnya masalah sosial itu, mulai dari kemiskinan, pertumbuhan penduduk, sampai pada sosial budaya. Pada sisi lain belum meratanya pelayanan publik, keterbatasan dalam mengakses pusat perekonomian akibat kondisi infrastruktur yang kurang memadai, belum optimalnya koordinasi dan sinergitas penanggulangan masalah sosial belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan data base untuk penduduk miskin maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial kurang valid sehingga yang menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima program perlindungan sosial. Berikut diuraikan berbagai masalah yang menyumbang pada masih banyaknya permasalahan sosial di Kabupaten Paser.

Upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Kabupaten Paser, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, implementasi strategi pembangunan sosial merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat sangat penting daripada hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam proses pengentasan kemiskinan adalah Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang, meningkatkan kualitas hidupnya. Pemerintah Daerah telah melaksanakan banyak program yang terbagi dalam dua kelompok utama yaitu kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Namun demikian tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menasar sasaran yang sama.



Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak. Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.

Untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023, disusun strategi dan arah kebijakan tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 4.4**  
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD  
Kabupaten Paser Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
<b>Misi 1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing Sasaran</b>		
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing</b>		
Sasaran 1.1. Meningkatnya efek berganda ( <i>multiplier effect</i> ) sektor pertanian	S.1.1.1. Revitalisasi sektor pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan baik untuk penduduk Paser maupun sebagai penyangga IKN	1. Pengembangan kawasan peternakan ( <i>Mini Ranch</i> ) dan produksi peternakan 2. Pengembangan kawasan pertanian ( <i>Food Estate</i> ) dan kawasan Hortikultura 3. Peremajaan komoditi Kelapa Sawit dan pengembangan komoditi perkebunan lainnya 4. Peningkatan Produksi Perikanan tangkap dan budidaya
	S.1.1.2. Pengembangan industri berbasis sumber daya pertanian (agro industri)	5. Peningkatan Mutu hasil dan nilai tambah produk pertanian 6. Pengembangan industri olahan oleh IKM dan UMKM bahan baku berbasis pertanian
	S.1.1.3. Pengembangan industri hilir produk olahan CPO dalam rangka menciptakan nilai tambah industri berbasis kelapa sawit	7. Pengembangan Industri Hilir Produk olahan CPO
	S.1.1.4. Penguatan kelembagaan pertanian dan industri agro dengan memanfaatkan teknologi sehingga tercipta inovasi bidang pertanian maupun industri	8. Penguatan lembaga pertanian dan penyuluhan
Sasaran 1.2. Berkembangnya sektor kepariwisataan	S.1.2.1. Meningkatkan daya tarik wisata dan budaya berbasis masyarakat	9. Pengembangan daya Tarik wisata alam, 10. Pengembangan daya Tarik wisata budaya dan sejarah



Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Pengembangan daya Tarik wisata buatan</li> <li>12. Peningkatan promosi pariwisata</li> <li>13. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat</li> <li>14. Peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata berupa Pengembangan pusat olahraga (<i>Sport Center</i>)</li> <li>15. Peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata berupa Pembangunan Menara Pandang (<i>viewing deck</i>)</li> </ol>
	S.1.2.2. Pemberdayaan usaha kecil dan koperasi dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan	16. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, melalui kerjasama dengan lembaga keuangan setempat berupa pinjaman modal tanpa anggunan dengan suku bunga kompetitif dan persyaratan mudah
	S.1.2.3. Mendorong tumbuhnya investasi sektor sektor pendukung usaha kecil dan pariwisata berbasis masyarakat	17. Penguatan peran usaha kecil dan koperasi untuk meningkatkan pariwisata
	S.1.2.4. Mengelola arus perdagangan kawasan untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai dukungan terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	18. Mempercepat kemudahan investasi yang berorientasi usaha kecil dan pariwisata
	S.1.2.5. Menjalin kerjasama dengan kawasan sekitar Kabupaten Paser dalam pengembangan pariwisata dan usaha kecil	19. Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan transportasi menuju objek wisata
<b>Misi 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan</b>		
<b>Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas</b>		
Sasaran 2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	S.2.1.1. Meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah berbasis <i>money follows program priority</i></li> <li>2. Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan</li> <li>3. Mewujudkan Opini BPK : WTP</li> <li>4. Peningkatan kontribusi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber penerimaan daerah serta pengelolaan keuangan</li> <li>5. Peningkatan pengelolaan kearsipan daerah</li> </ol>
	S.2.1.2. Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah</li> <li>7. Penerapan SPIP Terintegrasi di Perangkat Daerah</li> </ol>



Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		8. Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sesuai STRANAS PK
	S.2.1.3. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Daerah	9. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi
	S.2.1.4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel	10. Implementasi perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial
	S.2.1.5. Revitalisasi struktur kelembagaan OPD	11. Penataan struktur organisasi yang proporsional
Sasaran 2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S.2.2.1. Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik	12. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju <i>smart city</i> (kota pintar) 13. Peningkatan penyediaan infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika.
	S.2.2.2. Mengembangkan sistem pengelolaan satu data yang terintegrasi	14. Percepatan penerapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia 15. Peningkatan kemudahan dan keamanan layanan informasi
	S.2.2.3. Mengembangkan kolaborasi dengan stakeholder dalam pemenuhan infrastruktur jaringan internet	16. Peningkatan kerjasama dengan penyedia jasa jaringan internet
	S.2.2.4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan Publik	17. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui pengembangan zona integritas
	S.2.2.5. Mengembangkan sistem manajemen komplain handling	18. Membuka layanan jaringan media partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik
	S.2.2.6. Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik	19. Peningkatan standar kualitas pelayanan publik 20. Pelaksanaan Desentralisasi urusan pemerintah daerah ke Kecamatan/Kelurahan 21. Melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas
Sasaran 2.3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	S.2.3.1. Penguatan penegakkan Perda	22. Peningkatan intensitas pengawasan 23. Peningkatan kapasitas personil penertiban 24. Penindakan dan evaluasi pelanggaran Peraturan daerah
	S.2.3.2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	25. Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan 26. Peningkatan pengendalian keamanan dan kenyamanan



Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat.
	S.2.3.3. Peningkatan Kualitas Legislasi daerah	27. Penetapan produk hukum daerah tepat waktu 28. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan
	S.2.3.4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	29. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu 30. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara
	S.2.3.5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba	31. Peningkatan peran BNK dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kampanye, deteksi dini, pendidikan dan pemetaan kawasan. 32. Implementasi Rencana Aksi Nasional P4GN
<b>Misi 3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan</b>		
<b>Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup</b>		
Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	S.3.1.1. Memperlancar konektivitas dan aksesibilitas antar desa, kecamatan dan Ibu kota Kabupaten serta sentra pertumbuhan ekonomi.	1. Peningkatan Infrastruktur jalan di wilayah sentra pertumbuhan ekonomi; 2. Pembangunan Jalan untuk memperlancar mobilitas Barang/Jasa pada daerah rendah konektivitas; 3. Rekonstruksi dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi jalan mantap khususnya yang menghubungkan pusat-pusat pemerintahan; 4. Peningkatan layanan sarana dan prasarana perhubungan; 5. Peningkatan penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan; 6. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang perhubungan;
	S.3.1.2. Meningkatkan Kualitas pembangunan sarana dan prasarana publik	7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah;
	S.3.1.3. Percepatan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh.	8. Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
	S.3.1.4. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, akses air bersih, sanitasi dan infrastruktur lingkungan permukiman.	9. Peningkatan penanganan rumah korban bencana 10. Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni 11. Pengelolaan dan pengembangan spam di daerah kabupaten



Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		12. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten. 13. Pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
	S.3.1.5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air.	14. Peningkatan sarana dan prasarana air baku; 15. Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir; 16. Operasi dan Pemeliharaan Sungai wilayah Kabupaten; 17. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder kewenangan Kabupaten
	S.3.1.6. Melakukan Kerjasama /Sharing pendanaan infrastruktur.	18. Melakukan Pinjaman Daerah dalam pengembangan infrastruktur 19. Meningkatkan peran serta perusahaan dalam berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Paser
Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	S.3.2.1. Mempercepat dan memperkuat regulasi penataan ruang dan peningkatan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang	20. Mempercepat penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang setiap Kecamatan; 21. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan Kawasan sesuai rencana tata ruang.
	S.3.2.2. Peningkatan penutupan lahan dan perlindungan sumber daya air berbasis komunitas	22. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
	S.3.2.3. Penguatan komunitas tangguh bencana	23. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana; 24. Melakukan pembentukan dan kolaborasi komunitas-komunitas peduli bencana
	S.3.2.4. Penguatan advokasi dan kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup.	25. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam upaya perencanaan strategis lingkungan hidup di daerah; 26. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 27. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah yang fokus di bidang lingkungan hidup
	S.3.2.5. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sampah	28. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA; 29. Meningkatkan sarana dan prasarana pengangkutan sampah; 30. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat untuk melaksanakan



Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		3R ( <i>reduce, reuse, recycle</i> ) di rumah tangga
<b>Misi 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</b>		
<b>Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata</b>		
Sasaran 4.1. Meningkatnya kualitas Pendidikan	S.4.1.1. Peningkatan kualitas belajar mengajar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan dan pemerataan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan pengembangan pendidikan karakter	1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Pelaksanaan pendidikan karakter dengan memperhatikan aspek religious, nasionalisme, kemandirian, integritas, dan gotong royong serta peran serta keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keluarga dalam satuan pendidikan
	S.4.1.2. Peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis teknologi informasi	3. Pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi
Sasaran 4.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	S.4.2.1. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui penguatan sistem kesehatan, perbaikan gizi masyarakat (penurunan prevalensi stunting) dan peningkatan pengendalian penyakit	4. Penguatan kapasitas kelembagaan puskesmas dalam bentuk BLUD 5. Peningkatan capaian akreditasi puskesmas serta capaian SPM 6. Penguatan fasilitas pelayanan dasar dan rujukan, kompetensi tenaga kesehatan, tata kelola dan pengendalian penyakit
	S.4.2.2. Pembudayaan perilaku hidup sehat gerakan masyarakat hidup sehat berbasis kemitraan dan pemanfaatan teknologi informasi	7. Meningkatkan upaya promosi, preventif, surveillance serta peran serta masyarakat/dunia usaha dan pemanfaatan inovasi teknologi
Sasaran 4.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	S.4.3.1. Peningkatkan upaya pengendalian penduduk melalui optimalisasi pembangunan berwawasan kependudukan, peningkatan akses dan mutu layanan Keluarga Berencana	8. Meningkatkan Pengendalian penduduk, pembinaan KB, serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
	S.4.3.2. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga berbasis kemitraan	9. Penguatan PUG PUHA, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pengelolaan system data dan pemenuhan hak anak
	S.4.3.3. Peningkatan kesejahteraan keluarga dan perlindungan sosial melalui penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan seni budaya lokal, peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga,	10. Meningkatkan pemberdayaan rehabilitasi perlindungan dan jaminan social, serta pelayanan social masyarakat korban bencana 11. Mengembangkan kesenian tradisional pembinaan sejarah serta



Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pelibatan peran dunia usaha	pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman 12. Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan serta pengembangan kapasitas kepramukaan 13. Meningkatkan perlindungan perempuan. Kualitas keluarga dan pengarusutamaan hak anak
	S.4.3.4. Meningkatkan Penyerapan, daya saing tenaga kerja serta pencegahan dan optimalisasi penyelesaian konflik ketenagakerjaan /hubungan industrial	14. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, produktivitas, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan kemampuan serta ketrampilan pekerja mandiri 15. Meningkatkan kualitas balai latihan kerja daerah serta mengoptimalkan peluang kemitraan dengan perusahaan/badan usaha swasta 16. Meningkatkan kondisivitas dan keberlangsungan usaha melalui penyelesaian konflik hubungan industrial yang berkeadilan, dan mendorong peran pengusaha dalam hal kesejahteraan

Dalam upaya memantapkan tujuan dan sasaran, visi dan misi pembangunan Kabupaten Paser tahun 2021-2026 tentu diperlukan dukungan kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan sebagai berikut.

#### 1. Laptop Bagi Tenaga Pengajar

Implementasi dari visi misi Bupati-Wakil Bupati Paser Salah satunya peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pendidikan. Peningkatan SDM ini perlu ditopang dengan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Berbicara kualitas SDM, tentu tenaga pendidik terlebih dahulu ditingkatkan kualitasnya. Karena guru yang berkualitas akan melahirkan anak didik yang berkualitas pula. Pemberian laptop bagi tenaga pengajar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di kabupaten Paser. Mekanisme penganggaran laptop ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). pengadaan satu guru satu laptop ini pemberiannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dengan melihat keadaan kemampuan keuangan daerah.

Maksud dan tujuan pengadaan laptop bagi guru ini adalah untuk menunjang kinerja para guru agar dapat dengan mudah dalam mempersiapkan dan melaksanakan



proses pembelajaran di sekolah. Sebagai media belajar, laptop mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran yaitu untuk memberi dukungan proses komunikasi interaktif antara siswa dan guru serta menyiapkan bahan pembelajaran

## 2. Seragam Sekolah

Bantuan Pengadaan Seragam dan Perlengkapan Siswa SD kelas I dan SMP kelas VII secara gratis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser adalah merupakan salah satu komitmen kepala daerah yang masuk didalam daftar program strategis kepala daerah yang bertujuan untuk memajukan Pendidikan di Kabupaten Paser. Selain itu bantuan seragam tersebut juga wujud pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Kabupaten Paser. Program tersebut juga bagian dari stimulus program pendidikan untuk meringankan beban warga karena dampak Covid-19, dimana bantuan seragam gratis tersebut rencananya akan disalurkan ketika siswa telah masuk sekolah Kembali, Sehingga anak-anak lebih bersemangat dan siap masuk sekolah setelah masa pandemi terlewati nanti.

Maksud dan tujuan Pengadaan Seragam dan Perlengkapan Siswa SD ini adalah untuk memberikan fasilitas perlengkapan sekolah secara gratis bagi siswa, terutama bagi orang tua yang terdampak secara ekonomi karena wabah pandemic covid 19.

## 3. BPJS gratis bagi masyarakat Kabupaten Paser

Pemberian BPJS gratis bertujuan untuk Kabupaten Paser dapat menjadi UHC (*Universal Health Coverage*) yaitu system penjaminan Kesehatan yang memastikan setiap warganya mempunyai akses terhadap pelayanan Kesehatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative bermutu dengan biaya terjangkau. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan Kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Paser mempunyai beberapa sumber pembiayaan untuk membayar iuran jaminan Kesehatan yang meliputi :

- a. Penerima Bantuan Iuran yang bersumber dari APBD
- b. Penerima Bantuan Iuran yang bersumber dari APBN



## Pemerintah Kabupaten Paser

c. Pekerja Penerima Upah baik yang merupakan tenaga Pegawai Tidak Tetap maupun Kepala desa atau perangkat desa

d. Bantuan iuran untuk semua peserta mandiri klas III

Dengan berbagai segmen pembiayaan kepesertaan BPJS diharapkan masyarakat Kabupaten Paser semua (minimal 95%) terjamin kesehatannya.

4. Alokasi Dana Desa Tambahan bagi guru mengaji, operasional RT dan kaum masjid/marbot

Sebagai salah satu komitmen pemerintah Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, maka pemerintah daerah menyediakan alokasi yang secara khusus diberikan melalui alokasi dana desa dan dapat dipergunakan untuk membiayai pembayaran insentif tambahan bagi guru mengaji yang ada di desa-desa, penambahan anggaran yang digunakan bagi peningkatan dan pemerataan biaya operasional RT, serta peningkatan kesejahteraan bagi kaum masjid dan marbot.

5. Beasiswa Prestasi untuk mahasiswa (S1)

Dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, pemerintah Kabupaten Paser pada tahun 2023 akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata 1 (S1) dan berasal dari Kabupaten Paser. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang masuk dalam kategori kurang mampu akan tetapi memiliki prestasi yang baik, dalam bentuk prestasi akademik maupun prestasi lainnya. Hal ini dilakukan agar mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Paser dapat menyelesaikan pendidikannya, yang didukung dengan pemberian beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Paser.

6. Da'I Pembangunan

Program da'i pembangunan merupakan salah satu program yang dilaksanakan untuk menghadirkan da'i-da'i berkualitas dan tersebar di seluruh pelosok desa di Kabupaten Paser, sehingga masyarakat Kabupaten Paser bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan agama Islam. Hal ini tentunya berkorelasi dalam mendukung pembentukan mental masyarakat Kabupaten Paser yang agamis sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses dan tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.



## 7. Pemerataan Puskesmas Rawat Inap

Puskesmas Perawatan atau Puskesmas Rawat Inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara. pengertian rawat inap, merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.

Dalam mencapai standar puskesmas rawat inap beberapa hal harus dipenuhi agar dapat memberikan pelayanan yang baik buat masyarakat Kabupaten Paser dan yaitu standar ketenagaan, standar sarana prasarana, standar peralatan medis.

Selain itu untuk puskesmas rawat inap juga ditekankan bahkan untuk semua puskesmas dan sektor Kesehatan terdapat 12 standar minimal pelayanan yang harus dipenuhi.

SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan



12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan.

Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan. Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas: standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan **harus 100% (seratus persen)**.

Pemerintah Daerah harus benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Sehingga pada penerapan SPM bidang kesehatan khususnya di kabupaten/kota ada kontribusi pembiayaan dan pelayanan program JKN. Untuk hal tersebut, pada penerapannya tidak perlu mengalokasikan anggaran pada pelayanan-pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif yang dibiayai oleh JKN.

Untuk mendukung pelaksanaan empat prioritas kabupaten sebagaimana tema RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 dalam mendukung kondisi terkini sesuai tematik, Pemerintah Kabupaten Paser akan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian secara umum di Kabupaten Paser, maka perlu kiranya pemberdayaan keberadaan Balai Penyuluh Pertanian sebagai pusat pembelajaran untuk peningkatan kapasitas SDM bagi penyuluh, petani dan masyarakat pada umumnya. Pengembangan BPP diharapkan sudah mengarah pada spesifik komoditi, maksudnya BPP dikembangkan sejalan dengan komoditi yang banyak dikembangkan di daerah tersebut. Untuk Tahun 2023 difokuskan pada pengembangan BPP Tanah Grogot menjadi BPP Edu Agri Wisata



2. Peningkatan produksi hasil peternakan sapi lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana dan Kawasan Pertanian Terpadu di Desa Saing Prupuk  
Kabupaten Paser bekerjasama dengan Universitas Mulawarman untuk menghasilkan suatu dokumen menuju Kawasan pertanian terpadu. Berdasarkan dokumen tersebut ada beberapa daerah Kawasan pertanian terpadu dan salah satunya di Desa Saing Perupuk. Desa Saing Prupuk terdapat pengembangan sapi dalam bentuk mini ranch yang cukup baik. Untuk mendukung keberhasilannya maka perlu penambahan sarana dan prasarana di Kawasan tersebut. Untuk beberapa tahun ke depan fokus pada pengembangan Kawasan tersebut sehingga terlihat keberhasilannya. Dan berlanjut untuk pengembangan Kawasan pertanian terpadu lainnya.
3. Cadangan Pangan  
Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat. Keberadaan Cadangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka Kabupaten Paser pun menetapkan adanya cadangan pangan daerah.
4. Pengadaan Bibit Tanaman  
Pengadaan bibit tanaman sangat lah diperlukan sebagai rotasi terhadap keperluan bibit tanaman yang dibutuhkan oleh petani, dan juga sebagai upaya dalam pencegahan rawan pangan, sehingga tanaman terus berkembang dan sesuai dengan spesifik lokasi.
5. Dasa Wisma (Tanaman Pekarangan)  
Dasa Wisma merupakan program kerja PKK ke desa yang terdiri dari kelompok ibu PKK yang merupakan aktivitas bermanfaat bagi keluarga. Kegiatan ini sebagai dukungan terhadap mengatasi desa rawan pangan yang ada di Kabupaten Paser. Dengan adanya kegiatan ini maka Ibu PKK menanam tanaman baik sayuran atau buah-buahan di lahan pekarangan, sehingga ketersediaan pangan dan panganekaragaman pangan keluarga tersedia di tingkat rumah tangga.



6. Peningkatan Produksi Padi pada lokasi *Food Estate*

Kabupaten Paser menetapkan lokasi *food estate* untuk komoditi padi seluas 2.500 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Long Ikis dan Long Kali pada 17 Desa. Pada desa tersebut menjadi fokus kegiatan pengembangan padi di Kabupaten Paser dengan pemberian input produksi berupa benih, pupuk, kapurisasi lahan, alat dan mesin pertanian, yang diharapkan terjadi peningkatan produksi dan produktivitas padi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Provinsi yaitu Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi.

7. Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan

Penyediaan sarana dan prasarana Perikanan berupa pengadaan kapal nelayan, alat tangkap, kolam dan sarana pengolahan hasil masih merupakan fokus pembangunan di Kabupaten Paser. Sarana dan prasarana ini menjadi menu utama pembangunan untuk peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

8. Sertifikasi pelaku usaha perikanan budidaya

Program ini merupakan pendampingan terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam upaya agar pelaku usaha perikanan budidaya lahannya telah disertifikasi. Kabupaten Paser pada tahun 2021 telah melaksanakan sertifikasi sebanyak 112 bidang sertifikat, rencana pada tahun 2022 sebanyak 65 bidang dan tahun 2023 sebanyak 60 bidang.

9. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan non sawit (karet, kelapa dalam, aren)

Kabupaten Paser berupaya meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditas karet dan aren dengan cara perluasan arealnya. Pengembangan karet diakokasikan pada daerah yang merupakan sentra tanaman karet dan bukan sentra sawit seperti kecamatan Muara Komam dan Long Kali, sementara untuk pengembangan aren dialokasikan pada kecamatan Paser Belengkong.

10. Pengembangan ekonomi kreatif

Upaya pengembangan ekonomi kreatif sejalan dengan program pengembangan pariwisata di Kabupaten Paser. Kabupaten Paser terus mendorong peningkatan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan industri pengolahan hasil berbasis pertanian yang nantinya mendukung menjadi ekonomi kreatif. Identifikasi dan bimbingan terus



diupayakan, baik oleh Perangkat daerah yang terlibat maupun bekerjasama dengan perguruan tinggi.

**Tabel 4.5**

Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Prioritas Kabupaten Paser Tahun 2023 dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Paser

Prioritas Kabupaten Paser Tahun 2023	Program Pembangunan Kabupaten Paser	Prioritas Kabupaten Paser	Program Perangkat Daerah
PK1	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian.	Program peningkatan produksi, mutu hasil dan olahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>• Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>• Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>• Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>• Program Perizinan Usaha Pertanian</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>• Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</li> <li>• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>• Program Penanganan Kerawanan Pangan</li> </ul>



Prioritas Kabupaten Paser Tahun 2023		Program Pembangunan Kabupaten Paser	Prioritas Program Perangkat Daerah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengawasan Keamanan Pangan</li> </ul>
		Program pengembangan industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>• Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>• Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>• Program Pengembangan Kebudayaan</li> <li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>• Program Pengembangan UMKM</li> <li>• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> </ul>
<b>PK2</b>	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Program Peningkatan Kinerja Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ul>
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ul>
<b>PK3</b>	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>• Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>• Program Pengembangan Perumahan</li> </ul>



Prioritas Kabupaten Paser Tahun 2023		Program Pembangunan Kabupaten Paser	Prioritas Kabupaten	Program Perangkat Daerah
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Kawasan Permukiman</li> <li>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</li> <li>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li> </ul>
<b>PK4</b>	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Program Peningkatan Sistem Perlindungan Sosial		<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</li> <li>Program Penanganan Bencana</li> </ul>
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Pendidikan</li> </ul>
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan dan Jaminan Kesehatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul>

Dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), pada RKPD tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Paser mempersiapkan program-program untuk mendorong pencapaian target-target pada indikator TPB/SDGs. Berikut program perangkat daerah yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

**Tabel 4.6**

Persandingan Program Perangkat Daerah Kabupaten Paser dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Program Perangkat Daerah
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>2. Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>4. Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>5. Program Perencanaan Tenaga Kerja</li> <li>6. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> </ol>



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program Perangkat Daerah
2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;</li><li>2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;</li><li>3. Program Penanganan Kerawanan Pangan</li><li>4. Program Pengawasan Keamanan Pangan</li><li>5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li><li>6. Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian</li><li>7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li><li>8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li><li>9. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li></ol>
3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li><li>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li><li>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</li><li>5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li><li>6. Program Pengendalian Penduduk</li><li>7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li><li>9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li><li>10. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</li></ol>
4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan Pendidikan</li><li>2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</li><li>3. Program Pengembangan Kurikulum</li><li>4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</li></ol>
5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</li><li>2. Program Perlindungan Perempuan</li><li>3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li><li>4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</li></ol>



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program Perangkat Daerah
	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Program Perlindungan Khusus Anak</li><li>6. Program Pengendalian Penduduk</li><li>7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li><li>8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li></ol>
<b>6</b> Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li><li>2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau/ Kerusakan Lingkungan Hidup</li><li>3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li><li>4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li><li>5. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</li></ol>
<b>7</b> Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	-
<b>8</b> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Penempatan Tenaga Kerja</li><li>2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li><li>3. Program Hubungan Industrial</li><li>4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li><li>5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li><li>6. Program Promosi Penanaman Modal</li><li>7. Program Pelayanan Penanaman Modal</li><li>8. Program Pemasaran Pariwisata</li><li>9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li><li>10. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li><li>11. Program Pengembangan UMKM</li><li>12. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</li></ol>



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Program Perangkat Daerah
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Penyelenggaraan Jalan</li><li>2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);</li><li>3. Program Pengelolaan Pelayaran;</li><li>4. Program Pengelolaan Perekeretaapian;</li><li>5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;</li><li>6. Program Informasi Dan Komunikasi Publik</li><li>7. Program Aplikasi Informatika</li><li>8. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</li></ol>
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li><li>2. Program Penataan Desa</li><li>3. Program Peningkatan Kerjasama Desa</li><li>4. Program Administasi Pemerintah Desa</li><li>5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</li></ol>
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li><li>2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li><li>3. Program Pengembangan Perumahan</li><li>4. Program Kawasan Permukiman</li><li>5. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh</li><li>6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</li><li>7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li><li>8. Program Perencanaan Transmigrasi;</li><li>9. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;</li><li>10. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;</li></ol>
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengendalian B3 dan Limbah B3;</li><li>2. Program Pengelolaan Persampahan</li></ol>
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Penanggulangan Bencana</li><li>2. Program Penanganan Bencana</li><li>3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li><li>4. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau/ Kerusakan Lingkungan Hidup</li><li>5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li></ol>



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Program Perangkat Daerah
		6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li><li>2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li><li>3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li><li>4. Program Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan</li><li>5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li></ol>
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;</li><li>2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li></ol>
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</li><li>2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</li></ol>
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengembangan Ekspor</li><li>2. Program Perekonomian dan Pembangunan</li><li>3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li><li>4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li></ol>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Kabupaten/Kota perlu melakukan penelaahan atas kebijakan pemerintah Provinsi. Tahapan ini akan menjabarkan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi yang mana sudah tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD (Rancangan Awal) Provinsi Kalimantan Timur dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan pada tahun 2023.

Dalam rangka sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Paser dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, maka pada tahun 2023 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dituangkan dalam 7 prioritas Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dituangkan dalam 5 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk prioritas pembangunan Kabupaten Paser dituangkan dalam 34



prioritas pembangunan Kabupaten Paser pada RKPD Tahun 2023. Pada 7 prioritas nasional dan 6 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tersebut Pemerintah Kabupaten Paser mengimplementasikannya pada prioritas pembangunan kabupaten Paser yang dijelaskan pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 berikut ini.

**Tabel 4.7**

Sinkronisasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser dengan Prioritas Nasional Tahun 2023

Prioritas Nasional		Prioritas Kabupaten Paser	
<b>PN1</b>	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PK1	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian.
		PK4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial
<b>PN2</b>	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi dan Menjamin Pemerataan	PK3	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>PN3</b>	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PK4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial
<b>PN4</b>	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial
<b>PN5</b>	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PK3	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>PN6</b>	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PK3	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>PN7</b>	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik	PK2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif



**Tabel 4.8**

Sinkronisasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kabupaten Paser
<b>PP1</b> Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing.	PK4 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial
<b>PP2</b> Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat	PK1 Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian.
<b>PP3</b> Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan	PK1 Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian.
<b>PP4</b> Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi	PK1 Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian.
<b>PP5</b> Pemerataan dan pemantapan konektivitas antar daerah dan kawasan pendukung IKN	PK3 Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>PP6</b> Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	PK2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif

#### 4.2.1 Telaah Pokok – Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD 2023

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 Ayat 2 dikatakan bahwa Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

Secara garis besar hasil penelaahan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### 1. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, meliputi:

- a. Masih banyaknya akses jalan di lingkungan perumahan dan desa yang rusak.
- b. Tidak lancarnya drainase di lingkungan perumahan warga yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah.
- c. Terbatasnya akses air bersih bagi masyarakat



- d. Kurang tersedianya embung di beberapa Desa untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau
- e. Masih belum optimalnya akses terhadap sumber daya air pertanian
- f. Masih adanya warga yang menempati rumah tidak layak huni
- g. Kurangnya sarana lampu penerangan jalan umum
- h. Adanya akses penghubung jalan berupa jembatan dan gorong-gorong yang rusak/terputus.
- i. Kurangnya sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi
- j. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan sampah, dll.

**2. Bidang Perekonomian, meliputi:**

- a. Kurangnya peralatan penunjang industri bagi UKM
- b. Kurangnya sarana dan prasarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- c. Kurang tersedianya lahan sawah untuk produksi padi dalam rangka penguatan ketahanan pangan
- d. Kurangnya modal usaha bagi koperasi
- e. Masih rendahnya kompetensi dan keterampilan masyarakat untuk melakukan wirausaha guna mendorong terciptanya lapangan pekerjaan.
- f. Kurangnya kompetensi dan keterampilan petani dan nelayan dalam menjalankan usaha produksi.
- g. Kurangnya sarana dan prasarana pada beberapa objek wisata
- h. Tidak tersedianya prasarana pasar di beberapa Desa, dll.

**3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi:**

- a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pendidikan dan utilitas sekolah
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dll.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana Olahraga yang memadai di beberapa Desa
- d. Kurangnya pengembangan kesenian tradisional
- e. Kurangnya kompetensi dan keterampilan para pemuda

**4. Bidang Tata Kelola Pemerintahan, meliputi:**

- a. Masih belum layaknya beberapa rumah ibadah yang terdapat di beberapa desa.
- b. Masih belum tersedianya sarana dan prasarana rumah ibadah
- c. Masih belum tersedianya bangunan TK/TP Alquran di beberapa Desa
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana bagi kelompok Majelis Talim / Habsyi di beberapa Desa



- e. Masih adanya kantor pemerintahan baik di Kecamatan maupun di Desa yang perlu dilakukan rehabilitasi
- f. Masih kurangnya sarana pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat baik di Kantor Kecamatan maupun di kantor Desa, dll.

Hasil penelaahan terhadap permasalahan yang terdapat dalam Rekomendasi hasil reses DPRD Kabupaten Paser, akan menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser, selanjutnya dapat dijabarkan sebagaimana terlampir.

#### 4.2.2 Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang

Dalam menyusun RKPD Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Paser melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musrenbang. Dalam penyampaian permasalahan oleh Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Paser melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah disediakan menu pilihan berdasarkan prioritas pembangunan. Permasalahan tersebut kemudian akan di verifikasi dan validasi oleh mitra Bappeda Bersama dengan Perangkat Daerah terkait sehingga diperoleh kesepakatan untuk menjadi bahan masukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Adapun rekapitulasi hasil kesepakatan tersebut terlampir.

#### 4.3 Inovasi Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan Kabupaten Paser perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Paser. Untuk meningkatkan hasil pembangunan perlu pula di dukung oleh inovasi pada perencanaan pembangunan. Beberapa program inovasi yang dikembangkan di Kabupaten Paser antara lain sebagai berikut:

1. SENJATA BM ( <http://halae.tambacola.com/> )  
Sistem Elektronik Jalan dan Jembatan “SENJATA BM” yaitu sistem yang dapat menampung data base jalan dan jembatan dalam bentuk digital sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Data base ini meliputi data kondisi jalan, tipe permukaan jalan, peta jaringan jalan serta foto masing-masing ruas jalan dan jembatan.
2. SIPAPA ( <http://sipapa.bappedalitbang.paserkab.go.id> )  
Sistem Informasi PerencAnaan PendidikAn Bappedalitbang (SIPAPA Bappedalitbang) merupakan inovasi yang digunakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Paser untuk mengupdate kondisi terkini serta realisasi tahun berjalan Sarana dan Prasarana Pendidikan tingkat PAUD, Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah di Kabupaten Paser.  
Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan aplikasi yang mudah diakses oleh perencana pendidikan pada bappedalitbang dan masyarakat secara luas



sehingga perencanaan pendidikan di Kabupaten Paser dapat dikawal dengan baik.

Diharapkan Aplikasi SIPAPA BAPPEDALITBANG ini dapat menjadi alat bantu kerja dalam meningkatkan efektifitas perencanaan pendidikan di Kabupaten Paser.

3. SIKIPER (<http://sikiiper.evlap.id/login>.)

Aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah (SIKIPER) Kabupaten Paser adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD di Kabupaten Paser.

Dalam pengoperasiannya, sistem aplikasi ini menggunakan dua jenis (level) user yaitu user unit yang digunakan untuk menginput capaian kinerja program, kegiatan, sub kegiatan pada level dinas atau unit serta level UPTD atau sub unit dibawahnya; dan user sub unit yang digunakan untuk menginput capaian kinerja program, kegiatan, sub kegiatan hanya pada level UPTD atau sub unit tertentu. Pada user level unit, operator juga dapat melakukan pembuatan user untuk level sub unit dibawahnya. Beberapa menu lainnya yang tertampil pada aplikasi menyesuaikan dengan jenis (level) user yang digunakan.

Data dasar yang tersedia pada aplikasi SIKIPER Kabupaten Paser diambil dan disesuaikan dengan data yang terdapat pada aplikasi SIPD. Penyesuaian terhadap data dasar yang telah tersedia pada aplikasi dapat dilakukan sesuai dengan arahan dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Paser.

4. E-Buen

E-Buen (Elektronik Bikin Urusan Enak & Nyaman) adalah inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis android yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Layanan berbasis android ini diciptakan untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Paser dalam rangka mengakses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Aplikasi berbasis Android E-Buen dapat dunduh di *Play Store*, *Google Play*.

5. DASHBOARD EKSEKUTIF (<https://dashboard.paserkab.go.id/>)

Dashboard Eksekutif adalah penyajian data dari berbagai perangkat daerah untuk disajikan kepada pimpinan, sehingga data yang ingin dilihat oleh pimpinan tersaji dengan cepat dan proses pengambilan keputusan tepat sasaran. Selama ini pengambilan data masih menerapkan proses manual dalam bentuk dokumentasi fisik ataupun telah menggunakan sistem informasi namun



terbatas pada masing-masing Perangkat Daerah. Inovasi ini digagas dan dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

6. SIAP KERJA (<http://simandiri.paserkab.go.id>)

Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser menggagas inovasi guna terciptanya iklim perubahan dalam peningkatan kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Perbaikan kinerja birokrasi memiliki dampak langsung dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Melihat adanya peluang dalam memperbaiki kinerja birokrasi, upaya yang diambil Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Paser dengan melakukan upaya pengawasan kinerja PNS melalui sistem online berupa aplikasi Sistem Informasi Administrasi Penilaian Kinerja ASN ( SIAPKERJA ). Pengawasan ini dapat dijadikan sebagai upaya positif bagi pembenahan kinerja birokrasi agar kinerja birokrasi (aparatur) dapat dimonitor secara optimal.

7. SIFIDA Penguatan ([Difusi Inovasi](#))

SIFIDA adalah akronim dari Sistem Fasilitas Inovasi Perangkat Daerah yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser. Inovasi ini awalnya berbasis Web untuk menjaring gagasan-gagasan inovasi di perangkat daerah. Inovasi SIFIDA selanjutnya diarahkan ke penguatan inovasi dengan tujuan meningkatkan peran interest kepala Perangkat Daerah dan ASN untuk mengimplementasi kebijakan inovasi di perangkat daerah dan di masyarakat. Penguatan inovasi daerah dibangun melalui 1). Seminar Nasional Inovasi Daerah dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian dan Daerah untuk meningkatkan persepsi semua pihak terkait pentingnya implementasi kebijakan inovasi di daerah, 2). Penta helix inkubator bisnis dan teknologi. Target penguatan ini adalah pendampingan inovator yang telah berhasil melakukan invensi dan inovasi. Pendampingan ini dilakukan secara lintas sektoral yakni Bappedalitbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Perguruan tinggi dan Pengusaha. Penguatan ini diharapkan menciptakan pengusaha-pengusaha muda baru yang mampu memanfaatkan dan mengembang potensi daerah guna kemakmuran masyarakat Kabupaten Paser. 3). Pendampingan Agen Perubahan Perangkat Daerah. Penguatan ini diharapkan melalui agen perubahan perangkat daerah mampu menggerakkan sumberdaya



## Pemerintah Kabupaten Paser

yang lain untuk melakukan inovasi-inovasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan banyak lagi inovasi-inovasi lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu



## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2023 disusun dengan mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2023, disusun mengikuti program pembangunan daerah. Terkait kesesuaian nama program, indikator dan target kinerja serta perangkat daerah penanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1**  
Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pagu Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah Tahun 2023

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	6	16	87	324,239,585,508	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	20	65	166,238,290,913	Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	3	3	80,510,540,000	RSUD Panglima Sebaya
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	6	11	1,054,073,602	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	9	17	938,025,300	UPTD Puskesmas Mendik
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	4	5	1,609,326,000	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	6	11	998,089,020	UPTD Puskesmas Suatang Baru
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	6	13	2,431,493,300	UPTD Puskesmas Tanahgrogot
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	6	11	1,310,600,000	UPTD Puskesmas Kerang
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	6	10	1,352,506,030	UPTD Puskesmas Long Kali
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	5	10	1,118,249,361	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	6	9	895,226,000	UPTD Puskesmas Kayungo
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	7	12	928,988,000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	5	14	1,430,791,002	UPTD Puskesmas Muara Komam
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	7	20	738,486,456	UPTD Puskesmas Krayan
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	7	12	793,986,134	UPTD Puskesmas Lolo
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	5	9	2,164,890,000	UPTD Puskesmas Long Ikis
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	6	15	979,064,720	UPTD Puskesmas Senaken



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	6	9	1,641,777,612	UPTD Puskesmas Kuaro
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	5	13	1,419,000,000	UPTD Rumah Sakit Pratama Batu Engau
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	6	16	943,100,263	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	6	10	1,267,928,102	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	6	13	551,611,700	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	6	13	1,319,000,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	5	9	1,353,598,000	UPTD Puskesmas Batukajang
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	23	67	123,351,622,880	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	1	1	1,799,224,660	UPTD Perkantoran Gentung Temiang
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	12	27	47,359,828,580	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	9	31	13,916,222,136	Satuan Polisi Pamong Praja
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	9	19	8,630,562,275	Dinas Pemadam Kebakaran
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	9	19	7,392,146,202	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	15	49	7,934,912,166	Dinas Sosial
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2	4	6	697,534,360	UPTD Pelkesos Bulau Sayang
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	17	36	6,979,061,724	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	19	33	9,315,526,550	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3	6	9	195,000,000	UPTD PPA Kabupaten Paser
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	12	30	8,794,017,764	Dinas Ketahanan Pangan
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4	4	6	907,650,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11	22	60	27,969,967,409	Dinas Lingkungan Hidup
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	10	27	7,825,474,489	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	10	41	12,616,752,198	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
42	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	6	14	821,030,960	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
43	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4	17	33	16,281,442,032	Dinas Perhubungan



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1	1	1	94,499,790	UPTD Terminal Kuaro
45	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1	1	1	282,077,250	UPT Pelabuhan Tana Paser
46	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1	1	1	239,735,350	UPTD Terminal Kota
47	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1	1	2	579,752,400	UPTD PKB
48	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	8	37	13,219,078,528	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
49	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6	10	21	10,757,087,753	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
50	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	11	25	7,318,149,025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
51	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	10	22	11,258,179,534	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
52	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	6	304,948,100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
53	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	2	4	87,490,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
54	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	6	10	1,914,521,880	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	9	30	6,392,888,940	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
56	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	8	10	324,930,490	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	15	33	14,418,901,257	Dinas Perikanan
58	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	6	18	2,310,033,834	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	18	30	20,167,153,156	Dinas Perkebunan dan Peternakan
60	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	10	32	75,766,418,131	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1	1	1	429,286,600	UPT Pembibitan dan Perawatan Ternak Petangis
62	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1	1	1	150,749,883	UPT PKH Kuaro
63	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1	1	1	107,725,532	UPT PKH Long Ikis
64	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1	1	1	131,184,725	UPT PKH Batu Engau
65	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1	1	1	103,764,000	UPT PKH Muara Komam
66	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1	1	1	75,504,550	UPT PKH Tana Paser
67	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1	1	1	113,176,250	UPT PKH Pasir Belengkong
68	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1	1	1	260,167,874	UPT RPH Jone
69	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1	1	1	486,438,449	UPTD Balai Pembibitan dan Tanaman Perkebunan
70	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	7	30,445,755,418	Dinas Lingkungan Hidup
71	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6	9	13	9,143,613,822	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
72	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	2	4	1,302,400,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
73	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3	3	6	389,586,034	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
74	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	3	795,864,383	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
75	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	3	1,120,922,191	Bagian Tata Pemerintahan
76	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	3	479,958,571	Bagian Hukum
77	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	5	793,708,719	Bagian Organisasi
78	SEKRETARIAT DAERAH	1	7	21	23,023,317,056	Bagian Umum
79	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	3	11,628,703,152	Bagian Kesejahteraan Rakyat
80	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	2	260,860,429	Bagian Kerjasama
81	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	4	258,140,554	Bagian Perekonomian
82	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	3	418,766,759	Bagian Administrasi Pembangunan
83	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	3	268,632,874	Bagian Sumber Daya Alam
84	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	3	1,443,235,958	Bagian Protokol dan Pimpinan
85	SEKRETARIAT DAERAH	1	3	10	26,920,175,155	Bagian Perencanaan dan Keuangan
86	SEKRETARIAT DPRD	2	16	66	49,273,580,052	Sekretariat DPRD
87	PERENCANAAN	3	12	54	14,323,765,754	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
88	KEUANGAN	3	10	58	289,716,677,019	Badan Keuangan Aset Daerah
89	KEUANGAN	2	6	28	13,412,716,563	Badan Pendapatan Daerah
90	KEPEGAWAIAN	2	10	40	12,527,794,622	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
91	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	2,187,463,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
92	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	3	6	1,609,561,230	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
93	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	26	16,713,043,526	Inspektorat Kabupaten
94	KECAMATAN	6	12	27	6,365,313,724	Kantor Camat Tanah Grogot
95	KECAMATAN	6	15	32	5,465,641,137	Kantor Camat Pasir Belengkong
96	KECAMATAN	6	12	27	5,948,770,495	Kantor Camat Kuaro
97	KECAMATAN	6	13	25	5,682,204,252	Kantor Camat Long Ikis
98	KECAMATAN	6	13	29	5,996,361,495	Kantor Camat Long Kali
99	KECAMATAN	6	14	30	6,043,157,653	Kantor Camat Batu Sopang
100	KECAMATAN	6	13	24	4,615,164,020	Kantor Camat Muara Komam
101	KECAMATAN	6	13	31	4,115,230,253	Kantor Camat Batu Engau
102	KECAMATAN	6	10	21	2,870,502,779	Kantor Camat Tanjung Harapan
103	KECAMATAN	6	15	35	3,137,628,730	Kantor Camat Muara Samu
104	KECAMATAN	4	11	18	1,363,048,113	Kelurahan Tanah Grogot
105	KECAMATAN	3	6	16	468,290,410	Kelurahan Kuaro
106	KECAMATAN	3	6	10	363,065,170	Kelurahan Muara Komam
107	KECAMATAN	4	11	18	1,132,027,952	Kelurahan Longkali
108	KECAMATAN	2	5	10	413,869,390	Kelurahan Longikis
109	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	11	32	13,902,148,980	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	<b>JUMLAH</b>	<b>177</b>	<b>457</b>	<b>1.361</b>	<b>1,644,650,714,583</b>	

**Tabel 5.2**

**Konsistensi Target Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan RPJMD Tahun Pelaksanaan**

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD	0.70 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD	0.70 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMP	1.5 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMP	1.5 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	APK PAUD	38 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	38 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	APK SD	107 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	107 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	APK SMP	95.50 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP	95.50 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	APM SD	98 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	98 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	APM SMP	95.50 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP	95.50 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KURKULUM	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan yang memiliki pendidik sesuai standar	91 %	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan yang memiliki pendidik sesuai standar	91 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan yang memiliki tenaga kependidikan sesuai standar	55 %	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan yang memiliki tenaga kependidikan sesuai standar	55 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	100 %	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	100 %	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %	Dinas Kesehatan
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %	Dinas Kesehatan
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %	Dinas Kesehatan
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %	Dinas Kesehatan
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Cakupan pengendalian dan pengawasan Obat, alkes dan makanan minuman	100 %	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pengendalian dan pengawasan Obat, alkes dan makanan minuman	100 %	Dinas Kesehatan
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Cakupan pengendalian dan pengawasan Obat, alkes dan makanan minuman	100 %	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pengendalian dan pengawasan Obat, alkes dan makanan minuman	100 %	Dinas Kesehatan
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	70 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	70 %	Dinas Kesehatan
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	70 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	70 %	Dinas Kesehatan
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	persentase kawasan sumber daya air yang dikelola dengan baik	30 %	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA)	persentase kawasan sumber daya air yang dikelola dengan baik	30 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	persentase capaian akses air minum layak	81 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase capaian akses air minum layak	81 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	persentase bangunan dan infrastruktur persampahan yang dikelola dengan baik	55 %	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase bangunan dan infrastruktur persampahan yang dikelola dengan baik	55 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	78 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	78 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi dengan baik	73 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi dengan baik	73 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik	84 %	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik	84 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	58 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	58 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	persentase jembatan dalam kondisi baik	80 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase jembatan dalam kondisi baik	80 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	68 %	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	68 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang	59.18 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang	59.18 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	47.40 %	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	47.40 %	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	30 %	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	30 %	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	91.20 %	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	91.20 %	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	51.58 %	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	51.58 %	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase demonstrasi anarkis	0 %	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase demonstrasi anarkis	0 %	Satuan Polisi Pamong Praja
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase penurunan pelanggaran perda	55 %	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran perda	55 %	Satuan Polisi Pamong Praja
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	cakupan layanan penanggulangan bencana	100 %	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	cakupan layanan penanggulangan bencana	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Cakupan layanan kebakaran kabupaten	40 %	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan layanan kebakaran kabupaten	40 %	Dinas Pemadam Kebakaran
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	100 %	Dinas Sosial
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	100 %	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	100 %	Dinas Sosial
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Dinas Sosial
42	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Cakupan layanan penanganan bencana	100 %	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan layanan penanganan bencana	100 %	Dinas Sosial
43	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	TMP dalam kondisi baik	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	TMP dalam kondisi baik	100 %	Dinas Sosial
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100 %	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
45	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60 %	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
46	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Persentase besaran pencari kerjayang terdaftar dan ditempatkan	30 %	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	30 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
47	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40 %	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
48	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan	40 %	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan	40 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
49	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	71.43 %	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	71.43 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
50	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	100 %	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
51	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan	60 %	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan	60 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
52	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak	59.52 %	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak	59.52 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
53	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	650 Poin	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	650 Poin	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
54	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	50 %	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	50 %	Dinas Ketahanan Pangan
56	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Tingkat ketersediaan pangan	97.90 %	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat ketersediaan pangan	97.90 %	Dinas Ketahanan Pangan
57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Tingkat konsumsi pangan	86 %	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat konsumsi pangan	86 %	Dinas Ketahanan Pangan
58	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Persentase penanganan desa rawan pangan	18.06 %	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rawan pangan	18.06 %	Dinas Ketahanan Pangan
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Persentase penyaluran cadangan pangan	10 %	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penyaluran cadangan pangan	10 %	Dinas Ketahanan Pangan
60	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	82 %	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	82 %	Dinas Ketahanan Pangan
61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	57.14 %	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	57.14 %	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
62	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	55.56 %	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	55.56 %	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
63	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Persentase proses penetapan tanah ulayat	60 %	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase proses penetapan tanah ulayat	60 %	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
64	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	30 %	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	30 %	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
65	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	70 %	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	70 %	Dinas Lingkungan Hidup
66	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	persentase cakupan pancegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	73 %	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase cakupan pancegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	73 %	Dinas Lingkungan Hidup
67	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	9 %	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	9 %	Dinas Lingkungan Hidup
68	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Rasio Luas RTH (Ruang terbuka Hijau) dan Taman kehati yang dikelola	60 %	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Luas RTH (Ruang terbuka Hijau) dan Taman kehati yang dikelola	60 %	Dinas Lingkungan Hidup
69	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	persentase jumlah perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3	80 %	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase jumlah perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3	80 %	Dinas Lingkungan Hidup
70	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	persentase perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	persentase perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
71	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan	100 %	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
72	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	persentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	55 %	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	55 %	Dinas Lingkungan Hidup
73	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah penghargaan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	1 Piagam Adipura	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	1 Piagam Adipura	Dinas Lingkungan Hidup
74	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100 %	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100 %	Dinas Lingkungan Hidup



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
75	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	persentase pengelolaan sampah disumber	19 %	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase pengelolaan sampah disumber	19 %	Dinas Lingkungan Hidup
76	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	persentase sampah yang terangkut ke TPA	53 %	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase sampah yang terangkut ke TPA	53 %	Dinas Lingkungan Hidup
77	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	96 %	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	96 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
78	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	96 %	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	96 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
79	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase data kependudukan yang valid	96 %	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	96 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
80	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
81	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Perbukit Batas Desa	5 %	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Perbukit Batas Desa	5 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
82	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	100 %	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
83	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti	100 %	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
84	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Lembaga Adat Desa yang aktif	60 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Lembaga Adat Desa yang aktif	60 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
85	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Masyarakat Hukum Adat yang aktif	2 lembaga	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Masyarakat Hukum Adat yang aktif	2 lembaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
86	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	85 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	85 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
87	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Angka Kelahiran Kasar	10 %	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Kasar	10 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PPPA

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
88	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rasio Akseptor KB	76 %	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	76 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
89	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga aktif	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga aktif	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar	90 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar	90 %	Dinas Perhubungan
91	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Persentase Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten	90 %	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten	90 %	Dinas Perhubungan
92	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian	40 %	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian	40 %	Dinas Perhubungan
93	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
94	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang terintegrasi	40 %	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang terintegrasi	40 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
95	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase koperasi sehat	62 %	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat	62 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
96	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang maju	12 %	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang maju	12 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
97	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rata-rata omset per koperasi	257 Juta rupiah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rata-rata omset per koperasi	257 Juta rupiah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
98	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan	5 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan	5 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
99	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase peningkatan jumlah UMKM yang naik kelas	0.05 %	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan jumlah UMKM yang naik kelas	0.05 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	725.412 juta rupiah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	725.412 juta rupiah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Jumlah investor non tambang dan non sawit	62 Investor	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor non tambang dan non sawit	62 Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.04 %	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.04 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	62 Investor	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	62 Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
104	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	70 %	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	70 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	Persentase kelompok wirausaha muda (%)	47 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase kelompok wirausaha muda (%)	47 %	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	Persentase organisasi pemuda yang aktif	15.56 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	15.56 %	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
107	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	Jumlah atlet berprestasi	3 orang	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	3 orang	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	Persentase pembinaan cabang olahraga	34 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang olahraga	34 %	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
109	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	Gugus Pramuka Aktif (%)	100 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Gugus Pramuka Aktif (%)	100 %	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	tingkat keamanan informasi	50 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	tingkat keamanan informasi	50 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan sesuai dengan standar Kebudayaan	70 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan sesuai dengan standar Kebudayaan	70 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
113	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif	24 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif	24 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
114	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	5 event	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	5 event	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
115	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	70 %	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	70 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun	12 %	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun	12 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	persentase perpustakaan yang dibina	2 %	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase perpustakaan yang dibina	2 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
118	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	5 Naskah	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	5 Naskah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
119	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	50 %	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	50 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	persentase arsip/dokumen daerah yang dilestarikan	55 %	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase arsip/dokumen daerah yang dilestarikan	55 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
121	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Persentase angka pemakaian arsip	100 %	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase angka pemakaian arsip	100 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
122	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0.6 %	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0.6 %	Dinas Perikanan
123	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.00 %	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.00 %	Dinas Perikanan
124	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan	45 %	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan	45 %	Dinas Perikanan
125	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan	0.9 %	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan	0.9 %	Dinas Perikanan



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
126	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Persentasi destinasi wisata yang baik	21.21 %	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentasi destinasi wisata yang baik	21.21 %	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
127	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan	20 %	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan	20 %	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
128	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Jumlah produk ekonomi kreatif yang memperoleh perlindungan Hak Cipta dari HAKI	1 Produk	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk ekonomi kreatif yang memperoleh perlindungan Hak Cipta dari HAKI	1 Produk	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
129	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	20 Komunitas	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	20 Komunitas	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
130	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase sarana pertanian (perkebunan dan peternakan) yang dimanfaatkan	100 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian (perkebunan dan peternakan) yang dimanfaatkan	100 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
131	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yg dimanfaatkan	100 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yg dimanfaatkan	100 %	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
132	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	100 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	100 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Presentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
134	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
135	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	100 %	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	100 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
136	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Pertumbuhan produksi tanaman Pangan dan hortikultura	10.40 %	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertumbuhan produksi tanaman Pangan dan hortikultura	10.40 %	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
137	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100 %	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
138	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	62 %	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	62 %	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
139	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik.	76.66 %	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik.	76.66 %	Dinas Lingkungan Hidup
140	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	50 rekomendasi	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	50 rekomendasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
141	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi dan fasilitas yang dibangun/direhab	4 %	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi dan fasilitas yang dibangun/direhab	4 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
142	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	50 %	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	50 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
143	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase peningkatan produk lokal yang di ekspor	20 %	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan produk lokal yang di ekspor	20 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
144	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	100 %	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	100 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
145	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase peningkatan Produk UMKM yang dipasarkan/dipromosikan	12 %	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan Produk UMKM yang dipasarkan/dipromosikan	12 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
146	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase Pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian	2,40 %	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian	2,40 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
147	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase pemutahiran data IKM	50 %	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pemutahiran data IKM	50 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
148	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Cakupan kawasan transmigrasi yg sesuai perencanaan	0 %	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan kawasan transmigrasi yg sesuai perencanaan	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
149	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	70 %	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	70 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
150	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan perkotaan baru yang terbentuk	0 kawasan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan perkotaan baru yang terbentuk	0 kawasan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
151	SEKRETARIAT DAERAH	Nilai EKPPD	2.95 nilai	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai EKPPD	2.95 nilai	Sekretariat Daerah
152	SEKRETARIAT DAERAH	Persentase perumusan kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	100 %	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	100 %	Sekretariat Daerah
153	SEKRETARIAT DAERAH	Persentase kebijakan prioritas Perekonomian dan Pembangunan yang dituangkan dalam produk hukum daerah	100 %	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan prioritas Perekonomian dan Pembangunan yang dituangkan dalam produk hukum daerah	100 %	Sekretariat Daerah
154	SEKRETARIAT DPRD	Dokumen KUA PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	6 dokumen	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Dokumen KUA PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	6 dokumen	Sekretariat DPRD
155	SEKRETARIAT DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	100 %	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	100 %	Sekretariat DPRD
156	SEKRETARIAT DPRD	Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	100 %	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	100 %	Sekretariat DPRD
157	PERENCANAAN	Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	94 %	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	94 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
158	PERENCANAAN	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	94 %	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	94 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
159	PERENCANAAN	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	93 %	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	93 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
160	KEUANGAN	Persentase penurunan temuan administratif atas laporan keuangan pemerintah daerah	10 %	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penurunan temuan administratif atas laporan keuangan pemerintah daerah	10 %	Badan Keuangan Aset Daerah
161	KEUANGAN	Persentase permasalahan pengelolaan barang milik daerah selesai ditindaklanjuti	55 %	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase permasalahan pengelolaan barang milik daerah selesai ditindaklanjuti	55 %	Badan Keuangan Aset Daerah
162	KEUANGAN	Rasio PAD terhadap APBD	7.7 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap APBD	7.7 %	Badan Pendapatan Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
163	KEPEGAWAIAN	Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	75 %	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	75 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
164	KEPEGAWAIAN	Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	75 %	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	75 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
165	KEPEGAWAIAN	Persentase pegawai berkinerja baik	100 %	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pegawai berkinerja baik	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
166	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	75 %	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	75 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
167	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	65 %	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	65 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
168	INSPEKTORAT DAERAH	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	3.5 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	3.5 %	Inspektorat Kabupaten
169	INSPEKTORAT DAERAH	Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	75 %	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	75 %	Inspektorat Kabupaten
170	INSPEKTORAT DAERAH	Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	75 %	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	75 %	Inspektorat Kabupaten
171	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	Kantor Camat Tanah Grogot
172	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	Kantor Camat Kuaro
173	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	Kantor Camat Muara Samu
174	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	Kantor Camat Batu Sopang
175	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	Kantor Camat Muara Komam
176	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	Kantor Camat Long Ikis



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
177	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	Kantor Camat Long Kali
178	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	Kantor Camat Pasir Belengkong
179	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	Kantor Camat Batu Engau
180	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	Kantor Camat Tanjung Harapan
181	KECAMATAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	Kantor Camat Tanah Grogot
182	KECAMATAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	Kantor Camat Kuaro
183	KECAMATAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	Kantor Camat Muara Samu
184	KECAMATAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	Kantor Camat Batu Sopang
185	KECAMATAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	Kantor Camat Muara Komam
186	KECAMATAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	Kantor Camat Long Ikis
187	KECAMATAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	Kantor Camat Long Kali
188	KECAMATAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	Kantor Camat Pasir Belengkong
189	KECAMATAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	Kantor Camat Batu Engau
190	KECAMATAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	Kantor Camat Tanjung Harapan
191	KECAMATAN	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	55 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	55 %	Kantor Camat Tanah Grogot



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
192	KECAMATAN	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	Kantor Camat Pasir Belengkong
193	KECAMATAN	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	Kantor Camat Kuaro
194	KECAMATAN	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	Kantor Camat Long Ikis
195	KECAMATAN	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	Kantor Camat Long Kali
196	KECAMATAN	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	Kantor Camat Batu Sopang
197	KECAMATAN	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	Kantor Camat Muara Komam
198	KECAMATAN	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	Kantor Camat Batu Engau
199	KECAMATAN	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	Kantor Camat Tanjung Harapan
200	KECAMATAN	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	Kantor Camat Muara Samu
201	KECAMATAN	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	Kantor Camat Tanah Grogot
202	KECAMATAN	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	Kantor Camat Pasir Belengkong
203	KECAMATAN	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	Kantor Camat Kuaro
204	KECAMATAN	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	Kantor Camat Long Ikis
205	KECAMATAN	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	Kantor Camat Long Kali



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
206	KECAMATAN	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	Kantor Camat Batu Sopang
207	KECAMATAN	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	Kantor Camat Muara Komam
208	KECAMATAN	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	Kantor Camat Batu Engau
209	KECAMATAN	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	Kantor Camat Tanjung Harapan
210	KECAMATAN	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	Kantor Camat Muara Samu
211	KECAMATAN	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	Kantor Camat Tanah Grogot
212	KECAMATAN	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	Kantor Camat Pasir Belengkong
213	KECAMATAN	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	Kantor Camat Kuaro
214	KECAMATAN	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	Kantor Camat Long Ikis
215	KECAMATAN	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	Kantor Camat Long Kali
216	KECAMATAN	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	Kantor Camat Batu Sopang
217	KECAMATAN	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	Kantor Camat Muara Komam
218	KECAMATAN	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	Kantor Camat Batu Engau
219	KECAMATAN	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	Kantor Camat Tanjung Harapan



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
220	KECAMATAN	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	Kantor Camat Muara Samu
221	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase penurunan konflik berbau sara	100 %	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penurunan konflik berbau sara	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
222	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80 %	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
223	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	75 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	75 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
224	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
225	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	100 %	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
226	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
227	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
228	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
229	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
230	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
231	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
232	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
233	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
234	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
235	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
236	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
237	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
238	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
239	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
240	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
241	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
242	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
243	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
244	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
245	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
246	PERENCANAAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
247	KEUANGAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
248	KEPEGAWAIAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
249	INSPEKTORAT DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
250	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	
251	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	



## **5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2023 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Paser. Penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 pada tahun berkenaan, dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur serta harus mempunyai keberpihakan terhadap permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten Paser.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Paser memiliki tema disetiap tahunnya. Strategi ini dilakukan agar pembangunan Kabupaten Paser dapat tercapai dengan maksimal dan memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam mewujudkan tema pembangunan maka dirumuskan Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 yang dikelompokkan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwajibkan melalui prestasi kerja dalam mencapai standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan dan perundangan. Sedangkan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa, merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi



pembangunan Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Pemerintah Daerah Wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD tahun 2023 ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, pertanian dalam arti luas, serta kegiatan penunjang lainnya.

Matrik rencana program dan kegiatan yang diuraikan berikut ini merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Paser. Rencana program dan kegiatan tersebut dilengkapi dengan rincian rencana kebutuhan indikatif pendanaan program dan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Paser tahun anggaran 2023.

Tabel 5.3

## Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif									
										Nasional					Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01						324,239,585,508						359,316,672,056									
1	01	01																				
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
						Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %			70 %	72 %	236,622,977,128		72 %	252,525,887,056							
1	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	%		%	100 %	396,409,628		100 %	530,000,000							
1	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen SPM yang Disusun				2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen		3,09,084,628		Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Non ASN	2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	4,20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				0 Dokumen 6 Dokumen		12,585,000		Kab. Paser, Semua Kecamatan Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan	ASN dan Non ASN	0 Dokumen 6 Dokumen	15,000,000	Dinas Pendidikan dan

				SKPD	Perubahan RKA-SKPD						Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesejahteraan Sosial				Kebudayaan
1	0	0	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun Jumlah Laporan LKJIP yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen 0 Laporan	74,740,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Non ASN	1 Dokumen 0 Laporan	95,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Kualitas Penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan yang akuntable	%		%	100 %	<b>235,257,377,500</b>						100 %	<b>250,430,000,000</b>	
1	0	0	2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan 0 Orang	234,947,062,500	Kab. Paser Semua Kecamatan-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Non ASN	12 Bulan 0 Orang	250,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Bulan 0 Laporan	310,315,000	Kab. Paser Semua Kecamatan-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Non ASN	12 Bulan 0 Laporan	430,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	<b>94,500,000</b>						100 %	<b>153,887,056</b>	

1	0	0	2.	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				24 Dokumen	94,500,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahtera an Sosial	ASN dan Non ASN	24 Dokumen	150,887,056	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	0	0	2.	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>174,190,000</b>							12 Bulan	<b>450,000,000</b>	
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian  Jumlah Dokumen Kepegawaian				0 Dokumen 5 Dokumen	145,140,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahtera an Sosial	ASN dan Non ASN	0 Dokumen 5 Dokumen	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	0	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Memenuhi Angka Kredit Jabatan  Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  Jumlah Peserta yang melaksanakan Diklat				1800 Orang 0 Orang 5 Orang	29,050,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahtera an Sosial	ASN dan Non ASN	1800 Orang 0 Orang 5 Orang	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>366,500,000</b>							12 Bulan	<b>577,000,000</b>	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan						Kab.	Dana	Meningkatka n Sumber	Peningkatan					

1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan			0 Paket	18,300,000	Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Non ASN	0 Paket	25,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Bulan 12 Bulan 0 Paket	120,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Non ASN	12 Bulan 12 Bulan 0 Paket	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Bulan 0 Paket	16,200,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Non ASN	12 Bulan 0 Paket	25,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang Dimanfaatkan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Bulan 0 Dokumen	2,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Non ASN	12 Bulan 0 Dokumen	2,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan			12 Bulan		Kab. Paser, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	ASN dan	12 Bulan	350,000,00	Dinas Pendidikan

1	1	1	6	9	dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	210,000,000	Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Non ASN	0 Laporan	0	dan Kebudayaan
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%			100 %	<b>275,000,000</b>						100 %	<b>295,000,000</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Bulan 0 Laporan	33,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Non ASN	12 Bulan 0 Laporan	45,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Bulan 0 Laporan	242,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Non ASN	12 Bulan 0 Laporan	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional	%	%			100 %	<b>59,000,000</b>						100 %	<b>90,000,000</b>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					0 Unit		Kab. Paser,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas Sumber		0 Unit		Dinas

1	0	0	2	0	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki STNK Aktif Jumlah Mobil Dinas/Operasional yang Dipelihara				5 Unit 5 Unit	44,000,000	Tanah Grogot, Tepian Batang	Umum-Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Non ASN	5 Unit 5 Unit	75,000,000	Pendidikan dan Kebudayaan	
1	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	15,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Non ASN	5 Unit	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	0	0	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Angka Putus Sekolah SD Angka Putus Sekolah SMP APK PAUD APK SD APK SMP APM SD APM SMP	0.25 % - % 40 % 100 % 100 % 100 %	0.94 % 2.28 % 37.60 % 108.62 % 95 % 97.87 % 81.58 %	0.70 % 1.5 % 38 % 107 % 95.50 % 98 % 95.50 %		<b>86,611,108,380</b>						0.70 % 1.5 % 38 % 107 % 95.50 % 98 % 95.50 %	<b>105,675,785,000</b>		
1	0	0	2	0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Terwujudnya Layanan Akses Pendidikan Dasar	%	%	100 %		<b>53,723,544,970</b>							100 %	<b>64,028,285,000</b>	
1	0	0	2	0	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Unit Sekolah Baru yang Dibangun				0 Ruang 10 Unit	220,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	0 Ruang 10 Unit		0 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2	0	Pembangunan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Dibangun				2 Unit	200,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Siswa, Guru,	2 Unit		0	Dinas Pendidikan

1	1	2	01	5	Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					0 Ruang	0	Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Manusia dan Kesejahteraan Sosial	dan Sekolah	0 Ruang		dan Kebudayaan
1	0	0	2	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					7 Unit	750,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	7 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat					12 Unit 0 Ruang	160,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	12 Unit 0 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2 Unit	200,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	2 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2	1	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					1 Paket 0 Paket	3,450,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	1 Paket 0 Paket	10,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2	1	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					1 Paket 0 Unit	1,800,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	1 Paket 0 Unit	5,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah							Kab. Paser	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas	Siswa,			Dinas

1	0	0	2.	2	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			1 Kegiatan	13,310,000	Semua Kecamatan	Umum-Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Guru, dan Sekolah	1 Kegiatan	13,310,000	Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			5500 Peserta Didik	44,975,000	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	5500 Peserta Didik	44,975,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	2	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			208 Sekolah	155,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	208 Sekolah	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Lomba Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			208 Sekolah	220,485,000	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	208 Sekolah	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Honorer					Kab. Paser Semua	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas Sumber	Siswa,			Dinas

1	0	0	2.	2	Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1076 Orang	35,917,502,550	Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Guru, dan Sekolah	1076 Orang	37,000,000,000	Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Dilaksanakan				1 Kegiatan	154,379,820	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	1 Kegiatan	170,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang Dibina Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				208 Sekolah 0 Satuan Pendidikan	267,402,600	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	208 Sekolah 0 Satuan Pendidikan	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Daerah Jumlah Sekolah Penerima Dana BOSDA Hibah Jumlah				0 Satuan Pendidikan 208 Sekolah 25 Sekolah 223 Sekolah	10,170,490,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	0 Satuan Pendidikan 208 Sekolah 25 Sekolah 223 Sekolah	11,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





1	0	0	2.	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Penerima BOS Daerah Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima BOS Hibah Jumlah Sekolah Penerima BOS Pusat				66 Sekolah 0 Satuan Pendidikan 14 Sekolah 77 Sekolah	4,821,715,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	66 Sekolah 0 Satuan Pendidikan 14 Sekolah 77 Sekolah	5,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	0	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Dini (PAUD)</b>	Jumlah Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	% %	% %	66.3 % 66.3 %	<b>7,831,853,780</b>							66.3 % 66.3 %	<b>8,711,500,000</b>	
1	0	0	2.	0	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				5 Unit	200,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	5 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				5 Unit	300,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	5 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Jumlah									Meningkatkan	Peningkatan				



1	0	0	2.	1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2 Kegiatan 0 Orang	81,453,420	Kab. Pasir Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	2 Kegiatan 0 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Dokumen Jumlah Kelembagaan PAUD yang Dibina Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Dokumen 204 Sekolah 0 Satuan Pendidikan	40,500,000	Kab. Pasir Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	1 Dokumen 204 Sekolah 0 Satuan Pendidikan	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	1	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Sekolah Penerima BOP Jumlah Sekolah Penerima BOSDA Jumlah Sekolah Penerima Hibah Bosda				0 Satuan Pendidikan 204 Sekolah 9 Sekolah 204 Sekolah	5,050,000,000	Kab. Pasir Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	0 Satuan Pendidikan 204 Sekolah 9 Sekolah 204 Sekolah	6,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2.	0	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Terkelolanya Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif	%	%	100 %		<b>259,925,000</b>						100 %	<b>316,000,000</b>	
					Penyelenggaraan	Jumlah Lembaga Penyelenggaraan						Kab. Pasir	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas	Siswa,			Dinas

1	0	0	2	1	Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			9 Lembaga 0 Peserta Didik	49,632,000	Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Guru, dan Sekolah	9 Lembaga 0 Peserta Didik	32,000,000	Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2	1	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dievaluasi Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			9 Lembaga 0 Satuan Pendidikan	9,510,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	9 Lembaga 0 Satuan Pendidikan	12,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2	1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			1 Kegiatan 0 Orang	50,783,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	1 Kegiatan 0 Orang	52,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	2	1	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			9 Lembaga 0 Satuan Pendidikan	150,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Siswa, Guru, dan Sekolah	9 Lembaga 0 Satuan Pendidikan	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0	3		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100 %	90 %	100 %	<b>40,500,000</b>						100 %	<b>150,000,000</b>	

1	0	0	2.	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	%	%	100 %	<b>40,500,000</b>					100 %	<b>150,000,000</b>		
1	0	0	2.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			1 Kegiatan	40,500,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Guru dan Siswa	1 Kegiatan	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0	0		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	<b>965,000,000</b>					100 %	<b>965,000,000</b>		
1	0	0	2.	<b>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	Terlayannya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	%	100 %	<b>7,500,000</b>					100 %	<b>20,000,000</b>		
1	0	0	2.	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang			0 Dokumen 3 Sekolah	7,500,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat dan Sekolah	0 Dokumen 3 Sekolah	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

					Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani																
1	0	0	2.		<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat %	%	100 %	<b>957,500,000</b>								100 %	<b>945,000,000</b>			
1	0	0	2.	0	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat		0 Dokumen 25 Sekolah	7,500,000	Kab. Paseh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat dan Sekolah	0 Dokumen 25 Sekolah	20,000,000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	0	0	2.	0	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		0 Dokumen 114 Desa	950,000,000	Kab. Paseh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat dan Sekolah	0 Dokumen 114 Desa	925,000,000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
<b>2</b>	<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>								<b>1,914,521,880</b>							<b>1,700,000,000</b>	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan sesuai dengan standar Kebudayaan	100 %	na %	70 %	<b>214,846,900</b>							70 %	<b>275,000,000</b>			

2	2	0	2.	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Obyek Kebudayaan Masyarakat yang di kelola	%	%	100 %	<b>14,846,900</b>					100 %	<b>25,000,000</b>		
2	2	0	2.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Perindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			0 Objek 1 Kegiatan	14,846,900	Kab. Paseh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahtera an Sosial	Kebudayaan Masyara kat	0 Objek 1 Kegiatan	25,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2	0	2.	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan	Persen	Persen	100 Persen	<b>200,000,000</b>						100 Persen	<b>250,000,000</b>	
2	2	0	2.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jumlah Perindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			0 Objek 20 Obyek	200,000,000	Kab. Paseh Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahtera an Sosial	Masyara kat	0 Objek 20 Obyek	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2	0	3	<b>PROGRAM PENGEMBANGA N KESENIAN TRADISIONAL</b>	Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif	42 %	12 %	24 %	<b>984,306,900</b>						24 %	<b>500,000,000</b>	
2	2	0	2.	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya</b>	Jumlah kelompok seni yang	Seni	Seni	84 Seni	<b>984,306,900</b>						84 Seni	<b>500,000,000</b>	



2	2	0	2.	0	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				6 Jenis	53,152,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	6 Jenis	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
2	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun	18 %		10 %	12 %	<b>362,216,080</b>						12 %	<b>425,000,000</b>				
2	2	0	2.		<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	Terkelolanya museum kabupaten/Kota	Unit		Unit	1 Unit	<b>362,216,080</b>						1 Unit	<b>425,000,000</b>				
2	2	0	2.	0	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Museum Sebagai Wadah Edukasi dan Rekreasi Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				5 Orang	50,628,680	Kab. Paser Belengkong Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Museum	5 Orang	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
2	2	0	2.	0	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Museum dan Cagar Budaya yang dikelola Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	311,587,400	Kab. Paser Belengkong Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Museum	1 Unit	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
<b>1</b>	<b>0</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>									<b>166,238,290,913</b>							<b>180,882,000,000</b>	

1	0	0		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP				70	<b>113,220,412,153</b>				70	<b>117,147,000,000</b>			
1	0	0	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Presentase perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	persen		persen	100 persen	<b>100,994,490</b>				100 persen	<b>125,000,000</b>			
1	0	0	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat				1 Dokumen	<b>80,724,600</b>	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan dan UPTD	1 Dokumen	<b>80,000,000</b>	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD				24 Dokumen	<b>65,312,000</b>	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan dan UPTD	24 Dokumen	<b>60,000,000</b>	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	<b>4,957,890</b>	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kesehatan dan UPTD	2 Laporan	<b>15,000,000</b>	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Presentase dokumen dan laporan adminitrasi keuangan yang tersusun	persen		persen	100 persen	<b>111,735,980,028</b>					100 persen	<b>115,100,000,000</b>		
1	0	0	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan				1090 Orang/bulan	<b>111,716,212,028</b>	Kab. Paser, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	ASN	1090 Orang/bulan	<b>115,000,000,000</b>	Dinas Kesehatan

			2	ASN	ASN						Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Manusia dan Kesejahteraan Sosial				
1	0	0	2.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	7,900,000		Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	11,868,000		Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	1 Laporan	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.005	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Presentase adminitrasi kepegawaian PD yang tersusun	%	%	100 %	<b>25,000,000</b>							100 %	<b>25,000,000</b>	
1	0	0	2.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			23 Dokumen	25,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dilingkungan Dinkes	23 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.006	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	persen	persen	100 persen	<b>424,036,535</b>							100 persen	<b>585,000,000</b>	
1	0	0	2.006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1 Paket	6,073,650		Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dinas Kesehatan	1 Paket	15,000,000	Dinas Kesehatan





1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5 Unit	79,597,100	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Sarana Prasarana penunjang urusan kantor	5 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50 Unit	126,600,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Sarana Prasarana penunjang urusan kantor	50 Unit	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Unit	9,152,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Sarana Prasarana penunjang urusan kantor	12 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %	100 %	100 %		<b>37,612,447,860</b>						100 %	<b>45,220,000,000</b>	
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	persen	persen	86 persen		<b>4,008,092,200</b>						86 persen	<b>6,300,000,000</b>	
						Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan						Kab. Paser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas				

1	0	0	2.	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas				2 Unit	1,170,000,000	Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Fasilitas Kesehatan	2 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100 Unit	609,328,600	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Fasilitas Kesehatan	100 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	1	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin				2 Paket	1,198,500,000	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Fasilitas Kesehatan	2 Paket	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	1	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai				1 Paket	861,700,000	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1,300,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Unit	168,563,600	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Fasilitas Kesehatan	20 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan yang tersedia	persen	persen	100 persen		<b>33,392,649,660</b>						100 persen	<b>38,460,000,000</b>	
1	0	0	2.	0	Pengelolaan Pelayanan	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu				5354 Orang	87,004,500	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Masyarakat Kabupaten Paser dan	5354 Orang	250,000,000	Dinas

	2	2	2	1	Kesehatan Ibu Hamil	Hamil Sesuai Standar						Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Petugas Kesehatan		0	Kesehatan
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Sesuai Standar			5167 Orang	90,655,000		Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	5167 Orang	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar			5167 Orang	90,838,000		Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	5167 Orang	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar			24647 Orang	139,395,000		Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	24647 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar			33183 Orang	75,000,000		Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	33183 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar			18.058 Orang	54,732,000		Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	18.058 Orang	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	0	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar			1097 Orang	7,592,000		Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	1097 Orang	250,000,000	Dinas Kesehatan



1	0	0	2.	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					1 Dokumen	50,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	13,337,760	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)					12857 Oras	38,426,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	12857 Oras	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus					3 Dokumen	15,076,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	3 Dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					3 Dokumen	11,776,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	3 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					1 Dokumen	29,717,208,800	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	1 Dokumen	30,000,000,000	Dinas Kesehatan
	0	0	2.	3	Pengelolaan	Terkelolanya							Kab. Paser Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber	Masyarakat Kabupaten Paser			Dinas

1	2	2	0	1	Penelitian Kesehatan	Penelitian Kesehatan					1 Dokumen	18,555,000	Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	dan Petugas Kesehatan	1 Dokumen	50,000,000	Kesehatan	
1	0	0	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	1,600,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	1 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2	3	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					5 unit	240,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	5 unit	250,000,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2	3	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	44,130,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	1 Laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2	3	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respo Wabah					1 Dokumen	13,155,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga					18207 Keluarga	57,389,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kabupaten Paser dan Petugas Kesehatan	18207 Keluarga	250,000,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2	3	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	persen		persen		100 persen	<b>80,336,000</b>							100 persen	<b>160,000,000</b>	



1	0	0	2.	<b>Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	kebutuhan SDM yang direncanakan untuk UKP dan UKM			persen		persen	100 persen	<b>14,744,856,000</b>					100 persen	<b>16,000,000,000</b>		
1	0	0	2.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)						351 Orang	14,691,600,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pukesmas, puskesmas pembantu, dinas kesehatan	351 Orang	15,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						1 Dokumen	5,256,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pukesmas, puskesmas pembantu, dinas kesehatan	1 Dokumen	5,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM			persen		persen	80 persen	<b>523,090,000</b>						80 persen	<b>2,000,000,000</b>	
1	0	0	2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100 Orang	523,090,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN Kesehatan	100 Orang	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	4	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Cakupan pengendalian dan pengawasan Obat, alkes dan makanan minuman			100 %		100 %	100 %	<b>61,749,900</b>						100 %	<b>165,000,000</b>	

1	0	0	2.		<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Persentase pemberian izin untuk apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	persen		persen	100 persen	<b>43,800,000</b>						100 persen	<b>50,000,000</b>		
1	0	0	2.	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	13,800,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Toko Obat, toko kosmetik dan Apotek	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Presentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat	persen		persen	50 persen	<b>32,275,000</b>							50 persen	<b>50,000,000</b>	
1	0	0	2.	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat				1 Dokumen	32,275,000	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Industri Rumah	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan	

			3	sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Tangga						
1	0	0	2	0	4	2.	0	4													
				<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Presentase penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi TPM.			persen			persen	40 persen	<b>12,140,000</b>					40 persen	<b>50,000,000</b>		
1	0	0	2	0	4	2.	0	4													
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							1 Dokumen	12,140,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Tempat pengolahan makanan dan Depo Air Mimum	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	0	4	2.	0	5													
				<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	Presentasi penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan			persen			persen	50 persen	<b>3,534,900</b>						50 persen	<b>15,000,000</b>	
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan									Kab. Paser,	Dana	Meningkatkan Sumber	Peningkatan Kualitas				



1	0	0	2.	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentse UKBM yang dikembangkan (posy aktif)	persen		persen	58 persen	16,320,000						58 persen	150,000,000		
1	0	0	2.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	16,320,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Kader Kesehatan	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan	
<b>1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
1	0	2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						80,510,540,000									0
1	0	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	600,000,000						72 %	0		
1	0	0	2.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		laporan	2 laporan	600,000,000						2 laporan	0		
1	0	0	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	600,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	masyarakat dan karyawan rumah sakit		2 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	66,500,000,000						100 %	0		



1	0	0			<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>223,607,400</b>					72 %	<b>235,903,140</b>	
1	0	0	2.		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	85 persen	<b>97,078,600</b>					85 persen	<b>106,786,460</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,241,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ATK,lampu,alat/bahan untuk kantor,rapat koordinasi dan konsultasi	1 Paket	1,365,650	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,448,010	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ATK,lampu,alat/bahan untuk kantor,rapat koordinasi dan konsultasi	1 Paket	2,692,811	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	19,649,290	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ATK,lampu,alat/bahan untuk kantor,rapat koordinasi dan konsultasi	1 Paket	21,614,219	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	43,719,800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ATK,lampu,alat/bahan untuk kantor,rapat koordinasi dan konsultasi	1 Paket	48,091,780	Dinas Kesehatan
															ATK,lampu,alat/bahan untuk kantor,rapat koordinasi dan konsultasi			

1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan	30,020,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ahan untuk kantor, rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan	33,022,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	%		%		90 %	<b>96,550,000</b>						90 %	<b>96,140,000</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	jasa komunikasi,air,lisrik,telepon,jasa surat menyurat dan servis ac	1 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	6,400,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	jasa komunikasi,air,lisrik,telepon,jasa surat menyurat dan servis ac	12 Laporan	5,040,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Laporan	9,150,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	jasa komunikasi,air,lisrik,telepon,jasa surat menyurat dan servis ac	2 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat	unit %		unit %		3 unit 85 %	<b>29,978,800</b>						3 unit 85 %	<b>32,976,680</b>	

1	02192	2.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	29,978,800		Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan mobil operasional kantor	3 Unit	32,976,680	Dinas Kesehatan
1	022	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	<b>188,804,300</b>								100 %	<b>207,684,730</b>	
1	022	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	%		%	95 %	<b>103,364,300</b>								95 %	<b>113,700,730</b>	
1	022	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	3,164,300		Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	tersedia nya plastik obat, distribusi obat, pengambilan vaksin covid	1 Paket	3,480,730	Dinas Kesehatan	
1	022	02	2.01	11	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan				1 Paket	100,200,000			Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	tersedia nya plastik obat, distribusi obat, pengambilan vaksin covid	1 Paket	110,220,000	Dinas Kesehatan	



1	0	0		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>240,950,930</b>					72 %	<b>265,046,023</b>		
1	0	0	2.006	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	<b>29,977,810</b>					100 %	<b>32,975,591</b>		
1	0	0	2.006	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	562,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Bahan Logistik (ATK, Kebersihan), Lampu, Alat/bahan untuk kantor, rapat koordinasi dan konsultasi	1 Paket	618,750	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.006	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	12,815,310	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Bahan Logistik (ATK, Kebersihan), Lampu, Alat/bahan untuk kantor, rapat koordinasi dan konsultasi	1 Paket	14,096,841	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.006	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1,100,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Bahan Logistik (ATK, Kebersihan), Lampu, Alat/bahan untuk kantor, rapat koordinasi dan	1 Paket	1,210,000	Dinas Kesehatan





1	0	0	2.	<b>Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	%	%	100 %	<b>739,049,070</b>						100 %	<b>794,896,377</b>	
1	0	0	2.	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			1200 Orang	8,240,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	UPTD. Labkesda Kab. Paser	1200 Orang	9,006,400	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	10,809,070	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	UPTD. Labkesda Kab. Paser	1 Dokumen	11,889,977	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			1 Unit	10,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	UPTD. Labkesda Kab. Paser	1 Unit	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %	100 %	100 %	<b>339,000,000</b>						100 %	<b>372,900,000</b>	
1	0	0	2.	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan</b>	Jumlah Tenaga Yang Tersedia	%	%	100 %	<b>339,000,000</b>						100 %	<b>372,900,000</b>	

				UKM di Wilayah Kabupaten/Kota															
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				11 Orang	339,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	11 Orang	372,900,000	Dinas Kesehatan
<b>1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						1,419,000,000						1,500,973,820		
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	467,566,303						72 %	503,896,753	
1	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	%		%	100 %	148,150,303						100 %	152,538,953	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11,584,800	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Rumah Sakit Pratama Batu Engau	1 Paket	2,316,880	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,052,240	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Rumah Sakit Pratama Batu Engau	1 Paket	15,457,484	Dinas Kesehatan
													Dana	Meningkatkan Sumber	Peningkatan				



1	0	0	2.	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit 3 Unit	62,416,000	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Rumah Sakit Pratama Batu Engau	0 Unit 3 Unit	68,657,800	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	35,000,000	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Rumah Sakit Pratama Batu Engau	1 Unit	38,500,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	0		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	<b>951,433,697</b>						100 %	<b>997,077,067</b>	
1	0	0	2.	01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	%		%	80 %	<b>538,643,697</b>						80 %	<b>543,008,067</b>	
1	0	0	2.	1	01	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	50,000,000	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Rumah Sakit Pratama Batu Engau	4 Unit	5,500,000	Dinas Kesehatan
							Jumlah Obat						Kab. Paser,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas Sumber	Rumah Sakit			

1	0	0	2.	1	Pengadaan Obat, dan Vaksin yang Disediakan				4 Paket	386,700,000	Batu Engau, Kerang	Umum-Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pratama Batu Engau	4 Paket	425,370,000	Dinas Kesehatan								
1	0	0	2.	1	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan			4 Paket	91,943,697	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Rumah Sakit Pratama Batu Engau	4 Paket	101,138,067	Dinas Kesehatan								
1	0	0	2.	2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			27 Unit	10,000,000	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Rumah Sakit Pratama Batu Engau	27 Unit	11,000,000	Dinas Kesehatan								
1	0	0	2.	2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan yang tersedia	%	%	85 %	<b>412,790,000</b>							85 %	<b>454,069,000</b>								
1	0	0	2.	3	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			2 Dokumen	412,790,000	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Rumah Sakit Pratama Batu Engau	2 Dokumen	454,069,000	Dinas Kesehatan								
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																									
1	0	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																<b>2,431,493,300</b>							<b>2,674,627,567</b>	
1	0	0	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																					72 %	<b>432,109,682</b>	
1	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	%	%	100 %	<b>237,862,984</b>							100 %	<b>261,649,282</b>								

1	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	8,788,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	1 Paket	9,666,800	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	93,857,584	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	1 Paket	103,243,342	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	37,934,400	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	1 Paket	41,727,840	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10 Laporan	67,283,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	10 Laporan	67,011,300	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%		%		100 %	<b>125,010,000</b>						100 %	<b>137,511,000</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1,800,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	1 Laporan	1,980,000	Dinas Kesehatan

1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	123,210,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	3 Laporan	135,531,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %		<b>29,954,000</b>						100 %	<b>32,949,400</b>	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 Unit	14,604,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	0	2 Unit	16,064,400	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					22 Unit	15,350,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	0	22 Unit	16,885,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %		<b>1,699,066,316</b>						100 %	<b>1,868,957,885</b>	
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	%		%	100 %		<b>16,740,966</b>						100 %	<b>18,400,000</b>	

1	0	0	2.	1	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				1 Unit	16,740,966	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	1 Unit	18,400,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	%	%	100 %		<b>1,682,325,350</b>						100 %	<b>1,850,557,885</b>	
1	0	0	2.	2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 Dokumen	82,670,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	1 Dokumen	85,937,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				14 Dokumen	1,632,203,300	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	14 Dokumen	1,795,423,630	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	3	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	17,452,050	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	1 Dokumen	19,197,255	Dinas Kesehatan
1	0	0	3		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %	100 %	100 %		<b>339,600,000</b>						100 %	<b>373,560,000</b>	
1	0	0	2.	2	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	Presentase kebutuhan SDM yang direncanakan untuk UKP	%	%	100 %		<b>339,600,000</b>						100 %	<b>373,560,000</b>	

				<b>untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	dan UKM																							
1	02	03	202	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			11 Orang	339,600,000		Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial		PTT Puskesmas	11 Orang	373,560,000	Dinas Kesehatan									
1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																								
1	02			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						979,064,720											1,000,645,000							
1	02	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	C				C								CC	273,451,320						281,000,000			
1	02	01	206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	%				%									100 %	116,181,360						100 %	120,000,000	
1	02	01	206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								1 Paket	8,291,300	Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial		ASN	1 Paket		9,000,000		Dinas Kesehatan			
1	02	01	206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								2 Paket	13,250,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial		ASN	2 Paket		14,000,000		Dinas Kesehatan			
1	02	01	206	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								4 Paket	38,740,060	Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial		ASN	4 Paket		40,000,000		Dinas Kesehatan			

1	0	0	2.	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									75 Laporan	55,900,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN	75 Laporan	57,000,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Presentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	%		%						100 %	<b>50,340,000</b>							100 %	<b>51,000,000</b>	
1	0	0	2.	0	075	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan									40 Unit	50,340,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Masyarakat	40 Unit	51,000,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	%		%						100 %	<b>71,195,280</b>							100 %	<b>76,000,000</b>	
1	0	0	2.	0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat									75 Laporan	750,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Masyarakat	75 Laporan	1,000,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									12 Laporan	70,445,280	Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Masyarakat	12 Laporan	75,000,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%						100 %	<b>35,734,680</b>							100 %	<b>34,000,000</b>	

				<b>Pemerintahan Daerah</b>														
1	0	0	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	14,074,680	Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Masyarakat	3 Unit	15,000,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			11 Unit	7,790,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Masyarakat	11 Unit	8,000,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	3,500,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Masyarakat	1 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			17 Unit	10,370,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Masyarakat	17 Unit	11,000,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	%	%	100 %	<b>705,613,400</b>						100 %	<b>719,645,000</b>		
1	0	0	2.	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang disediakan	%	%	83 %	<b>11,600,000</b>						83 %	<b>12,000,000</b>		



				KABUPATEN/KOTA	dokumen dan laporan adminitrasi umum													
1	0	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase dokumen adminitrasi umum yang disusun	%		%	100 %	<b>147,803,532</b>					100 %	<b>148,217,500</b>		
1	0	0	2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia				100 %	2,217,500	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Rawat Inap Muser	100 %	2,217,500	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				100 %	48,931,232	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Rawat Inap Muser	100 %	49,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan				100 %	6,904,800	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Rawat Inap Muser	100 %	7,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30,750,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Rawat Inap Muser	30 Laporan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	%		%	100 %	<b>19,956,000</b>						100 %	<b>19,956,000</b>	
			2.		Jumlah Laporan						Kab. Paser,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas Sumber	Puskesmas			



1	0	0	2.	01	<b>Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%		%	100 %	<b>71,609,070</b>						100 %	<b>72,000,000</b>	
1	0	0	2.	1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	71,609,070	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kecamatan Muara Samu	20 Unit	72,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan yang disediakan	%		%	100 %	<b>443,950,000</b>						100 %	<b>443,950,000</b>	
1	0	0	2.	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				40 Dokumen	443,950,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kecamatan Muara Samu	40 Dokumen	443,950,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	3		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %		100 %	100 %	<b>322,800,000</b>						100 %	<b>322,800,000</b>	
1	0	0	2.	0	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	%		%	100 %	<b>322,800,000</b>						100 %	<b>322,800,000</b>	

1	0	0	2.	0	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	322,800,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahtera an Sosial	Pegawai Tidak Tetap (PTT) Puskesm as Rawat Inap Muser	10 Orang	322,800,000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
1	0	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>										<b>938,025,300</b>						<b>1,168,016,000</b>		
1	0	0	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/KO TA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>202,655,800</b>						72 %	<b>285,652,000</b>		
1	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	<b>98,690,636</b>						1 Paket	<b>118,572,000</b>		
1	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,260,400	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah an Yang Partisipatif	Puskesm as Mendik , IGD Mendik dan Pusban wilayah Mendik	1 Paket	3,912,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	29,000,000	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah an Yang Partisipatif	Puskesm as Mendik , IGD Mendik dan Pusban wilayah Mendik	4 Paket	35,000,000	Dinas Kesehatan	
						Jumlah Paket						Kab.	Dana Transfer Umum- Dana Bagi	Meningkatka n Sumber	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah an Yang	Puskesm as Mendik ,				



1	0	0	0	0	Urusan Pemerintahan Daerah	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	60,554,700						12 Laporan	71,241,000	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	46,034,700	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Puskesmas, IGD dan Pusban Mendik	12 Laporan	55,241,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3 Laporan	14,520,000	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Puskesmas, IGD dan Pusban Mendik	3 Laporan	16,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	unit	2 unit	<b>28,647,257</b>						2 unit	<b>34,376,000</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	17,527,257	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kendaraan dinas Operasional dan Ambulans Puskesmas Mendik	2 Unit	21,032,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang			24 Unit	11,120,000	Kab. Paser, Long Kali,	Dana Transfer Umum-Dana		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui	Kendaraan dinas Operasional dan Ambulan	24 Unit	13,344,000	Dinas Kesehatan

			9	Mesin Lainnya	Dipelihara						Mendik	Alokasi Umum		Pemerintahan Yang Partisipatif	ce Puskesmas Mendik			
1	0	0	2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	558,909,500						100 %	670,612,000	
1	0	0	2	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit		unit	7 unit	34,815,500						7 unit	41,700,000	
1	0	0	2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	24,000,000	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Puskesmas Mendik dan IGD 24 Jam Puskesmas mendik	2 Unit	28,800,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				7 Unit	10,815,500	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Puskesmas Mendik dan IGD 24 Jam Puskesmas mendik	7 Unit	12,900,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen		dokumen	100 dokumen	524,094,000						100 dokumen	628,912,000	

1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	524,094,000	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Puskesmas Mendik, Pusban dan Masyarakat wilayah Mendik serta Mitra Puskesmas Mendik (RSU Panglima Sebaya)	100 Dokumen	628,912,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %		100 %	100 %	<b>176,460,000</b>						100 %	<b>211,752,000</b>	
1	02	03	2.02		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Puskesmas Mendik	orang		orang	5 orang	<b>162,300,000</b>						5 orang	<b>194,760,000</b>	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				5 Orang	162,300,000	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	PTT Puskesmas Mendik	5 Orang	194,760,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.03		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah</b>	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Puskesmas	orang		orang	3 orang	<b>14,160,000</b>						3 orang	<b>16,992,000</b>	

				<b>Kabupaten/Kota</b>	Mendik													
1	0	0	2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			3 Orang	14,160,000	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Puskesmas Mendik	3 Orang	16,992,000	Dinas Kesehatan	
<b>1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
1	0	2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>1,609,326,000</b>							<b>1,609,326,000</b>	
1	0	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %							72 %	<b>172,960,000</b>	
1	0	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	%		%	100 %							100 %	<b>78,560,000</b>	
1	0	0	2.															
1	0	0	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 paket	46,000,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Lori Kab. Paser, Belengkong, Suliliran Kab. Paser, Belengkong, Laburan Kab. Paser, Belengkong, Suliliran Baru Kab. Paser, Belengkong, Laburan Baru Kab. Paser, Belengkong, Laburan Baru Kab. Paser,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Peningkatan dan Lintas Sektor di Wilayah Kerja Puskesmas Suliliran Baru		20 paket	46,000,000	Dinas Kesehatan



1	2	1	0	8	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	pemerintah daerah yang disediakan	%	%	100 %	<b>50,400,000</b>				100 %	<b>50,400,000</b>		
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan 0 Laporan	50,400,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Lori Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Kab. Paser, Paser Belengkong, Laburan Kab. Paser Belengkong, Suliliran Baru Kab. Paser, Paser Belengkong, Laburan Baru Kab. Paser, Paser Belengkong, Sunge Batu Kab. Paser, Tanah Grogot, Perepat Kab. Paser, Tanah Grogot, Sungai Langir	Dana Transfer Umum Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	3 Laporan 0 Laporan	50,400,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	%	%	100 %	<b>44,000,000</b>				100 %	<b>44,000,000</b>		
											Kab. Paser, Tanjung Harapan, Lori						

1	0	0	2.	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	44,000,000	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Kab. Paser, Paser Belengkong, Laburan Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru Kab. Paser, Paser Belengkong, Laburan Baru Kab. Paser, Paser Belengkong, Sunge Batu Kab. Paser, Tanah Grogot, Perepat Kab. Paser, Tanah Grogot, Sungai Langir	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kantor	19 Unit	44,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	0	2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	<b>1,436,366,000</b>		100 %	<b>1,436,366,000</b>	
1	0	0	2.	0	2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>1,436,366,000</b>		100 %	<b>1,436,366,000</b>	
										Kab. Paser, Tanjung Harapan, Lori Kab. Paser,						

1	0	0	2.	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1,436,366,000	Paser Belengkong, Suliliran Kab. Paser, Paser Belengkong, Laburan Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru Kab. Paser, Paser Belengkong, Laburan Baru Kab. Paser, Paser Belengkong, Sunge Batu Kab. Paser, Tanah Grogot, Perepat Kab. Paser, Tanah Grogot, Sungai Langir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Suliliran Baru	3 Dokumen	1,436,366,000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1	0	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>998,089,020</b>						<b>1,112,647,400</b>		
1	0	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Presentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah	80 % %	70 % %	72 % 72 %	<b>155,886,620</b>						72 % 72 %	<b>171,247,400</b>		
1	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase dokumen dan laporan pengadaan barang dan jasa yang tersusun	%	%	100 %	<b>80,967,500</b>					100 %	<b>87,966,000</b>		

1	02161	2.061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,496,900	Kab. Paser Belengkong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Kepala Puskesmas, Pemegang program, TU	1 Paket	6,496,000	Dinas Kesehatan
1	02164	2.064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	38,187,550	Kab. Paser Belengkong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Kepala Puskesmas, Pemegang program, TU	1 Paket	40,187,000	Dinas Kesehatan
1	02165	2.065	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	17,613,050	Kab. Paser Belengkong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Kepala Puskesmas, Pemegang program, TU	0 Paket	20,613,000	Dinas Kesehatan
1	02169	2.069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Kepala Puskesmas, Pemegang program, TU	12 Laporan	20,670,000	Dinas Kesehatan
1	0218	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%		%	100 %	<b>33,484,030</b>						100 %	<b>36,846,400</b>	
1	02181	2.081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	460,000	Kab. Paser Belengkong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	TU, Jaringan Perkantoran	1 Laporan	520,000	Dinas Kesehatan
1	02182	2.082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang				12 Laporan	83,024,030	Kab. Paser Belengkong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	TU, Jaringan Perkantoran	12 Laporan	86,326,400	Dinas Kesehatan

					Disediakan															
1	0	0	2.		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	<b>41,435,090</b>						100 %	<b>46,435,000</b>		
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	30,685,090	Kab. Paser Belengkong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Kendaraan dinas Kantor	7 Unit	33,685,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10,750,000	Kab. Paser Belengkong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Kendaraan dinas Kantor	15 Unit	12,750,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	<b>546,402,400</b>						100 %	<b>616,020,000</b>		
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	%		%	100 %	<b>3,840,000</b>							100 %	<b>4,020,000</b>	
1	0	0	2.	1	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	3,840,000	Kab. Paser Belengkong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat, Petugas Kesehatan	1 Paket	4,020,000	Dinas Kesehatan	

1	0	2	2	2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan yang tersedia	%	%	100 %	<b>542,562,400</b>					100 %	<b>612,000,000</b>							
1	0	2	2	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	542,562,400	Kab. Paser Belengkong, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat, Masyarakat Miskin, petugas Kesehatan	12 Dokumen	612,000,000	Dinas Kesehatan				
1	0	2	3		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %	100 %	100 %	<b>295,800,000</b>					100 %	<b>325,380,000</b>							
1	0	2	3	2	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Presentase kebutuhan SDM yang direncanakan untuk UKP dan UKM	%	%	100 %	<b>295,800,000</b>					100 %	<b>325,380,000</b>							
1	0	2	3	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			9 Orang	295,800,000	Kab. Paser Belengkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Tenaga Honorer / PTT	9 Orang	325,380,000	Dinas Kesehatan					
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																						
1	0	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>														<b>1,310,600,000</b>					<b>1,441,660,001</b>	
			<b>PROGRAM PENUNJANG</b>																				



1	0	0	0	Urusan Pemerintahan Daerah	urusan pemerintah daerah yang disediakan	%	%	100 %	100,600,343					100 %	110,660,378	
1	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1,000,000	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Puskesmas Kerang	1 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	58,514,166	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Puskesmas Kerang	12 Laporan	64,365,583	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	41,086,177	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Puskesmas Kerang	1 Laporan	45,194,795	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.0	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %	100 %	100 %	837,969,665					100 %	921,766,632	
1	0	0	2.0	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang disediakan	%	%	83 %	29,515,000					83 %	32,466,500	
1	0	0	2.1	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang			2 Paket	29,515,000	Kab. Paser, Batu Engau,	Dana Transfer Umum-Dana	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui	Puskesmas	2 Paket	32,466,500	Dinas Kesehatan

					Disediakan						Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Pemerintahan Yang Partisipatif	Kerang			
1	0	0	2.		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	%	%	100 %	<b>808,454,665</b>					100 %	<b>889,300,132</b>		
1	0	0	2.	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			100 %	7,370,000	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Puskesmas Kerang	100 %	8,107,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			100 Dokumen	801,084,665	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Puskesmas Kerang	100 Dokumen	881,193,132	Dinas Kesehatan
1	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %	100 %	100 %	<b>270,600,000</b>					100 %	<b>297,660,000</b>		
1	0	0	2.		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Presentase kebutuhan SDM yang direncanakan untuk UKP dan UKM	%	%	100 %	<b>270,600,000</b>					100 %	<b>297,660,000</b>		
1	0	0	2.	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			20 %	270,600,000	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Kerang	20 %	297,660,000	Dinas Kesehatan

(Fasyankes)

1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																				
1	0	2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>1,352,506,030</b>								<b>1,531,200,000</b>						
1	0	2	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>232,826,030</b>						72 %	<b>257,600,000</b>						
1	0	2	0	1	2.	0	0	6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya kegiatan adminitrasi umum PD	Persen		Persen	100 Persen	<b>107,423,300</b>			100 Persen	<b>119,000,000</b>					
1	0	2	0	1	2.	0	0	6	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	10,000,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1 Paket	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	2	0	1	2.	0	0	6	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	51,883,300	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	2 Paket	57,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	2	0	1	2.	0	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			132 Laporan	45,540,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	132 Laporan	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	2	0	1	2.	0	0	8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>54,246,540</b>							100 Persen	<b>60,100,000</b>	
1	0	2	0	1	2.	0	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1,000,000	Kab. Paser, Long Kali, Long	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan

											Kali	Umum																	
1	0	0	2.	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan											12 Laporan	53,246,540	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	12 Laporan	59,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya barang milik daerah ueusan pemerintah daerah	Persen		Persen								100 Persen	71,156,190							100 Persen	78,500,000		
1	0	0	2.	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya											3 Unit	21,156,190	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	3 Unit	23,500,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi											1 Unit	50,000,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1 Unit	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %								100 %	946,280,000								100 %	1,045,000,000	
1	0	0	2.	0	01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit		Unit								1 Unit	42,000,000								1 Unit	45,000,000	

1	0	0	2.	1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	42,000,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Unit	45,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Persen		Persen	100 Persen	<b>904,280,000</b>						100 Persen	<b>1,000,000,000</b>	
1	0	0	2.	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				36 Dokumen	904,280,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	36 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	3		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %		100 %	100 %	<b>173,400,000</b>						100 %	<b>228,600,000</b>	
1	0	0	2.	0	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Tersusunnya perencanaan dan kebutuhan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kerja	Persen		Persen	100 Persen	<b>173,400,000</b>						100 Persen	<b>228,600,000</b>	
1	0	0	2.	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				6 Orang	173,400,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6 Orang	228,600,000	Dinas Kesehatan
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														

1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,118,249,361								1,118,249,361	
1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %	70 %	72 %	<b>181,210,000</b>						72 %	<b>181,210,000</b>	
1	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	%	%	100 %	<b>103,739,700</b>						100 %	<b>103,739,700</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4,998,700	Kab. Paser Belengkong Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja Puskesmas Pasir Belengkong	1 Paket	4,998,700	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	7,417,500	Kab. Paser Belengkong Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja Puskesmas Pasir Belengkong	1 Paket	7,417,500	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	32,168,500	Kab. Paser Belengkong Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja Puskesmas Pasir Belengkong	3 Paket	32,168,500	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	8,026,000	Kab. Paser Belengkong Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja Puskesmas Pasir Belengkong	1 Paket	8,026,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	51,129,000	Kab. Paser Belengkong Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja Puskesmas Pasir Belengkong	12 Laporan	51,129,000	Dinas Kesehatan

1	0	0	2.		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	%	%	100 %	<b>41,039,200</b>						100 %	<b>41,039,200</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	500,000	Kab. Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Pasir Belengkong	1 Laporan	500,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	40,539,200	Kab. Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Pasir Belengkong	12 Laporan	40,539,200	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	%	%	100 %	<b>36,431,100</b>						100 %	<b>36,431,100</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	36,431,100	Kab. Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Pasir Belengkong	3 Unit	36,431,100	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %	100 %	100 %	<b>586,639,361</b>						100 %	<b>586,639,361</b>	

1	0	0	2.	0	0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	%	%	100 %	586,639,361					100 %	586,639,361				
1	0	0	2.	0	0	2	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	586,639,361	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Pasir Belengkong	12 Dokumen	586,639,361	Dinas Kesehatan		
1	0	0	2.	0	0	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %	100 %	100 %	350,400,000						100 %	350,400,000			
1	0	0	2.	0	0	2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDM yang direncanakan untuk UKP dan UKM	%	%	100 %	350,400,000							100 %	350,400,000		
1	0	0	2.	0	0	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			11 Orang	350,400,000	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Pasir Belengkong	11 Orang	350,400,000	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										895,226,000							895,226,000			
1	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Pelayanan	80 %	70 %	72 %	273,643,200										72 %	273,643,200	

				KABUPATEN/KOTA	Sekretariat													
1	0	0	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	%		%	100 %	<b>136,109,400</b>						100 %	<b>136,109,400</b>	
1	0	0	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	23,279,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	0	2 Paket	23,279,400	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12,830,000	Kab. Paser, Long Ikis, Long Gelang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	0	12 Laporan	12,830,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Presentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	%		%	100 %	<b>83,354,000</b>						100 %	<b>83,354,000</b>	
1	0	0	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 Unit	73,850,000	Kab. Paser, Long Ikis, Long Gelang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	puskesmas	2 Unit	73,850,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			12 Unit	9,504,000	Kab. Paser, Long Ikis, Long Gelang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	puskesmas	12 Unit	9,504,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang	%		%	100 %	<b>34,407,800</b>						100 %	<b>34,407,800</b>	

						disediakan															
1	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	2,000,000	Kab. Paser, Long Ikis, Long Gelang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	puskesmas	1 Laporan	2,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	62,407,800	Kab. Paser, Long Ikis, Long Gelang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	puskesmas	12 Laporan	62,407,800	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	<b>19,772,000</b>							100 %	<b>19,772,000</b>	
1	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit	19,772,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas	2 Unit	19,772,000	Dinas Kesehatan
1	0	0				<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	<b>369,882,800</b>							100 %	<b>369,882,800</b>	
1	0	0	2.	0		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	%		%	80 %	<b>369,882,800</b>							80 %	<b>369,882,800</b>	



1	0	0	2.		<b>Umum Perangkat Daerah</b>	laporan pengadaan barang dan jasa yang tersusun	%		%	100 %	<b>131,835,021</b>					100 %	<b>0</b>		
1	0	0	2.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,453,600	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan Administ rasi Umum PD	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,960,191	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kegiatan Administ rasi Umum PD	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,313,360	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kegiatan Administ rasi Umum PD	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16,457,870	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kegiatan Administ rasi Umum PD	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				112 Laporan	86,650,000	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kegiatan Administ rasi Umum PD	112 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Presentase dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	%		%	100 %	<b>70,474,569</b>						100 %	<b>0</b>	

					diadakan														
1	0	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	70,474,569	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kegiatan barang milik daerah urusan penunjang pemerintah daerah	13 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%		%	100 %	<b>30,179,692</b>						100 %	<b>0</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20,085,120	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Laporan	10,094,572	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			jasa penunjang urusan pemerintah daerah	21 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	<b>32,233,718</b>						100 %	<b>0</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				3 Unit	32,233,718	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BMD	3 Unit	0	Dinas Kesehatan

					Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
1	0	0			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	<b>546,065,000</b>					100 %	<b>0</b>	
1	0	0	2.		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	%		%	100 %	<b>15,495,000</b>					100 %	<b>0</b>	
1	0	0	2.	01														
1	0	0	2.	01	1	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan			1 Paket	15,495,000	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan yang tersedia	%		80 %	<b>530,570,000</b>					80 %	<b>0</b>	
1	0	0	2.	03		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			100 Dokumen	530,570,000	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Layanan Kesehatan UKM dan UKP	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %		100 %	100 %	<b>118,200,000</b>					100 %	<b>0</b>	
1	0	0	2.	0	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan	%		%	70 %	<b>118,200,000</b>					70 %	<b>0</b>	

			2	untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	kompetensi SDM													
1	0	0	2.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			4 Orang	118,200,000	Kab. Paser, Long Kali, Sebukung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	4 Orang		0	Dinas Kesehatan	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
1	0	2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>1,430,791,002</b>							<b>1,443,891,002</b>	
1	0	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %						72 %	<b>334,770,870</b>		
1	0	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya kegiatan adminitrasi umum PD	%		%	100 %						100 %	<b>226,451,300</b>		
1	0	0	2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,089,850	Kab. Paser, Muara Komam, Muarakom	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai puskesmas muara komam, sarana dan prasarana di lingkungan kerja puskesmas muara komam	1 Paket	11,089,850	Dinas Kesehatan
	0	0	2.	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan						Kab. Paser, Muara	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber	Pegawai puskesmas muara komam, sarana dan pra			Dinas

1	2	1	0	2	Perengkapan Kantor	Perengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	98,371,860	Komam, Muarakom	Dana Lokasi Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	sarana di lingkungan kerja puskesmas muarakom	1 Paket	99,371,860	Kesehatan													
1	2	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								1 Paket	41,889,590	Kab. Paseh Muara Komam, Muarakom	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai puskesmas muarakom, sarana dan prasarana di lingkungan kerja puskesmas muarakom	1 Paket	42,889,590	Dinas Kesehatan		
1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								1 Laporan	72,100,000	Kab. Paseh Muara Komam, Muarakom	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai puskesmas muarakom, sarana dan prasarana di lingkungan kerja puskesmas muarakom	1 Laporan	73,100,000	Dinas Kesehatan		
1	2	1	0	0	2	0	0	1	8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%			%							100 %	<b>59,136,400</b>								100 %	<b>61,236,400</b>	
1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								1 Laporan	700,000	Kab. Paseh Muara Komam, Muarakom	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	sumber daya air listrik dan pembelian materi	1 Laporan	800,000	Dinas Kesehatan		

1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	58,436,400	Kab. Paser, Muara Komam, Muarakom	Dana Transfer Umum-Dana Komunikasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	sumber daya air listrik dan pembelian materai	2 Laporan	60,436,400	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	<b>45,083,170</b>						100 %	<b>47,083,170</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	32,053,170	Kab. Paser, Muara Komam, Muarakom	Dana Transfer Umum-Dana Komunikasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Barang barang yang ada di puskesmas muara komam yang di miliki oleh daerah	1 Unit	33,053,170	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	13,030,000	Kab. Paser, Muara Komam, Muarakom	Dana Transfer Umum-Dana Komunikasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Barang barang yang ada di puskesmas muara komam yang di miliki oleh daerah	1 Unit	14,030,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	<b>796,020,132</b>						100 %	<b>801,020,132</b>	
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan</b>	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan	%		%	100 %	<b>796,020,132</b>						100 %	<b>801,020,132</b>	



1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				5330 Keluarga	4790,000	Kab. Paser, Muara Komam, Muarakom	Dana Transfer Umum-Dana Monev	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	5330 Keluarga	4790,000	Dinas Kesehatan	
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %		100 %	100 %	<b>308,100,000</b>						100 %	<b>308,100,000</b>		
1	02	03	2.02		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Tersusunya perencanaan dan kebutuhan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kerja	%		%	100 %	<b>308,100,000</b>						100 %	<b>308,100,000</b>		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	308,100,000	Kab. Paser, Muara Komam, Muarakom	Dana Transfer Umum-Dana Monev	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Puskesmas Muara Komam	10 Orang	308,100,000	Dinas Kesehatan	
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>02</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>738,486,456</b>								<b>740,816,940</b>	
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>174,474,456</b>						72 %	<b>183,308,940</b>		
1	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	%		%	100 %	<b>85,693,405</b>						100 %	<b>91,448,126</b>		
					Penyediaan	Jumlah Paket							Dana		Peningkatan					

1	0	0	2.	0	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9,348,405	Kab. Paser, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Krayan	4 Paket	9,193,646	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10,450,000	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Krayan	4 Paket	9,769,980	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	65,895,000	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Krayan	30 Laporan	72,484,500	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	%	%	100 %		<b>57,530,901</b>						100 %	<b>56,683,991</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Krayan	1 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42,000,000	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Krayan	12 Laporan	39,600,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	14,530,901	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Puskesmas Krayan	4 Laporan	15,983,991	Dinas Kesehatan

1	0	0	2.	0	0	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	%	%	100 %	31,250,150					100 %	35,176,823		
1	0	0	2.	0	0	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	24,060,150	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Krayan	2 Unit	28,609,823	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	0	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			9 Unit	7,190,000	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Krayan	9 Unit	6,567,000	Dinas Kesehatan
1	0	0						<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %	100 %	100 %	447,062,000						100 %	426,113,000	
1	0	0	2.	0	0	0	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang disediakan	%	%	80 %	40,000,000						80 %	44,000,000	
1	0	0	2.	0	0	0	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan			7 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Krayan	7 Unit	44,000,000	Dinas Kesehatan

						Oleh Puskesmas														
1	0	0	2	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	%	%	100 %	407,062,000					100 %	382,113,000			
1	0	0	2	2	2	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar			6 Dokumen	300,000	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	6 Dokumen	330,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	2	2	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar			620 Orang	13,440,000	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	620 Orang	14,520,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	2	2	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			82 Persen	3,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	82 Persen	3,817,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2	2	2	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			8 Dokumen	10,690,000	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	8 Dokumen	11,759,000	Dinas Kesehatan
							Jumlah							Dana	Meningkatkan Sumber	Peningkatan				



1	0	0	2.0	<b>Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Presentase kebutuhan SDM yang direncanakan untuk UKP dan UKM	%	%	100 %	<b>90,000,000</b>					100 %	<b>99,000,000</b>		
1	0	0	2.0	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			3 Orang	90,000,000	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	PTT (Pegawai Tidak Tetap)	3 Orang	99,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.0	03	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM.	%	%	70 %	<b>26,950,000</b>					70 %	<b>32,395,000</b>	
1	0	0	2.0	03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			5 Orang	26,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	5 Orang	32,395,000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1	0	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>														<b>793,986,134</b>	<b>873,384,857</b>
1	0	0		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %	70 %	72 %	<b>226,652,414</b>					72 %	<b>249,317,765</b>		
1	0	0	2.0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase pemenuhan administrasi umum PD	%	%	100 %	<b>109,493,550</b>					100 %	<b>120,443,015</b>		

1	0	0	2.	0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	3,353,700	Kab. Paser, Kuario, Keluang Paser Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	0	1 Paket	3,689,070	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	4,940,000	Kab. Paser, Kuario, Keluang Paser Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	0	1 Paket	5,434,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	38,320,050	Kab. Paser, Kuario, Keluang Paser Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	0	1 Paket	42,152,055	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10 Laporan	62,879,800	Kab. Paser, Kuario, Keluang Paser Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahtera an Sosial	0	10 Laporan	69,167,890	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	0	07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	%		%	100 %	<b>15,667,404</b>							100 %	<b>17,234,144</b>		
1	0	0	2.	0	0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Unit	15,667,404		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	0	10 Unit	17,234,144	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	0	08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah	%		%	100 %	<b>73,044,000</b>								100 %	<b>80,348,400</b>	

				<b>Daerah</b>	daerah yang disediakan														
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	680,000	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	1 Laporan	748,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2,364,000	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	0	12 Laporan	79,600,400	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	<b>28,447,460</b>						100 %	<b>31,292,206</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	15,687,460	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	3 Unit	17,256,206	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	12,760,000	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	20 Unit	14,036,000	Dinas Kesehatan
1	0	0			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	<b>421,533,720</b>						100 %	<b>463,687,092</b>	

				MASYARAKAT													
1	0	0	2.	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang disediakan	%	%	80 %	<b>9,449,300</b>						80 %	<b>10,394,230</b>	
1	0	0	2. 1	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan			2 Paket	9,449,300	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	2 Paket	10,394,230	Dinas Kesehatan
1	0	0	2. 0	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan yang tersedia	%	%	100 %	<b>412,084,420</b>						100 %	<b>453,292,862</b>	
1	0	0	2. 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			100 Dokumen	412,084,420	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	100 Dokumen	453,292,862	Dinas Kesehatan
1	0	0	3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %	100 %	100 %	<b>145,800,000</b>						100 %	<b>160,380,000</b>	
1	0	0	2.	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Presentase kebutuhan SDM yang direncanakan untuk UKP dan UKM	%	%	100 %	<b>145,800,000</b>						100 %	<b>160,380,000</b>	

1	0	0	2.	0	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				5 Orang	145,800,000	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	0	5 Orang	160,380,000	Dinas Kesehatan		
1						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1	0	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>2,164,890,000</b>								<b>2,381,379,000</b>	
1	0	2	0	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>175,500,000</b>						72 %	<b>193,050,000</b>			
1	0	2	0	0	1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	%		%	100 %	<b>44,360,332</b>						100 %	<b>48,796,365</b>			
1	0	2	0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,725,380	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Petugas Puskesmas, Bahan Pakai Habis	1 Paket	1,897,918	Dinas Kesehatan		
1	0	2	0	0	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	24,680,000	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Petugas Puskesmas, Bahan Pakai Habis	1 Paket	27,148,000	Dinas Kesehatan		
1	0	2	0	0	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,594,952	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Petugas Puskesmas, Bahan Pakai Habis	1 Paket	2,854,447	Dinas Kesehatan		



1	0	0				<b>PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	<b>1,508,790,000</b>					100 %	<b>1,659,669,000</b>		
1	0	0	2.	0	0	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan yang di sediakan	%		%	100 %	<b>1,508,790,000</b>					100 %	<b>1,659,669,000</b>		
1	0	0	2.	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1,508,790,000	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat, Kader Kesehatan, Petugas Kesehatan	3 Dokumen	1,659,669,000	Dinas Kesehatan
1	0	0				<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %		100 %	100 %	<b>480,600,000</b>						100 %	<b>528,660,000</b>	
1	0	0	2.	0	0	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	%		%	100 %	<b>480,600,000</b>						100 %	<b>528,660,000</b>	
1	0	0	2.	0	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				15 Orang	480,600,000	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Tenaga Kontrak/PTT Puskesmas	15 Orang	528,660,000	Dinas Kesehatan

1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	0			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>													<b>0</b>		
1	0	0		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>256,629,250</b>							72 %	<b>0</b>	
1	0	0	2.006	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	Persen		Persen	100 Persen	<b>131,629,250</b>							100 Persen	<b>0</b>	
1	0	0	2.006	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,000,000	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.006	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	44,469,250	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	3 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.006	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,000,000	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.006	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	73,160,000	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	12 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.008		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah	Persen		Persen	100 Persen	<b>25,000,000</b>							100 Persen	<b>0</b>

				<b>Daerah</b>	daerah yang disediakan															
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	75,000,000	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	12 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>50,000,000</b>						100 Persen	<b>0</b>		
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	50,000,000	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	<b>1,098,948,362</b>						100 %	<b>0</b>		
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang disediakan	persen		persen	89 persen	<b>18,870,000</b>							89 persen	<b>0</b>	
1	0	0	2.	1	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket	18,870,000	Kab. Paser, Kuaro, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan	0	2 Paket	0	Dinas Kesehatan	

										Kelurahan		Dan Berdaya Saing	Kesejahteraan Sosial				
1	0	0	2.	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,080,078,362</b>					100 Persen	<b>0</b>	
1	0	0	2.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	1,080,078,362	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	0	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %		100 %	100 %	<b>286,200,000</b>					100 %	<b>0</b>	
1	0	0	2.	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Presentase kebutuhan SDM yang direncanakan untuk UKP dan UKM	Persen		Persen	100 Persen	<b>286,200,000</b>					100 Persen	<b>0</b>	
1	0	0	2.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				9 Orang	286,200,000	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9 Orang	0	Dinas Kesehatan
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>															<b>987,684,900</b>
1	0	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan	80 %		70 %	72 %	<b>174,574,763</b>					72 %	<b>193,139,900</b>	

				<b>N DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Sekretariat													
1	0	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase adminitrasi kepegawaian PD yang tersusun	%		%	100 %	<b>102,731,800</b>						100 %	<b>120,000,000</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	11,725,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyara kat	1 Paket	13,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	21,201,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyara kat	3 Paket	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	11,725,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyara kat	4 Paket	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			125 Laporan	58,080,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyara kat	125 Laporan	65,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	%		%	100 %	<b>31,782,400</b>						100 %	<b>30,952,400</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	940,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyara kat	1 Laporan	110,000	Dinas Kesehatan

1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30,842,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	12 Laporan	30,842,400	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	<b>40,060,563</b>						100 %	<b>42,187,500</b>	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	19,187,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	4 Unit	19,187,500	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	20,873,063		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	22 Unit	23,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	<b>516,825,500</b>						100 %	<b>542,845,000</b>	
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	%		%	86 %	<b>8,160,000</b>						86 %	<b>8,160,000</b>	

1	02	02	2.01	6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				0 Paket	8,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	0 Paket	8,160,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	%	%	100 %		<b>508,665,500</b>						100 %	<b>534,685,000</b>	
1	02	02	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				713 Orang	4,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	713 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	5,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	12 Dokumen	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	5,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	12 Dokumen	2,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				24 Dokumen	5,185,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	24 Dokumen	5,185,000	Dinas Kesehatan
					Operasional	Jumlah Dokumen Operasional							Dana Transfer		Peningkatan Kualitas				



1	0	0	2.	Umum	pemenuhan	%	%	100 %	103,296,95					100 %	0	
2	1	0	0	Perangkat	adminitrasi				6							
6		6		Daerah	umum PD											
1	0	0	2.	Penyediaan	Jumlah Paket			1 Paket	53,969,456	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Aru	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
2	1	0	0	Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan											
6		6	4													
1	0	0	2.	Penyediaan	Jumlah Paket			1 Paket	7,067,500	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Aru	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
2	1	0	0	Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan											
6		6	5													
												Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan				

1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	42,260,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Aru	1 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	%	%	100 %		<b>15,678,040</b>					100 %	<b>0</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,200,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Aru	1 Laporan	0	Dinas Kesehatan

												Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial							
1	0	0	2.	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	14,478,040	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Aru	1 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2.	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	%	%	100 %	35,511,806						100 %	0	
													Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas						

1	0	0	2.	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit	26,095,806	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Aru	2 Unit	0	Dinas Kesehatan
															Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah			

1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	9,416,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Aru	12 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100 %		100 %	100 %	<b>609,741,300</b>					100 %	<b>0</b>	
1	0	0	2.	01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	<b>34,575,000</b>					1 Paket	<b>0</b>	
														Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber				

1	0	0	2.	1	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan					1 Paket	34,575,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Aru	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	%	%	100 %	<b>575,166,300</b>								100 %	<b>0</b>	
																Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan				

1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	575,166,300	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Aru	12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100 %		100 %	100 %	<b>503,700,000</b>						100 %	<b>0</b>	
1	02	03	2.02		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Presentase kebutuhan SDM yang direncanakan untuk UKP dan UKM	%		%	100 %	<b>503,700,000</b>						100 %	<b>0</b>	
															Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang				

1	0	0	2.	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			16 Orang	503,700,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Aru	16 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														

1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				<b>1,353,598,000</b>							<b>1,373,962,020</b>			
1	0	0	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Presentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah	%	%	100 %	<b>193,228,000</b>						100 %	<b>202,712,020</b>		
1	0	0	1	2.006	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase dokumen dan laporan pengadaan barang dan jasa yang tersusun	%	%	100 %	<b>137,172,780</b>						100 %	<b>145,000,000</b>		
1	0	0	1	2.006	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			30 Paket	1,800,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Batu Kajang	30 Paket	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	1	2.006	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			18 Paket	50,072,780	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Batu Kajang	18 Paket	52,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	1	2.006	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			121 Laporan	35,300,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Batu Kajang	121 Laporan	36,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	1	2.008		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	%	100 %	<b>30,943,200</b>						100 %	<b>32,600,000</b>	
1	0	0	1	2.000		Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan			1 Laporan	600,000	Kab. Paser, Batu	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Puskesmas Batu	1 Laporan	600,000	Dinas

2	1	8	1	Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat						Sopang, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Kajang			Kesehatan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	80,343,200	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Batu Kajang	12 Laporan	82,000,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	%		100 %	<b>25,112,020</b>						100 %	<b>25,112,020</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	17,962,020	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Batu Kajang	2 Unit	17,962,020	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			11 Unit	7,150,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Puskesmas Batu Kajang	11 Unit	7,150,000	Dinas Kesehatan
1	0	0	2.	0	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Cakupan Pelayanan UKM dan UKP	%		80 %	<b>873,270,000</b>						80 %	<b>855,350,000</b>	
0	0	2.			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan</b>	Cakupan Layanan Kesehatan				<b>873,270,00</b>							<b>855,350,00</b>	

1	2	2	0	2	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	untuk UKM dan UKP Rujukan	%		%	80 %	0					80 %	0			
1	0	0	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 dokumen	870,270,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Peserta JKN dan Umum	100 dokumen	855,350,000	Dinas Kesehatan	
1	0	0	2	0	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase peningkatan SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi	%		%	100 %	<b>287,100,000</b>					100 %	<b>315,900,000</b>			
1	0	0	2	0	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Dokumen Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	<b>287,100,000</b>					9 Dokumen	<b>315,900,000</b>			
1	0	0	2	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				9 orang	287,100,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Tenaga Kontrak	9 orang	315,900,000	Dinas Kesehatan	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																				
1	0	3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>															<b>123,351,622,880</b>	<b>30,683,703,000</b>	
1	0	3	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>13,618,904,175</b>					72 %	<b>13,893,295,000</b>			

1	0	0	2.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase	%	%	100 %	<b>70,000,000</b>						100 %	<b>145,000,000</b>	
1	0	0	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	10,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	ASN dan Non ASN	5 Dokumen	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	0	0	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5 Dokumen	10,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	ASN dan Non ASN	5 Dokumen	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	0	0	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			5 Dokumen	10,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	ASN dan Non ASN	5 Dokumen	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	0	0	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			5 Dokumen	10,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	ASN dan Non ASN	5 Dokumen	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Kab. Paser,	Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Penguatan Layanan				Dinas

1	031	02015	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	10,000,000	Tanah Grogot, Tepian Batang	Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	ASN dan Non ASN	5 Dokumen	25,000,000	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	031	02016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	10,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	ASN dan Non ASN	5 Laporan	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	031	02017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	10,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	ASN dan Non ASN	5 Laporan	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	031	0202	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase	%	%	100 %		<b>8,994,795,000</b>						100 %	<b>9,081,295,000</b>	
1	031	0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	8,443,548,360	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Non ASN	56 Orang/bulan	8,462,295,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		2.	Penyediaan	Jumlah Dokumen Hasil						Kab. Paser, Tanah	Dana Transfer	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Penguatan Layanan Infrastruktur				Dinas

1	031022	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	532,500,000	Grogot, Tepian Batang	Umum-Dana Bagi Hasil	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	ASN dan Non ASN	5 Dokumen	600,000,000	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	031024	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	18,746,640	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	ASN dan Non ASN	12 Dokumen	19,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	031033	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase	%	%	100 %		<b>10,000,000</b>						100 %	<b>15,000,000</b>	
1	031035	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	10,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	ASN dan Non ASN	5 Laporan	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	031035	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen		<b>10,000,000</b>						1 Dokumen	<b>12,000,000</b>	
1	031035	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	10,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	ASN dan Non ASN	5 Dokumen	12,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	031036	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase	%	%	100 %		<b>265,000,000</b>						100 %	<b>280,000,000</b>	
		2.	Penyediaan	Jumlah Paket Bahan						Dana Transfer	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Penguatan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan			Dinas

1	031064	Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket	50,000,000		Umum-Dana Bagi Hasil	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	n dan kinerja Organisasi yang akuntabel	0 Paket	60,000,000	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	031065	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					56442 Paket	5,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja Organisasi yang akuntabel	56442 Paket	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	031069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja Organisasi yang akuntabel	0 Laporan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03107	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase	%		%	100 %		<b>139,109,175</b>						100 %	<b>200,000,000</b>	
1	031076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit	139,109,175	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja Organisasi yang akuntabel	10 Unit	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03108	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase	%		%	100 %		<b>4,000,000,000</b>						100 %	<b>4,000,000,000</b>	
													Meningk				

1	0310802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	4,000,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	atnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja Organisasi yang akuntabel	12 Laporan	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03109	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase	%		%	100 %		<b>130,000,000</b>						100 %	<b>160,000,000</b>	
1	0310902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit	120,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	ASN dan Non ASN	7 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	0310906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	10,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	ASN dan Non ASN	10 Unit	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	032	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	persentase kawasan sumber daya air yang dikelola dengan baik	50 %		20 %	30 %		<b>76,459,800,000</b>						30 %	<b>511,800,000</b>	
1	03201	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1</b>	Persentase	%		%	100 %		<b>19,836,800,000</b>						100 %	<b>286,800,000</b>	

				(Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun					1 Dokumen	286,800,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	286,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun					4 Unit	200,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	4 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun					2 Unit	1,750,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	2 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
1	03	02	2.01	06	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi					1 KM	17,600,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
1	03	02	2.00	2	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah</b>	Persentase	%		%		100 %	<b>56,623,000,000</b>							100 %	<b>225,000,000</b>	

				Kabupaten/Kota														
1	032	202	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	225,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	032	202	04	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0 KM	50,473,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	0 KM		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	032	202	07	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi				2 KM	6,000,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	2 KM		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	033			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	persentase capaian akses air minum layak	100 %		70 %	81 %	<b>11,039,250,130</b>						81 %	<b>250,000,000</b>	
1	033	201		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase	%		%	100 %	<b>11,039,250,130</b>						100 %	<b>250,000,000</b>	
1	033	201	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan				100 SR	1,550,250,130	Kab. Paser, Batu Sopang,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas	Masyarakat	100 SR		Dinas Pekerjaan Umum dan



1	3	5			<b>PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	air limbah domestik yang layak	90 %			63 %	78 %	<b>25,000,000</b>						78 %	<b>0</b>	
1	0	0	2.		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dukungan terhadap kelancaran Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dalam Daerah	%			%	0 %	<b>25,000,000</b>						0 %	<b>0</b>	
1	0	0	2.	0	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman					0 Rumah Tangga	25,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	0 Rumah Tangga	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi dengan baik	85 %			67 %	73 %	<b>2,965,508,576</b>						73 %	<b>543,000,000</b>	
1	0	0	2.		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase	%			%	100 %	<b>2,965,508,576</b>						100 %	<b>543,000,000</b>	
1	0	0	2.	0	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi					0 M	547,508,576	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	0 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Panjang							Kab.	Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk	Penguatan				

1	03	06	2.01	2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun					100 M	1,000,000,000	Paser, Kuaro, Klempano Sari	Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	100 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2.01	3	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan					200 M	1,418,000,000	Kab. Paser Belengkong Sunge Batu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	200 M	543,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik	90 %		81 %	84 %		<b>2,582,559,999</b>						84 %	<b>246,120,000</b>	
1	03	08	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Persentase	%		%	100 %		<b>2,582,559,999</b>						100 %	<b>246,120,000</b>	
1	03	08	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					20 Dokumen	2,582,559,999	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	20 Dokumen	246,120,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01			<b>PROGRAM PENYELENGGA</b>	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	70 % 95 %		39 % 71 %	58 % 80 %		<b>15,210,800,000</b>						58 % 80 %	<b>10,989,488,000</b>	

				<b>RAAN JALAN</b>	persentase jembatan dalam kondisi baik													
1	030	101	2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase	%		%	100 %	<b>15,210,800,000</b>						100 %	<b>10,989,488,000</b>	
1	030	101	2.011	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				350 Dokumen	486,720,000	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	350 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	030	101	2.018	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				20 KM	7,981,160,000	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	20 KM	3,939,276,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	030	101	2.019	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1 KM	772,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 KM	850,212,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	030	101	2.011	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				25 KM	2,500,000,000	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	25 KM	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1	03	01	2.01	2	1	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun					100 M	1,470,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	100 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.01	9	1	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin					100 M	2,000,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	100 M	2,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	91 %		55 %	68 %		<b>440,400,000</b>						68 %	<b>2,000,000,000</b>	
1	03	01	2.01			<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Persentase	%		%	100 %		<b>257,600,000</b>						100 %	<b>1,000,000,000</b>	
1	03	01	2.01	4	0	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan					100 Orang	207,600,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	100 Orang	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.01	6	0	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi					200 Orang	50,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	200 Orang	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1	031	2.02	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase	%	%	100 %	<b>77,600,000</b>						100 %	<b>500,000,000</b>	
1	031	2.021	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi			1 Laporan	77,600,000	Kab. Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	1 Laporan	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	031	2.04	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	Persentase	%	%	100 %	<b>105,200,000</b>						100 %	<b>500,000,000</b>	
1	031	2.043	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			40 Laporan	105,200,000	Kab. Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	40 Laporan	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	032		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang	78.91 %	47.5 %	59.18 %	<b>984,400,000</b>						59.18 %	<b>2,250,000,000</b>	
1	032	2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Persentase	%	%	100 %	<b>495,100,000</b>						100 %	<b>1,200,000,000</b>	
1	032	2.011	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			1 Dokumen	495,100,000	Kab. Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1	032012	2.012	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	200,000,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	2 Dokumen	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	0322	2.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase	%	%	100 %		<b>173,000,000</b>						100 %	<b>500,000,000</b>	
1	0322	2.021	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	53,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	0322	2.022	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	0323	2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase	%	%	100 %		<b>191,300,000</b>						100 %	<b>350,000,000</b>	
1	0323	2.031	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan				1 Dokumen	156,300,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

					Daerah																	
1	0	1	2	0	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang			1 Dokumen	15,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
1	0	1	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	%	%	100 %	125,000,000						100 %	200,000,000					
1	0	1	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			15 Rapat	125,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	15 Rapat	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																1,799,224,660			1,700,000,000	
1	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %	70 %	72 %	1,799,224,660						72 %	1,700,000,000					
1	0	0	1	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	%	%	100 %	1,799,224,660						100 %	1,700,000,000					
1	0	0	1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6 Unit	1,799,224,660	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	6 Unit	1,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				47,359,828,580							10,373,336,580			
1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	7,878,745,422					72 %	7,908,745,422		
1	0	0	2.		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	Persen		Persen	100 Persen	156,135,880					100 Persen	156,135,880		
1	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah				3 Dokumen	56,997,600	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3 Dokumen	56,997,600	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi								Memperkuat Infrastruktur	Penguatan				

1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7,172,440	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Laporan	7,172,440	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	71,965,840	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	5 Laporan	71,965,840	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Predikat Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	Nilai		Nilai	70 Nilai	<b>6,870,455,000</b>						70 Nilai	<b>6,900,455,000</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 orang/bulan	6,120,455,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	39 orang/bulan	6,120,455,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	750,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Dokumen	780,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	<b>576,870,800</b>						100 Persen	<b>576,870,800</b>	
														Memperkuat					

1	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	4,020,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	11 Paket	4,020,500	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	180,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	15 Paket	180,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	140,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	35 Paket	140,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				60 Paket	18,256,700	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	60 Paket	18,256,700	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				531 Dokumen	4,593,600	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	531 Dokumen	4,593,600	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Penyelenggaraan	Jumlah Laporan						Kab. Paser,	Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Penguatan Layanan	Aparatur			Dinas Perumahan

1	0	0	2.	0	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	230,000,000	Tanah Grogot, Tanah Grogot	Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sipil Negara (ASN)	40 Laporan	230,000,000	Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase penunjang administrasi perkantoran yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	<b>159,368,742</b>						100 Persen	<b>159,368,742</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,450,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Laporan	1,450,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	157,918,742	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Laporan	157,918,742	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>115,915,000</b>						100 Persen	<b>115,915,000</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	104,200,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	6 Unit	104,200,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
														Memperkuat					

1	04106	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	11,715,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN)	25 Unit	11,715,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	042		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100 %		8.44 %	47.40 %	<b>1,050,400,000</b>						47.40 %	<b>1,050,400,000</b>	
1	042	2.01	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>395,000,000</b>						1 Dokumen	<b>395,000,000</b>	
1	042	2.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	042	2.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	95,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	95,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	00	2.	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban</b>	Jumlah Rumah Korban	Unit		Unit	12 Unit	<b>622,400,00</b>						12 Unit	<b>622,400,00</b>	



1	0	0	2.	<b>Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang disusun	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	116,850,000					1 Dokumen	116,850,000		
1	0	0	2.	Penyusunan/Revisi/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			1 Dokumen	116,850,000	Kab. Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	116,850,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	Hektar	Hektar	33.68 Hektar	5,758,536,576					33.68 Hektar	313,520,000		
1	0	0	2.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			200 Unit	550,000,000	Kab. Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	200 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0	2.	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar			33.7 Ha	5,208,536,576	Kab. Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	33.7 Ha	213,520,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0	0		<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	94.10 %	89.26 %	91.20 %	1,913,200,000					91.20 %	413,200,000		
	0	0	2.	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan</b>	Persentase Rumah Tidak layak huni yang	Persen	Persen	8.26 Persen	1,913,200,000					8.26 Persen	413,200,000		



2	1	0	2.	<b>Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Mediasi Sengketa Pertanahan yang tertangani	Kasus		Kasus	3 Kasus	<b>249,650,000</b>					3 Kasus	<b>249,650,000</b>		
2	1	0	2.0	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara dan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	52,500,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	52,500,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	1	0	2.0	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	197,150,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	3 Berita Acara	197,150,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	1	0		<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %		33.33 %	55.56 %	<b>497,000,000</b>						55.56 %	<b>497,000,000</b>	
2	1	0	2.0	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lokasi Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan Tanah	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	<b>497,000,000</b>						2 Lokasi	<b>497,000,000</b>	
2	1	0	2.0	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				1 Dokumen	47,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	47,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2 Dokumen	450,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	2 Dokumen	450,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	1	0	7		<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	Persentase proses penetapan tanah ulayat	100 %		30 %	60 %		<b>85,000,000</b>						60 %	<b>85,000,000</b>	
2	1	0	7	2.	<b>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penetapan tanah ulayat yang dilaksanakan	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi		<b>85,000,000</b>						1 Lokasi	<b>85,000,000</b>	
2	1	0	7	2.	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota				1 Dokumen		85,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	1	0	1	0	<b>PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH</b>	Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	100 %		NA %	30 %		<b>76,000,000</b>						30 %	<b>76,000,000</b>	
2	1	0	1	2.	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi		<b>76,000,000</b>						2 Lokasi	<b>76,000,000</b>	
					Koordinasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan							Kab. Pasuruan	Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Penguatan Layanan				Dinas Perumahan

210012				Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	76,000,000	Semua Kecamatan	Transfer Dana Bagi Hasil	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	76,000,000	Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
105				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							13,916,222,136								13,887,962,136	
1051				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	%	%	60 %		10,928,282,040							60 %	10,900,022,040		
1051			2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	%	95 %		72,056,000							95 %	43,796,000		
1051			2.011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 Dokumen		40,656,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP (ASN & NON ASN)		8 Dokumen	40,656,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1051			2.017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Laporan		31,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP (ASN & NON ASN)		12 Laporan	3,140,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1051			2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Laporan Keuangan yang Akuntabel	Laporan	Laporan	24 Laporan		10,445,869,040							24 Laporan	10,445,869,040		
					Jumlah Orang yang						Semua Kab/Kota	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Anggota				Satuan	

1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				87 Orang	10,346,869,040	Semua Kecamatan	Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Satpol PP ASN & Non ASN	87 Orang	10,346,869,040	Polisi Pamong Praja
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	9,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP ASN & Non ASN	12 Dokumen	9,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	0	0	2	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Anggota Satpol Yang Terlayani	Orang		Orang	170 Orang	10,000,000						170 Orang	10,000,000	
1	0	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP (ASN & Non ASN)	10 Orang	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	0	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP (ASN & Non ASN)	10 Orang	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	0	0	2	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	75 Laporan	178,700,110						75 Laporan	178,700,110	
1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	62,194,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP ASN dan Non ASN	4 Paket	62,194,500	Satuan Polisi Pamong Praja
														Memperkuat	Peningkatan				

1	0	0	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	6,801,140	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP ASN dan Non ASN	5 Paket	6,801,140	Satuan Polisi Pamong Praja
1	0	0	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	54,004,470	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP ASN dan Non ASN	40 Paket	54,004,470	Satuan Polisi Pamong Praja
1	0	0	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP ASN dan Non ASN	12 Paket	6,150,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	0	0	2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP ASN dan Non ASN	12 Dokumen	2,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	0	0	2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	47,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP ASN dan Non ASN	10 Laporan	47,050,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	0	0	2.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan atas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan		48 Laporan	<b>80,709,000</b>						48 Laporan	<b>80,709,000</b>	
1	0	0	2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Benda/Jasa Surat				12 Laporan	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Anggota Satpol PP (ASN & Non ASN)	12 Laporan	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

					Menyurat																			
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								36 Laporan	79,709,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP (ASN & Non ASN)	36 Laporan	79,709,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit Kendaraan dan Mesin Yang Dipelihara	Unit			Unit	9 Unit				<b>140,947,890</b>							9 Unit	<b>140,947,890</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					8 Unit			132,707,890	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	1. Anggota Satpol PP (ASN & Non ASN) 2. Masyarakat Kabupaten Paser	8 Unit	132,707,890	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4 Unit			8,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	1. Anggota Satpol PP (ASN & Non ASN) 2. Masyarakat Kabupaten Paser	4 Unit	8,240,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase demonstrasi anarkis Persentase Demonstrasi Anarkis Persentase penurunan pelanggaran perda Persentase	0 % % 70 % %		0 % % 50 % %	0 % 55 % 55 % 55 %				<b>2,987,940,096</b>							0 % 55 % 55 % 55 %	<b>2,987,940,096</b>		

					Penurunan Pelanggaran Perda														
1	0	0	2.	01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan/Dokumen Penegakan PERDA dan PERKADA Kabupaten/Kota													
						Persentase Anggota Satpol PP dan Linmas yang Terlatih													
						Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	Dokumen	123 Dokumen								123 Dokumen		
						Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda / Perkada yang ditindaklanjuti	%	%	80 %	503,380,096							80 %	503,380,096	
						Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda / Perkada yang ditindaklanjuti	%	%	50 %								50 %		
						Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda / Perkada yang ditindaklanjuti	%	%	80 %								80 %		
1	0	0	2.	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan													
						Jumlah Kegiatan Pengamanan Pejabat Pemda, Provinsi dan													
						Jumlah Kegiatan Pengamanan Pejabat Pemda, Provinsi dan													
						Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			20 Kasus	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kabupaten Paser		20 Kasus	70,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Kegiatan Pengamanan Pejabat Pemda, Provinsi dan			45 Kegiatan							45 Kegiatan			



1	052015	2.015	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	HUT Satpol PP & Linmas Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan Persentase Peserta Pelatihan Dalmas				1 Kegiatan 1758 Orang	100 % 180,000,000 100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kabupaten Paser	1 Kegiatan 1758 Orang	100 % 180,000,000 100 % 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
1	052016	2.016	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan			8 Dokumen	48,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kabupaten Paser	8 Dokumen	48,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	052017	2.017	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia			11 Kegiatan 15 Unit	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kabupaten Paser	11 Kegiatan 15 Unit	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	

1	0	0	2.	0	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				2 Dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kabupaten Paser	2 Dokumen	4,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	0	0	2.	0	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kabupaten Paser	2 Laporan	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	0	0	2.	0	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Jumlah laporan Kegiatan Pengawasan, Sosialisasi dan Penanganan Atas Pelanggaran PERDA dan PERKADA Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	83 Laporan		<b>2,464,560,000</b>						83 Laporan	<b>2,464,560,000</b>	
1	0	0	2.	0	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				5 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP & Masyarakat Kabupaten Paser	5 Laporan	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	0	0	2.	0	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali				48 Laporan	2,306,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP & Masyarakat Kabupaten Paser	48 Laporan	2,306,560,000	Satuan Polisi Pamong Praja

					Kota																								
1	0	0	2.	0	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	30 Laporan	38,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP & Masyarakat Kabupat en Paser	30 Laporan	38,000,000			Satuan Polisi Pamong Praja										
1	0	0	2.	0	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	Rasio Jumlah PPNS terhadap Kasus yang ditangani	%	0.42 %	<b>20,000,000</b>						0.42 %	<b>20,000,000</b>													
1	0	0	2.	0	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	5 Laporan	20,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Satpol PP (ASN Satpol PP)	5 Laporan	20,000,000			Satuan Polisi Pamong Praja										
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																												
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																	<b>8,630,562,275</b>								<b>9,131,140,631</b>		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																	<b>7,026,940,664</b>								<b>7,404,310,803</b>	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.</b>	<b>0</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>														<b>21,210,049</b>	<b>35,000,000</b>									

				<b>Perangkat Daerah</b>															
1	051	001	2.01	011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	10,192,224	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif		6 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	051	001	2.01	017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	11,017,825	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif		3 Laporan	20,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	051	002	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Temuan Yang Ditindak Lanjuti	persen		persen	100 persen	6,415,514,640						100 persen	6,577,310,803	
1	051	002	2.02	011	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	6,368,480,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Dinas Pemadam Kebakaran	48 Orang/bulan	6,500,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
						Jumlah Dokumen							Dana	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas	Dinas			

1	051	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				15 Dokumen	47,034,140		Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemadam Kebakaran	15 Dokumen	77,310,803	Dinas Pemadam Kebakaran
1	051	206		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>131,409,400</b>							<b>220,000,000</b>	
1	051	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				29 Paket	25,450,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif		29 Paket	50,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	051	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10,150,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif		12 Paket	20,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	051	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	95,809,400	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		7 Laporan	150,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran

											Dana Bagi Hasil		Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif						
1	0	0	2.		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi	persen		persen	100 persen	<b>51,074,800</b>					100 persen	<b>72,000,000</b>		
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,015,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Dinas Pemadam Kebakaran	1 Laporan	2,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50,059,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Dinas Pemadam Kebakaran	1 Laporan	70,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran	
1	0	0	2.		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	persen		persen	100 persen	<b>407,731,775</b>					100 persen	<b>500,000,000</b>		
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara				19 Unit	407,731,775		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Dinas Pemadam Kebakaran	19 Unit	500,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran

				Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Publik	n Yang Partisipatif				
1	0	0	4	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Cakupan layanan kebakaran kabupaten	70 %	10 %	40 %	1,603,621,611					40 %	1,726,829,828	
1	0	0	2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Yang ditangani	persen	persen	40 persen	1,407,456,000					40 persen	1,501,239,318	
1	0	0	2.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			12 Dokumen	1,276,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kabupaten Paser	12 Dokumen	1,316,674,918	Dinas Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung			2 Dokumen	100,450,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kabupaten Paser	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran

				Diri	Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal						Dana Alokasi Umum		Partisipatif				
1	054	0017	2.0	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			17 Orang	30,056,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kabupaten Paser	17 Orang	34,564,400	Dinas Pemadam Kebakaran
1	054	002	2.0	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>					<b>80,000,000</b>							<b>92,000,000</b>	
1	054	0021	2.0	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran			20 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif		20 Dokumen	25,750,000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	054	0022	2.0	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelayakan standart sarana dan prasarana proteksi kebakaran			48 dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif		48 dokumen	25,250,000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	054	004	2.0	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>					<b>89,165,611</b>							<b>102,540,510</b>	
											Dana		Peningkatan Kualitas Pelayanan				

1	0	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya				125 Orang	40,000,000		Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	125 Orang	46,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.	0	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				10 Desa/Kelurahan	44,165,611		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	10 Desa/Kelurahan	44,290,510	Dinas Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.	0	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar				3 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	3 Dokumen	17,250,000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	0	0	2.	0	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>						<b>27,000,000</b>					<b>31,050,000</b>	

1	0	0	2.	0	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				2 Laporan	27,000,000			Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif		2 Laporan	31,050,000	Dinas Pemadam Kebakaran	
1	0	0	5	0	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1	0	0	5	0	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							7,392,146,202								155,000,000	
1	0	0	5	0	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	5,680,026,202							72 %	0		
1	0	0	5	0	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen yang tersusun	dokumen		dokumen	5 dokumen	12,000,000							5 dokumen	0		
1	0	0	5	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	6,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur dilingkungan BPBD Kab.Paser		16 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	0	0	5	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 Laporan	6,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur dilingkungan BPBD Kab.Paser		17 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

1	0	0	2.	0	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	bulan	bulan	14 bulan	5,407,553,606					14 bulan	0		
1	0	0	2.	0	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	5,244,339,126	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur dilingkungan BPBD Kab. Paser	14 Orang/bulan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0	0	2.	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	163,214,480	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur dilingkungan BPBD Kab. Paser	12 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0	0	2.	0	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dilayani Administrasi Umum	persen	persen	100 persen	78,960,000						100 persen	0	
1	0	0	2.	0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	42,600,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur dilingkungan BPBD Kab.Paser	12 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0	0	2.	0	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	3,600,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur dilingkungan BPBD Kab.Paser	12 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0	0	2.	0	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			24 Dokumen	2,760,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur dilingkungan BPBD Kab.Paser	24 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0	0	2.	0	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi			12 Laporan	80,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot,	Dana Transfer Umum-		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas	Aparatur dilingkungan	12 Laporan	0	Badan Penanggulangan

	5	1	6	9	dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD						Tanah Grogot	Dana Bagi Hasil		Pengelolaan Lingkungan Hidup	BPBD Kab.Paser			Bencana Daerah	
1	0	0	2.		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengadministrasian umum Berjalan Baik	persen		persen	100 persen	<b>87,576,163</b>							100 persen	<b>0</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	500,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur dilingkungan BPBD Kab. Paser		50 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	87,076,163	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur dilingkungan BPBD Kab. Paser		12 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0	0	2.		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berjalan Baik	persen		persen	100 persen	<b>93,936,433</b>							100 persen	<b>0</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	76,500,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur dilingkungan BPBD Kab. Paser		11 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				11 Unit	15,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur dilingkungan BPBD Kab. Paser		11 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

				Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya														
1	0	0	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			21 Unit	2,436,433	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur di lingkungan BPBD Kab. Paser	21 Unit		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	0	0		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	cakupan layanan penanggulangan bencana	100 %		100 %	100 %						100 %	<b>155,000,000</b>			
1	0	0	2.	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang di legalisasi Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang di legalisasi	dokumen dokumen		dokumen dokumen	1 dokumen 1 dokumen						1 dokumen 1 dokumen		<b>155,000,000</b>		
1	0	0	2.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi			1 Dokumen	150,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat di daerah rawan bencana	1 Dokumen		155,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	0	0	2.	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif	persen		persen	100 persen						100 persen		<b>0</b>		
1	0	0	2.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan			15 Dokumen	215,800,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat di daerah rawan bencana	15 Dokumen			0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

					Bencana														
1	0	0	2.	0	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				70 Orang	27,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat di daerah rawan bencana	70 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0	0	2.	0	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana, dan Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	persen		persen	100 persen	<b>1,109,800,000</b>						100 persen	<b>0</b>	
1	0	0	2.	0	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 Dokumen	823,800,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat terkena bencana		12 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0	0	2.	0	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				419 Orang	286,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat terkena bencana		419 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	0	0	2.	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Persentase layanan informasi Rawan Bencana	persen		persen	100 persen	209,520,000						100 persen	0	
1	0	0	2.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				1 Dokumen	209,520,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat di Daerah Rawan Bencana	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
1	0	6		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>							7,934,912,166							8,736,303,774
1	0	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	6,266,770,554						72 %	6,901,447,609	
1	0	0	2.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	%		%	100 %	157,562,300						100 %	181,318,530	
1	0	0	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	57,480,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	3 Dokumen	57,228,990	Dinas Sosial
				Koordinasi dan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan						Kab. Paser Semua	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas Sumber	Pegawai			

1	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	11,020,900	Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	2 Dokumen	12,122,990	Dinas Sosial
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen	6,020,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	2 Dokumen	6,622,990	Dinas Sosial
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen	4,020,900	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	2 Dokumen	4,422,990	Dinas Sosial
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	5,020,900	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	1 Dokumen	5,522,990	Dinas Sosial
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar					2 Laporan	30,076,900	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	2 Laporan	33,084,590	Dinas Sosial

						Realisasi Kinerja SKPD												
1	0	0	2.	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	43,920,900	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	3 Laporan	56,312,990	Dinas Sosial	
1	0	0	2.	0	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	%	%	100 %	<b>5,268,202,700</b>				100 %	<b>5,795,022,970</b>		
1	0	0	2.	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	5,184,447,700	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	33 Orang/bulan	5,702,892,470	Dinas Sosial	
1	0	0	2.	0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	20,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Sosial	
1	0	0	2.	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	42,749,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	1 Laporan	47,023,900	Dinas Sosial	
1	0	0	2.	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	1 Laporan	21,006,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	1 Laporan	23,106,600	Dinas Sosial	

				SKPD	SKPD							saing	an Sosial					
1	0	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani	%		%	100 %	<b>366,720,350</b>					100 %	<b>403,392,385</b>		
1	0	0	2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,647,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	1 Paket	1,811,700	Dinas Sosial
1	0	0	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	40,464,800	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	4 Paket	44,511,280	Dinas Sosial
1	0	0	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	36,780,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	2 Paket	40,458,000	Dinas Sosial
1	0	0	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17,731,400	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	1 Paket	19,504,540	Dinas Sosial
1	0	0	2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	270,097,150	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	1 Laporan	297,106,865	Dinas Sosial
1	0	0	2.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	%		%	100 %	<b>396,690,004</b>					100 %	<b>436,359,004</b>		

			8	<b>Pemerintahan Daerah</b>	Perkantoran yang terpenuhi														
1	0	0	2.008		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	1 Laporan	2,200,000	Dinas Sosial
1	0	0	2.008		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	32,408,020	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	1 Laporan	35,648,822	Dinas Sosial
1	0	0	2.008		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	862,281,984	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	1 Laporan	898,510,182	Dinas Sosial
1	0	0	2.009	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	%	100 %	<b>77,595,200</b>								100 %	<b>85,354,720</b>	
1	0	0	2.009		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	68,395,200	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Dinas Sosial	7 Unit	75,234,720	Dinas Sosial
	0	0	2.0		Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				8 Unit		Kab. Paser Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber	Pegawai	8 Unit		

1	6	1	0	6	Peralatan dan Mesin Lainnya	yang Dipelihara					9,200,000	Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial		10,120,000	Dinas Sosial
1	6	0	0		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	100 %		100 %	100 %	<b>288,423,540</b>						100 %	<b>317,265,894</b>	
1	6	0	0	2.01	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	Persentase komunitas adat terpencil yang mendapatkan pemberdayaan dan bimbingan	%		%	100 %	<b>91,361,250</b>						100 %	<b>100,497,375</b>	
1	6	0	0	2.011	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Keluarga	71,830,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	8 Keluarga	79,013,000	Dinas Sosial
1	6	0	0	2.012	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Keluarga	19,531,250	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	30 Keluarga	21,484,375	Dinas Sosial
1	6	0	0	2.02	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penerbitan izin undian gratis dan pengumpulan sumbangan	%		%	100 %	<b>45,027,380</b>						100 %	<b>49,530,118</b>	
1	6	0	0	2.021	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan				4 Dokumen	45,027,380	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	BUMN, BUMD, Pelaku Usaha dan Yayasan	4 Dokumen	49,530,118	Dinas Sosial

					Uang atau Barang														
1	0	0	2.		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan	%		%	100 %	<b>152,034,910</b>					100 %	<b>167,238,401</b>		
1	0	0	2.	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	30,318,320	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	PSKS	10 Orang	33,350,152	Dinas Sosial
1	0	0	2.	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	74,525,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	PSKS	10 Orang	81,977,500	Dinas Sosial
1	0	0	2.	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	47,191,590	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	PSKS	10 Lembaga	51,910,749	Dinas Sosial
1	0	0	4		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	100 %		100 %	100 %	<b>404,295,350</b>						100 %	<b>444,724,885</b>	
1	0	0	2.	0	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang	%		%	100 %	<b>227,822,350</b>						100 %	<b>250,604,585</b>	

					<b>Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya											
1	06	04	201	01	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	14,408,400	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	40 Orang	15,849,240	Dinas Sosial	
1	06	04	201	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	91,492,550	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	34 Orang	100,641,805	Dinas Sosial	
1	06	04	201	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	33,997,500	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	15 Orang	37,397,250	Dinas Sosial	
					Pemberian	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada							Penyandang Disabilit				

1	06	04	2.01	06	Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota				10 Orang	17,923,900	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	as Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	10 Orang	19,716,290	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	7,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	500 Orang	7,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	%	100 %		<b>176,473,000</b>						100 %	<b>194,120,300</b>	
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	19,002,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	PMKS Bukan Korban HIV/AIDS	5 Orang	20,902,200	Dinas Sosial
						Jumlah Orang yang						Kab. Paser,	Dana	Meningkatkan Sumber	Peningkatan Kualitas				

1	06	04	2.02	1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					18 Orang	25,367,000	Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	PMKS Bukan Korban HIV/AIDS	18 Orang	27,903,700	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					18 Orang	19,152,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	PMKS Bukan Korban HIV/AIDS	18 Orang	21,067,200	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	1	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					15 Orang	102,450,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	PMKS Bukan Korban HIV/AIDS	15 Orang	112,695,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	1	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					1 Dokumen	10,502,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	PMKS Bukan Korban HIV/AIDS	1 Dokumen	11,552,200	Dinas Sosial
1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100 %		100 %	100 %		<b>545,758,066</b>						100 %	<b>600,334,263</b>	
1	06	05	2.01		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	Persentase anak-anak terlantar yang dipelihara	%		%	100 %		<b>150,951,500</b>						100 %	<b>166,046,650</b>	
1	06	05	2.01	0	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota					5 Orang	39,821,500	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Anak-anak terlantar	5 Orang	43,803,650	Dinas Sosial

1	065012	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	71,920,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Anak-anak terlantar	5 Orang	79,112,000	Dinas Sosial
1	065013	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	39,210,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Anak-anak terlantar	5 Orang	43,131,000	Dinas Sosial
1	06502	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase data fakir miskin yang dikelola	%	%	100 %	<b>394,806,566</b>				100 %	<b>434,287,613</b>	
1	065021	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	6300 Orang	69,312,059	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Miskin	6300 Orang	69,343,655	Dinas Sosial
1	065022	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	22,444,648	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Miskin	1500 Keluarga	22,459,113	Dinas Sosial
1	065023	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga	11,349,859	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Miskin	5 Keluarga	12,484,845	Dinas Sosial
1	066	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Cakupan layanan penanganan bencana	100 %	100 %	100 %	<b>334,065,420</b>				100 %	<b>367,371,963</b>	

1	06	06	2.01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan	%	%	100 %	<b>227,174,935</b>					100 %	<b>249,892,429</b>		
1	06	06	2.011		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat ( pengungsian ) kewenangan Kabupaten/Kota			200 Orang	91,011,760	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat yang terkena bencana	200 Orang	100,112,936	Dinas Sosial
1	06	06	2.012		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			40 Orang	98,509,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat yang terkena bencana	40 Orang	108,359,900	Dinas Sosial
1	06	06	2.014		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			25 Orang	37,654,175	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat yang terkena bencana	25 Orang	41,419,593	Dinas Sosial
1	06	06	2.02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana	%	%	100 %	<b>106,890,485</b>					100 %	<b>117,479,534</b>		
						Jumlah Kampung yang							Meningkatka	Peningkatan				

1	0	0	2.	0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	48,147,485	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	1 Kampung	2,862,234	Dinas Sosial
1	0	0	2.	0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	58,743,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	30 Orang	64,617,300	Dinas Sosial
1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	TMP dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	<b>95,599,236</b>						100 %	<b>105,159,160</b>	
1	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	%		%	100 %	<b>95,599,236</b>						100 %	<b>105,159,160</b>	
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				12 Makam	95,599,236	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Makam Pahlawan	12 Makam	105,159,160	Dinas Sosial
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						<b>697,534,360</b>							<b>767,165,360</b>	
1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>81,024,360</b>						72 %	<b>90,324,360</b>	
1	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani	%		%	100 %	<b>27,000,000</b>						100 %	<b>31,300,000</b>	

1	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahtera an Sosial	Pegawai UPTD Pelkesso s	1 Paket	3,300,000	Dinas Sosial
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	24,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahtera an Sosial	Pegawai UPTD Pelkesso s	1 Paket	28,000,000	Dinas Sosial
1	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	%	%	100 %	<b>40,000,000</b>							100 %	<b>44,000,000</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 laporan	40,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahtera an Sosial	Pegawai UPTD Pelkesso s	1 laporan	44,000,000	Dinas Sosial
1	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	1 Unit	<b>14,024,360</b>							1 Unit	<b>15,024,360</b>	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				1 Unit	14,024,360	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Pegawai UPTD Pelkesso	1 Unit	15,024,360	Dinas Sosial

			9	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Manusia dan Kesejahteraan Sosial								
1	0	0	4	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	100 %		100 %	100 %	616,510,000							100 %	676,841,000				
1	0	0	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%		%	100 %	616,510,000							100 %	676,841,000				
1	0	0	2	0	0	3	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					6 Orang	576,510,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Janju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	6 Orang	632,841,000	Dinas Sosial
1	0	0	2	1	3	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota						10 Orang	40,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	10 Orang	44,000,000	Dinas Sosial
2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
2	0	2	7	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>								6,979,061,724									8,754,471,209	
2	0	7	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	6,055,130,783										72 %	7,790,111,093	

2	0	0	2.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Presentase capaian sasaran strategis Disnakertrans	Persen		Persen	87 Persen	<b>107,081,000</b>					87 Persen	<b>117,203,020</b>	
2	0	0	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	97,020,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	3 Dokumen	107,105,020	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0	0	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	5,470,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0	0	2.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	4,591,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	4 Dokumen	4,598,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0	0	2.0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta tersediannya Laporan Keuangan	Bulan		Bulan	14 Bulan	<b>4,833,693,493</b>					14 Bulan	<b>6,556,973,200</b>	
2	0	0	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan				33 Orang/bulan	4,778,763,493	Kab. Paser, Tanah Grogot,	Dana Transfer Umum-Dana	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui	ASN	33 Orang/bulan	6,501,973,200	Dinas Tenaga Kerja dan



2018	00	00	00	00	Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	41,094,920					100 Persen	05,554,190		
2018	00	00	00	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	748,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	12 Laporan	758,670	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2018	00	00	00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	51,706,920	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	12 Laporan	67,595,520	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2018	00	00	00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	788,640,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	12 Laporan	817,200,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2019	00	00	00	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	58,451,520						100 Persen	60,500,000	
2019	00	00	00	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	27,393,320	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	3 Unit	27,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Jumlah						Kab.	Dana		Peningkatan Kualitas				Dinas

2070106	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	14,820,000	Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	13 Unit	16,500,000	Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2070109	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	16,238,200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	1 Unit	16,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20702		<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100 %		100 %	100 %	<b>16,660,300</b>						100 %	<b>21,002,000</b>	
2070201	2.01	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>16,660,300</b>						1 Dokumen	<b>21,002,000</b>	
2070202	2.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro				3 Perusahaan	<b>16,660,300</b>	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan	3 Perusahaan	<b>21,002,000</b>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20703		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 %		40 %	60 %	<b>504,930,941</b>						60 %	<b>450,000,000</b>	
002		<b>Pelaksanaan Pelatihan</b>	Presentase Pencari Kerja yang Mendapatkan					<b>294,526,66</b>							<b>220,364,71</b>	

2	7	3	01	<b>berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persen		Persen	80 Persen	4					80 Persen	9		
2	0	0	2	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			16 Orang	294,526,664	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pencari Kerja	16 Orang	220,364,719	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0	0	2	0	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Presentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persen		Persen	80 Persen	65,849,335					80 Persen	84,881,000	
2	0	0	2	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			8 Lembaga	65,849,335	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	8 Lembaga	84,881,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0	0	2	0	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	Presentase Pendaftaran dan Rekomendasi LPK	Persen		Persen	60 Persen	56,839,892					60 Persen	59,659,000	
2	0	0	2	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi			1 Perizinan	56,839,892	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	1 Perizinan	59,659,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0	0	2	0	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	Presentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persen		Persen	70 Persen	53,788,892					70 Persen	51,834,000	
2	0	0	2	0	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan			5 Perusahaan	53,788,892	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Perusahaan	5 Perusahaan	51,834,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi







2	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				30 Laporan	37,278,421	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan	30 Laporan	52,020,160	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0	0	2.	0	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan	kasus		kasus	40 kasus	<b>148,711,579</b>						40 kasus	<b>147,840,224</b>	
2	0	0	2.	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	49,444,106	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan	1 Perkara	59,955,797	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	0	0	2.	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				20 Perkara	27,790,473	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan	20 Perkara	39,794,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
															Peningkatan Kualitas Sumber Daya				



3	3	0	2.	0	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain					1 Dokumen	44,100,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	3	0	2.	0	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi					1 Kawasan Transmigrasi	60,100,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	3	0			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	100 %		50 %	70 %		<b>88,200,000</b>						70 %	<b>140,000,000</b>	
3	3	0	2.	0	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru	KK		KK	60 KK		<b>88,200,000</b>						60 KK	<b>140,000,000</b>	
3	3	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					2 Laporan	44,100,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Warga Transmigrasi	2 Laporan	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan									Mengemban					

3	3	0	2.	0	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)			2 Dokumen	44,100,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Warga Transmigrasi	2 Dokumen	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3	3	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Jumlah kawasan perkotaan baru yang terbentuk	2 kawasan	0 kawasan	0 kawasan	<b>197,186,034</b>						0 kawasan	<b>0</b>		
3	3	0	2.	0	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</b>	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Transmigrasi yang Mandiri	Kawasan	Kawasan	1 Kawasan	<b>197,186,034</b>						1 Kawasan	<b>0</b>		
3	3	0	2.	0	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina			55 Kepala Keluarga	78,100,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kawasan Transmigrasi	55 Kepala Keluarga		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3	3	0	2.	0	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan			1 Satuan Permukiman	119,086,034	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kawasan Transmigrasi	1 Satuan Permukiman		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					<b>9,315,526,550</b>								<b>10,327,496,905</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %	70 %	72 %	<b>8,186,208,726</b>						72 %	<b>9,002,615,299</b>		

				KABUPATEN/KOTA														
208101	2.01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin		Poin	75 Poin	<b>228,993,000</b>					75 Poin	<b>251,892,300</b>		
2081011	2.011			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	198,403,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah	7 Dokumen	218,243,300	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2081017	2.017			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	30,590,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah	5 Laporan	33,649,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
208102	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	<b>7,247,914,468</b>					100 %	<b>7,972,705,915</b>		
2081021	2.021			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	7,088,556,148		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah	14 Orang/bulan	7,797,411,763	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2081027	2.027			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	159,358,320	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah	24 Laporan	175,294,152	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
208105	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksanakannya Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>131,990,000</b>					100 %	<b>145,189,000</b>		
													Meningkatkan					

2081203	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					5 Dokumen	1,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah	5 Dokumen	1,189,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2081206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%			%	100 %	<b>346,986,520</b>						100 %	<b>381,685,172</b>	
20812061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					8 Paket	2,995,520	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah	8 Paket	3,295,072	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
20812064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					50 paket	112,661,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Perangkat Daerah	50 paket	123,927,100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
20812065	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	16,330,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah	4 Paket	17,963,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
20812069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					485 Laporan	215,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah	485 Laporan	236,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2081207	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Persentase Kesiediaan Barang milik Daerah	%			%	100 %	<b>89,500,000</b>						100 %	<b>98,450,000</b>	

					Daerah															
20810706					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	89,500,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Perangkat Daerah	4 Unit	98,450,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
208108					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>76,853,600</b>							100 %	<b>84,538,960</b>	
20810801					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	1,650,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Kendaraan Dinas	150 Laporan	1,815,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA	
20810802					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	75,203,600	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Kendaraan Dinas	2 Laporan	82,723,960	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA	
208109					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya sarana prasarana penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>63,971,138</b>							100 %	<b>68,153,952</b>	
20810902					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan				6 Unit	51,629,138	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Peralatan Kantor Perangkat Daerah	6 Unit	56,792,052	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA	

					Pajak dan Perizinannya													
2	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			7 Unit	5,489,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Peralatan Kantor Perangkat Daerah	7 Unit	6,037,900	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	4,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Peralatan Kantor Perangkat Daerah	3 Unit	5,324,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	0	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	2,013,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Peralatan Kantor Perangkat Daerah	3 Unit	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	0	0			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase partisipasi perempuan Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	49.50 % 100 %	36 % 45 %	40 % 71.43 %	<b>659,928,174</b>						40 % 71.43 %	<b>808,552,991</b>	
2	0	0	2.	0	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	%	%	100 %	<b>125,048,174</b>						100 %	<b>137,552,991</b>	
2	0	0	2.	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	Jumlah Perangkat daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan			55 Perangkat Daerah	18,025,000	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Perangkat	55 Perangkat Daerah	18,827,500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga



2	0	0	2	2.		<b>Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga		Lembaga	29 Lembaga	334,880,000				29 Lembaga	361,000,000			
2	0	0	2	2.	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				25 Lembaga	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga	25 Lembaga	275,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	0	0	2	2.	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				0 Orang 40 Orang	84,880,000		PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga	0 Orang 40 Orang	86,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	0	0	3			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	100 %		90 %	100 %	129,900,000						100 %	142,890,000	

2083	2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Yang difasilitasi	Lembaga	Lembaga	60 Lembaga	129,900,000					60 Lembaga	129,900,000	
2083	2.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			75 Orang	129,900,000	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga	75 Orang	129,900,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2084	04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan	90 %	45 %	60 %	77,999,960					60 %	85,799,956	
2084	2.04	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga KG dan Hak Anak yang difasilitasi	Lembaga	Lembaga	10 Lembaga	85,799,960					10 Lembaga	85,799,956	
2084	2.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan			1 Dokumen	77,999,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Lembaga	1 Dokumen	77,999,960	Dinas Pengendalian Penduduk,



2	0	0	2.	0	Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				9 Organisasi	36,805,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga/Institusi	9 Organisasi	42,685,500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA	
2	0	0	2.	0	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang di fasilitasi	Lembaga	Lembaga	10 Lembaga	78,347,500							10 Lembaga	78,347,500	
2	0	0	2.	0	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	58,340,000	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga	1 Dokumen	64,174,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA		
2	0	0	2.	0	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	12,885,000	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga	1 Dokumen	14,173,500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA		



2	1	0	2.	0	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				20 Satuan Pendidikan	48,290,000		PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah	20 Satuan Pendidikan	53,119,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	1	0	2.	0	<b>Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Penduduk	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>142,910,000</b>						1 Dokumen	<b>157,201,000</b>	
2	1	0	2.	0	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				4 Dokumen	89,900,000		PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	4 Dokumen	88,890,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	1	0	2.	0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				5 Laporan	21,300,000		PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	5 Laporan	23,430,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	1	0	2.	1	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				1 Laporan	31,710,000		PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	1 Laporan	34,881,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	1	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Rasio Akseptor KB	77.5 %		74.5 %	76 %	<b>452,314,000</b>						76 %	<b>486,445,400</b>	

2	1	0	2.	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	orang		orang	5 orang	<b>80,000,000</b>					5 orang	<b>88,000,000</b>		
2	1	0	2.	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				4 Laporan	49,138,000		PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	PKB/PLKB dan Kader	4 Laporan	54,051,800	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	1	0	2.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				288 Orang	30,862,000		PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	PKB/PLKB dan Kader	288 Orang	33,948,200	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	1	0	2.	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten Dengan Kegiatan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	%		%	100 %	<b>231,000,000</b>						100 %	<b>243,000,000</b>	
1	0	2.	0	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana							Kab. Paser, Tanah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber				Dinas Pengendalian Penduduk,

2	4	3	0	1	Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					28 Laporan	74,335,000	Grogot, Tanah Grogot	TRANSFER	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Faskes	28 Laporan	1,768,500	Keluarga Berencana. PPPA	
2	1	0	2	0	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					1000 Orang	8,605,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Faskes	1000 Orang	9,465,500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA	
2	1	0	2	0	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB					28 Unit	121,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Faskes	28 Unit	122,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA	
2	1	0	2	0	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					28 Laporan	27,060,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Faskes	28 Laporan	29,766,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA	
2	1	0	2	0	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan</b>	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang Berperan Serta Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Organisasi		Organisasi		12 Organisasi	<b>141,314,000</b>							12 Organisasi	<b>155,445,400</b>	

					<b>Kesertaan Ber-KB</b>														
2	1	0	2.	0	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			12 Organisasi	35,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Organisasi Kemasyarakatan	12 Organisasi	35,080,000		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	1	0	2.	0	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			1 Dokumen	16,234,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	16,234,000		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	1	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga aktif	100 %		100 %	100 %						100 %	<b>177,516,960</b>		<b>195,268,656</b>
2	1	0	2.	0	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Cakupan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%		%	100 %						100 %	<b>177,516,960</b>		<b>195,268,656</b>
2	1	0	2.	0	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi			5 Laporan	73,808,480	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga dan Stakeholder	5 Laporan	81,189,328		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA

2140207	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	103,708,480					Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga dan Stakeholder	5 Laporan	114,079,328	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
208	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							195,000,000									214,500,000	
20801	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %	70 %	72 %	23,381,930									72 %	25,720,123		
208016	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	9,287,630									100 %	10,216,393		
2080164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	9,287,630					Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah	24 Paket	10,216,393	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA		
208018	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah	%	%	100 %	600,000									100 %	660,000		
		Jumlah						Kab.			Meningkatkan Sumber	Peningkatan Kualitas					Dinas	

2	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	600,000	Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN TRANSFER	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah	1 Laporan	660,000	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
2	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	<b>13,494,300</b>							100 %	<b>14,843,730</b>	
2	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			3 Unit	13,494,300	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Kendaraan Dinas	3 Unit	14,843,730	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA	
2	0	0	2.	0	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %	100 %	100 %	<b>171,618,070</b>							100 %	<b>188,779,877</b>	
2	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus yang di layani	orang	orang	200 orang	<b>171,618,070</b>							200 orang	<b>188,779,877</b>	
2	0	0	2.	0	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			40 Orang	171,618,070	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Orang/ Kasus	40 Orang	188,779,877	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA	

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8,794,017,764							11,489,064,215	
2	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	6,148,333,782						72 %	6,823,564,215		
2	0	0	2.		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	persen		persen	100 persen	80,635,932						100 persen	178,440,000		
2	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	70,000,000		Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	SKPD Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	65,940,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2,000,000		Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	SKPD Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	2,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	8,635,932		Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	SKPD Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

2012	091	2.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	persen	persen	100 persen	5,877,467,900						100 persen	6,287,714,215	
2012	091	2.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			32 Orang/bulan	5,627,467,900	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		pegawai Dinas Ketahanan Pangan	32 Orang/bulan	6,012,714,215	Dinas Ketahanan Pangan
2012	091	2.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			3 Laporan	250,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	pegawai Dinas Ketahanan Pangan	3 Laporan	275,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2016	091	2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	persen	100 persen	169,500,000						100 persen	333,750,000	
2016	091	2.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	25,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	4 Paket	65,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2016	091	2.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	30,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	4 Paket	53,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
											Memperkuat Ketahanan					

2016	205	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	7,000,000	Kab. Pasia Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	4 Paket	16,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2016	206	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					1 Dokumen	2,500,000	Kab. Pasia Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	2,750,000	Dinas Ketahanan Pangan
2016	209	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	100,000,000	Kab. Pasia Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	42,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2016	201	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	5,000,000	Kab. Pasia Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2018	208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen	<b>11,009,950</b>						100 persen	<b>13,160,000</b>	
2018	201	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	441,000	Kab. Pasia Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	660,000	Dinas Ketahanan Pangan
			Jumlah									Memperkuat					

2	0	0	2.	0	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	3,568,950	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	3,500,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	0	0	2.	0	0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	7,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	9,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	0	0	2.	0	0	9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan BMD	persen		persen	100 persen		<b>9,720,000</b>							100 persen	<b>10,500,000</b>	
2	0	0	2.	0	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	9,720,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	SKPD Dinas Ketahanan Pangan	2 Unit	10,500,000	Dinas Ketahanan Pangan		
2	0	0	2.	0	0	2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	65 %		30 %	50 %		<b>160,000,000</b>							50 %	<b>1,100,000,000</b>	
2	0	0	2.	0	0	1	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan</b>	Jumlah lantai jemur yang tersedia	unit		unit	1 unit		<b>160,000,000</b>							1 unit	<b>1,100,000,000</b>	

					Daerah Kabupaten/Kota														
2	0	0	2.	0	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia				1 Unit	160,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kabupaten Paser	1 Unit	1,100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	0	0	3		<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Tingkat ketersediaan pangan Tingkat konsumsi pangan	99 % 89 %		97.70 % 85 %	97.90 % 86 %	<b>1,905,683,982</b>						97.90 % 86 %	<b>2,415,500,000</b>	
2	0	0	2.	0	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan	persen		persen	100 persen	<b>296,453,982</b>						100 persen	<b>1,167,000,000</b>	
2	0	0	2.	0	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	23,628,360	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kabupaten Paser	1 Laporan	30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	0	0	2.	0	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	35,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kabupaten Paser	1 Laporan	850,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
					Pemantauan	Pemantauan						Kab. Paser	Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Perekonomi				

201903014	Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Stok, Pasokan dan Harga Pangan					1 Dokumen	97,825,622	Semua Kecamatan-Semua Kelurahan	Transfer Dana Bagi Hasil	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	an Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kabupaten Paser	1 Dokumen	107,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
201903016	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan					1 Unit	140,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kabupaten Paser	1 Unit	180,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
20190302	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya data potensi dan kebutuhan pangan lokal	dokumen		dokumen		1 dokumen	30,000,000						1 dokumen	48,500,000	
20190302	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal					1 Dokumen	30,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kabupaten Paser	1 Dokumen	48,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
20190304	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	Persentase capaian target konsumsi pangan berdasarkan AKG	persen		persen		97.5 persen	1,579,230,000						97.5 persen	1,200,000,000	
20190304	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun					1 Dokumen	25,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Masyarakat Kabupaten Paser	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
	Pemberdayaan	Jumlah Pemberdayaan									Memperkuat Ketahanan					

2020	09	03	2.04	02	Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1,519,230,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Masyarakat Kabupaten Paser	1 Laporan	1,100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2020	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	35,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Masyarakat Kabupaten Paser	1 Laporan	70,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2020	09	04			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Persentase penanganan desa rawan pangan Persentase penyaluran cadangan pangan	15.97 % 50 %	19.44 % 10 %	18.06 % 10 %		<b>495,000,000</b>						18.06 % 10 %	<b>750,000,000</b>	
2020	09	04	2.01		<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	Tersedianya Dokumen Update data peta FSVA	dokumen	dokumen	1 dokumen		<b>45,000,000</b>						1 dokumen	<b>50,000,000</b>	
2020	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	45,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Daerah rentan rawan pangan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2020	09	04	2.02		<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Teratasinya kerawanan pangan daerah	Kecamatan	Kecamatan	8 Kecamatan		<b>450,000,000</b>						8 Kecamatan	<b>700,000,000</b>	
2020	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan				1 Laporan	50,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas		Daerah rentan rawan pangan	1 Laporan	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota													
2019	04	2.02		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	400,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Daerah rentan pangan	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2019	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	88 %		80 %	82 %	<b>85,000,000</b>						82 %	<b>400,000,000</b>	
2019	05	2.01		<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	persen		persen	84.5 persen	<b>85,000,000</b>						84.5 persen	<b>400,000,000</b>	
2019	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Dokumen	85,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pelaku Usaha PSAT	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2019	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pelaku Usaha PSAT	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2019	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah				1 Dokumen	85,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pelaku Usaha PSAT	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota							Berkeadilan						
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>27,969,967,409</b>						<b>30,301,969,111</b>	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>13,681,823,491</b>					72 %	<b>13,192,261,780</b>		
					Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi terlaksana	%		%	100 %						100 %			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	%		%	100 %	<b>537,589,951</b>					100 %	<b>581,203,445</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	<b>78,585,492</b>	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	2 Dokumen	<b>220,003,445</b>	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	<b>65,500,000</b>	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	<b>65,500,000</b>	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	<b>48,629,600</b>	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	<b>58,800,000</b>	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD					Kab. Paser	Dana Transfer			Pegawai DLH			

2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,490,959	Semua Kecamatan	Dana Umum	Serta Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,488,900	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	27,395,000	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	4 Laporan	46,400,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	13,500,000	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	1 Laporan	13,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase pelayanan administrasi keuangan terlaksana	%		%	100 %	<b>11,696,766,500</b>				100 %	<b>11,322,822,700</b>	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan				92 Orang/bulan	11,551,020,500	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Pegawai DLH serta Kelompok	92 Orang/bulan	11,181,428,500	Dinas Lingkungan Hidup

					Tunjangan ASN						Kelurahan	Alokasi Umum			Masyarakat				
2	1	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	20,990,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH serta Kelompok Masyarakat	12 Dokumen	20,394,200		Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	35,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH serta Kelompok Masyarakat	1 Laporan	25,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4 Laporan	13,285,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH serta Kelompok Masyarakat	4 Laporan	13,500,000		Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	13,471,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH serta Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	13,500,000		Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	persentase pelayanan administrasi keuangan terlaksana	%	%	100 %	<b>50,000,000</b>						100 %	<b>50,000,000</b>		
2	1	0	2	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			7 Orang	50,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	7 Orang	50,000,000		Dinas Lingkungan Hidup

2	1	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase penunjang administrasi perkantoran terlayani	%		%	100 %	<b>562,475,300</b>				100 %	<b>361,543,145</b>			
2	1	0	2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4,261,500	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	5 Paket	4,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				36 Paket	50,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	36 Paket	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	34,213,800	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	15 Paket	35,054,250	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				360 Dokumen	5,500,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	360 Dokumen	5,888,895	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	300,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	38 Laporan	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	9,500,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	100 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
				Dukungan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Dukungan						Kab. Paser,	Dana			Pegawai DLH			

2	1	0	2.	1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	70,000,000	Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Serta Kelompok Masyarakat	2 Dokumen	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	0	2.	07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	77 %		<b>158,000,000</b>						77 %	<b>66,820,050</b>		
2	1	0	2.	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	15,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	1 Unit		0	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	143,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	5 Unit	66,820,050		Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase penunjang administrasi perkantoran terlayani	%	%	100 %		<b>484,503,740</b>						100 %	<b>537,372,440</b>		
2	1	0	2.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	1,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	200 Laporan	892,440		Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DLH Serta Kelompok Masyarakat	12 Laporan	229,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah										Pegawai				





2	1	0		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	cakupan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	%	73 %	<b>1,466,973,400</b>					73 %	<b>1,682,240,000</b>	
2	1	0	2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Jumlah persetujuan teknis lingkungan yang dikeluarkan	Dokumen	Dokumen	11 Dokumen	<b>722,110,000</b>					11 Dokumen	<b>465,180,000</b>	
2	1	0	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			8 Dokumen	<b>174,770,000</b>	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat serta Perusahaan	8 Dokumen	<b>201,780,000</b>	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			2 Dokumen	<b>97,340,000</b>	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat serta Perusahaan	2 Dokumen	<b>117,400,000</b>	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Sarana Prasarana Pengelolaan Lab. Lingkungan			1 Paket	<b>450,000,000</b>	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat serta Perusahaan	1 Paket	<b>146,000,000</b>	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.02	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>	Jumlah Jenis Pemantauan Lingkungan	Jenis	Jenis	9 Jenis	<b>582,714,100</b>					9 Jenis	<b>936,060,000</b>	



2	1	0			<b>KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	terbuka Hijau) dan Taman kehati yang dikelola	75 %		50 %	60 %	<b>1,828,685,477</b>					60 %	<b>3,620,400,000</b>		
2	1	0	2.		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kawasan konservasi/ RTH dan taman Kehati terkelola	Lokasi		Lokasi	12 Lokasi	<b>1,828,685,477</b>					12 Lokasi	<b>3,620,400,000</b>		
2	1	0	2.	0	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1067 Ha	100,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	1067 Ha	200,400,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	0	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				63.8171 Ha	1,671,482,059	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	63.8171 Ha	3,350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	0	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	57,203,418	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	1 Unit	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	persentase jumlah perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3	100 %		55 %	80 %	<b>144,917,050</b>					80 %	<b>230,000,000</b>		

2	1	0	2.	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	Jumlah rekomendasi penyimpanan limbah yang dikeluarkan	Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	<b>99,917,350</b>					7 Dokumen	<b>170,000,000</b>	
2	1	0	2.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			3 Dokumen	69,919,150	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat serta Perusahaan	3 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			1 Laporan	29,998,200	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat serta Perusahaan	1 Laporan	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2.	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah rekomendasi pengumpulan limbah yang dikeluarkan	Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	<b>44,999,700</b>					5 Dokumen	<b>60,000,000</b>	
2	1	0	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			1 Dokumen	44,999,700	Kab. Paser Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Masyarakat serta	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Lingkungan

1	5	2	2	rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Bencana Dan Perubahan Iklim	Perusahaan			Hidup
2	1	0	6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	persentase perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan	100 %	65 %	100 %	147,792,760					100 %	290,000,000		
2	1	0	2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase rekomendasi tindak lanjut evaluasi yang diberikan	%	%	55 %	147,792,760					55 %	290,000,000		
2	1	0	2.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			2 Orang	31,957,760		Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pegawai DLH	2 Orang	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
				Pengawasan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau								Membangun				

2	1	0	2	0	Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				22 Laporan	75,940,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pegawai DLH	22 Laporan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				8 Dokumen	39,895,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pegawai DLH	8 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0	0	7	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan	100 %	0 %	100 %		<b>29,804,250</b>					100 %	<b>50,000,000</b>	
2	1	0	2	0	<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	Jumlah MHA yang mendapatkan pembinaan	MHA	MHA	1 MHA		<b>29,804,250</b>					1 MHA	<b>50,000,000</b>	
2	1	0	2	0	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan				1 Dokumen	29,804,250	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup



2	1	0	2.	<b>Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	penilaian dan penghargaan lingkungan hidup terselenggara	Jenis		Jenis	3 Jenis	<b>60,000,000</b>					3 Jenis	<b>200,000,000</b>		
2	1	0	2.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	60,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	3 Entitas	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1		<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100 %		80 %	100 %	<b>107,230,000</b>						100 %	<b>212,200,000</b>	
2	1	1	2.	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah sngsi administrasi yang diterapkan	Kasus		Kasus	2 Kasus	<b>107,230,000</b>						2 Kasus	<b>212,200,000</b>	
2	1	1	2.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				26 Dokumen	107,230,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	26 Dokumen	212,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	persentase pengelolaan sampah disumber persentase sampah yang terangkut ke TPA	30 % 70 %		12 % 42.5 %	19 % 53 %	<b>9,945,121,121</b>						19 % 53 %	<b>9,855,476,291</b>	
2	1	1	2.	<b>Pengelolaan Sampah</b>	Jumlah sampah terangkut ke	Ton		Ton	16000 Ton	<b>9,915,430,821</b>						16000 Ton	<b>9,825,476,291</b>	



2	1	1	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				4 Dokumen	17,819,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	4 Dokumen	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	1	2.	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				20 Unit	4,225,630,740	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	20 Unit	6,101,819,471	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	1	2.	0	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	Persentase pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah terselenggara	%	%	100 %		<b>29,690,300</b>					100 %	<b>30,000,000</b>		
2	1	1	2.	0	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja				2 Unit	29,690,300	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	2 Unit	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>							<b>30,445,755,418</b>						<b>3,192,840,000</b>	
					<b>PROGRAM</b>														

3	2	0			<b>KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik.	81.66 %		70.50 %	76.66 %	<b>30,445,755,418</b>					76.66 %	<b>3,192,840,000</b>	
3	2	0	2.01		<b>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengawasan dan keamanan dari gangguan dan kerusakan kawasan	%		%	100 %	<b>30,445,755,418</b>					100 %	<b>3,192,840,000</b>	
3	2	0	2.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah panjang sekat bakaran terpelihara Jumlah Pemadaman dan Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan Jumlah sosialisasi karhutla terlaksana				30 KM 8 Lokasi 3 Desa	1,241,500,000	Kab. Paser, Batu Engau, Petangis Kab. Paser, Batu Engau, Saing Prupuk Kab. Paser, Batu Engau, Tebru Paser Damai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat Sekitar TAHURA	30 KM 8 Lokasi 3 Desa	842,840,000	Dinas Lingkungan Hidup
3	2	0	2.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operas Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota				50 Operasi	700,000,000	Kab. Paser, Batu Engau, Petangis Kab. Paser, Batu Engau, Saing Prupuk Kab. Paser, Batu Engau, Tebru Paser Damai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat Sekitar TAHURA	50 Operasi	850,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
														Membangun				

3	2	0	2	0	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Jumlah Dana DBH DR yang tersisa					0 3 Tahun	26,748,055, 418	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Sekitar TAHURA	0 3 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup
3	2	0	2	0	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem					200 Ha	531,200,000	Kab. Paser, Batu Engau, Petangis Kab. Paser, Batu Engau, Saing Prupuk Kab. Paser, Batu Engau, Tebru Paser Damai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Sekitar TAHURA	200 Ha	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
3	2	0	2	0	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti					1 Permohonan	100,000,000	Kab. Paser, Batu Engau, Petangis Kab. Paser, Batu Engau, Saing Prupuk Kab. Paser, Batu Engau, Tebru Paser Damai	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Sekitar TAHURA	1 Permohonan	0	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah							Kab. Paser, Batu Engau, Petangis Kab. Paser,	DBH Sumber	Membangun Lingkungan					

3	2	0	2.	0	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota			2 Dokumen	500,000,000	Batu Engau, Saing Prupuk Kab. Paser, Batu Engau, Tebru Paser Damai	Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Sekitar TAHURA	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
3	2	0	2.	0	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif			3 Desa	625,000,000	Kab. Paser, Batu Engau, Petangis Kab. Paser, Batu Engau, Saing Prupuk Kab. Paser, Batu Engau, Tebru Paser Damai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Sekitar TAHURA	3 Desa	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
<b>2.1.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL</b>																		
2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Pelayanan Administerasi Perkantoran dan Pelaporan	%	%	100 %	<b>6,473,310,605</b>						100 %	<b>7,472,312,627</b>	
2	1	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Administerasi Perkantoran dan Pelaporan	%	%	100 %	<b>6,453,509,634</b>						100 %	<b>6,563,163,426</b>	
1	0	2.	0		Penyediaan Gaji	Jumlah Orang yang Menerima			50 Orang/bulan	6,340,222,0		Dana Transfer Umum-		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		50 Orang/bulan	6,340,222,0	Dinas Kependuduk

2	2	1	0	1	dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				50		Dana Alokasi Umum		Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0		50	an dan Pencatatan Sipil
2	2	1	0	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			5 Dokumen	13,287,584		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	5 Dokumen	207,941,376	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	2	1	0	6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Administerasi Perkantoran dan Pelaporan	%	%	100 %	<b>19,800,971</b>						100 %	<b>445,100,000</b>	
2	2	1	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	19,800,971		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	2 Paket	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	2	2	0		<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	98 %	95 %	96 %	<b>19,800,971</b>						96 %	<b>224,901,900</b>	
2	2	2	0	1	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase Jumlah Dokumen Kependudukan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	%	97 %	<b>19,800,971</b>						97 %	<b>224,901,900</b>	
2	2	2	0	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			8000 Dokumen	19,800,971		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	8000 Dokumen	154,489,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	2	3	0		<b>PROGRAM PENCATATAN</b>	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte	98 %	95 %	96 %	<b>271,800,971</b>						96 %	<b>482,976,330</b>	

				<b>SIPIIL</b>	kelahiran, kematian, nikah, cerai)												
2	1	0	2.	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	%	%	98 %	<b>271,800,971</b>					98 %	<b>482,976,330</b>		
2	1	0	2.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			6000 Dokumen	271,800,971		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	6000 Dokumen	482,976,330	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	0		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase data kependudukan yang valid	98 %	95 %	96 %	<b>1,060,561,942</b>					96 %	<b>259,290,471</b>		
2	1	0	2.	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	Persentase Data kependudukan Yang Valid	%	%	96 %	<b>1,027,560,324</b>					96 %	<b>174,290,471</b>		
2	1	0	2.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			12 Dokumen	1,020,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	12 Dokumen	174,489,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	0	2.	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			2 Dokumen	6,600,324		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	2 Dokumen	19,800,971	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	0	2.	<b>Penyelenggaraa n Pengelolaan Informasi Administrasi</b>	Persentase Data kependudukan	%	%	96 %	<b>33,001,618</b>					96 %	<b>85,000,000</b>		



2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 laporan	1,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai DPMD Kab Paser	12 laporan	1,680,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 dokumen	13,756,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai DPMD Kab Paser	6 dokumen	14,444,325	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>5,684,436,616</b>						1 Kegiatan	<b>5,968,658,447</b>	
2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	5,371,696,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DPMD Kab Paser	14 bulan	5,640,281,010	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				400 dokumen	299,940,416	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai DPMD Kab Paser	400 dokumen	305,487,437	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				15 dokumen	21,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai DPMD Kab Paser	15 dokumen	22,890,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

						Akhir Tahun SKPD															
2	1	0	2.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>25,390,000</b>								1 Kegiatan	<b>26,659,500</b>		
2	1	0	2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 kecamatan	25,390,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						Pegawai DPMD Kab Paser	10 kecamatan	26,659,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>2,600,000</b>									1 Kegiatan	<b>2,730,000</b>	
2	1	0	2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				16 orang	2,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						Pegawai DPMD Kab Paser	16 orang	2,730,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>383,408,410</b>									1 Kegiatan	<b>407,828,831</b>	
2	1	0	2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 unit	1,799,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						Pegawai DPMD Kab Paser	24 unit	1,889,003	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 unit	21,602,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						Pegawai DPMD Kab Paser	7 unit	22,682,625	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					40 item	116,976,860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai DPMD Kab Paser	40 item	122,825,703	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 bular	20,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai DPMD Kab Paser	12 bular	21,262,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					724 exemplar	1,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai DPMD Kab Paser	724 exemplar	2,079,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					36 kali	220,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai DPMD Kab Paser	36 kali	237,090,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2	0	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan		<b>74,309,940</b>						1 Kegiatan	<b>78,025,437</b>	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4 unit	65,059,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai DPMD Kab Paser	4 unit	68,312,937	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya					10 buah	9,250,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-			Pegawai DPMD	10 buah	9,712,500	Dinas Pemberdayaan

3	1	9	6	Mesin Lainnya	yang Dipelihara													Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil								Kab Paser				Masyarakat dan Desa
2	1	0		<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa	12 %		0 %	5 %	<b>5,000,000</b>																		5 %	<b>5,500,000</b>		
2	1	0	2.	<b>Penyelenggaraa n Penataan Desa</b>	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>5,000,000</b>																		1 Kegiatan	<b>5,500,000</b>		
2	1	0	2.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa				1 Desa	2,500,000								Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif		Seluruh Desa se Kabupat en Paser		1 Desa	2,750,000		Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa			
2	1	0	2.	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				1 Desa	2,500,000								Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif		Seluruh Desa se Kabupat en Paser		1 Desa	2,750,000		Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa			
2	1	0		<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	100 %		NA %	100 %	<b>38,970,000</b>																		100 %	<b>40,918,500</b>		
2	1	0	2.	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>38,970,000</b>																		1 Kegiatan	<b>40,918,500</b>		
2	1	0	2.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 dokumen	38,970,000								Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Seluruh Desa se Kabupat en Paser		1 dokumen	40,918,500		Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa				
2	1	0		<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHA</b>	Persentase LHP desa yang selesai	100 %		100 %	100 %	<b>3,570,589, 354</b>																		100 %	<b>3,746,768, 322</b>		

				N DESA	ditindaklanjuti													
2	1	0	2.	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	3,570,589,354							1 Kegiatan	3,746,768,322	
2	1	0	2.0	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			10 desa	1,548,276,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Seluruh Desa se Kabupaten Paser	10 desa	1,625,689,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	1	0	2.0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			139 dokumen	120,048,626	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Seluruh Desa se Kabupaten Paser	139 dokumen	120,051,057	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	1	0	2.0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa			139 dokumen	268,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Seluruh Desa se Kabupaten Paser	139 dokumen	268,400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	1	0	2.0	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			72 orang	454,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh Desa se Kabupaten Paser	72 orang	477,153,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	1	0	2.0	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa			1 dokumen	4,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas		Seluruh Desa se Kabupaten Paser	1 dokumen	4,294,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	





2	1	0	2.	<b>Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	2,763,645,878					1 Kegiatan	2,878,793,671		
2	1	0	2.0	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			1 dokumen	11,568,626	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Seluruh Lembaga Desa se Kabupaten Paser	1 dokumen	17,147,057	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2.0	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			5 dokumen	87,445,626	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Seluruh Lembaga Desa se Kabupaten Paser	5 dokumen	91,817,907	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,							Meningkatka					

2	1	0	2.	0	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 lembaga	25,913,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Seluruh Lembaga Desa se Kabupaten Paser	15 lembaga	27,208,650	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2.	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 dokumen	2,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Seluruh Lembaga Desa se Kabupaten Paser	1 dokumen	2,215,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2.	0	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				10 desa	122,028,626	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Seluruh Lembaga Desa se Kabupaten Paser	10 desa	130,345,557	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2.	0	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 dokumen	9,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Seluruh Lembaga Desa se Kabupaten Paser	1 dokumen	10,059,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	0	2.	0	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				4 Dokumen	2,405,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Seluruh Lembaga Desa se Kabupaten Paser	4 Dokumen	2,500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
1											16,281,442								25,444,724

2	5			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>					<b>,032</b>									<b>,251</b>		
2	1	0		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %	70 %	72 %	<b>12,090,001,318</b>									72 %	<b>15,046,903,008</b>	
2	1	0	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	<b>22,912,700</b>									4 Dokumen	<b>26,730,659</b>	
2	1	0	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	9,906,800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	10,987,228	Dinas Perhubungan			
2	1	0	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	4,055,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	4,910,180	Dinas Perhubungan			
2	1	0	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			1 Laporan	6,875,900	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	8,320,323	Dinas Perhubungan			

							Kinerja SKPD													
2	1	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	2,075,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	2,512,928	Dinas Perhubungan
2	1	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentasi administrasi keuangan yang terlaksana	%		%		100 %	<b>8,384,021,000</b>						100 %	<b>10,978,484,502</b>	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					56 Orang/bulan	7,722,339,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	56 Orang/bulan	10,220,202,034	Dinas Perhubungan
2	1	0	2.	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Laporan	661,682,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	758,282,468	Dinas Perhubungan
2	1	0	2.	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%		100 %	<b>40,696,481</b>						100 %	<b>50,000,000</b>	
2	1	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					2 Orang	40,696,481	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	2 Orang	50,000,000	Dinas Perhubungan

2	1	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		%	100 %	<b>291,400,120</b>					100 %	<b>457,817,496</b>		
2	1	0	2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	2,375,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	2,874,294	Dinas Perhubungan
2	1	0	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			7 Paket	30,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	7 Paket	155,879,303	Dinas Perhubungan
2	1	0	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	41,976,820	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	47,793,609	Dinas Perhubungan
2	1	0	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	17,062,300	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	20,645,625	Dinas Perhubungan
2	1	0	2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			65 Laporan	19,986,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	65 Laporan	230,624,665	Dinas Perhubungan

2	1	0	2.		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang urusan skpd	%	%	100 %	<b>3,245,331,017</b>			Dasar				100 %	<b>3,326,263,140</b>	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	4,210,000	Dinas Perhubungan	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	3,229,796,105	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	3,308,056,693	Dinas Perhubungan	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	3,050,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	3,690,500	Dinas Perhubungan	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	11,484,912	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	10,305,947	Dinas Perhubungan	
2	1	0	2.		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya pemeliharaan barang skpd	unit	unit	31 unit	<b>105,640,000</b>							31 unit	<b>207,607,211</b>	

2	1	0	2.	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit	100,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	7 Unit	200,782,811	Dinas Perhubungan
2	1	0	2.	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	5,640,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara	10 Unit	6,824,400	Dinas Perhubungan
2	1	0				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar	100 %		70 %	90 %		<b>3,755,440,714</b>						90 %	<b>8,912,827,609</b>	
2	1	0	2.	0	01	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk LLAJ	%		%	100 %		<b>227,128,800</b>							100 %	<b>0</b>
2	1	0	2.	0	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					1 Dokumen	227,128,800	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	1	0	2.	0	2	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	%		%	100 %		<b>2,198,311,914</b>							100 %	<b>6,496,876,598</b>

2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia					139 Unit	1,699,749,870	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	139 Unit	4,767,571,450	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					5419 Unit	219,452,044	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	5419 Unit	1,222,157,848	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					941 Unit	279,110,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	941 Unit	507,147,300	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Persentase jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan	%		%		100 %	<b>484,000,000</b>						100 %	<b>966,613,824</b>	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan					1 Unit	484,000,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Lori	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Unit	966,613,824	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.0		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan</b>	Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	<b>30,000,000</b>						1 Dokumen	<b>36,830,191</b>	

			4	<b>Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	parkir													
2	1	0	2	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	86,830,191	Dinas Perhubungan
2	1	0	2	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Tersedinya Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	136,000,000						3 Dokumen	409,345,946	
2	1	0	2	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	42,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Laporan	197,826,519	Dinas Perhubungan
2	1	0	2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	32,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Laporan	107,224,127	Dinas Perhubungan
					Jumlah Laporan								Memperkuat Infrastruktur Untuk	Penguatan				



2150216				<b>serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	dan pengawasan Tarif Angkutan umum	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>603,000,000</b>						1 Dokumen	<b>905,762,750</b>	
21502163				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	603,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Laporan	905,762,750	Dinas Perhubungan
21503				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	Persentase Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-orang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten	100 %	60 %	90 %		<b>336,000,000</b>						90 %	<b>1,361,021,334</b>	
215036				<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api</b>	Tersedianya data penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>81,200,000</b>						1 Dokumen	<b>841,021,334</b>	

				<b>Kabupaten/Kota</b>														
2	1	0	2.	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah			1 Laporan	81,200,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Laporan	81,021,334		Dinas Perhubungan
2	1	0	2.	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	Terpeliharanya prasarana Pelabuhan Sungai & danau	unit		unit	2 unit	254,800,000					2 unit	520,000,000		
2	1	0	2.	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan			1 Unit	254,800,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Unit	520,000,000		Dinas Perhubungan
2	1	0		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian	100 %		5 %	40 %	100,000,000					40 %	123,972,300		
2	1	0	2.	<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>	Tersedianya data dan informasi mengenai penyusunan rencana induk perkeretaapian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100,000,000					1 Dokumen	123,972,300		



2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	orang-perorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten	100 %		60 %	90 %	<b>282,077,250</b>					90 %	<b>876,190,214</b>			
2	1	0	2.13		<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	Terpeliharanya Prasarana Pelabuhan Sungai & Danau	unit		unit	1 unit	<b>282,077,250</b>					1 unit	<b>876,190,214</b>			
2	1	0	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	282,077,250	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Unit	876,190,214	Dinas Perhubungan	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
2	1	5			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>							<b>239,735,350</b>							<b>290,079,773</b>	
2	1	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar	100 %		70 %	90 %	<b>239,735,350</b>						90 %	<b>290,079,773</b>		
2	1	0	2.09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit		unit	15 unit	<b>239,735,350</b>						15 unit	<b>290,079,773</b>		
					Pengendalian	Jumlah Laporan Pengendalian dan								Memperkuat						



2161				<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>5,917,098,972</b>					72 %	<b>8,108,415,870</b>	
2161		2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%		%	100 %	<b>69,998,428</b>					100 %	<b>241,193,500</b>	
2161		2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	62,198,428		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen	59,443,500	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2161		2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	80,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2161		2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2161		2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen	10,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2161		2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil				1 Dokumen	1,500,000		Dana Transfer Umum-		0	1 Dokumen	10,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika,

				SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						Dana Bagi Hasil					Statistik dan Persandian	
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,500,000			0	1 Laporan	15,750,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,500,000			0	1 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	<b>5,349,543,644</b>				100 %	<b>6,880,689,150</b>	
2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	5,180,092,700			-	12 Orang/bulan	6,657,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	169,450,944			-	1 Laporan	223,689,150	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	0	<b>Administrasi Umum</b>	Persentase Pelayanan Adm dalam	%		%	100 %	<b>368,556,90</b>				100 %	<b>589,246,97</b>	

	6	1	6	<b>Perangkat Daerah</b>	menunjang kinerja aparatur					0							0
2	1	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Paket	112,767,970	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	47,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Paket	107,179,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Paket	35,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen	6,300,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	303,456,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Laporan	328,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Sarana dan Prasarana dlm menunjang kegiatan	%	%	100 %		<b>87,000,000</b>					100 %	<b>267,441,250</b>	
2	1	0	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Laporan	147,441,250	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,				1 Laporan	2,000,000		Dana Transfer Umum-		0	1 Laporan	120,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika,

			8	dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													Statistik dan Persandian
2	1	0	2.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan BMD	%	%	100 %	<b>42,000,000</b>					100 %	<b>129,845,000</b>	<b>0</b>		
2	1	0	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	40,000,000					0	4 Unit	79,845,000		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	2,000,000					0	4 Unit	50,000,000		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100 %	100 %	100 %	<b>3,077,353,185</b>					100 %	<b>3,827,773,800</b>	<b>00</b>		
2	1	0	2.	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Masyarakat yang dapat mengakses Informasi	%	%	55 %	<b>3,077,353,185</b>					55 %	<b>3,827,773,800</b>	<b>00</b>		
2	1	0	2.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			1 Dokumen	10,000,000					-	1 Dokumen	10,000,000		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2	1	0	2	0	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					1 Dokumen	359,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				-	1 Dokumen	634,057,350	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	0	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik					1 Dokumen	327,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				-	1 Dokumen	438,293,767	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	0	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					1 Dokumen	186,113,185		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				-	1 Dokumen	528,211,341	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	0	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					1 Dokumen	77,433,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				-	1 Dokumen	249,676,001	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2	1	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan					1 Dokumen	2,026,566,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				-	1 Dokumen	1,887,535,341	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	3		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase aplikasi yang terintegrasi	70 %		25 %	40 %		<b>4,224,626,371</b>							40 %	<b>11,039,300,000</b>	
2	1	0	3	2	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah</b>	Sistem E-Government yang terbangun	%		%	55 %		<b>3,502,282,086</b>							55 %	<b>4,303,300,000</b>	

				Kabupaten/Kota															
2	1	0	2.	0	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				3 Domain	139,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	3 Domain	500,800,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2.	0	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	5,012,086		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				42 Unit	3,357,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	42 Unit	3,752,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2.	0	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Layanan nama domain dan sub domain di Pemerintah Daerah Kab Paser	%	%		55 %	<b>722,344,285</b>						55 %	<b>6,736,000,000</b>	
2	1	0	2.	0	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	17,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-	1 Dokumen	350,800,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2.	0	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	5,010,850		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

						Elektronik											
2	1	0	2.	0		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	140,350,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-	1 Unit	450,800,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2.	0		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	87,304,585		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-	1 Dokumen	4,560,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2.	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	144,904,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-	1 Dokumen	229,600,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2.	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	40 Perangkat Daerah	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-	40 Perangkat Daerah	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2.	0		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	35,010,150		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-	2 Unit	350,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	1	0	2.	0		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	23,704,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-	1 Layanan	224,800,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2	1	0	2.	0	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	20,110,000					-	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2	1	0	2.	1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	28,120,000					-	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2	2	0			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						<b>304,948,100</b>								<b>536,469,000</b>	
2	2	0			<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	100 %		100 %	100 %	<b>304,948,100</b>						100 %	<b>536,469,000</b>		
2	2	0	2.	01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	%		%	100 %	<b>304,948,100</b>						100 %	<b>536,469,000</b>		
2	2	0	2.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	29,060,300					0	1 Dokumen	218,840,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2	2	0	2.	01	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam				2 Orang	39,810,000					0	2 Orang	30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika,	





218101	2.01	<b>dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	%	75.5 %	<b>89,012,519</b>						75.5 %	<b>97,913,771</b>		
218101	2.011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	42,678,900	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	0	3 Dokumen	46,946,790	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
218101	2.016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	33,399,819	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	0	1 Laporan	36,739,801	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
218101	2.017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	12,933,800	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	0	1 Laporan	14,227,180	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
218102	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%	100 %	<b>5,476,332,456</b>						100 %	<b>6,015,165,701</b>		
218102	2.021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan				30 Orang/bulan	5,038,784,200	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah	0	30 Orang/bulan	5,542,662,620	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

					ASN						Kelurahan Umum		n Yang Partisipatif			Satu Pintu		
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	437,548,256	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	1 Laporan	472,503,081	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	2.	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>65,000,000</b>					100 %	<b>71,500,000</b>	
2	1	0	2.	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	65,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	400 Orang	1,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>232,387,100</b>					100 %	<b>255,625,810</b>	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,723,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	1 Paket	7,395,300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,123,900	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		0	1 Paket	7,836,290	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Paket						Kab. Paser,	Dana					Dinas Penanaman

21810204	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	41,103,000	Tanah Grogot, Tanah Grogot	Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	1 Paket	45,213,300	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21810205	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	30,141,600	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	1 Paket	33,155,760	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21810206	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					2 Dokumen	8,688,800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	2 Dokumen	4,057,680	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21810209	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	43,606,800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	2 Laporan	157,967,480	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21810208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	%		%		100 %	<b>11,026,950</b>						100 %	<b>12,129,645</b>	
21810201	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	2,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	1 Laporan	2,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21810204	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	9,026,950	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	1 Laporan	9,929,645	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2	1	0	2.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan BMD	%	%	100 %	<b>30,470,000</b>					100 %	<b>33,517,000</b>		
2	1	0	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	2,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	1 Unit	2,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit	21,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	1 Unit	23,100,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			17 Unit	7,470,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	17 Unit	8,217,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	3.937.450 juta rupiah	670.000 juta rupiah	725.412 juta rupiah	<b>513,720,000</b>					725.412 juta rupiah	<b>565,092,000</b>		
2	1	0	2.	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	<b>513,720,000</b>						2 Dokumen	<b>565,092,000</b>	
				Penyusunan	Jumlah Peraturan					Kab. Paser	Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Kualitas				Dinas



2	1	0	2.	<b>Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi	%	%	82.04 %	<b>482,800,000</b>					82.04 %	<b>535,480,000</b>		
2	1	0	2.0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			922 Pelaku Usaha	418,800,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	922 Pelaku Usaha	418,800,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	2.0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			20 Orang	64,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	20 Orang	71,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	335 Investor	56 Investor	62 Investor	<b>64,000,000</b>						62 Investor	<b>71,500,000</b>	
2	1	0	2.	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah</b>	Jumlah pengendalian terhadap perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	20 Perusahaan	<b>64,000,000</b>						20 Perusahaan	<b>71,500,000</b>	



2	1	0		<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>5,993,769,758</b>				72 %	<b>6,249,707,992</b>	
2	1	0	2.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	%		%	100 %	<b>92,628,100</b>				100 %	<b>105,000,000</b>	
2	1	0	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	62,410,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	68,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	1	0	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15,023,100	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	1 Laporan	17,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	1	0	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	15,195,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	1 Laporan	20,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	1	0	2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat</b>	pelaksanaan administrasi keuangan yang	%		%	100 %	<b>5,592,457,238</b>				100 %	<b>5,809,085,992</b>	

				Daerah	akuntabel													
2	1	0	2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	5,340,467,300	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	34 Orang/bulan	5,554,085,992	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	1	0	2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	251,989,938	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	1 Dokumen	255,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	1	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	<b>257,902,420</b>						100 %	<b>284,260,000</b>	
2	1	0	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	17,495,300	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh Pegawai Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	2 Paket	20,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	1	0	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	42,128,420	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh Pegawai Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	12 Paket	46,260,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	1	0	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang				12 Paket	5,187,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinas Pemuda Olahraga Dan	12 Paket	7,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan

					Disediakan					Grogot	Hasil		n Yang Partisipatif	Pariwisata			Pariwisata		
2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	156,596,200	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh Pegawai Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	1 Laporan	171,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
2	1	0	2.	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	36,495,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh Pegawai Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
2	1	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pemeliharaan barang milik daerah	unit		unit	5 unit	<b>50,782,000</b>					5 unit	<b>51,362,000</b>		
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	49,362,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Peralatan Dan Kendaraan Operasional	3 Unit	49,362,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	1	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1,420,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Peralatan Dan Kendaraan Operasional	1 Unit	2,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	1	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING</b>	Persentase kelompok wirausaha muda (%)	100 %		20 %	47 %							47 %	<b>1,583,000,000</b>	
						Persentase	17.78 %		15.56 %	15.56 %							15.56 %		

				<b>KEPEMUDAAN</b>	organisasi pemuda yang aktif														
2	1	0	2	01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	berpartisipasinya pemuda dalam kegiatan pengemabngan kepemudaan dalam usaha kemandirian	orang	orang	152 orang	1,287,767,500					152 orang	1,416,000,000			
2	1	0	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			40 Orang	26,303,900	Kab. Pase	Dana Transfer Kecamatan, Jumlah Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pemuda, Wirausaha muda, organisasi pemuda	40 Orang	38,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	1	0	2	01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	10,966,800	Kab. Pase	Dana Transfer Kecamatan, Jumlah Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pemuda, Wirausaha muda, organisasi pemuda	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	1	0	2	01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan			40 Orang	50,496,800	Kab. Pase	Dana Transfer Kecamatan, Jumlah Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pemuda, Wirausaha muda, organisasi pemuda	40 Orang	56,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
					Penyelenggaraan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota								Meningkatkan Sumber	Peningkatan	Pemuda,			

2	192019	2.019	Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				32 Orang	1,000,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Wirausaha muda, organisasi pemuda	32 Orang	1,100,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19202	2.02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	berpartisipasinya pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	orang	orang	40 orang	<b>151,944,800</b>							40 orang	<b>167,000,000</b>	
2	19202	2.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			1 Dokumen	151,944,800	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	pemuda umur 16 sd 30 tahun		1 Dokumen	167,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	193	03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Jumlah atlet berprestasi Persentase pembinaan cabang olahraga	15 orang 68 %	3 orang 11 %	3 orang 34 %	<b>3,674,697,476</b>							3 orang 34 %	<b>1,982,262,049</b>	
2	19302	2.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	penyelenggaraan kejuaraan olahraga	kali	kali	1 kali	<b>149,928,578</b>							1 kali	<b>99,928,578</b>	
2	19302	2.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	149,928,578	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Atlet, Cabang olahraga, organisasi olahraga		1 Dokumen	149,928,578	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19304	2.04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	terbinanya dan berkembangnya organisasi olahraga	organisasi	organisasi	2 organisasi	<b>1,632,920,000</b>							2 organisasi	<b>1,558,000,000</b>	
2	19304	2.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi			1 Dokumen	1,600,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan	Organisasi olahraga		1 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan

					Keolahragaan						Kelurahan	Hasil						Pariwisata		
2	1	0	2.	0	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2,920,000	Kab. Pasem Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Organisasi olahraga	1 Dokumen	58,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		
2	1	0	2.	0	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	sarana dan prasarana olahraga	unit		unit	3 unit	<b>1,891,848,898</b>					3 unit	<b>324,333,471</b>			
2	1	0	2.	0	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				3 Unit	1,891,848,898	Kab. Pasem Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	3 Unit	324,333,471	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		
2	1	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Gugus Pramuka Aktif (%)	100 %		100 %	100 %	<b>150,000,000</b>					100 %	<b>150,000,000</b>			
2	1	0	2.	0	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	Pembinaan organisasi kepramukaan kabupaten	%		%	100 %	<b>150,000,000</b>					100 %	<b>150,000,000</b>			
2	1	0	2.	0	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	150,000,000	Kab. Pasem Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	1 Organisasi	150,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>						<b>2,310,033,834</b>								<b>1,217,573,395</b>	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Persentasi destinasi wisata yang baik	28.77 %		17 %	21.21 %	<b>1,830,838,000</b>						21.21 %	<b>692,100,000</b>		
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	2.	0	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata</b>	pengelolaan daya tarik wisata	lokasi		lokasi	2 lokasi	<b>544,238,000</b>						2 lokasi	<b>598,100,000</b>		

					<b>Kabupaten/Kota</b>														
3	2	0	2.	0	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	10,093,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	daya tarik wisata kabupaten	1 Lokasi	11,100,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	2	0	2.	0	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	534,145,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	daya tarik wisata kabupaten	1 Lokasi	587,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	2	0	2.	0	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata	lokasi		lokasi	4 lokasi	<b>21,280,000</b>						4 lokasi	<b>23,000,000</b>	
3	2	0	2.	0	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	21,280,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kawasan strategis pariwisata	1 Dokumen	23,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	2	0	2.	0	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	pengelolaan destinasi pariwisata	lokasi		lokasi	1 lokasi	<b>1,265,320,000</b>						1 lokasi	<b>71,000,000</b>	
3	2	0	2.	0	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1,232,500,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Destinasi pariwisata	1 Lokasi	35,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

3	2	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	32,820,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Destinasi pariwisata	1 Laporan	36,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3	2	0	3		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan	35 %		10 %	20 %	<b>132,848,578</b>					20 %	<b>144,000,000</b>		
3	2	0	2.	01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	pelaksanaan promosi sektor pariwisata yang ada di kabupaten	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	<b>132,848,578</b>					5 kegiatan	<b>144,000,000</b>		
3	2	0	2.	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	28,794,920	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Wisatawan nusantara dan mancanegara	1 Dokumen	61,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	2	0	2.	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Laporan	75,593,658	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Wisatawan nusantara dan mancanegara	1 Laporan	82,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	2	0	2.	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata				1 Dokumen	28,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis	Wisatawan nusantara dan mancanegara	1 Dokumen	61,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

					Luar Negeri	Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					Kelurahan	dan Berkeadilan	Pertanian	gara				
3	2	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Jumlah produk ekonomi kreatif yang memperoleh perlindungan Hak Cipta dari HAKI	5 Produk	0 Produk	1 Produk	218,048,578					1 Produk	239,973,395		
3	2	0	2.		<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	produk ekonomi kreatif	buah	buah	1 buah	218,048,578					1 buah	239,973,395		
3	2	0	2.	0	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif			1 Dokumen	4,080,000	Kab. Pase	Dana Transfer Kecamatan-Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Ekonomi kreatif	1 Dokumen	5,560,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	2	0	2.	0	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif			1 Dokumen	15,500,000	Kab. Pase	Dana Transfer Kecamatan-Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Ekonomi kreatif	1 Dokumen	17,050,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
						Jumlah Dokumen							Memperkuat					

3	2	0	2.	0	Perindungan Hasil Kreativitas	Perindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	25,425,000	Kab. Pasej Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Ekonomi kreatif	1 Dokumen	27,850,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	2	0	2.	0	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	18,031,400	Kab. Pasej Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Ekonomi kreatif	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	2	0	2.	1	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	145,012,178	Kab. Pasej Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Ekonomi kreatif	1 Dokumen	159,513,395	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	2	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	100 Komunitas		10 Komunitas	20 Komunitas	<b>128,298,678</b>						20 Komunitas	<b>141,500,000</b>	
3	2	0	2.	01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	partisipasi pelaku ekonomi kreatif	orang		orang	80 orang	<b>128,298,678</b>						80 orang	<b>141,500,000</b>	
3	2	0	2.	0	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				10 Orang	20,000,000	Kab. Pasej Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pelaku ekonomi kreatif	10 Orang	22,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
						Jumlah Orang								Memperkuat					



2	2	0	2.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu	%	%	100 %	<b>64,418,980</b>					100 %	<b>70,860,878</b>		
2	2	0	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah			10 Dokumen	24,506,080	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	10 Dokumen	26,956,688	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	24,387,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	12 Laporan	26,826,250	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	15,525,400	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	2 Laporan	17,077,940	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Presentase kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan		%	100 %	<b>5,512,763,381</b>						100 %	<b>6,064,039,719</b>	
2	2	0	2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	5,192,181,600	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	12 bulan	5,711,399,760	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2	2	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	42,064,684	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	3 Dokumen	46,271,152	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verikasi keuangan SKPD				1 Dokumen	2,828,740	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	1 Dokumen	3,111,614	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD				5 Dokumen	274,198,357	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	5 Dokumen	301,618,193	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan				5 Dokumen	1,165,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	5 Dokumen	1,281,500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD				5 Laporan	325,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	5 Laporan	357,500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	<b>225,431,795</b>						100 %	<b>247,974,974</b>	
2	2	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan				4 Paket	1,401,730	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	4 Paket	1,541,903	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

				Kantor						Grogot	Umum	Dan Berdaya Saing	n Yang Partisipatif					
2	2	0	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatn rumah tangga yang disediain				13 Paket	5,039,320	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	13 Paket	5,543,252	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				33 Paket	63,216,345	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	33 Paket	69,537,979	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket brang cetakn dan penggandaan yang disediakan				4200 Paket	8,064,400	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	4200 Paket	8,064,400	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan perauan perundang undangan yang disediaan				12 bulan/ Dokumen	2,160,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	12 bulan/ Dokumen	2,376,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyeleggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				24 Laporan	45,580,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	24 Laporan	46,138,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	<b>54,731,644</b>						100 %	<b>60,204,808</b>	
					jumlah unit						Kab. Paser,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Pemerint			Dinas

2	2	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				5 Unit	54,731,644	Tanah Grogot, Tanah Grogot	Umum-Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ah tingkat lokal dan nasional	5 Unit	60,204,808	Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	%	100 %	<b>76,210,000</b>							100 %	<b>201,331,000</b>	
2	2	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			100 lembar	1,200,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	100 lembar	1,200,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	2	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	75,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	12 Laporan	200,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	2	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jumlah aset yang tersedia dalam keadaan baik	%	%	100 %	<b>53,672,814</b>							100 %	<b>59,040,095</b>	
2	2	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipeihara dan dibayarkan pajak dan perrijinannya			5 Unit	41,082,814	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	5 Unit	45,191,095	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	2	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan			10 Unit 0 Unit	7,100,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Pemerintah tingkat lokal dan	10 Unit 0 Unit	7,810,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

					Mesin Lainnya yang Dipelihara						Grogot	Umum	Dan Berdaya Saing	n Yang Partisipatif	nasional			n	
2	2	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi			9 Unit	5,490,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah tingkat lokal dan nasional	9 Unit	6,039,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	2	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	persentase perpustakaan yang dibina	3.5 %		1 %	2 %						2 %	<b>439,471,857</b>		
2	2	0	2.	01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kunjungan pemustaka	orang		orang	8950 orang						8950 orang	<b>176,019,199</b>		
2	2	0	2.	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	25,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Perpustakaan (siswa siswi, mahasiswa), masyarakat umum Pemerintah Kabupaten kota sekitar kab. paser dan pemerintah provinsi diluar perusahaan tambang	1 Layanan	28,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
															Anggota Perpustakaan (siswa siswi, mahasiswa)				

2	2	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) Pengelola Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Paser/ Jumlah Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										20 Orang	116,171,499	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	wa), masyarakat umum Pemerintah Kabupaten kota sekitar kab. paser dan pemerintah provinsi diluar kaltim perusahaan tambang	20 Orang	127,788,648	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	2	0	2	0	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten / Kota Melalui Peningkatan Koleksi Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi										3 Dokumen/0 Layanan	Layanan 10,200,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Perpustakaan (siswa siswi, mahasiswa), masyarakat umum Pemerintah Kabupaten kota sekitar kab. paser dan pemerintah provinsi diluar kaltim perusahaan tambang	3 Dokumen/0 Layanan	Layanan 11,220,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan																Anggota Perpustakaan (siswa siswi, mahasiswa), masyarakat				

2	2	0	2.	0	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					20 buku/eksemplar 0 Eksemplar	5,856,600	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	kat umum Pemerintah Kabupaten kota sekitar kab. paser dan pemerintah provinsi diluar kaltim perusahaan tambang	20 buku/eksemplar 0 Eksemplar	6,442,260	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.	1	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Perpustakaan Sekolah SD, SMP, Desa/ Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					25 Data/Laporan 0 Dokumen	18,791,100	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Perpustakaan (siswa siswi, mahasiswa), masyarakat umum Pemerintah Kabupaten kota sekitar kab. paser dan pemerintah provinsi diluar kaltim perusahaan tambang	25 Data/Laporan 0 Dokumen	20,670,210	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.	2	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Nilai budaya baca	%	%	7.35 %	<b>223,046,127</b>								7.35 %	<b>245,350,739</b>	
																	Anggota Perpustakaan (siswa siswi,			

2	2	0	2	0	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	0 Lokus 40 laporan/ Lokus	167,720,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	mahasiswa), masyarakat umum Pemerintah Kabupaten kota sekitar kab. paser dan pemerintah provinsi diluar kaltim perusahaan tambang	0 Lokus 40 laporan/ Lokus	184,492,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2	0	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Lomba/ Jumlah Orang yang Mendapatkan PenghargaanGerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	1 laporan/ 0 Orang	33,759,370	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Perpustakaan (siswa siswi, mahasiswa), masyarakat umum Pemerintah Kabupaten kota sekitar kab. paser dan pemerintah provinsi diluar kaltim perusahaan tambang	1 laporan/ 0 Orang	37,135,307	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
							Jumlah orang						Anggota Perpustakaan (siswa siswi, mahasiswa),				

2	2	0	2	0	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang terpilih menjadi Duta Baca Pelajar di Wilayah Kabupaten Paser/ Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya			2 Orang	21,566,757	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	masyarakat umum Pemerintah Kabupaten kota sekitar kab. paser dan pemerintah provinsi diluar kaltim perusahaan tambang	2 Orang	23,723,432	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	3	3		<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	30 Naskah	2 Naskah	5 Naskah	<b>6,595,000</b>						5 Naskah	<b>7,254,500</b>	
2	2	0	3	01	2	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	dokumen	dokumen	2 dokumen	<b>6,595,000</b>						2 dokumen	<b>7,254,500</b>	
2	2	0	3	01	0	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			2 Dokumen	<b>6,595,000</b>	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Anggota Perpustakaan (siswa siswi, mahasiswa), masyarakat umum Pemerintah Kabupaten kota sekitar kab. paser dan pemerintah	2 Dokumen	<b>7,254,500</b>	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

																	ah provinsi diluar kaltim perusahaan tambang			
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						<b>324,930,490</b>								<b>357,423,539</b>	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	80 %		38 %	50 %	<b>131,751,600</b>							50 %	<b>144,926,760</b>	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase arsip yang telah dibuatkan daftar arsip	%		%	100 %	<b>46,725,000</b>						100 %	<b>51,397,500</b>	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kearsipan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal dan pada Perangkat Daerah/ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			20 PD/Lap	<b>46,725,000</b>	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	masyarakat umum Pemerintah Kabupaten kota sekitar kab. paser dan pemerintah provinsi diluar kaltim perusahaan tambang	20 PD/Lap	<b>51,397,500</b>	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%		%	100 %	<b>18,381,600</b>					100 %	<b>20,219,760</b>	
							Jumlah dokumen										masyarakat umum Pemerintah Kabupaten			



2	2	0	2.	<b>Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	%		%	100 %	<b>16,915,000</b>						100 %	<b>18,606,500</b>	
2	2	0	2.	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan/ Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				20 Arsip/ Berkas	16,915,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kearsipan	20 Arsip/ Berkas	18,606,500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.	<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</b>	tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	%		%	100 %	<b>64,466,680</b>						100 %	<b>70,913,348</b>	
2	2	0	2.	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip statis/Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				100 Arsip	64,466,680	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kearsipan	100 Arsip	70,913,348	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.	<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabungkan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK	%		%	100 %	<b>36,436,200</b>						100 %	<b>40,079,820</b>	

2	2	0	2.		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis/ Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			50 Arsip/ Daftar	23,115,200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	masyarakat umum Pemerintah Kabupaten kota sekitar kab. paser dan pemerintah provinsi diluar kaltim perusahaan tambang	50 Arsip/ Daftar	25,426,720	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis/ Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			100 Arsip	13,321,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	masyarakat umum Pemerintah Kabupaten kota sekitar kab. paser dan pemerintah provinsi diluar kaltim perusahaan tambang	100 Arsip	14,653,100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2	0	2.		<b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>	Alih Media Kabupaten/Kota tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	%	%	100 %	<b>26,025,450</b>						100 %	<b>28,627,995</b>	
						Jumlah arsip									masyarakat umum Pemerintah			



2	2	0	2	0	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	untuk mengelola arsip/ Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				42 OPD/Ar	2,919,160	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	en kota sekitar kab. paser dan pemerintah provinsi diluar kaltim perusahaan tambang	42 OPD/Ar	2,211,076	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	
3	2	5			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							<b>14,418,901,257</b>									<b>20,638,352,466</b>	
3	2	0	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>5,618,815,567</b>							72 %	<b>6,532,831,466</b>			
3	2	0	2	01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	%		%	100 %	<b>181,621,000</b>							100 %	<b>334,112,000</b>			
3	2	0	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	8,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	ASN Dinas Perikanan	3 Dokumen	8,000,000	Dinas Perikanan		
3	2	0	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	3,500,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	ASN Dinas Perikanan	2 Dokumen	3,500,000	Dinas Perikanan		
						Jumlah Dokumen							Kab.		Memperkuat Ketahanan	Peningkatan						

3	2	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2,000,000	Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	ASN Dinas Perikanan	2 Dokumen	2,000,000	Dinas Perikanan
3	2	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3,121,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	8,612,000	Dinas Perikanan
3	2	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	85,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	ASN Dinas Perikanan	4 Laporan	160,000,000	Dinas Perikanan
3	2	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan Dinas Perikanan	%	%	100 %		<b>4,935,064,100</b>						100 %	<b>5,648,664,466</b>	
3	2	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4,851,459,100	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	ASN Dinas Perikanan	33 Orang/bulan	5,548,664,466	Dinas Perikanan
					Pelaksanaan							Kab.	Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Peningkatan				



3	2	0	2.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jasa/pelayanan untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	Jenis	2 Jenis	<b>204,145,600</b>					2 Jenis	<b>244,555,000</b>		
3	2	0	2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	900,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	900,000	Dinas Perikanan
3	2	0	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	203,245,600	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	243,655,000	Dinas Perikanan
3	2	0	2.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Jenis	Jenis	4 Jenis	<b>49,830,000</b>					4 Jenis	<b>53,500,000</b>		
3	2	0	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	42,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	ASN Dinas Perikanan	3 Unit	45,000,000	Dinas Perikanan
3	2	0	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			11 Unit	7,830,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	ASN Dinas Perikanan	11 Unit	8,500,000	Dinas Perikanan

3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0.6 %		0.1 %	0.6 %	<b>5,009,100,000</b>					0.6 %	<b>9,963,825,000</b>	
3	2	0	2.01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah wilayah pengelolaan penangkapan ikan di wilayah PUD	Kecamatan		Kecamatan	5 Kecamatan	<b>4,944,100,000</b>					5 Kecamatan	<b>9,592,125,000</b>	
3	2	0	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Dokumen	50,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Nelayan kecil	5 Dokumen	92,125,000	Dinas Perikanan
3	2	0	2.03	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				403 Unit	4,894,100,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Nelayan kecil	403 Unit	9,500,000,000	Dinas Perikanan
3	2	0	2.02		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kelompok nelayan kecil yang diberdayakan	Kelompok		Kelompok	15 Kelompok	<b>50,000,000</b>					15 Kelompok	<b>246,700,000</b>	
3	2	0	2.01		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				40 Orang	35,000,000	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Nelayan kecil	40 Orang	80,000,000	Dinas Perikanan



3	2	0	2.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				3 Kelompok	18,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pembudayaan ikan kecil	3 Kelompok	18,000,000	Dinas Perikanan
3	2	0	2.	<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah rekomendasi perizinan bagi pembudidaya ikan	Rekomendasi		Rekomendasi	10 Rekomendasi	16,000,000						10 Rekomendasi	16,000,000	
3	2	0	2.	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				4 Rekomendasi	16,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pembudayaan ikan kecil	4 Rekomendasi	16,000,000	Dinas Perikanan
3	2	0	2.	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	Jumlah wilayah pengelolaan pembudidayaan ikan	Kecamatan		Kecamatan	10 Kecamatan	2,649,891,000						10 Kecamatan	2,951,359,000	
3	2	0	2.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	18,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pembudayaan ikan kecil	5 Dokumen	17,125,000	Dinas Perikanan
3	2	0	2.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah				292 Unit	2,538,891,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Paser Tanjung	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian Peningkatan Perekonomi	Pembudayaan ikan kecil	292 Unit	2,760,874,000	Dinas Perikanan

				(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota					Harapan, Tanjung Aru	Hasil		an Yang Mandiri Berbasis Pertanian					
3	2	0	2	0	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			3 Dokumen	30,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pembudidayaan ikan kecil	3 Dokumen	56,680,000		Dinas Perikanan
3	2	0	2	0	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			20 Orang	33,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pembudidayaan ikan kecil	20 Orang	56,680,000		Dinas Perikanan
3	2	0	0	5	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan	45 %		35 %	45 %	<b>45,000,000</b>				45 %	<b>60,000,000</b>		
3	2	0	2	0	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	persen		persen	55 persen	<b>45,000,000</b>				55 persen	<b>60,000,000</b>		
	2	0	2	0	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai,					Kab. Paser Semua	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Peningkatan Perekonomian Yang	Pelaku usaha perikanan			Dinas

3	5	5	01	1	Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				4 Dokumen	45,000,000	Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandiri Berbasis Pertanian	n di wilayah PUD	4 Dokumen	60,000,000	Perikanan
3	2	0	6		<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan	3.7 %	0.1 %	0.9 %		<b>1,044,094,690</b>						0.9 %	<b>875,672,000</b>	
3	2	0	6	2.01	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	Jumlah rekomendasi izin usaha pengolahan hasil perikanan	Rekomendasi	Rekomendasi	2 Rekomendasi		<b>80,239,900</b>						2 Rekomendasi	<b>131,306,000</b>	
3	2	0	6	2.011	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			5 Dokumen		<b>80,239,900</b>	Kab. Pasuruan	Dana Transfer Kecamatan Semua Kelurahan		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan	5 Dokumen	<b>131,306,000</b>	Dinas Perikanan
3	2	0	6	2.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	Jumlah pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan keamanan hasil olahan	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha		<b>93,989,840</b>						2 Pelaku Usaha	<b>146,310,000</b>	
					Pelaksanaan Bimbingan dan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan									Memperkuat Ketahanan	Pengola			



3	2	0		<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>15,941,047,341</b>					72 %	<b>15,930,747,000</b>	
3	2	0	2.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik	%		%	100 %	<b>195,655,000</b>					100 %	<b>212,000,000</b>	
3	2	0	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 3 Dokumen	164,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Dinas	0 Dokumen 3 Dokumen	170,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	935,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Dinas	1 Laporan	2,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Dinas	4 Laporan	40,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat</b>	persentasi PD yang menyusun laporan	%		%	100 %	<b>15,142,747,000</b>					100 %	<b>15,142,747,000</b>	

				Daerah	keuangan tepat waktu												
3	2	0	2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/bulan	15,072,747,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	ASN	111 Orang/bulan	15,072,747,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200 Dokumen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	ASN	200 Dokumen	70,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	%		%	100 %	<b>321,615,500</b>					100 %	<b>269,000,000</b>	
3	2	0	2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas	4 Paket	1,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas	5 Paket	30,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas	3 Paket	70,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas	3 Paket	25,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
			2.	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan						Dana Transfer		Peningkatan Perekonomi				Dinas



3	2	0	2.	0	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	58,729,841		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Aset Dinas	1 Unit	70,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Aset Dinas	5 Unit	3,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Aset Dinas	2 Unit	1,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yg dimanfaatkan	100 %		100 %	100 %	<b>3,539,120,000</b>						100 %	<b>450,000,000</b>	
3	2	0	2.	0	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	%		%	100 %	<b>3,539,120,000</b>						100 %	<b>450,000,000</b>	
3	2	0	2.	0	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				40 Laporan	3,383,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	0	40 Laporan	220,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2.	0	Pendampingan Penggunaan Sarana	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana				40 Laporan	15,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri	0	40 Laporan	230,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan

					Pendukung Pertanian	Pendukung Pertanian						Hasil	n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Berbasis Pertanian			Holtikultura		
3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Presentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %		100 %	100 %	<b>54,036,120,000</b>					100 %	<b>455,000,000</b>		
3	2	0	2.		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Persentasi pengembangan prasarana pertanian	%		%	100 %	<b>47,600,000</b>					100 %	<b>100,000,000</b>		
3	2	0	2.	0	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	37,600,000			Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2.	0	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	10,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2.	0	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian	Unit		Unit	0 Unit	<b>53,988,520,000</b>					0 Unit	<b>355,000,000</b>		
3	2	0	2.	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara				1 Unit	2,462,600,000			Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	1 Unit	100,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
	2	0	2.	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jumlah Embung Pertanian yang					1,705,000,0			Dana Transfer					Dinas Tanaman



3	2	0	2	0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan					10 Ha	149,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	0	10 Ha	130,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2	0	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan					2 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	0	2 Laporan	20,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	7		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	68 %		50 %	62 %		<b>1,815,000,000</b>						62 %	<b>1,050,000,000</b>	
3	2	0	7	2	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	terlaksananya penyuluhan pertanian	%		%	100 %		<b>1,815,000,000</b>						100 %	<b>1,050,000,000</b>	
3	2	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					5 Unit	214,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	0	5 Unit	250,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2	0	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					5 Unit	1,155,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	0	5 Unit	700,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	2	0	2	0	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana					7 Unit	444,800,000		Dana Transfer Umum-		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri	0	7 Unit	100,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan

				Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian													Dana Bagi Hasil			Berbasis Pertanian					Hortikultura						
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																												
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>												<b>266,130,790</b>															<b>250,000,000</b>	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yg dimanfaatkan	100 %			100 %	100 %	<b>266,130,790</b>												100 %	<b>250,000,000</b>							
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Persentasi pengawasan penggunaan sarana pertanian	%			%	100 %	<b>266,130,790</b>												100 %	<b>250,000,000</b>							
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	<b>266,130,790</b>											UPTD dan Penangkar	1 Laporan	<b>250,000,000</b>	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura						
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																												
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>												<b>20,167,153,156</b>														<b>17,454,000,000</b>		
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %			70 %	72 %	<b>9,830,505,162</b>												72 %	<b>10,769,000,000</b>							
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	persen			persen	100 persen	<b>101,538,794</b>												100 persen	<b>125,000,000</b>							
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	<b>88,400,000</b>											Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan	5 Dokumen	<b>100,000,000</b>	Dinas Perkebunan dan Peternakan			



3	2	0	0	<b>Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	kegiatan administrasi kepegawaian	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>108,969,397</b>					12 Bulan	<b>120,000,000</b>		
3	2	0	2.0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	108,969,397		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan	2 Dokumen	20,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
3	2	0	2.0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum di dinas	persen		persen	100 persen	<b>115,600,000</b>					100 persen	<b>250,000,000</b>		
3	2	0	2.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	20,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan	5 Paket	25,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
3	2	0	2.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan	0 Paket	5,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
3	2	0	2.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan	25 Laporan	20,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
3	2	0	2.0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	<b>39,537,774</b>					100 persen	<b>51,500,000</b>		
3	2	0	2.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan	1 Laporan	1,500,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan



3	2	0	2.	0	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomi an Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kelompo k Tani Pekebun	12 Laporan	50,000,000	Dinas Perkebunan dan Pernakan
3	2	0	2.	0	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	58,938,794		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomi an Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kelompo k Tani Pekebun	12 Laporan	100,000,000	Dinas Perkebunan dan Pernakan
3	2	0	2.	0	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	persen	persen	100 persen		<b>469,400,000</b>						100 persen	<b>450,000,000</b>	
3	2	0	2.	0	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tan aman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	469,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomi an Yang Mandiri Berbasis Pertanian Peningkatan Perekonomi an Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kelompo k Tani Pernak	12 Laporan	450,000,000	Dinas Perkebunan dan Pernakan
3	2	0	2.	0	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengawasan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak	persen	persen	100 persen		<b>99,400,000</b>						100 persen	<b>100,000,000</b>	
			2.		Pengawasan Produksi	Jumlah Pengawasan Produksi							Dana Transfer		Peningkatan Perekonomi	Kelompo			Dinas

327000	000	000	Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				12 Laporan	9,400,000		Umum-Dana Bagi Hasil		an Yang Mandiri Berbasis Pertanian	k Tani Peternak	12 Laporan	10,000,000	Perkebunan dan Peternakan
32702	206		<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	Persentase Kegiatan penyediaan Bibit Ternak yang dilaksanakan	persen		persen	100 persen	<b>7,553,015,230</b>						100 persen	<b>5,000,000,000</b>	
32702	206	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				100 Ekor	7,553,015,230		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kelompok Tani Peternak	100 Ekor	5,000,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
32703			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	100 %		100 %	100 %	<b>1,493,338,794</b>						100 %	<b>265,000,000</b>	
32703	201		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	persen		persen	100 persen	<b>1,022,738,794</b>						100 persen	<b>165,000,000</b>	
32703	201	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				12 Dokumen	973,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kelompok Tani Pekebun	12 Dokumen	100,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Koordinasi dan	Jumlah Koordinasi dan							Dana		Peningkatan				

3	2	0	2.	0	Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				25 Laporan	48,938,794		Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kelompok Tani Pekebun	25 Laporan	65,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
3	2	0	2.	0	<b>Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum</b>	Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang tersedia	persen		persen	100 persen	470,600,000						100 persen	100,000,000		
3	2	0	2.	0	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan				25 Ha	470,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kelompok Tani Peternak	25 Ha	100,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
3	2	0	2.	0	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %		50 %	60 %	458,416,382						60 %	320,000,000		
3	2	0	2.	0	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya kegiatan penjaminan kesehatan hewan dalam daerah kab/kota	persen		persen	100 persen	273,938,794						100 persen	120,000,000		
3	2	0	2.	0	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				12 Laporan	273,938,794		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	0	12 Laporan	120,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
3	2	0	2.	0	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengawasan produk hewan	persen		persen	100 persen	82,938,794							100 persen	100,000,000	
			2.		Penilaian Risiko	Jumlah Penilaian Risiko							Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Peningkatan Perekonomi	Kelompo			Dinas	

3	2	0	0	0	Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan				12 Laporan	82,938,794	Umum-Dana Bagi Hasil	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	an Yang Mandiri Berbasis Pertanian	k Tani Peternak	12 Laporan	100,000,000	Perkebunan dan Peternakan
3	2	0	2	0	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Persentase terlaksananya pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	persen		persen	100 persen	<b>101,538,794</b>					100 persen	<b>100,000,000</b>	
3	2	0	2	0	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	47,738,794	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Unit Usaha Hewan	12 Laporan	85,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	2	0	2	0	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	53,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Unit Usaha Hewan	12 Laporan	65,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	2	0	0	0	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	100 %		100 %	100 %	<b>77,738,794</b>					100 %	<b>200,000,000</b>	
3	2	0	2	0	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya kegiatan pengendalian gangguan tanaman perkebunan	persen		persen	100 persen	<b>77,738,794</b>					100 persen	<b>200,000,000</b>	
	2	0	2	0	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan						Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Peningkatan Perekonomian Yang	Kelompok		200,000,00	Dinas Perkebunan



3	2	0	2.	0	2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				12 Dokumen	486,438,449		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kelompok Tani Pekebun	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																				
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>																	<b>429,286,600</b>	<b>500,000,000</b>	
3	2	0	2.	0	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Persentase sarana pertanian (perkebunan dan peternakan) yang dimanfaatkan	100 %		100 %	100 %	429,286,600						100 %	500,000,000			
3	2	0	2.	01	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terlaksana	persen		persen	100 persen	429,286,600						100 persen	500,000,000			
3	2	0	2.	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	429,286,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kelompok Tani Peternak	12 Laporan	500,000,000	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																				
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>																	<b>150,749,883</b>	<b>155,000,000</b>	
3	2	0	2.	04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %		50 %	60 %	150,749,883						60 %	155,000,000			
3	2	0	2.	03	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah</b>	Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	persen		persen	100 persen	150,749,883						100 persen	155,000,000			



7	4	3	2	Medik Veteriner	Jasa Medik Veteriner													Dana Bagi Hasil			Mandiri Berbasis Pertanian	Peternak					dan Peternakan
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																							
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>																							
2	7															<b>103,764,000</b>											<b>120,000,000</b>
3	2	0	4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %		50 %	60 %	<b>103,764,000</b>														60 %	<b>120,000,000</b>		
3	2	0	4	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	persen		persen	100 persen	<b>103,764,000</b>														100 persen	<b>120,000,000</b>		
3	2	0	4	2.03	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			12 Laporan	<b>103,764,000</b>								Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Kelompok Tani Peternak		12 Laporan	<b>120,000,000</b>		Dinas Perkebunan dan Peternakan	
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																							
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>																							
2	7															<b>75,504,550</b>											<b>145,000,000</b>
3	2	0	4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %		50 %	60 %	<b>75,504,550</b>														60 %	<b>145,000,000</b>		
3	2	0	4	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	persen		persen	100 persen	<b>75,504,550</b>														100 persen	<b>145,000,000</b>		
3	2	0	4	2.03	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			12 Laporan	<b>75,504,550</b>								Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis	Kelompok Tani Peternak		12 Laporan	<b>145,000,000</b>		Dinas Perkebunan dan Peternakan	



			2	Rumah Potong Hewan	Direhabilitasi dan Dipelihara								Dana Bagi Hasil		Berbasis Pertanian			Peternakan		
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>							<b>10,757,087,753</b>								<b>11,399,000,000</b>	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>10,192,087,753</b>						72 %	<b>11,154,000,000</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	indeks kepuasan pelayanan sekretariat	persen		persen	72 persen	<b>95,195,919</b>						72 persen	<b>70,000,000</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2.</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	<b>17,684,000</b>			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	RKA Perangkat daerah	0 Dokumen	<b>15,000,000</b>	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	<b>32,244,719</b>			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	RKA Perangkat daerah	2 Dokumen	<b>15,000,000</b>	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				1 Laporan	<b>22,020,200</b>			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	RKA Perangkat daerah	1 Laporan	<b>15,000,000</b>	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan

					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												Menengah		
2	1	0	2.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	23,247,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	RKA Perangkat daerah	1 Laporan	25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	1	0	2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan		persen		persen	90 persen	<b>9,742,826,424</b>					90 persen	<b>10,700,000,000</b>		
2	1	0	2.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	9,086,094,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan	60 Orang/bulan	10,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	0	2.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	656,731,824		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan	12 Dokumen	700,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan		bulan		bulan	12 bulan	<b>290,743,960</b>						12 bulan	<b>315,000,000</b>	
2	1	0	2.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				23 Paket	58,389,960		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Pegawai disperindagkop	23 Paket	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
														Meningkatka					Dinas Perindustria





2	1	0	2.	0	Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Unit Usaha	28,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	koperasi	10 Unit Usaha	30,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	0	2.	0	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				10 Unit Usaha	26,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	koperasi	10 Unit Usaha	30,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Rata-rata omset per koperasi	270 Juta rupiah		219 Juta rupiah	257 Juta rupiah	<b>55,000,000</b>						257 Juta rupiah	<b>60,000,000</b>	
2	1	0	2.	0	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Peningkatan Omzet Koperasi	persen		persen	5 persen	<b>55,000,000</b>						5 persen	<b>60,000,000</b>	
2	1	0	2.	0	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan ukm dan kewirausahaan perkoperasian Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang 0 Unit Usaha	55,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Meningkatkannya Pertumbuhan dan Kualitas Koperasi dan UKM	30 Orang 0 Unit Usaha	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,</b>	Persentase peningkatan jumlah UMKM	25 %		0 %	5 %	<b>55,000,000</b>						5 %	<b>70,000,000</b>	



2	1	0		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	peningkatan jumlah UMKM yang naik kelas	0.25 %		0 %	0.05 %	<b>400,000,000</b>						0.05 %	<b>55,000,000</b>	
2	1	0	2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil	ukm		ukm	10 ukm	<b>400,000,000</b>						10 ukm	<b>55,000,000</b>	
2	1	0	2.011	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				50 Unit Usaha	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	pelaku UKM	50 Unit Usaha	55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						<b>9,143,613,822</b>							<b>6,648,000,000</b>	
3	3	0	2	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	250 rekomendasi		50 rekomendasi	50 rekomendasi	<b>54,999,800</b>						50 rekomendasi	<b>87,000,000</b>	
3	3	0	2.01	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	rekomendasi perijinan	rekom		rekom	50 rekomendasi	<b>13,476,800</b>						50 rekomendasi	<b>32,000,000</b>	
3	3	0	2.011	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui				10 Dokumen	<b>13,476,800</b>		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis	pelaku usaha	10 Dokumen	<b>32,000,000</b>	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil

					Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						dan Berkeadilan	Pertanian				dan Menengah	
3	3	0	2	2.06	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	rekomendasi perinjinan	rekom		rekom	50 rekom	<b>41,523,000</b>					50 rekom	<b>55,000,000</b>	
3	3	0	2	2.061	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				5 Laporan	41,523,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	pelaku usaha	5 Laporan	55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	3	0	3		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase sarana distribusi dan fasilitas yang dibangun/direhab	20 %		1 %	4 %	<b>8,538,494,988</b>					4 %	<b>6,060,000,000</b>	
3	3	0	3	2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	pasar		pasar	5 pasar	<b>2,655,696,488</b>					5 pasar	<b>15,000,000</b>	
3	3	0	3	2.011	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				9 Unit	2,655,696,488	Dana Perimbangan		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	sarana dan prasarana	9 Unit	15,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3	3	0	3	2.	0	2	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana pasar distribusi perdagangan	pasar	5 pasar	<b>5,882,798,500</b>					5 pasar	<b>6,045,000,000</b>			
3	3	0	3	2.	0	2	0	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		12 Dokumen	<b>41,303,900</b>		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	pasar rakyat	12 Dokumen	<b>45,000,000</b>	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	3	0	3	2.	0	2	0	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		12 Dokumen	<b>5,841,494,600</b>		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	pasar rakyat	12 Dokumen	<b>6,000,000,000</b>	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	3	0	4				<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	60 %	50 %	50 %	<b>69,999,900</b>						50 %	<b>109,000,000</b>	
3	3	0	4	2.	0	2	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya pendataan dan informasi harga dan stock bapak dan bapakting	pelaku usaha	pelaku usaha	30 pelaku usaha	<b>50,000,000</b>						30 pelaku usaha	<b>77,000,000</b>	
							Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan						Memperkuat Ketahanan Ekonomi		Peningkatan				Dinas Perindustrian,

3	304	2.01	Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	15,455,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	stok Bapak	12 Laporan	15,000,000	Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	304	2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				240 Laporan	1,545,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	stok Bapak	240 Laporan	1,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	304	2.03	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan masyarakat	kios		kios	32 kios	<b>19,999,900</b>						32 kios	<b>32,000,000</b>	
3	304	2.03	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				32 Dokumen	19,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	pelaku usaha	32 Dokumen	19,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	305		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Persentase peningkatan produk lokal yang di ekspor	100 %		0 %	20 %	<b>34,998,000</b>						20 %	<b>62,000,000</b>	
3	302		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk</b>	Jumlah Pelaku Usaha Produk	pelaku		pelaku	3 pelaku	<b>34,998,000</b>						3 pelaku	<b>62,000,000</b>	

0	5	01	<b>Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ekspor Unggulan yang Dibina	usaha		usaha	usaha	0					usaha			
3	3	0	2.	0	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina		5 Pelaku Usaha	19,998,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	pelaku usaha	5 Pelaku Usaha	32,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	3	0	2.	0	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina		10 Pelaku Usaha	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	pelaku usaha	10 Pelaku Usaha	30,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	3	0			<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase jumlah UTTP yang ditera/terulang	100 %	50 %	100 %	<b>390,121,134</b>					100 %	<b>265,000,000</b>	
3	3	0	2.	0	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Terlaksananya Tera, Tera Ulang alat UTTP	kecamatan	kecamatan	6 kecamatan	<b>390,121,134</b>					6 kecamatan	<b>265,000,000</b>	
3	3	0	2.	0	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		300 Unit	290,121,134		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	UTTP yang ditera	300 Unit	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	3	0	2.	0	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Jumlah Pelaku Usaha		0 Orang 250 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis	UTTP yang ditera	0 Orang 250 Orang	65,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil

															Pertanian				dan Menengah		
3	3	0	0																		
					<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase peningkatan Produk UMKM yang dipasarkan/dipromosikan	20%				0 %	12 %	<b>55,000,000</b>					12 %	<b>65,000,000</b>		
3	3	0	0	2.	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Meningkatnya pelaksanaan promosi dan penggunaan produk lokal	kegiatan				kegiatan	1 kegiatan	<b>55,000,000</b>					1 kegiatan	<b>65,000,000</b>		
3	3	0	0	2.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						20 UMKM	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	produk UMKM	20 UMKM	65,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	3	1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>							<b>1,302,400,000</b>								<b>740,000,000</b>	
3	3	1	0		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian	2,40 %				2,10 %	2,40 %	<b>1,252,400,000</b>						2,40 %	<b>675,000,000</b>	
3	3	1	0	2.	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan industri	dokumen				dokumen	2 dokumen	<b>1,252,400,000</b>						2 dokumen	<b>675,000,000</b>	
3	3	1	0	2.																	
3	3	1	0	2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						1 Dokumen	602,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	pembangunan industri	1 Dokumen	65,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3	31	02	2015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				10 Dokumen	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	pembangunan industri	10 Dokumen	550,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	02	2016	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				5 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	pembangunan industri	5 Dokumen	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	03		<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	Persentase pemutahiran data IKM	60 %		40 %	50 %	<b>50,000,000</b>						50 %	<b>65,000,000</b>	
3	31	03	201	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah IKM yang Difasilitasi Perizinannya	ikm		ikm	5 ikm	<b>50,000,000</b>						5 ikm	<b>65,000,000</b>	
3	31	03	202	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan				5 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	pelaku usaha	5 Dokumen	65,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan



1										91													
4	0	0	0		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Nilai LPPD Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	0	Persentase	0	Persentase	100 Persentase	2,750	1,120,922,191						2,750	100 Persentase	0		
4	0	0	0	2.01	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Wilayah yang terfasilitasi	Persen		Persen	100 Persen		1,120,922,191							100 Persen		0		
4	0	0	0	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					23 Dokumen	546,575,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat Daerah,		23 Dokumen		0	Sekretariat Daerah
4	0	0	0	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					9 Dokumen	284,520,701	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat Daerah,		9 Dokumen		0	Sekretariat Daerah
4	0	0	0	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					3 Dokumen	289,826,490	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah,		3 Dokumen		0	Sekretariat Daerah
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																		
4	0				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>												<b>479,958,57</b>				<b>479,958,57</b>		







4	0	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>6,693,886,005</b>					100 Persen	<b>7,028,580,306</b>	
4	0	0	2.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						87,472,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah		91,846,104	Sekretariat Daerah
4	0	0	2.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						288,938,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah		303,385,425	Sekretariat Daerah
4	0	0	2.0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						53,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah		56,091,000	Sekretariat Daerah
4	0	0	2.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1,250,322,375		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah		1,312,838,494	Sekretariat Daerah
4	0	0	2.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						47,008,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah		49,358,400	Sekretariat Daerah
4	0	0	2.0	Fasilitas Kunjungan Tamu						3,337,079,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang	Sekretariat Daerah		3,503,933,633	Sekretariat Daerah

4	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1,521,645,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Partisipatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah		1,597,727,250	Sekretariat Daerah	
4	0	0	2.	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						108,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah		113,400,000	Sekretariat Daerah	
4	0	0	2.	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>99,846,800</b>							100 Persen	<b>104,839,140</b>	
4	0	0	2.	0	Pengadaan Mebel						99,846,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah		104,839,140	Sekretariat Daerah	
4	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	<b>9,648,286,000</b>							100 Persen	<b>10,130,700,300</b>	
4	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah		10,500,000	Sekretariat Daerah	
	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi,						1,788,286,0		Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretari		1,877,700,30	Sekretariat	

4	1	1	0	2	Sumber Daya Air dan Listrik						00		Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	at Daerah		0	Daerah
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7,850,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah		8,242,500,000	Sekretariat Daerah
4	0	0	2	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan BMD	Persen		Persen	100 Persen	<b>2,589,669,251</b>						100 Persen	<b>2,719,152,714</b>	
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						357,969,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah		375,867,450	Sekretariat Daerah
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						892,716,251		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah		937,352,064	Sekretariat Daerah
4	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1,338,984,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah		1,405,933,200	Sekretariat Daerah
4	0	0	2	0	<b>Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah</b>	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,815,200,000</b>						100 Persen	<b>4,005,960,000</b>	



4	0	0	2.	0	0	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100 Dokumen	4.514,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat daerah	100 Dokumen	4.514,290,000	Sekretariat Daerah
4	0	0	2.	0	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	15 Dokumen	700,992,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat daerah	15 Dokumen	700,992,000	Sekretariat Daerah
4			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
4	0	1				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>260,860,429</b>				<b>313,032,000</b>	
			<b>PROGRAM</b>			Nilai LPPD	Persentase Perumusan							

4	0	0		<b>PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	0 Persen		0 Persen	2.750 100 Persen	<b>260,860,429</b>						2.750 100 Persen	<b>313,032,000</b>			
4	0	0	2.004	<b>Fasilitas Kerja Sama Daerah</b>	Cakupan Kerjasama Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>260,860,429</b>						100 Persen	<b>313,032,000</b>			
4	0	0	2.004	01	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri			30 Dokumen	122,910,029		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	30 Dokumen	159,492,000	Sekretariat Daerah		
4	0	0	2.004	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			30 Laporan	127,950,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	30 Laporan	158,540,000	Sekretariat Daerah		
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
<b>4</b>	<b>0</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>258,140,554</b>									<b>800,000,000</b>	
4	0	0	03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase kebijakan prioritas Perekonomian dan Pembangunan yang dituangkan dalam produk hukum daerah	100 %		100 %	100 %	<b>258,140,554</b>						100 %	<b>800,000,000</b>			
4	0	0	2.001	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	Persen		Persen	100 Persen	<b>258,140,554</b>						100 Persen	<b>800,000,000</b>			
4	0	0	2.001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi			20 Dokumen	14,140,000		Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui	Sekretariat Daerah	20 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah		



4	0	0	2.	0	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah					2 Dokumen	187,235,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sekretariat Daerah	2 Dokumen	187,235,000	Sekretariat Daerah				
4	0	0	2.	0	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					12 Laporan	184,913,759		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	184,913,759	Sekretariat Daerah				
4	0	0	2.	0	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					12 Laporan	146,618,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	146,618,000	Sekretariat Daerah				
<b>4</b>					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																			
4	0				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>										<b>268,632,874</b>								<b>185,496,157</b>	
4	0	0			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen		<b>268,632,874</b>							100 Persen	<b>185,496,157</b>				
4	0	0	2.	0	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Persen		Persen	100 Persen		<b>268,632,874</b>							100 Persen	<b>185,496,157</b>				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan								Dana	Memperkuat Ketahanan	Peningkatan								

4	0	0	2.	0	Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				30 Dokumen	65,591,874	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Sekretariat Daerah	30 Dokumen	63,151,057	Sekretariat Daerah	
4	0	0	2.	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				25 Dokumen	76,342,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	25 Dokumen	60,976,200	Sekretariat Daerah	
4	0	0	2.	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				30 Dokumen	86,699,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	30 Dokumen	61,368,900	Sekretariat Daerah	
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4	0				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>1,443,235,958</b>						<b>1,650,000,000</b>	
					<b>PROGRAM PENUNJANG</b>														

4	0	0		<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.	Nilai Indeks		Nilai Indeks	72 Nilai Indeks	<b>1,443,235,958</b>					72 Nilai Indeks	<b>1,650,000,000</b>			
4	0	0	2.	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,443,235,958</b>					100 Persen	<b>1,650,000,000</b>			
4	0	0	2.0	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	521,265,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	600,000,000	Sekretariat Daerah		
4	0	0	2.0	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				36 Laporan	408,326,058	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	36 Laporan	500,000,000	Sekretariat Daerah		
4	0	0	2.0	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	513,644,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	12 Laporan	550,000,000	Sekretariat Daerah		
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
4	0			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								<b>26,920,175,155</b>						<b>28,236,123,413</b>	
4	0	0		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.	Nilai Indeks		Nilai Indeks	72 Nilai Indeks	<b>26,920,175,155</b>					72 Nilai Indeks	<b>28,236,123,413</b>			
4	0	0	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>231,355,980</b>					100 Persen	<b>242,923,779</b>			

4	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	99,916,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	6 Dokumen	99,912,304	Sekretariat Daerah	
4	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	65,471,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	12 Dokumen	65,745,075	Sekretariat Daerah	
4	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	65,968,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	5 Laporan	69,266,400	Sekretariat Daerah	
4	0	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>25,505,688,925</b>							100 Persen	<b>26,780,973,371</b>	
4	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2268 Orang	25,092,540,405		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	2268 Orang	26,347,167,425	Sekretariat Daerah	
					Pelaksanaan								Dana		Peningkatan Kualitas					

4	0	0	2.	0	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	394,723,520		Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	12 Dokumen	414,459,696	Sekretariat Daerah
4	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	18,425,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Daerah	2 Laporan	19,346,250	Sekretariat Daerah
4	0	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,183,130,250</b>						100 Persen	<b>1,212,226,263</b>	
4	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				28 Orang	292,440,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang	307,062,263	Sekretariat Daerah
4	0	0	2.	0	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	88,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Paket	93,009,000	Sekretariat Daerah
4	0	0	2.	0	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala				8 Orang	200,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala	8 Orang	210,945,000	Sekretariat Daerah

				Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Umum	i Pelayanan Publik	n Yang Partisipatif	Daerah										
4	0	0	2.	0	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang	601,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang	601,210,000	Sekretariat Daerah						
<b>4</b>					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																			
4	0				<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																<b>49,273,580,052</b>		<b>54,201,033,369</b>	
4	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat	Indeks		Indeks	80 Indeks	<b>33,423,190,548</b>						80 Indeks	<b>36,765,604,915</b>						
4	0	0	2.	01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	<b>110,669,870</b>						5 Dokumen	<b>121,736,857</b>						
4	0	0	2.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	61,550,600	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	1 Dokumen	67,705,660	Sekretariat DPRD					
4	0	0	2.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				2 Laporan	2,799,680	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	2 Laporan	3,079,648	Sekretariat DPRD					

						Realisasi Kinerja SKPD															
4	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	46,319,590	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	1 Laporan	50,951,549	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	6,371,007,641								100 Persen	7,008,108,405	
4	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	6.316.204,461	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	14 Orang/Bulan	6.947.824,907	Sekretariat DPRD		
4	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	24,844,420	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	12 Dokumen	27,328,862	Sekretariat DPRD		
4	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	29,958,760	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	2 Laporan	32,954,636	Sekretariat DPRD		
4	0	0	2.	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	104,844,000								100 Persen	115,328,400	
																Peningkatan					

4	0	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	104,844,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	PNS Pada Set.DPR D Kab.Paser	20 Orang	115,328,400	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	<b>921,415,087</b>							100 Persen	<b>1,013,651,909</b>	
4	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31,000,640	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	1 Paket	34,100,704	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	388,019,510	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	10 Paket	426,821,461	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	105,720,285	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	7 Paket	116,292,314	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	36,003,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	1 Paket	39,603,300	Sekretariat DPRD	

4	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	56,300,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	4 Dokumen	61,930,000	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	32,485,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	1 Laporan	35,733,500	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	236,804,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	45 Laporan	260,484,400	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8 Dokumen	35,082,652	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser	8 Dokumen	38,686,230	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam	Persen		Persen	100 Persen	<b>233,560,411</b>						100 Persen	<b>256,916,452</b>	

						<b>Daerah</b>	kondisi baik											
4	0	0	2.	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	233,560,411	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser, Rumah Jabatan Sekwan dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser	3 Unit	256,916,452	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	Persen	Persen	100 Persen	1,508,361,832				100 Persen	1,659,198,015		
4	0	0	2.	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	588,113,200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser, Rumah Jabatan Sekwan dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser	12 Laporan	646,924,520	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	920,248,632	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser, Rumah Jabatan Sekwan dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser	2 Laporan	1,012,273,495	Sekretariat DPRD	

4	0	0	2.		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,314,536,802</b>						100 Persen	<b>1,445,990,482</b>	
4	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	358,399,204	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser, Rumah Jabatan Sekwan, Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser dan Kendaraan Dinas Operasional Set. DPRD /Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD Kab.Paser	4 Unit	394,239,124	Sekretariat DPRD
4	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan				3 Unit	154,489,899	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser, Rumah Jabatan Sekwan, Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser dan Kendaraan Dinas Operasional	3 Unit	169,938,889	Sekretariat DPRD

						Perizinannya									nal Set. DPRD /Kendara an Dinas Jabatan Pimpina n DPRD Kab.Paser				
4	0	0	2.	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			50 Unit	14,640,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupat en Paser, Rumah Jabatan Sekwan, Rumah Jabatan Pimpina n DPRD Kabupat en Paser dan Kendara an Dinas Operasio nal Set. DPRD /Kendara an Dinas Jabatan Pimpina n DPRD Kab.Paser	50 Unit	16,104,000	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			105 Unit	167,103,840	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupat en Paser, Rumah Jabatan Sekwan, Rumah Jabatan Pimpina n DPRD Kabupat en Paser dan Kendara an Dinas Operasio nal Set.	105 Unit	183,814,224	Sekretariat DPRD	

																			DPRD /Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD Kab.Paser				
4	0	0	2	1	2.	0	0	0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			7 Unit	527,671,859	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser, Rumah Jabatan Sekwan, Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser dan Kendaraan Dinas Operasional Set. DPRD /Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD Kab.Paser	7 Unit	580,439,045	Sekretariat DPRD
4	0	0	2	1	2.	0	0	1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			256 Unit	92,232,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Set. DPRD Kabupaten Paser, Rumah Jabatan Sekwan, Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser dan Kendaraan Dinas Operasional Set.	256 Unit	101,455,200	Sekretariat DPRD

																	DPRD /Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD Kab.Paser		
4	0	0	2.		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Persentase Penyelenggaraan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persen		Persen	100 Persen	<b>21,814,602,151</b>							100 Persen	<b>23,996,062,366</b>
4	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	21,107,582,151	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser	30 Orang/Bulan		23,218,340,366	Sekretariat DPRD
4	0	0	2.	0	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				30 Paket	326,070,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser	30 Paket	358,677,000	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	380,950,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser	30 Orang	419,045,000	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Persentase Penyelenggaraan layanan administrasi DPRD	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,044,192,754</b>							100 Persen	<b>1,148,612,029</b>
														Peningkatan					

4	0	0	2.	0	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				2 Laporan	53,352,074	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	2 Laporan	58,687,281	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				20 Laporan	17,667,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	20 Laporan	459,433,700	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				40 Paket	573,173,680	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	40 Paket	630,491,048	Sekretariat DPRD	
4	0	0			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Dokumen KUA PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	30 dokumen 100 % 100 %	6 dokumen 100 % 100 %	6 dokumen 100 % 100 %		15,850,389,504						6 dokumen 100 % 100 %	17,435,428,454		
4	0	0	2.	0	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan	Dok Perda		Dok Perda	10 Dok Perda	2,577,162,451							10 Dok Perda	2,834,878,696	

4	0	0	2.	0	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	9,259,300	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	1 Dokumen	10,185,230	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	1,762,658,451	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	10 Dokumen	1,938,924,296	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	335,399,650	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	5 Dokumen	668,939,615	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	460,585,600	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	3 Dokumen	506,644,160	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	9,259,450	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	1 Dokumen	10,185,395	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	5 Rekomendasi	573,757,000							5 Rekomendasi	631,132,700	

4	0	0	2.	0	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	4,595,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	1 Dokumen	3,054,500	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1,140,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	1 Dokumen	4,254,550	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1,723,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	1 Dokumen	1,958,500	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	3,450,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	1 Dokumen	3,495,550	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	280,336,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	1 Dokumen	308,369,600	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2.	0	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	62 Rekomendasi	<b>5,646,235,000</b>							62 Rekomendasi	<b>6,210,858,500</b>	
4	0	0	2.	0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan				3 Laporan	67,220,000	Kab. Paser, Tanah Grogot,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui	DPRD Kabupaten Paser	3 Laporan	953,942,000	Sekretariat DPRD	

				Pemerintahan dan Hukum	Bidang Pemerintahan dan Hukum					Tanah Grogot	Alokasi Umum	i Pelayanan Publik	Pemerintahan Yang Partisipatif				
4	0	0	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			3 Laporan	867,220,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	3 Laporan	953,942,000	Sekretariat DPRD
4	0	0	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			10 Laporan	867,220,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	10 Laporan	953,942,000	Sekretariat DPRD
4	0	0	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			10 Laporan	867,220,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	10 Laporan	953,942,000	Sekretariat DPRD
4	0	0	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			10 Laporan	867,220,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	10 Laporan	953,942,000	Sekretariat DPRD
4	0	0	2	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			1 Dokumen	80,861,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	1 Dokumen	83,947,100	Sekretariat DPRD
	0	0	2	Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil					Kab. Paser, Tanah	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	DPRD		953,942,00	Sekretariat

4	2	2	0	7	Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	667,220,000	Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kabupaten Paser	1 Dokumen		0	DPRD	
4	0	0	2	0	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	412,054,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	1 Dokumen	453,259,400		Sekretariat DPRD	
4	0	0	2	0	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Terfasilitasinya dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,195,339,600</b>							100 Persen	<b>3,514,873,560</b>		
4	0	0	2	0	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	1,305,822,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	3 Dokumen	1,436,404,200		Sekretariat DPRD	
4	0	0	2	0	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				24 Dokumen	298,995,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	24 Dokumen	328,894,500		Sekretariat DPRD	
4	0	0	2	0	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	264,172,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	3 Orang	290,589,200		Sekretariat DPRD	
4	0	0	2	0	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	274,732,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	6 Orang	302,205,200		Sekretariat DPRD	

4	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	1,042,498,600	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	12 Dokumen	1,146,748,460	Sekretariat DPRD
4	0	0	2.	0	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	9,120,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	1 Dokumen	10,032,000	Sekretariat DPRD
4	0	0	2.	0	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Dokumen laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen		Dokumen	95 Dokumen	1,762,251,800						95 Dokumen	1,938,476,980	
4	0	0	2.	0	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	69,370,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	1 Laporan	76,307,000	Sekretariat DPRD
4	0	0	2.	0	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	84,987,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	1 Dokumen	93,485,700	Sekretariat DPRD
4	0	0	2.	0	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1,607,894,800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang	DPRD Kabupaten Paser	3 Dokumen	1,768,684,280	Sekretariat DPRD

4	0	0	2.		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	Dokumen kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	139,932,453						2 Dokumen	153,925,698	
4	0	0	2.	0	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			3 Laporan	139,932,453	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	3 Laporan	153,925,698	Sekretariat DPRD
4	0	0	2.		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Dokumen laporan fasilitasi tugas DPRD	Dokumen	Dokumen	35 Dokumen	1,955,711,200						35 Dokumen	2,151,282,320	
4	0	0	2.	0	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			10 Dokumen	472,732,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	10 Dokumen	520,005,200	Sekretariat DPRD
4	0	0	2.	0	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			1 Laporan	25,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	1 Laporan	27,500,000	Sekretariat DPRD
4	0	0	2.	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			12 Dokumen	753,455,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	DPRD Kabupaten Paser	12 Dokumen	828,800,500	Sekretariat DPRD
4	0	0	2.	0	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan			12 Dokumen	704,524,200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	DPRD Kabupaten Paser	12 Dokumen	774,976,620	Sekretariat DPRD



					berkenaan														
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Persentase RKA disusun menggunakan SSH&ASB Persentase RKA-SKPD disusun sesuai KAK				2 Dokumen 70 persen 80 persen	49,462,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Bappeda litbang	2 Dokumen 70 persen 80 persen	165,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Persentase KAK per Kegiatan pada DPA Persentase Kegiatan diakomodir dalam DPA-SKPD				2 Dokumen 70 persen 80 persen	17,308,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Bappeda litbang	2 Dokumen 70 persen 80 persen	18,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Laporan evaluasi kinerja tepat waktu Persentase capaian kinerja dan				5 Laporan 5 dokumen 90 persen 30 persen	135,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengend	5 Laporan 5 dokumen 90 persen 30 persen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengemban

					anggaran kegiatan ≥ 80% Persentase pengendalian resiko kegiatan							Partisipatif	alian serta Evaluasi Kinerja Bappeda litbang			gan		
5	0	0	2.		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase LHP nihil Persentase temuan ditindaklanjuti	% persen	% persen	100 % 100 persen	<b>8,242,867,094</b>				100 % 100 persen	<b>7,706,635,811</b>			
5	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kesesuaian data kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN			51 Orang 100 persen	8,017,274,94		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan keuangan	51 Orang 100 persen	8,017,274,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian realisasi kinerja keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase dokumen SPJ yang dikembalikan			95.6 persen 450 Dokumen 18 persen	4,165,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan keuangan	95.6 persen 450 Dokumen 18 persen	4,165,300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Persentase pemenuhan Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu			2 Laporan 100 persen	179,574,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan keuangan	2 Laporan 100 persen	275,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat</b>	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥	persen	persen	80 persen	<b>350,690,000</b>					80 persen	<b>465,000,000</b>		

				<b>Daerah</b>	80													
5	0	0	2.0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Persentase jumlah ASN yang memiliki pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			86 Paket 100 persen	30,215,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian	86 Paket 100 persen	30,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase ASN yang mendapatkan Sosialisasi			35 Orang 82 persen	84,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian	35 Orang 82 persen	110,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian			87 Orang 80 persen	235,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian	87 Orang 80 persen	325,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	%	100 %	<b>632,960,650</b>						100 %	<b>603,500,000</b>		
5	0	0	2.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan bahan			6 Paket 100 persen	2,505,160		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Bappedalitbang	6 Paket 100 persen	3,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan





5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Kendaraan dinas operasional layak pakai					3 Unit 80 persen	113,212,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik	3 Unit 80 persen	85,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase Peralatan kantor kondisi baik					85 Unit 34 persen	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik	85 Unit 34 persen	48,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	97 % 97 %	90 % 93 %	94 % 94 %	<b>2,267,955,000</b>								94 % 94 %	<b>1,533,395,475</b>	
5	0	0	2	01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Konsistensi ketepatan waktu dan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir di dalam APBD	persen %	persen %	95 persen 25 %	<b>1,833,974,400</b>								95 persen 25 %	<b>853,395,475</b>	

5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) Persentase permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang masuk kedalam Ranwal dokumen perencanaan					1 Dokumen 55 persen	30,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dan ketepatan waktu pelaksanaan tahapan perencanaan	1 Dokumen 55 persen	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan antara dokumen RKPD dengan dokumen Kebijakan lainnya					1 Dokumen 100 persen	24,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dan ketepatan waktu pelaksanaan tahapan perencanaan	1 Dokumen 100 persen	28,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Persentase masukan stakeholders (pemangku kepentingan) yang disepakati menjadi rancangan awal dokumen perencanaan					1 Berita Acara 100 persen	35,977,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dan ketepatan waktu pelaksanaan tahapan perencanaan	1 Berita Acara 100 persen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Persentase hasil musrenbang RKPD yang di tindak lanjuti kedalam Renja PD					1 Berita Acara 25 persen	14,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dan ketepatan waktu pelaksanaan tahapan perencanaan	1 Berita Acara 25 persen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Persentase muatan rancangan awa Dokumen Perencanaan Daerah yang disetujui sebagai rancangan Akhir Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten disetujui dalam RKPD Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang sesuai Tema RKPD					0 Berita Acara 1 Berita Acara 100 persen 85 persen 85 persen	230,614,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dan ketepatan waktu pelaksanaan tahapan perencanaan	0 Berita Acara 1 Berita Acara 100 persen 85 persen 85 persen	83,395,475	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
					Penyiapan Bahan	Dokumen Panduan Pelaksanaan Musrenbang								Dana	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatnya partisipasi pemangku			Badan Perencanaan

5	01	02	2.01	06	Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1 Dokumen 1000 Usulan	22,750,000		Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	kepentingan dan ketepatan waktu pelaksanaan tahapan perencanaan	1 Dokumen 1000 Usulan	25,000,000	Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Konsistensi ketepatan waktu pelaksanaan tahapan penyusunan RKPD				1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100 persen	1,275,402,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dan ketepatan waktu pelaksanaan tahapan perencanaan	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100 persen	270,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.02	02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase Ketersediaan data perencanaan	persen		persen	93 persen	184,345,200						93 persen	355,000,000	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah				45 Orang 82 persen	77,716,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan data/analisa data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah	45 Orang 82 persen	135,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
					Penyusunan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Persentase				1 Buku			Dana	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan data/ana	1 Buku		Badan Perencanaan

5	0	0	2	0	0	0	3	Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	data& informasi perencanaan yang dipublikasikan Profil Pembangunan Daerah					100 persen	106,628,400		Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	lisa data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah	100 persen	1 Dokumen	220,000,000	Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2	0	0	2	3	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD	persen		persen	86 persen	<b>249,635,400</b>						86 persen	<b>325,000,000</b>			
5	0	0	2	0	0	2	0	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Persentase ketepatan waktu pengendalian dokumen perencanaan Tingkat capaian target program prioritas per sasaran RPJMD				1 Laporan 100 persen 100 persen	47,602,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	1 Laporan 100 persen 100 persen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
5	0	0	2	0	0	2	0	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Persentase program dengan capaian kinerja yang telah >=76% Persentase realisasi program prioritas KDH				2 Laporan 100 persen 50 persen	402,032,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	2 Laporan 100 persen 50 persen	65,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	

5	0	0			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	96 %		92 %	93 %	<b>2,344,683,860</b>					93 %	<b>3,154,223,955</b>		
5	0	0	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	persen		persen	80 persen	<b>1,153,184,000</b>					80 persen	<b>1,193,723,955</b>		
5	0	0	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0 Dokumen	<b>262,600,000</b>		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	0 Dokumen	<b>287,723,955</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen						1 Dokumen			
					Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Pemerintahan	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Pemerintahan				100 persen						100 persen			
					Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pemerintahan	Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pemerintahan				100 persen						100 persen			

5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Pemerintahan Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Pemerintahan	36 Laporan 82 persen 100 persen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	36 Laporan 82 persen 100 persen	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Pemerintahan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENCANA PD Bidang Pemerintahan Tingkat Capaian	48 Laporan 95 persen 85 persen 85 persen	28,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan	48 Laporan 95 persen 85 persen 85 persen	38,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

					Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pemerintahan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pemerintahan							manusia					
5	0	0	2.	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Pemerintahan	0 Laporan 12 Laporan 80 persen	100,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	0 Laporan 12 Laporan 80 persen	105,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
					Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang					Memperkuat	Peningkatan Kualitas	Meningkatnya konsistensi dokumen				Badan Perencanaan

5	0	0	2.	0	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPd Bidang Pembangunan Manusia Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia				0 Dokumen 2 Dokumen 100 persen 100 persen	52,907,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	0 Dokumen 2 Dokumen 100 persen 100 persen	450,000,000	Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Pembangunan Manusia Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang				18 Laporan 82 persen 100 persen	42,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	18 Laporan 82 persen 100 persen	38,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

						Pembangunan Manusia													
5	0	0	2.	0		<p>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pembangunan Manusia</p>	<p>24 Laporan</p> <p>95 persen</p> <p>85 persen</p> <p>85 persen</p>	80,000,000											
	1	3	01	7		<p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p>				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	24 Laporan	95 persen	85 persen	85 persen	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
						<p>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</p>							Meningkatnya						

5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Pembangunan Manusia						0 Laporan 6 Laporan 80 persen	261,407,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	0 Laporan 6 Laporan 80 persen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
5	01	03	2.02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah						persen	persen	80 persen	585,774,760					80 persen	1,097,500,000	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPd Bidang Perekonomian Persentase muatan Renstra yang selaras dengan						2 Dokumen 100 persen 100 persen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	2 Dokumen 100 persen 100 persen	260,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	

						RPJMD Bidang Perekonomian												
5	0	0	2.	0		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian												
1	3	0	0	2		Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Perekonomian	18 Laporan											
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Perekonomian	82 persen	34,910,560			Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	18 Laporan	82 persen	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.	0		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian												
1	3	0	0	3		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang	2 Laporan											
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		95 persen	44,999,700			Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan	2 Laporan	95 persen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian
							85 persen								85 persen			

				Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perekonomian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Perekonomian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Perekonomian			85 persen		Hasil	i Pelayanan Publik	n Yang Partisipatif	gunakan bidang Perekonomian dan SDA	85 persen	dan Pengembangan
5	0	0	2.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Perekonomian			0 Laporan 6 Laporan 80 persen	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	0 Laporan 6 Laporan 80 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
				Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya								Meningkatnya konsistensi		Badan





5	0	0	2.	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	persen	persen	80 persen	605,725,100					80 persen	863,000,000	
5	0	0	2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPd Bidang Infrastruktur Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Infrastruktur			2 Dokumen 100 persen 100 persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen 100 persen 100 persen	155,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Infrastruktur			12 Laporan 82 persen 100 persen	26,464,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan	12 Laporan 82 persen 100 persen	65,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan



5	0	0	2.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Infrastruktur						4 Laporan 80 persen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	nsi dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan 80 persen	85,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Kewilayahan Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Kewilayahan						1 Dokumen 100 persen 100 persen	1,405,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen 100 persen 100 persen	153,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
				Asistensi Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Persentase										Memperkuat	Peningkatan Kualitas	Meningkatnya konsistensi dokumen			Badan Perencanaan





						dengan Baik							n Yang Partisipatif	penyusunan dokumen perencanaan					
5	0	0	2.			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	persen		persen	55 persen	<b>675,000,000</b>				55 persen	<b>700,000,000</b>		
5	0	0	2.	0		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	<b>450,000,000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya kontribusi kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	<b>350,000,000</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.	0		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen 1 Dokumen	<b>225,000,000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya kontribusi kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	1 Dokumen 1 Dokumen	<b>350,000,000</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

5	0	0	2.	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Persentase inovasi dan teknologi yang difasilitasi untuk diterapkan	persen	persen	35 persen	634,561,230					35 persen	861,928,683	
5	0	0	2.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Persentase Uji Coba Inovasi yang Memenuhi Standar			1 Laporan 55 persen	129,215,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	1 Laporan 55 persen	235,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Persentase inovasi yang memenuhi standar			1 Laporan 20 persen	353,117,950	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	1 Laporan 20 persen	420,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	0	0	2.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal Renja PD			1 Laporan 55 persen	152,227,780	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	1 Laporan 55 persen	206,928,683	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan





5	0	0	2.	Umum	Pelayanan	%	%	72 %	663,473,01					72 %	741,520,31	
2	1	0	06	Perangkat	Administrasi				4						5	
				Daerah	Umum											
					Perangkat											
					Daerah											
5	0	0	2.	Penyediaan	Jumlah Paket			2 Paket	10,000,000	Kab.	Dana	Peningkatan	BKAD	2 Paket	11,000,000	Badan
2	1	0	06	Komponen	Komponen					Paser,	Transfer	Kualitas	Kab.			Keuangan
				Instalasi	Listrik/Penerangan					Tanah	Umum-	Pelayanan	Paser			Aset Daerah
				Listrik/Penerangan	Bangunan					Grogot,	Dana	Melalui				
				Bangunan	Kantor					Tanah	Bagi	Pemerintah				
				Kantor	yang Disediakan					Grogot	Hasil	n Yang				
												Partisipatif				
5	0	0	2.	Penyediaan	Jumlah Paket			7 Paket	23,998,820	Kab.	Dana	Peningkatan	BKAD	7 Paket	40,798,702	Badan
2	1	0	06	Peralatan dan	Peralatan dan					Paser,	Transfer	Kualitas	Kab.			Keuangan
				Perlengkapan	Perlengkapan					Tanah	Umum-	Pelayanan	Paser			Aset Daerah
				Kantor	Kantor yang					Grogot,	Dana	Melalui				
					Disediakan					Tanah	Bagi	Pemerintah				
										Grogot	Hasil	n Yang				
												Partisipatif				
5	0	0	2.	Penyediaan	Jumlah Paket			6 Paket	250,351,694	Kab.	Dana	Peningkatan	BKAD	6 Paket	275,386,86	Badan
2	1	0	06	Bahan Logistik	Bahan					Paser,	Transfer	Kualitas	Kab.		3	Keuangan
				Kantor	Logistik					Tanah	Umum-	Pelayanan	Paser			Aset Daerah
					Kantor yang					Grogot,	Dana	Melalui				
					Disediakan					Tanah	Bagi	Pemerintah				
										Grogot	Hasil	n Yang				
												Partisipatif				
5	0	0	2.	Penyediaan	Jumlah Paket			3 Paket	46,722,500	Kab.	Dana	Peningkatan	BKAD	3 Paket	51,394,750	Badan
2	1	0	06	Barang Cetakan	Barang					Paser,	Transfer	Kualitas	Kab.			Keuangan
				dan	Cetakan dan					Tanah	Umum-	Pelayanan	Paser			Aset Daerah
				Penggandaan	Penggandaan					Grogot,	Dana	Melalui				
					yang					Tanah	Bagi	Pemerintah				
					Disediakan					Grogot	Hasil	n Yang				
												Partisipatif				
5	0	0	2.	Penyediaan	Jumlah Bahan			365 Dokumen	180,000	Kab.	Dana	Peningkatan	BKAD	365 Dokumen	180,000	Badan
2	1	0	06	Bahan Bacaan	Bacaan dan					Paser,	Transfer	Kualitas	Kab.			Keuangan
				dan Peraturan	Peraturan					Tanah	Umum-	Pelayanan	Paser			Aset Daerah
				Perundang-	Perundang-					Grogot,	Dana	Melalui				
				undangan	undangan					Tanah	Bagi	Pemerintah				
					yang					Grogot	Hasil	n Yang				
					Diadakan							Partisipatif				
5	0	0	2.	Penyelenggaraan	Jumlah Laporan			40 Laporan	275,000,00	Semua	Dana	Peningkatan	BKAD	40 Laporan	302,500,00	Badan
2	1	0	06	Rapat Koordinasi	Penyelenggaraan					Kab/Kota,	Transfer	Kualitas	Kab.		0	Keuangan
				dan Konsultasi	Rapat Koordinasi					Semua	Umum-	Pelayanan	Paser			Aset Daerah
				SKPD	dan Konsultasi					Kecamatan,	Dana	Melalui				
					SKPD					Semua	Bagi	Pemerintah				
										Kelurahan	Hasil	n Yang				
												Partisipatif				



5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	16,172,434	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	BKAD Kab. Paser	2 Unit	17,789,677	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2,505,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	BKAD Kab. Paser	3 Unit	2,755,500	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	3,550,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	BKAD Kab. Paser	11 Unit	3,905,550	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase penurunan temuan administratif atas laporan keuangan pemerintah daerah	10 %		10 %	10 %	<b>258,552,970,350</b>							10 %	<b>284,404,384,685</b>	
5	0	0	2.	0	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Jumlah dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	dokumen		dokumen 6 dokumen		<b>2,912,894,000</b>							6 dokumen	<b>3,200,300,700</b>	
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	296,989,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh SKPD di Kab. Paser	2 Dokumen	296,687,900	Badan Keuangan Aset Daerah	
					Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan						Kab. Paser,	Dana Transfer		Peningkatan Kualitas Pelayanan	Seluruh				Badan

5	0	0	2.	0	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	194,261,000	Tanah Grogot, Tanah Grogot	Umum-Dana Bagi Hasil		Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	SKPD di Kab. Paser	2 Dokumen	13,687,100	Keuangan Aset Daerah
5	0	0	2.	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	257,519,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh SKPD di Kab. Paser	42 Dokumen	283,270,900	Badan Keuangan Aset Daerah
5	0	0	2.	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	159,903,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh SKPD di Kab. Paser	42 Dokumen	158,893,300	Badan Keuangan Aset Daerah
5	0	0	2.	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	87,143,200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh SKPD di Kab. Paser	42 Dokumen	40,857,520	Badan Keuangan Aset Daerah
5	0	0	2.	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	32,500,300	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh SKPD di Kab. Paser	42 Dokumen	35,750,330	Badan Keuangan Aset Daerah
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	1,140,223,700	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh SKPD di Kab. Paser	2 Dokumen	1,254,246,170	Badan Keuangan Aset Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan						Kab.	Dana		Peningkatan Kualitas				

5	0	0	2.	0	Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					2 Dokumen	544,137,800	Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh SKPD di Kab. Paser	2 Dokumen	598,551,580	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					2 Dokumen	42,093,400	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh SKPD di Kab. Paser	2 Dokumen	46,302,740	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0	2.	1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					25 Dokumen	130,386,200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh SKPD di Kab. Paser	25 Dokumen	150,024,820	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0	2.	1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					42 Dokumen	32,909,400	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh SKPD di Kab. Paser	42 Dokumen	36,200,340	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0	2.	1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan					2 Dokumen	38,828,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Seluruh SKPD di Kab. Paser	2 Dokumen	38,828,000	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0	2.	0	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Persentase Jumlah Pengajuan SPM yang sesuai ketentuan	%		%		100 %	<b>817,261,000</b>							100 %	<b>898,987,100</b>	
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan					4 Dokumen	170,898,000	Kab. Paser, Tanah Grogot,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui	SKPD Se-Kabupat	4 Dokumen	170,898,800	Badan Keuangan Aset Daerah	

																				Pengelolaan Kas Daerah											Tanah Grogot	Hasil			Pemerintahan Yang Partisipatif	en Paser				
5	0	0	2	2	2	2	0	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	14,450,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	SKPD Se-Kabupaten Paser	6 Dokumen	158,895,000	Badan Keuangan Aset Daerah																				
5	0	0	2	2	2	2	0	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	103,050,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	SKPD Se-Kabupaten Paser	2 Dokumen	113,355,000	Badan Keuangan Aset Daerah																				
5	0	0	2	2	2	2	0	0	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan	42 Dokumen	247,198,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	SKPD Se-Kabupaten Paser	42 Dokumen	271,917,800	Badan Keuangan Aset Daerah																				



5	0	0	2.	0	Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			1 Dokumen	440,666,600	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	SKPD Se- Kabupat en Paser	1 Dokumen	484,733,260	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0	2.	0	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Dokumen	216,039,800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	SKPD Se- Kabupat en Paser	1 Dokumen	216,643,780	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0	2.	1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			11 Lembaga	48,204,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	SKPD Se- Kabupat en Paser	11 Lembaga	58,024,950	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0	2.	0	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	dokumen	dokumen	1 dokumen	<b>253,950,408,650</b>							1 dokumen	<b>279,345,449,515</b>	
5	0	0	2.	0	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			1 Laporan	242,466,665,500	Kab. Paser, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyara kat Kabupat en Paser	1 Laporan	266,713,332,050	Badan Keuangan Aset Daerah	

5	0	0	2.	0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	6,000,000,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kabupaten Paser	1 Laporan	6,600,000,000	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0	2.	1	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	5,483,743,150	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kabupaten Paser	1 Laporan	6,032,117,465	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase permasalahan pengelolaan barang milik daerah selesai ditindaklanjuti	70 %		50 %	55 %	<b>1,377,520,000</b>						55 %	<b>1,240,272,000</b>		
5	0	0	2.	0	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan BMD	dokumen		dokumen	42 dokumen	<b>1,377,520,000</b>							42 dokumen	<b>1,240,272,000</b>	
5	0	0	2.	0	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	300,304,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Barang Milik Daerah	1 Dokumen	410,334,400	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0	2.	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	17,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	8,800,000	Badan Keuangan Aset Daerah	
5	0	0	2.	0	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	17,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	8,800,000	Badan Keuangan Aset Daerah	

5	0	0	2.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	57,923,267	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Barang Milik Daerah	2 Laporan	63,715,594	Badan Keuangan Aset Daerah
5	0	0	2.	0	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	69,779,900	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Barang Milik Daerah	2 Laporan	76,757,890	Badan Keuangan Aset Daerah
5	0	0	2.	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	254,917,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Barang Milik Daerah	2 Laporan	280,408,700	Badan Keuangan Aset Daerah
5	0	0	2.	0	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	115,420,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Barang Milik Daerah	2 Laporan	126,962,000	Badan Keuangan Aset Daerah
5	0	0	2.	0	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	246,228,920	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Barang Milik Daerah	2 Laporan	270,851,812	Badan Keuangan Aset Daerah
5	0	0	2.	1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik				4 Dokumen	85,257,073	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Barang Milik Daerah	4 Dokumen	96,782,780	Badan Keuangan Aset Daerah

				Daerah	Daerah																	
5	0	0	2.	1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	161,945,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Barang Milik Daerah	2 Laporan	178,139,500	Badan Keuangan Aset Daerah			
5	0	0	2.	1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	51,744,840	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Barang Milik Daerah	2 Laporan	21,719,324	Badan Keuangan Aset Daerah			
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
5	0				<b>KEUANGAN</b>							<b>13,412,716,563</b>									<b>14,979,383,515</b>	
5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>10,710,889,823</b>							72 %	<b>11,973,168,215</b>			
5	0	0	2.	01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	<b>382,321,049</b>							6 Dokumen	<b>447,400,000</b>			
5	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	23,999,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser	0 Dokumen	35,000,000	Badan Pendapatan Daerah			
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	20,238,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang	Pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.PAS	1 Dokumen	225,000,000	Badan Pendapatan Daerah			



			6	Daerah	Umum																		
5	0	0	2	0	1	2	0	0	2	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket 15 Unit	66,152,750		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser	0 Paket 15 Unit	130,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2	0	1	2	0	0	6	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebersihan Gedung Kantor, Alat Tulis Kantor, Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10 Jenis	175,932,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser	10 Jenis	199,526,080	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2	0	1	2	0	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis	151,962,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser	20 Jenis	174,962,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2	0	1	2	0	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran dan Peraturan Perundang-undangan	365 exemplar	1,821,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser	365 exemplar	1,800,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2	0	1	2	0	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 1 Laporan 30 Koordinasi	154,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser	0 Laporan 1 Laporan 30 Koordinasi	175,989,000	Badan Pendapatan Daerah



				Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya							Berkeadilan	Partisipatif							
5	0	0	2	0	1	2.	0	1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sarana dan Prasarana Milik Daerah	4 Unit	70,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2	0	4					<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Rasio PAD terhadap APBD	8.5 %	7.5 %	7.7 %	<b>2,701,826,740</b>			7.7 %	<b>3,006,215,300</b>	
5	0	0	2	0	4	2.	0	01		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Presentase Peningkatan PAD	%	%	10 %	<b>2,701,826,740</b>			10 %	<b>3,006,215,300</b>	
5	0	0	2	0	4	2.	0	01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen 0 Dokumen	200,755,300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	1 Dokumen 0 Dokumen	220,755,300	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2	0	4	2.	0	01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen Intensifikasi Pajak Daerah	1 Dokumen	52,015,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	1 Dokumen	52,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2	0	4	2.	0	01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	170,067,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	1 Laporan	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
														Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Kualitas				

5	0	0	2.	0	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Didata					1 Dokumen	160,424,500		Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	1 Dokumen	140,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.	0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dokumen Penerimaan Pajak Daerah					1 Dokumen	209,389,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	1 Dokumen	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah BPHTB yang diverifikasi Jumlah PBB yang diverifikasi					1400 Wajib Pajak 87000 Wajib Pajak	325,123,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	1400 Wajib Pajak 87000 Wajib Pajak	390,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan					1590 Wajib Pajak	233,865,340		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	1590 Wajib Pajak	255,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.	0	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima					0 Layanan 1 Dokumen	357,029,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	0 Layanan 1 Dokumen	360,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.	0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah					1 Dokumen	182,404,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang	Masyarakat	1 Dokumen	190,000,000	Badan Pendapatan Daerah



5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	75,923,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	BKPSDM	5 Dokumen	83,515,850	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	184,045,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	BKPSDM	12 Laporan	147,450,050	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan PD	Nilai		Nilai	70 Nilai	<b>5,579,441,356</b>						70 Nilai	<b>6,104,385,500</b>	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	5,342,823,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai BKPSDM	33 Orang/bulan	5,877,105,300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				200 Dokumen	26,118,356	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai BKPSDM	200 Dokumen	27,180,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum PD	Nilai		Nilai	70 Nilai	<b>316,661,079</b>						70 Nilai	<b>347,895,500</b>	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				6 Paket	1,444,960	Kab. Paser, Tanah Grogot,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan	Pegawai BKPSDM	6 Paket	1,589,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

				an Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan					Tanah Grogot	Hasil		Kesejahteraan Sosial				Daya Manusia
5	0	0	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	16,318,500	Kab. Paser, Semua Kecamatan-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai BKPSDM	2 Paket	17,950,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				45 Paket	45,004,619	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai BKPSDM	45 Paket	49,505,100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	7,359,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai BKPSDM	4 Paket	8,095,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4,320,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai BKPSDM	2 Dokumen	4,320,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	150,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai BKPSDM	40 Laporan	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	92,214,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai BKPSDM	1 Dokumen	101,435,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Persentase ketersediaan BMD penunjang urusan PD	%	%	100 %		<b>95,692,628</b>					100 %	<b>105,262,500</b>	

					Daerah														
5	0	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	47,167,120	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Sarana Prasarana Kantor	14 Unit	51,884,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	48,525,508	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sarana Prasarana Kantor	7 Unit	53,378,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan PD	%	%	100 %		<b>6,975,800</b>						100 %	<b>7,673,700</b>	
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	422,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Pegawai BKPSDM dan Instansi terkait	10 Laporan	464,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,553,800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai BKPSDM dan Instansi terkait	12 Laporan	7,209,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	%	%	100 %		<b>91,457,496</b>						100 %	<b>100,604,500</b>	
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4 Unit	9,279,917	Kab. Paser, Tanah	Dana Transfer Umum-			Sarana Prasarana	4 Unit	10,208,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

3	1	9	2	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Grogot, Tanah Grogot	Dana Bagi Hasil				a Kantor		gan Sumber Daya Manusia		
5	0	0	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	19,190,000		Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Sarana Prasarana Kantor	10 Unit	21,110,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	0	0	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	59,937,579		Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Sarana Prasarana Kantor	1 Unit	65,931,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	0	0	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	3,050,000		Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Sarana Prasarana Kantor	1 Unit	3,355,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	0	0	2.	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan Persentase pegawai berkinerja baik															
						90 %	50 %	75 %										75 %		
						90 %	50 %	75 %	6,227,597,263									75 %	6,872,359,922	
						100 %	100 %	100 %										100 %		
5	0	0	2.	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Persentase formasi kebutuhan pegawai yang terpenuhi berdasarkan jumlah bezzeting/formasi															
						persen	persen	70 persen	1,398,392,103									70 persen	1,582,231,462	

						yang diusulkan													
5	0	0	2	0	3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	53,513,868	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Calon ASN dan ASN Kab. Paser	1 Dokumen	1,059,865,254	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5	0	0	2	0	3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	82,502,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Calon ASN dan ASN Kab. Paser	1 Dokumen	85,752,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5	0	0	2	0	3	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	55,762,250	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Calon ASN dan ASN Kab. Paser	1 Dokumen	61,338,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5	0	0	2	0	3	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	80,616,250	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Calon ASN dan ASN Kab. Paser	1 Lembaga	82,678,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	5	0	0	2	0	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	407,440,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Calon ASN dan ASN Kab. Paser	1 Dokumen	418,184,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
											Dana		Peningkatan Kualitas Pelayanan						

5	03	02	2.01	1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	15,231,735	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Calon ASN dan ASN Kab. Paser	1 Dokumen	18,754,908	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	2	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	33,326,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Calon ASN dan ASN Kab. Paser	1 Laporan	36,658,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	%		%	80 %	<b>842,055,100</b>						80 %	<b>926,260,960</b>	
5	03	02	2.02	0	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	16,434,500	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	17,078,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	0	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1000 Dokumen	76,922,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparatur Sipil Negara	1000 Dokumen	85,824,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
															Peningkatan				Badan

5	0	0	2.	0	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					1 Dokumen	657,598,600	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	723,358,460	Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	0	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Persentase ASN yang telah mengikuti peningkatan kompetensi sesuai dengan syarat kompetensi dalam jabatan	%	%			70 %	<b>3,466,331,060</b>						70 %	<b>3,878,965,500</b>	
5	0	0	2.	0	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center					1 Dokumen	81,656,560	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	89,822,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	0	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN					1 Dokumen	2,908,008,500	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	3,264,809,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	0	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					100 Orang	355,799,500	Kab. Pasuruan Semua Kecamatan-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Sipil Negara	100 Orang	391,379,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	0	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina					1 Orang	53,886,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparatur Sipil Negara	1 Orang	59,275,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang					1 Orang	66,980,500		Dana Transfer Umum-		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur Sipil	1 Orang	73,679,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

3	2	3	4	Jabatan Fungsional	Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir						Dana Bagi Hasil		Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Negara			gan Sumber Daya Manusia	
5	0	0	2.	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	Persentase ASN dengan nilai SKP baik	%		%	75 %	<b>520,819,000</b>					75 %	<b>484,902,000</b>		
5	0	0	2.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	66,818,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	62,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	93,458,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	80,804,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	42,914,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	47,205,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1200 Orang	128,891,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparatur Sipil Negara	1200 Orang	108,780,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0	2.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				400 Orang	65,070,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	400 Orang	71,577,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Jumlah						Kab. Paser	Dana	Meningkatkan Sumber					Badan Kepegawaia

5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	23,668,000	Semua Kecamatan	Transfer Dana Bagi Hasil	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	114,035,000	n dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5	04				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						<b>2,187,463,500</b>								<b>2,417,209,850</b>		
5	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	90 %		50 %	75 %	<b>2,187,463,500</b>							75 %	<b>2,417,209,850</b>		
5	04	02	2.02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Persentase calon ASN dan ASN yang telah memenuhi diklat penjenjangan	%		%	92 %	<b>2,187,463,500</b>							92 %	<b>2,417,209,850</b>		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	2,187,463,500	Kab. Pase	Dana Transfer Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif		ASN Kab Paser	1 Laporan	2,417,209,850	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
6					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
6	01				<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						<b>16,713,043,526</b>									<b>17,756,000,000</b>	
6	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>13,381,093,526</b>							72 %	<b>14,051,000,000</b>		
6	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</b>	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persen		Persen	100 Persen	<b>204,150,000</b>							100 Persen	<b>230,000,000</b>		

				Daerah	Perangkat Daerah														
6	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	59,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	6 Dokumen	70,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	144,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	7 Laporan	160,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	0	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>11,207,870,000</b>						100 Persen	<b>11,710,000,000</b>	
6	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	11,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	64 Orang/bulan	11,500,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				200 Dokumen	1,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	200 Dokumen	150,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	59,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1 Laporan	60,000,000	Inspektorat Kabupaten

6	0	0	2.005	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Persen		Persen	100 Persen	925,000,000						100 Persen	1,000,000,000		
6	0	0	2.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	5 Orang	100,000,000	Inspektorat Kabupaten	
6	0	0	2.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				64 Orang	840,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	64 Orang	900,000,000	Inspektorat Kabupaten	
6	0	0	2.016	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum PD	Persen		Persen	100 Persen	633,847,226							100 Persen	666,000,000	
6	0	0	2.026	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	99,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1 Paket	100,000,000	Inspektorat Kabupaten	
6	0	0	2.046	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	204,917,226		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1 Paket	220,000,000	Inspektorat Kabupaten	
6	0	0	2.056	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	49,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1 Paket	60,000,000	Inspektorat Kabupaten	

6	0	0	2.	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					24 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	24 Dokumen	5,000,000	Inspektorat Kabupaten	
6	0	0	2.	0	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					3 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3 Laporan	30,000,000	Inspektorat Kabupaten	
6	0	0	2.	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60 Laporan	249,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	60 Laporan	250,000,000	Inspektorat Kabupaten	
6	0	0	2.	0	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpenuhinya Pengadaa BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>24,500,000</b>								100 Persen	<b>25,000,000</b>	
6	0	0	2.	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	24,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1 Unit	25,000,000	Inspektorat Kabupaten	
6	0	0	2.	0	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>220,000,000</b>								100 Persen	<b>240,000,000</b>	
6	0	0	2.	0	0	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan					12 Laporan	220,000,000		Dana Transfer Umum-		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Aparat Pengawas Intern	12 Laporan	240,000,000	Inspektorat	

1	1	8	1	Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat					0		Dana Bagi Hasil		Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah (APIP)		0	Kabupaten	
6	0	0	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>165,726,300</b>							100 Persen	<b>180,000,000</b>	
6	0	0	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	165,726,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)		6 Unit	180,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	0	0	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	4 %		2.5 %	3.5 %	<b>3,110,950,000</b>							3.5 %	<b>3,480,000,000</b>	
6	0	0	2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen		Persen	100 Persen	<b>2,620,950,000</b>							100 Persen	<b>2,930,000,000</b>	
6	0	0	2.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				77 Laporan	634,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)		77 Laporan	700,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	0	0	2.01	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				12 Laporan	172,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)		12 Laporan	180,000,000	Inspektorat Kabupaten
0	0	2.0	0	Reviu Laporan	Jumlah Laporan Hasil					725,000,00		Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Aparat Pengawas Intern			800,000,00	Inspektorat

6	1	2	01	3	Kinerja	Reviu Laporan Kinerja					200 Laporan	0	Umum-Dana Bagi Hasil	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintah (APIP)	200 Laporan	0	Kabupaten	
6	0	0	2.	0	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan					17 Laporan	247,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	17 Laporan	300,000,000	Inspektorat Kabupaten	
6	0	0	2.	0	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa					8 Laporan	177,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	8 Laporan	200,000,000	Inspektorat Kabupaten	
6	0	0	2.	0	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk					3 Kesepakatan	275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3 Kesepakatan	300,000,000	Inspektorat Kabupaten	
6	0	0	2.	0	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					4 Dokumen	390,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	4 Dokumen	450,000,000	Inspektorat Kabupaten	
6	0	0	2.	0	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Persen		Persen		100 Persen	490,000,000						100 Persen	550,000,000	
6	0	0	2.	0	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					15 Laporan	490,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Aparat Pengawas Intern Pemerintah	15 Laporan	550,000,000	Inspektorat Kabupaten	



7	0	0	2.	<b>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	4 Laporan	<b>82,976,800</b>					4 Laporan	<b>84,625,640</b>		
7	0	0	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dokumen	18,731,800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	10 Dokumen	19,668,390	Kantor Camat Tanah Grogot
7	0	0	2.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	14,245,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	4 Laporan	14,957,250	Kantor Camat Tanah Grogot
7	0	0	2.0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Orang/Bulan	Orang/Bulan	37 Orang/Bulan	<b>5,063,675,578</b>					37 Orang/Bulan	<b>5,532,428,427</b>		
7	0	0	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 Orang/bulan	4,798,303,650		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	37 Orang/bulan	5,264,428,427	Kantor Camat Tanah Grogot
7	0	0	2.0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	246,281,928	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	12 Dokumen	248,000,000	Kantor Camat Tanah Grogot
7	0	0	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			10 Laporan	19,090,000	Kab. Paser, Tanah Grogot,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui	0	10 Laporan	20,000,000	Kantor Camat Tanah

				Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Tanah Grogot	Hasil	i Pelayanan Publik	Pemerintahan Yang Partisipatif				Grogot
7	0	0	2.006	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan pengadaan yang disediakan	Paket		Paket	3 Paket	<b>127,544,436</b>						3 Paket	<b>135,357,711</b>	
7	0	0	2.006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,980,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	1 Paket	2,970,000	Kantor Camat Tanah Grogot
7	0	0	2.006	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	32,694,800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	2 Paket	34,415,579	Kantor Camat Tanah Grogot
7	0	0	2.006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	11,274,200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	3 Paket	12,082,200	Kantor Camat Tanah Grogot
7	0	0	2.006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62 Laporan	81,595,436	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	62 Laporan	85,889,932	Kantor Camat Tanah Grogot
7	0	0	2.008	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	250 Laporan	<b>59,151,880</b>						250 Laporan	<b>71,651,880</b>	
			2.		Jumlah Laporan						Kab. Paser,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Peningkatan Kualitas Pelayanan				Kantor

701081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					250 Laporan	2,500,000	Tanah Grogot, Tanah Grogot	Umum-Dana Bagi Hasil	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	250 Laporan	2,000,000	Camat Tanah Grogot
701082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	65,651,880	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	12 Laporan	68,651,880	Kantor Camat Tanah Grogot
70109	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				2 Unit	<b>120,670,800</b>						2 Unit	<b>127,863,340</b>	
70109	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				2 Unit	119,450,800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	2 Unit	125,423,340	Kantor Camat Tanah Grogot
701090	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				2 Unit	1,220,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	2 Unit	2,440,000	Kantor Camat Tanah Grogot
70102	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80 %		70 %	72 %		<b>269,144,280</b>						72 %	<b>283,091,750</b>	
701022	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang</b>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Laporan		Laporan	12 Laporan		<b>179,135,000</b>						12 Laporan	<b>188,091,750</b>	

				<b>Ada di Kecamatan</b>	Wilayah Kecamatan															
7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	179,135,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	12 Laporan	188,091,750	Kantor Camat Tanah Grogot	
7	0	0	2.	0	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		Laporan	1 Laporan	90,009,280							1 Laporan	95,000,000	
7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	90,009,280	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	1 Laporan	95,000,000	Kantor Camat Tanah Grogot	
7	0	0	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	90 %		NA %	75 %	194,440,700							75 %	204,162,735	
7	0	0	2.	0	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	16 Laporan	194,440,700							16 Laporan	204,162,735	
7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.				16 Lembaga	19,840,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	16 Lembaga	20,832,000	Kantor Camat Tanah Grogot	

7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 4 Laporan	174,600,700	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	0 Laporan 4 Laporan	183,330,735	Kantor Camat Tanah Grogot	
7	0	0	4		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	70 %		50 %	55 %	<b>260,480,000</b>						55 %	<b>265,613,000</b>		
7	0	0	2.	0	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>23,860,000</b>						1 Laporan	<b>25,613,000</b>		
7	0	0	2.	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12,660,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	12 Laporan	13,293,000	Kantor Camat Tanah Grogot
						Jumlah									Peningkatan					



7	0	0	2.	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					330 Orang	2,610,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	330 Orang	3,000,000	Kantor Camat Tanah Grogot
7	0	0	2.	0	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					180 Orang	16,740,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	180 Orang	18,540,000	Kantor Camat Tanah Grogot
	0	0	2.	0	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan							Kab. Paser, Tanah	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				Kantor Camat



7	0	0	2.	1	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	21,760,000		Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	2 Dokumen	23,000,000	Kantor Camat Tanah Grogot	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																					
7	0				<b>KECAMATAN</b>							<b>1,363,048,113</b>								<b>1,992,968,323</b>	
7	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>253,359,113</b>							72 %	<b>351,810,423</b>		
7	0	0	2.		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen		dokumen	12 dokumen	<b>82,640,000</b>							12 dokumen	<b>90,904,000</b>		
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	<b>82,640,000</b>		Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN, Kantor	12 Dokumen	<b>90,904,000</b>	Kantor Camat Tanah Grogot	
7	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah ATK yang disediakan	jenis		jenis	3 jenis	<b>71,974,628</b>							3 jenis	<b>95,675,613</b>		
7	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 jenis	3,446,190		Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	keluarahan tanah grogot	3 jenis	3,790,809	Kantor Camat Tanah Grogot	
						Jumlah ATK yang							Kab.	Dana	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas					

7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disediakan Jumlah bahan kebersihan yang Disediakan				10 item 11 item	36,992,978	Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	keluarah an tanah grogot	10 item 11 item	40,692,276	Kantor Camat Tanah Grogot	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 jenis	8,710,460	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	keluarah an tanah grogot	3 jenis	9,581,506	Kantor Camat Tanah Grogot	
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2,825,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	keluarah an tanah grogot	12 Laporan	41,611,022	Kantor Camat Tanah Grogot	
7	0	0	2.	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		unit	2 unit	<b>9,133,583</b>							2 unit	<b>35,000,000</b>	
7	0	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9,133,583	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kantor keluraha n	1 Unit	35,000,000	Kantor Camat Tanah Grogot	
7	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jaringan Listrik dan Air yang Dibayarkan	bulan		bulan	12 bulan	<b>64,727,100</b>							12 bulan	<b>71,199,810</b>	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	64,727,100	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	12 Laporan	71,199,810	Kantor Camat Tanah Grogot	





7	0	0	0	<b>Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	peningkatan kesadaran keluarga dan pembangunan.	Keluarga	Keluarga	6000 Keluarga	16,950,000					6000 Keluarga	16,950,000		
7	0	0	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar-antar keluarga, dan kelompok masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			1000 keluarga 1000 Keluarga	16,950,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Posyandu , PKK , Karang taruna	1000 keluarga 1000 Keluarga	16,950,000	Kantor Camat Tanah Grogot
7	0	0	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			27 posyandu	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Posyandu , PKK , Karang taruna	27 posyandu	15,000,000	Kantor Camat Tanah Grogot
7	0	0	6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	Persentase desa yang menyampaikan	100 %		100 %	100 %					100 %	16,500,000		



7	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP dan Evaluasi Renja)					2 Dokumen	4,380,000	Kab. Paser Belengkong, Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan Paser Belengkong	2 Dokumen	4,380,000	Kantor Camat Paser Belengkong
7	0	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Presentase PD Yang Menyusun dan Menetapkan Dokumen Keuangan Tepat Waktu	%		%		100 %	<b>4,148,284,719</b>						100 %	<b>4,148,284,719</b>	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14 Bulan	3,960,906,303	Kab. Paser Belengkong, Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan Paser Belengkong	14 Bulan	3,960,906,303	Kantor Camat Paser Belengkong
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan (SPM, SPP)					130 Dokumen	156,718,416	Kab. Paser Belengkong, Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan Paser Belengkong	130 Dokumen	156,718,416	Kantor Camat Paser Belengkong
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan (Laporan Rekonsiliasi Keuangan, Calk dan Prognosis)					15 Dokumen	30,660,000	Kab. Paser Belengkong, Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan Paser Belengkong	15 Dokumen	30,660,000	Kantor Camat Paser Belengkong
7	0	0	2.	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Presentase Data Pegawai Yang Diperbarui	%		%		100 %	<b>87,780,000</b>						100 %	<b>87,780,000</b>	
7	0	0	2.	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Yang Diperbarui datanya					10 Orang	87,780,000	Kab. Paser Belengkong, Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan Paser Belengkong	10 Orang	87,780,000	Kantor Camat Paser Belengkong

7	0	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase Kegiatan Pelayanan administrasi Umum PD Berjalan Dengan Baik	%	%	100 %	<b>74,409,410</b>					100 %	<b>74,579,910</b>		
7	0	0	2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Yang Disediakan			26 Buah	1,329,500	Kab. Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan Paser Belengkong dan Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	26 Buah	1,500,000	Kantor Camat Pasir Belengkong
7	0	0	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan Jumlah Peralatan dan bahan Kebersihan yang disediakan			8 Jenis 9 Jenis	27,577,110	Kab. Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan Paser Belengkong dan Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	8 Jenis 9 Jenis	27,577,110	Kantor Camat Pasir Belengkong
7	0	0	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			7 Jenis	5,767,800	Kab. Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan Paser Belengkong dan Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	7 Jenis	5,767,800	Kantor Camat Pasir Belengkong
7	0	0	2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Konsumsi Rapat Yang Disediakan Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi			700 Kotak 60 Kali	39,735,000	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong, Kab. Paser Tanah Grogot,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan Paser Belengkong dan Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	700 Kotak 60 Kali	39,735,000	Kantor Camat Pasir Belengkong



7	0	0	2.	<b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penunjang Urusan Pemerintah Terpelihara Dengan Baik	%	%	100 %	<b>15,434,180</b>					100 %	<b>15,434,180</b>		
7	0	0	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5 Unit	12,632,180	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan Paser Belengkong	5 Unit	12,632,180	Kantor Camat Paser Belengkong
7	0	0	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	1,460,000	Kab. Paser Belengkong, Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan Paser Belengkong	2 Unit	1,460,000	Kantor Camat Paser Belengkong
7	0	0	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	1,342,000	Kab. Paser Belengkong, Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan Paser Belengkong	2 Unit	1,342,000	Kantor Camat Paser Belengkong
7	0	0		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80 %	70 %	72 %	<b>421,569,000</b>					72 %	<b>424,385,000</b>		
7	0	0	2.	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	%	%	100 %	<b>241,635,000</b>					100 %	<b>241,635,000</b>		

7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang diberikan (SPMHT, Rekom Ijin Usaha, Surat Pengantar KK, Surat Pindah, Surat Ahli Waris, SKTM, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Domisili)				500 Dokumen	261,860,000	Kab. Paser Belengkong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	500 Dokumen	261,860,000	Kantor Camat Paser Belengkong
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi				60 Orang	10,275,000	Kab. Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	60 Orang	10,275,000	Kantor Camat Paser Belengkong
7	01	02	2.03		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Presentase Koordinasi Pemeliharaan Prasaran dan Sarana Pelayanan Umum	%		%	100 %	<b>167,184,000</b>						100 %	<b>170,000,000</b>	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Publik Yang Terpelihara				2 Obyek	167,184,000	Kab. Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	2 Obyek	170,000,000	Kantor Camat Paser Belengkong
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	%		%	100 %	<b>12,750,000</b>						100 %	<b>12,750,000</b>	

7	0	0	2.	0	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Bansos Yang Dilayani					15 Dokumen	12,750,000	Kab. Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	15 Dokumen	12,750,000	Kantor Camat Pasir Belengkong
7	0	0	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	90 %		NA %	75 %		<b>121,784,370</b>						75 %	<b>121,784,370</b>	
7	0	0	3	2.	01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana	%		%	100 %		<b>121,784,370</b>						100 %	<b>121,784,370</b>	
7	0	0	3	2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Desa Yang Dilaksanakan				1 Kali	21,502,500		Kab. Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	1 Kali	21,502,500	Kantor Camat Pasir Belengkong
7	0	0	3	2.	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (PKK,Posyantek/TTG)				3 kegiatan	100,281,870		Kab. Paser Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	3 kegiatan	100,281,870	Kantor Camat Pasir Belengkong
7	0	0	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	70 %		50 %	55 %		<b>293,282,500</b>						55 %	<b>294,120,000</b>	
7	0	0	4	2.	01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %		<b>11,162,500</b>						100 %	<b>12,000,000</b>	
						Sinergitas dengan										Memperkuat	Peningkatan	Pegawai			

7	01	04	2.01	01	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang Dilaksanakan (FKDM)					15 Kali	11,162,500	Kab. Paser Belengkong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	dan Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	15 Kali	12,000,000	Kantor Camat Paser Belengkong
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Pesentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	%			100 %	<b>282,120,000</b>						100 %	<b>282,120,000</b>	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Koordinasi Bidang Penegakkan Peraturan Yang Dilaksanakan					12 Kali	282,120,000	Kab. Paser Belengkong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kecamatan Paser Belengkong dan Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	12 Kali	282,120,000	Kantor Camat Paser Belengkong
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	100 %			100 %	<b>40,773,500</b>						100 %	<b>40,773,500</b>	
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Presentase Kasus konflik Sosial Yang Tertangani/Terselesaikan di Wilayah Kecamatan	%				100 %	<b>40,773,500</b>						100 %	<b>40,773,500</b>	
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan										Memperkuat	Peningkatan	Pegawai Kantor Kecamatan			

7	01	05	2.01	01	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah HUT RI Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan					1 Kali	22,671,000	Kab. Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	an Paser Belengkong dan Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	1 Kali	22,671,000	Kantor Camat Pasir Belengkong
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan					1 Kali	18,102,500	Kab. Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan Paser Belengkong dan Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	1 Kali	18,102,500	Kantor Camat Pasir Belengkong
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %			100 %	100 %	<b>60,763,650</b>						100 %	<b>60,763,650</b>	
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana Dengan Baik	%			%	100 %	<b>60,763,650</b>						100 %	<b>60,763,650</b>	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Kepala Desa Yang Difasilitasi					15 Dokumen	18,550,000	Kab. Pasir Belengkong	Dana Transfer Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang	Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	15 Dokumen	18,550,000	Kantor Camat Pasir Belengkong

7	0	0	2	0	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa Yang Mengikuti Lomba				15 Desa	10,800,650	Kab. Paser Belengkong-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	15 Desa	10,800,650	Kantor Camat Pasir Belengkong
7	0	0	2	0	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Desa Yang Diterbitkan				60 Dokumen	18,623,000	Kab. Paser Belengkong-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	60 Dokumen	18,623,000	Kantor Camat Pasir Belengkong
7	0	0	2	0	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemilihan				7 Desa	8,400,000	Kab. Paser, Paser Belengkong, Lempesu Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong Kab. Paser Belengkong Kab. Paser, Paser Belengkong, Sunge Batu Kab. Paser, Paser Belengkong, Suatang Keteban	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kecamatan Paser Belengkong	7 Desa	8,400,000	Kantor Camat Pasir Belengkong
					Fasilitas Penataan, Pemanfaatan,	Jumlah Tapal						Kab. Paser	Dana	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Masyarakat			

7	01	06	2.01	15	dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Batas Objek Rupa Bumi				2 Segmen 2 Objek	4,390,000	Paser Belengkong, Semua Kelurahan	Transfer Dana Bagi Hasil	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Paser Belengkong	2 Segmen 2 Objek	4,390,000	Kantor Camat Paser Belengkong	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																				
7	01				<b>KECAMATAN</b>						<b>5,948,770,495</b>							<b>7,231,500,000</b>		
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>4,937,945,364</b>							72 %	<b>5,460,500,000</b>	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Laporan Keuangan	Dokumen		Dokumen	29 Dokumen	<b>4,735,774,462</b>							29 Dokumen	<b>5,067,000,000</b>	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	4,544,745,342	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	36 Orang/bulan	4,800,000,000	Kantor Camat Kuaro	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				125 Dokumen	191,029,120	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	125 Dokumen	250,000,000	Kantor Camat Kuaro	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	<b>72,659,030</b>							100 Persen	<b>199,000,000</b>	
7	01	01	2.06	00	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah ATK yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah				26 Paket 0 Paket	72,659,030	Kab. Paser Semua Kecamatan	Dana Transfer Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas	26 Paket 0 Paket	85,000,000	Kantor Camat	



7	01	02	2.002	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Pelayanan yang Diberikan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				250 Dokumen 0 Laporan	198,820,800	Kab. Paseban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	250 Dokumen 0 Laporan	250,000,000	Kantor Camat Kuaro
7	01	02	2.003		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	Persen		Persen	100 Persen	<b>559,850,011</b>						100 Persen	<b>650,000,000</b>	
7	01	02	2.003	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Sarana Persampahan Obyek Taman/Media Jalan Pasar Desa/Kelurahan yang Dikelola				0 Dokumen 3 Jenis 4 Obyek 1 Pasar	559,850,011	Kab. Paseban Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	0 Dokumen 3 Jenis 4 Obyek 1 Pasar	650,000,000	Kantor Camat Kuaro
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	70 %		50 %	55 %	<b>252,154,320</b>						55 %	<b>330,000,000</b>	
7	01	04	2.001		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban</b>	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	<b>252,154,320</b>						12 Kegiatan	<b>318,000,000</b>	

7	01	04	201	01	Umum	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan												
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Kegiatan		Kab. Paser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	12 Kegiatan	300,000,000	Kantor Camat Kuaro
									0 Laporan	252,154,320						0 Laporan	0	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7	01				<b>KECAMATAN</b>					<b>468,290,410</b>							<b>829,900,000</b>	
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %	70 %	72 %	<b>201,290,410</b>						72 %	<b>306,900,000</b>	
7	01	01	202		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	jumlah SPM yang di proses	dokumen	dokumen	45 dokumen	<b>160,000,000</b>						45 dokumen	<b>200,000,000</b>	
7	01	01	204		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			45 Dokumen	160,000,000	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	45 Dokumen	200,000,000	Kantor Camat Kuaro
7	01	01	206		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	persentase terselenggaranya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%	%	100 %	<b>23,680,410</b>						100 %	<b>72,000,000</b>	
														Peningkatan				

7	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 item	2,400,000	Kab. Paser, Kuario, Kuario	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	Meningk atnya akuntabi litas kinerja pemerint ah	4 item	3,000,000	Kantor Camat Kuario	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 item	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	Meningk atnya akuntabi litas kinerja pemerint ah	40 item	30,000,000	Kantor Camat Kuario	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3,000,000	Kab. Paser, Kuario, Kuario	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	Meningk atnya akuntabi litas kinerja pemerint ah	4 Paket	7,000,000	Kantor Camat Kuario	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				62 Dokumen	1,000,000	Kab. Paser, Kuario, Kuario	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	Meningk atnya akuntabi litas kinerja pemerint ah	62 Dokumen	2,000,000	Kantor Camat Kuario	
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				100 kotak 12 bulan	2,280,410	Kab. Paser, Kuario, Kuario	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	Meningk atnya akuntabi litas kinerja pemerint ah	100 kotak 12 bulan	30,000,000	Kantor Camat Kuario	
7	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	ersentase terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%		%	100 %	<b>15,500,000</b>							100 %	<b>30,700,000</b>	
													Dana	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas	Meningk atnya				



7	0	0		<b>PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80 %		70 %	72 %	<b>13,000,000</b>					72 %	<b>15,000,000</b>		
7	0	0	2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	%		%	100 %	<b>13,000,000</b>					100 %	<b>15,000,000</b>		
7	0	0	2.043	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	terbayarnya honorarium kader posyandu tersedianya makanan dan minuman rapat				12 bulan 80 kotak	13,000,000	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	12 bulan 80 kotak	15,000,000	Kantor Camat Kuaro
7	0	0	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	90 %		NA %	75 %	<b>254,000,000</b>					75 %	<b>508,000,000</b>		
7	0	0	2.032	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	jumlah kelompok masyarakat	kelompok		kelompok	4 kelompok	<b>254,000,000</b>					4 kelompok	<b>508,000,000</b>		
7	0	0	2.031	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir				40 Laporan	1,000,000	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	40 Laporan	2,000,000	Kantor Camat Kuaro
7	0	0	2.032	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun				1 kegiatan	100,000,000	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	1 kegiatan	300,000,000	Kantor Camat Kuaro
					Jumlah						Kab.	Dana	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Peran			

7	0	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	lembaga masyarakat yang diberdayakan				20 RT	150,000,000	Paser, Kuaro, Kuaro	Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	20 RT	200,000,000	Kantor Camat Kuaro		
7	0	0	2.	0	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				35 Laporan	8,000,000	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	35 Laporan	6,000,000	Kantor Camat Kuaro		
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>																					
7	0				<b>KECAMATAN</b>						<b>5,682,204,252</b>									<b>6,402,362,800</b>	
7	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>4,898,570,984</b>							72 %	<b>5,448,530,616</b>		
7	0	0	2.	0	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	persen		persen	100 persen	<b>14,728,000</b>							100 persen	<b>20,348,340</b>		
7	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7,545,300	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis	5 Dokumen	1,885,600	Kantor Camat Long Ikis		
7	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 dokumen	7,182,700	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis	5 dokumen	8,462,740	Kantor Camat Long Ikis		
7	0	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat</b>	Persentase temuan	persen		persen	100 persen	<b>4,666,322,388</b>							100 persen	<b>5,197,909,768</b>		

			2	<b>Daerah</b>	ditindaklanjuti															
7	0	0	2.002	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				360 Orang/bulan	4,489,394,720	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis	360 Orang/bulan	4,996,583,895	Kantor Camat Long Ikis	
7	0	0	2.004	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				200 Dokumen	174,736,768	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis	200 Dokumen	199,134,368	Kantor Camat Long Ikis	
7	0	0	2.005	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15 dokumen	2,190,900	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis	15 dokumen	2,191,505	Kantor Camat Long Ikis	
7	0	0	2.005	01	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai $\geq$ 80	nilai		nilai	70 nilai	<b>5,089,700</b>						70 nilai	<b>5,090,000</b>		
7	0	0	2.003	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	5,089,700	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Kantor Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis	12 Dokumen	5,090,000	Kantor Camat Long Ikis	
7	0	0	2.006	01	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	persen		persen	100 persen	<b>93,783,070</b>							100 persen	<b>99,026,398</b>	
			2.		Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen						Kab. Paser,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kantor			Kantor	

7010601	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1,182,880	Long Ikis, Semua Kelurahan	Umum-Dana Bagi Hasil	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Ikis	1 Paket	1,184,000	Camat Long Ikis
7010604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					5 Paket	19,729,290	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kantor Kecamatan Long Ikis	5 Paket	20,709,098	Kantor Camat Long Ikis
7010605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	2,784,900	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kantor Kecamatan Long Ikis	1 Paket	2,784,900	Kantor Camat Long Ikis
7010609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					189 Laporan	20,086,000	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kantor Kecamatan Long Ikis	189 Laporan	20,348,400	Kantor Camat Long Ikis
7010801	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	persen			persen	100 persen	<b>110,000,926</b>						100 persen	<b>110,001,110</b>	
7010802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	50,000,926	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kantor Kecamatan Long Ikis	12 Laporan	50,001,110	Kantor Camat Long Ikis
7010804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	60,000,000	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Kantor Kecamatan Long Ikis	12 Laporan	60,000,000	Kantor Camat Long Ikis

					yang Disediakan							Publik	n Yang Partisipatif					
7	0	0	2.		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	persen	persen	60 persen	<b>8,646,900</b>					60 persen	<b>16,155,000</b>		
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	3,766,900	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kantor Kecamatan Long Ikis	2 Unit	11,275,000	Kantor Camat Long Ikis
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	4,880,000	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kantor Kecamatan Long Ikis	4 Unit	4,880,000	Kantor Camat Long Ikis
7	0	0	2.		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80 %	70 %	72 %	<b>301,710,818</b>					72 %	<b>309,674,634</b>		
7	0	0	2.		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persen	persen	100 persen	<b>95,520,000</b>					100 persen	<b>99,360,000</b>		
7	0	0	2.		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar			3 Laporan	95,520,000	Kab. Paser, Long Ikis,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan	3 Laporan	99,360,000	Kantor Camat Long

1	2	2	2	Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil	Transformasi Pelayanan Publik	Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	an Long Ikis				Ikis
7	0	0	2.004	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persen		persen	100 persen	<b>206,190,818</b>						100 persen		<b>210,314,634</b>	
7	0	0	2.003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	206,190,818	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kecamatan Long Ikis	3 Laporan		210,314,634	Kantor Camat Long Ikis
7	0	0	03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	90 % %		0 % %	75 % 75 %	<b>165,392,450</b>						75 % 75 %		<b>172,277,450</b>	
7	0	0	2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	persen		persen	100 persen	<b>165,392,450</b>						100 persen		<b>172,277,450</b>	
7	0	0	2.011	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga	16,170,000	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kecamatan Long Ikis	5 Lembaga		23,055,000	Kantor Camat Long Ikis
7	0	0	2.0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan				3 Laporan	149,222,450		Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan	3 Laporan		149,222,450	Kantor Camat Long

1	3	01	3	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Dana Bagi Hasil	Transformasi Pelayanan Publik	Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	an Long Ikis				Ikis
7	0	0	4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	70 %	50 %	55 %	<b>203,330,000</b>						55 %	<b>295,440,000</b>		
7	0	0	4	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100 persen	<b>197,280,000</b>						100 persen	<b>289,390,000</b>		
7	0	0	4	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			4 Laporan	197,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kecamatan Long Ikis	4 Laporan	289,390,000		Kantor Camat Long Ikis
7	0	0	4	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persen	persen	100 persen	<b>6,050,000</b>						100 persen	<b>6,050,000</b>		
7	0	0	4	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan			4 Laporan	6,050,000		Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui	Masyarakat Kecamatan	4 Laporan	6,050,000		Kantor Camat Long



7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	10,200,000			Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat Kecamatan Long Ikis	50 Orang	12,825,000		Kantor Camat Long Ikis
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %		100 %	100 %	<b>78,000,000</b>							100 %	<b>129,174,000</b>		
7	01	06	2.01		<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Desa yang terfasilitasi	desa		desa	25 desa	<b>78,000,000</b>							25 desa	<b>129,174,000</b>		
7	01	06	2.01	02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	6,675,000		Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Desa di wilayah Kecamatan Long Ikis	5 Dokumen	6,680,000		Kantor Camat Long Ikis
7	01	06	2.01	03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				25 Dokumen	6,430,000		Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Desa di wilayah Kecamatan Long Ikis	25 Dokumen	6,448,700		Kantor Camat Long Ikis
					Fasilitas Penataan,	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka									Memperkuat	Peningkatan Kualitas					

7	0	0	2.	1	Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				3 Dokumen	4,895,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Desa di wilayah Kecamatan Long Ikis	3 Dokumen	8,045,300	Kantor Camat Long Ikis		
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																					
7	0				<b>KECAMATAN</b>							<b>413,869,390</b>								<b>426,285,472</b>	
7	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>233,977,694</b>						72 %	<b>240,997,025</b>			
7	0	0	2.		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase LHP nihil	persen		persen	100 persen	<b>154,811,200</b>						100 persen	<b>159,455,536</b>			
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100 Dokumen	154,811,200	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	100 Dokumen	159,455,536	Kantor Camat Long Ikis		
7	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	persen		persen	100 persen	<b>48,307,290</b>						100 persen	<b>44,606,509</b>			
7	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3,465,200	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	2 Paket	3,569,156	Kantor Camat Long Ikis		
7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	16,482,090	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang	0	8 Paket	16,976,553	Kantor Camat Long Ikis		

7	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,200,000	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	0	2 Paket	3,296,000	Kantor Camat Long Ikis	
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	20,160,000	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	0	150 Laporan	20,764,800	Kantor Camat Long Ikis	
7	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	persen		persen	100 persen	<b>24,999,204</b>							100 persen	<b>25,749,180</b>	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24,999,204	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	0	12 Laporan	25,749,180	Kantor Camat Long Ikis	
7	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	persen		persen	60 persen	<b>10,860,000</b>							60 persen	<b>11,185,800</b>	
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 3 Unit	10,860,000	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	0	0 Unit 3 Unit	11,185,800	Kantor Camat Long Ikis	



7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	0				<b>KECAMATAN</b>							<b>5,996,361,495</b>							<b>6,269,277,685</b>	
7	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>4,588,417,414</b>						72 %	<b>4,797,929,604</b>		
7	0	0	2.		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%		%	100 %	<b>28,075,000</b>						100 %	<b>40,650,000</b>		
7	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	10,900,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali	5 Dokumen	10,900,000	Kantor Camat Long Kali	
7	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPR)				7 Laporan	8,175,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali	7 Laporan	10,750,000	Kantor Camat Long Kali	
7	0	0	2.		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase LHP nihil Persentase temuan yang ditindaklanjuti	% %		% %	100 % 100 %	<b>4,067,084,919</b>						100 % 100 %	<b>4,245,662,109</b>		
7	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan				14 bulan 38 Orang	3,884,152,401	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang	Kecamatan Long Kali	14 bulan 38 Orang	4,060,229,591	Kantor Camat Long Kali	

						Tunjangan ASN							Partisipatif															
7	0	1	0	2.	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen keuangan (SPM, SPP)				324 Dokumen	166,410,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali	324 Dokumen	166,410,000							Kantor Camat Long Kali	
7	0	1	0	2.	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan				1 Laporan	16,522,518	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali	1 Laporan	19,022,518							Kantor Camat Long Kali	
7	0	1	0	2.	0	5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian dengan nilai $\geq 75$	%		%	70 %	<b>100,375,000</b>							70 %	<b>105,375,000</b>							
7	0	1	0	2.	0	5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang diperbarui datanya				38 Pegawai	10,375,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali	38 Pegawai	10,375,000						Kantor Camat Long Kali	
7	0	1	0	2.	0	6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	75 %	<b>207,513,260</b>								75 %	<b>220,113,260</b>						
7	0	1	0	2.	0	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen yang disediakan				55 Buah	2,414,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali	55 Buah	2,414,000						Kantor Camat Long Kali	
7	0	1	0	2.	0	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				29 Paket	28,999,260	Kab. Paser, Long Kali, Long	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Kecamatan Long Kali	29 Paket	30,999,260						Kantor Camat Long Kali	

											Kali		Publik	n Yang Partisipatif				
7	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	4,900,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali	4 Paket	5,500,000	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			256 Laporan	1,200,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali	256 Laporan	1,200,000	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase penyediaan jasa penunjang pelayanan kantor	%	%	80 %	121,509,020						80 %	121,659,020	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	550,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali	12 Laporan	700,000	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			24 Laporan	20,959,020	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali	24 Laporan	20,959,020	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	%	%	75 %	63,860,215						75 %	64,470,215	
					Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas								Peningkatan				

7	0	0	2.	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	35,200,215	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali	7 Unit	35,200,215	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3,660,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali	6 Unit	4,270,000	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali	1 Unit	25,000,000	Kantor Camat Long Kali
7	0	0		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80 %	70 %	72 %		<b>559,022,936</b>						72 %	<b>583,405,936</b>	
7	0	0	2.	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%	%	80 %		<b>181,830,000</b>						80 %	<b>199,830,000</b>	
7	0	0	2.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	79,410,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	12 Laporan	79,410,000	Kantor Camat Long Kali

7	01	02	2.03	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4 Laporan	102,420,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	4 Laporan	102,420,000	Kantor Camat Long Kali	
7	01	02	2.03		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang layak	%		%	70 %		<b>70,851,950</b>						70 %	<b>72,851,950</b>		
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					12 Dokumen	70,851,950	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	12 Dokumen	70,851,950	Kantor Camat Long Kali	
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada camat	%		%	80 %		<b>306,340,986</b>							80 %	<b>310,723,986</b>	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					3 Laporan	306,340,986	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali, Desa, Masyarakat	3 Laporan	310,723,986	Kantor Camat Long Kali	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	90 %		NA %	75 %		<b>217,219,439</b>							75 %	<b>221,219,439</b>	

7	0	0	2.	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksanakan	%	%	100 %	<b>217,219,439</b>						100 %	<b>221,219,439</b>	
7	0	0	2. 0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			23 lembaga	34,335,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat	23 lembaga	34,335,000	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2. 0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4 Laporan	182,884,439	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kecamatan Long Kali, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat	4 Laporan	182,884,439	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	70 %	50 %	55 %	<b>363,191,106</b>						55 %	<b>365,191,106</b>	
7	0	0	2. 0	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	%	%	100 %	<b>363,191,106</b>						100 %	<b>365,191,106</b>	
7	0	0	2. 0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di			12 Laporan	851,311,106	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	12 Laporan	851,311,106	Kantor Camat Long Kali

					Wilayah Kecamatan												
7	0	0	2.	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	11,880,000		Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	1 Laporan	13,880,000	Kantor Camat Long Kali
7	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	<b>42,096,600</b>						100 %	<b>49,096,600</b>	
7	0	0	2.	0	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	%	100 %	<b>42,096,600</b>					100 %	<b>49,096,600</b>	
7	0	0	2.	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	40 Orang	30,171,600		Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	40 Orang	33,171,600	Kantor Camat Long Kali

					Indonesia													
7	0	0	2.	0	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	11,925,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	60 Orang	15,925,000			Kantor Camat Long Kali
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %		100 %	100 %				100 %	<b>252,435,000</b>			
7	0	0	2.	0	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa yang terfasilitasi	%		%	100 %				100 %	<b>252,435,000</b>			
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen	10,540,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Desa	22 Dokumen	10,540,000			Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	12,615,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Desa	5 Dokumen	12,615,000			Kantor Camat Long Kali





7	0	0	2.	<b>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Presentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	%	%	80 %	<b>20,000,000</b>						80 %	<b>22,000,000</b>	
7	0	0	2.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	20,000,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparatur Kelurahan Long Kali	1 Unit	22,000,000	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	%	%	80 %	<b>76,789,102</b>						80 %	<b>79,199,000</b>	
7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan			250 Buah	2,500,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparatur Kelurahan	250 Buah	2,800,000	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	6,426,102	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparatur Kelurahan	12 Laporan	6,539,000	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1,802,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparatur Kelurahan	12 Laporan	1,900,000	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	Presentase Barang Inventaris dalam kondisi	%	%	80 %	<b>27,368,000</b>						80 %	<b>28,736,400</b>	

				<b>Pemerintahan Daerah</b>	baik												
7	0	0	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Unit	27,368,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aparatur Kelurahan Long Kali	6 Unit	28,736,400	Kantor Camat Long Kali
7	0	0		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80 %	70 %	72 %	<b>333,336,620</b>						72 %	<b>345,300,000</b>	
7	0	0	2.	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	%	%	80 %	<b>14,590,000</b>						80 %	<b>15,300,000</b>	
7	0	0	2.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	14,590,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat/Aparatur di Wilayah Kelurahan Long Kali	1 Laporan	15,300,000	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Jumlah Sarana Persampahan	Unit	Unit	1 Unit	<b>318,746,620</b>						1 Unit	<b>330,000,000</b>	
7	0	0	2.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	Jumlah Sarana Persampahan			1 Unit	318,746,620	Kab. Paser, Long Kali, Long	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Long Kali	1 Unit	330,000,000	Kantor Camat Long Kali

					Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							Kali		Publik	n Yang Partisipatif				
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%		%	100 %	<b>170,630,270</b>						100 %	<b>179,160,545</b>	
7	0	0	2.		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	%		%	100 %	<b>35,762,470</b>						100 %	<b>37,550,045</b>	
7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Usulan Musrembang Kelurahan yang terakomodir				200 Usulan	4,262,900	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Lembaga Masyarakat di wilayah Kelurahan Long Kali	200 Usulan	4,476,045	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di (LPTO, PKK, Posyandu, Posyantek)				2 Kali	31,499,570	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Lembaga Masyarakat di wilayah Kelurahan Long Kali	2 Kali	33,074,000	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.	0	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	%		%	100 %	<b>134,867,800</b>						100 %	<b>141,610,500</b>	
7	0	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang diberdayakan				1 Lembaga	195,990,000	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Lembaga Masyarakat di Kelurahan Long Kali	1 Lembaga	11,289,500	Kantor Camat Long Kali
7	0	0	2.	0	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	28,877,800	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Lembaga Masyarakat di Kelurahan Long Kali	1 Laporan	30,321,000	Kantor Camat Long Kali



7	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	12,326,700	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	5 Laporan	12,943,035	Kantor Camat Batu Sopang
7	0	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase temuan ditindak lanjuti	%	%		85 %	<b>3,620,627,983</b>						85 %	<b>3,801,659,487</b>	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	3,511,539,503	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	23 Orang/bulan	3,687,116,478	Kantor Camat Batu Sopang
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100 Dokumen	106,388,480	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	100 Dokumen	117,708,009	Kantor Camat Batu Sopang
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2,700,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	2 Laporan	2,835,000	Kantor Camat Batu Sopang
7	0	0	2.	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat</b>	Presentase rata rata capaian IKI dengan nilai ≥	%	%		75 %	<b>14,602,050</b>						75 %	<b>15,332,153</b>	





7	01	02	2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	%	100 %	<b>101,130,000</b>					100 %	<b>107,446,500</b>		
7	01	02	2.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			255 Laporan	101,130,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	255 Laporan	107,446,500	Kantor Camat Batu Sopang
7	01	02	2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	%	100 %	<b>198,287,500</b>					100 %	<b>200,078,041</b>		
7	01	02	2.03	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			4 Dokumen	198,287,500	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	4 Dokumen	200,078,041	Kantor Camat Batu Sopang
7	01	02	2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada Camat	%	%	100 %	<b>1,207,030,750</b>					100 %	<b>1,267,382,288</b>		

7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan 4 Laporan	207,030,750	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	0 Laporan 4 Laporan	1,267,382,288	Kantor Camat Batu Sopang
7	0	0	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	90 %		NA %	75 %	<b>94,634,750</b>						75 %	<b>98,380,138</b>	
7	0	0	2.	01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	%		%	85 %	<b>94,634,750</b>						85 %	<b>98,380,138</b>	
7	0	0	2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga	33,149,750	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	6 Lembaga	34,807,238	Kantor Camat Batu Sopang
7	0	0	2.	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 1 Laporan	61,485,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	0 Laporan 1 Laporan	63,572,900	Kantor Camat Batu Sopang



7	01	04	2.02	01	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			12 Laporan	29,068,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	12 Laporan	30,521,400	Kantor Camat Batu Sopang
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	100 %		<b>90,721,000</b>						100 %	<b>95,266,500</b>	
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	%	100 %	<b>90,721,000</b>						100 %	<b>95,266,500</b>	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik			60 Orang	44,991,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	60 Orang	47,250,000	Kantor Camat Batu Sopang

					Indonesia																
7	0	0	2.	0	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					60 Orang	3,435,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	60 Orang	3,606,750	Kantor Camat Batu Sopang	
7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					9 Dokumen	4,295,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	9 Dokumen	4,409,750	Kantor Camat Batu Sopang	
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %		100 %		100 %	<b>88,770,000</b>							100 %	<b>93,208,500</b>	
7	0	0	2.	0	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Desa yang terfasilitasi	Desa		Desa		9 Desa	<b>88,770,000</b>							9 Desa	<b>93,208,500</b>	
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata					9 Dokumen	4,430,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	0	9 Dokumen	4,651,500	Kantor Camat Batu Sopang	

					Pemerintahan Desa						Kajang		Publik	n Yang Partisipatif									
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	72,250,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	9 Dokumen	75,862,500	Kantor Camat Batu Sopang				
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 Dokumen	7,000,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	9 Dokumen	7,350,000	Kantor Camat Batu Sopang				
7	0	0	2.	1	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	3,825,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	2 Dokumen	4,016,250	Kantor Camat Batu Sopang				
7	0	0	2.	1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	1,265,000	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	9 Laporan	1,328,250	Kantor Camat Batu Sopang				
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>																							
7		0		<b>1 KECAMATAN</b>																<b>4,615,164,020</b>		<b>4,922,000,000</b>	
7	0	0	<b>1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO</b>																				
					Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %		<b>3,343,363,170</b>						72 %	<b>3,588,500,000</b>					

				<b>TA</b>															
7	0	0	2.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian sasaran strategis perangkat daerah"	Persen		Persen	90 Persen	<b>14,390,000</b>							90 Persen	<b>21,500,000</b>	
7	0	0	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah				1 Dokumen	5,965,000	Kab. Paser Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dokumen Perencanaan PD		1 Dokumen	11,500,000	Kantor Camat Muara Komam
7	0	0	2.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	8,425,000	Kab. Paser Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Dokumen Perencanaan PD		5 Laporan	10,000,000	Kantor Camat Muara Komam
7	0	0	2.0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase temuan ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,150,237,120</b>							100 Persen	<b>3,375,000,000</b>	
7	0	0	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang	3,027,840,000	Kab. Paser Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai PD		23 Orang	3,250,000,000	Kantor Camat Muara Komam
7	0	0	2.0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	22,397,120	Kab. Paser Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai PD		12 Dokumen	25,000,000	Kantor Camat Muara Komam
7	0	0	2.0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	<b>112,315,250</b>							100 Persen	<b>119,500,000</b>	
	0	0	2.0	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi						Kab. Paser Muara	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan				Kantor Camat

7	1	1	0	1	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					3 Paket	2,874,300	Komam, Muarakoman	Dana Bagi Hasil	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kesekretariatan	3 Paket	3,500,000	Muara Komam	
7	1	1	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					30 Paket	46,617,950	Kab. Paseh Muara Komam, Muarakoman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pelayanan Kesekretariatan	30 Paket	50,000,000	Kantor Camat Muara Komam	
7	1	1	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					5 Paket	10,563,000	Kab. Paseh Muara Komam, Muarakoman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pelayanan Kesekretariatan	5 Paket	11,000,000	Kantor Camat Muara Komam	
7	1	1	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					181 Laporan	52,260,000	Kab. Paseh Muara Komam, Muarakoman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pelayanan Kesekretariatan	181 Laporan	55,000,000	Kantor Camat Muara Komam	
7	1	1	2	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Persen		Persen		85 Persen	<b>27,500,000</b>							85 Persen	<b>28,000,000</b>	
7	1	1	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	27,500,000	Kab. Paseh Muara Komam, Muarakoman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pelayanan Kesekretariatan	3 Unit	28,000,000	Kantor Camat Muara Komam	
7	1	1	2	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Persen		Persen		100 Persen	<b>38,920,800</b>							100 Persen	<b>44,500,000</b>	
															Memperkuat	Peningkatan Kualitas					



7	01	02	2.03	01	gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	400,452,000	Kab. Paser Muara Komam, Muarakoman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	425,000,000	Kantor Camat Muara Komam
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen		Persen	100 Persen	<b>405,899,100</b>						100 Persen	<b>420,000,000</b>	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	405,899,100	Kab. Paser Muara Komam, Muarakoman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Laporan	420,000,000	Kantor Camat Muara Komam
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	90 %		NA %	75 %	<b>266,544,500</b>						75 %	<b>268,000,000</b>	
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	<b>266,544,500</b>						100 Persen	<b>268,000,000</b>	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	"Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa"				15 Lembaga	47,559,500	Kab. Paser Muara Komam, Muarakoman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemberdayaan Masyarakat Desa	15 Lembaga	48,000,000	Kantor Camat Muara Komam

7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	248,985,000	Kab. Paser Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 Laporan	250,000,000	Kantor Camat Muara Komam
7	0	0			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	70 %		50 %	55 %	<b>264,705,000</b>						55 %	<b>267,500,000</b>	
7	0	0	2.	0	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen		Persen	100 Persen	<b>6,253,000</b>						100 Persen	<b>7,500,000</b>	
7	0	0	2.	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	6,253,000	Kab. Paser Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kelompok Masyarakat	2 Laporan	7,500,000	Kantor Camat Muara Komam
7	0	0	7.	0	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Laporan		Laporan	9 Laporan	<b>258,452,000</b>						9 Laporan	<b>260,000,000</b>	
7	0	0	7.	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara				9 Laporan	258,452,000	Kab. Paser Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kelompok Masyarakat	9 Laporan	260,000,000	Kantor Camat Muara Komam

				Negara Republik Indonesia	Republik Indonesia												
7	0	0		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	<b>41,200,000</b>						100 %	<b>45,000,000</b>		
7	0	0	2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	Kegiatan	2 Kegiatan	<b>41,200,000</b>					2 Kegiatan	<b>45,000,000</b>		
7	0	0	2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			300 Orang	\$1,340,500	Kab. Paser Muara Komam, Muarakoman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kelompok Masyarakat	300 Orang	\$5,000,000	Kantor Camat Muara Komam
				Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra							Memperkuat	Peningkatan Kualitas				

7	0	0	2.	0	Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				120 Orang	9,859,500	Kab. Paser Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kelompok Masyarakat	120 Orang	10,000,000	Kantor Camat Muara Komam	
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %		100 %	100 %	<b>34,769,750</b>							100 %	<b>38,000,000</b>	
7	0	0	2.	0	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Desa yang terfasilitasi	Desa		Desa	9 Desa	<b>34,769,750</b>							9 Desa	<b>38,000,000</b>	
7	0	0	2.	0	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	6,419,750	Kab. Paser Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintahan Desa	1 Dokumen	7,000,000	Kantor Camat Muara Komam	
7	0	0	2.	0	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	4,980,000	Kab. Paser Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintahan Desa	12 Dokumen	6,000,000	Kantor Camat Muara Komam	
7	0	0	2.	0	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	5,970,000	Kab. Paser Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintahan Desa	6 Dokumen	7,000,000	Kantor Camat Muara Komam	

7	0	0	2.	1	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	7,400,000	Kab. Paser Muara Komam, Muarakoman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemerintahan Desa	2 Dokumen	8,000,000	Kantor Camat Muara Komam	
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>																				
7	0	<b>1 KECAMATAN</b>										363,065,170								363,065,170
7	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	212,661,270						72 %	212,661,270		
7	0	0	2.		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase temuan ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	135,899,120						100 Persen	135,899,120		
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	165,899,120	Kab. Paser Muara Komam, Muarakoman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai PD	12 Dokumen	165,899,120	Kantor Camat Muara Komam	
7	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	64,879,138						100 Persen	64,879,138		
7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	25,675,138	Kab. Paser Muara Komam, Muarakoman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pelayanan Kesekretariatan	16 Paket	25,675,138	Kantor Camat Muara Komam	
						Jumlah Paket							Dana	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas					

7010605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	3,774,000		Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pelayanan Kesekretariatan	4 Paket	3,774,000	Kantor Camat Muara Komam
7010609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					80 Laporan	35,430,000	Kab. Paseh Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pelayanan Kesekretariatan	80 Laporan	35,430,000	Kantor Camat Muara Komam
70108	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Persen		Persen	100 Persen		<b>11,883,012</b>						100 Persen	<b>11,883,012</b>	
7010801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2 Laporan	600,000	Kab. Paseh Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pelayanan Kesekretariatan	2 Laporan	600,000	Kantor Camat Muara Komam
7010802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan	11,283,012	Kab. Paseh Muara Komam, Muarakomam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pelayanan Kesekretariatan	24 Laporan	11,283,012	Kantor Camat Muara Komam
70102	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80 %		70 %	72 %		<b>34,310,000</b>						72 %	<b>34,310,000</b>	
70102	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja</b>	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen		<b>48,900,000</b>						100 Persen	<b>48,900,000</b>	

				<b>Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													
7	01	02	2.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	18,900,000	Kab. Paser Muara Komam, Muarakoman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kelompok Masyarakat	9 Laporan	18,900,000	Kantor Camat Muara Komam
7	01	02	2.004	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen		Persen	100 Persen	<b>15,410,000</b>						100 Persen	<b>15,410,000</b>	
7	01	02	2.004	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	15,410,000	Kab. Paser Muara Komam, Muarakoman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4 Laporan	15,410,000	Kantor Camat Muara Komam
7	01	03		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	90 %		NA %	75 %	<b>116,093,900</b>						75 %	<b>116,093,900</b>	
7	01	03	2.002	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	<b>116,093,900</b>						100 Persen	<b>116,093,900</b>	
7	01	03	2.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	"Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan"				17 Lembaga	8,093,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	17 Lembaga	8,093,900	Kantor Camat Muara Komam

7	0	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					18 Pokmas / Ormas	108,000,000	Kab. Paser Muara Komam, Muarakom	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	108,000,000	Kantor Camat Muara Komam
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																				
7	0	<b>KECAMATAN</b>													<b>4,115,230,253</b>				<b>4,669,260,193</b>	
7	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %		<b>3,394,614,215</b>						72 %	<b>3,841,023,618</b>	
7	0	0	2.	0	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketetapan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Persen		Persen	100 Persen		<b>75,392,620</b>						100 Persen	<b>86,544,892</b>	
7	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	6,738,600	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Kantor Kecamatan Batu Engau	5 Dokumen	6,839,679	Kantor Camat Batu Engau
7	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	68,654,020	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Kantor Kecamatan Batu Engau	5 Laporan	76,705,213	Kantor Camat Batu Engau
7	0	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Temuan Tindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen		<b>2,990,988,695</b>						100 Persen	<b>3,383,234,825</b>	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan					294 Orang	2,913,083,595	Kab. Paser, Batu Engau, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Sekretariat Kantor Kecamatan Batu Engau	294 Orang	3,286,905,133	Kantor Camat Batu Engau

						ASN					Kelurahan	Hasil	i Pelayanan Publik	n Yang Partisipatif	Engau				
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				150 Dokumen	70,215,000	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Kantor Kecamatan Batu Engau	150 Dokumen	88,524,240	Kantor Camat Batu Engau
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15 Laporan	7,690,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Kantor Kecamatan Batu Engau	15 Laporan	7,805,452	Kantor Camat Batu Engau
7	0	0	2.	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian IKI dengan Nilai >80	%		%	72 %	<b>110,950,000</b>						72 %	<b>133,249,200</b>	
7	0	0	2.	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	10,950,000	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Kantor Kecamatan Batu Engau	6 Dokumen	13,249,200	Kantor Camat Batu Engau
7	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	<b>122,006,400</b>						100 Persen	<b>127,614,836</b>	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,653,700	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Kantor Kecamatan Batu Engau	1 Paket	3,708,810	Kantor Camat Batu Engau
												Kab.		Memperkuat	Peningkatan Kualitas	Sekretari			

7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,617,400	Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	at Kantor Kecamatan Batu Engau	1 Paket	2,659,300	Kantor Camat Batu Engau	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	50,440,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Kantor Kecamatan Batu Engau	3 Paket	53,955,271	Kantor Camat Batu Engau	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,545,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Kantor Kecamatan Batu Engau	1 Paket	4,613,175	Kantor Camat Batu Engau	
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				234 Laporan	61,750,000	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Kantor Kecamatan Batu Engau	234 Laporan	62,678,280	Kantor Camat Batu Engau	
7	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Persen		Persen	100 Persen	<b>80,670,000</b>							100 Persen	<b>81,880,050</b>	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	500,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Kantor Kecamatan Batu Engau	50 Laporan	507,500	Kantor Camat Batu Engau	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	52,570,000	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Sekretariat Kantor Kecamatan Batu Engau	12 Laporan	53,358,550	Kantor Camat Batu Engau	



7	01	02	2.02	<b>yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>98,650,000</b>					100 Persen	<b>119,183,030</b>		
7	01	02	2.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	97,150,000	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kec.Batu Engau Kab.Paser	7 Laporan	106,240,050	Kantor Camat Batu Engau
7	01	02	2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kec.Batu Engau Kab.Paser	1 Laporan	12,942,980	Kantor Camat Batu Engau
7	01	02	2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>53,200,000</b>						100 Persen	<b>53,998,000</b>	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	53,200,000	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	13 Desa Kecamatan Batu Engau	3 Laporan	53,998,000	Kantor Camat Batu Engau
7	01	03		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	90 %		NA %	75 %	<b>8,881,727</b>						75 %	<b>16,129,434</b>	

7	0	0	2.	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	<b>8,881,727</b>						100 Persen	<b>16,129,434</b>	
7	0	0	2.0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga	3,452,084	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kec. Batu Engau Kab.Paser	6 Lembaga	3,452,084	Kantor Camat Batu Engau
7	0	0	2.0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	5,429,643	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kec. Batu Engau Kab.Paser	3 Laporan	12,677,350	Kantor Camat Batu Engau
7	0	0	4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	70 %		50 %	55 %	<b>276,658,460</b>						55 %	<b>290,958,885</b>	
7	0	0	2.0	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	55 %	<b>16,350,000</b>						55 %	<b>21,670,250</b>	
7	0	0	2.0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di				4 Laporan	16,350,000	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Kec.Batu Engau Kab.Paser	4 Laporan	21,670,250	Kantor Camat Batu Engau



7	0	0	2.	0	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	10,004,256		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	13 Desa Kecamatan Batu Engau	50 Orang	61,879,326	Kantor Camat Batu Engau
7	0	0	2.	0	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	45,104,540	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	13 Desa Kecamatan Batu Engau	50 Orang	45,883,075	Kantor Camat Batu Engau
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %		100 %	100 %	<b>228,117,055</b>						100 %	<b>240,204,825</b>	
7	0	0	2.	0	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan</b>	Jumlah Desa yang terfasilitasi Persentase terselenggaranya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan	Desa Persen		Desa Persen	13 Desa 100 Persen	<b>228,117,055</b>						13 Desa 100 Persen	<b>240,204,825</b>	

					<b>Desa</b>	pengawasan pemerintahan desa													
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	4,015,220	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	13 Desa Kecamatan Batu Engau	13 Dokumen	4,080,300	Kantor Camat Batu Engau
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	8,345,190	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	13 Desa Kecamatan Batu Engau	13 Dokumen	8,475,250	Kantor Camat Batu Engau
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	16,425,300	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	13 Desa Kecamatan Batu Engau	13 Dokumen	16,251,450	Kantor Camat Batu Engau
7	0	0	2.	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				13 Dokumen	73,310,345	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	13 Desa Kecamatan Batu Engau	13 Dokumen	77,906,325	Kantor Camat Batu Engau
7	0	0	2.	1	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan				3 Dokumen	18,536,000	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	13 Desa Kecamatan Batu Engau	3 Dokumen	18,793,850	Kantor Camat Batu Engau



7	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	10,080,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	kesalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Laporan	12,000,000	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7	0	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase PD yang menyusun LKJIP tepat waktu	persen		persen	100 persen	<b>2,195,811,063</b>						100 persen	<b>406,899,501</b>		
7	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				132 Orang	2,003,490,763	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya kemampuan PD dlm menyusun laporan kinerja	132 Orang	2,004,497,201	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	17,280,300	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kemampuan PD dlm menyusun laporan kinerja	5 Dokumen	20,152,300	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,040,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kemampuan PD dlm menyusun laporan kinerja	1 Laporan	6,250,000	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	persen		persen	100 persen	<b>127,851,196</b>							100 persen	<b>144,019,255</b>	

7	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1,747,676	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	meningk atkan kualitas pelayana n adminita si umum kec tanjung harapan	1 Paket	2,200,000	Kantor Camat Tanjung Harapan		
7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	20,133,520	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	meningk atkan kualitas pelayana n adminita si umum kec tanjung harapan	1 Paket	22,195,255	Kantor Camat Tanjung Harapan		
7	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	6,150,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	meningk atkan kualitas pelayana n adminita si umum kec tanjung harapan	1 Paket	7,124,000	Kantor Camat Tanjung Harapan		
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					145 Laporan	99,820,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	meningk atkan kualitas pelayana n adminita si umum kec tanjung harapan	145 Laporan	12,500,000	Kantor Camat Tanjung Harapan		
7	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen		100 persen	<b>23,615,500</b>								100 persen	<b>25,460,222</b>	
					Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa							Kab. Paser,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan	meningk atkan kualitas pelayana n				Kantor	

7	0	0	2	0	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	23,615,500	Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Umum-Dana Bagi Hasil	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	penyediaan jasa penunjang urusan kecamatan tanjung harapan	1 Laporan	25,460,222	Camat Tanjung Harapan	
7	0	0	2	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	<b>28,278,020</b>							100 persen	<b>29,218,020</b>	
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	26,818,020	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatkan barang inventaris dalam kondisi baik	2 Unit	26,818,020	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1,460,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatkan barang inventaris dalam kondisi baik	5 Unit	2,400,000	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7	0	0	2	0	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80 %		70 %	72 %	<b>33,615,000</b>							72 %	<b>35,925,000</b>	
7	0	0	2	0	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di</b>	Jumlah Dokumen Pelayanan yang diberikan	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	<b>35,925,000</b>							100 Dokumen	<b>35,925,000</b>	

				<b>Kecamatan</b>														
7	0	0	2.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	16,807,500	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	12 Laporan	18,500,000	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	0	0	2.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	16,807,500	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	5 Laporan	17,425,000	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	0	0	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	90 %		NA %	75 %	<b>79,535,000</b>						75 %	<b>79,535,000</b>	
7	0	0	2.	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan	persen		persen	100 persen	<b>79,535,000</b>						100 persen	<b>79,535,000</b>	
7	0	0	2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	79,535,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	12 Laporan	79,535,000	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	0	0	4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	70 %		50 %	55 %	<b>290,740,000</b>						55 %	<b>315,250,000</b>	

7	0	0	2.	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	kegiatan yang ditindaklanjuti (berjalan baik) / seluruh kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum dikoordinasikan x 100	persen	persen	100 persen	<b>290,740,000</b>					100 persen	<b>315,250,000</b>		
7	0	0	2.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			12 Laporan	290,740,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	12 Laporan	315,250,000	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	0	0		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	<b>26,300,000</b>					100 %	<b>29,750,000</b>		
7	0	0	2.	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	jumlah Koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persen	persen	100 persen	<b>26,300,000</b>					100 persen	<b>29,750,000</b>		
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan					Kab.	Dana	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas	Meningkatkan urusan			

7	0	0	2.	0	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	6,150,000	Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	250 Orang	7,250,000	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7	0	0	2.	0	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	20,150,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatkan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	100 Orang	22,500,000	Kantor Camat Tanjung Harapan	
7	0	0	0	6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %		100 %	100 %	<b>44,597,000</b>						100 %	<b>46,875,000</b>		
7	0	0	2.	0	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	jumlah Koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persen		persen	100 persen	<b>44,597,000</b>							100 persen	<b>46,875,000</b>	
						Jumlah Dokumen yang								Memperkuat	Peningkatan	Meningkatkan				

7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					7 Dokumen	16,807,500	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	7 Dokumen	17,450,000	Kantor Camat Tanjung Harapan			
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan					7 Laporan	16,807,500	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatkan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	7 Laporan	17,425,000	Kantor Camat Tanjung Harapan			
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					7 Dokumen	10,982,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Meningkatkan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	7 Dokumen	12,000,000	Kantor Camat Tanjung Harapan			
<b>7</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																		
<b>7</b>	<b>0</b>				<b>KECAMATAN</b>							<b>3,137,628,730</b>										<b>3,452,220,260</b>	
7	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %		70 %	72 %	<b>2,390,946,102</b>								72 %	<b>2,639,864,997</b>			
7	0	0	2.		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Persentase capaian sasaran strategis perangkat daerah Persentase ketepatan tahapan penyusunan	Nilai % %		Nilai % %	77 Nilai 90 % 100 %	<b>18,778,100</b>								77 Nilai 90 % 100 %	<b>21,559,665</b>			

						dokumen perencanaan PD													
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	8,867,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	5 Dokumen	1,500,000	Kantor Camat Muara Samu
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	9,911,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	5 Laporan	10,059,665	Kantor Camat Muara Samu
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase LHP nihil	%		%	100 %	<b>1,998,643,902</b>						100 %	<b>2,210,653,040</b>	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				144 Orang/bulan	1,889,990,862	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	144 Orang/bulan	2,100,000,000	Kantor Camat Muara Samu
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				200 Dokumen	6,761,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	200 Dokumen	6,761,400	Kantor Camat Muara Samu
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15 Laporan	41,891,640	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	15 Laporan	41,891,640	Kantor Camat Muara Samu

7	0	0	2.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	%	%	80 %	<b>77,656,000</b>						80 %	<b>68,056,500</b>	
7	0	0	2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			34 Paket	13,600,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	34 Paket	0	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12 Dokumen	64,056,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	12 Dokumen	64,056,500	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	%	%	100 %	<b>114,179,360</b>						100 %	<b>129,695,360</b>	
7	0	0	2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	5 Paket	2,000,000	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	1,200,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	2 Paket	2,000,000	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			18 Paket	18,000,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	ASN	18 Paket	22,333,510	Kantor Camat Muara Samu
					Jumlah Paket							Memperkuat	Peningkatan Kualitas				

7	0	0	2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4,809,300	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	ASN	4 Paket	4,809,300	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	36,170,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	ASN	100 Laporan	36,552,550	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	2.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	3,000,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	ASN	5 Dokumen	5,000,000	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	2.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	%	%		75 %	<b>10,000,000</b>						75 %	<b>23,500,000</b>	
7	0	0	2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	0	2 Unit	23,500,000	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	2.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	%	%		100 %	<b>115,700,000</b>						100 %	<b>116,686,000</b>	
7	0	0	2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	500,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah	0	50 Laporan	1,000,000	Kantor Camat Muara Samu

7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan	32,400,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	24 Laporan	32,886,000	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	32,800,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	12 Laporan	32,800,000	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	2.	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	%		%		45 %	<b>55,988,800</b>						45 %	<b>69,714,432</b>	
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4 Unit	35,000,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aset Daerah	4 Unit	38,560,800	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 Unit	10,988,800	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aset Daerah	8 Unit	11,153,632	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	10,000,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Aset Daerah	2 Unit	20,000,000	Kantor Camat Muara Samu



7	0	0	2.	0	Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	95,744,380	Paser, Muara Samu, Muser	Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	12 Dokumen	95,744,380	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	2.	0	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	%	100 %		<b>50,000,000</b>						100 %	<b>63,000,000</b>	
7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2 Laporan		50,000,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	0	2 Laporan	63,000,000	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0	0		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	90 %	NA %	75 %		<b>101,910,199</b>						75 %	<b>113,000,000</b>	
					Tingkat pertumbuhan usaha/keompok usaha baru	%	%	25 %									25 %		
7	0	0	2.	0	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	%	%	100 %		<b>101,910,199</b>						100 %	<b>113,000,000</b>	
7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			6 lembaga		25,919,900	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	0	6 lembaga	27,000,000	Kantor Camat Muara Samu



7	0	0	2.	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	%	100 %	<b>34,412,987</b>					100 %	<b>34,412,987</b>	
7	0	0	2.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			9 Laporan	34,412,987	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	9 Laporan	34,412,987	Kantor Camat Muara Samu
7	0	0		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	<b>35,184,000</b>					100 %	<b>39,596,987</b>	
7	0	0	2.	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Kegiatan	Kegiatan	2 Kegiatan	<b>35,184,000</b>					2 Kegiatan	<b>39,596,987</b>	
7	0	0	2.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik			20 Orang	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan	Masyarakat	20 Orang	34,412,987	Kantor Camat Muara Samu

				1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Hasil	i Pelayanan Publik	n Yang Partisipatif						
7	0	0	2.	0	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			30 Orang	5,184,000	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	30 Orang	5,184,000	Kantor Camat Muara Samu	
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %		100 %	100 %						100 %	<b>124,754,009</b>		
7	0	0	2.	0	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Desa yang terfasilitasi	Desa		Desa	9 Desa						9 Desa	<b>124,754,009</b>		
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan				18 Dokumen	2,280,000	Kab. Paser, Muara Samu,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Melalui	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui	Desa	18 Dokumen	2,494,200	Kantor Camat Muara Samu



					Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah													
8	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	4,300,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Bakesbangpol Paser	5 Dokumen	4,514,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Bakesbangpol Paser		30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2.	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Presentase temuan yang ditindak lanjuti	%		%	100 %	<b>5,262,002,457</b>						100 %	<b>5,578,479,037</b>	
8	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					35 Orang/bulan	4,896,157,457		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai pada Bakesbangpol Paser	35 Orang/bulan	5,212,634,037	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						365,845,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai pada Bakesbangpol Paser		365,845,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	<b>327,172,070</b>						100 %	<b>303,829,000</b>	
8	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	702,150		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang	Pegawai Pada Bakesbangpol Paser	1 Paket	710,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan				1 paket	1,200,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Partisipatif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Pada Bakesbangpol Paser	1 paket	19,870,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	46,259,920		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Pada Bakesbangpol Paser	2 Paket	41,405,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 Paket	35,060,000	Kab. Paser Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Pada Bakesbangpol Paser	2 Paket	36,540,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	5,200,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Pada Bakesbangpol Paser	12 Dokumen	5,304,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi				120 laporan	238,750,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Pegawai Pada Bakesbangpol Paser	120 laporan	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2.	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya barang milik daerah	Unit		Unit	4 Unit	<b>19,714,200</b>								4 Unit	<b>19,983,909</b>	
8	0	0	2.	0	Pengadaan Mebel						19,714,200		Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui	bakesbangpol		19,983,909	Badan Kesatuan Bangsa dan	

												Dana Bagi Hasil	Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Yang Partisipatif	Paser			Politik
8	0	0	2.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	<b>23,664,099</b>							100 %	<b>72,184,161</b>	
8	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6,430,000			Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Bakesbangpol Paser		6,526,450	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	17,234,099		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Bakesbangpol Paser	12 Laporan	65,657,711	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik negara yang terpelihara	%	%	100 %	<b>22,020,000</b>							100 %	<b>22,020,000</b>	
8	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	17,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Barang Milik Daerah	3 Unit	17,760,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan				4,260,000			Dana Transfer Umum-		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui	Barang Milik		4,260,000	Badan Kesatuan Bangsa dan

			9	Mesin Lainnya								Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Yang Partisipatif	Daerah			Politik
8	0	0		<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Persentase penurunan konflik berbau sara	100 %		100 %	100 %		<b>130,227,000</b>					100 %	<b>132,180,405</b>	
8	0	0	2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dirumuskan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen		<b>130,227,000</b>					6 Dokumen	<b>132,180,405</b>	
8	0	0	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				2 Dokumen		<b>50,227,000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat, pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat	2 Dokumen	<b>50,980,405</b>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika				90 Orang		<b>80,000,000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat, pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat	90 Orang	<b>81,200,000</b>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



					Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Umum		n Yang Partisipatif				
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Orang	5,262,803,074			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat dan Partai Politik	40 Orang	785,858,797	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	121,029,100			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat dan Partai Politik	2 Laporan	23,303,945	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8	0	0		<b>PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKA TAN</b>	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	75 %		75 %	75 %	<b>202,487,25 0</b>					75 %	<b>135,406,58 3</b>		
8	0	0	2.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n</b>	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	<b>202,487,25 0</b>				5 Dokumen		<b>135,406,58 3</b>		
8	0	0	2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				175 Orang	73,322,070		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	Organisa si Masyara kat	175 Orang	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan				40 Orang	36,244,780		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintah n Yang Partisipatif	Organisa si Masyara kat	40 Orang	41,287,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

				Daerah	Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
8	0	0	2.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	92,920,400			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Organisasi Masyarakat	2 Laporan	54,119,283	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	<b>719,999,930</b>							100 %	<b>730,799,929</b>	
8	0	0	2.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama yang dirumuskan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	<b>719,999,930</b>							5 Dokumen	<b>730,799,929</b>	
8	0	0	2.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan				5 Dokumen	200,000,00			Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyara	5 Dokumen	203,000,00	Badan Kesatuan



80106				<b>PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	100 %		100 %	100 %	<b>1,503,999,400</b>					100 %	<b>1,700,350,000</b>	
80106	2.01			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social yang dirumuskan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	<b>1,503,999,400</b>					6 Dokumen	<b>1,700,350,000</b>	
80106	2.01	01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						14,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	15,225,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
80106	2.01	02		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi						14,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	17,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



8	0	0	2.	0	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				44 Laporan	274,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	44 Laporan	274,000,000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1,049,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif	Masyarakat	12 Dokumen	1,065,750,000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>TOTAL</b>											<b>1,644,650,714,583</b>								<b>1,460,324,832,570</b>		



## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, untuk itu penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Maka, Kepala Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome ataupun output pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Ditetapkannya indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan. Indikator makro pembangunan terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Gini. Adapun target indikator kinerja utama Kabupaten Paser Tahun 2023 disajikan pada tabel 6.1 berikut ini.



**Tabel 6.1**  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser

No	INDIKATOR	TARGET TAHUN	
		2022	2023
1	2	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	73.03	73.77
2	Angka Kemiskinan	8.00	8,80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.45	4,5
4	Pertumbuhan Ekonomi	1,32	3,5-4,5
5	Indeks Gini	0,275	0.270
6	Indeks Reformasi Birokrasi	60 (CC)	65 (CC)
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4	5
8	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	52.73	59.18
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,43	74,56
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	195,5	195
11	Umur Harapan Hidup	72.80	72.90
12	Angka Harapan Lama Sekolah	13.25	13.30
13	Rata-rata Lama Sekolah	8.60	8.70
14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	72
15	Nilai SAKIP	61 (B)	65 (B)
16	Nilai IKM daerah	80	81
17	Angka Kriminalitas	52	51
18	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang	4.90	5.14
19	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	0.01	1.12



Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Paser merupakan capaian pembangunan, maka secara keseluruhan indikator pembangunan Kabupaten Paser disajikan pada tabel 6.2 sebagai berikut :

**Tabel 6.2**

Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										
<b>PENDIDIKAN</b>										
1	APK SD	%	108.62	108.62	108.62	107.00	108.00	104.00	100	100
2	APK SMP	%	95.00	95.00	95.00	95.50	96.00	98.00	100	100
3	APM SD	%	97.87	97.87	97.87	98.00	98.50	99.00	100	100
4	APM SMP	%	81.58	81.58	95.00	95.50	96.00	98.00	100	100
5	APK PAUD	%	37.60	37.60	37.60	38.00	39.00	39.50	40.00	40.00
6	Angka Putus Sekolah SD	%	0.94	0.94	0.90	0.70	0.70	0.50	0.25	0.25
7	Angka Putus Sekolah SMP	%	2.28	2.28	2	1.5	1	0.5	0	0
8	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	%	90	90	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Pendidik sesuai standar	%	90	90	90	91	91	92	92	92
10	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Tenaga Kependidikan sesuai standar	%	NA	50	50	55	60	65	70	70
11	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
<b>KESEHATAN</b>										
1	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan pengendalian dan pengawasan Obat, alkes dan makanan minuman	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase UKBM Aktif	%	NA	57.5	60	70	80	90	100	100
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										
1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	34,62	39	54	58	62	66	70	70



No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
2	Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	%	67,48	71	75	80	85	90	95	95
3	Persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi baik	%	67	68	70	73	76	80	85	85
4	Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik.	%	78	81	82	84	86	88	90	90
5	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	%	49	55	61	68	74	82	91	91
6	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	%	1	20	25	30	36	43	50	50
7	Persentase capaian akses air minum layak	%	66,88	70	76	81	87	93	100	100
8	Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	%	67,13	71	75	78	82	86	90	90
9	Persentase Bangunan dan Infrastruktur Persampahan yang berfungsi dengan baik	%	40	45	50	55	60	65	70	70
10	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang	%	44.68	47.50	52.73	59.18	65.82	72.47	78.91	78.91
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>										
1	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	%	3.25	8.44	27.92	47.40	66.88	86.36	100	100
2	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani	%	0	5	15	30	50	70	90	90
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	88.30	89.26	90.23	91.20	92.17	93.13	94.10	94.10
4	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	35.58	39.58	44.58	51.58	58.58	65.58	72.58	72.58
<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										
1	Persentase penurunan pelanggaran perda	%	NA	50	50	55	60	65	70	70
2	Presentase Demonstrasi Anarkis	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cakupan layanan kebakaran kabupaten	%	NA	10	30	40	50	60	70	70
4	Cakupan layanan penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>SOSIAL</b>										
1	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan layanan penanganan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	TMP dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100



No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>TENAGA KERJA</b>										
1	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	40	50	60	70	85	100	100
3	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	30	40	30	30	30	30	30	30
4	Tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	%	38.46	40	40	40	40	40	40	40
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>										
1	Persentase partisipasi perempuan	%	34.39	36	37.50	40.00	43.50	46.50	49.50	49.50
2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	36	45	59.52	71.43	83.33	100	100	100
3	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	%	82.35	90	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan	%	40	45	50	60	70	80	90	90
5	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak	%	23.81	30	47.62	59.52	71.43	83.33	95.24	95.24
6	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Poin	560	580	600	650	700	750	800	800
7	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>PANGAN</b>										
1	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	%	30	30	31	50	55	60	65	65
2	Tingkat ketersediaan pangan	%	97.59	97.70	97.77	97.90	98	98.5	99	99
3	Tingkat konsumsi pangan	%	84.1	85	85	86	87	88	89	89
4	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	%	20.83	19.44	18.75	18.06	17.36	16.67	15.97	15.97
5	Persentase Penyaluran cadangan Pangan	%	38.84	10	10	10	10	10	10	50
6	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	%	71,67	80	80	82	84	86	88	88
<b>PERTANAHAN</b>										
1	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	%	14.29	28.57	42.86	57.14	71.43	85.71	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	16.67	33.33	44.44	55.56	66.67	83.33	100	100



No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
3	Persentase proses penetapan tanah ulayat	%	NA	NA	30	50	80	100	-	100
4	Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	%	NA	NA	10	30	50	70	100	100
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>										
1	Persentase Dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	%	50	55	62.5	70	83.3	85.71	87.50	87.50
2	Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	68	69	70	73	75	78	80	80
3	Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	3	4.5	6	9	12	15	18	18
4	Persentase jumlah perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3	%	50	55	60	80	100	100	100	100
5	Persentase Perusahaan / pelaku usaha yang mendapat kan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan	%	55	65	80	100	100	100	100	100
6	Presentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.	%	11.22	25	40	55	65	75	85	85
7	Rasio luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan taman kehati yang dikelola	%	48.71	50	55	60	65	70	75	75
8	Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	0	0	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah predikat penghargaan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Buah	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Tropi adipura	1 Tropi adipura
10	Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	68.75	80	100	100	100	100	100	100
11	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	39.57	42.50	45	53	61	70	70	70
12	Persentase pengelolaan sampah disumber	%	11.37	12	14	19	24	30	30	30
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										
1	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	%	95	95	95	96	97	98	98	98
2	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	%	95	95	95	96	97	98	98	98
3	Persentase data kependudukan yang valid	%	95	95	95	96	97	98	98	98
4	Persentase pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100



No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>										
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	78.65	79	80	85	90	95	100	100
2	Lembaga Adat Desa yang aktif	%	40	45	50	60	70	80	90	90
3	Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Lembaga	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa	%	NA	0	2	5	8	10	12	12
5	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>										
1	Angka Kelahiran Kasar		12.61	12.35	12	10	10	10	10	10
2	Rasio Akseptor KB		73.6	74.5	75	76	76.5	77	77.5	77.5
3	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>PERHUBUNGAN</b>										
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar	%	60	70	85	90	90	95	100	100
2	Persentase penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perorang atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten	%	50	60	85	90	90	95	100	100
3	Persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian.	%	0	5	20	40	60	80	100	100
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										
1	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase aplikasi yang terintegrasi	%	NA	25	30	40	50	60	70	70
<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>										
1	Persentase Koperasi sehat	%	56.33	56.33	59	62	65	67	70	70
2	Rata-Rata Omset per koperasi	Juta Rp	219	219	255	257	260	265	270	270
3	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang maju	%	0	0	0	12	12	12	12	48
4	Persentase Peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan	%	0	0	5	5	5	5	5	25
5	Persentase peningkatan Jumlah UMKM yang naik kelas	%	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.25
<b>PENANAMAN MODAL</b>										
1	Nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	Juta Rupiah	657,970	670,000	690,869	725,412	761,683	837,851	921,636	3,937,450
2	Jumlah investor non tambang dan non sawit	Investor	56	56	59	62	65	71	78	335



No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	80	81.02	82.06	82.06	82.08	82.10	82.10
4	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	Investor	56	56	59	62	65	71	78	335
5	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	%	50	50	60	70	80	90	100	100
<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>										
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	15.56	15.56	15.56	15.56	17.78	17.78	17.78	17.78
2	Persentase kelompok wirausaha muda	%	20	20	33	47	60	73	100	100
3	Persentase Pembinaan Cabang olahraga	%	11	11	23	34	45	57	68	68
4	Jumlah atlet berprestasi	orang	3	3	3	3	3	3	3	15
5	Gugus Pramuka Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>STATISTIK</b>										
1	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>PERSANDIAN</b>										
1	Tingkat keamanan informasi	%	NA	30	38	50	63	75	88	88
<b>KEBUDAYAAN</b>										
1	Persentase Penyelenggaraan Even Kebudayaan sesuai dengan standar kebudayaan	%	NA	NA	70	70	70	70	70	70
2	Persentase kelompok seni/sanggar Kesenian yang aktif	%	12	12	18	24	30	36	42	42
3	Jumlah Penyelenggaraan even dan penulisan buku yang berkaitan dengan sejarah daerah	even	NA	5	5	5	5	5	5	25
4	Persentase Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	NA	60	60	70	80	90	100	100
5	Persentase peningkatan pengunjung Museum Sadurengas per tahun	%	NA	10	10	12	14	16	18	18
<b>PERPUSTAKAAN</b>										
1	Persentase Perpustakaan yang dibina	%	1	1	1.5	2	2.5	3	3.5	3.5
2	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	Naskah	NA	2	5	5	5	5	5	25
<b>KEARSIPAN</b>										
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	36	38	40	50	60	70	80	80
2	Persentase arsip/dokumen daerah yang dilestarikan	%	44	48	50	55	60	65	70	70
3	Persentase angka pemakaian arsip	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>URUSAN PILIHAN</b>										



No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>PERIKANAN</b>										
1	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	-3.29	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	6.23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan	%	35	35	35	45	45	45	45	45
4	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	%	-81.8	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	3.7
<b>PARIWISATA</b>										
1	Persentase destinasi wisata yang baik	%	16,13	17	18,75	21,21	23,53	25,71	28,77	28,77
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	-56,13	10	14,26	20,00	25,00	33,33	35,00	35,00
3	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang memperoleh Perlindungan Hak Cipta dari HAKI	Produk	0	0	1	1	1	1	1	5
4	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	%	10	10	20	20	20	20	20	100
<b>PERTANIAN</b>										
1	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Pertumbuhan produksi tanaman Pangan dan hortikultura	%	-2.23	8.00	10.89	10.40	9.34	11.98	9.59	9.59
4	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	%	50	50	60	62	64	66	68	68
5	Persentase sarana pertanian (perkebunan dan peternakan ) yang dimanfaatkan	%	0	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	%	0	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	%	50	50	60	60	60	60	60	60
8	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	%	0	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	%	0	100	100	100	100	100	100	100
<b>KEHUTANAN</b>										
1	Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik.	%	68	70.50	73.33	76.66	78.33	80	81.66	81.66
<b>PERDAGANGAN</b>										
1	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Rekomendasi	120	50	50	50	50	50	50	250



No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
2	Persentase sarana distribusi dan fasilitas yang dibangun/direhab	%	2.70	1	4	4	4	4	4	20
3	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	%	50	50	50	50	60	60	60	60
4	Persentase Peningkatan produk lokal yang diekspor	%	0	0	20	20	20	20	20	100
5	Persentase Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	%	50	50	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Peningkatan Produk UMKM yang dipasarkan/dipromosikan	%	0	0	10	12	15	17	20	20
<b>PERINDUSTRIAN</b>										
1	Persentase Pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian	%	2.10	2.10	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
2	Persentase pemutahiran data IKM	%	40	40	45	50	55	60	60	60
<b>TRANSMIGRASI</b>										
1	Cakupan kawasan transmigrasi yg sesuai perencanaan	%	1	0	100	0	0	100	0	100
2	Persentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	%	40	50	60	70	80	90	100	100
3	Jumlah kawasan perkotaan baru yang memiliki sarana prasarana yang memadai	Kawasan	1	0	1	0	0	1	0	2
<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>										
<b>PERENCANAAN</b>										
1	Persentase Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	92.64	93	93	94	95	96	97	97
2	Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	%	NA	90	93	94	95	96	97	97
3	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	91.64	92	92	93	94	95	96	96
<b>KEUANGAN</b>										
1	Persentase penurunan temuan administratif atas laporan keuangan pemerintah daerah	%	NA	10	10	10	10	10	10	10
2	Persentase permasalahan pengelolaan barang milik daerah selesai ditindaklanjuti	%	NA	50	50	55	60	65	70	70
3	Rasio PAD terhadap APBD	%	7,34	7,5	7,5	7,7	8	8,3	8,5	8,5
<b>KEPEGAWAIAN</b>										
1	Persentase pegawai berkinerja baik	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	%	NA	50	70	75	80	85	90	90
3	Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	%	NA	50	70	75	80	85	90	90



No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>PENGAWASAN</b>										
1	Indeks Penerapan Manajemen resiko (MRI)		2.50	2.50	3.04	3.50	3.70	3.90	4.00	4.00
2	Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	%	70	70	70	75	80	85	90	90
3	Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	%	25	25	70	75	80	85	90	90
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>										
1	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	%	NA	50	70	75	80	85	90	90
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>										
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	50	50	60	65	70	75	80	80
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>										
1	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
2	Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
3	Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	Dokumen	NA	6	6	6	6	6	6	30
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>										
1	Persentase perumusan kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
2	Nilai EKPPD		2.80	2.80	2.90	2.95	3.00	3.10	3.20	3.20
3	Persentase Kebijakan prioritas perekonomian dan pembangunan yang dituangkan dalam produk hukum daerah	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
<b>KECAMATAN</b>										
1	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	%	NA	NA	20	25	30	35	40	40
2	Persentase desa yang Menyampaikan LKP desa tepat waktu	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	NA	70	70	72	74	76	80	80
4	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	%	NA	50	50	55	60	65	70	70
5	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
<b>FUNGSI PENUNJANG LAINNYA</b>										
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	%	NA	70	70	72	74	76	80	80



No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2020)	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
2	Persentase PD dengan Nilai IRB Baik	%	75	75	75	80	85	90	90	90
<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>										
1	Persentase penurunan konflik berbau sara	%	50	100	100	100	100	100	100	100
2	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	70	70	80	80	80	80	80	80
3	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	%	NA	75	75	75	75	75	75	75
4	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100



## **BAB VII PENUTUP**

### **7.1 Penutup**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah guna mencapai target capaian kinerja Perangkat Daerah dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Kabupaten Paser menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

RKPD Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun kebijakan publik yaitu kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) masing masing. Renja Perangkat Daerah (PD) tersebut sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan untuk tahun 2023.

RKPD Tahun 2023 berfungsi sangat penting karena menjadi dasar Pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJMD 2021-2026. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Paser berupaya mengoptimalkan peran publik dalam proses perencanaan



## Pemerintah Kabupaten Paser

pembangunan daerah melalui masukan pokok-pokok pikiran DPRD, forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Forum tersebut merupakan wahana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menghasilkan rumusan rencana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Paser. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Paser sangat bergantung pada strategi berbagi peran aktif antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian melalui tema **“PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN BERBASIS PERTANIAN UNTUK MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT”**.

Di tetapkan di : Tana Paser

Pada tanggal : Juli 2022

**BUPATI PASER,**

**dr. FAHMI FADLI**

# LAMPIRAN



**Tabel**  
Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Kabupaten Paser

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
<b>I</b>	<b>BIDANG INPRASWIL</b>					
<b>I</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>					
1	masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan tandon ukuran 1.200 Liter desa Tanjung Pinang Kec. Muara Samu	100	Biji	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2	Pembangunan gedung serba guna yang sudah di bangun masih membutuhkan pekerjaan lanjutan	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Lanjutan pembangunan gedung serbaguna desa Keluang Paser Jaya	1	Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3	Masih terdapat beberapa warga kesulitan untuk menampung air bersih	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan tandon air bersih ukuran 1.200 liter desa Tapis	60	Biji	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4	Masih terdapat beberapa warga kesulitan untuk menampung air bersih	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan tandon air bersih ukuran 1.200 liter desa Janju	60	Biji	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5	Masih terdapat beberapa warga kesulitan untuk menampung air bersih	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan tandon air bersih ukuran 1.200 liter desa Jone	60	Biji	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6	Masih terdapat beberapa warga kesulitan untuk menampung air bersih	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan tandon air bersih ukuran 1.200 liter desa Senaken	60	Biji	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7	Sarana tempat ibadah/Gereja yang tidak memadai	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gereja RATU RENYA ROSARI Desa Olung	1	Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8	Masyarakat masih sulit untuk mendapatkan air bersih	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan sumur bor di RT, 1,2,3,4,5 Desa Bukit Saloka	5	Titik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
9	Tidak adanya akses air bersih maka perlu adanya pengadaan sumur bor	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan sumur bor di desa songka RT 01-RT 09	1	Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10	Saluran irigasi yang rusak sehingga menyebabkan sistem irigasi tidak lancar membutuhkan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan di RT 02 Desa Sebakung	1	Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
11	Sulitnya air bersih didaerah pedesaan sehingga membutuhkan tempat menampung air bersih berupa Tandon air	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon di RT 01, RT 02, Dan RT 03 Kelurahan Muara Komam	1	Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
12	Aliran air yang melewati bawah jalan tersumbat sehingga perlu adanya pembangunan Box Culvert	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Box Culvert Desa Padang Pengrapat Kec. Tanah Grogot	1	Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
13	Kurang Optimalnya Saluran Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Mendik RT. 08,09 dan 13 Desa Mendik Kec. Long Kali	3000	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
14	Akses Air yang sulit sehingga diperlukan tempat penampungan air maka perlu adanya Pengadaan Tandon di Desa Batu Kajang	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon Tersebar di Desa Batu Kajang	136	Buah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
15	Akses air yang sulit maka diperlukan penampungan air sehingga perlu adanya Pengadaan Tandon di Afdeling 1,3, dan 4 Desa Mendik Makmur Kecamatan Long Kali	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon Tersebar di Afdeling 1, 3 dan 4 Desa Mendik Makmur Kec. Long Kali	136	Buah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
16	Akses Air yang sulit sehingga diperlukan tempat penampungan air maka perlu adanya Pengadaan Tandon (600Liter) di Desa Tebru Paser Damai	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon 600 Liter Tersebar di Desa Tebru Paser Damai	172	Buah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
17	Akses Air yang sulit sehingga diperlukan tempat penampungan air maka perlu adanya Pengadaan Tandon (600 Liter) di Desa Muara Telake Kec. Long Kali Kab. Paser	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon 600 Liter Tersebar di Desa Muara Telake Kec. Long Kali Kab. Paser	172	Buah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
18	Akses Air yang sulit sehingga diperlukan tempat penampungan air maka perlu adanya Pengadaan Tandon di Desa Rangan	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon Tersebar di Desa Rangan, Sandelay, Sei Rie dan Kelurahan Kuaro	172	Buah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
19	Kurang tersedianya air bersih sehingga perlu pengadaan Tandon di Desa Sempulang	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon Di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot (Kapasitas 600 Liter )	500	Buah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
20	Kurang Tersedianya air bersih sehingga perlu pengadaan Tandon (kapasitas 600 Liter) di Desa Padang Pengrapat	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon (kapasitas 600 Liter)Di Desa Padang Pengrapat Kecamatan Tanah Grogot	500	Buah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
21	Kurang tersedianya air bersih sehingga perlu pengadaan Tandon (kapasitas 600 Liter) di Desa Krayan Makmur	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon (kapasitas 600 Liter)Di Desa Krayan makmur Kecamatan Long Ikis	500	Buah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
22	Kurang tersedianya air bersih sehingga perlu pengadaan Tandon (kapasitas 600 Liter) di Desa Sebakung Kecamatan Long Kali	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon (Kapasitas 600 Liter) di Desa sebakung Kecamatan long Kali	500	Buah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
23	Kurangnya ketersediaan penampungan air bersih, sehingga perlu pengadaan tandon 1200 L di Desa Sawit Jaya	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon di Desa Sawit Jaya, Kecamatan long Ikis (kapasitas 1200 L)	120	Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
24	Kurangnya ketersediaan penampungan air bersih, sehingga perlu pengadaan tandon 1200 L di Desa Tajur	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon di desa Tajur Kecamatan long ikis (kapasitas 1200 L)	120	Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
25	Kurangnya ketersediaan penampungan air bersih, sehingga perlu pengadaan tandon di Desa Teluk Waru	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan tandon di Desa Teluk Waru, Kecamatan long Ikis (kapasitas 1200 L )	50	Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
26	Kurangnya ketersediaan penampungan air bersih, sehingga perlu pengadaan tandon 1200 L di Desa Olung	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon di Desa Olung Kecamatan long Ikis (kapasitas 1200 L )	120	Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
27	Kurangnya ketersediaan penampungan air bersih, sehingga perlu pengadaan tandon 1200 L di Desa Pait	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon di Desa Pait (Kapasitas 1200 L) Kecamatan Long Ikis	150	Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
28	Kurangnya ketersediaan penampungan air bersih, sehingga perlu pengadaan tandon 1200 L di kelurahan long ikis	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon Di Kelurahan long Ikis, Kecamatan long ikis (kapasitas 1200 L)	120	Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
29	Kurangnya Pembiayaan untuk pembangunan Masjid Nurul Iman di Desa Lempesu Kec. Paser Belengkong	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Lanjutan Pembangunan Masjid Nurul Iman di Desa Lempesu Kec. Paser Belengkong			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
30	Dimana disaat musim kemarau masyarakat Desa Kesusahan mendapatkan air bersih sehingga perlunya bantuan tandon Desa Mengkudu Kec. Batu Engau	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon Desa Mengkudu Kec. Batu Engau	120	Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
31	Sungai Kerang Dayo wilayah RT 1 Desa Kerang Dayo tertutup limbah kayu dan lumpur sehingga jika musim hujan akan terjadi banjir untuk itu perlu diprogramkan normalisasi sungai kerang dayo agar warga RT 1 Kerang Dayo terhindar dari Banjir	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi Sungai Sungai Kerang Dayo RT 1 Kec. Batu Engau Kab. Paser	1000	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
32	Belum ada Nya akses air bersi sehingga harus dibuat kan sumur bor di Kelurahan Long Kali	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Sumur Bor, Kelurahan Long Kali, Kab. Paser	4	UNIT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
33	Belum ada Nya akses air bersi sehingga harus dibuat kan sumur bor di desa muara telake	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Sumur Bor, Desa Muara Telake, Kab. Paser	4	UNIT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
34	Pembangunan Embung RT 08 Desa Mendik Makmur Kecamatan Long Kali	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	PEMBANGUNAN EMBUNG, RT 08 MENDIK MAKMUR	300	M 2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
35	Belum adanya akses jalan sehingga mempersulit masyarakat untuk melakukan aktifitas sehingga memerlukan pembangunan jalan lingkungan di GG Al Amin RT 5 Desa Tanah Periuk	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Titian Ulin di RT 5 Desa Tanah Periuk	300	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
36	bantuan pengadaan tandon untuk masyarakat paser belengkong yang kekurangan sarana penampungan air bersih	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	PENGADAAN TANDON	1	PAKET	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
37	Belum Adanya jaringan pipanisasi air bersih di desa lomu	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	PIPANISASI AIR BERSIH (KAWASAN PEDESAAN), DESA LOMU KEC BATU ENGAU	5	KM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
38	Jalan lingkungan RT 10 Desa Tajer Mulya terdapat jembatan kayu yang sudah rusak dan berbahaya jika dilalui sehingga perlu dianggarkan pembangunan box culvert	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Box Culvert RT 10 Desa Tajer Mulya, Kab. Paser	1	Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
39	Akses Drainase yang terhambat maka perlu adanya Rehabilitasi Drainase	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rehabilitasi Drainase Gang.Pinang RT 13/RW04 Kelurahan Tanah Grogot	1	unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40	minimnya tempat penyimpanan air bersih sehingga diperlukan adanya pengadaan tandon di desa Laburan	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon Desa Laburan (SP3)	1	Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
41	aliran air tidak lancar sehingga diperlukannya Rehabilitasi saluran drainase di Desa Suliliran	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rehabilitasi Saluran Dreinase Di Desa Suliliran			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
42	Kesusahan Menampung Air bersih	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Tandon ( Desa Selerong Kec.Muara Komam)	150	Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
43	Sebagai Serana meningkatkan layanan bagi masyarakat rumah tangga yang memiliki akses air bersih dan pengkatan layanan penampung air maka meminta sumur bor semua RT didesa Telake	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan sumur bor Desa Muara Telake Rt 1,2,3,4,5,6 Kec. Longkali	6	Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
44	Memerlukan pembangunan jembatan Ulin Karena tidak layak di pake	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Desa Damit Kec.Pasir Belengkong	36000	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
45	Kondisi jalan lingkunga /Gang Sebagian besar belum ada parit /Darinase sehingga dikhawatirkan badan jalan dapat terjadi banjir	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan/Gang Rt Desa Padang pangrapat Kec.tanah grogot	200	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
46	kondisi jalan lingkungan sebagai besar belum adanya Normalisasi Paret di lahan Hilalang	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan ( Desa Jone Rt 6 Kec.Tanah Grogot	1	Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
47	Sulitnya mendapatkan sumber air bersih untuk MCK, sehingga sangat butuhnya pembangunan sumur bor	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipa di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Sumur Bor RT 001 Desa Busui Kec. Batu Sopang	1	Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
48	Pembuangan limbah cair rumah tangga yang mengganggu, sehingga sangat perlunya pembuatan parit/drainase (PxL: 23 x 1,5 M)	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan Gang Sahabat RT 009 Desa Songka Kec. Batu Sopang, Kab. Paser	1	Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
49	Rusaknya akses jalan desa, sehingga perlunya peningkatan jalan poros desa (perkerasan beton semen)	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Antar Desa (Dekat Pesantren Darussalam) Desa Batu Kajang (RT 017) Kec. Batu Sopang, Kab. Paser	1	Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
50	Kurangnya wadah penampungan air bersih, sehingga sangat butuhnya bantuan tandon air warga	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipa di Kawasan Perdesaan	Pengadaan tandon Desa Legai Kecamatan Batu Sopang	50	Buah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
51	Sulitnya mendapatkan air bersih, sehingga mohon pembangunan sumur bor	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipa di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Sumur Bor RT 005 desa Legai Kec. Batu Sopang, Kab. Paser	1	Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
52	Buruknya Saluran Pembuangan Air sehingga diperlukan adanya Pembangunan Drainase RT.10 Desa Sawit Jaya Kec. Long Ikis	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Peningkatan Drainase Parit RT. 10 Desa Sawit Jaya (800 Mtr) Kec. Long Ikis	800	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
<b>II</b>	<b>DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>					
1	Pembangunan Parit / Drainase RT 11 Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan Parit / Drainase RT 11 Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali	150	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Seringnya terjadi banjir sehingga memerlukan Pembangunan Drainase di gang 50 rt 003 jln pangeran mentri	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan Drainase Lingkungan/Gang, gang 50 rt 003 jln pangeran mentri, Kab. Paser	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3	Tidak adanya saluran air, sehingga perlu pembangunan drainase/parit lingkungan di RT.016 Arah Pasar desa Batu Kajang	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan Drainase Lingkungan/Gang di RT 016 Arah Pasar Desa Batu Kajang	500	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4	Masih banyak terdapat jalan pemakaman yang masih berlumpur karena belum di semenisasi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan pemakaman umum Desa Keluang Paser Jaya	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	Bahu jalan mengalami kerusakan sehingga perlu perbaikan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi bahu jalan RT.5 Desa Tapis	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6	Jalan Gang yang rusak dan berlumpur sehingga warga kesulitan melakukan aktifitasnya	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Gang RAMANG RT.10 desa Sungai Tuak	300	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	Jalan Gang yang rusak dan berlumpur karena belum di semenisasi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Gang SUKUR Jl. Yunion RT.4 Desa Jone	100	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
8	Jalan gang yang rusak berlubang lubang diperlukan semenisasi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Jl. Syamsul Bahri Gang.TOLANG LEMIT RT.17 RW.4 Tanah Grogot	75	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
9	Rusaknya jalan gang di butuhkan semenisasi gang	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Gg. Surya 2 Jl. DI. Panjaitan Tanah Grogot	150	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
10	Jalan Gang yang rusak (berlubang-lubang)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Gang Rambutun Jl. DI.Panjaitan RT.2 Desa Tapis	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
11	Badan jalan yang rusak sehingga menyulitkan warga sebagai pengguna jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan / Semenisasi Jalan RT.10 desa Krayan Sentosa	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
12	Akses Jalan Rusak sehingga butuh peningkatan jalan	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Peningkatan jalan Gg. Harmonis RT 17 Desa Batu Kajang	1	Paket	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
13	Jalan yang rusak menghambat kegiatan warga sehingga butuh peningkatan jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan Gg. Asam Putar RT 02 Desa Songka	1	Paket	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
14	Akses Jalan Rusak sehingga butuh peningkatan jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan LDII RT 05 Desa Batu Kajang	1	Paket	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
15	kses jalan rusak sehingga perlu adanya peningkatan jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan lingkungan (latasir) di kelurahan Tanah Grogot	1	Paket	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
16	Akses Jalan Rusak Sehingga perlu adanya perbaikan Jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Lingkungan (Lanjutan) Gang Taliyu Kec. Tanah Grogot	1	Paket	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
17	Akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya Peningkatan Jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan (Latasir) Tanah Periuk Gg. Kakalati Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot	1	Paket	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
18	Akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya Peningkatan Jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan (Latasir) Desa Tapis RT. 06	150	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
19	Akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya Peningkatan Jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan (Semenisasi) Jl. Kapten Pierre Tendean Gg. Sepakat Kel. Tanah Grogot	116	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
20	Terdapat Beberapa Rumah yang tidak layak huni sehingga perlu adanya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tampakan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (* Rehabilitasi RTLH di luar Kawasan Kumuh) di Desa Tampakan Kec. Batu Engau			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
21	Akses jalan yang rusak maka perlu adanya Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Tempat Ibadah di Desa Samuntai RT. 09 Kec. Long Ikis	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Jalan Lingkungan sekitar Tempat Ibadah RT. 09 Desa Samuntai Kec. Long Ikis			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
22	Akses jalan yang rusak maka perlu adanya Peningkatan Jalan Majapahit di Desa Makmur Jaya Kec. Long Kali Kab. Paser	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Majapahit ( 200 Mtr ) Desa Makmur Jaya Kec. Long Kali Kab. Paser			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
23	Rusaknya akses Jalan Lingkungan Desa sehingga perlu dilakukan perbaikan jalan (SEMENISASI) di Jalan Nangka Desa Padang Pengrapat, Panjang 900 M, Lebar 4 M.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan / Gang (SEMENISASI) di Jln. Nangka, Desa Padang Pengrapat,	3600	M2	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
24	Rusaknya akses jalan lingkungan, sehingga perlu dilakukan peningkatan jalan lingkungan (semenisasi), panjang 135 m dan lebar 6 m di RT.06 Desa Lombok	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan Lingkungan (Semenisasi) Di Desa Lombok RT.06 Kecamatan Long Ikis	810	M2	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
25	Rusaknya akses jalan lingkungan, sehingga perlu peningkatan jalan lingkungan Gang Bersama RT.06 Pait. Panjang 130 meter lebar 2 meter.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan lingkungan Di Gang Bersama RT. 06 Pait, Kec. Long ikis	260	M2	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
26	Kurang layak hunian atau rumah masyarakat sehingga perlu rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa Krayan bahagia	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (* Rehabilitasi RTLH di luar Kawasan Kumuh) di Desa Krayan Bahagia, Kec. Long Ikis	4	Unit	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
27	Karena jala sudah rusak dan becek maka perlunya semenisasi / peningkatan jalan Gang RT 01 Desa Selerong	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Gang RT 01 Desa Selerong Kec. Muara Komam	L=2 P=300 m	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
28	Karena jalan sudah rusak dan berlubang maka perlunya bantuan semenisasi Gang Puwerjo II RT 02 Desa Padang Jaya Kec. Kuaro	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Gang Puwerjo II RT 02 Desa Padang Jaya Kec. Kuaro	L = 3,5 P = 200m	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
29	Jalan sudah Rusak dan berlubang maka perlunya bantuan semenisasi Gang Hikmah RT 23 Batu Kajang	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Gang Hikmah RT 23 Batu Kajang	L=2 P=200 m	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
30	Jalan sudah Rusak dan berlubang maka perlunya bantuan semenisasi Gang pirang Batu Kajang	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Gang Pirang Batu Kajang	L=2m P= 150 m	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
31	Jalan banyak yg berlubang dan rusak maka perlunya semenisasi jalan Belakang Kantor Kecamatan RT 018 Gg Tower 1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Jalan Belakang Kantor Kecamatan ? RT 018 Gg Tower 1 Kecamatan Batu Sopang	150m x 3m	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
32	Karena kalau hujan jalan becek maka perlunya bantuan semenisasi Gang Butung RT 04 Kec. Kuaro	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Gang Butung RT 04 Kec. Kuaro	L = 3 m P = 200m	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
33	Karena jala sudah rusak dan becek maka perlunya peningkatan jalan Semenisasi Jalan/Gang Jl. Ahmad Yani Gg. Abadi RT.006 Samping Kantor Camat	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Jalan/Gang Jl. Ahmad Yani Gg. Abadi RT.006 Samping Kantor Camat	L=3m P=200m	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
34	Rusaknya jalan maka perlunya bantuan Semenisasi Gg. Nusantara Desa Batu Kajang	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Gg. Nusantara Desa Batu Kajang	P= 250 L=4m	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
35	Rusaknya Akses jalan lingkungan Desa. Sehingga perlu dilakukan Perkerasan Beton Semen (Rigid) di Lempesu Kec. Paser Belengkong	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan di Lempesu Kec. Paser Belengkong	400	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
36	Rusaknya Akses jalan lingkungan Desa. Sehingga perlu dilakukan Perkerasan Beton Semen (Rigid) di Bekoso Kec. Paser Belengkong	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan di Bekoso Kec. Paser Belengkong	300	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
33	Rusaknya Akses jalan masuk wisata. Sehingga perlu dilakukan Perkerasan Beton Semen (Rigid) di jalan Putri Petung Desa Bekoso Kec. Paser Belengkong	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Wisata ) di jalan Putri Petung Desa Bekoso Kec. Paser Belengkong	400	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
37	Rusaknya akses jalan lingkungan kelurahan longkali Rt 13 sehingga memerlukan pengersana atau semenisasi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang, Kelurahan Long Kali RT 13, Kab. Paser	150	M	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
38	rusaknya akses jalan gang bersama desa songka sehingga perlu peningkatan jalan semenisasi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan lingkungan/gang bersama ds songka rt 9 kec batu sopang ( semenisasi )	150	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
39	masih rusaknya jalan akses masyarakat maka memerlukan lanjutan semenisasi gang murni RT 21 Batu kajang	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan lingkungan / gang murni RT 20 Batu Kajang Kec batu sopang ( semenisasi )	150	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
40	belum adanya akses jalan rantau niun rt 18 ds batu kajang menuju samurangau untuk mempermudah jarak tempuh maka perlu adanya pembangunan jalan rantau niun samurangau	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan jalan lingkungan jalan rantau niung rt 18 ds batu kajang menuju samurangau ( pembukaan jalan )	7	KM	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
41	Rusaknya akses jalan sehingga memerlukan perbaikan di GG Partisipasi 2 RT 11 RW 5 Kec, Tanah Grogot dengan konstruksi Latasir	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Peningkatan GG Partisipasi 2 RT 11 RW 5 Kec, Tanah Grogot dengan konstruksi Latasir	400	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
42	Rusaknya akses jalan sehingga memerlukan perbaikan di dengan semenisasi di Desa Jone Jalan Pulau Ampelas RT 5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pulau Ampelas RT 5 Desa Jone Kec. Tanah Grogot (semenisasi)	150	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
43	Rusaknya akses jalan lingkungan Gang Millenium ujung (blok D,E,F) sehingga memerlukan perbaikan (semenisasi)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg Milenium Ujung Blok (D,E,F) RT 005 RW 005 Jl, RM Noto Sunardi Kec. Tanah Grogot	600	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
44	Rusaknya akses jalan di Gang Ikhlas Jalan Jembatan Dua Blok 1 Desa Senaken, sehingga memerlukan perbaikan dengan konstruksi rigid	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ikhlas Jalan Jembatan Dua Blok 1 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot dengan konstruksi semenisasi	150	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
45	Belum adanya akses jalan yang memadai untuk masyarakat di Gang Pemancingan Desa Rantau Panjang sehingga perlu dilakukan semenisasi di RT 3 Desa Rantau Panjang	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Gang Pemancingan RT 3 Desa Rantau Panjang dengan konstruksi semenisasi	300	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
46	Rusaknya Akses jalan dimana jalan banyak berlubang di Gang Bintara 10 Desa Sungai Tuak, perlu ditingkatkan dengan konstruksi rigid/semenisasi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penigkatan Gang Bintara 10 Desa Sungai Tuak Kec. Tanah Grogot (semenisasi)	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
47	bantuan rehab rumah untuk mayarakat desa suliliran di karenakan kondisi rumah yang sudah sangat rusak rumah atas nama : MODING,RAHMANI,HASANIDDIN,DINA	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (* Rehabilitasi RTLH di luar Kawasan Kumuh), DESA SULILIRAN KEC PASER BELENGKONG	4	UNIT	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
48	Rusaknya akses jalan desa Tajer Mulia Dari rt 01 Sampai Rt 17 sehingga memerlukan perbaikan atau peningkatan (RIGID atau ASPAL)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan di RT 01 desa Tajer Mulya Kec. Long Ikis Kab. Paser (Rigid)	1,1	km	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
49	rusaknya akses jalan sehingga memerlukan peningkatan atau pengerasan semenisasi (RIGID) di jalan bima Gang rukun 4 rt 6 , P.100, L.4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang, jaln Bima gang rukun 4 rt 6 desa tapis tanah grogot, Kab. Paser	800	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
50	Seringnya terjadi banjir sehingga memerlukan Pembangunan Drainase di Gang 49Rt 003 jln pangeran mentri	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan Drainase Lingkungan/Gang, gang 49 jln pangeran mentri, Kab. Paser	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
51	lanjutan semenisasi menuju jalan pemakaman di desa tapis	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan dilingkungan Pemakaman, Desa Tapis jalan menuju pemakaman, Kab. Paser	100	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
52	Rusaknya akses jalan sehingga memerlukan perbaikan atau pengerasan di desa tapis gang saudara 2 rt 01 P.65 L2,5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang, Desa Tapis Gang Saudara 2 Rt 01, Kab. Paser	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
53	Dibutuhkan Nya pembangunan/Rehabilitasi Drainase di gang Aspirasi rt 05 rw 04 jl Piertendean	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan Drainase Lingkungan/ Gang (SK Kawasan Permukiman Kumuh), gang Aspirasi RT 05 RW 04 jl Pierre Tendean	400	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
54	Rusaknya Akses jalan sehingga memerlukan pengersan atau perbaikan di desa tapis gang Al-amin rt 01 (P Kanan 80), (P. Kiri 20) ,(L 2) Meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang, Desa Tapis Gang Al-Amin RT. 01	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
55	rusaknya akses jalan sehingga memerlukan pengersan atau perbaikan di jln Ciptomangunkusumo gang cahaya tanah grogot P. 120 , L. 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang Cipto Mangunkusumo Gang cahaya Tanah Grogot, Kab. Paser	240	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
56	Seringnya terjadi banjir sehingga memerlukan Pembangunan Drainase di gang Restu rt 003 jln pangeran menteri	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan Drainase Lingkungan/Gang, gang Restu RT 003 jln Pangeran Menteri, Kab. Paser	120	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
57	Akses jalan yang rusak maka perlu adanya peningkatan jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan di Gg. Cokro 2 RT.03 jl. Hos Cokroaminoto Tanah Grogot (Latasir)			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
58	Peningkatan jalan yang belum selesai maka perlu adanya Lanjutan Peningkatan Jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lanjutan Peningkatan Jalan di Gang. LBK Desa Senaken (Latasir)	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
59	Peningkatan jalan yang belum selesai maka perlu adanya Lanjutan Peningkatan Jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lanjutan Peningkatan Jalan di Gang. Swadaya 3 Kec. Tanah Grogot Jl. Agus Salim RT.01/05 (Latasir)	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Peningkatan jalan yang belum selesai maka perlu adanya Lanjutan Peningkatan Jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan di RT. 09 Desa Senaken (Latasir)	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
60	Akses jalan yang rusak maka perlu adanya peningkatan jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan di Jalan RT 01 Desa Senaken (Latasir)	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Akses jalan yang rusak maka perlu adanya peningkatan jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Senaken RT. 12	201	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
61	Akses Jalan yang rusak maka perlu adanya Peningkatan Jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan di Gang. Ramadhan RT.14 Desa Senaken (Latasir)	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
62	Akses Jalan yang rusak maka perlu adanya Peningkatan Jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan di Gang. Kusumo Desa Senaken RT.11 (Latasir)	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Akses Jalan yang rusak maka perlu adanya Peningkatan Jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan di Gang RT.3 Desa Senaken (Latasir)			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Saluran air yang tersumbat sehingga perlu adanya Rehabilitasi Saluran Drainase di Desa Senaken	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Rehabilitasi Drainase Di Desa Senaken	201	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
63	Akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya Peningkatan Jalan	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Peningkatan Jalan di RT.06 Desa Senaken (Latasir)	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
64	Akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya Peningkatan Jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan di RT.02 Desa Senaken (Latasir)	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
65	Akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya Peningkatan Jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan di RT.05 Desa Senaken (Latasir)	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
66	Akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya Peningkatan Jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan di RT.10 Desa Senaken (Latasir)	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
67	terdapat rumah yang tidak layak huni sehingga dibutuhkan bantuan rehab rumah tidak layak huni di desa Tanjung Aru	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Tanjung Aru	2	Unit	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
68	Akses Jalan Rusak sehingga perlu perbaikan Jalan berupa Semenisasi di Desa Damit RT 5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan RT 5 Desa Damit	1	Paket	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
69	akses jalan rusak sehingga diperlukannya Perbaikan Jalan Berupa semenisasi di Desa Sangkuriman RT 5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan RT 5 Desa Sangkuriman	1	Paket	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
70	Rusaknya akses jalan maka memerlukan semenisasi jalan gang bambu	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan lingkungan /gang ( Gang Bambu ) Desa Rantau Bintangan Rt 01 Kec.Muara Samu	150	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
71	Rumah tidak layak huni ditempati	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rehabilitas Rumah tidak layak huni Desa Rantau Bintangan	20	unut	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
72	Banyaknya pemukiman dalam menuju pemakaman sangkuriman dan sebagai jalan penghubung Rt 1 dan Rt 2 maka dari itu meminta jalan disemenisasi untuk menghubungkan dan sebagai sudah dimenisasi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan lingkungan / Gang Desa Sangkuriman RT.2 Saing Belimbing Kec.Paser Belengkong	2000	M2	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
73	Rusaknya akses jalan sehingga diperlukan pembangunan cor BR 5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan jalan lingkungan / gang di Desa Kresik Bura jalan BR 5 Kec. Pasir Belengkong	2	KM	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
74	Banyak rumah warga yang sudah tidak layak huni memungkinkan segera untuk diperbaiki kelompok Berdi Karya	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (*Rehabilitas RTLH Diluar Kawasan kumuh) Desa Tanjung aru RT.1	20	Unit	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
75	Banyak rumah warga yang sudah tidak layak huni memungkinkan segera untuk diperbaiki kelompok Mandiri Baru	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (*Rehabilitas RTLH Diluar Kawasan kumuh) Desa Tanjung Aru RT.2	20	Unit	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
76	lanjutan pekerjaan menuju areal kuburan yang sampai sekarang belum selesai dikerjakan mengingat jalan sekarang masih tanah timbunan sehingga diperlukan peningkatan jalan lanjutan timbunan sampai dengan perkerasan jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lanjutan Peningkatan jalan lingkungan pemakaman RT.12 Desa Sungai Tuak kec.Tanah grogot	350	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
77	lanjutan peningkatan pekerjaan gang bersatu yang sampai sekarang belum selesai dikerjakan mengingat jalan tersebut jalan alternatif bagi warga setempat menuju jalan umum sehingga diperlukan peningkatan jalan lanjutan ( Semenisasi )	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lanjutan peningkatan jalan lingkungan/Gang Bersatu RT.9 Desa Sungai Tuak Kec.Tanah Grogot	300	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
78	kondisi lokasi yang diusulkan keras/tanah lembek/tanah rawa maka memerlukan semen Beton ( Rigit )	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan lingkungan/gang Desa Janju RT. 002 Kec.Tanah Grogot	2750	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
79	Banyak rumah warga yang sedang tidak layak huni memungkinkan segera mungkin untuk dilaksanakan perbaikan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (* Rehabilitasi RTLH di luar Kawasan Kumuh) Desa Jone Rt 1-15 Kec.Tanah Grogot	30	Unit	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
80	Rusaknta akses jalan memerlukan semen beton ( Rigit ) Maka Meminta Rehab Total Gang Kontruksi Ulin Di Desa Muara pasir	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang Desa Muara Pasir Kec.Tanah Grogot	1200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
81	Kuraknya akses jalan maka memerlukan Semenisasi Jalan Gang Halal / Timur	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan lingkungan/ Gang Desa Jone Kec.Tanah Grogot	1000	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
82	Rusakya akses jalan maka memerlukan peningkatan jalan Semen Beton (Rigit) Di Gang Sampulota Rt 3	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang Desa Tanah Periuk Kec.Tanah Grogot	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
83	Rusaknya akses jalan lingkungan sehingga perlu dilakukan pengerasan beton semen (Rigit) Digang Halal Rt 3 Tepiang Batang	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang Desa Tepiang batang Kec.Tanah Grogot	2000	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
84	rusaknya akses jalan lingkungan gang bersama desa Padang pangrapat Blok B Jalan Meranti sehingga warga perlu pengadaan dilakukan beton, semen ( rigit )	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan Meranti Blok B Desa Padang Pangrapat, kec.Tanah grogot	600	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
85	Rusaknya akses jalan lingkungan desa sehingga perlu dilakukan pengerasan beton semen ( Rigit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang Desa Olung RT.01,03,08,012 dan RT. 14 Kec.Longikis	600	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
86	Rusaknya akses jalan lingkungan desa sehingga perlu dilakukan pengerasan beton semen ( Rigit	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan lingkungan/Gang Samping SMK Muhammadiyah menuju ke makam Desa Atang Pait RT.001 Kec.Longkali	500	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
87	Rusaknya akses jalan gang, sehingga perlunya peningkatan jalan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Gang Sahabat RT 009 Desa Songka Kec. Batu Sopang	200	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
88	Belum adanya akses jalan, sehingga perlunya pembangunan/semenisasi jalan (100 x 4 M)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Gang Gorong-gorong RT 004 Desa Songka Kec. Batu Sopang, Kab. Paser	1	Paket	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
89	Rusaknya akses jalan desa, Sehingga sangat perlunya peningkatan jalan jalur 6 Blok K	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan jalur 6 Blok K Desa Sungai Terik Kec. Batu Sopang (tanjakan)	1	Paket	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
90	Rusaknya akses jalan lingkungan, sehingga perlu peningkatan (Latasir) jalan lingkungan IKK Kecamatan Batu sopang	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan (Latasir) jalan lingkungan IKK Kecamatan Batu Sopang, Desa Batu Kajang	20000	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
91	Belum Tersambung dan Rusaknya akses jalan lingkungan, sehingga perlu *Peningkatan jalan lingkungan RT.016 Tembus Pasar Batukajang	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan Jalan lingkungan / Gang RT. 016 Tembus Pasar Batu Kajang, Kec. Batu Sopang	1000	Meter	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
<b>III</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>					
1	kurangnya penerangan saat malam hari sehingga memerlukan penerangan atau pemasangan lampu jalan di jalan andi ali sampai dengan jln merawen Desa Jone	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jln. Andi Ali - Jln merawen desa Jone kec. Tanah Grogot, Kab. Paser	1000	Meter	DINAS PERHUBUNGAN
<b>II</b>	<b>BIDANG PPM</b>					
<b>1</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>					
1	Untuk memberdayakan kesenian tradisional di usulkan bantuan seperangkat GAMELAN SELENDRO, PELOG, SOUNSYSTEM, KYBOARD, PAKAIAN, PANGGUNG, TENDA DAN PERLENGKAPAN DPD IKAPAKARTI Kabupaten Paser		Pengadaan seperangkat Gamelan Salendro, Pelog, Sounsystem, Kyboard, Pakaian, Panggung, tenda dan Perlengkapan DPD IKAPAKARTI Kabupaten Paser.	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Adanya Kerusakan pada plafon sehingga perlu perbaikan Plafon		Perbaiki atau Rehab Plafon SD 006 Tanah Grogot Desa Muara Pasir	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
3	Diperlukan perbaikan / rehab bangunan sekolah PAUD Kelompok belajar MAWAR di Desa jone RT 09		Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD di Sekolah PAUD Kelompok Belajar MAWAR Desa Jone RT.09 Kecamatan TANAH GROGOT	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	Sanggar Budaya Karawitan Campur Sari Dwi Laras Desa Tapis memerlukan bantuan Keuangan untuk pengembangan peralatan Sanggar		Bantuan Keuangan untuk Sanggar Budaya Karawitan Campur Sari Dwi Laras Desa Tapis	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	Tidak adanya Gedung Perpustakaan dengan banyaknya jumlah siswa sehingga tidak efektifnya disaat waktu sekolah sehingga perlu bantuan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Muhammadiyah Desa Atang Pait Kec. Long Ikis		Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Muhammadiyah Desa Atang Pait Kec. Long Ikis, Kab. Paser	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	kesenian tradisional di desa suliliran baru tidak aktif sehingga diperlukan alat kesenian untuk mengaktifkan kembali kesenian tradisional untuk kelompok lestari budoyo		Bantuan alat kesenian lestari budoyo Desa Suliliran Baru	1	Set	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	Kurangnya ruang belajar, sehingga perlunya pembangunan Lokal untuk ruang belajar baru		Pembangunan Ruang Kelas PAUD TK/TPA Ar-Rahim RT 001 Desa Busui Kec. Batu Sopang, Kab. Paser	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>2</b>	<b>BAGIAN KESRA</b>					
1	Tidak adanya sarana dan prasarana tempat ibadah maka di harapkan adanya bantuan dari pemerintah		Bantuan sarana dan prasana untuk untuk masjid/musholla BAITUL MUTTAKIN RT.01 Perum. Yunion / Masjid AL-IKHLASH Jl. Perum. Grand Abdi Karya Regency RT.01 Desa Jone	1	Paket	BAGIAN KESRA

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
1	Dikarenakan kondisi Musholla/Langgar Darus Syifa Jln. Dr.Cipto Mangunkusumo Gg. Rawasari banyak ditemukan kerusakan maka memerlukan Rehab / perbaikan agar tercipta suasana beribadah yang nyaman bagi warga sekitar. Ukuran 6 X 6 Meter.		Rehab / Perbaikan Musholla/Langgar Darus Syifa Jln. Dr. Cipto mangunkusumo, GG. Rawasari RT. 04, Kec. Tanah Grogot	36	M2	BAGIAN KESRA
2	Karena Musholahnya tidak pernah mendapatkan bantuan sehingga Perlu bantuan Masjid Nurul Huda Desa Lempesu Kec. Paser Belengkong		Rehab Masjid Nurul Huda Desa Lempesu Kec. Paser Belengkong			BAGIAN KESRA
3	Di karenakan tidak adanya bantaun dan dana sehingga memohon Bantuan Rehat TKA TPA Fidinillah Desa Damit		Bantuan Rehab TKA TPA Fidinillah Desa Damit			BAGIAN KESRA
4	Gereja Katolik Pastoran Gereja Katolik Paroki Allluia Tanah Grogot kondisinya sudah rusak dan memerlukan bantuan renovasi		Bantuan Keuangan Gereja Katolik Pastoran Gereja Katolik Paroki Alleluia Tanah Grogot (Hibah)	1	Paket	BAGIAN KESRA
5	Mushola Nidaur Rahman Jl. Rahmat RT 10 Desa Tepian Batang memerlukan bantuan untuk penyelesaian pembangunan		Bantuan Keuangan untuk Musholla Nidaur Rahman Jl. Rahmat RT 10 Desa Tepian Batang Kec.Tanah Grogot	1	Paket	BAGIAN KESRA
6	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), RT 005 DESA TAMPAKAN KEC BATU ENGAU		BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID BAITURAAHMAN RT 005 DESA TAMPAKAN	1	Paket	BAGIAN KESRA
7	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), AL- IKHLAS DESA LOMU RT 005		PERMOHONAN BANTUAN DANA UNTUK MUSOLLAH AL-IKHLAS DESA LOMU RT 005	1	Paket	BAGIAN KESRA

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
8	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)H, DESA MENGKUDU KEC BATU ENGAU		bantuan pembangunan musollah ""SABILIL MUTTAQIN"" desa mengkudu kec batu engau	1	Paket	BAGIAN KESRA
9	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)		bantuan untuk masjid jami nuni yadi desa sagendang pembangunan atai rehabilitasi	1	Paket	BAGIAN KESRA
10	Musholah AL Fallah Desa Makmur Jaya Kec. Long Kali mengalami kerusakan sehingga perlu dianggarkan rehab mushola		Bantuan Keuangan Musholah AL Fallah Desa Makmur Jaya Kec. Long Kali, Kab. Paser (Hibah)	1	Paket	BAGIAN KESRA
11	Musolla Al Hijrah RT 12 desa Mendik Karya Kec Long Kali mengalami kerusakan sehingga perlu diprogramkan rehab musholla		Bantuan Keuangan Musolla Al Hijrah RT 12 desa Mendik Karya, Kab. Paser(Hbah)	1	unit	BAGIAN KESRA
12	Minimnya bantuan terhadap majelis talim sehingga diperlukan bantuan pengadaan baju seragam dan masker kain untuk majelis talim miftahul jannah di desa sangkuriman		Bantuan Majelis Talim Miftahul Jannah Desa Sangkuriman	1	Set	BAGIAN KESRA
13	Minimnya bantuan terhadap majelis talim sehingga diperlukan bantuan Dana Untuk Kelompok Majelis Miftahussurur Pabencengan Desa Pasir Belengkong		Bantuan Kelompok Majelis Miftahussurur Jl Pabencengan Desa Pasir Belengkong	1	Set	BAGIAN KESRA
14	Minimnya bantuan terhadap majelis talim sehingga diperlukan bantuan Dana Untuk Kelompok Majelis Nurul Amin Desa Keresik Bura		Bantuan Kelompok Majelis Nurul Amin Desa Keresik Bura	1	Set	BAGIAN KESRA
15	Minimnya bantuan terhadap majelis talim sehingga diperlukan bantuan Dana Untuk Kelompok Majelis Nurul Yaqin Desa Keresik Bura		Bantuan Kelompok Majelis Nurul Yaqin Desa Keresik Bura	1	Set	BAGIAN KESRA

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
16	Minimnya bantuan terhadap majelis talim sehingga diperlukan bantuan Dana Untuk Kelompok Majelis Raudhatul Janah Desa Keresik Bura		Bantuan Kelompok Majelis Raudhatul Janah Desa Keresik Bura	1	Set	BAGIAN KESRA
17	Minimnya bantuan terhadap majelis talim sehingga diperlukan bantuan Dana Untuk Kelompok Majelis Al MUTTAQIN Desa Keresik Bura		Bantuan Kelompok Majelis Al MUTTAQIN Desa Keresik Bura	1	Set	BAGIAN KESRA
18	Minimnya bantuan terhadap majelis talim sehingga diperlukan bantuan Dana Untuk Kelompok Majelis Taklim Nurul Jannah Jl Sama Taka Desa Damit		Bantuan Kelompok Majelis Taklim Nurul Jannah Jl Sama Taka Desa Damit	1	Set	BAGIAN KESRA
19	Minimnya bantuan terhadap majelis talim sehingga diperlukan bantuan Dana Untuk Kelompok Majelis Taklim Ar Raudah Griya Nusantara		Bantuan Kelompok Majelis Taklim Ar Raudah Griya Nusantara	1	Set	BAGIAN KESRA
20	Minimnya bantuan terhadap majelis talim sehingga diperlukan bantuan Dana Untuk Kelompok Majelis Taklim Ahbabul Musthofa Desa Sangkuriman		Bantuan Kelompok Majelis Taklim Ahbabul Musthofa Desa Sangkuriman	1	Set	BAGIAN KESRA
21	Kondisi Masjid yang belum selesai dan perlu perbaikan dan beberapa tempat ( Bantuan rehab Masjid Nurul Fajri		Rehab Masjid Nurul Fajri Di desa Rantau Bintungan Kec.Muara samu	1	Paket	BAGIAN KESRA
22	Ada bagian bangunan gereja yang rusak dan perlu untuk diperbaiki rehab gereja sendelay		Rehab Gereja Desa Sendelay Kec.Kuaro	1	Paket	BAGIAN KESRA
23	Kondisi langgar yang rusak dan dan perlu renovasi ( Masjid Darussalam Sei rat )		Rehab Masjid darussalam sei Rat Desa Rangan Kec.Kuaro	1	Paket	BAGIAN KESRA
24	Karna belum adanya pagar maka meminta pengadaan pagar masjid Al Muhajirin		Permohonan Bantuan pagar masjid Al Muhajirin	280	Meter	BAGIAN KESRA

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
25	Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual ( Melalui Mekanisme Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan ) Desa Seniung Jaya Kec.Paser Belengkong		Permohonan bantuan membangun halaman masjid al Muhajirin	1	Ha	BAGIAN KESRA
26	Lokasi Tempat ibadah yang sering mengalami longsor		Pembangunan siring masjid NURUL IMAN RT.04 Desa Lempesu Kec. Paser Belengkong	1	Paket	BAGIAN KESRA
27	Terrbatasnya sarana dan prasarana tempat ibadah di desa kayungo Sari		Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah Gereja SPM IMMACULLATA desa Kayungo Sari Jl. Cindrawasih RT.02	1	Paket	BAGIAN KESRA
28	Belum adanya sarana ibadah yang memadai		Pembangunan masjid AL-MUKARROM RT.08 desa Kayungo Sari	1	Paket	BAGIAN KESRA
29	Tidak adanya menara langgar tempat ibadah sehingga perlu Pembangunan Menara Langgar Daarurahmah desa pait		Pembangunan Menara Langgar DAARURAHMAH Desa Pait Kec. Long Ikis	2	Unit	BAGIAN KESRA
30	belum selesainya pembangunan langgar Darul ulum Desa Muara Komam RT 13 maka perlu lanjutan pembangunan langgar.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Lanjutan Pembangunan Langgar Darul ulum Desa muara komam RT 13 Beras Jiring Kec Muara komam (Lanjutan Pembangunan)	1	Paket	BAGIAN KESRA
<b>III</b>	<b>BIDANG PSDA</b>					
<b>1</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>					
1	Untuk menmbah peningkatan ekonomi petani di mohon bantuan untuk kelompok tani	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan Hand Tractor untuk kelompok tani PADA IDI desa Rantau Panjang	1	Unit	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
2	Akses jalan usaha tani yang rusak maka perlu adanya peningkatan jalan usaha tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan jalan usaha tani Barokah RT 01 Desa Padang Jaya	1	Paket	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	Belum akses jalan menuju jalan pertanian sehingga perlu adanya pembangunan jalan pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembuatan jalan pertanian Blok D desa Padang Pengrapat	1	Paket	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4	Sering terjadi banjir sehingga perlu adanya Pembangunan Tanggul sebagai penampung banjir	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan Tanggul Bendung Banjir Kelompok Tani Payo Selibah RT 03 Dan RT 10 Kecamatan Longkali	1	Paket	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
5	belum tersedia embung untuk menampung suplai aliran air hujan untuk pengairan pertanian/perkebunan RT 03 Kelurahan Long Kali	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung, RT 03 Kelurahan Long Kali, Kab. Paser	300	M2	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
6	Akses Jalan Usaha Tani yang rusak sehingga perlu adanya Peningkatan Jalan Usaha Tani di Desa Krayan Sentos Kec. Long Ikis Kab. Paser	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Krayan Sentosa Kec. Long Ikis Kab. Paser			DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
7	Rusak jalan menuju kebun sawit sebagai pendapatan ekonomi kelompok tani maka perlunya pembangunan jalan usaha Tani di Desa Suliliran	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Suliliran Kec. Pasir Belengkong			DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
8	Rusaknya jalan maka perlunya peningkatan jalan usaha tani kelompok tani Aliansi Taka Desa Tajur	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Tajur Kecamatan Long Ikis			DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
9	Tidak adana akses jalan menuju perkebunan sehingga menghambat mata pencarian ekonomi warga sehingga perlunya pembuatan jalan usaha tani dan Box Culvert di blok 18 RT 08 Desa Kendarom Kec. Kuaro	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Box Culvert Blok 18 RT 08 Kendarom Kec. Kuaro	1	Paket	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
10	Tidak adanya akses jalan maka perlunya pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Busui Batu Sopang	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Busui Kec. Batu Sopang	L=4 m P=5 km	Km	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
11	belum adanya akses jalan usaha tani perkebunan wargan Ds biu RT 3 untuk mempermudah masyarakat berkebun maka perlu pembukaan jalan usaha tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha tani desa biu rt 3 kec Muara samu pembukaan jalan usaha tani (pembukaan badan jalan)	1,5	Km	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
12	belum adanya akses jalan usaha tani maka perlu pembangunan pembukaan jalan usaha tani munte bawe di desa kasungai Batu sopang	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	pembangunan jalan usaha tani munte brewe desa kasungai RT 3 Kec Batu Sopang (pembukaan badan jalan)	4	Km	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
13	untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang Mandiri dan memaksimalkan lahan perkebunan warga maka dengan ini warga meminta untuk pengadaan bibit kecambah sawit untuk kelompok tani bolang makmur sungai terik agar lahan perkebunannya bisa produktif	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	pengadaan cultivator kelompok tani bolang makmur sungai terik RT 6 Kec Batu Sopang (Alat Cultivator)	2	Paket	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
14	bantuan pengadaan alat pertanian untuk menubjang kerja pertanian lebih maksimal di desa suliliran baru kelompok tani MEKAR JAYA	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	PENGADAAN HAND TRAKTOR RODA 2 ROTARY, KELOMPOK TANI MEKER JAYA DESA SULILIRAN BARU	2	Unit	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
15	kurangnya alat pertanian di desa damit sehingga memerlukan bantuan pengadaan alat pertanian untuk kelompok tani BERKAT MUFAKAT	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan Power Threaser (*Prioritas pada Desa food estate), DESA DAMIT KEC PASER BELENGKONG	2	Unit	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
16	Jalan usaha tani di Desa Tajer Mulya kondisinya rusak parah sehingga diperlukan Peningkatan jalan usaha tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Tajer Mulya Kec. Long Ikis Kab. Paser (Rigid)	1	Paket	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
17	Belum Adanya akses jalan menuju pertanian atau perkebunan sehingga memerlukan pembangunan di desa Putang Kec Long Kali	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Putang Kec Long Kali, Kab. Paser (LPB)	10000	Meter	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
18	Tidak ada akses jalan untuk mengangkat hasil pertanian sehingga perlu adanya pembangunan / pembukaan jalan usaha tani Desa Libur Dinding Rt 01 Kec. Muara samu	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani (Desa Libur Dinding Rt 01 Kec. Muara Samu)	5	Km	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
19	Tidak ada akses jalan untuk mengangkat hasil pertanian sehingga perlu adanya pembangunan / pembukaan jalan usaha tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan jalan usaha tani Di Desa Sweto Rt 02 Kec.muara samu	2500	Meter	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
20	Tidak ada akses jalan untuk mengangkat hasil pertanian sehingga perlu adanya pembangunan / pembukaan jalan usaha tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan jalan usaha tani Di Desa Rangan Kec.Kuaro	2300	Meter	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
21	Tidak ada akses jalan untuk mengangkat hasil pertanian sehingga perlu adanya pembangunan / pembukaan jalan usaha tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan jalan usaha tani desa Padang Jaya Kec.Kuaro	7000	Meter	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
22	Meningkatakan perekonomian Masyarakatan maka meminta hand Sprayer ( Pengadaan Alat Pertanian )	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Hand Sprayer Elektrik ( Desa Jone Panjang Kec.Tanah Grogot )	200	Unit	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
23	Meningkatakan perekonomian Masyarakatan maka meminta hand Sprayer ( Pengadaan Alat Pertanian )	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Hand Sprayer Elektrik ( Desa Pepara Kec.Tanah Grogot )	75	Unit	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
24	Meningkatakan perekonomian Masyarakatan maka meminta hand Sprayer ( Pengadaan Alat Pertanian )	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Hand Sprayer Elektrik ( Desa Rantau Panjang Kec.Tanah Grogot )	200	Unit	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
25	Rusaknya akses jalan, sehingga perlunya peningkatan jalan usaha tani sepanjang 3 ha	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 010 Desa Keluang Paser Jaya Kec. Kuaro	1	Paket	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
26	Terkendalanya dengan jalan yang rusak maka warga desa sangat memerlukan perbaikan jalan atau semenisasi jalan usaha tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan Jalan Usaha Tani (Suliliran Baru Rt 002 Kec.Pasir Belengkong)	1	Paket	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
27	Sebagai sarana konsumsi air bagi masyarakat dan peningkatan layanan penampung air di musim kemarau	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung ( Desa Laburan Lama Rt 02 Kec.Paser Belengkong )	1500	Meter	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
28	Petani masih kesulitan mengangkut hasil pertaniannya karena rusaknya akses jalan petani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan jalan usaha tani desa Lempesu Kec. Pasir Belengkong	200	Meter	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
29	Peningkatan jalan memberi manfaat dan membantu masyarakat melakukan mobilisasi diberbagai bidang sehingga menjadikan jalan untuk layak digunakan baik oleh warga sebagai akses pemakai jalan sehingga membuat kenyamanan dalam berkendara serta memobilisasi haSil kebun sehingga meningkatkan dapat taraf hidup	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan jalan usaha tani (Perkebunan) Rt 01-Rt09 Desa Kerang Dayo Kec.Batu Engau (LPB)	20	Km	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
<b>2</b>	<b>DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b>					
1	Karena masih minimnya pendapatan petani sehingga di butuhkan ternak sapi secara kelompok	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan sapi ternak untuk KELOMPOK CIPTA KARYA SANTOS desa Kerta Bumi Kec. Kuaro	20	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2	Untuk menambah pendapatan petani sangat di harapkan adanya bantuan sapi ternak	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan sapi ternak untuk kelompok PANTANG MUNDUR desa Padang Pengrapat	25	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3	Masih minimnya pendapatan hasil usaha petani di perlukan bantuan peningkatan usaha petani	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan bebek ternak, pakan dan kandang untuk kelompok SIPAKA INGE desa Sungai Tuak	25	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
4	Untuk meningkatkan usaha petani Di usulkan bantuan ternak sapi untuk kelompok MAKMUR JAYA desa Sekurau Jaya	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan sapi ternak untuk Kelompok MAKMUR JAYA desa SEKUROU JAYA	20	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
5	Untuk penambahan usaha petani di usulkan pengadaan ternak sapi untuk kelompok TRIMA RIZKI desa Kerta Bhakti	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan sapi ternak untuk Kelompok TRI REZEKI Desa Kerta Bhakti	25	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
6	Untuk meningkatkan mutu pendapatan maka butuh pengadaan bibit sapi ternak	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan bibit ternak sapi untuk kelompok Tunas Muda Desa Sekuan Makmur	1	Paket	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
7	Kurangnya modal kelompok tani untuk mengembangkan perekonomian maka perlu Pengadaan Bibit Itik Kelompok Tani Tunas Muda Desa Sekuan Makmur	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Itik Kelompok Tani Tunas Muda Desa Sekuan Makmur			DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
8	Pengadaan Ternak Sapi Jantan dan Betina Kelompok Tani Pias Hulu Desa Pinang Jatus Kec. Long Kali	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	PENGADAAN BIBIT TERNAK SAPI, KELOMPOK TANI PIS HULU DESA PINAG JATUS KEC LONG KALI	20	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
9	Pengadaan Ternak Sapi Jantan dan Betina Kelompok Tani Maju Desa Krayan Jaya Kec. Long Ikis	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	PENGADAAN BIBIT SAPI, KELOMPOK TANI MAJU DESA KRAYAN JAYA KEC LONG IKIS	20	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
10	Masyarakat Desa Munggu memerlukan alternatif pendapatan dengan bantuan, bibit ternak sapi bali untuk kelompok tani subur makmur Desa Munggu Kec Longkali sebanyak 43ekor (39 betina 4 jantan)	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak Sapi. kelompok tani subur maksmur desa Munggu Kec Long kali, Kab. Paser	43	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
11	Masyarakat Desa Mendik memerlukan alternatif pendapatan dengan bantuan, bibit ternak sapi bali untuk kelompok tani Sekenduy Taka Desa Mendik Kec Longkali sebanyak 29 ekor (27 betina 2 jantan)	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak Sapi. Kelompok ternak Sekenduy Taka Desa Mendik Kec Longkali, Kab. Paser	29	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
12	Bantuan pengedaan ternak sapi untuk kelompok ternak BERKARYA betina 31 ekor , jantan 2 ekor	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak Sapi. desa mendik karya kec long kali, Kab. Paser	33	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
13	untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang mandiri dan memaksimalkan lahan perkebunan warga maka warga meminta untuk pengadaan bibit kecambah sawit untuk kelompok tani bosa jaya bersama Ds Lusan RT 03 Kec Muara komam	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan bibit kecambah kelapa sawit kelompok tani bosa jaya bersama kelompok tani ds Lusan RT 03 Kec Muara komam (bibit kecambah kelapa sawit)	3	paket/peti	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
14	untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang Mandiri dan memaksimalkan lahan perkebunan warga maka dengan ini warga meminta untuk pengadaan bibit kecambah sawit untuk kelompok tani bolang makmur sungai terik RT 06 Kec Batu sopang agar lahan perkebunannya bisa produktif	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	pengadaan bibit kecambah kelapa sawit kelompok tani Bolang makmur kelompok tani ds sungai terik RT 6 Kec Batu Sopang (bibit Kecambah Kelapa sawit)	3	paket/peti	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
15	Minimnya bantuan kepada kelompok tani sehingga dibutuhkannya bantuan pengadaan benih cambah kelapa sawit di desa Riwang	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengadaan Bibit Kecambah Sawit Desa Riwang			DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
16	Bantuan pengadaan bibit ternak kambing kelompok ternak Sabar subur di desa tampakan rt 8 kec batu engau betina 31 ekor , jantan 31 ekor	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	PENGADAAN BIBIT TERNAK KAMBING, KELOMPOK TERNAK (TANI)SABAR SUBUR DESA TAMPAKAN	31	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
17	permohonan bantuan pengadaan ternak sapi untuk kelompok tani "TUNAS MUDA" betina 30, jantan 10	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	PENGADAAN BIBIT TERNAK SAPI, KELOMPOK TERNAK TUNAS MUDA DESA SULILIRAN BARU	JANTAN 10 BETINA 30	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
18	bantuan pengadaan bibit ternak sapi untuk kelompok ternak Warga saluyo Desa Laburan Baru. Kec Pasir Belengkong	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	PENGADAAN BIBIT TERNAK SAPI, KELOMPOK TERNAK WARGI SALUYO DESA LABURAN BARU	jANTAN 5 BETINA 50	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
19	Minimnya bantuan terhadap kelompok tani/ternak sehingga diperlukannya bantuan Kandang Ayam di Desa Seniung Jaya	Sub Kegiatan Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Pengadaan Kandang Ayam Desa Seniung Jaya (SP4)	1	Paket	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
20	rendahnya nilai perekonomian masyarakat sehingga perlu bantuan dalam hal Pengadaan Bibit Sapi Untuk "Kelompok Tani Berkah Abadi" di Desa Suliliran Baru	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak Sapi Kelompok berkah abadi Desa Suliliran Baru (SP1)	1	Paket	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
21	Pengadaan bibit sapi untuk kelompok tani "Kelompok Lembu Berkah" di desa Suliliran Baru	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak Sapi Kelompok lembu berkah Desa Suliliran Baru (SP1)	1	Paket	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
22	Diperlukannya bantuan kelompok Tani Wanita (KWT) cahaya pagi berupa pengadaan bibit unggas ternak ayam di desa suliliran baru	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ayam Desa Suliliran Baru	1	Paket	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
23	Sulitnya mendapatkan bibit ternak, sehingga mohon bantuan pengadaan bibit ternak sapi kelompok peternak	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak Sapi Desa Keluang Paser Jaya Kec. Kuaro, Kab. Paser	20	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
24	Untuk pengembangan populasi hewan ternak sapi serta meningkatkan perekonomian masyarakat	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak Sapi (Desa Laburan Baru Kec.Belengkong)	20	Ekor	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
<b>3</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>					
1	Masih banyak terdapat sarana dan prasarana nelayan yang membutuhkan bantuan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan domping untuk kelompok MARHAEN BANTENG Desa Pasir Mayang RT.11	14	Unit	DINAS PERIKANAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
2	Masih minimnya peralatan untuk keperluan para nelayan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Alat tangkap udang (PENAMBE) gilnet untuk kelompok nelayan SUKUR SELAMAT Desa Muara Paser	1	Paket	DINAS PERIKANAN
3	Susahnya Nelayan dalam Menangkap Ikan Maka Perlu adanya Pendukung Agar Memudahkan Nelayan Maka Perlu Adanya Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Desa Muara Adang Kec. Long Ikis Kab.Paser	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Desa Muara Adang Kec. Long Ikis Kab. Paser			DINAS PERIKANAN
4	Kurangnya bibit ikan lele yang ada, sehingga perlu pengadaan bibit ikan dan pakan untuk pengembangan perikanan kelompok budidaya ikan esa taka di kelurahan long ikis	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket Budi daya Ikan Lele pada kelompok Budidaya ikan esa taka di Kelurahan Long Ikis	1	Paket	DINAS PERIKANAN
5	Kurangnya bibit ikan yang ada, sehingga perlu pengadaan bibit ikan dan pakan untuk pengembangan perikanan kelompok Budidaya Ikan Sukses Bersama Desa Krayan Bahagia Long Ikis	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket Budi daya ikan Lele pada kelompok Budidaya Ikan Sukses Bersama Desa Krayan Bahagia, Kec. Long Ikis	1	Paket	DINAS PERIKANAN
6	Kurangnya bibit ikan yang ada, sehingga perlu Pengadaan bibit ikan dan pakan untuk pengembangan perikanan kelompok Budidaya Ikan Batur Salembur Desa Krayan Bahagia Long Ikis.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket Budi daya ikan Lele pada kelompok Budidaya Ikan Batur Salembur Desa Krayan Bahagia, Kec. Long Ikis	1	Paket	DINAS PERIKANAN
7	Kurangnya bibit ikan yang ada, sehingga perlu pengadaan budidaya ikan lele dan perlengkapannya untuk Pokdakan Gagak Lumayung desa Krayan bahagia	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket Budi daya Ikan Lele untuk Pokdakan Gagak Lumayung Desa Krayan Bahagia, Kelurahan Long Ikis	1	Paket	DINAS PERIKANAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
8	Perlunya penambahan Mesin Penggerak Kapal 24 HP untuk masyarakat Desa Muara Telake Kelompok Nelayan Mutiara Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap Ikan > 23 HP, Desa Muara Telake, Kab. Paser	21	Unit	DINAS PERIKANAN
9	Perlunya penambahan mesin ketinting untuk masyarakat Desa Petiku Kelompok Nelayan Nurul Ikhwan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Ketinting, Desa Petiku, Kab. Paser	25	Unit	DINAS PERIKANAN
10	Masyarakat Desa Pepara yang berprofesi sebagai nelayan dan tergabung dalam Kelompok Nelayan Rajawali membutuhkan mesin ketinting sebagai sarana untuk menangkap ikan mengngat mesin yang mereka memiliki sudah berusia tua dan sering rusak	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan mesin ketinting untuk Kelompok Nelayan Rajawali Desa Pepara Kec. Tanah Grogot	50	Unit	DINAS PERIKANAN
11	bantuan mesin dompeng 24 HP untuk kelompok nelayan Harapan kami desa selengot mesin deasel ninja 20 unit,, has panjang 2m 20 unit	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	PENGADAAN MESIN PENGGERAK KAPAL PENANGKAP IKAN > 23 HP, KELOMPOK NELAYAN KARAPAN KAMI DESA SELENGOT KEC TANJUNG HARAPAN (MESIN DIESEL NINJA 24 HP 20 UNIT) DAN (HAS PANJANG 2 M , 20 UNIT)	MESIN 20 HAS 20	Unit	DINAS PERIKANAN
12	Bantuan pengadaan mesin ketinting Kelompok nelayan BERINGIN RAYA Desa Sagendang	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	PENGADAAN MESIN KETINTING, KELOMPOK NELAYAN BERINGIN RAYA DESA SAGENDANG KEC BATU ENGAU	20	Unit	DINAS PERIKANAN
13	bantuan pengadaan mesin ketintin untuk kelompok nelayan LANDING JAYA desa riwang kec batu enfau mesin ketinting merek RYU HP 420	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	PENGADAAN MESIN KETINTING, DESA RIWANG KEC BATU ENGAU KELOMPOK NELAYAN LANDING JAYA	15	Unit	DINAS PERIKANAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
14	minimnya bantuan terhadap kelompok nelayan sehingga diperlukannya bantuan pengadaan alat tangkap (Rengge Udang) di Desa Tanjung Aru	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Rengge Udang Desa Tanjung Aru	1	Paket	DINAS PERIKANAN
15	minimnya bantuan terhadap kelompok nelayan sehingga diperlukannya bantuan pupuk tambak untuk warga desa senipah	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Pupuk Tambak Desa Tanjung Aru	1	Paket	DINAS PERIKANAN
16	warga nelayan desa pasir mayang tidak bisa lagi mencari ekonomi akibat mesin yang ada tidak bisa diperbaiki	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Ketinting Di Desa Pasir Mayang Kec.Kuaro	100	Unit	DINAS PERIKANAN
17	Warga nelayan senipa khususnya kelompok Kub Sipatuo tidak bisa melaut dikarenakan selalu terkendala dengan Mesin yang rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Penggerak kapal Penangkap Ikan >23 HP / Desa Senipa Kec.Tanjung Harapan	20	Unit	DINAS PERIKANAN
18	Warga nelayan khususnya nelayan tidak bisa melaut dikarenakan selalu terkendali dengan mesin yang rusak dan tidak bisa di perbaiki	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Penggerak kapal Penangkap Ikan >23 HP / Desa Tanjung Aru Rt 02 Kec.Tanjung Harapan	20	Unit	DINAS PERIKANAN
19	Karna Tidak Layak dipake masyarakat meminta bantuan mesin ketinting	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Ketinting (Desa Muara Pasir Kec,Tanah Grogot)	50	Unit	DINAS PERIKANAN
20	Warga nelayan desa suliliran baru RT 002 tidak bisa lagi mencari ekonomi akibat mesin yang ada suda tidak layak diperbaiki	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Ketinting ( Suliliran Baru Rt 002 Kec.Pasir Belengkong	50	Unit	DINAS PERIKANAN
21	Kurangnya pelayanan penangkap udang bagi nelayan pesisir	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Trammel Net ( Desa Labuankallo Kec.Tanjung Harapan )	1000	Unit	DINAS PERIKANAN
22	warga nelayan khusnya tidak bisa melaut dikarenakan selalu terkendali dengan mesin yang rusak dan tidak bisa di perbaiki	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap Ikan > 23 HP ( Desa Senipa Kec.Tanjung harapan )	15	Unit	DINAS PERIKANAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
23	Kurangnya pelayanan tangkap udang bagi nelayan pesisir	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Trammel Net (Desa Sungai Langir Kec Tanah Grogot)	200	Set	DINAS PERIKANAN
24	Kurangnya pelayanan penangkap udang bagi nelayan pesisir	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Trammel Net (Desa Lori Kec. Tanjung Harapan)	1000	Set	DINAS PERIKANAN
25	warga nelayan khususnya nelayan tidak bisa melalui di karenakan selalu terkendali mesin yang rusak dan tidak bisa diperbaiki	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap Ikan > 23 HP ( Desa Selengot Rt 1-5 Kec.Tanjung Harapan	20	Unit	DINAS PERIKANAN
26	kurangnya pelayanan tangkap udang bagi nelayan pesisir maka memerlukan bahan julu	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Trammel Net ( Desa Selengot Rt 1-5 Kec.Tanjung Harapan	20	Unit	DINAS PERIKANAN
27	BANTUAN PERALATAN PENYIAPAN KERUPUK IKAN DAN UDANG DAN ALAT KUKUS, UNTUK KELOMPOK UMK TERATAI PUTRI DESA LORI KEC TANJUNG HARAPAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	PAKET PENYEDIAAN PERALATAN PENGOLAHAN KERUPUK, DESA LORI KEC TANJUNG HARAPAN	1	PAKET	DINAS PERIKANAN
<b>4</b>	<b>DINAS OLAHRAGA PEMUDA DAN PARIWISATA</b>					
1	Masyarakat sangat membutuhkan sarana olah raga sebagai upaya peningkatan kesehatan dan prestasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pembangunan pagar lapangan Volley Ball Kelompok BUANA MUDA RT.02 RW.01 desa Modang	1	Paket	DINA OLAH RAGA PEMUDA DAN PARIWISATA
2	Kurangnya pengembangan Olahraga PSHT tidak tersedianya tempat khusus olahraga PSHT maka perlunya Pembangunan Padepokan PSHT Kec. Tanah Grogot	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pembangunan Padepokan PSHT Kec. Tanah Grogot	1	Paket	DINA OLAH RAGA PEMUDA DAN PARIWISATA
3	Pembangunan Lapangan Futsal Desa Suliliran Baru	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi (Pembangunan Lapangan Futsal) Desa Suliliran Baru (SP1)	1	Paket	DINA OLAH RAGA PEMUDA DAN PARIWISATA

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
5	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI &amp; UKM</b>					
1	Halaman Pasar berair, terdapat banyak genangan air hujan sehingga perlu adanya Rehabilitasi Pasar berupa Semenisasi/ di cor agar masyarakat nyaman ketika berbelanja di pasar Desa Petangis	Penyediaan Sarana distribusi perdagangan	Rehabilitasi Pasar Rakyat (Semenisasi halaman pasar) desa Petangis	1	Paket	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN IKM
2	Tidak adanya perlengkapan penunjang peralatan budidaya lebah madu kelulut sehingga perlu untuk Pengadaan Peralatan Budi Daya Lebah Madu Kelulut Kelompok Tani Hutan "Tajur Berkah Lestari"	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Pengadaan Peralatan Budi Daya Lebah Madu Kelulut Kelompok Tani Hutan "Tajur Berkah Lestari" Desa Tajur Kecamatan Long Ikis	1	Paket	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN IKM

**Tabel**

## Rekapitulasi Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Sulitnya memperoleh bibit yang unggul dan harga bibit yang mahal	Pengadaan Bibit Ternak Kambing	Desa Tempakan	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	banyaknya warga yang mengusulkan ternak sapi dikarenakan potensi untuk ternak sapi sangat besar dan pangannya pun melimpah	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Desa Petangis	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	masih luasnya lahan kosong yang dimiliki masyarakat Desa Libur Dinding yang masih belum diberdayakan	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Desa Libur Dinding	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
4	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Biu belum pernah mendapat bantuan ternak Sapi	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Desa Biu	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
5	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	kurangnya modal dana kelompok tani untuk membeli ternak sapi	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Desa Tanjung Pinang	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	sulitnya memperoleh bibit yang unggul dan harga bibit yang mahal khususnya ayam kampung KUB didesa Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu	Pengadaan Bibit Ternak Ayam	Desa Rantau Bintungan	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
7	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	kurangnya Sumber Daya Hewani terutama kambing	Pengadaan Bibit Ternak Kambing	Desa Muara Langon	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
8	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Warga desa berharap adanya bantuan hewan Sapi Sehingga mereka ada kegiatan selain sawit	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Desa Sunge Batu	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
9	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	susahnya memperoleh bibit itik yang unggul dan harga bibit yang mahal	Pengadaan Bibit Ternak Itik	Desa Samurangau	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
10	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tidak tersedianya bibit sapi unggul	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Desa Legai	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	belum tersedianya bibit unggas atau peningkatan produksi telur bebek	Pengadaan Bibit Ternak Itik	Desa Mendik	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
12	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	sulitnya memperoleh Sapi yang unggul dan berkualitas	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Desa Pinang Jatus	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Karena masih kurangnya bibit super di Desa Muara Lamabakan khususnya bibit Sapi Bali	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Desa Muara Lambakan	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
14	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	masih sulitnya mencari bibit ternak kambing yang berkualitas	Pengadaan Bibit Ternak Kambing	Desa Mendik Makmur	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
15	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	sulitnya memperoleh ternak	Pengadaan Bibit Ternak Kambing	Desa Mendik Bhakti	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
16	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	pemelihara mandiri terkendala modal kurang	Pengadaan Bibit Ternak Itik	Desa Gunung Putar	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17	Progam Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	masih banyak masyarakat yang ingin menjadi wiraswasta namun belum memiliki modal	Pengadaan Kandang Ayam	Desa Janju	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
18	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	banyaknya kebutuhan pakan ternak yang murah	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak	Desa Senaken	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
19	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	mahal dan terbatasnya pakan ternak sehingga mengurangi minat warga dalam memelihara hewan ternak	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak	Desa Olung	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
20	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	sulitnya mendapat bibit ternak unggas dengan jenis ayam kampung	Pengadaan Bibit Ternak Ayam	Desa Sawit Jaya	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
21	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Belum bisa mendapatkan bibit unggas yang unggul dan murah untuk pengembangan usaha di masyarakat	Pengadaan Bibit Ternak Ayam	Desa Adang Jaya	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan
22	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ayam Petelur	Pengadaan Bibit Ternak Ayam	Desa Atang Pait	1 Paket	Dinas Perkebunan dan Peternakan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	sulitnya warga mendapatkan harga yang ekonomis sehingga adanya pengembangan bawang merah di desa	Pengembangan Bawang Merah	Desa Bai Jaya	1 Paket	DPTH
24	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sulitnya Mendapatkan Bibit Jahe Merah di Desa Luan	Pengembangan Jahe	Desa Luan	1 Paket	DPTH
25	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tidak ada peralatan untuk pengolahan tanah	Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Desa Prayon	1 Unit	DPTH
26	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Selama ini mengolah tanah masih menggunakan cangkul sehingga prosesnya lambat	Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Desa Lusan	2 Unit	DPTH
27	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sulitnya memperoleh Bibit unggul	Pengembangan Bawang Merah	Desa Sekuan Makmur	1 Paket	DPTH
28	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	kekurangan alat pemanen padi sawah	Pengadaan Power Threaser	Desa Damit	3 Unit	DPTH

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	kekurangan peralatan pengolahan lahan Persawahan	Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Desa Damit	1 Unit	DPTH
30	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	kurangnya Alat Pertanian Traktor dan Power Tleser Sehingga Produksi Hasil Panen Kurang Maksimal	Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Desa Suatang	1 Unit	DPTH
31	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	tidak adanya pintu air saluran irigasi pertanian yang layak dan baik	Pembangunan Pintu Air	Desa Suliliran Baru	2 Unit	DPTH
32	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sulitnya Para petani membajak sawah	Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Desa Suliliran	1 Unit	DPTH
33	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengolahan dan Produktivitas menjadi tidak maksimal karena kurangnya alat pendukung pertanian	Pengadaan Power Threaser	Desa Suatang Keteban	2 Unit	DPTH
34	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sulitnya Memperoleh Bibit yang Unggul dan Harga Bibit yang Mahal	Pengembangan Bawang Merah	Desa Songka	1 1 Paket	DPTH
35	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sulitnya mendapatkan alat pengolahan lahan pertanian karena harga yang mahal	Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Kelurahan Long Kali	1 Unit	DPTH

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
36	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sehubungan dengan belum tersedianya Hand Traktor di Desa Bente Tualan yang merupakan sebagai sarana pendukung pertanian, dengan ini kami memohon agar sarana pendukung pertanian tersebut bisa terealisasi.	Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Desa Bente Tualan	1 Unit	DPTH
37	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	kurangnya hand traktor roda 2 sehingga pengolahan lahan pertanian kurang maksimal	Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Desa Sebakung Taka	1 Unit	DPTH
38	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	kurangnya alat pada saat musim tanam tiba	Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Desa Maruat	1 Unit	DPTH
39	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Mahalnya biaya pengolahan lahan tanam	Pengadaan Hand Traktor R 2 Rotary	Desa Sebakung Makmur	1 Unit	DPTH
40	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Mahalnya biaya pengolahan lahan	Pengadaan Cultivator	Desa Sebakung Makmur	1 Unit	DPTH
41	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sulitnya Peralatan untuk besawah	Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Desa Petiku	2 Unit	DPTH

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
42	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Masyarakat masih menggunakan alat manual untuk pengolahan pertanian	Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Desa Muara Adang II	2 Unit	DPTH
43	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengolahan Tanah masih menggunakan alat pertanian manual, sehingga tidak maksimalnya produk yang dihasilkan	Pengadaan Hand Traktor R 2 Rotary	Desa Kerta Bumi	1 Unit	DPTH
44	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sulitnya memperoleh bibit yang unggul dan harga bibit yang mahal	Pengembangan Bawang Merah	Desa Padang Jaya	1 Paket	DPTH
45	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tidak tersedia sarana dan prasarana pengelolaan tanah lahan replanting kelapa sawit	Pengadaan Hand Traktor R 2 Rotary	Desa Klempang Sari	1 Unit	DPTH
46	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Sulit Untuk Dilalui	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Desa Tanah Periuk	250 m	DPTH
47	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terdapat Lahan Yang bisa Digunakan Untuk Pengembangan Budidaya Tanaman Jahe	Pengembangan Jahe	Desa Sempulang	1 Paket	DTPH

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
48	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Usaha tani yang ada didesa masih kekurangan alat handtraktor	Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Desa Rantau Panjang	1 Unit	DPTH
49	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pembentukan dasawisma di desa, belum terdapat kegiatan sehingga mengalami kesulitan dalam menyusun program kedasawismaan sehingga harapannya dapat sekaligus untuk ketahanan pangan di desa	Pembangunan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Rumah Bibit, Demplot, Pertanaman/Pekarangan, Pasca Panen)	Desa Saing Prupuk	2 Kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan
50	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kurangnya Bibit untuk Perkarangan Rumah di Desa Luan	Pembangunan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Rumah Bibit, Demplot, Pertanaman/Pekarangan, Pasca Panen)	Desa Luan	2 Kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan
51	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kurangnya Pengetahuan Cara menanam sayur yang baik dan yang benar	Pembangunan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Rumah Bibit, Demplot, Pertanaman/Pekarangan, Pasca Panen)	Desa Damit	1 Kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
52	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pengadaan Lumbung padi untuk permasalahan sulitnya petani menampung hasil panen pasca panen	Pembangunan Toko Mitra Tani	Desa Tajur	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan
53	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kurangnya hasil produksi tanaman pangan Desa Krayan bahagia	Pembangunan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Rumah Bibit, Demplot, Pertanaman/Pekarangan, Pasca Panen)	Desa Krayan Bahagia	1 Kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan
54	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan kami sudah mendapatkan bantuan berupa mesin ketinting dan untuk mendukung kinerja nelayan di laut memerlukan alat tangkap ikan	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Keramba Jaring Apung	Desa Segandang	1 Paket	Dinas Perikanan
55	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Keluhan nelayan terkait dengan alat penggerak perahu nelayan, sehingga perlu diadakan sebagai alat penunjang kerja para nelayan.	Pengadaan Mesin Ketinting	Desa Riwang	10 Unit	Dinas Perikanan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
56	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terbatasnya Nelayan di Desa Langgai yang mempunyai Mesin Ketinting sehingga menjadi kendala dalam menangkap ikan	Pengadaan Mesin Ketinting	Desa Langgai	1 0 Unit	Dinas Perikanan
57	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan dasawisma di desa, belum terdapat kegiatan sehingga mengalami kesulitan dalam menyusun program ke dasawismaan sehingga memerlukan bantuan dalam rangka sekaligus ketahanan pangan di desa	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Desa Saing Prupuk	1 Paket	Dinas Perikanan
58	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Karena belum ada yang membudidayakan ikan lele	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Lele	Desa Muser	1 Paket	Dinas Perikanan
59	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memenuhi Kebutuhan Konsumsi Ikan	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Muara Andeh	1 Paket	Dinas Perikanan
60	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Potensi pengembangan ikan air tawar	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Keramba Jaring Apung	Desa Keladen	1 Paket	Dinas Perikanan
61	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Potensi perikanan air tawar	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Lele	Desa Keladen	1 Paket	Dinas Perikanan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
62	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya peralatan pengolahan kerupuk	Pengadaan Paket Penyediaan Peralatan Pengolahan Kerupuk	Desa Tanjung Aru	1 Paket	Dinas Perikanan
63	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Mesin sudah banyak bermasalah dan rusak	Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap Ikan > 23 HP	Desa Tanjung Aru	10 Unit	Dinas Perikanan
64	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Karena Mesin Nelayan Desa Labuangkallo Sudah Pada Rusak Berat Atau Tidak Bisa Dipakai	Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap Ikan > 23 HP	Desa Labuangkallo	50 Unit	Dinas Perikanan
65	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kurangnya Biaya Untuk Alat Tangkap Nelayan	Pengadaan Gill Net	Desa Lori	50 Unit	Dinas Perikanan
66	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kekurangan mesin penangkap ikan	Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap Ikan > 23 HP	Desa Senipah	20 Unit	Dinas Perikanan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
67	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sulitnya memperoleh bibit yang unggul dan harga bibit yang mahal	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Desa Uko	1 Paket	Dinas Perikanan
68	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Tidak memiliki Penghasilan Yang cukup	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Keramba Jaring Apung	Desa Muara Kuaro	1 Paket	Dinas Perikanan
69	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jauh Dari Pangsa Pasar Karena Jalan kurang mendukung (100 Kolam Estimasi 100 Juta)	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Desa Swan Slotung	1 Paket	Dinas Perikanan
70	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sulitnya memperoleh bibit ikan lele yang unggul dan harga yang tinggi	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Lele	Desa Pasir Belengkong	1 Paket	Dinas Perikanan
71	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Benih Ikan Nila Karena Sulit Memperoleh benih unggul harga benih yang mahal	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Desa Sangkuriman	1 Paket	Dinas Perikanan
72	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sulitnya memperoleh bibit unggul dan harga pakan lele yang sangat mahal	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Lele	Desa Laburan	1 Paket	Dinas Perikanan
73	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sulitnya Memperoleh Bibit yang Unggul dan Harga Bibit yang Mahal	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Desa Batu Kajang	1 Paket	Dinas Perikanan
74	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sulitnya Memperoleh Bibit Nila yang Unggul dan Harga Bibit yang Mahal	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Desa Rantau Layung	1 Paket	Dinas Perikanan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
75	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belum tersedianya bibit ikan yang mahal dan memadai	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Desa Kepala Telake	1 Paket	Dinas Perikanan
76	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belum tersedianya bibit ikan nila di Desa Makmur Jaya	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Desa Makmur Jaya	1 Paket	Dinas Perikanan
77	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya usaha budidaya ikan di lingkungan desa lolo karena kebanyakan masyarakat dan kelompok masyarakat bertani, sedangkan ada potensi pasar yang didapat diperoleh.	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Lele	Desa Lolo	1 Paket	Dinas Perikanan
78	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sulitnya memperoleh alat penangkapan ikan	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Keramba Jaring Apung	Desa Pasir Mayang	1 Paket	Dinas Perikanan
79	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Guna untuk meningkatkan ekonomi kreatif di kelurahan kuario	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Kelurahan Kuario	1 Paket	Dinas Perikanan
80	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Masih kurangnya saat ini sarana prasarana untuk nelayan mencari ikan	Pengadaan Mesin Ketinting	Desa Rantau Panjang	1 0 Unit	Dinas Perikanan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
81	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya Peralatan Penunjang	Pengadaan Paket Penyediaan Peralatan Pengolahan Kerupuk	Desa Muara Adang	1 Paket	Dinas Perikanan
82	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Butuhnya kegiatan yang dapat membantu Ketahanan Pangan di Desa	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Lele	Desa Lombok	1 Paket	Dinas Perikanan
83	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Harga Jual Ikan Lele warga yang sangat rendah dan tidak sesuai dengan biaya pakan dan pemeliharaan, sehingga menimbulkan keinginan warga untuk mengajukan pelatihan pengolahan panganan dari ikan sehingga memiliki harga jual yang pantas.	Pengadaan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Diversifikasi Pangan Olahan berbasis ikan	Desa Olung	1 Paket	Dinas Perikanan
84	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belum adanya bibit unggul untuk usaha ikan nila di masyarakat dengan harga murah	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Desa Tiwei	1 Paket	Dinas Perikanan
85	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keterbatasan dalam membudidayakan ikan nila	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Keramba Jaring Apung	Desa Kerta Bhakti	1 Paket	Dinas Perikanan
86	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Minimnya Penghasilan Petani dan Sulitnya Memperoleh Bibit Unggul Serta Harga Bibit Yang Mahal	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Lele	Desa Tajer Mulya	1 Paket	Dinas Perikanan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
87	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Masih belum tersedianya alat angkut persampahan	Pengadaan Sarana Angkut Persampahan	Desa Riwang	1 Unit pick up	Dinas Lingkungan Hidup
88	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Masih belum tersedianya alat angkut persampahan	Pengadaan Sarana Angkut Persampahan	Desa Muara Payang	1 Unit pick up	Dinas Lingkungan Hidup
89	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Masih belum tersedianya alat angkut persampahan	Pengadaan Sarana Angkut Persampahan	Desa Songka	1 Unit pick up	Dinas Lingkungan Hidup
90	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Masih belum tersedianya alat angkut persampahan	Pengadaan Sarana Angkut Persampahan	Kelurahan Tanah Grogot	3 Unit	Dinas Lingkungan Hidup
91	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Masih belum tersedianya alat angkut persampahan	Pengadaan Sarana Angkut Persampahan	Desa Jone	3 Unit	Dinas Lingkungan Hidup
92	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Masih belum tersedianya alat angkut persampahan	Pengadaan Sarana Angkut Persampahan	Desa Padang Pengrapat	3 Unit	Dinas Lingkungan Hidup

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
93	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Masih belum tersedianya alat angkut persampahan	Pengadaan Sarana Angkut Persampahan	Desa Senaken	3 Unit	Dinas Lingkungan Hidup
94	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Masih belum tersedianya alat angkut persampahan	Pengadaan Sarana Angkut Persampahan	Kelurahan Long Ikis	1 Unit pick up	Dinas Lingkungan Hidup
95	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Masih belum tersedianya alat angkut persampahan	Pengadaan Sarana Angkut Persampahan	Desa Pait	1 Unit pick up	Dinas Lingkungan Hidup
96	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	sulitnya masyarakat mendapatkan pasokan sembako dan pemasaran hasil bumi	Rehabilitasi Pasar Rakyat	Desa Lomu	1 Paket	DISPERINDAGKOP
97	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sebagian sarana dan prasarana pasar desa Pengguren Jaya rusak berat dan membutuhkan perluasan area	Rehabilitasi Pasar Rakyat	Desa Pengguren Jaya	1 Paket	DISPERINDAGKOP
98	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tidak Terpenuhi Fasilitas Sarana Dan Prasarana Pasar Desa	Rehabilitasi Pasar Rakyat	Desa Tebru Paser Damai	1 Paket	DISPERINDAGKOP

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
99	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Perlunya keterampilan masyarakat untuk membantu peningkatan perekonomian rumah tangga	Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Peralatan	Kelurahan Muara Komam	1 Paket	DISPERINDAGKOP
100	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kondisi pasar yang kurang strategis dan membahayakan keselamatan penjual dan pembeli	Relokasi Pasar Rakyat	Desa Keresik Bura	1 Paket	DISPERINDAGKOP
101	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	guna meningkatkan anyaman di desa dan belum tersedianya peralatan pengelolaan rotan	Pelatihan Industri dan Bantuan Peralatan	Desa Kasungai	1 Paket	DISPERINDAGKOP
102	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kurangnya Skill Menjahit Para Wanita PKK Desa Batu Kajang	Pendidikan Pelatihan dan Pelatihan Kompetensi (Pelatihan alat perbengkelan, pelatihan listrik, las, kecantikan, memasak dan menjahit)	Desa Batu Kajang	3 Orang	DISPERINDAGKOP
103	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Masih banyak pedagang yang menggelar dagangannya dijalan/diterminal desa	Rehabilitasi Pasar Rakyat	Desa Muara Telake	1 Paket	DISPERINDAGKOP

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
104	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	kondisii lantai pasar yang sudah jabuk karena terbuat dari papan sehingga membahayakan pedagang dan konsumen	Rehabilitasi Pasar Rakyat	Desa Maruat	1 Paket	DISPERINDAGKOP
105	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kurangnya sarana prasarana pendukung kemajuan UMKM	Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Peralatan	Desa Rangan	1 Paket	DISPERINDAGKOP
106	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sebagian Bangunan sudah tidak layak Pakai	Rehabilitasi Pasar Rakyat	Desa Kerta Bumi	1 Paket	DISPERINDAGKOP
107	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	belum pernah mendapat pelatihan UMKM	Pendidikan Pelatihan dan Pelatihan Kompetensi (Pelatihan alat perbengkelan, pelatihan listrik, las, kecantikan, memasak dan menjahit)	Kelurahan Tanah Grogot	4 Orang	DISPERINDAGKOP
108	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Keadaan Pasar Rakyat Kurang layak dan masih butuh direhap	Rehabilitasi Pasar Rakyat	Desa Tepian Batang	1 Paket	DISPERINDAGKOP
109	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	belum ada fasilitas pasar yang memadai	Rehabilitasi Pasar Rakyat	Desa Muara Pasir	1 Paket	DISPERINDAGKOP

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
110	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Banyaknya masyarakat yang belum ada keterampilan untuk menambah penghasilan keluarga, terbatasnya keterampilan anyaman di desa dan belum tersedianya peralatan pengelolaan rotan	Pelatihan Industri dan Bantuan Peralatan	Desa Tiwei	1 Paket	DISPERINDAGKOP
111	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	menambah wawasan, pengetahuan dan ketrampilan	Pendidikan Pelatihan dan Pelatihan Kompetensi (Pelatihan alat perbengkelan, pelatihan listrik, las, kecantikan, memasak dan menjahit)	Desa Selengot	3 Orang	DISNAKERTRANS
112	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Perlunya keterampilan masyarakat untuk membantu peningkatan perekonomian rumah tangga	Pendidikan Pelatihan dan Pelatihan Kompetensi (Pelatihan alat perbengkelan, pelatihan listrik, las, kecantikan, memasak dan menjahit)	Kelurahan Muara Komam	3 Orang	DISNAKERTRANS

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
113	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Banyak sumber daya manusia yang ada di desa menjadi pengangguran karena putus sekolah dan tidak memiliki ketrampilan	Pendidikan Pelatihan dan Pelatihan Kompetensi (Pelatihan alat perbengkelan, pelatihan listrik, las, kecantikan, memasak dan menjahit)	Desa Lusan	3 Orang	DISNAKERTRANS
114	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Perlunya peningkatan sumber daya untuk pengembangan keterampilan masyarakat	Pendidikan Pelatihan dan Pelatihan Kompetensi (Pelatihan alat perbengkelan, pelatihan listrik, las, kecantikan, memasak dan menjahit)	Desa Bukit seloka	3 Orang	DISNAKERTRANS
115	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Perlunya peningkatan sumber daya untuk pengembangan keterampilan masyarakat	Pendidikan Pelatihan dan Pelatihan Kompetensi (Pelatihan alat perbengkelan, pelatihan listrik, las, kecantikan, memasak dan menjahit)	Desa Krayan Makmur	3 Orang	DISNAKERTRANS

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
116	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kurangnya Kualitas SDM	Pendidikan Pelatihan dan Pelatihan Kompetensi (Pelatihan alat perbengkelan, pelatihan listrik, las, kecantikan, memasak dan menjahit)	Desa Kayungo Sari	3 Orang	DISNAKERTRANS
117	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana Objek Wisata Doyam Gundrah Desa Batu Botuk	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	Desa Batu Botuk	1 Paket	DISPORAPAR
118	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Ketidakterediaan Obyek wisata	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	Desa Selerong	1 Paket	DISPORAPAR
119	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Sarana dan Prasarana Olahraga di Desa Bekoso belum memadai sehingga kegiatan Olahraga di Desa kurang di minati masyarakat	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Desa Bekoso	1 Paket	DISPORAPAR
120	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	sempitnya lokasi menyebabkan sulitnya pengunjung untuk berkunjung	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	Desa Sungai terik	1 Paket	DISPORAPAR

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
121	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	tidak adanya penunjang seperti gazebo, toilet, tangga menuju wisata goa loyang	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	Desa Kasungai	1 Paket	DISPORAPAR
122	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kondisi obyek wisata kemilau laut pondong fasilitas yang ada sudah kurang baik	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	Desa Pondong Baru	1 Paket	DISPORAPAR
123	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Ketidakterediaan sarana penunjang wisata mangrove	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	Desa Klempang Sari	1 Paket	DISPORAPAR
124	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Belum adanya sarana prasarana olahraga rekreasi yang memadai	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Desa Tapis	1 Paket	DISPORAPAR
125	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kurangnya sarana dan prasaran olahraga di Desa sehingga pengembangan kegiatan Kepemudaan dibidang olah raga kurang berkembang.	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Desa Senaken	1 Paket	DISPORAPAR
126	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	Overload Jumlah Siswa	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 006 Batu Engau	Desa Saing Prupuk	1 Lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
127	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kondisi lantai ruang kelas yang rusak menyebabkan seringnya anak-anak sekolah tersandung dan jatuh, sehingga perlu perbaikan lantai ruang kelas yang rusak	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 007 Long Kali	Desa Bente Tualan	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
128	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Belum ada rumah dinas guru	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN SATAP 8 Batu Engau	RT. 003, Desa Kerang Dayo	1 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
129	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Ada Jurang di belakang Sekolah SDN 005 yang membahayakan Murid sehingga dibutuhkan Pagar	Pembangunan Pagar SDN 005 Tanah Grogot	RT. 007 Desa Tepian Batang	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
130	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak Terjangkaunya Pelayanan Kesehatan Yang Baik Dan Bermutu	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Tebru Paser Damai	1 Paket	Dinas Kesehatan
131	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kekurangan fasilitas peralatan medis	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Senipah	1 Paket	Dinas Kesehatan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
132	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurangnya Perlengkapan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Uko	1 Paket	Dinas Kesehatan
133	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurangnya Alat Medis	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Muara Payang	1 Paket	Dinas Kesehatan
134	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurangnya Alat kesehatan yang tersedia	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Olong Pinang	1 Paket	Dinas Kesehatan
135	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kurangnya Sarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan dan Lain-lain	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Desa Batu Kajang	1 Unit	Dinas Kesehatan
136	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dengan belum tersedianya peralatan medis yang memadai di Desa bente Tualan, maka diperlukan adanya alat penunjang kesehatan yang memadai.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Bente Tualan	1 Paket	Dinas Kesehatan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
137	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	belum lengkapnya alat kesehatan yang ada di PUSBAN Desa Muara Telake	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Muara Telake	1 Paket	Dinas Kesehatan
138	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	tidak adanya alat peralatan kesehatan sehingga sulitnya ketika warga mengalami sakit karna kuranya alat kesehatan yang ada di desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Perkuwen	1 Paket	Dinas Kesehatan
139	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurang Memadai dan masih sangat diperlukan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Putang	1 Paket	Dinas Kesehatan
140	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	alat kesehatan pusban belum lengkap	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Muara Adang II	1 Paket	Dinas Kesehatan
141	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Masih Kurangnya ketersediaan alat kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Sandeley	1 Paket	Dinas Kesehatan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
142	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belum tersedianya sarana dan prasarana alat kesehatan desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Padang Jaya	1 Paket	Dinas Kesehatan
143	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Masih belum tersedianya sarana prasarana alat kesehatan atau alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Polindes	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Pulau Rantau	1 Paket	Dinas Kesehatan
144	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Bantuan maupun POLINDES kekurangan alat Penjuang Medik	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Tepian Batang	1 Paket	Dinas Kesehatan
145	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Kesehatan belum Lengkap dan Belum Terlayannya Masyarakat dengan Baik	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Muara Adang	1 Paket	Dinas Kesehatan
146	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belum Tersedianya Autoclave	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Krayan Makmur	1 Paket	Dinas Kesehatan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
147	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kurangnya alat kesehatan yang ada untuk pelayanan di masyarakat	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Adang Jaya	1 Paket	Dinas Kesehatan
148	Program Kawasan Permukiman	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terkendalanya akses jalan bagi masyarakat disebabkan badan jalan yang bergelombang dan tidak rata	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 004 Desa Kerang Kec. Batu Engau	RT. 004 Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau	200 M2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
149	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Ketidak Layakan Hunian Masyarakat Di Pedesaan	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni RT. 001 dan RT. 002 Desa Tebru Paser Damai Kec. Batu Engau	RT.001 dan RT.002 Desa Tebru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau	5 Unit	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
150	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Banyak rumah warga yang perlu diperbaiki mengingat kondisinya yang sudah tidak layak huni	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Pasir Mayang Kec. Kuaro	Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro	5 Unit	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
151	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Banyaknya Warga yang Masih Hidup dibawah Garis Kemiskinan (Satu Rumah hidup 5 Keluarga)	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Muara Adang Kec. Long Ikis	Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis	5 Unit	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
152	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rumah Tidak Layak untuk ditempati	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Lambakan Kec. Long Kali	Desa Muara Lambakan, Kecamatan Long Kali	5 Unit	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
153	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Karena kondisi rumah sebelumnya sudah banyak yang rusak	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni RT. 001 - 003 Desa Lusan Kec. Muara Komam	RT. 001 - RT. 003 Desa Lusan, Kecamatan Muara Komam	5 Unit	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
154	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Gang Sudirman masih Tanah dan butuh semenisasi 3 x 50 M	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 005 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot	RT. 005 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot	2 0 0 M2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
155	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Belum Maksimalnya Pemanfaatan Embung Air di Desa Luan	Pembangunan Siring Embung RT. 002 Desa Luan, Kec. Muara Samu	RT. 002 Desa Luan, Kecamatan Muara Samu	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
156	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	sulitnya mendapatkan air layak konsumsi	Pipanisasi Air Bersih RT. 003 Desa Senipah, Kec. Tanjung Harapan	RT. 003 Desa Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan	2 5 0 0 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
157	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	beberapa titik di simpangan jalan lingkungan gelap yang menyebabkan aktifitas masyarakat terkendala	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Krayan Sentosa Kec. Long Ikis	RT. 001, RT. 003, RT. 006, RT. 007, RT. 009, Desa Krayan Sentosa, Kecamatan Long Ikis	1 0 Unit	Dinas Perhubungan
158	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Masih banyak lingkungan pemukiman yang tidak ada fasilitas lampu penerangan jalan umum	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Kecamatan Long Kali	RT. 001, RT. 002, RT. 003, RT. 004, RT. 005, RT. 006, RT. 007, RT. 008, RT. 009, RT. 010, RT. 011, RT. 013, RT. 014, RT. 016, Kelurahan Long Kali	1 1 Unit	Dinas Perhubungan

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Permasalahan	Nomenklatur	Lokasi (desa/kel)	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
159	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	belum tersedianya penerangan jalan umum tenaga surya	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Suliliran Baru Kec. Paser Belengkong	Desa Suliliran Baru, Kecamatan Paser Belengkong	1 1 Unit	Dinas Perhubungan
160	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Poros ketika malam hari sangat gelap ksekali sehingga kami membutuhkan lampu penerang jalan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Sunge Batu Kec. Paser Belengkong	RT. 001, RT. 002 dan RT. 003 Desa Sunge Batu, Kecamatan Paser Belengkong	1 1 Unit	Dinas Perhubungan